BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

LANGARA, 21 AGUSTUS 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

LANGARA, 21 AGUSTUS 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerahpada umumnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD Adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Pasal 2

(1) Pertanggungjawan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan terdiri dari:
    a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan		Rp.	643.585.044.876,00
b. Belanja		Rp.	674.402.736.118,00
	Surplus/ (defisit)	Rp.	(30.817.691.242,00)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan Pembiayaan		Rp.	59.884.831.464,00
- Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	59.884.831.464,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.901.118.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	646.486.163.577,00
b. Realisasi		Rp.	643.585.044.876,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	2.901.118.701,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.31.968.158.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan		Rp.	706.370.894.989,00
b. Realisasi		Rp.	674.402.736.118,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	31.968.158.871,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.29.067.140.222,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus setelah Perubahan	Rp.	(59.884.831.464,00)
b.	Surplus Tahun Berjalan	Rp.	(30.817.691.242,00)
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	29.067.140.222,00

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.100.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	59.884.731.412,00
b.	Realisasi	Rp.	59.884.831.464,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	100.052,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.100.052,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp.	59.884.731.412,00
b.	Realisasi	Rp.	59.884.831.464,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	100.052,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai akhir tahun angaran yaitu sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	59.884.731.412,00
b.	Penggunaan SAL	Rp.	59.884.831.464,00
	Selisih	Rp.	(100.052,00)
c.	SILPA	Rp.	29.067.140.222,00
d.	Koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya	Rp.	100.052,00
e.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	29.067.140.222,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sampai akhir tahun angaran yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.222.635.736.502,78
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	7.353.764.790,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.215.281.971.712,78

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	542.551.858.071,00
b. Beban	Rp.	578.134.872.935,38
c. Kegiatan non operasional	Rp.	(21.184.516,92)
d. Pos luar biasa	Rp.	(130.909.090,00)
Surplus/(Defisit LO)	Rp.	(35.735.108.471,30)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sampai akhir tahun anggaran yaitu sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp.	59.885.046.727,00
b. Koreksi SiLPA Tahun Lalu	Rp.	100.052,00
c. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	171.079.667.157,00
d. Arus Kas dari aktivitas investasi aset-non keuangan	Rp.	(201.897.358.399,00)
e. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
f. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	8.750.188,00
g. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	29.076.205.725,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f pada akhir tahun anggaran sebelumnya yaitu sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	1.254.668.678.292,65
b. Surplus/(defisit LO)	Rp.	(35.735.108.471,31
c. Koreksi Kas dan Setara Kas	Rp.	100.052,00
d. Koreksi Aset Tetap	Rp.	(662.440.268,00)

e.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp.	1.419.500.000,00
f.	Koreksi Aset Lain-Lain	Rp.	(4.786.006.426,00)
g.	Koreksi Piutang	Rp.	377.248.533,43
		Rp.	1.215.281.971.712,78

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g sampai dengan akhir tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas tiap pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran	I	Laporan Realisasi Anggaran
	Lampiran	I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
	Lampiran	I.2	Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
	Lampiran	I.3	Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.
	Lampiran	I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran	II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran	III	Laporan Operasional;
d.	Lampiran	IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e.	Lampiran	V	Neraca;
f.	Lampiran	VI	Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran	VII	Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran	VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	Lampiran	IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j.	Lampiran	X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	Lampiran	XI	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.	Lampiran	XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	Lampiran	XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	Lampiran	XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	Lampiran	XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	Lampiran	XVI	Daftar dana cadangan daerah;
q.	Lampiran	XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
r.	Lampiran	XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
s.	Lampiran	XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran	XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
	Lampiran	XX.1	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran	XX.2	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggugjawaban Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 21-08-2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 2/ 31 /2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

DAFTAR ISI

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	i - ix
	DAFTAR ISI	x -xi
LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1 - 2
LAMPIRAN I. 1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3 - 10
LAMPIRAN I. 2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	11 - 12
LAMPIRAN I. 3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	13 - 109
LAMPIRAN I. 4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	110 - 221
LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	222
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL	223 - 224
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	225
LAMPIRAN V	LAPORAN NERACA	226 - 227
LAMPIRAN VI	LAPORAN ARUS KAS	228 - 229
LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	230 - 448
LAMPIRAN VIII	REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	449

LAMPIRAN	URAIAN	HALAMAN
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	450 - 452
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	453
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYETORAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	454
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	455
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH	456
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	457 - 458
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	459
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	460
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	461 - 473
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	474
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN BERIKUTNYA	475
LAMPIRAN XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS :	
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	476
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	477
	LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA	

LAMPIRAN I

Lampiran I PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	3.640.000.000,00	4.396.468.804,00	120,78	4.612.262.047,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.340.000.000,00	3.107.876.344,00	93,05	1.568.575.656,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	100,00	2.573.523.227,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	5.912.943.999,00	5.410.087.822,00	91,50	7.429.861.190,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		17.249.032.486,00	17.270.521.057,00	100,12	16.181.312.122,00
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	85.856.894.000,00	87.204.773.480,00	101,57	29.205.590.018,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	330.150.530.000,00	331.825.914.827,00	100,51	315.896.476.961,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	78.817.626.000,00	76.102.013.197,00	96,57	69.883.510.111,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	34.042.006.000,00	34.136.833.519,00	97,70	32.962.432.431,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)		529.867.056.000,00	531.272.532.023,00	100,27	447.908.009.521,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
18	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	100,00	65.129.304.000,00
19	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	100,00	11.754.042.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 20)		77.227.340.000,00	77.227.340.000,00	100,00	76.883.346.000,00
21						
22	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16	17.296.757.943,00
24	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)		19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16	22.296.757.943,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 21 + 25)		626.919.157.091,00	624.390.779.080,00	99,60	547.088.113.464,00
27	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
28	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.1	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99	0,00
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (29 s/d 29)		2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99	0,00
30	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 30)		646.486.163.577,00	643.585.044.876,00	99,55	563.269.425.586,00
31						
32	BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	133.100.705.515,00	146.544.208.655,00	98,72	124.206.083.732,00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	201.635.236.744,00	187.848.533.095,00	93,06	192.286.333.588,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	30.246.300.000,00	30.188.210.759,00	99,81	16.565.135.000,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	4.303.616.640,00	4.297.021.000,00	99,85	2.393.030.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 38)		369.285.857.099,00	368.878.973.509,00	54,71	335.460.662.320,00
39						
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
41	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73	4.091.525.640,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	34.426.116.413,00	33.676.841.869,00	97,82	33.886.037.468,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	97.827.899.937,00	92.894.711.664,00	94,96	60.907.127.172,00
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	65.600.987.940,00	61.587.257.321,00	93,88	73.036.471.874,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.565.834.900,00	4.559.190.025,00	99,85	4.262.628.750,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	8.053.850.000,00	7.948.536.890,00	93,70	2.845.554.000,00
47	Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47)		212.469.226.590,00	202.933.467.599,00	95,09	179.029.544.904,00
48						
49	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
50	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07	90.000.000,00
51	Jumlah Belanja Tidak Terduga (51 s/d 51)		1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07	90.000.000,00
52	JUMLAH BELANJA (39 + 48 + 52)		583.254.083.689,00	571.760.493.218,00	54,77	514.580.107.244,00
53						
54	TRANSFER					
55	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.1	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.898.406.900,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (57 s/d 57)		103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.898.406.900,00
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (53 + 58)		709.370.894.989,00	674.462.736.118,00	95,47	616.486.514.144,00
59						
60	SURPLUS/DEFISIT (31 - 59)		(59.884.731.412,00)	(30.817.691.242,00)	51,46	(53.197.088.558,00)
61						

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
62	PEMBIAYAAN	5.1.3				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
64	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00
65	Jumlah Penerimsan Pembiayaan (65 s/d 65)		59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00
66						
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
68	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
69	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (69 s/d 69)		0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
70	PEMBIAYAAN NETTO (66 - 70)		59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	113.081.819.970,00
71						
72	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 71)		0,00	59.867.163.222,00	0,00	53.884.731.412,00

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ASRIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN I.1

Lampiran I.1 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	646.488.183.577	643.585.044.876,00	(2.901.138.701)	99,55
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.477.974.000	4.858.851.891,00	(619.122.109)	88,70
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.417.974.000	3.811.904.471,00	(606.069.529)	86,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	2.417.974.000	2.059.827.139,00	(358.146.861)	89,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.417.974.000	2.059.827.139,00	(358.146.861)	89,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000	336.082.480,00	176.082.480	210,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000	336.082.480,00	176.082.480	210,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.317.974.000	1.923.744.739,00	(394.229.261)	83,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	2.317.974.000	1.923.744.739,00	(394.229.261)	82,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.800.000.000	1.652.877.332,00	(147.912.668)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000	1.652.877.332,00	(147.912.668)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.800.000.000	1.652.877.332,00	(147.912.668)	82,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	2.800.000.000	1.652.877.332,00	(147.912.668)	82,60
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.060.000.000	1.046.547.420,00	(13.452.580)	98,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.060.000.000	1.046.547.420,00	(13.452.580)	98,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.060.000.000	1.046.547.420,00	(13.452.580)	98,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.060.000.000	1.046.547.420,00	(13.452.580)	98,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.060.000.000	1.046.547.420,00	(13.452.580)	98,73
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	147.500.000	122.952.500,00	(24.547.500)	84,00
1.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.000.000	14.644.500,00	(5.355.500)	73,22
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.000.000	14.644.500,00	(5.355.500)	73,22
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000	14.644.500,00	(5.355.500)	73,22
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	14.644.500,00	(5.355.500)	73,22
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000	14.644.500,00	(5.355.500)	73,22
1.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	35.000.000	23.541.000,00	(11.459.000)	67,26
1.19	2.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	35.000.000	23.541.000,00	(11.459.000)	67,26
1.19	2.26.2.19.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000	23.541.000,00	(11.459.000)	67,26
1.19	2.26.2.19.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000	23.541.000,00	(11.459.000)	67,26
1.19	2.26.2.19.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	35.000.000	23.541.000,00	(11.459.000)	67,26
1.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000	18.970.000,00	3.970.000	126,47
1.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15.000.000	18.970.000,00	3.970.000	126,47
1.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000	18.970.000,00	3.970.000	126,47
1.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000	18.970.000,00	3.970.000	126,47
1.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000	18.970.000,00	3.970.000	126,47
1.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	77.500.000	66.837.000,00	(10.663.000)	86,24
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	77.500.000	66.837.000,00	(10.663.000)	86,24
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	77.500.000	66.837.000,00	(10.663.000)	86,24
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.500.000	66.837.000,00	(10.663.000)	86,24
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	77.500.000	66.837.000,00	(10.663.000)	86,24
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
1.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
1.27	1.27.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
1.27	1.27.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
1.27	1.27.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
1.27	1.27.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000	26.276.692,00	16.276.692	262,77
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	640.850.689.577	638.575.923.793,00	(2.274.765.784)	99,65
5.02			KEUANGAN	640.850.689.577	638.575.923.793,00	(2.274.765.784)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	640.850.689.577	638.575.923.793,00	(2.274.765.784)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	640.850.689.577	638.575.923.793,00	(2.274.765.784)	99,65
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.931.512.486	14.185.144.713,00	253.632.227	101,82
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	3.640.008.000	4.396.468.904,00	756.460.904	120,78
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	22.500.000	22.500.000,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.888.487	4.356.888.487,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.912.943.999	5.410.887.622,00	(502.056.377)	91,50
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	626.919.157.091	624.390.779.080,00	(2.528.378.011)	99,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.494.396.000	608.495.873.023,00	1.001.476.923	100,16
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.424.761.091	15.894.907.057,00	(3.529.854.034)	81,83

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
		5	Belanja	706.370.894.597	674.381.870.237,00	(31.989.024.732)	95,47
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	369.957.974.856	349.673.370.629,00	(20.284.604.307)	94,52
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	109.920.824.856	102.134.468.707,00	(7.686.355.949)	92,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	109.920.824.856	102.134.468.707,00	(7.686.355.949)	92,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	109.920.824.856	102.134.468.707,00	(7.686.355.949)	92,01
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	82.230.148.219	75.124.577.628,00	(7.105.562.691)	91,36
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	60.424.214.729	57.242.142.528,00	(3.182.072.201)	94,73
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.886.585.390	15.917.586.850,00	(3.968.998.540)	80,04
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.985.348.099	1.969.608.249,00	(15.739.850)	99,21
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.690.684.637	27.109.891.079,00	(580.793.558)	97,90
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.841.868.428	6.942.919.550,00	(898.948.878)	88,54
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.883.259.387	17.805.203.629,00	(478.055.758)	97,34
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	389.721.850	389.300.000,00	(421.850)	99,89
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.165.834.980	2.162.467.900,00	(3.367.080)	99,84
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	128.579.352.574	121.478.536.529,00	(7.100.816.045)	94,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	78.071.695.647	75.236.362.251,00	(2.835.333.396)	96,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	78.071.695.647	75.236.362.251,00	(2.835.333.396)	96,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	43.726.419.288	43.353.698.646,00	(372.720.654)	99,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	25.046.527.798	25.856.022.136,00	810.494.348	103,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.579.841.487	15.076.631.589,00	(1.503.216.894)	90,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	101.050.000	101.050.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.245.276.447	24.202.665.686,00	(3.042.610.841)	91,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.281.193.798	4.066.875.080,00	(214.318.798)	95,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.301.846.149	15.402.701.156,00	(2.899.144.993)	84,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.660.136.500	4.632.999.450,00	(29.137.050)	99,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	39.042.575.000	36.341.613.038,00	(2.700.961.962)	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	39.042.575.000	36.341.613.038,00	(2.700.961.962)	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.308.973.295	15.608.948.241,00	(1.692.025.054)	90,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.936.700.900	3.777.812.642,00	(1.158.887.258)	76,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.464.273.295	11.831.135.599,00	(633.137.696)	94,92
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	21.741.601.705	20.732.664.797,00	(1.008.936.908)	95,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.830.344.452	11.692.666.497,00	(137.679.955)	98,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.541.257.253	8.040.000.300,00	(501.256.953)	93,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.000.000	0,00	(370.000.000)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS LANGARA	1.532.680.748	1.433.169.537,00	(99.511.203)	93,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.532.680.748	1.433.169.537,00	(99.511.203)	93,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.508.535.848	1.421.244.537,00	(87.291.311)	94,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	129.676.000	129.676.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.378.859.848	1.291.568.537,00	(87.291.311)	93,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	24.144.900	11.925.000,00	(12.219.900)	49,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.144.900	11.925.000,00	(12.219.900)	49,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS LAMPEAPI	1.135.436.100	1.109.918.559,00	(25.517.541)	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.135.436.100	1.109.918.559,00	(25.517.541)	97,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.128.458.100	1.103.469.809,00	(25.000.291)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	98.002.800	98.002.800,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.455.300	1.005.467.009,00	(25.000.291)	97,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.977.300	6.448.750,00	(517.250)	92,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.977.300	6.448.750,00	(517.250)	92,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS LANSILOWO	1.128.119.480	1.062.908.824,00	(65.210.656)	94,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.128.119.480	1.062.908.824,00	(65.210.656)	94,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.124.373.080	1.061.210.824,00	(63.162.256)	94,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	95.724.000	92.269.771,00	(3.454.229)	96,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.028.649.080	968.941.053,00	(61.707.027)	94,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.746.400	1.698.000,00	(48.400)	97,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.746.400	1.698.000,00	(48.400)	97,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BOROJO	1.271.298.920	1.216.881.327,00	(55.209.593)	95,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.271.298.920	1.216.881.327,00	(55.209.593)	95,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.253.797.920	1.198.638.327,00	(55.159.593)	95,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	184.368.600	184.368.600,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.429.320	1.014.269.727,00	(55.159.593)	94,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	17.493.000	17.443.000,00	(50.000)	99,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.493.000	17.443.000,00	(50.000)	99,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS LAHANJA	1.189.504.840	1.119.095.164,00	(70.409.676)	94,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.189.504.840	1.119.095.164,00	(70.409.676)	94,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.091.160.090	1.023.674.387,00	(67.485.703)	93,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	41.026.000	35.841.513,00	(5.184.487)	87,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.126.090	987.832.874,00	(62.293.216)	94,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	9.744.750	7.020.777,00	(2.723.973)	72,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.744.750	7.020.777,00	(2.723.973)	72,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS WAWORETE	1.312.105.480	1.005.127.495,00	(116.975.985)	89,50

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.122.183.600	1.005.117.495,00	(116.975.905)	89,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.091.536.700	1.005.117.495,00	(86.409.205)	92,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	82.665.800	82.665.800,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.008.870.900	922.481.695,00	(86.409.205)	91,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	30.566.700	0,00	(30.566.700)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.566.700	0,00	(30.566.700)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS POLARA	1.071.744.152	1.010.490.153,00	(61.253.999)	94,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.071.744.152	1.010.490.153,00	(61.253.999)	94,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.047.618.992	995.390.153,00	(52.228.839)	95,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	91.166.000	91.166.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.444.992	904.224.153,00	(52.220.839)	94,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	24.125.160	15.300.000,00	(8.825.160)	63,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.125.160	15.300.000,00	(8.825.160)	63,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS BOSO- BOSO	1.017.679.700	996.921.270,00	(21.758.430)	97,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.017.679.700	995.921.270,00	(21.758.430)	97,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.007.422.800	985.664.370,00	(21.758.430)	97,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	55.766.200	55.766.200,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.656.600	929.898.170,00	(21.758.430)	97,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	10.256.900	10.256.900,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.256.900	10.256.900,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS WAWOROPE	1.885.122.595	1.836.348.910,00	(48.873.685)	95,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.885.122.595	1.836.348.910,00	(48.873.685)	95,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.858.048.595	1.814.648.910,00	(43.399.685)	95,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	100.289.000	92.781.417,00	(7.500.583)	92,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.766.895	922.267.493,00	(35.499.402)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	27.073.700	21.600.000,00	(5.473.700)	79,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.073.700	21.600.000,00	(5.473.700)	79,78
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	104.174.225.483	99.706.934.702,00	(4.467.290.781)	95,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	104.174.225.483	99.706.934.702,00	(4.467.290.781)	95,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	104.174.225.483	99.706.934.702,00	(4.467.290.781)	95,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	16.999.852.905	16.839.847.857,00	(194.808.048)	99,09
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.881.805.000	3.888.278.630,00	(81.526.370)	97,99
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.111.348.905	13.038.769.227,00	(72.479.678)	99,45
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	87.281.171.578	82.867.886.845,00	(4.313.284.733)	95,05
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.360.818	267.235.680,00	(5.119.338)	98,12
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.789.792.900	27.606.686.829,00	(203.786.071)	99,27
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.460.175.668	50.859.796.646,00	(3.600.377.814)	93,39
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	4.658.850.000	4.154.767.690,00	(504.082.310)	89,18
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.809.944.981	7.659.383.854,00	(150.561.127)	96,81
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.809.944.981	7.659.383.854,00	(150.561.127)	96,81
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.809.944.981	7.659.383.854,00	(150.561.127)	96,81
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.632.425.811	4.541.893.954,00	(90.531.857)	98,05
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.347.698.888	1.178.119.563,00	(33.430.437)	97,31
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.875.511	2.186.774.391,00	(58.101.120)	97,41
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.09	Belanja Bantuan Sosial	1.180.000.000	1.180.000.000,00	0	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.227.519.470	3.067.489.900,00	(160.029.870)	95,04
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.381.320	265.942.500,00	(399.820)	99,86
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.316.217.150	2.177.158.400,00	(139.058.750)	93,99
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	625.000.000	624.389.000,00	(611.000)	99,90
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	16.660.784.810	15.961.652.875,00	(699.851.935)	95,80
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	11.604.835.690	11.015.034.758,00	(589.800.932)	94,92
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.604.835.690	11.015.034.758,00	(589.800.932)	94,92
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.204.068.640	9.679.324.898,00	(524.743.132)	94,86
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.472.000	2.433.440.748,00	(64.031.252)	97,43
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.706.597.640	7.245.883.760,00	(460.713.880)	94,02
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.400.766.050	1.335.710.250,00	(65.055.800)	95,36
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	582.890.050	535.198.000,00	(47.692.050)	91,82
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	518.876.000	500.511.250,00	(17.364.750)	96,46
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.055.949.120	4.946.617.317,00	(109.331.803)	97,84
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.055.949.120	4.946.617.317,00	(109.331.803)	97,84
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.242.581.920	3.148.511.392,00	(93.998.528)	97,10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	681.647.000	628.090.023,00	(53.556.977)	92,14
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.934.920	1.522.421.369,00	(38.493.551)	97,53
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.813.366.400	1.798.105.925,00	(15.260.475)	99,29
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000	144.989.000,00	(15.110.000)	90,56
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.653.366.400	1.653.116.925,00	(2.690.475)	99,92
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.761.913.232	1.682.394.762,00	(80.528.470)	97,09
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	2.761.913.232	1.682.394.762,00	(80.528.470)	97,09
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.761.913.232	1.682.394.762,00	(80.528.470)	97,09
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.657.578.132	2.577.194.762,00	(80.383.370)	96,98

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	699.428.000	644.244.865,00	(55.183.135)	92,11
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.188.132	1.970.949.900,00	(27.238.232)	98,63
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	105.345.100	105.200.000,00	(145.100)	99,86
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.345.100	105.200.000,00	(145.100)	99,86
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	57.161.683.756	54.897.579.751,00	(2.244.428.065)	96,07
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	436.411.060	434.368.897,00	(2.042.163)	99,53
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	436.411.060	434.368.897,00	(2.042.163)	99,53
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	436.411.060	434.368.897,00	(2.042.163)	99,53
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	331.411.060	328.376.772,00	(2.034.288)	99,39
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.411.060	328.376.772,00	(2.034.288)	99,39
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	105.000.000	104.992.125,00	(7.875)	99,99
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.000.000	104.992.125,00	(7.875)	99,99
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.982.605.129	3.912.448.397,00	(70.156.723)	98,24
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.982.605.129	3.912.448.397,00	(70.156.723)	98,24
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.982.605.129	3.912.448.397,00	(70.156.723)	98,24
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.824.605.129	3.754.848.397,00	(69.756.723)	98,18
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.499.515.809	1.432.347.513,00	(66.567.487)	95,53
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.325.299.120	2.322.500.884,00	(2.799.236)	99,88
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	158.000.000	157.600.000,00	(400.000)	99,75
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000	44.000.000,00	0	100,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.000.000	113.600.000,00	(400.000)	99,65
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.018.891.848	2.001.258.288,00	(17.633.552)	99,13
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	2.018.891.848	2.001.258.288,00	(17.633.552)	99,13
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.018.891.848	2.001.258.288,00	(17.633.552)	99,13
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.980.891.848	1.962.486.288,00	(17.628.552)	99,11
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	719.327.000	705.384.781,00	(13.942.219)	98,06
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.787.548	1.257.033.607,00	(3.603.853)	99,71
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	38.000.000	38.000.000,00	(5.000)	99,99
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.257.500	29.200.000,00	(7.500)	99,97
2.09	2.09.1.01.2.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.600.000	8.600.000,00	0	100,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.472.449.270	2.247.831.870,00	(224.617.400)	90,92
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.472.449.270	2.247.831.870,00	(224.617.400)	90,92
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.472.449.270	2.247.831.870,00	(224.617.400)	90,92
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	469.411.870	469.401.870,00	(10.000)	100,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.411.870	469.401.870,00	(10.000)	100,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.003.037.400	1.778.430.000,00	(224.607.400)	88,79
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.957.537.400	1.732.930.000,00	(224.607.400)	88,53
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.500.000	45.500.000,00	0	100,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.382.798.532	2.328.119.855,00	(54.678.677)	97,71
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.382.798.532	2.328.119.855,00	(54.678.677)	97,71
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.382.798.532	2.328.119.855,00	(54.678.677)	97,71
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.368.798.532	2.314.119.855,00	(54.678.677)	97,69
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	786.360.000	745.083.326,00	(41.276.674)	94,75
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.582.438.532	1.569.036.529,00	(13.402.003)	99,15
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000	14.000.000,00	0	100,00
2.11	2.11.2.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000	14.000.000,00	0	100,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.252.814.168	3.022.489.761,00	(230.186.407)	92,92
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.252.814.168	3.022.489.761,00	(230.186.407)	92,92
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.252.814.168	3.022.489.761,00	(230.186.407)	92,92
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.188.419.368	2.958.518.761,00	(230.100.607)	92,77
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	838.813.800	727.711.005,00	(111.102.795)	87,61
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.349.605.568	2.222.606.946,00	(127.198.622)	94,59
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	73.696.800	72.891.000,00	(5.800)	99,99
2.12	2.12.2.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.696.800	72.891.000,00	(5.800)	99,99
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.260.867.934	3.968.343.628,00	(292.524.306)	93,13
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.260.867.934	3.968.343.628,00	(292.524.306)	93,13
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.260.867.934	3.968.343.628,00	(292.524.306)	93,13
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.230.868.934	3.937.545.628,00	(293.323.306)	93,08
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.284.666.713	1.243.865.824,00	(40.801.889)	96,82
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.945.402.921	2.693.680.604,00	(251.722.317)	91,45
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.798.900	29.798.000,00	(900)	100,00
2.13	2.13.2.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.798.900	29.798.000,00	(900)	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.122.615.000	5.852.014.000,00	(70.601.000)	95,62
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.122.615.000	5.852.014.000,00	(70.601.000)	95,62
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.122.615.000	5.852.014.000,00	(70.601.000)	95,62
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.794.640.000	3.789.072.000,00	(5.568.000)	99,85
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.794.640.000	3.789.072.000,00	(5.568.000)	99,85
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.327.975.000	1.262.942.000,00	(65.033.000)	95,10
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.302.975.000	1.262.942.000,00	(40.033.000)	96,93
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000	0,00	(25.000.000)	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.393.375.300	9.086.453.579,00	(306.921.721)	96,73
2.15	2.15.2.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	9.393.375.300	9.086.453.579,00	(306.921.721)	96,73
2.15	2.15.2.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	9.393.375.300	9.086.453.579,00	(306.921.721)	96,73

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.847.793.700	3.684.805.979,00	(162.791.121)	95,77
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.442.585.800	1.346.657.379,00	(95.927.421)	93,34
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.405.208.700	2.337.445.800,00	(67.762.700)	97,18
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	5.525.581.600	5.402.451.800,00	(123.129.600)	97,77
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.576.100	590.465.000,00	(25.111.100)	95,92
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.560.775.900	5.467.916.000,00	(92.309.500)	97,49
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.790.000	26.790.000,00	0	100,00
1.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.320.000.000	1.317.280.000,00	(2.720.000)	99,80
1.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.181.915.988	4.123.192.199,00	(58.723.713)	98,60
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.181.915.988	4.123.192.199,00	(58.723.713)	98,60
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.181.915.988	4.123.192.199,00	(58.723.713)	98,60
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.189.776.975	4.049.322.195,00	(68.454.780)	98,53
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	849.928.700	815.923.865,00	(34.005.835)	96,00
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.259.848.275	3.333.399.330,00	(26.449.102)	99,09
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	72.138.938	71.870.000,00	(268.938)	99,63
1.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.138.938	71.870.000,00	(268.938)	99,63
1.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.176.994.070	2.132.846.124,00	(42.147.946)	98,06
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.176.994.070	2.132.846.124,00	(42.147.946)	98,06
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.176.994.070	2.132.846.124,00	(42.147.946)	98,06
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.077.518.470	2.035.446.124,00	(42.072.346)	97,97
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	882.468.042	855.680.177,00	(26.787.865)	96,96
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.960.428	1.209.765.947,00	(15.294.481)	98,75
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	97.475.600	97.400.000,00	(75.600)	99,92
1.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.475.600	97.400.000,00	(75.600)	99,92
1.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.495.472.094	2.414.738.184,00	(80.733.910)	96,76
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.495.472.094	2.414.738.184,00	(80.733.910)	96,76
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.495.472.094	2.414.738.184,00	(80.733.910)	96,76
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.355.107.294	2.274.543.324,00	(80.564.970)	96,58
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	925.657.044	848.172.330,00	(76.484.714)	91,69
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.450.250	1.429.370.994,00	(2.899.256)	99,86
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	140.364.800	140.194.860,00	(169.940)	99,88
1.18	2.18.2.07.2.32.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.364.800	140.194.860,00	(169.940)	99,88
1.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.943.776.854	3.801.564.011,00	(142.212.843)	96,39
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.943.776.854	3.801.564.011,00	(142.212.843)	96,39
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.943.776.854	3.801.564.011,00	(142.212.843)	96,39
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.230.535.704	3.143.654.011,00	(86.881.693)	97,31
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.092.994.900	948.538.110,00	(57.451.890)	94,37
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.427.340.704	1.598.155.912,00	(29.109.812)	98,21
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Hibah	680.000.000	599.560.000,00	(39.999)	99,99
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	723.441.150	657.910.000,00	(65.541.150)	91,22
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.546.150	78.450.000,00	(96.150)	99,88
1.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	634.895.000	579.460.000,00	(55.445.000)	91,27
1.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	86.620.000	71.733.000,00	(14.887.000)	82,79
1.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	86.620.000	71.733.000,00	(14.887.000)	82,79
1.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	86.620.000	71.733.000,00	(14.887.000)	82,79
1.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	86.620.000	71.733.000,00	(14.887.000)	82,79
1.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.620.000	71.733.000,00	(14.887.000)	82,79
1.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	23.240.000	22.280.000,00	(960.000)	95,87
1.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	23.240.000	22.280.000,00	(960.000)	95,87
1.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	23.240.000	22.280.000,00	(960.000)	95,87
1.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.240.000	22.280.000,00	(960.000)	95,87
1.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.240.000	22.280.000,00	(960.000)	95,87
1.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.331.924.565	4.003.462.560,00	(328.462.005)	92,42
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.331.924.565	4.003.462.560,00	(328.462.005)	92,42
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.331.924.565	4.003.462.560,00	(328.462.005)	92,42
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.550.524.565	3.255.654.560,00	(294.870.005)	88,59
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.524.565	3.255.654.560,00	(294.870.005)	88,59
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.781.400.000	2.747.808.000,00	(33.592.000)	98,79
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.372.400.000	2.348.258.000,00	(24.142.000)	98,98
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	209.000.000	199.808.000,00	(9.200.000)	95,60
1.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	199.750.000,00	(250.000)	99,88
1.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.450.383.591	6.148.434.122,00	(301.949.469)	95,32
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	6.450.383.591	6.148.434.122,00	(301.949.469)	95,32
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.450.383.591	6.148.434.122,00	(301.949.469)	95,32
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.378.683.591	3.088.651.957,00	(290.031.634)	91,42
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.289.875.956	1.014.754.814,00	(275.121.142)	78,67
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.088.807.635	2.068.897.143,00	(22.910.492)	99,04
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.071.700.000	3.067.782.165,00	(3.917.835)	99,87
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.001.700.000	1.001.285.000,00	(415.000)	99,96
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	199.525.000,00	(475.000)	99,76
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	70.000.000,00	0	100,00
1.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.800.000.000	1.796.972.325,00	(3.027.675)	99,83
1.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	130.750.458	127.711.360,00	(3.039.098)	97,68
1.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	130.750.458	127.711.360,00	(3.039.098)	97,68
1.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	130.750.458	127.711.360,00	(3.039.098)	97,68
1.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	130.750.458	127.711.360,00	(3.039.098)	97,68
1.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.750.458	127.711.360,00	(3.039.098)	97,68
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.925.819.450	22.410.648.695,00	(514.770.655)	97,75
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN DAN KEPARIWISATAAN	5.878.963.197	5.627.272.783,00	(251.630.484)	95,72
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	5.878.963.197	5.627.272.783,00	(251.630.484)	95,72
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.878.963.197	5.627.272.783,00	(251.630.484)	95,72
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.671.044.297	5.448.814.793,00	(222.229.504)	96,08
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.214.838.900	1.151.848.935,00	(62.989.965)	94,81
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.927.606.457	1.778.744.958,00	(356.861.499)	91,86
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.528.619.840	2.517.821.900,00	(2.598.040)	99,84

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
3.25	3.25.3.00.1.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	207.850.000	178.458.000,00	(29.408.000)	85,86
3.25	3.25.3.00.1.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.291.900	85.263.000,00	(28.900)	99,97
3.25	3.25.3.00.1.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.567.000	95.195.000,00	(39.372.000)	70,42
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	837.822.210	835.983.900,00	(1.838.310)	99,78
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	837.822.210	835.983.900,00	(1.838.310)	99,78
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	837.822.210	835.983.900,00	(1.838.310)	99,78
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	667.197.210	665.383.900,00	(1.813.310)	99,73
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.197.210	665.383.900,00	(1.813.310)	99,73
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	170.625.000	170.600.000,00	(25.000)	99,99
3.26	3.26.2.19.1.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.625.000	170.600.000,00	(25.000)	99,99
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.275.796.993	10.120.673.060,00	(155.123.933)	98,49
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000		DINAS PERTANIAN	10.275.796.993	10.120.673.060,00	(155.123.933)	98,49
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.275.796.993	10.120.673.060,00	(155.123.933)	98,49
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.134.238.320	9.037.134.160,00	(97.104.160)	98,94
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.179.520.000	1.126.404.360,00	(53.115.640)	95,50
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.454.718.320	7.410.729.800,00	(43.988.520)	99,41
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	500.000.000,00	0	100,00
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.141.558.673	1.083.538.900,00	(58.019.773)	94,92
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.042.675	465.810.500,00	(2.232.175)	99,52
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.833.998	199.683.500,00	(13.150.498)	93,82
3.27	3.27.0.00.1.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	460.682.000	418.046.900,00	(42.635.100)	90,75
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.202.452.500	1.188.327.000,00	(14.125.500)	98,83
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.202.452.500	1.188.327.000,00	(14.125.500)	98,83
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.202.452.500	1.188.327.000,00	(14.125.500)	98,83
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	252.476.000	248.600.000,00	(3.876.000)	98,47
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.476.000	248.600.000,00	(3.876.000)	98,47
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	949.982.500	939.727.000,00	(10.255.500)	98,92
3.30	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	949.982.500	939.727.000,00	(10.255.500)	98,92
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.538.898.888	4.446.346.488,00	(92.551.512)	97,97
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.538.898.888	4.446.346.488,00	(92.551.512)	97,97
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.538.898.888	4.446.346.488,00	(92.551.512)	97,97
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	467.111.888	448.767.488,00	(18.345.512)	96,07
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	467.111.888	448.767.488,00	(18.345.512)	96,07
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.071.787.000	3.997.579.000,00	(73.786.000)	98,19
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.919.561.000	3.846.588.000,00	(72.786.000)	98,14
3.31	2.17.3.30.1.31.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.226.000	152.226.000,00	0	100,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	191.746.555	191.745.558,00	(997)	100,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	191.746.555	191.745.558,00	(997)	100,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	5	BELANJA DAERAH	191.746.555	191.745.558,00	(997)	100,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	191.746.555	191.745.558,00	(997)	100,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.746.555	191.745.558,00	(997)	100,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.897.031.621	64.217.895.190,00	(3.679.136.431)	94,58
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	37.564.774.957	35.513.161.683,00	(2.051.613.274)	94,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	11.939.713.000	11.534.697.316,00	584.984.326	104,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.939.713.000	11.534.697.316,00	584.984.326	104,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.939.713.000	11.641.630.881,00	(198.082.119)	97,50
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	0	882.866.445,00	882.866.445	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.939.713.000	10.758.764.436,00	(1.180.948.564)	90,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022		BAGIAN UMUM	18.640.685.535	9.178.844.535,00	(1.461.840.000)	86,26
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5	BELANJA DAERAH	18.640.685.535	9.178.844.535,00	(1.461.840.000)	86,26
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	9.766.227.545	8.305.132.095,00	(1.461.095.450)	85,04
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.766.227.545	8.305.132.095,00	(1.461.095.450)	85,04
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	874.457.990	873.712.040,00	(745.190)	99,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	718.353.840	789.907.240,00	(448.000)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.104.150	163.805.000,00	(299.150)	99,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	984.000.000	948.065.410,00	(35.934.590)	96,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	984.000.000	948.065.410,00	(35.934.590)	96,35
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	809.000.000	773.065.410,00	(35.934.590)	95,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.000.000	773.065.410,00	(35.934.590)	95,57
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	175.000.000	174.999.800,00	(200.000)	99,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000	174.999.800,00	(200.000)	99,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN PEMBANGUNAN	707.712.300	670.103.000,00	(37.609.300)	94,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	707.712.300	670.103.000,00	(37.609.300)	94,69
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	682.712.300	647.053.000,00	(35.659.300)	94,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	0	85.000.000,00	85.000.000	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.712.300	562.053.000,00	(120.659.300)	82,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000	23.050.000,00	(1.950.000)	92,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	23.050.000,00	(1.950.000)	92,20
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004		BAGIAN EKONOMI DAN SDA	859.343.500	783.235.500,00	(76.108.000)	91,14
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	5	BELANJA DAERAH	859.343.500	783.235.500,00	(76.108.000)	91,14
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	849.078.500	773.055.500,00	(76.023.000)	91,05
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.078.500	773.055.500,00	(76.023.000)	91,05
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	10.265.000	10.180.000,00	(85.000)	99,17
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.265.000	10.180.000,00	(85.000)	99,17
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.416.599.632	7.594.838.800,00	(821.760.832)	90,24
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	8.416.599.632	7.594.838.800,00	(821.760.832)	90,24
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.416.599.632	7.594.838.800,00	(821.760.832)	90,24
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.280.799.632	6.474.038.800,00	(806.760.832)	88,92
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	1.060.800.000	1.050.800.000,00	(10.000.000)	99,06
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000	70.000.000,00	(5.000.000)	93,33
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	1.864.876.000	1.820.308.500,00	(44.567.500)	97,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.864.876.000	1.820.308.500,00	(44.567.500)	97,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.864.876.000	1.820.308.500,00	(44.567.500)	97,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.864.876.000	1.820.308.500,00	(44.567.500)	97,61
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN HUKUM	948.000.000	911.396.112,00	(36.603.888)	96,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	948.000.000	911.396.112,00	(36.603.888)	96,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	900.507.000	863.906.112,00	(36.600.888)	95,94

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.507.000	962.996.113,00	(38.600.000)	96,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	47.493.000	47.490.000,00	(3.000)	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.493.000	47.490.000,00	(3.000)	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.235.625.000	1.184.399.700,00	(91.225.300)	95,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	1.235.625.000	1.184.399.700,00	(91.225.300)	95,85
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.188.753.820	1.137.859.700,00	(68.894.120)	95,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.753.820	1.137.859.700,00	(68.894.120)	95,72
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	46.871.180	46.540.000,00	(331.180)	99,29
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.871.180	46.540.000,00	(331.180)	99,29
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN	705.500.000	697.352.400,00	(71.147.600)	98,74
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	5	BELANJA DAERAH	705.500.000	697.352.400,00	(71.147.600)	98,74
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	716.501.700	647.452.400,00	(73.049.300)	90,33
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	716.501.700	647.452.400,00	(73.049.300)	90,33
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	49.998.300	49.900.000,00	(98.300)	99,80
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.998.300	49.900.000,00	(98.300)	99,80
4.02			SEKRETARIAT DPRD	38.332.256.664	28.704.731.507,00	(1.627.525.157)	94,63
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009		SEKRETARIAT DPRD	38.332.256.664	28.704.731.507,00	(1.627.525.157)	94,63
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	38.332.256.664	28.704.731.507,00	(1.627.525.157)	94,63
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.231.851.434	27.654.141.507,00	(1.577.509.927)	94,60
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	8.866.990.633	8.715.888.333,00	(151.090.190)	98,29
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.346.660.963	16.918.741.174,00	(1.425.919.729)	92,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	1.320.605.230	1.070.590.000,00	(50.015.230)	95,64
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	672.878.730	670.590.000,00	(2.288.730)	99,66
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.726.500	0,00	(47.726.500)	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000	400.000.000,00	0	100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	146.799.138.056	143.050.703.442,00	(3.748.434.614)	97,45
5.01			PERENCANAAN	5.686.327.374	5.412.991.240,00	(341.336.834)	97,46
5.01	5.01.3.05.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.686.327.374	5.412.991.240,00	(341.336.834)	97,46
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.686.327.374	5.412.991.240,00	(341.336.834)	97,46
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.186.327.374	5.049.691.240,00	(356.636.834)	97,37
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.068.141.155	971.013.555,00	(97.127.600)	90,91
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.118.186.119	4.078.677.685,00	(39.508.432)	99,04
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	368.000.000	363.300.000,00	(4.700.000)	98,72
5.01	5.01.3.05.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.000.000	363.300.000,00	(4.700.000)	98,72
5.02			KEUANGAN	134.488.438.148	131.438.686.141,00	(2.969.752.007)	97,79
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	134.488.438.148	131.438.686.141,00	(2.969.752.007)	97,79
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	134.488.438.148	131.438.686.141,00	(2.969.752.007)	97,79
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.803.258.908	35.058.891.131,00	(1.744.367.777)	95,26
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.543.212.621	12.358.019.398,00	(1.185.193.723)	91,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.260.046.287	12.700.561.233,00	(559.485.054)	95,78
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.985.547.940	2.686.800.000,00	(301.547.940)	89,90
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	36.000.000	36.000.000,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.885.907.940	2.043.300.000,00	(46.187.940)	98,07
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	885.360.000	697.080.000,00	(263.360.000)	69,98
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.980.000.000	991.052.110,00	(988.947.890)	66,07
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.980.000.000	991.052.110,00	(988.947.890)	66,07
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	103.116.811.300	102.702.242.980,00	(414.568.480)	99,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300	102.702.242.980,00	(414.568.480)	99,60
5.03			KEPEGAWAIAN	4.168.782.634	3.657.235.261,00	(511.547.373)	87,73
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.168.782.634	3.657.235.261,00	(511.547.373)	87,73
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.168.782.634	3.657.235.261,00	(511.547.373)	87,73
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.078.782.634	3.478.645.261,00	(488.737.373)	85,30
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.844.915.613	989.211.661,00	(55.703.952)	94,67
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.833.867.021	2.488.933.600,00	(553.853.421)	81,77
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000	87.198.000,00	(2.802.000)	96,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000	87.198.000,00	(2.802.000)	96,88
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	319.600.000	319.600.000,00	0	100,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	319.600.000	319.600.000,00	0	100,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	319.600.000	319.600.000,00	0	100,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	319.600.000	319.600.000,00	0	100,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.600.000	319.600.000,00	0	100,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.348.000.000	2.322.190.800,00	(25.809.200)	98,90
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.348.000.000	2.322.190.800,00	(25.809.200)	98,90
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.348.000.000	2.322.190.800,00	(25.809.200)	98,90
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	898.000.000	872.190.800,00	(25.809.200)	97,13
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.000.000	872.190.800,00	(25.809.200)	97,13
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0	100,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.311.373.913	6.074.972.588,00	(1.236.401.325)	83,09
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	7.311.373.913	6.074.972.588,00	(1.236.401.325)	83,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	7.311.373.913	6.074.972.588,00	(1.236.401.325)	83,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.311.373.913	6.074.972.588,00	(1.236.401.325)	83,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.718.890.513	5.619.488.188,00	(1.099.401.325)	83,63
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.831.271.813	1.743.435.979,00	(87.835.834)	95,20
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.887.618.700	3.776.063.209,00	(1.111.565.491)	77,26
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	592.473.400	555.473.400,00	(37.000.000)	93,75
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	592.473.400	555.473.400,00	(37.000.000)	93,75
7			UNSUR KEWILAYAHAN	4.901.000.000	4.823.903.672,00	(77.096.328)	98,43
7.01			KECAMATAN	4.901.000.000	4.823.903.672,00	(77.096.328)	98,43
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN WAWONII BARAT	433.000.000	435.280.000,00	2.280.000	100,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	433.000.000	435.280.000,00	2.280.000	100,53
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	373.000.000	380.480.000,00	7.480.000	102,01
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.000.000	380.480.000,00	7.480.000	102,01
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000	54.800.000,00	(5.200.000)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	54.800.000,00	(5.200.000)	91,33
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN WAWONII UTARA	433.000.000	426.801.302,00	(6.198.698)	98,57
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	433.000.000	426.801.302,00	(6.198.698)	98,57

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	367.348.100	362.411.302,00	(4.936.798)	98,66
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.348.100	362.411.302,00	(4.936.798)	98,66
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	65.652.900	64.390.000,00	(1.262.900)	98,08
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.652.900	64.390.000,00	(1.262.900)	98,08
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT	432.666.900	432.351.912,00	(348.988)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	432.666.900	432.351.912,00	(348.988)	99,89
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	409.507.900	408.701.912,00	(805.988)	99,80
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.507.900	408.701.912,00	(805.988)	99,80
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.450.000	23.450.000,00	(43.000)	99,82
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.450.000	23.450.000,00	(43.000)	99,82
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN WAWONII TIMUR	431.000.000	431.323.500,00	(1.676.500)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	431.000.000	431.323.500,00	(1.676.500)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	431.000.000	431.323.500,00	(1.676.500)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.000.000	431.323.500,00	(1.676.500)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN WAWONII TENGGARA	431.000.000	428.760.500,00	(3.239.500)	99,25
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	431.000.000	428.760.500,00	(3.239.500)	99,25
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	485.000.000	481.760.500,00	(3.239.500)	99,33
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.000.000	481.760.500,00	(3.239.500)	99,33
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	38.000.000	38.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000	38.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN WAWONII SELATAN	485.000.000	480.803.858,00	(2.196.142)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	485.000.000	480.803.858,00	(2.196.142)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	484.647.400	482.351.858,00	(2.195.542)	99,53
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.647.400	482.351.858,00	(2.195.542)	99,53
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	18.952.600	18.452.000,00	(600)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.952.600	18.452.000,00	(600)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN WAWONII TENGAH	433.000.000	441.860.000,00	8.860.000	102,05
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	433.000.000	441.860.000,00	8.860.000	102,05
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	412.348.100	421.220.000,00	8.871.900	102,15
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.348.100	421.220.000,00	8.871.900	102,15
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.651.900	20.640.000,00	(11.900)	99,94
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.651.900	20.640.000,00	(11.900)	99,94
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN LANGARA LAUT	260.000.000	249.048.000,00	(10.948.000)	95,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	249.048.000,00	(10.948.000)	95,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	249.048.000,00	(10.948.000)	95,79
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	249.048.000,00	(10.948.000)	95,79
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001		KELURAHAN LANSELOWO	260.000.000	234.000.000,00	(26.000.000)	90,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	234.000.000,00	(26.000.000)	90,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	234.000.000,00	(26.000.000)	90,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	234.000.000,00	(26.000.000)	90,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		KELURAHAN MUNSE	260.000.000	259.993.500,00	(6.500)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	259.993.500,00	(6.500)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	259.993.500,00	(6.500)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	259.993.500,00	(6.500)	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		KELURAHAN LADIANTA	260.000.000	247.490.000,00	(12.510.000)	95,19
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	247.490.000,00	(12.510.000)	95,19
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	247.490.000,00	(12.510.000)	95,19
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	247.490.000,00	(12.510.000)	95,19
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001		KELURAHAN LAMPEAPI	260.000.000	248.000.000,00	(12.000.000)	95,38
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	248.000.000,00	(12.000.000)	95,38
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	248.000.000,00	(12.000.000)	95,38
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	248.000.000,00	(12.000.000)	95,38
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001		KELURAHAN SAWAEA	260.000.000	259.600.000,00	(400.000)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	259.600.000,00	(400.000)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	260.000.000	259.600.000,00	(400.000)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000	259.600.000,00	(400.000)	99,85
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		KELURAHAN POLARA	260.000.000	247.800.000,00	(12.200.000)	95,31
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5	BELANJA DAERAH	260.000.000	247.800.000,00	(12.200.000)	95,31
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	259.649.500	247.449.500,00	(12.200.000)	95,30
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.649.500	247.449.500,00	(12.200.000)	95,30
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.2	BELANJA MODAL	350.500	350.500,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.500	350.500,00	0	100,00
II			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	29.437.359.252	29.232.998.165,00	(204.161.087)	99,31
II.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.437.359.252	29.232.998.165,00	(204.161.087)	99,31
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.437.359.252	29.232.998.165,00	(204.161.087)	99,31
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	29.437.359.252	29.232.998.165,00	(204.161.087)	99,31
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	29.375.689.252	29.173.298.165,00	(202.391.087)	99,31
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	857.339.990	773.736.027,00	(83.603.963)	90,25
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.219.252	1.913.099.568,00	(106.119.684)	94,74
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	26.499.119.890	26.486.472.569,00	(12.647.868)	99,95
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	61.669.000	59.699.000,00	(1.970.000)	97,07
II.01	II.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.669.000	59.699.000,00	(1.970.000)	97,07
			Jumlah	(59.884.751.412)	(34.796.325.361,00)	25.087.886.051	58,13

Langara, 23 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

IRHAM SAIFUL ABRAZAK

LAMPIRAN I.2

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	3.840.000.000,00	4.398.468.604,00	120,78	4.612.262.047,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.340.000.000,00	3.107.875.344,00	93,05	1.588.575.656,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.366.088.487,00	4.366.088.487,00	100,00	2.673.629.227,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	5.912.943.999,00	5.410.087.632,00	91,50	7.426.951.192,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		17.249.032.486,00	17.279.521.067,00	100,12	16.181.312.122,00
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	85.856.894.000,00	87.204.773.480,00	101,57	29.206.590.018,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	330.150.530.000,00	331.828.914.827,00	100,51	315.656.476.961,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	78.917.626.000,00	76.102.010.197,00	96,97	69.883.510.111,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	34.642.006.000,00	34.136.833.519,00	97,70	32.962.432.431,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)		529.567.056.000,00	531.272.532.023,00	100,27	447.909.009.521,00
16						
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
18	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	100,00	65.129.204.000,00
19	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.3	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	100,00	11.754.042.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 20)		77.227.340.000,00	77.227.340.000,00	100,00	76.883.246.000,00
21						
22	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	19.824.781.091,00	15.890.807.057,00	80,16	17.295.757.943,00
24	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	5.900.000.000,00
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)		19.824.781.091,00	15.890.807.057,00	80,16	23.295.757.943,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 21 + 25)		626.913.157.091,00	624.390.779.080,00	99,60	547.088.113.464,00
27	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
28	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.1	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99	0,00
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (28 s/d 28)		2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99	0,00
30	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 30)		646.480.163.577,00	643.595.044.876,00	99,55	563.269.425.586,00
31						
32	BELANJA	5.1.2				
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	153.100.700.515,00	146.544.208.656,00	95,72	124.206.063.732,00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	201.526.236.144,00	187.668.539.065,00	93,06	192.396.333.588,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	30.246.300.000,00	30.188.210.759,00	99,81	16.585.135.000,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	4.303.619.640,00	4.267.021.000,00	99,15	2.393.030.000,00
38	Jumlah Belanja Operasi (35 s/d 38)		389.289.897.599,00	368.675.973.509,00	94,71	335.480.562.320,00
39						
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
41	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.993.537.400,00	1.769.900.000,00	88,78	4.091.829.840,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	34.436.116.413,00	33.676.841.899,00	97,82	33.386.037.488,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	97.827.899.937,00	92.894.711.994,00	94,95	60.907.127.172,00
44	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	65.600.987.940,00	61.587.257.321,00	93,88	73.036.471.874,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.665.834.900,00	4.559.190.025,00	99,65	4.262.828.760,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	8.053.850.300,00	7.546.536.660,00	93,70	2.845.354.000,00
47	Jumlah Belanja Modal (42 s/d 47)		212.468.226.890,00	202.833.467.599,00	95,46	179.029.544.934,00
48						
49	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
50	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07	90.000.000,00
51	Jumlah Belanja Tidak Terduga (51 s/d 51)		1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07	90.000.000,00
52	JUMLAH BELANJA (39 + 48 + 52)		603.254.062.489,00	571.700.493.218,00	94,77	514.590.107.244,00
53						
54	TRANSFER					
55	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	5.1.2.4				
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.1	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.888.406.900,00
57	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (57 s/d 57)		103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.888.406.900,00
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (53 + 58)		706.370.934.389,00	674.402.736.118,00	95,47	616.466.514.144,00
59						
60	SURPLUS/DEFISIT (31 - 59)		(59.884.731.412,00)	(30.807.691.242,00)	51,46	(53.197.088.558,00)
61						

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
62	**PEMBIAYAAN**	5.1.3				
63	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.1				
64	Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	59.884.731.412,00	59.884.831.484,00	100,00	115.581.819.970,00
65	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (65 s/d 65)**		59.884.731.412,00	59.884.831.484,00	100,00	115.581.819.970,00
66						
67	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.3.2				
68	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
69	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (69 s/d 69)**		0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
70	**PEMBIAYAAN NETTO (66 - 70)**		59.884.731.412,00	59.884.831.484,00	100,00	113.081.819.970,00
71						
72	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 71)**		0,00	29.087.140.222,00	0,00	59.584.731.412,00

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN I.3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		KENAIKAN / (PENURUNAN)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	169.928.824.455,00	102.234.468.707,00	(7.696.355.949,00)	93,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	45.113.668.967,00	41.153.804.878,00	(3.959.864.108,00)	91,22	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.131.164.962,00	20.351.176.521,00	(1.779.988.441,00)	91,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.795.000,00	250.756.802,00	(38.198,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	250.795.000,00	250.756.802,00	(38.198,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.795.000,00	250.756.802,00	(38.198,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	548.799.001,00	548.686.001,00	(113.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	548.799.001,00	548.686.001,00	(113.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.799.001,00	548.686.001,00	(113.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.817.842.386,00	4.696.248.946,00	(121.593.440,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.817.842.386,00	4.696.248.946,00	(121.593.440,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	57.000.000,00	(3.000.000,00)	95,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.757.842.386,00	4.639.248.946,00	(118.593.440,00)	97,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	159.988.806,00	159.887.350,00	(20.456,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	159.988.806,00	159.887.350,00	(20.456,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.908.806,00	159.887.350,00	(20.456,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	399.279.335,00	384.282.000,00	(14.997.335,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	399.279.335,00	384.282.000,00	(14.997.335,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.279.335,00	384.282.000,00	(14.997.335,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400.000.000,00	399.150.000,00	(850.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	399.150.000,00	(850.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	399.150.000,00	(850.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas	630.730.000,00	578.685.000,00	(52.045.000,00)	91,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	630.730.000,00	578.685.000,00	(52.045.000,00)	91,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	630.730.000,00	578.685.000,00	(52.045.000,00)	91,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.393.500.000,00	2.379.750.000,00	(13.750.000,00)	99,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	2.193.500.000,00	2.180.050.000,00	(13.450.000,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.193.500.000,00	2.180.050.000,00	(13.450.000,00)	99,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	504.686.600,00	455.986.600,00	(48.700.000,00)	90,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	504.686.600,00	455.986.600,00	(48.700.000,00)	90,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.686.600,00	435.986.600,00	(48.700.000,00)	89,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	495.000.000,00	375.758.000,00	(119.250.800,00)	75,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	495.000.000,00	375.758.000,00	(119.250.800,00)	75,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.000.000,00	375.758.000,00	(119.250.800,00)	75,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.120.665.800,00	366.479.600,00	(754.186.200,00)	32,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	1.120.665.800,00	366.479.600,00	(754.186.200,00)	32,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.665.800,00	366.479.600,00	(754.186.200,00)	32,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.394.365.620,00	837.500.000,00	(556.865.620,00)	60,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.394.365.620,00	837.500.000,00	(556.865.620,00)	60,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.394.365.620,00	837.500.000,00	(556.865.620,00)	60,06	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.664.778.800,00	3.664.778.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.664.778.800,00	3.664.778.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	921.561.200,00	921.561.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	596.433.500,00	596.433.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	325.127.700,00	325.127.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	593.182.640,00	567.854.800,00	(25.327.840,00)	95,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	593.182.640,00	567.854.800,00	(25.327.840,00)	95,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.182.640,00	567.854.800,00	(25.327.840,00)	95,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	556.442.880,00	504.988.000,00	(51.454.880,00)	90,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	556.442.880,00	504.988.000,00	(51.454.880,00)	90,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.442.880,00	504.988.000,00	(51.454.880,00)	90,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	501.590.800,00	501.562.900,00	(27.100,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	501.590.800,00	501.562.900,00	(27.100,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	501.590.800,00	501.562.900,00	(27.100,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	176.486.590,00	176.486.590,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.486.590,00	176.486.590,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.602.442.000,00	2.581.772.022,00	(20.669.978,00)	99,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	2.602.442.000,00	2.581.772.022,00	(20.669.978,00)	99,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.602.442.000,00	2.581.772.022,00	(20.669.978,00)	99,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.638.165.245,00	19.166.166.946,00	(1.471.998.299,00)	90,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.069.910.000,00	1.065.448.134,00	(4.461.866,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.069.910.000,00	1.065.448.134,00	(4.461.866,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.069.910.000,00	1.065.448.134,00	(4.461.866,00)	99,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	666.750.000,00	666.726.448,00	(23.552,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	666.750.000,00	666.726.448,00	(23.552,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	666.750.000,00	666.726.448,00	(23.552,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium	346.000.000,00	345.958.802,00	(41.198,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	346.000.000,00	345.958.802,00	(41.198,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.000.000,00	345.958.802,00	(41.198,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0007		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.780.049.590,00	3.596.775.950,00	(170.273.640,00)	95,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	3.569.049.590,00	3.399.075.950,00	(169.973.640,00)	95,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.569.049.590,00	3.399.075.950,00	(169.973.640,00)	95,23	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	196.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0008		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	185.000.000,00	182.971.912,00	(28.088,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	185.000.000,00	182.971.912,00	(28.088,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	182.971.912,00	(28.088,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.289.560.000,00	1.289.092.500,00	(667.500,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	1.289.560.000,00	1.289.092.500,00	(667.500,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0034	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.289.560.000,00	1.289.092.500,00	(667.500,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Mebel Sekolah	399.279.335,00	388.422.300,00	(10.857.035,00)	97,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	399.279.335,00	388.422.300,00	(10.857.035,00)	97,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399.279.335,00	388.422.300,00	(10.857.035,00)	97,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	480.800.080,00	398.328.000,00	(1.680.800,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	480.800.080,00	398.328.000,00	(1.680.800,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	480.800.080,00	398.328.000,00	(1.680.800,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030		Pengelolaan Kelas Sarana, Prasarana dan Utilitas	477.360.080,00	476.730.500,00	(629.500,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	5.2	BELANJA MODAL	477.360.080,00	476.730.500,00	(629.500,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	5.2.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	477.360.080,00	476.730.500,00	(629.500,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.570.800.080,00	1.566.570.000,00	(3.230.000,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	200.800.080,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.800.080,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	1.570.800.080,00	1.566.870.000,00	(3.130.800,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.570.800.080,00	1.566.870.000,00	(3.130.800,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	387.800.080,00	291.750.000,00	(95.250.800,00)	75,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	387.800.080,00	291.750.000,00	(95.250.800,00)	75,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.800.080,00	291.750.000,00	(95.250.800,00)	75,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	921.803.560,00	140.104.000,00	(781.699.560,00)	15,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	921.803.560,00	140.104.000,00	(781.699.560,00)	15,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	921.803.560,00	140.104.000,00	(781.699.560,00)	15,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.069.936.088,00	657.253.588,00	(412.782.500,00)	61,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.069.936.088,00	657.253.588,00	(412.782.500,00)	61,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.936.088,00	657.253.588,00	(412.782.500,00)	61,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.915.619.088,00	1.915.619.088,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.915.619.088,00	1.915.619.088,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	435.880.950,00	435.880.950,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.883.750,00	286.883.750,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.997.200,00	148.997.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	483.297.648,00	485.920.800,00	(76.376.840,00)	84,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	483.297.648,00	485.920.800,00	(76.376.840,00)	84,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.297.648,00	485.920.800,00	(76.376.840,00)	84,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		Koordinasi, Pemrosesan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	289.784.140,00	279.484.100,00	(6.300.040,00)	97,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	289.784.140,00	279.484.100,00	(6.300.040,00)	97,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.784.140,00	279.484.100,00	(6.300.040,00)	97,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	249.735.800,00	249.735.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.735.800,00	249.735.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059		Pembangunan Ruang Kelas Baru	550.080.800,00	513.423.000,00	(6.577.000,00)	98,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	550.080.800,00	523.423.000,00	(6.577.000,00)	98,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.080.800,00	523.423.000,00	(6.577.000,00)	98,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.478.054.200,00	4.903.420.662,00	(494.633.618,00)	90,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	950.768.280,00	746.600.562,00	(184.167.618,00)	82,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	950.768.280,00	746.600.562,00	(184.167.618,00)	82,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.633.080,00	151.633.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.133.450,00	395.367.562,00	(184.046.088,00)	79,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.731.850,00	199.600.000,00	(121.350,00)	99,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	814.991.080,00	608.345.000,00	(6.646.000,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	814.991.080,00	608.345.000,00	(6.646.000,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	814.991.080,00	608.345.000,00	(6.646.000,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	402.571.590,00	399.190.400,00	(3.381.100,00)	99,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	402.571.590,00	399.190.400,00	(3.381.100,00)	99,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.571.590,00	399.190.400,00	(3.381.100,00)	99,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0015		Penyelisan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	758.800.000,00	715.250.000,00	(36.750.000,00)	95,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0015	5.1	BELANJA OPERASI	758.800.000,00	715.250.000,00	(36.750.000,00)	95,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.800.000,00	715.250.000,00	(36.750.000,00)	95,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	135.104.500,00	131.804.500,00	(3.300.000,00)	97,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0016	5.1	BELANJA OPERASI	135.104.500,00	131.804.500,00	(3.300.000,00)	97,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.104.500,00	131.804.500,00	(3.300.000,00)	97,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.031.021.000,00	750.236.400,00	(281.384.488,00)	72,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.031.021.000,00	750.236.400,00	(281.384.488,00)	72,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.021.000,00	750.236.400,00	(281.384.488,00)	72,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0018	5.1	BELANJA OPERASI	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0018	5.1.05	Belanja Hibah	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0019		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	364.328.080,00	305.324.000,00	(59.004.800,00)	83,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0019	5.1	BELANJA OPERASI	364.328.080,00	305.324.000,00	(59.004.800,00)	83,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.05.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.328.080,00	305.324.000,00	(59.004.800,00)	83,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	868.284.500,00	751.948.750,00	(114.243.750,00)	86,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0019		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	208.814.500,00	129.782.500,00	(78.832.000,00)	62,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0019	5.1	BELANJA OPERASI	208.814.500,00	129.782.500,00	(78.832.000,00)	62,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.814.500,00	129.782.500,00	(78.832.000,00)	62,21	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan	656.670.000,00	621.258.250,00	(35.411.750,00)	94,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	656.670.000,00	621.258.250,00	(35.411.750,00)	94,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	656.670.000,00	621.258.250,00	(35.411.750,00)	94,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.05		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.352.401.160,00	1.345.934.800,00	(6.466.360,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.162.398.160,00	1.156.034.800,00	(6.363.360,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	492.508.800,00	491.775.000,00	(733.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	492.508.800,00	491.775.000,00	(733.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	492.508.800,00	491.775.000,00	(733.000,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0007		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	669.893.160,00	664.241.800,00	(5.651.360,00)	99,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	669.893.160,00	664.241.800,00	(5.651.360,00)	99,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.893.160,00	664.241.800,00	(5.651.360,00)	99,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	190.005.000,00	189.900.000,00	(105.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0000		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	190.005.000,00	189.900.000,00	(105.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	190.005.000,00	189.900.000,00	(105.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.005.000,00	189.900.000,00	(105.000,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	366.452.800,00	180.850.000,00	(185.602.800,00)	49,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		Pemenuhan Kualifikasi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.452.800,00	180.850.000,00	(185.602.800,00)	49,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		Perbaikan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.452.800,00	180.850.000,00	(185.602.800,00)	49,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	366.452.800,00	180.850.000,00	(185.602.800,00)	49,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.452.800,00	180.850.000,00	(185.602.800,00)	49,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.08		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERIZINAN	25.452.800,00	0,00	(25.452.800,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.08.2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.452.800,00	0,00	(25.452.800,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001		Pemilihan Kelayakan Unit Pemberi Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.432.000,00	0,00	(25.432.000,00)	0,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.432.000,00	0,00	(25.432.000,00)	0,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.432.000,00	0,00	(25.432.000,00)	0,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.862.868.509,00	59.353.399.028,00	(3.509.469.481,00)	94,41	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.822.000,00	56.662.000,00	(20.160.000,00)	74,66	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.841.000,00	8.881.000,00	(12.160.000,00)	42,20	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.841.000,00	8.881.000,00	(12.160.000,00)	42,20	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.841.000,00	8.881.000,00	(12.160.000,00)	42,20	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.319.000,00	26.819.000,00	(8.200.000,00)	77,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.319.000,00	26.819.000,00	(8.200.000,00)	77,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.319.000,00	26.819.000,00	(8.200.000,00)	77,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.434.214.759,00	57.262.142.528,00	(23.172.072.231,00)	94,75	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.424.214.759,00	57.262.142.528,00	(23.162.072.231,00)	94,75	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.424.214.759,00	57.262.142.528,00	(23.162.072.231,00)	94,75	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	80.424.214.759,00	57.262.142.528,00	(23.162.072.231,00)	94,75	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	66.242.500,00	38.317.500,00	(27.925.000,00)	57,84	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	66.242.500,00	38.317.500,00	(27.925.000,00)	57,84	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.242.500,00	38.317.500,00	(27.925.000,00)	57,84	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.242.500,00	38.317.500,00	(27.925.000,00)	57,84	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.750.000,00	100.525.000,00	(41.425.000,00)	72,33	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	99.750.000,00	58.325.000,00	(41.425.000,00)	58,47	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	99.750.000,00	58.325.000,00	(41.425.000,00)	58,47	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.750.000,00	58.325.000,00	(41.425.000,00)	58,47	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.260.790,00	813.239.200,00	(10.050.590,00)	98,78	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.777.200,00	87.777.200,00	(80,00)	99,99	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.777.200,00	87.777.200,00	(80,00)	99,99	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.777.200,00	87.777.200,00	(80,00)	99,99	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	81.797.590,00	81.797.590,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.797.590,00	81.797.590,00	0,00	100,00	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000,00	960.000,00	(4.320.000,00)	18,18	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.280.000,00	960.000,00	(4.320.000,00)	18,18	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	960.000,00	(4.320.000,00)	18,18	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.800.800,00	65.511.000,00	(289.800,00)	99,56	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	65.800.800,00	65.511.000,00	(289.800,00)	99,56	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.800.800,00	65.511.000,00	(289.800,00)	99,56	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	879.506.800,00	874.044.500,00	(5.462.300,00)	99,38	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	879.506.800,00	874.044.500,00	(5.462.300,00)	99,38	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.506.800,00	874.044.500,00	(5.462.300,00)	99,38	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	709.868.900,00	543.000.000,00	(166.868.900,00)	76,50	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	980.000.000,00	956.000.000,00	(24.000.000,00)	97,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	980.000.000,00	956.000.000,00	(24.000.000,00)	97,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	5.2.03	Belanja Modal Pembelian dan Mesin	980.000.000,00	956.000.000,00	(24.000.000,00)	97,55	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.868.590,00	167.000.000,00	(22.868.590,00)	88,10	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	289.868.590,00	167.000.000,00	(22.868.590,00)	88,10	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.03	Belanja Modal Pembelian dan Mesin	289.868.590,00	167.000.000,00	(22.868.590,00)	88,10	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.990.000,00	146.000.000,00	(29.990.000,00)	82,96	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.990.000,00	16.400.000,00	(5.590.000,00)	74,57	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.990.000,00	16.400.000,00	(5.590.000,00)	74,57	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.990.000,00	16.400.000,00	(5.590.000,00)	74,57	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.600.000,00	129.600.000,00	(24.000.000,00)	84,37	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	153.600.000,00	129.600.000,00	(24.000.000,00)	84,37	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	129.600.000,00	(24.000.000,00)	84,37	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.900.000,00	198.221.800,00	(50.678.200,00)	79,63	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.900.000,00	198.221.800,00	(50.678.200,00)	79,63	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	248.900.000,00	198.221.800,00	(50.678.200,00)	79,62	
1.00	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.900.000,00	198.221.800,00	(50.678.200,00)	79,63	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00	

Langara, 27 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

DINAS KESEHATAN

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2025
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.417.971.000,00	2.159.827.135,00	(258.146.865,00)	89,32	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	236.082.400,00	136.082.400,00	236,08	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	236.082.400,00	136.082.400,00	236,08	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	2.317.971.000,00	1.923.744.735,00	(394.226.261,00)	82,99	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.317.971.000,00	1.923.744.739,00	(394.226.261,00)	82,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	88.481.681.979,00	84.100.671.583,00	(4.350.980.396,00)	95,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	59.920.304.784,00	54.998.484.767,00	(4.921.820.019,00)	91,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.819.729.908,00	35.689.751.206,00	(3.129.978.703,00)	91,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.913.513.648,00	13.962.123.350,00	(1.951.390.299,00)	87,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.913.513.648,00	13.962.123.350,00	(1.951.390.299,00)	87,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.064.371.506,00	1.056.600.000,00	(7.771.500,00)	99,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.698.221.648,00	11.764.523.900,00	(1.933.697.749,00)	85,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.110.920.500,00	1.142.000.450,00	(7.021.050,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	486.200.000,00	434.000.000,00	(52.200.000,00)	93,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	486.200.000,00	434.000.000,00	(52.200.000,00)	93,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.200.000,00	434.000.000,00	(52.200.000,00)	93,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	18.754.562.060,00	17.624.267.256,00	(1.130.294.804,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	18.754.562.060,00	17.624.267.256,00	(1.130.294.804,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.981.388.560,00	2.777.179.000,00	(204.211.560,00)	93,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.261.952.500,00	11.357.092.256,00	(904.867.244,00)	92,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.511.216.000,00	3.490.000.000,00	(21.216.000,00)	99,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	676.620.000,00	660.800.000,00	(15.820.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	676.620.000,00	660.800.000,00	(15.820.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	676.620.000,00	660.800.000,00	(15.820.000,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.208.945.000,00	1.206.375.000,00	(12.570.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	1.198.945.000,00	1.196.375.000,00	(12.570.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.198.945.000,00	1.196.375.000,00	(12.570.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Kolam dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	50.570.000,00	0,00	(50.570.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	50.570.000,00	0,00	(50.570.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.570.000,00	0,00	(50.570.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.238.494.200,00	1.254.332.108,00	15.837.908,00	101,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.238.494.200,00	1.254.332.108,00	15.837.908,00	101,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.238.494.200,00	1.254.332.108,00	15.837.908,00	101,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0035		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis	420.825.000,00	407.853.500,00	(12.971.500,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	420.825.000,00	407.853.500,00	(12.971.500,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.825.000,00	407.853.500,00	(12.971.500,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.911.820.410,00	19.120.481.561,00	(1.791.338.849,00)	91,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	309.180.000,00	294.108.000,00	(15.072.000,00)	95,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	309.180.000,00	294.108.000,00	(15.072.000,00)	95,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.180.000,00	294.108.000,00	(15.072.000,00)	95,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	189.282.500,00	183.832.500,00	(5.450.000,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	189.282.500,00	183.832.500,00	(5.450.000,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.282.500,00	183.832.500,00	(5.450.000,00)	97,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru	91.660.000,00	64.167.000,00	(27.493.000,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	91.660.000,00	64.167.000,00	(27.493.000,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.660.000,00	64.167.000,00	(27.493.000,00)	70,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	101.780.000,00	96.410.000,00	(5.370.000,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	101.780.000,00	96.410.000,00	(5.370.000,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.780.000,00	96.410.000,00	(5.370.000,00)	94,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	559.560.000,00	537.040.000,00	(22.520.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	559.560.000,00	537.040.000,00	(22.520.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.560.000,00	537.040.000,00	(22.520.000,00)	95,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	67.110.000,00	67.060.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.110.000,00	67.060.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.110.000,00	67.060.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	199.966.000,00	199.916.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	199.966.000,00	199.916.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.966.000,00	199.916.000,00	(50.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	44.740.000,00	44.115.000,00	(625.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	44.740.000,00	44.115.000,00	(625.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.740.000,00	44.115.000,00	(625.000,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	55.900.240,00	55.240.000,00	(660.240,00)	98,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.900.240,00	55.240.000,00	(660.240,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.900.240,00	55.240.000,00	(660.240,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	197.695.000,00	195.245.000,00	(2.450.000,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	197.695.000,00	195.245.000,00	(2.450.000,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.695.000,00	195.245.000,00	(2.450.000,00)	98,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	224.768.000,00	195.865.000,00	(28.903.000,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	224.768.000,00	195.865.000,00	(28.903.000,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.768.000,00	195.865.000,00	(28.903.000,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	148.390.000,00	147.840.000,00	(550.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	148.390.000,00	147.840.000,00	(550.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.390.000,00	147.840.000,00	(550.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	21.770.000,00	0,00	(21.770.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	21.770.000,00	0,00	(21.770.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.770.000,00	0,00	(21.770.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	2.619.983.738,00	2.499.801.500,00	(120.182.238,00)	95,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.548.000,00	2.163.701.500,00	(119.846.500,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.283.548.000,00	2.163.701.500,00	(119.846.500,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	335.435.738,00	335.100.000,00	(335.738,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Pembelian dan Modal	335.435.738,00	335.100.000,00	(335.738,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.235.000,00	56.870.000,00	(18.365.000,00)	75,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	75.235.000,00	56.870.000,00	(18.365.000,00)	75,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.235.000,00	56.870.000,00	(18.365.000,00)	75,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.099.000,00	257.054.000,00	(357.054.000,00)	41,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	615.099.000,00	162.245.000,00	(452.854.000,00)	26,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.099.000,00	162.245.000,00	(452.854.000,00)	26,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	370.334.000,00	198.841.000,00	(171.493.000,00)	53,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	370.334.000,00	198.841.000,00	(171.493.000,00)	53,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.334.000,00	198.841.000,00	(171.493.000,00)	53,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	502.339.000,00	491.038.000,00	(11.301.000,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	502.339.000,00	491.038.000,00	(11.301.000,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.339.000,00	491.038.000,00	(11.301.000,00)	97,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.989.342.888,00	1.860.216.132,00	(129.126.748,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.989.342.888,00	1.860.216.132,00	(129.126.748,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.342.888,00	1.860.216.132,00	(129.126.748,00)	93,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.199.938.752,00	5.810.269.712,00	(389.669.040,00)	93,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	6.074.868.822,00	5.740.151.285,00	(334.715.537,00)	94,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.074.868.822,00	5.740.151.285,00	(334.715.537,00)	94,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	125.071.930,00	70.112.427,00	(54.959.483,00)	56,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.03	Belanja Modal Pembelian dan Modal	125.071.930,00	70.112.427,00	(54.959.483,00)	56,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027		Dampak Dari Penyelenggaraan NAPZA di Pasyarakat dan Sekolah	53.730.000,00	51.630.000,00	(2.100.000,00)	96,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	53.730.000,00	51.630.000,00	(2.100.000,00)	96,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.730.000,00	51.630.000,00	(2.100.000,00)	96,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Tranmisi KLB ke laboratorium	50.640.000,00	0,00	(50.640.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	50.640.000,00	0,00	(50.640.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.640.000,00	0,00	(50.640.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	66.805.000,00	62.510.000,00	(4.295.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	66.805.000,00	62.510.000,00	(4.295.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.805.000,00	62.510.000,00	(4.295.000,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	4.681.381.820,00	4.335.946.717,00	(345.435.103,00)	92,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	4.681.381.820,00	4.335.946.717,00	(345.435.103,00)	92,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	698.282.600,00	689.755.884,00	(8.526.716,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.982.989.220,00	3.646.190.833,00	(336.798.387,00)	91,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		Pembinaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	448.309.940,00	432.529.000,00	(15.780.940,00)	96,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	448.309.940,00	432.529.000,00	(15.780.940,00)	96,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.309.940,00	432.529.000,00	(15.780.940,00)	96,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	87.300.000,00	60.900.000,00	(26.400.000,00)	69,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	87.300.000,00	60.900.000,00	(26.400.000,00)	69,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	60.900.000,00	(26.400.000,00)	69,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon	122.270.000,00	122.220.000,00	(50.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	122.270.000,00	122.220.000,00	(50.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000,00	21.170.000,00	(50.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.05	Belanja Hibah	101.050.000,00	101.050.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	81.000.000,00	78.600.000,00	(2.400.000,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	78.600.000,00	(2.400.000,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	78.600.000,00	(2.400.000,00)	97,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	34.940.560,00	24.300.000,00	(10.640.560,00)	69,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	34.940.560,00	24.300.000,00	(10.640.560,00)	69,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.940.560,00	24.300.000,00	(10.640.560,00)	69,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	136.500.000,00	136.350.000,00	(150.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	136.500.000,00	136.350.000,00	(150.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	136.350.000,00	(150.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	562.269.000,00	556.982.000,00	(5.287.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	562.269.000,00	556.982.000,00	(5.287.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.269.000,00	556.982.000,00	(5.287.000,00)	99,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Pengelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	169.549.467,00	169.047.000,00	(502.467,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	169.549.467,00	169.047.000,00	(502.467,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.549.467,00	169.047.000,00	(502.467,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.549.467,00	169.047.000,00	(502.467,00)	99,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.205.000,00	19.205.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.205.000,00	19.205.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.281.818.461,00	955.691.990,00	(246.118.471,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	183.527.000,00	169.656.000,00	(13.871.000,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.580.000,00	22.580.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.580.000,00	22.580.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	160.947.000,00	147.076.000,00	(13.871.000,00)	91,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	160.947.000,00	147.076.000,00	(13.871.000,00)	91,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.947.000,00	147.076.000,00	(13.871.000,00)	91,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.018.280.461,00	788.035.990,00	(230.247.471,00)	77,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.018.280.461,00	788.035.990,00	(230.247.471,00)	77,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.018.280.461,00	788.035.990,00	(230.247.471,00)	77,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.280.461,00	786.035.990,00	(232.247.471,00)	77,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	178.160.000,00	139.289.000,00	(38.870.000,00)	78,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	140.510.000,00	101.649.000,00	(38.870.000,00)	72,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	140.510.000,00	101.649.000,00	(38.870.000,00)	72,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	140.510.000,00	101.649.000,00	(38.870.000,00)	72,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.510.000,00	101.649.000,00	(38.870.000,00)	72,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	104.162.308,00	103.292.000,00	(870.308,00)	99,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.647.308,00	77.777.000,00	(870.308,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.647.308,00	77.777.000,00	(870.308,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.647.308,00	77.777.000,00	(870.308,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.647.308,00	77.777.000,00	(870.308,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.515.000,00	25.515.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.515.000,00	25.515.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.047.217.432,00	27.960.915.824,00	856.698.392,00	103,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359.995.000,00	358.345.000,00	(1.650.000,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.805.000,00	122.335.000,00	(1.470.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.805.000,00	122.335.000,00	(1.470.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.805.000,00	122.335.000,00	(1.470.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.165.000,00	20.005.000,00	(160.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.165.000,00	20.005.000,00	(160.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.165.000,00	20.005.000,00	(160.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.025.000,00	216.005.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	216.025.000,00	216.005.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.025.000,00	216.005.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.055.677.798,00	25.866.422.138,00	810.744.340,00	103,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.045.527.798,00	25.856.022.138,00	810.494.340,00	103,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.045.527.798,00	25.856.022.138,00	810.494.340,00	103,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	25.045.527.798,00	25.856.022.138,00	810.494.340,00	103,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.150.000,00	10.400.000,00	250.000,00	102,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.150.000,00	10.400.000,00	250.000,00	102,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	10.400.000,00	250.000,00	102,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.340.000,00	69.998.000,00	(19.142.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0001		Pemindahan Satuan dan Prasarana Disiplin	60.280.000,00	41.018.000,00	(19.142.000,00)	68,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.280.000,00	41.018.000,00	(19.142.000,00)	68,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.280.000,00	41.018.000,00	(19.142.000,00)	68,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.940.000,00	28.940.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.940.000,00	28.940.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.004.634,00	1.063.997.403,00	39.992.769,00	103,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.819.764,00	81.819.000,00	9.999.236,00	113,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.819.764,00	81.819.000,00	9.999.236,00	113,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.819.764,00	81.819.000,00	9.999.236,00	113,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.846.870,00	39.415.875,00	9.569.005,00	132,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.846.870,00	39.415.875,00	9.569.005,00	132,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.846.870,00	39.415.875,00	9.569.005,00	132,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.940.000,00	32.540.000,00	(400.000,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.940.000,00	32.540.000,00	(400.000,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.940.000,00	32.540.000,00	(400.000,00)	98,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.320.000,00	71.680.000,00	3.360.000,00	104,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	68.320.000,00	71.680.000,00	3.360.000,00	104,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.320.000,00	71.680.000,00	3.360.000,00	104,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	814.278.000,00	830.842.528,00	16.564.528,00	102,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	814.278.000,00	830.842.528,00	16.564.528,00	102,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.278.000,00	830.842.528,00	16.564.528,00	102,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.600.000,00	209.979.762,00	53.979.762,00	134,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.600.000,00	21.195.000,00	(405.000,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.195.000,00	(405.000,00)	98,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		BASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.195.000,00	(405.000,00)	98,12	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	89.384.762,00	54.384.762,00	255,38	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	89.384.762,00	54.384.762,00	255,38	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	89.384.762,00	54.384.762,00	255,38	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.800.000,00	336.473.521,00	(26.326.479,00)	92,74	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.800.000,00	324.473.521,00	(38.326.479,00)	89,43	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	362.800.000,00	324.473.521,00	(38.326.479,00)	89,43	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.800.000,00	324.473.521,00	(38.326.479,00)	89,43	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02	1.02.1.00.1.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

Lasusua, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDO SAPULLAH RAZAK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.652.077.332,00	(347.922.668,00)	82,60	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.652.077.332,00	(347.922.668,00)	82,60	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.652.077.332,00	(347.922.668,00)	82,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	39.842.575.000,00	36.341.613.038,00	(3.700.961.962,00)	93,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.299.215.000,00	24.932.743.836,00	(1.366.471.164,00)	94,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.582.603.000,00	23.322.858.435,00	(1.259.794.565,00)	94,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	180.000.000,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.577.805.176,00	7.504.495.712,00	(73.309.464,00)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	7.577.805.176,00	7.504.495.712,00	(73.309.464,00)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.577.805.176,00	7.504.495.712,00	(73.309.464,00)	99,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	99.649.506,00	(100.350.494,00)	49,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	99.649.506,00	(100.350.494,00)	49,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	99.649.506,00	(100.350.494,00)	49,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit	13.723.347.824,00	12.791.467.285,00	(931.880.539,00)	93,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	13.723.347.824,00	12.791.467.285,00	(931.880.539,00)	93,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.012.090.571,00	3.991.486.989,00	(40.603.586,00)	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.541.257.253,00	8.660.980.308,00	(781.356.953,00)	92,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.901.590.000,00	2.807.245.932,00	(94.254.068,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	2.901.590.000,00	2.807.245.932,00	(94.254.068,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.901.590.000,00	2.807.245.932,00	(94.254.068,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.716.562.000,00	1.609.885.401,00	(106.676.599,00)	93,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	166.500.000,00	152.450.000,00	(14.050.000,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	166.500.000,00	152.450.000,00	(14.050.000,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.500.000,00	152.450.000,00	(14.050.000,00)	91,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Upaya Penanganan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	85.500.000,00	75.620.000,00	(9.880.000,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	85.500.000,00	75.620.000,00	(9.880.000,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	75.620.000,00	(9.880.000,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.440.800.000,00	1.357.358.401,00	(82.641.599,00)	94,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.800.000,00	1.357.358.401,00	(82.641.599,00)	94,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.800.000,00	1.357.358.401,00	(82.641.599,00)	94,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	24.562.000,00	24.457.000,00	(105.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	24.562.000,00	24.457.000,00	(105.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.562.000,00	24.457.000,00	(105.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.241.803.000,00	5.236.803.603,00	(5.000.397,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02		Penyelenggaraan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.836.000.000,00	5.831.225.000,00	(4.775.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002		Penyusunan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.836.000.000,00	5.831.225.000,00	(4.775.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.836.000.000,00	5.831.225.000,00	(4.775.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.836.000.000,00	5.831.225.000,00	(4.775.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.812.000,00	205.578.603,00	(233.397,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.812.000,00	205.578.603,00	(233.397,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.812.000,00	205.578.603,00	(233.397,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.812.000,00	205.578.603,00	(233.397,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.501.348.000,00	6.172.065.599,00	(1.329.482.401,00)	82,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.930.000,00	5.950.000,00	(980.000,00)	85,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.840.000,00	1.860.000,00	(980.000,00)	65,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	1.860.000,00	(980.000,00)	65,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	1.860.000,00	(980.000,00)	65,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.836.990.000,00	3.777.812.642,00	(1.059.177.358,00)	78,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.836.700.000,00	3.777.812.642,00	(1.058.887.358,00)	78,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.836.700.000,00	3.777.812.642,00	(1.058.887.358,00)	78,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.836.700.000,00	3.777.812.642,00	(1.058.887.358,00)	78,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.879.895,00	734.225.697,00	(68.654.198,00)	91,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.440.000,00	7.190.000,00	(3.250.000,00)	68,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	7.190.000,00	(3.250.000,00)	68,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	7.190.000,00	(3.250.000,00)	68,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.701.600,00	28.701.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.701.600,00	28.701.600,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.787.000,00	36.786.000,00	(10.001.000,00)	78,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.787.000,00	36.786.000,00	(10.001.000,00)	78,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.787.000,00	36.786.000,00	(10.001.000,00)	78,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.595.295,00	66.023.000,00	(9.572.295,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.595.295,00	66.023.000,00	(9.572.295,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.595.295,00	66.023.000,00	(9.572.295,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.860.000,00	3.500.000,00	(3.360.000,00)	51,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.860.000,00	3.500.000,00	(3.360.000,00)	51,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	3.500.000,00	(3.360.000,00)	51,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.456.000,00	586.985.097,00	(42.470.903,00)	93,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	629.456.000,00	586.985.097,00	(42.470.903,00)	93,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.456.000,00	586.985.097,00	(42.470.903,00)	93,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	440.448.705,00	436.701.800,00	(3.746.905,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.448.705,00	386.701.800,00	(3.746.905,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	390.448.705,00	386.701.800,00	(3.746.905,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.448.705,00	386.701.800,00	(3.746.905,00)	99,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.649.400,00	558.812.627,00	(141.836.773,00)	79,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	75,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.649.400,00	290.312.627,00	(68.336.773,00)	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	358.649.400,00	290.312.627,00	(68.336.773,00)	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.649.400,00	290.312.627,00	(68.336.773,00)	80,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.000.000,00	264.000.000,00	(72.000.000,00)	78,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	336.000.000,00	264.000.000,00	(72.000.000,00)	78,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	264.000.000,00	(72.000.000,00)	78,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.689.000,00	658.562.833,00	(57.127.167,00)	92,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.350.000,00	48.285.000,00	(65.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.350.000,00	48.285.000,00	(65.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	48.285.000,00	(65.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.150.000,00	220.157.833,00	(39.992.167,00)	84,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.150.000,00	220.157.833,00	(39.992.167,00)	84,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.150.000,00	220.157.833,00	(39.992.167,00)	84,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.470.000,00	158.400.000,00	(3.070.000,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	161.470.000,00	158.400.000,00	(3.070.000,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.470.000,00	158.400.000,00	(3.070.000,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.720.000,00	231.720.000,00	(12.000.000,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	243.720.000,00	231.720.000,00	(12.000.000,00)	95,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.720.000,00	231.720.000,00	(12.000.000,00)	95,07	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

SIFUL SAIFUDDIN RAZAK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.060.000.000,00	1.046.947.420,00	(13.052.580,00)	98,78	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.060.000.000,00	1.046.947.420,00	(13.052.580,00)	98,78	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.060.000.000,00	1.046.947.420,00	(13.052.580,00)	98,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	104.174.225.483,00	99.706.934.702,00	(4.467.290.781,00)	95,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.951.305.750,00	4.987.201.835,00	(1.964.103.715,00)	71,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.213.677.750,00	1.162.922.088,00	(1.950.155.662,00)	37,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	418.989.500,00	416.576.737,00	(2.412.763,00)	99,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	406.989.500,00	404.576.737,00	(2.412.763,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.989.500,00	404.576.737,00	(2.412.763,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	368.988.250,00	360.798.400,00	(8.189.850,00)	97,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2	BELANJA MODAL	356.988.250,00	348.798.400,00	(8.189.850,00)	97,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	356.988.250,00	348.798.400,00	(8.189.850,00)	97,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115		Pembangunan Tanggul Sungai	2.325.100.000,00	385.546.951,00	(1.939.553.049,00)	16,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	2.307.100.000,00	367.546.951,00	(1.939.553.049,00)	15,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.307.100.000,00	367.546.951,00	(1.939.553.049,00)	15,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.838.226.000,00	3.824.278.947,00	(13.947.053,00)	99,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	209.986.000,00	209.986.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	209.986.000,00	209.986.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Perensikan	2.369.880.000,00	2.355.132.947,00	(13.947.053,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	143.880.000,00	143.880.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.880.000,00	143.880.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	2.226.000.000,00	2.212.052.947,00	(13.947.053,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	826.000.000,00	812.052.947,00	(13.947.053,00)	98,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.259.160.000,00	1.259.160.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.160.000,00	1.259.160.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.658.268.000,00	11.899.120.843,00	(759.147.157,00)	94,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	12.658.268.000,00	11.899.120.843,00	(759.147.157,00)	94,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.801.450.000,00	8.055.260.036,00	(746.189.964,00)	91,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	8.643.450.000,00	7.897.260.036,00	(746.189.964,00)	91,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.643.450.000,00	7.897.260.036,00	(746.189.964,00)	91,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.188.650.800,00	2.178.750.000,00	(9.900.000,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	2.188.650.800,00	2.178.750.000,00	(9.900.000,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.188.650.800,00	2.178.750.000,00	(9.900.000,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.668.168.800,00	1.666.110.807,00	(2.057.193,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	149.718.000,00	146.690.807,00	(3.027.193,00)	97,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.718.000,00	146.690.807,00	(3.027.193,00)	97,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	1.518.450.000,00	1.518.420.000,00	(30.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.518.450.000,00	1.518.420.000,00	(30.000,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	387.536.100,00	385.799.000,00	(1.737.100,00)	99,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	387.536.100,00	385.799.000,00	(1.737.100,00)	99,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	387.536.100,00	385.799.000,00	(1.737.100,00)	99,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	387.536.100,00	385.799.000,00	(1.737.100,00)	99,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	187.536.100,00	187.530.000,00	(6.100,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	198.269.000,00	(1.731.000,00)	99,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.705.435.500,00	4.695.195.500,00	(10.240.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	4.705.435.500,00	4.695.195.500,00	(10.240.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.705.435.500,00	4.695.195.500,00	(10.240.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	4.705.435.500,00	4.695.195.500,00	(10.240.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.205.435.500,00	4.197.500.500,00	(7.935.000,00)	99,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	497.695.000,00	(2.305.000,00)	99,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.871.114.510,00	6.789.993.000,00	(81.121.510,00)	98,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.871.114.510,00	6.789.993.000,00	(81.121.510,00)	98,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.671.114.510,00	6.589.993.000,00	(81.121.510,00)	98,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	6.557.114.510,00	6.475.993.000,00	(81.121.510,00)	98,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.557.114.510,00	6.475.993.000,00	(81.121.510,00)	98,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	27.849.207.900,00	27.645.501.829,00	(203.706.871,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	27.849.207.900,00	27.645.501.829,00	(203.706.871,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	27.748.792.900,00	27.545.086.829,00	(203.706.871,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	27.691.792.900,00	27.488.086.829,00	(203.706.871,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.691.792.900,00	27.488.086.829,00	(203.706.871,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	102.415.000,00	102.415.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.415.000,00	102.415.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.825.059.800,00	34.023.065.765,00	(801.994.035,00)	97,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	34.825.059.800,00	34.023.065.765,00	(801.994.035,00)	97,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031		Penggantian Jembatan	8.307.353.900,00	7.917.570.160,00	(389.783.740,00)	95,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	8.298.353.900,00	7.908.570.160,00	(389.783.740,00)	95,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.298.353.900,00	7.908.570.160,00	(389.783.740,00)	95,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	20.622.049.900,00	20.210.846.915,00	(411.202.985,00)	98,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	191.080.000,00	191.080.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.080.000,00	191.080.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	20.430.969.900,00	20.019.766.915,00	(411.202.985,00)	97,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.430.969.900,00	20.019.766.915,00	(411.202.985,00)	97,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	283.850.000,00	283.803.690,00	(46.310,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2	BELANJA MODAL	283.850.000,00	283.803.690,00	(46.310,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	283.850.000,00	283.803.690,00	(46.310,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	4.362.006.000,00	4.361.045.000,00	(961.000,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	4.350.006.000,00	4.349.050.000,00	(956.000,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.006.000,00	4.349.050.000,00	(956.000,00)	99,97	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	163.875.360,00	140.000.000,00	(23.875.360,00)	85,43	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	140.049.360,00	140.000.000,00	(49.360,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	140.049.360,00	140.000.000,00	(49.360,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	131.249.680,00	131.200.320,00	(49.360,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.249.680,00	131.200.320,00	(49.360,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	8.799.680,00	8.799.680,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.799.680,00	8.799.680,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	23.826.000,00	0,00	(23.826.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	23.826.000,00	0,00	(23.826.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.826.000,00	0,00	(23.826.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.826.000,00	0,00	(23.826.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.546.688.000,00	2.046.688.000,00	(500.000.000,00)	80,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.275.000.000,00	1.775.000.000,00	(500.000.000,00)	78,02	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.325.000.000,00	1.075.000.000,00	(250.000.000,00)	81,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.325.000.000,00	1.075.000.000,00	(250.000.000,00)	81,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.325.000.000,00	1.075.000.000,00	(250.000.000,00)	81,13	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0007		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	950.000.000,00	700.000.000,00	(250.000.000,00)	73,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0007	5.2	BELANJA MODAL	950.000.000,00	700.000.000,00	(250.000.000,00)	73,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0007	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	950.000.000,00	700.000.000,00	(250.000.000,00)	73,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	271.688.000,00	271.688.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.688.000,00	271.688.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.915.736.563,00	6.794.369.730,00	(121.366.833,00)	98,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.179.500,00	143.907.500,00	(272.000,00)	99,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.999.500,00	123.727.500,00	(272.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	123.999.500,00	123.727.500,00	(272.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.999.500,00	123.727.500,00	(272.000,00)	99,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.180.000,00	20.160.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.180.000,00	20.160.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.180.000,00	20.160.000,00	(20.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.971.145.000,00	3.876.918.630,00	(94.226.370,00)	97,63	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.881.805.000,00	3.800.278.630,00	(81.526.370,00)	97,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.881.805.000,00	3.800.278.630,00	(81.526.370,00)	97,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.881.805.000,00	3.800.278.630,00	(81.526.370,00)	97,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.000.000,00	54.892.000,00	(108.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.892.000,00	(108.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.892.000,00	(108.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.500.000,00	7.220.000,00	(280.000,00)	96,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.220.000,00	(280.000,00)	96,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.220.000,00	(280.000,00)	96,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.340.000,00	7.080.000,00	(12.260.000,00)	36,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.340.000,00	7.080.000,00	(12.260.000,00)	36,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.340.000,00	7.080.000,00	(12.260.000,00)	36,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.448.000,00	(52.000,00)	99,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.448.000,00	(52.000,00)	99,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.448.000,00	(52.000,00)	99,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.050.000,00	73.910.000,00	(140.000,00)	99,81	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.500.000,00	17.360.000,00	(140.000,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.360.000,00	(140.000,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.360.000,00	(140.000,00)	99,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.550.000,00	51.550.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.550.000,00	51.550.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.542.000,00	149.094.000,00	(448.000,00)	99,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.342.000,00	75.894.000,00	(448.000,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	76.342.000,00	75.894.000,00	(448.000,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.342.000,00	75.894.000,00	(448.000,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.644.725,00	701.820.450,00	(7.824.275,00)	98,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000,00	2.222.500,00	(37.500,00)	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.260.000,00	2.222.500,00	(37.500,00)	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	2.222.500,00	(37.500,00)	98,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.006.725,00	102.100.000,00	(906.725,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.006.725,00	102.100.000,00	(906.725,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.006.725,00	102.100.000,00	(906.725,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.055.000,00	13.987.000,00	(68.000,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.055.000,00	13.987.000,00	(68.000,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.055.000,00	13.987.000,00	(68.000,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.940.000,00	7.840.000,00	(100.000,00)	98,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.940.000,00	7.840.000,00	(100.000,00)	98,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.840.000,00	(100.000,00)	98,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.900.000,00	18.877.400,00	(22.600,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.900.000,00	18.877.400,00	(22.600,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.877.400,00	(22.600,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.883.000,00	556.593.550,00	(6.289.450,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	562.883.000,00	556.593.550,00	(6.289.450,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.883.000,00	556.593.550,00	(6.289.450,00)	98,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.555.338,00	258.436.000,00	(5.119.338,00)	98,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	45.750.000,00	(4.250.000,00)	91,5	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	45.750.000,00	(4.250.000,00)	91,5	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	45.750.000,00	(4.250.000,00)	91,5	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	19.462.538,00	19.350.000,00	(112.538,00)	99,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.462.538,00	19.350.000,00	(112.538,00)	99,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.462.538,00	19.350.000,00	(112.538,00)	99,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.092.800,00	193.336.000,00	(756.800,00)	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	194.092.800,00	193.336.000,00	(756.800,00)	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.092.800,00	193.336.000,00	(756.800,00)	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.380.800,00	54.837.250,00	(4.543.750,00)	92,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.800,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.800,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.380.000,00	12.837.250,00	(4.542.750,00)	73,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.380.000,00	12.837.250,00	(4.542.750,00)	73,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	12.837.250,00	(4.542.750,00)	73,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.544.840.000,00	1.535.665.900,00	(9.174.100,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.000.000,00	183.018.900,00	(981.100,00)	99,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	184.000.000,00	183.018.900,00	(981.100,00)	99,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.000.000,00	183.018.900,00	(981.100,00)	99,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.180.000,00	102.100.000,00	(80.000,00)	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.180.000,00	102.100.000,00	(80.000,00)	99,92	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.180.000,00	102.100.000,00	(80.000,00)	99,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Berat	1.123.900.000,00	1.115.925.000,00	(7.975.000,00)	99,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.123.900.000,00	1.115.925.000,00	(7.975.000,00)	99,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.900.000,00	1.115.925.000,00	(7.975.000,00)	99,29	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.760.000,00	92.657.000,00	(103.000,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.760.000,00	92.657.000,00	(103.000,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.760.000,00	92.657.000,00	(103.000,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	42.000.000,00	41.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	41.965.000,00	(35.000,00)	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	41.965.000,00	(35.000,00)	99,91	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. UU SAIFULLAH RAZAK

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.879.944.981,00	7.609.383.854,00	(270.561.127,00)	96,81	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	96.087.120,00	96.016.360,00	(70.760,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		Pembinaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	96.087.120,00	96.016.360,00	(70.760,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0006		Pembinaan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Sosial dan Rumah Khusus	47.584.760,00	47.549.000,00	(35.760,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.584.760,00	47.549.000,00	(35.760,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.584.760,00	47.549.000,00	(35.760,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	48.502.360,00	48.467.360,00	(35.000,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.502.360,00	48.467.360,00	(35.000,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.502.360,00	48.467.360,00	(35.000,00)	99,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.125.548.745,00	2.124.915.462,00	(631.283,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	628.087.800,00	627.486.800,00	(611.000,00)	99,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang	628.087.800,00	627.486.800,00	(611.000,00)	99,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.087.800,00	3.087.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.087.800,00	3.087.800,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	625.000.000,00	624.398.000,00	(611.000,00)	99,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	625.000.000,00	624.398.000,00	(611.000,00)	99,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.497.448.945,00	1.497.428.662,00	(20.283,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.341.167.500,00	1.341.167.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.167.500,00	161.167.500,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perusahaan/Pengelola Permukiman Kumuh	156.281.445,00	156.261.162,00	(20.283,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	156.281.445,00	156.261.162,00	(20.283,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.281.445,00	156.261.162,00	(20.283,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.182.028.030,00	3.020.327.400,00	(161.700.630,00)	94,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.182.028.030,00	3.020.327.400,00	(161.700.630,00)	94,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.141.820.630,00	2.980.128.400,00	(161.700.230,00)	94,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	885.603.480,00	802.962.000,00	(2.641.480,00)	99,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.603.480,00	802.962.000,00	(2.641.480,00)	99,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.256.217.150,00	2.177.158.400,00	(159.058.750,00)	95,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.256.217.150,00	2.177.158.400,00	(159.058.750,00)	95,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	40.207.400,00	40.207.000,00	(400,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.207.400,00	40.207.000,00	(400,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.207.400,00	40.207.000,00	(400,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.406.283.086,00	2.368.124.632,00	(88.158.454,00)	98,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01		Perencanaan, Pengenggian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.149.800,00	38.184.000,00	(965.800,00)	97,53	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	6.500.000,00	6.491.000,00	(9.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.491.000,00	(9.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.491.000,00	(9.000,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.500.000,00	6.467.000,00	(33.000,00)	99,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.467.000,00	(33.000,00)	99,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.467.000,00	(33.000,00)	99,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000,00	6.485.000,00	(15.000,00)	99,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.485.000,00	(15.000,00)	99,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.485.000,00	(15.000,00)	99,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.498.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.149.000,00	12.243.000,00	(906.000,00)	93,10	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.149.000,00	12.243.000,00	(906.000,00)	93,10	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.149.000,00	12.243.000,00	(906.000,00)	93,10	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.214.090.000,00	1.181.572.563,00	(32.477.437,00)	97,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.207.590.000,00	1.175.119.563,00	(32.470.437,00)	97,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.207.590.000,00	1.175.119.563,00	(32.470.437,00)	97,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.207.590.000,00	1.175.119.563,00	(32.470.437,00)	97,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.590.000,00	6.453.000,00	(47.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.590.000,00	6.453.000,00	(47.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.590.000,00	6.453.000,00	(47.000,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.426.500,00	29.388.369,00	(11.037.131,00)	72,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.426.500,00	29.388.369,00	(11.037.131,00)	72,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.426.500,00	29.388.369,00	(11.037.131,00)	72,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.426.500,00	29.388.369,00	(11.037.131,00)	72,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.888.186,00	714.912.760,00	(2.975.426,00)	99,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.712.000,00	8.712.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.302.320,00	265.942.500,00	(359.820,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0002	5.2	BELANJA MODAL	266.302.320,00	265.942.500,00	(359.820,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.302.320,00	265.942.500,00	(359.820,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.387.866,00	14.228.500,00	(159.366,00)	98,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.387.866,00	14.228.500,00	(159.366,00)	98,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.387.866,00	14.228.500,00	(159.366,00)	98,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000,00	3.840.000,00	(1.200.000,00)	76,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	3.840.000,00	(1.200.000,00)	76,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	3.840.000,00	(1.200.000,00)	76,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.965.000,00	(35.000,00)	99,5	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.965.000,00	(35.000,00)	99,5	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.965.000,00	(35.000,00)	99,5	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.366.000,00	408.144.760,00	(1.221.240,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0009	5.1	BELANJA OPERASI	409.366.000,00	408.144.760,00	(1.221.240,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.96.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.366.000,00	408.144.760,00	(1.221.240,00)	99,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.810.400,00	312.800.096,00	(30.010.304,00)	91,24	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0002		Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.839.400,00	28.050.096,00	(18.789.304,00)	59,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.839.400,00	28.050.096,00	(18.789.304,00)	59,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.839.400,00	28.050.096,00	(18.789.304,00)	59,91	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000,00	282.750.000,00	(11.250.000,00)	96,17	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0004	5.1	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	282.750.000,00	(11.250.000,00)	96,17	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.98.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	282.750.000,00	(11.250.000,00)	96,17	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.960.000,00	91.285.844,00	(10.674.156,00)	89,52	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.900.000,00	65.443.049,00	(2.456.951,00)	96,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0001	5.1	BELANJA OPERASI	67.900.000,00	65.443.049,00	(2.456.951,00)	96,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.900.000,00	65.443.049,00	(2.456.951,00)	96,38	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.060.000,00	25.822.795,00	(8.237.205,00)	75,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.060.000,00	25.822.795,00	(8.237.205,00)	75,83	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.99.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.060.000,00	25.822.795,00	(8.237.205,00)	75,83	

Langara, 31 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDHO SAIFULLAH RAZAK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BAMKAR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.604.035.690,00	11.015.034.758,00	(589.800.932,00)	94,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	773.255.700,00	734.485.800,00	(38.770.700,00)	94,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	516.610.700,00	505.440.000,00	(11.170.700,00)	97,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0002		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	42.416.700,00	31.250.000,00	(11.166.700,00)	73,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.416.700,00	31.250.000,00	(11.166.700,00)	73,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.416.700,00	31.250.000,00	(11.166.700,00)	73,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	182.200.000,00	182.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.200.000,00	182.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	196.644.000,00	196.640.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	196.644.000,00	196.640.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.644.000,00	196.640.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	256.645.000,00	229.045.000,00	(27.600.000,00)	89,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.580.000,00	40.580.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	111.690.000,00	84.090.000,00	(27.600.000,00)	75,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	111.690.000,00	84.090.000,00	(27.600.000,00)	75,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.690.000,00	84.090.000,00	(27.600.000,00)	75,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	104.375.000,00	104.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.375.000,00	104.375.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN,	1.340.511.160,00	1.338.027.870,00	(1.483.290,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemulihan, Pengolahan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	404.241.080,00	404.210.290,00	(10.890,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.390.000,00	48.390.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	48.390.000,00	48.390.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.827.450,00	47.827.450,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.827.450,00	47.827.450,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003		Pengelolaan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	49.475.000,00	49.450.000,00	(25.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	49.475.000,00	49.450.000,00	(25.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.475.000,00	49.450.000,00	(25.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.843.780,00	47.843.780,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.843.780,00	47.843.780,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	210.704.850,00	210.699.000,00	(5.850,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	210.704.850,00	210.699.000,00	(5.850,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.704.850,00	210.699.000,00	(5.850,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	874.683.280,00	873.030.840,00	(1.652.440,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	463.354.280,00	462.674.680,00	(679.600,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	463.354.280,00	462.674.680,00	(679.600,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.354.280,00	462.674.680,00	(679.600,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Kelawan Pemadam Kebakaran	411.329.000,00	410.356.160,00	(972.840,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	411.329.000,00	410.356.160,00	(972.840,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.329.000,00	410.356.160,00	(972.840,00)	99,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.586.800,00	61.586.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.586.800,00	61.586.800,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.491.068.530,00	8.941.721.888,00	(549.346.942,00)	94,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.238.000,00	25.144.400,00	(83.600,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.056.000,00	6.056.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.056.000,00	6.056.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.3006	5.1	BELANJA OPERASI	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.3006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.3007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.202.000,00	13.118.400,00	(83.600,00)	99,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.3007	5.1	BELANJA OPERASI	13.202.000,00	13.118.400,00	(83.600,00)	99,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.01.3007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.202.000,00	13.118.400,00	(83.600,00)	99,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.597.000,00	2.433.365.748,00	(64.031.252,00)	97,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.472.000,00	2.433.440.748,00	(64.031.252,00)	97,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.497.472.000,00	2.433.440.748,00	(64.031.252,00)	97,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.472.000,00	2.433.440.748,00	(64.031.252,00)	97,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.844.000,00	335.664.000,00	(180.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.3000	1.05.01.2.05.0003		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	335.844.000,00	335.664.000,00	(180.000,00)	99,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	335.344.000,00	335.664.000,00	(180.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.344.000,00	335.664.000,00	(180.000,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.228.830,00	1.390.788.490,00	(64.440.340,00)	95,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.457.880,00	20.457.245,00	(635,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.457.880,00	20.457.245,00	(635,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.457.880,00	20.457.245,00	(635,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.608.950,00	9.607.000,00	(1.950,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.608.950,00	9.607.000,00	(1.950,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.608.950,00	9.607.000,00	(1.950,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	902.660.000,00	902.550.000,00	(110.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	902.660.000,00	902.550.000,00	(110.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	902.660.000,00	902.550.000,00	(110.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.102.000,00	451.774.245,00	(64.327.755,00)	87,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	516.102.000,00	451.774.245,00	(64.327.755,00)	87,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.102.000,00	451.774.245,00	(64.327.755,00)	87,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.515.901.200,00	1.250.910.250,00	(65.090.950,00)	95,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.800.000,00	389.900.000,00	(47.100.000,00)	89,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	437.800.000,00	389.900.000,00	(47.100.000,00)	89,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.800.000,00	389.900.000,00	(47.100.000,00)	89,22	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.991.200,00	234.800.000,00	(191.200,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	234.991.200,00	234.800.000,00	(191.200,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.991.200,00	234.800.000,00	(191.200,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	643.870.000,00	625.510.250,00	(17.559.750,00)	97,26	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	518.870.000,00	500.511.250,00	(17.558.750,00)	96,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	518.870.000,00	500.511.250,00	(17.558.750,00)	96,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.335.959.800,00	3.011.423.000,00	(324.536.800,00)	90,27	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.039.800,00	5.000.000,00	(39.800,00)	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.039.800,00	5.000.000,00	(39.800,00)	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.039.800,00	5.000.000,00	(39.800,00)	98,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.321.900.000,00	2.997.423.000,00	(324.477.000,00)	90,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.321.900.000,00	2.997.423.000,00	(324.477.000,00)	90,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.321.900.000,00	2.997.423.000,00	(324.477.000,00)	90,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.150.000,00	489.126.000,00	(31.024.000,00)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	520.150.000,00	489.126.000,00	(31.024.000,00)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	520.150.000,00	489.126.000,00	(31.024.000,00)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.150.000,00	489.126.000,00	(31.024.000,00)	94,03	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ABDUL SAIFULLAH RAZAK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal :21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.055.868.320,00	4.946.617.317,00	(109.251.003,00)	97,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.266.536.400,00	3.229.374.219,00	(37.162.181,00)	98,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,00	79.796.000,00	(204.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	80.000.000,00	79.796.000,00	(204.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.796.000,00	(204.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.796.000,00	(204.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.893.906.400,00	2.868.630.925,00	(25.275.475,00)	99,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2.653.246.400,00	2.651.155.925,00	(2.090.475,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.653.246.400,00	2.651.155.925,00	(2.090.475,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.653.246.400,00	2.651.155.925,00	(2.090.475,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000,00	34.200.000,00	(5.800.000,00)	85,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	34.200.000,00	(5.800.000,00)	85,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.200.000,00	(5.800.000,00)	85,5	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.275.000,00	(725.000,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.275.000,00	(725.000,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.275.000,00	(725.000,00)	97,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	100.660.000,00	100.550.000,00	(110.000,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2	BELANJA MODAL	100.660.000,00	100.550.000,00	(110.000,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.660.000,00	100.550.000,00	(110.000,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.450.000,00	(1.550.000,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.450.000,00	(1.550.000,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.450.000,00	(1.550.000,00)	96,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengerahan Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	50.050.000,00	42.875.000,00	(7.175.000,00)	85,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000,00	32.875.000,00	(2.125.000,00)	93,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.875.000,00	(2.125.000,00)	93,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.875.000,00	(2.125.000,00)	93,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.050.000,00	10.000.000,00	(5.050.000,00)	66,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.050.000,00	10.000.000,00	(5.050.000,00)	66,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	10.000.000,00	(5.050.000,00)	66,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	242.580.000,00	238.072.294,00	(4.507.706,00)	98,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0003		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	187.580.000,00	187.072.294,00	(507.706,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	187.580.000,00	187.072.294,00	(507.706,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.580.000,00	187.072.294,00	(507.706,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0004		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	20.000.000,00	18.225.000,00	(1.775.000,00)	91,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.225.000,00	(1.775.000,00)	91,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.225.000,00	(1.775.000,00)	91,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana	35.000.000,00	32.775.000,00	(2.225.000,00)	93,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	32.775.000,00	(2.225.000,00)	93,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	32.775.000,00	(2.225.000,00)	93,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.789.331.920,00	1.717.243.098,00	(72.088.822,00)	95,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		Penunjang, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	27.550.000,00	(450.000,00)	98,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	6.500.000,00	6.351.000,00	(149.000,00)	97,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.351.000,00	(149.000,00)	97,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.351.000,00	(149.000,00)	97,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.790.000,00	(210.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.790.000,00	(210.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.790.000,00	(210.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	688.147.000,00	634.499.023,00	(53.647.977,00)	92,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	681.647.000,00	628.090.023,00	(53.556.977,00)	92,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	681.647.000,00	628.090.023,00	(53.556.977,00)	92,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	681.647.000,00	628.090.023,00	(53.556.977,00)	92,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.409.000,00	(91.000,00)	98,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	54.778.000,00	(222.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	55.000.000,00	54.778.000,00	(222.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.778.000,00	(222.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.778.000,00	(222.000,00)	99,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.784.920,00	527.350.494,00	(6.434.426,00)	98,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.784.920,00	23.750.000,00	(34.920,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.784.920,00	23.750.000,00	(34.920,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.784.920,00	23.750.000,00	(34.920,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.200.000,00	(1.800.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	445.402.494,00	(4.597.506,00)	98,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	445.402.494,00	(4.597.506,00)	98,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	445.402.494,00	(4.597.506,00)	98,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.000.000,00	248.366.194,00	(3.633.806,00)	98,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	11.366.194,00	(3.633.806,00)	75,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.366.194,00	(3.633.806,00)	75,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.366.194,00	(3.633.806,00)	75,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.000.000,00	180.298.387,00	(7.700.613,00)	95,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.000.000,00	163.949.387,00	(4.050.613,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.000.000,00	163.949.387,00	(4.050.613,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	163.949.387,00	(4.050.613,00)	97,59	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	16.350.000,00	(3.650.000,00)	81,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	16.350.000,00	(3.650.000,00)	81,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.350.000,00	(3.650.000,00)	81,75	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

DINAS SOSIAL

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal :21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMEBENTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.762.923.272,00	2.682.394.762,30	(80.528.473,00)	97,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	760.000.000,00	729.089.500,30	(910.500,00)	99,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	530.000.000,00	529.880.000,30	(120.000,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	480.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	480.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000,00	9.880.000,30	(120.000,00)	98,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.880.000,30	(120.000,00)	98,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.880.000,30	(120.000,00)	98,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rekan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	230.000.000,00	229.209.500,30	(790.500,00)	99,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,30	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013		Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000,00	9.209.500,30	(790.500,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.209.500,30	(790.500,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.209.500,30	(790.500,00)	92,09	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	178.785.000,00	177.601.000,30	(1.184.000,00)	99,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	15.185.000,00	14.835.000,30	(350.000,00)	97,69	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001		Pengangkatan Anak-Anak Terlantar	5.185.000,00	4.835.000,30	(350.000,00)	93,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.185.000,00	4.835.000,30	(350.000,00)	93,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	4.835.000,30	(350.000,00)	93,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.600.000,00	162.766.000,00	(834.000,00)	99,49	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	99.100.000,00	98.266.000,00	(834.000,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.100.000,00	98.266.000,00	(834.000,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.100.000,00	98.266.000,00	(834.000,00)	98,58	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	139.750.000,00	139.125.000,00	(625.000,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		Pengelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	139.750.000,00	139.125.000,00	(625.000,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.400.000,00	(600.000,00)	96,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	124.750.000,00	124.725.000,00	(25.000,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	124.750.000,00	124.725.000,00	(25.000,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.750.000,00	124.725.000,00	(25.000,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.614.598.272,00	1.536.579.262,00	(77.808.970,00)	95,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	26.860.000,00	(1.140.000,00)	95,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.860.000,00	(1.140.000,00)	92,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.860.000,00	(1.140.000,00)	92,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.860.000,00	(1.140.000,00)	92,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	705.928.000,00	652.744.862,00	(53.183.138,00)	92,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	699.428.000,00	646.244.862,00	(53.183.138,00)	92,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	699.428.000,00	646.244.862,00	(53.183.138,00)	92,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	699.428.000,00	646.244.862,00	(53.183.138,00)	92,39	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.500.000,00	85.470.000,00	(30.000,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	79.976.000,00	(24.000,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.976.000,00	(24.000,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.976.000,00	(24.000,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.546.000,00	287.008.900,00	(550.100,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	28.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.000.000,00	227.488.900,00	(511.100,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	228.000.000,00	227.488.900,00	(511.100,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	227.488.900,00	(511.100,00)	99,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.345.100,00	105.200.000,00	(145.100,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.345.100,00	105.200.000,00	(145.100,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	105.345.100,00	105.200.000,00	(145.100,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.345.100,00	105.200.000,00	(145.100,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	296.250.000,00	273.471.500,00	(22.778.500,00)	92,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.721.500,00	(278.500,00)	95,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.721.500,00	(278.500,00)	95,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.721.500,00	(278.500,00)	95,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000,00	265.500.000,00	(22.500.000,00)	92,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	288.000.000,00	265.500.000,00	(22.500.000,00)	92,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000,00	265.500.000,00	(22.500.000,00)	92,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.825.132,00	105.817.000,00	(8.132,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.825.132,00	90.817.000,00	(8.132,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.825.132,00	90.817.000,00	(8.132,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.825.132,00	90.817.000,00	(8.132,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ABDUL SAFIULLAH RAZAK

DINAS

KETAHANAN PANGAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.018.891.840,00	2.001.228.288,00	(17.663.552,00)	99,12	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	511.072.320,00	510.721.820,00	(350.500,00)	99,93	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	511.072.320,00	510.721.820,00	(350.500,00)	99,93	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	191.101.520,00	191.101.020,00	(500,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.101.520,00	191.101.020,00	(500,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.101.520,00	191.101.020,00	(500,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	228.464.000,00	228.364.000,00	(100.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	228.464.000,00	228.364.000,00	(100.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.464.000,00	228.364.000,00	(100.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	57.846.900,00	57.846.900,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.846.900,00	57.846.900,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016		Pemerataan Nilai Tukar Petani (NTN)	33.658.900,00	33.408.900,00	(250.000,00)	99,25	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	33.658.900,00	33.408.900,00	(250.000,00)	99,25	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.658.900,00	33.408.900,00	(250.000,00)	99,25	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.939.000,00	58.939.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.939.000,00	58.939.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.9.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.439.280.520,00	1.421.997.468,00	(17.283.052,00)	98,79	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000,00	40.850.000,00	(150.000,00)	99,70	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	732.327.000,00	718.384.781,00	(13.942.219,00)	98,09	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	719.327.000,00	705.384.781,00	(13.942.219,00)	98,06	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	719.327.000,00	705.384.781,00	(13.942.219,00)	98,06	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	719.327.000,00	705.384.781,00	(13.942.219,00)	98,06	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.888.000,00	30.813.000,00	(75.000,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.888.000,00	30.813.000,00	(75.000,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.888.000,00	30.813.000,00	(75.000,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05.0002	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	30.888.000,00	30.813.000,00	(75.000,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.068.020,00	380.877.840,00	809.820,00	100,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.912.080,00	3.912.000,00	(80,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.912.080,00	3.912.000,00	(80,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.912.080,00	3.912.000,00	(80,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.556.440,00	26.556.440,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.556.440,00	26.556.440,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.229.500,00	12.834.500,00	1.605.000,00	114,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.229.500,00	12.834.500,00	1.605.000,00	114,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.229.500,00	12.834.500,00	1.605.000,00	114,29	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Sarananya	324.332.000,00	325.536.900,00	(795.100,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	324.332.000,00	325.536.900,00	(795.100,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.332.000,00	325.536.900,00	(795.100,00)	99,75	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.237.500,00	29.230.000,00	(7.500,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0003	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0004		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.817.500,00	17.810.000,00	(7.500,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0004	5.2	BELANJA MODAL	17.817.500,00	17.810.000,00	(7.500,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.817.500,00	17.810.000,00	(7.500,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	84.360.000,00	81.168.847,00	(3.191.153,00)	96,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	15.360.000,00	13.168.847,00	(2.191.153,00)	85,73	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.360.000,00	13.168.847,00	(2.191.153,00)	85,73	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	13.168.847,00	(2.191.153,00)	85,73	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000,00	65.000.000,00	(1.000.000,00)	98,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	65.000.000,00	(1.000.000,00)	98,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	65.000.000,00	(1.000.000,00)	98,48	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.380.000,00	140.623.000,00	(757.000,00)	99,46	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.880.000,00	98.123.000,00	(757.000,00)	99,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.880.000,00	98.123.000,00	(757.000,00)	99,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.880.000,00	98.123.000,00	(757.000,00)	99,23	
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.06.01.9000	2.09.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. IDHAM SAIFULLAH RAZAK

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.000,00	18.970.000,00	3.970.000,00	126,46	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00	18.970.000,00	3.970.000,00	126,46	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000,00	18.970.000,00	3.970.000,00	126,46	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.382.758.552,00	2.328.119.881,00	(54.678.677,00)	97,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.604.500,00	80.604.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.604.500,00	80.604.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	394.039.850,00	393.639.850,00	(400.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	394.039.850,00	393.639.850,00	(400.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.031.090,00	17.631.090,00	(400.000,00)	97,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.031.090,00	17.631.090,00	(400.000,00)	97,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.031.090,00	17.631.090,00	(400.000,00)	97,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	347.328.760,00	347.328.760,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.328.760,00	347.328.760,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.136.500,00	12.136.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.136.500,00	12.136.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.413.642,00	47.413.642,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.413.642,00	47.413.642,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	152.586.750,00	152.586.750,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.586.750,00	152.586.750,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.999.800,00	39.999.800,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.800,00	39.999.800,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.560.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	182.852.160,00	182.852.160,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.852.160,00	182.852.160,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.160.605.330,00	1.406.326.653,00	(54.278.677,00)	96,28	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.350,00	6.500.350,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.350,00	6.500.350,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.161.760,00	10.161.760,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.161.760,00	10.161.760,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	799.360.500,00	758.083.826,00	(41.276.674,00)	94,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	786.360.000,00	745.083.326,00	(41.276.674,00)	94,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	786.360.000,00	745.083.326,00	(41.276.674,00)	94,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	786.360.000,00	745.083.326,00	(41.276.674,00)	94,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.3.01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.813.800,00	8.550.000,00	(12.263.800,00)	41,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.263.800,00	0,00	(12.263.800,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.263.800,00	0,00	(12.263.800,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.263.800,00	0,00	(12.263.800,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.549.400,00	321.523.507,00	(25.893,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.545.400,00	19.544.700,00	(700,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.545.400,00	19.544.700,00	(700,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.545.400,00	19.544.700,00	(700,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.520.000,00	3.519.840,00	(160,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.520.000,00	3.519.840,00	(160,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	3.519.840,00	(160,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.950.000,00	19.949.980,00	(100,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	19.949.980,00	(100,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.949.980,00	(100,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.694.000,00	274.669.067,00	(24.933,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	274.694.000,00	274.669.067,00	(24.933,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.694.000,00	274.669.067,00	(24.933,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.320,00	1.420.320,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.320,00	1.420.320,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.700.000,00	212.586.890,00	(713.110,00)	99,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.000.000,00	55.999.590,00	(410,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	55.999.590,00	(410,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	55.999.590,00	(410,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.190.000,00	83.477.300,00	(712.700,00)	99,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.190.000,00	83.477.300,00	(712.700,00)	99,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.190.000,00	83.477.300,00	(712.700,00)	99,15	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	73.110.000,00	73.110.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.110.000,00	73.110.000,00	0,00	100,00	

Langgur, 11 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN

TAHQUSAHFULLAH RAZAK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran I. 1 PERATURAN DAERAH 2025
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.252.516.168,00	3.822.489.761,00	(230.106.407,00)	92,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	493.205.880,00	493.040.428,00	(165.252,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72.528.140,00	72.448.500,00	(79.640,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	44.954.640,00	44.875.000,00	(79.640,00)	99,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.954.640,00	44.875.000,00	(79.640,00)	99,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.954.640,00	44.875.000,00	(79.640,00)	99,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.573.500,00	27.573.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.573.500,00	27.573.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	79.481.700,00	79.446.700,00	(35.000,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Serta dengan Kebutuhan	79.481.700,00	79.446.700,00	(35.000,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.481.700,00	79.446.700,00	(35.000,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.481.700,00	79.446.700,00	(35.000,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	206.802.970,00	206.733.928,00	(68.612,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98.950.800,00	98.881.388,00	(68.612,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	98.950.800,00	98.881.388,00	(68.612,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.950.800,00	98.881.388,00	(68.612,00)	99,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.387.970,00	43.387.970,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.387.970,00	43.387.970,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.484.600,00	64.484.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.484.600,00	64.484.600,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	134.391.270,00	134.391.270,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.391.270,00	134.391.270,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	244.275.839,00	244.224.550,00	(51.289,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	57.799.919,80	57.750.000,00	(49.919,80)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	57.799.919,80	57.750.000,00	(49.919,80)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.799.919,80	57.750.000,00	(49.919,80)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.799.919,80	57.750.000,00	(49.919,80)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46.477.350,80	46.476.000,00	(1.350,80)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0001		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Penerbitan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Pemeluk yang Beragama Islam	20.737.760,80	20.737.000,00	(760,80)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.737.760,80	20.737.000,00	(760,80)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.737.760,80	20.737.000,00	(760,80)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	25.739.590,00	25.739.000,00	(590,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.739.590,00	25.739.000,00	(590,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.739.590,00	25.739.000,00	(590,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.998.570,00	139.998.550,00	(20,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001		Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	9.999.020,00	9.999.000,00	(20,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.020,00	9.999.000,00	(20,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.020,00	9.999.000,00	(20,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	129.999.550,00	129.999.550,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.999.550,00	129.999.550,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	356.189.769,00	348.493.700,00	(1.696.069,00)	99,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	152.573.806,00	151.421.700,00	(952.106,00)	99,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		Pemutakhiran dan Penyajian Data Kependudukan	39.582.900,00	38.541.000,00	(41.900,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.582.900,00	38.541.000,00	(41.900,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.582.900,00	38.541.000,00	(41.900,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	88.791.066,00	88.981.700,00	(809.366,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.791.066,00	88.981.700,00	(809.366,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.791.066,00	88.981.700,00	(809.366,00)	99,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0003		Sinkronisasi Data untuk Keperluan Pembangunan Daerah	23.999.840,00	23.899.000,00	(100.840,00)	99,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	23.999.840,00	23.899.000,00	(100.840,00)	99,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.999.840,00	23.899.000,00	(100.840,00)	99,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.916.153,00	163.723.000,00	(193.153,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.916.153,00	163.723.000,00	(193.153,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	163.916.153,00	163.723.000,00	(193.153,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.916.153,00	163.723.000,00	(193.153,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.899.810,00	33.349.000,00	(550.810,00)	98,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	33.899.810,00	33.349.000,00	(550.810,00)	98,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.899.810,00	33.349.000,00	(550.810,00)	98,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.899.810,00	33.349.000,00	(550.810,00)	98,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.164.846.880,00	1.936.651.983,00	(228.195.797,00)	89,45	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.746.016,00	39.292.000,00	(454.016,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.872.900,00	14.672.000,00	(200.900,00)	98,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.872.900,00	14.672.000,00	(200.900,00)	98,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.872.900,00	14.672.000,00	(200.900,00)	98,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.873.116,00	24.620.000,00	(253.116,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.873.116,00	24.620.000,00	(253.116,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.873.116,00	24.620.000,00	(253.116,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	843.239.744,00	740.251.815,00	(102.987.929,00)	87,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	830.615.800,00	727.711.815,00	(102.903.985,00)	87,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	830.615.800,00	727.711.815,00	(102.903.985,00)	87,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	830.615.800,00	727.711.815,00	(102.903.985,00)	87,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.372.944,00	6.300.000,00	(72.944,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.372.944,00	6.300.000,00	(72.944,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.372.944,00	6.300.000,00	(72.944,00)	98,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.247.000,00	6.240.000,00	(7.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.247.000,00	6.240.000,00	(7.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.247.000,00	6.240.000,00	(7.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.330.000,00	20.125.000,00	(66.205.000,00)	23,31	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	20.350.000,00	20.125.000,00	(225.000,00)	98,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	20.125.000,00	(225.000,00)	98,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	20.125.000,00	(225.000,00)	98,89	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011		Sosialisasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.980.000,00	0,00	(65.980.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	65.980.000,00	0,00	(65.980.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.980.000,00	0,00	(65.980.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.392.320,00	542.418.897,00	(30.973.423,00)	94,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.560.000,00	1.200.000,00	(360.000,00)	76,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.000,00	1.200.000,00	(360.000,00)	76,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.200.000,00	(360.000,00)	76,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.414.000,00	3.400.000,00	(14.000,00)	99,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.414.000,00	3.400.000,00	(14.000,00)	99,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.414.000,00	3.400.000,00	(14.000,00)	99,59	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.700.320,00	51.700.000,00	(320,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.700.320,00	51.700.000,00	(320,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.320,00	51.700.000,00	(320,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.275.000,00	13.275.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	2.640.000,00	(1.560.000,00)	62,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	2.640.000,00	(1.560.000,00)	62,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.640.000,00	(1.560.000,00)	62,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.143.000,00	428.103.897,00	(29.039.103,00)	93,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	457.143.000,00	428.103.897,00	(29.039.103,00)	93,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.143.000,00	428.103.897,00	(29.039.103,00)	93,64	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.096.800,00	72.091.000,00	(5.800,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.096.800,00	72.091.000,00	(5.800,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	72.096.800,00	72.091.000,00	(5.800,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.096.800,00	72.091.000,00	(5.800,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.886.000,00	435.145.371,00	(14.740.629,00)	96,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	495.000,00	490.000,00	(5.000,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	495.000,00	490.000,00	(5.000,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	490.000,00	(5.000,00)	98,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.591.000,00	39.855.371,00	(14.735.629,00)	73,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.591.000,00	39.855.371,00	(14.735.629,00)	73,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.591.000,00	39.855.371,00	(14.735.629,00)	73,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	394.800.000,00	394.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.800.000,00	394.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.160.000,00	87.327.000,00	(12.833.000,00)	87,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.060.000,00	74.790.000,00	(5.270.000,00)	93,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.060.000,00	74.790.000,00	(5.270.000,00)	93,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.060.000,00	74.790.000,00	(5.270.000,00)	93,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0004		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.100.000,00	12.537.000,00	(7.563.000,00)	62,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.000,00	12.537.000,00	(7.563.000,00)	62,37	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	12.537.000,00	(7.563.000,00)	62,37	

Lapoa, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

BIRU SAIFULLAH RAZAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.360.867.954,00	3.968.343.428,00	(392.524.306,00)	97,13	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	330.199.920,00	281.953.352,00	(48.246.068,00)	85,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330.199.920,00	281.953.352,00	(48.246.068,00)	85,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	130.199.920,00	118.313.852,00	(11.886.068,00)	90,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	130.199.920,00	118.313.852,00	(11.886.068,00)	90,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.199.920,00	118.313.852,00	(11.886.068,00)	90,87	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200.000.000,00	163.640.000,00	(36.360.000,00)	81,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	163.640.000,00	(36.360.000,00)	81,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	163.640.000,00	(36.360.000,00)	81,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.899.451.716,00	1.708.379.325,00	(191.072.391,00)	89,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam	1.899.451.716,00	1.708.379.325,00	(191.072.391,00)	89,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	73.325.000,00	(26.675.000,00)	73,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	73.325.000,00	(26.675.000,00)	73,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	73.325.000,00	(26.675.000,00)	73,32	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	201.604.000,00	201.604.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.604.000,00	201.604.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Balai Rukun Gotong Royong Masyarakat	168.701.741,00	166.052.350,00	(2.649.391,00)	98,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	168.701.741,00	166.052.350,00	(2.649.391,00)	98,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.701.741,00	166.052.350,00	(2.649.391,00)	98,42	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.429.145.975,00	1.267.397.975,00	(161.748.000,00)	88,68	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.429.145.975,00	1.267.397.975,00	(161.748.000,00)	88,68	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.145.975,00	1.267.397.975,00	(161.748.000,00)	88,68	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.031.216.298,00	1.978.010.451,00	(53.205.847,00)	97,38	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.050.000,00	26.622.800,00	(11.427.200,00)	69,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	5.120.000,00	(1.380.000,00)	78,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	5.120.000,00	(1.380.000,00)	78,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.120.000,00	(1.380.000,00)	78,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.500.000,00	4.720.000,00	(1.780.000,00)	72,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	4.720.000,00	(1.780.000,00)	72,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.720.000,00	(1.780.000,00)	72,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.500.000,00	5.142.000,00	(1.358.000,00)	79,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	5.142.000,00	(1.358.000,00)	79,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.142.000,00	(1.358.000,00)	79,10	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.550.000,00	11.640.000,00	(6.910.000,00)	62,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.550.000,00	11.640.000,00	(6.910.000,00)	62,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	11.640.000,00	(6.910.000,00)	62,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.284.666.113,00	1.243.865.024,00	(40.801.089,00)	96,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.284.666.113,00	1.243.865.024,00	(40.801.089,00)	96,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.284.666.113,00	1.243.865.024,00	(40.801.089,00)	96,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.284.666.113,00	1.243.865.024,00	(40.801.089,00)	96,82	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.903.285,00	404.375.427,00	(527.858,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.235.285,00	33.197.000,00	(38.285,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.235.285,00	33.197.000,00	(38.285,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.235.285,00	33.197.000,00	(38.285,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.029.000,00	2.690.000,00	(339.000,00)	88,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.029.000,00	2.690.000,00	(339.000,00)	88,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.029.000,00	2.690.000,00	(339.000,00)	88,80	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.144.000,00	18.075.000,00	(69.000,00)	99,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.144.000,00	18.075.000,00	(69.000,00)	99,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.144.000,00	18.075.000,00	(69.000,00)	99,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	342.685.800,00	342.603.427,00	(81.573,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	342.685.800,00	342.603.427,00	(81.573,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.685.800,00	342.603.427,00	(81.573,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.798.900,00	36.798.000,00	(900,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.798.900,00	36.798.000,00	(900,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	36.798.900,00	36.798.000,00	(900,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.798.900,00	36.798.000,00	(900,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.308.000,00	132.205.800,00	(102.000,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0081	5.1	BELANJA OPERASI	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0081	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0082		Penyediaan Jasa Kemanikan, Sumber Daya Air dan Listrik	5.918.000,00	5.815.000,00	(103.000,00)	98,25	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0082	5.1	BELANJA OPERASI	5.918.000,00	5.815.000,00	(103.000,00)	98,25	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0082	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.918.000,00	5.815.000,00	(103.000,00)	98,25	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0084	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0084	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.690.000,00	121.345.000,00	(345.000,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0081		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.690.000,00	121.345.000,00	(345.000,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0081	5.1	BELANJA OPERASI	121.690.000,00	121.345.000,00	(345.000,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0081	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.690.000,00	121.345.000,00	(345.000,00)	99,71	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIEQI SAIFULLAH RAZAK

DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.982.805.120,00	3.912.448.397,00	(70.156.723,00)	98,23	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	455.500.000,00	455.084.000,00	(416.000,00)	99,90	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.600.000,00	99.584.000,00	(416.000,00)	99,58	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	67.600.000,00	66.584.000,00	(416.000,00)	98,57	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.600.000,00	66.584.000,00	(416.000,00)	98,57	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.600.000,00	66.584.000,00	(416.000,00)	98,57	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	311.500.000,00	311.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.500.000,00	311.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	667.500.000,00	662.575.000,00	(4.925.000,00)	99,26	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	417.475.000,00	417.005.000,00	(470.000,00)	99,88	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	417.475.000,00	417.005.000,00	(470.000,00)	99,88	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	417.475.000,00	417.005.000,00	(470.000,00)	99,88	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.475.000,00	417.005.000,00	(470.000,00)	99,88	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250.025.000,00	245.570.000,00	(4.455.000,00)	98,21	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.025.000,00	245.570.000,00	(4.455.000,00)	98,21	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	136.025.000,00	131.970.000,00	(4.055.000,00)	97,01	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.025.000,00	131.970.000,00	(4.055.000,00)	97,01	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	114.000.000,00	113.600.000,00	(400.000,00)	99,64	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.000.000,00	113.600.000,00	(400.000,00)	99,64	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.700.000,00	157.700.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.8.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.421.805.120,00	2.357.389.397,00	(64.815.723,00)	97,32	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.500.000,00	35.732.000,00	(768.000,00)	97,89	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.232.000,00	(768.000,00)	94,87	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.232.000,00	(768.000,00)	94,87	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.232.000,00	(768.000,00)	94,87	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.512.315.000,00	1.445.337.513,00	(66.977.487,00)	95,57	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.499.315.000,00	1.432.347.513,00	(66.967.487,00)	95,53	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.499.315.000,00	1.432.347.513,00	(66.967.487,00)	95,53	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.499.315.000,00	1.432.347.513,00	(66.967.487,00)	95,53	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	99,84	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	99,84	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.490.000,00	(10.000,00)	99,84	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.800.000,00	20.700.000,00	(100.000,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.800.000,00	20.700.000,00	(100.000,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	20.700.000,00	(100.000,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	20.700.000,00	(100.000,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.666.000,00	369.937.608,00	4.271.608,00	101,16	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.695.000,00	30.693.500,00	(1.500,00)	99,99	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.695.000,00	30.693.500,00	(1.500,00)	99,99	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.695.000,00	30.693.500,00	(1.500,00)	99,99	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.015.000,00	17.485.000,00	2.470.000,00	116,45	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.015.000,00	17.485.000,00	2.470.000,00	116,45	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	17.485.000,00	2.470.000,00	116,45	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.456.000,00	305.309.108,00	1.853.108,00	100,61	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	303.456.000,00	305.309.108,00	1.853.108,00	100,61	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.456.000,00	305.309.108,00	1.853.108,00	100,61	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.510.000,00	374.798.400,00	(711.600,00)	99,81	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.288.400,00	(711.600,00)	88,14	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.288.400,00	(711.600,00)	88,14	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.288.400,00	(711.600,00)	88,14	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	367.500.000,00	367.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.500.000,00	367.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.750.120,00	109.219.876,00	(530.244,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.750.120,00	109.219.876,00	(530.244,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.750.120,00	109.219.876,00	(530.244,00)	99,51	
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.750.120,00	109.219.876,00	(530.244,00)	99,51	

Unaaha, 11 Agustus 2015
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH AZAK

DINAS

PERHUBUNGAN

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		SERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	77.500.000,00	66.837.000,00	(10.663.000,00)	86,24	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.500.000,00	66.837.000,00	(10.663.000,00)	86,24	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	77.500.000,00	66.837.000,00	(10.663.000,00)	86,24	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.395.375.500,00	9.086.453.579,00	(308.921.721,00)	96,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.781.626.500,00	2.717.047.000,00	(64.579.500,00)	97,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.881.527.500,00	1.816.986.000,00	(64.541.500,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.821.527.500,00	1.756.986.000,00	(64.541.500,00)	96,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.005.000,00	82.500.000,00	(1.505.000,00)	98,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.005.000,00	82.500.000,00	(1.505.000,00)	98,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.737.522.500,00	1.674.486.000,00	(63.036.500,00)	96,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.722.500,00	528.408.000,00	(67.332.500,00)	88,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	735.000.000,00	699.296.000,00	(35.704.000,00)	95,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	680.000.000,00	598.880.000,00	(1.120.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0009		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	680.000.000,00	598.880.000,00	(1.120.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	680.000.000,00	598.880.000,00	(1.120.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0009	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	680.000.000,00	598.880.000,00	(1.120.000,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	230.728.000,00	210.711.000,00	(18.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	230.728.000,00	210.711.000,00	(18.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	230.728.000,00	230.711.000,00	(18.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.728.000,00	230.711.000,00	(18.000,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.515.000,00	15.515.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.515.000,00	15.515.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.855.000,00	67.855.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.855.000,00	67.855.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.703.713.000,00	3.575.416.000,00	(128.297.000,00)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12		Pembangunan, Pemeliharaan Area Pendaratan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.703.713.000,00	3.575.416.000,00	(128.297.000,00)	96,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.692.513.000,00	3.564.246.000,00	(128.267.000,00)	96,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	626.000.000,00	555.928.500,00	(70.071.500,00)	88,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.000.000,00	555.928.500,00	(70.071.500,00)	88,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.066.513.000,00	3.008.317.500,00	(58.195.500,00)	98,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.766.513.000,00	2.700.817.500,00	(65.695.500,00)	97,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	298.500.000,00	(1.500.000,00)	99,5	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.200.000,00	11.170.000,00	(30.000,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.170.000,00	(30.000,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.170.000,00	(30.000,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.896.035.500,00	2.783.690.579,00	(112.845.221,00)	96,10	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.000.000,00	42.950.000,00	(50.000,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.950.000,00	(50.000,00)	99,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.2	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.449.585.000,00	1.255.557.579,00	(96.027.421,00)	93,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.585.000,00	1.346.557.579,00	(96.027.421,00)	93,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.442.585.000,00	1.346.557.579,00	(96.027.421,00)	93,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.442.585.000,00	1.346.557.579,00	(96.027.421,00)	93,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.85.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.85.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.86		Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.023.250,00	429.782.000,00	(241.250,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.86.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	572.000,00	560.000,00	(12.000,00)	97,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.86.0003	5.1	BELANJA OPERASI	572.000,00	560.000,00	(12.000,00)	97,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.000,00	560.000,00	(12.000,00)	97,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.228.650,00	75.215.000,00	(5.650,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.228.650,00	75.215.000,00	(5.650,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.228.650,00	75.215.000,00	(5.650,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.118.000,00	14.070.000,00	(40.000,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.118.000,00	14.070.000,00	(40.000,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.118.000,00	14.070.000,00	(40.000,00)	99,71	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.849.000,00	19.849.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.849.000,00	19.849.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008		Fasilitasi Kegiatan Tamu	44.988.000,00	44.980.000,00	(8.000,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	44.988.000,00	44.980.000,00	(8.000,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.988.000,00	44.980.000,00	(8.000,00)	99,98	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.293.600,00	475.117.000,00	(176.600,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	475.293.600,00	475.117.000,00	(176.600,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.293.600,00	475.117.000,00	(176.600,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.843.600,00	92.065.000,00	(778.600,00)	99,16	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)	98,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)	98,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)	98,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12.843.600,00	12.765.000,00	(78.600,00)	99,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	5.2	BELANJA MODAL	12.843.600,00	12.765.000,00	(78.600,00)	99,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.843.600,00	12.765.000,00	(78.600,00)	99,38	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.350.000,00	154.952.000,00	(3.398.000,00)	97,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.892.000,00	(8.000,00)	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.892.000,00	(8.000,00)	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.892.000,00	(8.000,00)	99,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.350.000,00	12.960.000,00	(3.390.000,00)	79,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	12.960.000,00	(3.390.000,00)	79,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	12.960.000,00	(3.390.000,00)	79,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.233.950,00	516.784.000,00	(12.449.950,00)	97,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.210.000,00	36.145.000,00	(2.065.000,00)	94,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.210.000,00	36.145.000,00	(2.065.000,00)	94,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.210.000,00	36.145.000,00	(2.065.000,00)	94,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.234.650,00	184.915.000,00	(319.650,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	185.234.650,00	184.915.000,00	(319.650,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.234.650,00	184.915.000,00	(319.650,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.164.500,00	264.099.000,00	(10.065.500,00)	96,33	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	247.087.000,00	237.021.500,00	(10.065.500,00)	95,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.087.000,00	237.021.500,00	(10.065.500,00)	95,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	27.077.500,00	27.077.500,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.077.500,00	27.077.500,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.99.0011	5.2	BELANJA MODAL	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.99.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	100,00	

Langara, 22 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAEFULLAH MAZAK

DINAS KOMINFO, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Lampiran I.1 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	9.181.913.905,00	9.121.191.195,00	(60.723.715,00)	98,54	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.329.360.930,00	1.323.824.100,00	(5.539.830,00)	99,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.329.360.930,00	1.323.824.100,00	(5.539.830,00)	99,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004		Pengelolaan Konten dan Penyusunan Media Komunikasi Publik	227.485.000,00	225.084.100,00	(2.400.900,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	227.485.000,00	225.084.100,00	(2.400.900,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.485.000,00	225.084.100,00	(2.400.900,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	61.875.930,00	58.820.000,00	(3.055.930,00)	95,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.920.000,00	33.920.000,00	(3.000.000,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.920.000,00	33.920.000,00	(3.000.000,00)	91,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	24.955.930,00	24.900.000,00	(55.930,00)	99,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.955.930,00	24.900.000,00	(55.930,00)	99,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.227.763.728,00	1.224.446.789,00	(3.316.939,00)	99,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.113.763.728,00	1.110.582.789,00	(3.180.939,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.113.763.728,00	1.110.582.789,00	(3.180.939,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.113.763.728,00	1.110.582.789,00	(3.180.939,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.763.728,00	1.110.582.789,00	(3.180.939,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	114.000.000,00	113.864.000,00	(136.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008		Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah	114.000.000,00	113.864.000,00	(136.000,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.964.000,00	(36.000,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.964.000,00	(36.000,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	18.900.000,00	(100.000,00)	99,47	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.900.000,00	(100.000,00)	99,47	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.624.760.250,00	1.572.921.306,00	(51.838.944,00)	96,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.096.000,00	59.969.000,00	(7.127.000,00)	89,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.040.000,00	37.711.000,00	(3.329.000,00)	91,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.040.000,00	37.711.000,00	(3.329.000,00)	91,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.040.000,00	37.711.000,00	(3.329.000,00)	91,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.650.000,00	11.492.000,00	(158.000,00)	98,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.650.000,00	11.492.000,00	(158.000,00)	98,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	11.492.000,00	(158.000,00)	98,64	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.400.000,00	10.760.000,00	(3.640.000,00)	74,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	10.760.000,00	(3.640.000,00)	74,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	10.760.000,00	(3.640.000,00)	74,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	869.428.700,00	833.055.069,00	(36.373.631,00)	96,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	869.928.700,00	815.923.069,00	(54.005.631,00)	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	869.928.700,00	815.923.069,00	(54.005.631,00)	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	869.928.700,00	815.923.069,00	(54.005.631,00)	93,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	6.190.000,00	(310.000,00)	95,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.190.000,00	(310.000,00)	95,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.190.000,00	(310.000,00)	95,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.000.000,00	12.942.000,00	(58.000,00)	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.942.000,00	(58.000,00)	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.942.000,00	(58.000,00)	99,55	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.450.000,00	2.036.900,00	(413.100,00)	83,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.450.000,00	2.036.900,00	(413.100,00)	83,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.036.900,00	(413.100,00)	83,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.036.900,00	(413.100,00)	83,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.264.000,00	35.685.000,00	(579.000,00)	98,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.950.000,00	24.800.000,00	(150.000,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.950.000,00	24.800.000,00	(150.000,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	24.800.000,00	(150.000,00)	99,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.314.000,00	10.885.000,00	(429.000,00)	96,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.314.000,00	10.885.000,00	(429.000,00)	96,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.314.000,00	10.885.000,00	(429.000,00)	96,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.245.050,00	472.856.087,00	(1.388.963,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	924.000,00	(76.000,00)	92,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	924.000,00	(76.000,00)	92,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	924.000,00	(76.000,00)	92,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0802		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.468.800,00	4.290.000,00	(178.800,00)	96,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	286.000,00	120.000,00	(166.000,00)	41,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.000,00	120.000,00	(166.000,00)	41,95	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.180.000,00	4.170.000,00	(10.000,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.180.000,00	4.170.000,00	(10.000,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.192.050,00	27.192.050,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.192.050,00	27.192.050,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.953.050,00	(46.950,00)	99,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.953.050,00	(46.950,00)	99,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.953.050,00	(46.950,00)	99,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000,00	4.520.000,00	(520.000,00)	89,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	4.520.000,00	(520.000,00)	89,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.520.000,00	(520.000,00)	89,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000,00	15.601.000,00	(149.000,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.601.000,00	(149.000,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.601.000,00	(149.000,00)	99,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.847.000,00	410.375.987,00	(471.013,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	410.847.000,00	410.375.987,00	(471.013,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.847.000,00	410.375.987,00	(471.013,00)	99,88	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	13.900.000,00	(100.000,00)	99,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.120.500,00	80.048.000,00	(72.500,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000,00	3.120.000,00	(30.000,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.120.000,00	(30.000,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.120.000,00	(30.000,00)	99,04	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.970.500,00	9.928.000,00	(42.500,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.970.500,00	9.928.000,00	(42.500,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.970.500,00	9.928.000,00	(42.500,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.340.000,00	69.577.250,00	(7.762.750,00)	89,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0005		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.510.000,00	61.546.750,00	(5.963.250,00)	91,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.510.000,00	61.546.750,00	(5.963.250,00)	91,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.510.000,00	61.546.750,00	(5.963.250,00)	91,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.100.000,00	1.900.500,00	(199.500,00)	90,5	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.900.500,00	(199.500,00)	90,5	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.900.500,00	(199.500,00)	90,5	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.530.000,00	1.930.000,00	(1.600.080,00)	54,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	1.930.000,00	(1.600.080,00)	54,67	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	1.930.000,00	(1.600.080,00)	54,67	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ABDULLAH RAZAK

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	14.644.500,00	(5.355.500,00)	73,22	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	14.644.500,00	(5.355.500,00)	73,22	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	14.644.500,00	(5.355.500,00)	73,22	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.176.594.070,00	2.132.846.124,00	(43.747.946,00)	98,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.483.826,00	66.732.000,00	(751.826,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01		Penerbitan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67.483.826,00	66.732.000,00	(751.826,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004		Pelaksanaan Proses Penerbitan dan Pengawasan Koperasi yang Wilyah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	67.483.826,00	66.732.000,00	(751.826,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	67.483.826,00	66.732.000,00	(751.826,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.483.826,00	66.732.000,00	(751.826,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	61.025.900,00	59.875.900,00	(1.150.000,00)	98,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.025.900,00	59.875.900,00	(1.150.000,00)	98,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengelolaan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	61.025.900,00	59.875.900,00	(1.150.000,00)	98,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	61.025.900,00	59.875.900,00	(1.150.000,00)	98,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.025.900,00	59.875.900,00	(1.150.000,00)	98,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	93.890.900,00	92.840.000,00	(1.050.900,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	93.890.900,00	92.840.000,00	(1.050.900,00)	98,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	57.850.900,00	56.800.000,00	(1.050.900,00)	98,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	57.850.900,00	56.800.000,00	(1.050.900,00)	98,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.850.900,00	56.800.000,00	(1.050.900,00)	98,18	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.001	5.1	BELANJA OPERASI	36.040.000,00	36.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.040.000,00	36.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.952.595.444,00	1.913.308.224,00	(39.195.220,00)	97,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.505.614,00	28.483.900,00	(22.714,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	6.433.000,00	6.433.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.433.000,00	6.433.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.906,00	6.499.908,00	(6,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.906,00	6.499.908,00	(6,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.906,00	6.499.908,00	(6,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.972.708,00	15.950.000,00	(22.708,00)	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	15.972.708,00	15.950.000,00	(22.708,00)	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.972.708,00	15.950.000,00	(22.708,00)	99,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.967.750,00	832.179.677,00	(26.788.073,00)	96,88	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.800		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.468.042,00	825.680.177,00	(26.787.865,00)	96,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.800	5.1	BELANJA OPERASI	852.468.042,00	825.680.177,00	(26.787.865,00)	96,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.800	5.1.01	Belanja Pegawai	852.468.042,00	825.680.177,00	(26.787.865,00)	96,85	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.8004		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.498.708,00	6.498.500,00	(208,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.800	5.1	BELANJA OPERASI	6.498.708,00	6.498.500,00	(208,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.800	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.498.708,00	6.498.500,00	(208,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.469.544,00	506.432.310,00	(37.234,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.318.444,00	34.318.400,00	(44,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	34.318.444,00	34.318.400,00	(44,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.318.444,00	34.318.400,00	(44,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.638.100,00	33.633.244,00	(4.856,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	33.638.100,00	33.633.244,00	(4.856,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.638.100,00	33.633.244,00	(4.856,00)	99,98	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.087.000,00	52.080.000,00	(7.000,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	52.087.000,00	52.080.000,00	(7.000,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.087.000,00	52.080.000,00	(7.000,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0006		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.586.000,00	382.560.666,00	(25.334,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	382.586.000,00	382.560.666,00	(25.334,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.586.000,00	382.560.666,00	(25.334,00)	99,99	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.475.600,00	97.400.000,00	(75.600,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.475.600,00	97.400.000,00	(75.600,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.000	5.2	BELANJA MODAL	97.475.600,00	97.400.000,00	(75.600,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.475.600,00	97.400.000,00	(75.600,00)	99,92	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.304.936,00	356.314.597,00	(12.190.339,00)	96,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1	BELANJA OPERASI	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0009		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.899.936,00	30.959.597,00	(940.339,00)	97,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1	BELANJA OPERASI	31.899.936,00	30.959.597,00	(940.339,00)	97,05	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.899.936,00	30.959.597,00	(940.339,00)	97,05	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00	318.750.000,00	(11.250.000,00)	96,59	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1	BELANJA OPERASI	330.000.000,00	318.750.000,00	(11.250.000,00)	96,59	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	318.750.000,00	(11.250.000,00)	96,59	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.470.000,00	92.388.740,00	(81.260,00)	99,91	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.000 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.470.000,00	92.388.740,00	(81.260,00)	99,91	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.000	5.1	BELANJA OPERASI	92.470.000,00	92.388.740,00	(81.260,00)	99,91	
2.17	2.17.3.38.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.470.000,00	92.388.740,00	(81.260,00)	99,91	

Unaaraa, 31 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

HIDAYATULLAH RAZAK

DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	436.411.060,00	434.368.897,00	(2.042.162,00)	99,53	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.7.05		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	416.129.845,00	415.697.897,00	(431.948,00)	99,89	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	488.253.445,00	407.823.497,00	(431.948,00)	99,89	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	303.253.445,00	302.829.372,00	(424.073,00)	99,86	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	303.253.445,00	302.829.372,00	(424.073,00)	99,86	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.253.445,00	302.829.372,00	(424.073,00)	99,86	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	185.000.000,00	104.992.125,00	(7.875,00)	99,99	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	185.000.000,00	104.992.125,00	(7.875,00)	99,99	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.000.000,00	104.992.125,00	(7.875,00)	99,99	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.876.400,00	7.876.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.876.400,00	7.876.400,00	0,00	100,00	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20.281.215,00	18.671.000,00	(1.610.215,00)	92,06	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.281.215,00	18.671.000,00	(1.610.215,00)	92,06	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9.184.000,00	9.179.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.184.000,00	9.179.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.184.000,00	9.179.000,00	(5.000,00)	99,94	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11.097.215,00	9.492.000,00	(1.605.215,00)	85,55	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.097.215,00	9.492.000,00	(1.605.215,00)	85,55	
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.097.215,00	9.492.000,00	(1.605.215,00)	85,55	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.495.472.894,00	2.404.738.184,00	(90.733.990,00)	96,36	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.940.000,00	19.931.160,00	(8.840,00)	99,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.940.000,00	19.931.160,00	(8.840,00)	99,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.940.000,00	19.931.160,00	(8.840,00)	99,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.940.000,00	19.931.160,00	(8.840,00)	99,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.940.000,00	19.931.160,00	(8.840,00)	99,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	123.254.638,00	123.246.294,00	(8.536,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	123.254.638,00	123.246.294,00	(8.536,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	123.254.638,00	123.246.294,00	(8.536,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	123.254.638,00	123.246.294,00	(8.536,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.254.638,00	123.246.294,00	(8.536,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	355.089.800,00	354.888.600,00	(200.500,00)	99,94	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.089.800,00	354.888.600,00	(200.500,00)	99,94	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	355.089.800,00	354.888.600,00	(200.500,00)	99,94	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	355.089.800,00	354.888.600,00	(200.500,00)	99,94	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.089.800,00	354.888.600,00	(200.500,00)	99,94	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.952.188.264,00	1.871.471.110,00	(80.716.154,00)	95,87	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.300.000,00	50.614.226,00	(685.774,00)	97,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.700.000,00	3.200.000,00	(500.000,00)	86,48	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.200.000,00	(500.000,00)	86,48	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.200.000,00	(500.000,00)	86,48	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.300.000,00	16.134.226,00	(165.774,00)	98,98	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.300.000,00	16.134.226,00	(165.774,00)	98,98	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.134.226,00	(165.774,00)	98,98	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	925.737.044,00	851.270.330,00	(74.466.714,00)	91,95	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.637.044,00	845.170.330,00	(78.466.714,00)	91,50	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	923.637.044,00	845.170.330,00	(78.466.714,00)	91,50	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	923.637.044,00	845.170.330,00	(78.466.714,00)	91,50	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.400.000,00	6.380.000,00	(20.000,00)	99,68	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.400.000,00	6.380.000,00	(20.000,00)	99,68	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.380.000,00	(20.000,00)	99,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	6.580.000,00	(20.000,00)	99,68	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05		Administrasi Kependudukan Pencatatan Daerah	109.158.000,00	108.638.796,00	(519.204,00)	99,52	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.158.000,00	63.638.796,00	(519.204,00)	99,19	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	64.158.000,00	63.638.796,00	(519.204,00)	99,19	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.158.000,00	63.638.796,00	(519.204,00)	99,19	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Pemerintah Daerah	535.484.556,00	534.969.818,00	(544.738,00)	99,89	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.867.000,00	9.867.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.867.000,00	9.867.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.282.556,00	49.262.500,00	(56,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.262.556,00	49.262.500,00	(56,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.262.556,00	49.262.500,00	(56,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.599.000,00	12.559.700,00	(300,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	12.559.700,00	(300,00)	99,98	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.559.700,00	(300,00)	99,98	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.969.000,00	459.420.618,00	(544.382,00)	99,88	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	459.965.000,00	459.420.618,00	(544.382,00)	99,88	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.965.000,00	459.420.618,00	(544.382,00)	99,88	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.164.300,00	140.134.880,00	(169.920,00)	99,87	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.164.300,00	122.134.880,00	(169.920,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	122.164.300,00	122.134.880,00	(169.920,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.164.300,00	122.134.880,00	(169.920,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.733.964,00	139.622.100,00	(111.764,00)	99,92	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	19.733.864,00	19.622.100,00	(111.764,00)	99,43	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.733.864,00	19.622.100,00	(111.764,00)	99,43	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.733.864,00	19.622.100,00	(111.764,00)	99,43	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ROOSAIFELLAH RAZAK

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.450.583.591,00	6.148.434.122,00	(301.949.469,00)	95,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	4.354.760.449,00	4.339.511.822,00	(15.246.627,00)	99,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.969.789.549,00	3.964.517.922,00	(5.271.627,00)	99,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	280.727.010,00	280.496.600,00	(230.410,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.727.010,00	80.546.600,00	(180.410,00)	99,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.727.010,00	80.546.600,00	(180.410,00)	99,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.950.000,00	(50.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	199.950.000,00	(50.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	527.436.339,00	526.390.124,00	(1.046.215,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	277.858.339,00	277.840.124,00	(888.215,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.858.339,00	277.840.124,00	(888.215,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	249.500.000,00	249.350.000,00	(150.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.500.000,00	249.350.000,00	(150.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003		Pengembangan Koleksi Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.699.479.500,00	1.696.829.448,00	(2.650.052,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.479.500,00	99.301.823,00	(177.677,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.479.500,00	99.301.823,00	(177.677,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	1.597.527.625,00	(2.472.375,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.600.000.000,00	1.597.527.625,00	(2.472.375,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.599.000,00	88.599.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.599.000,00	88.599.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	102.156.300,00	101.583.400,00	(572.900,00)	99,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	102.156.300,00	101.583.400,00	(572.900,00)	99,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.156.300,00	101.583.400,00	(572.900,00)	99,43	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.655.600,00	111.655.600,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.655.600,00	111.655.600,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	553.151.000,00	552.951.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	53.151.000,00	53.151.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.151.000,00	53.151.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	499.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	499.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	364.320.790,00	363.764.190,00	(555.600,00)	99,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	164.320.790,00	164.320.690,00	(100,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.320.790,00	164.320.690,00	(100,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.444.500,00	(555.500,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	199.444.500,00	(555.500,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Lembaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.261.190,00	242.246.739,00	(14.460,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	242.261.190,00	242.246.739,00	(14.460,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.261.190,00	242.246.739,00	(14.460,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.968.900,00	374.993.906,00	(9.975.000,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	52.798.900,00	52.748.900,00	(50.000,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.798.900,00	52.748.900,00	(50.000,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.798.900,00	52.748.900,00	(50.000,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000,00	269.525.000,00	(475.000,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	270.000.000,00	269.525.000,00	(475.000,00)	99,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.525.000,00	(475.000,00)	99,76	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	62.170.000,00	52.720.000,00	(9.450.000,00)	84,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	62.170.000,00	52.720.000,00	(9.450.000,00)	84,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.170.000,00	52.720.000,00	(9.450.000,00)	84,79	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.095.655.142,00	1.888.922.300,00	(206.702.842,00)	86,31	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.741.000,00	35.723.000,00	(18.000,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.757.900,00	22.739.900,00	(18.000,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.757.900,00	22.739.900,00	(18.000,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.757.900,00	22.739.900,00	(18.000,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.246.397.956,00	1.021.246.834,00	(275.121.142,00)	78,77	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.289.875.956,00	1.014.754.834,00	(275.121.142,00)	78,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.289.875.956,00	1.014.754.834,00	(275.121.142,00)	78,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.289.875.956,00	1.014.754.834,00	(275.121.142,00)	78,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.082.520,00	303.568.624,00	(1.513.896,00)	99,50	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.000,00	1.108.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga	10.018.000,00	10.000.000,00	(18.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.618.000,00	1.618.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	52.200.000,00	52.185.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.200.000,00	52.185.000,00	(15.000,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.094.400,00	16.093.680,00	(720,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.094.400,00	16.093.680,00	(720,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.094.400,00	16.093.680,00	(720,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.489.000,00	12.489.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.489.000,00	12.489.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.788.200,00	10.298.000,00	(1.490.200,00)	87,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.788.200,00	10.298.000,00	(1.490.200,00)	87,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.788.200,00	10.298.000,00	(1.490.200,00)	87,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	4.969.920,00	4.968.000,00	(920,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.969.920,00	4.968.000,00	(920,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.969.920,00	4.968.000,00	(920,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.882.000,00	191.874.944,00	(7.056,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	191.882.000,00	191.874.944,00	(7.056,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.882.000,00	191.874.944,00	(7.056,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.130.058,00	359.311.965,00	(4.818.988,00)	98,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.130.950,00	41.311.962,00	(4.818.988,00)	89,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.130.950,00	41.311.962,00	(4.818.988,00)	89,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.130.950,00	41.311.962,00	(4.818.988,00)	89,55	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.851.816,00	49.621.000,00	(5.230.816,00)	90,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.851.816,00	49.621.000,00	(5.230.816,00)	90,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.851.816,00	49.621.000,00	(5.230.816,00)	90,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.851.816,00	49.621.000,00	(5.230.816,00)	90,46	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	130.750.450,00	127.711.360,00	(3.039.090,00)	97,67	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	130.750.450,00	127.711.360,00	(3.039.090,00)	97,67	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	39.649.888,00	39.023.880,00	(626.100,00)	98,21	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	29.549.904,00	29.023.880,00	(526.100,00)	98,21	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.549.904,00	29.023.880,00	(526.100,00)	98,21	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.549.904,00	29.023.880,00	(526.100,00)	98,21	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	63.025.550,00	60.042.000,00	(1.983.550,00)	96,80	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0003		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	62.025.550,00	60.042.000,00	(1.983.550,00)	96,80	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.025.550,00	60.042.000,00	(1.983.550,00)	96,80	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.025.550,00	60.042.000,00	(1.983.550,00)	96,80	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	39.175.800,00	38.645.560,00	(529.440,00)	98,64	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	39.175.800,00	38.645.560,00	(529.440,00)	98,64	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.175.800,00	38.645.560,00	(529.440,00)	98,64	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.175.800,00	38.645.560,00	(529.440,00)	98,64	

Langara, 31 Agustus 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH BAZAK

DINAS PERIKANAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2026
Nomor : 2 Tahun
Tanggal : 31 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.878.908.197,00	5.627.272.793,00	(251.630.404,00)	95,71	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	2.242.176.712,00	2.142.244.773,00	(99.931.939,00)	95,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.242.176.712,00	2.142.244.773,00	(99.931.939,00)	95,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	2.078.656.000,00	2.031.554.809,00	(47.101.191,00)	97,73	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.054.089.000,00	2.031.554.809,00	(22.534.191,00)	98,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.425.160,00	223.991.809,00	(21.433.351,00)	91,10	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.808.665.840,00	1.807.963.000,00	(702.840,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	24.567.000,00	0,00	(24.567.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.567.000,00	0,00	(24.567.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	163.520.712,00	110.689.964,00	(52.830.748,00)	67,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.520.712,00	110.689.964,00	(52.830.748,00)	67,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.520.712,00	110.689.964,00	(52.830.748,00)	67,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	942.616.918,00	931.069.800,00	(11.546.118,00)	98,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	181.301.050,00	174.887.800,00	(6.413.250,00)	96,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	77.709.118,00	71.962.800,00	(5.746.318,00)	92,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.709.118,00	71.962.800,00	(5.746.318,00)	92,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.709.118,00	71.962.800,00	(5.746.318,00)	92,60	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	54.505.668,00	53.839.000,00	(666.668,00)	98,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.505.668,00	53.839.000,00	(666.668,00)	98,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.505.668,00	53.839.000,00	(666.668,00)	98,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		Pemberian Penghargaan, Kemudahan Akses Iptek Pengelolaan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49.086.260,00	49.086.000,00	(260,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.086.260,00	49.086.000,00	(260,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.086.260,00	49.086.000,00	(260,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	761.314.880,00	756.182.000,00	(5.132.880,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.136.880,00	11.100.000,00	(1.036.880,00)	91,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.136.880,00	11.100.000,00	(1.036.880,00)	91,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.136.880,00	11.100.000,00	(1.036.880,00)	91,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		Pengawasan Ketersediaan Benih Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	749.178.000,00	745.082.000,00	(4.096.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	749.178.000,00	745.082.000,00	(4.096.000,00)	99,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.224.000,00	26.024.000,00	(3.200.000,00)	89,05	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	719.954.000,00	719.058.000,00	(896.000,00)	99,87	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	126.359.360,00	126.139.000,00	(120.360,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	126.259.360,00	126.139.000,00	(120.360,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota	126.259.360,00	126.139.000,00	(120.360,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	126.259.360,00	126.139.000,00	(120.360,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.259.360,00	126.139.000,00	(120.360,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	133.115.060,00	132.870.000,00	(245.060,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		Pemberian Merk dan Sertifikasi Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	133.115.060,00	132.870.000,00	(245.060,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001		Pelaksanaan Sertifikasi dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	133.115.060,00	132.870.000,00	(245.060,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	133.115.060,00	132.870.000,00	(245.060,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.115.060,00	132.870.000,00	(245.060,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.434.736.155,00	2.294.949.220,00	(139.786.935,00)	94,25	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.951.499,00	36.273.500,00	(5.677.999,00)	86,46	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.172.393,00	12.894.293,00	(1.278.000,00)	90,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.172.393,00	12.894.293,00	(1.278.000,00)	90,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.172.393,00	12.894.393,00	(1.278.000,00)	90,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.499.796,00	3.320.607,00	(3.279.189,00)	49,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.796,00	3.320.607,00	(3.279.189,00)	49,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.796,00	3.320.607,00	(3.279.189,00)	49,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.976.510,00	3.976.800,00	(310,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.976.510,00	3.976.800,00	(310,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.976.510,00	3.976.800,00	(310,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.302.800,00	16.982.500,00	(320.300,00)	98,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.302.800,00	16.982.500,00	(320.300,00)	98,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.342.900,00	16.992.500,00	(320.300,00)	98,14	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.221.818.000,00	1.158.048.935,00	(63.769.065,00)	94,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.214.818.000,00	1.151.048.935,00	(63.769.065,00)	94,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.214.818.000,00	1.151.048.935,00	(63.769.065,00)	94,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.214.818.000,00	1.151.048.935,00	(63.769.065,00)	94,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.701.890,00	6.701.500,00	(390,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.097.500,00	1.097.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.500,00	1.097.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.604.390,00	5.604.000,00	(390,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.604.390,00	5.604.000,00	(390,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.604.390,00	5.604.000,00	(390,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.516.000,00	75.511.545,00	(4.455,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.916.000,00	52.911.545,00	(4.455,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	52.916.000,00	52.911.545,00	(4.455,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.916.000,00	52.911.545,00	(4.455,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.452.930,00	429.971.970,00	(7.480.960,00)	98,29	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.735.000,00	7.700.000,00	(35.000,00)	99,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.735.000,00	7.700.000,00	(35.000,00)	99,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.735.000,00	7.700.000,00	(35.000,00)	99,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.233.300,00	32.723.000,00	(1.510.300,00)	95,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.483.300,00	1.000.000,00	(1.483.300,00)	40,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.483.300,00	1.000.000,00	(1.483.300,00)	40,26	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	31.750.000,00	31.723.000,00	(27.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.750.000,00	31.723.000,00	(27.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.235.638,00	25.190.928,00	(44.702,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.235.638,00	25.190.928,00	(44.702,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.235.638,00	25.190.928,00	(44.702,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.021.000,00	20.021.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.021.000,00	20.021.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.480.000,00	1.800.960,00	(3.680.040,00)	32,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.480.000,00	1.800.960,00	(3.680.040,00)	32,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	1.800.960,00	(3.680.040,00)	32,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.985.000,00	19.985.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.985.000,00	19.985.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.743.000,00	322.552.042,00	(2.190.958,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	324.743.000,00	322.552.042,00	(2.190.958,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.743.000,00	322.552.042,00	(2.190.958,00)	99,32	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.541.900,00	51.540.000,00	(1.900,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006		Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	51.541.900,00	51.540.000,00	(1.900,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	51.541.900,00	51.540.000,00	(1.900,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.541.900,00	51.540.000,00	(1.900,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.725.950,00	170.375.520,00	(18.350.416,00)	91,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Keuangan, Sumber Daya Air dan Listrik	45.475.936,00	27.125.520,00	(18.350.416,00)	67,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.475.936,00	27.125.520,00	(18.350.416,00)	67,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.475.936,00	27.125.520,00	(18.350.416,00)	67,01	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000,00	141.000.000,00	(3.000.000,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	144.000.000,00	141.000.000,00	(3.000.000,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	141.000.000,00	(3.000.000,00)	97,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.040.000,00	390.320.250,00	(48.526.750,00)	88,75	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.990.000,00	105.963.250,00	(34.026.750,00)	75,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.990.000,00	105.963.250,00	(34.026.750,00)	75,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.990.000,00	105.963.250,00	(34.026.750,00)	75,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	273.050.000,00	260.562.000,00	(12.488.000,00)	95,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	173.058.000,00	165.368.000,00	(7.690.000,00)	95,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.058.000,00	165.368.000,00	(7.690.000,00)	95,55	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	95.195.000,00	(4.805.000,00)	95,19	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	95.195.000,00	(4.805.000,00)	95,19	

Langara, 21 Agustus 2025

KEPALA KONAWE KEPULAUAN

RISUL SAIFULLAH RAZAK

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	35.000.000,00	23.541.000,00	(11.459.000,00)	67,25	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00	23.541.000,00	(11.459.000,00)	67,25	
	3.26.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	35.000.000,00	23.541.000,00	(11.459.000,00)	67,25	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.943.776.854,00	3.801.554.011,00	(142.222.843,00)	96,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	37.658.600,00	36.258.600,00	(1.400.000,00)	96,28	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		Pembedayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.658.600,00	36.258.600,00	(1.400.000,00)	96,28	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	37.658.600,00	36.258.600,00	(1.400.000,00)	96,28	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.658.600,00	36.258.600,00	(1.400.000,00)	96,28	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.658.600,00	36.258.600,00	(1.400.000,00)	96,28	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.258.173.200,00	1.196.410.009,00	(61.763.491,00)	95,09	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	652.395.000,00	596.450.000,00	(55.945.000,00)	91,42	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	652.395.000,00	596.450.000,00	(55.945.000,00)	91,42	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.000.000,00	(500.000,00)	97,14	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	634.895.000,00	579.450.000,00	(55.445.000,00)	91,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	634.895.000,00	579.450.000,00	(55.445.000,00)	91,26	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.778.500,00	300.000.000,00	(5.778.500,00)	98,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	305.778.500,00	300.000.000,00	(5.778.500,00)	98,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	305.778.500,00	300.000.000,00	(5.778.500,00)	98,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.778.500,00	300.000.000,00	(5.778.500,00)	98,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000,00	249.960.009,00	(39.991,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250.000.000,00	249.960.009,00	(39.991,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.960.009,00	(39.991,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	249.960.009,00	(39.991,00)	99,98	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.297.944.754,00	3.218.995.402,00	(78.949.352,00)	96,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.260.000,00	84.958.000,00	(302.000,00)	99,64	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.698.000,00	(302.000,00)	99,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.698.000,00	(302.000,00)	99,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.698.000,00	(302.000,00)	99,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.990.000,00	958.538.110,00	(57.451.890,00)	94,34	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.002.990.000,00	945.538.110,00	(57.451.890,00)	94,27	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.990.000,00	945.538.110,00	(57.451.890,00)	94,27	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.990.000,00	945.538.110,00	(57.451.890,00)	94,27	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.450.000,00	78.125.000,00	(325.000,00)	99,58	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0002		Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.450.000,00	78.125.000,00	(325.000,00)	99,58	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.450.000,00	78.125.000,00	(325.000,00)	99,58	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.450.000,00	78.125.000,00	(325.000,00)	99,58	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.348.104,00	625.240.247,00	(1.104.862,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.032.600,00	4.032.600,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.032.600,00	4.032.600,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.200.944,00	22.118.944,00	(82.000,00)	99,63	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.200.944,00	22.118.944,00	(82.000,00)	99,63	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.944,00	22.118.944,00	(82.000,00)	99,63	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.497.500,00	22.241.000,00	(256.500,00)	98,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.497.500,00	22.241.000,00	(256.500,00)	98,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.497.500,00	22.241.000,00	(256.500,00)	98,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.640.000,00	80.588.000,00	(52.000,00)	99,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	80.640.000,00	80.588.000,00	(52.000,00)	99,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.640.000,00	80.588.000,00	(52.000,00)	99,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.134.000,00	492.419.638,00	(714.362,00)	99,85	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	493.134.000,00	492.419.638,00	(714.362,00)	99,85	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.134.000,00	492.419.638,00	(714.362,00)	99,85	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.546.150,00	78.450.000,00	(96.150,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.546.150,00	78.450.000,00	(96.150,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	78.546.150,00	78.450.000,00	(96.150,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.546.150,00	78.450.000,00	(96.150,00)	99,87	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	289.193.500,00	289.415.180,00	(9.958.320,00)	96,67	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.693.500,00	54.685.180,00	(3.208.320,00)	94,45	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.693.500,00	54.685.180,00	(3.208.320,00)	94,45	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.693.500,00	54.685.180,00	(3.208.320,00)	94,45	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.000.000,00	227.250.000,00	(6.750.000,00)	97,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	234.000.000,00	227.250.000,00	(6.750.000,00)	97,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	227.250.000,00	(6.750.000,00)	97,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.460.000,00	97.638.870,00	(9.821.130,00)	90,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.460.000,00	97.638.870,00	(9.821.130,00)	90,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.460.000,00	97.638.870,00	(9.821.130,00)	90,86	
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.460.000,00	97.638.870,00	(9.821.130,00)	90,86	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

DINAS PERTANIAN

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : DINAS PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	26.276.692,00	16.276.692,00	262,76	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	26.276.692,00	16.276.692,00	262,76	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	26.276.692,00	16.276.692,00	262,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.275.796.993,00	10.128.673.060,00	(155.123.933,00)	98,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	792.874.870,00	791.166.310,00	(1.708.560,00)	99,78	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	792.874.870,00	791.166.310,00	(1.708.560,00)	99,78	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kearifan, Teknologi dan Spesifik Lokasi	729.569.870,00	727.875.000,00	(1.694.870,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	729.569.870,00	727.875.000,00	(1.694.870,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	729.569.870,00	727.875.000,00	(1.694.870,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63.305.000,00	63.291.310,00	(13.690,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.305.000,00	63.291.310,00	(13.690,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.305.000,00	63.291.310,00	(13.690,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.908.858.998,00	4.251.128.193,00	(57.722.805,00)	98,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	50.335.000,00	49.407.793,00	(927.207,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.335.000,00	49.407.793,00	(927.207,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.335.000,00	49.407.793,00	(927.207,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.335.000,00	49.407.793,00	(927.207,00)	98,15	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	4.298.515.998,00	4.201.720.400,00	(56.795.598,00)	98,66	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.585.000.000,00	3.584.000.000,00	(1.000.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.585.000.000,00	3.584.000.000,00	(1.000.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000.000,00	3.584.000.000,00	(1.000.000,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	673.413.998,00	617.720.400,00	(55.795.598,00)	91,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2	BELANJA MODAL	673.515.998,00	617.720.400,00	(55.795.598,00)	91,71	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.033.598,00	199.683.500,00	(12.350.098,00)	94,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	461.482.400,00	418.036.900,00	(43.445.500,00)	90,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	327.767.078,00	327.259.968,00	(507.110,00)	99,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penetapan dan Pembebasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	36.100.000,00	36.025.000,00	(75.000,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0004		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	36.100.000,00	36.025.000,00	(75.000,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.100.000,00	36.025.000,00	(75.000,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	36.025.000,00	(75.000,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04		Penerapan dan Pengawasan Penyamakan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	207.667.078,00	207.234.968,00	(432.110,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002		Pengawasan Peredaran Bentuk dan Produk Hewan	50.335.008,00	50.326.308,00	(8.700,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.335.008,00	50.326.308,00	(8.700,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.335.008,00	50.326.308,00	(8.700,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0005		Pembinaan Penerapan penyamakan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	157.332.070,00	156.908.660,00	(423.410,00)	99,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	157.332.070,00	156.908.660,00	(423.410,00)	99,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.332.070,00	156.908.660,00	(423.410,00)	99,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	61.097.000,00	61.040.000,00	(57.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	61.097.000,00	61.040.000,00	(57.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	61.097.000,00	61.040.000,00	(57.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.097.000,00	61.040.000,00	(57.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.097.000,00	61.040.000,00	(57.000,00)	99,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.125.936.868,00	2.118.362.916,00	(7.573.944,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.125.936.868,00	2.118.362.916,00	(7.573.944,00)	99,64	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	727.936.868,00	727.872.251,00	(64.609,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	727.936.868,00	727.872.251,00	(64.609,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.936.868,00	727.872.251,00	(64.609,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.069.000.000,00	1.069.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	589.000.000,00	589.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	192.490.665,00	(7.509.335,00)	96,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	192.490.665,00	(7.509.335,00)	96,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	192.490.665,00	(7.509.335,00)	96,24	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.659.270.185,00	2.571.715.681,00	(87.554.514,00)	96,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.417.200,00	6.417.200,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.185.739.600,00	1.180.623.849,00	(53.115.655,00)	95,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.179.520.000,00	1.126.404.345,00	(53.115.655,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.179.520.000,00	1.126.404.345,00	(53.115.655,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.179.520.000,00	1.126.404.345,00	(53.115.655,00)	95,49	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.219.600,00	6.219.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.219.600,00	6.219.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.219.600,00	6.219.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.219.600,00	6.219.600,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.646.000,00	9.000.000,00	(18.646.000,00)	32,55	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.9002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.9002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.9009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.646.000,00	0,00	(18.646.000,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.9009	5.1	BELANJA OPERASI	18.646.000,00	0,00	(18.646.000,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.9009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.646.000,00	0,00	(18.646.000,00)	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.551.904,00	502.434.389,00	(117.515,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.700,00	2.000.000,00	(700,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.700,00	2.000.000,00	(700,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.700,00	2.000.000,00	(700,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.734.404,00	28.700.000,00	(34.404,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9004	5.1	BELANJA OPERASI	28.734.404,00	28.700.000,00	(34.404,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.734.404,00	28.700.000,00	(34.404,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.710.800,00	28.700.000,00	(10.800,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9005	5.1	BELANJA OPERASI	28.710.800,00	28.700.000,00	(10.800,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.710.800,00	28.700.000,00	(10.800,00)	99,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9008	5.1	BELANJA OPERASI	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.628.800,00	416.534.389,00	(91.411,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9009	5.1	BELANJA OPERASI	416.628.800,00	416.534.389,00	(91.411,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.9009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.628.800,00	416.534.389,00	(91.411,00)	99,97	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.3.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.042.675,00	465.818.500,00	(2.224.175,00)	99,52	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.3.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	330.600.000,00	330.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.3.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	330.600.000,00	330.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.442.675,00	135.218.500,00	(2.224.175,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	137.442.675,00	135.218.500,00	(2.224.175,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.442.675,00	135.218.500,00	(2.224.175,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.841.816,00	42.469.647,00	(372.169,00)	99,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.841.816,00	9.469.647,00	(372.169,00)	96,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.841.816,00	9.469.647,00	(372.169,00)	96,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.841.816,00	9.469.647,00	(372.169,00)	96,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.477.000,00	572.418.000,00	(13.059.000,00)	96,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.265.000,00	81.651.000,00	(7.614.000,00)	89,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.265.000,00	81.651.000,00	(7.614.000,00)	89,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.265.000,00	81.651.000,00	(7.614.000,00)	89,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.212.000,00	310.767.000,00	(5.445.000,00)	98,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	316.212.000,00	310.767.000,00	(5.445.000,00)	98,27	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.212.000,00	310.767.000,00	(5.445.000,00)	98,27	

Langara, 31 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

SIFQI SAIFULLAH RAZAK

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 20246

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.938.712.000,00	12.524.697.326,00	586.984.326,00	104,89	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.939.713.000,00	12.463.177.326,00	523.464.326,00	104,38	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	21.079.008,00	21.079.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	10.569.008,00	10.569.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8,00	10.569.008,00	10.569.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,00	10.569.008,00	10.569.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	7.585.008,00	7.585.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8,00	7.585.008,00	7.585.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,00	7.585.008,00	7.585.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.519.610.008,00	11.320.179.211,00	(199.430.789,00)	98,26	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.519.610.008,00	11.260.322.211,00	(259.287.789,00)	97,74	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.519.610.008,00	11.260.322.211,00	(259.287.789,00)	97,74	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.519.610.008,00	11.260.322.211,00	(259.287.789,00)	97,74	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	16.272.000,00	16.272.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	16.272.000,00	16.272.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.272.000,00	16.272.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerintah	0,00	17.765.008,00	17.765.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	17.765.008,00	17.765.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.765.008,00	17.765.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bilamen/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	25.820.008,00	25.820.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	25.820.008,00	25.820.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.820.008,00	25.820.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	187.646.038,00	187.646.038,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.810.638,00	1.810.638,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.810.638,00	1.810.638,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.810.638,00	1.810.638,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	2.681.500,00	2.681.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	2.681.500,00	2.681.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.681.500,00	2.681.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	11.822.900,00	11.822.900,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.822.900,00	11.822.900,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.822.900,00	11.822.900,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	8.754.500,00	8.754.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	8.754.500,00	8.754.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.754.500,00	8.754.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kerjasama Tata	0,00	11.789.000,00	11.789.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.789.000,00	11.789.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.789.000,00	11.789.000,00	0,00	

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	150.787.500,00	150.787.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	150.787.500,00	150.787.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.787.500,00	150.787.500,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	92.088.607,00	92.088.607,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	90.938.607,00	90.938.607,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	90.938.607,00	90.938.607,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	90.938.607,00	90.938.607,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	134.837.800,00	134.837.800,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	48.580.000,00	48.580.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	48.580.000,00	48.580.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	48.580.000,00	48.580.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	74.517.000,00	74.517.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	74.517.000,00	74.517.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	74.517.000,00	74.517.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	650.800,00	650.800,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	650.800,00	650.800,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	650.800,00	650.800,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.103.000,00	435.308.670,00	15.205.670,00	103,61	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.103.000,00	381.308.670,00	(38.794.330,00)	90,76	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	420.103.000,00	381.308.670,00	(38.794.330,00)	90,76	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	420.103.000,00	381.308.670,00	(38.794.330,00)	90,76	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		Pemiliharaan Kesejahteraan Sekretariat Daerah	0,00	262.567.000,00	262.567.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0,00	166.080.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	166.080.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	166.080.000,00	166.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	0,00	4.567.000,00	4.567.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	4.567.000,00	4.567.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.567.000,00	4.567.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ekinerja Pemerintah Daerah	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH BAZAR

BAGIAN UMUM

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN UMUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022		5	BELANJA DAERAH	10.640.685.535,00	9.178.844.935,00	(1.461.840.600,00)	86,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.640.685.535,00	9.178.844.935,00	(1.461.840.600,00)	86,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.950.000,00	21.710.000,00	(240.000,00)	98,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.975.000,00	10.850.000,00	(125.000,00)	98,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.975.000,00	10.850.000,00	(125.000,00)	98,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.975.000,00	10.850.000,00	(125.000,00)	98,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.975.000,00	10.860.000,00	(115.000,00)	98,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.975.000,00	10.860.000,00	(115.000,00)	98,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.975.000,00	10.860.000,00	(115.000,00)	98,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.050.300,00	42.287.000,00	(44.693.000,00)	48,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.960.300,00	9.765.000,00	(195.000,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.960.300,00	9.765.000,00	(195.000,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.960.300,00	9.765.000,00	(195.000,00)	98,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18.420.800,00	0,00	(18.420.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.420.800,00	0,00	(18.420.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.420.800,00	0,00	(18.420.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.500.800,00	33.522.000,00	(25.978.080,00)	56,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	59.500.800,00	33.522.000,00	(25.978.080,00)	56,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.500.800,00	33.522.000,00	(25.978.080,00)	56,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.400.800,00	18.105.000,00	(295.080,00)	98,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.400.000,00	7.110.000,00	(290.000,00)	96,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	7.110.000,00	(290.000,00)	96,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.110.000,00	(290.000,00)	96,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0006		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000,00	10.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	494.920.000,00	453.304.552,00	(41.615.448,00)	91,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.860.000,00	210.036.352,00	(30.823.648,00)	87,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	240.860.000,00	210.036.352,00	(30.823.648,00)	87,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.860.000,00	210.036.352,00	(30.823.648,00)	87,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.760.000,00	164.968.200,00	(10.791.800,00)	93,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	175.760.000,00	164.968.200,00	(10.791.800,00)	93,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.760.000,00	164.968.200,00	(10.791.800,00)	93,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.248.524.845,30	2.214.217.264,00	(34.307.581,00)	98,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.000.000,00	63.952.938,00	(1.047.062,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	63.952.938,00	(1.047.062,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	63.952.938,00	(1.047.062,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.494.560,00	35.783.161,00	(2.711.399,00)	92,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.494.560,00	35.783.161,00	(2.711.399,00)	92,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.494.560,00	35.783.161,00	(2.711.399,00)	92,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.000.000,00	71.900.800,00	(100.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0003	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	71.900.800,00	(100.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0003	5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	71.900.800,00	(100.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.074.375,00	60.215.700,00	(10.858.675,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.074.375,00	60.215.700,00	(10.858.675,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.074.375,00	60.215.700,00	(10.858.675,00)	84,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.471.910,00	33.818.500,00	(4.653.410,00)	87,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.471.910,00	33.818.500,00	(4.653.410,00)	87,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.471.910,00	33.818.500,00	(4.653.410,00)	87,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	279.216.000,00	273.479.700,00	(5.736.300,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0008	5.1	BELANJA OPERASI	279.216.000,00	273.479.700,00	(5.736.300,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.216.000,00	273.479.700,00	(5.736.300,00)	97,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.680.468.000,00	1.675.067.265,00	(5.400.735,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.468.000,00	1.675.067.265,00	(5.400.735,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.96.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.468.000,00	1.675.067.265,00	(5.400.735,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	790.527.840,00	789.712.840,00	(815.000,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0005		Pengadaan Mebel	277.651.340,00	277.557.840,00	(93.500,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0005	5.2	BELANJA MODAL	277.651.340,00	277.557.840,00	(93.500,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.651.340,00	277.557.840,00	(93.500,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.702.500,00	360.450.000,00	(252.500,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0006	5.2	BELANJA MODAL	360.702.500,00	360.450.000,00	(252.500,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.702.500,00	360.450.000,00	(252.500,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.004.000,00	151.705.000,00	(299.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0009	5.2	BELANJA MODAL	152.004.000,00	151.705.000,00	(299.000,00)	99,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.97.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.004.000,00	151.705.000,00	(299.000,00)	99,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.490.233.500,00	2.304.846.561,00	(185.386.939,00)	92,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	10.900.000,00	(1.100.000,00)	90,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	10.900.000,00	(1.100.000,00)	90,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	10.900.000,00	(1.100.000,00)	90,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.353.500,00	384.741.561,00	(120.611.939,00)	76,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	505.353.500,00	384.741.561,00	(120.611.939,00)	76,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.353.500,00	384.741.561,00	(120.611.939,00)	76,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	34.400.000,00	(15.600.000,00)	68,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	34.400.000,00	(15.600.000,00)	68,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.400.000,00	(15.600.000,00)	68,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.922.880.000,00	1.874.805.000,00	(48.075.000,00)	97,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.922.880.000,00	1.874.805.000,00	(48.075.000,00)	97,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.880.000,00	1.874.805.000,00	(48.075.000,00)	97,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.693.047.350,00	1.460.040.628,00	(233.006.722,00)	86,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.400.000,00	290.104.275,00	(103.295.725,00)	73,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	393.400.000,00	290.104.275,00	(103.295.725,00)	73,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.400.000,00	290.104.275,00	(103.295.725,00)	73,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	840.400.000,00	723.334.553,00	(117.065.447,00)	86,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	840.400.000,00	723.334.553,00	(117.065.447,00)	86,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.400.000,00	723.334.553,00	(117.065.447,00)	86,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.540.000,00	81.243.000,00	(11.297.000,00)	87,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	92.540.000,00	81.243.000,00	(11.297.000,00)	87,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.540.000,00	81.243.000,00	(11.297.000,00)	87,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	366.707.350,00	365.358.880,00	(1.348.550,00)	99,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	354.807.200,00	353.458.800,00	(1.348.400,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.807.200,00	353.458.800,00	(1.348.400,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	12.100.150,00	12.100.000,00	(150,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.100.150,00	12.100.000,00	(150,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.591.833.000,00	1.027.517.090,00	(564.314.910,00)	64,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	169.250.000,00	169.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.250.000,00	169.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0009		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000,00	105.207.500,00	(144.792.500,00)	42,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	105.207.500,00	(144.792.500,00)	42,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	105.207.500,00	(144.792.500,00)	42,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.172.582.000,00	755.059.590,00	(417.522.410,00)	64,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.172.582.000,00	755.059.590,00	(417.522.410,00)	64,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.582.000,00	755.059.590,00	(417.522.410,00)	64,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kesejahteraan Sekretariat Daerah	1.203.540.000,00	846.104.000,00	(357.436.000,00)	70,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	554.400.000,00	460.000.000,00	(94.400.000,00)	82,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	554.400.000,00	460.000.000,00	(94.400.000,00)	82,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.400.000,00	460.000.000,00	(94.400.000,00)	82,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	524.400.000,00	266.000.000,00	(258.400.000,00)	50,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	524.400.000,00	266.000.000,00	(258.400.000,00)	50,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.400.000,00	266.000.000,00	(258.400.000,00)	50,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	124.740.000,00	120.104.000,00	(4.636.000,00)	96,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	124.740.000,00	120.104.000,00	(4.636.000,00)	96,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.740.000,00	120.104.000,00	(4.636.000,00)	96,28	

Lanipa, 21 Agustus 2025
BUPATI KEPULAUAN SULA

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

BAGIAN

PEMERINTAHAN

UMUM

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		6	BELANJA DAERAH	984.000.000,00	948.855.410,00	(35.904.590,00)	96,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	329.232.880,00	313.507.610,00	(15.725.270,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.16		Administrasi Tata Pemerintahan	329.232.880,00	313.507.610,00	(15.725.270,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.16.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	329.232.880,00	313.507.610,00	(15.725.270,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	329.232.880,00	313.507.610,00	(15.725.270,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.232.880,00	313.507.610,00	(15.725.270,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	654.767.120,00	634.557.800,00	(20.209.320,00)	96,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.219.620,00	247.102.800,00	(37.116.820,00)	86,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	150.000,00	(1.850.000,00)	7,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	150.000,00	(1.850.000,00)	7,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	150.000,00	(1.850.000,00)	7,5	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.451.620,00	27.400.000,00	(51.620,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.451.620,00	27.400.000,00	(51.620,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.451.620,00	27.400.000,00	(51.620,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kearsipan Tata	29.890.000,00	29.740.000,00	(150.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	29.890.000,00	29.740.000,00	(150.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.890.000,00	29.740.000,00	(150.000,00)	99,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.938.000,00	170.812.800,00	(14.125.200,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	184.938.000,00	170.812.800,00	(14.125.200,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.938.000,00	170.812.800,00	(14.125.200,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.607.500,00	234.575.000,00	(3.032.500,00)	98,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.682.500,00	39.525.000,00	(157.500,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.682.500,00	39.525.000,00	(157.500,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.682.500,00	39.525.000,00	(157.500,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	18,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	18,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	550.000,00	(2.475.000,00)	18,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	174.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	174.500.000,00	(500.000,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.500.000,00	(500.000,00)	99,71	

Langgara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

BIPQI SAIFULLAH KAZAK

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 21 Agustus 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	707.712.390,00	678.103.000,00	(37.609.500,00)	94,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	206.834.000,00	201.032.000,00	(5.792.000,00)	97,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	206.834.000,00	201.032.000,00	(5.792.000,00)	97,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	21.890.000,00	21.880.000,00	(10.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.890.000,00	21.855.000,00	(35.000,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.890.000,00	21.855.000,00	(35.000,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	66.974.000,00	61.222.000,00	(5.752.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.974.000,00	61.222.000,00	(5.752.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.974.000,00	61.222.000,00	(5.752.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	118.080.000,00	117.895.000,00	(185.000,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	118.080.000,00	117.895.000,00	(185.000,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.080.000,00	32.895.000,00	(85.185.000,00)	27,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.878.390,00	469.031.000,00	(31.847.500,00)	93,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000,00	18.990.000,00	(4.010.000,00)	82,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	998.000,00	(1.002.000,00)	49,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	998.000,00	(1.002.000,00)	49,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	998.000,00	(1.002.000,00)	49,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.498.000,00	(2.000,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.996.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	4.998.000,00	(1.502.000,00)	76,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0003		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	4.998.000,00	(1.502.000,00)	76,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	4.998.000,00	(1.502.000,00)	76,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	4.998.000,00	(1.502.000,00)	76,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.606.800,00	60.600.000,00	(6.800,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011		Sinergisasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.606.800,00	57.600.000,00	(6.800,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	57.606.800,00	57.600.000,00	(6.800,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.606.800,00	57.600.000,00	(6.800,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.072.380,00	254.842.000,00	(23.230.380,00)	91,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.941.380,00	9.831.000,00	(1.110.380,00)	89,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.941.380,00	9.831.000,00	(1.110.380,00)	89,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.941.380,00	9.831.000,00	(1.110.380,00)	89,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.440.000,00	8.439.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.440.000,00	8.439.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	8.439.000,00	(1.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.791.000,00	227.971.000,00	(22.119.000,00)	91,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	249.791.000,00	227.971.000,00	(22.119.000,00)	91,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.791.000,00	227.971.000,00	(22.119.000,00)	91,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	13.050.000,00	(11.950.000,00)	52,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	13.050.000,00	(11.950.000,00)	52,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	13.050.000,00	(11.950.000,00)	52,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Pengadaan dan Modal	25.000.000,00	13.050.000,00	(11.950.000,00)	52,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.690.000,00	36.545.000,00	(1.145.000,00)	96,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.150.000,00	34.005.000,00	(1.145.000,00)	96,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.150.000,00	34.005.000,00	(1.145.000,00)	96,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	34.005.000,00	(1.145.000,00)	96,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

IRFAN SAIFULLAH HAZAR

BAGIAN EKONOMI DAN SDA

Lampiran I. 3 PERATURAN DaERAH DIM
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 25 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN EKONOMI DAN SDA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004		6	BELANJA DAERAH	869.363.500,00	785.255.500,00	(76.108.000,00)	91,14	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	313.777.077,00	275.589.500,00	(40.287.577,00)	87,18	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	234.380.520,00	194.686.500,00	(39.694.020,00)	83,06	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	145.051.260,00	111.330.000,00	(33.721.260,00)	76,75	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.051.260,00	111.330.000,00	(33.721.260,00)	76,76	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.051.260,00	111.330.000,00	(33.721.260,00)	76,75	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0003		Pemacuan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	89.329.260,00	83.356.500,00	(5.972.760,00)	93,31	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	89.329.260,00	83.356.500,00	(5.972.760,00)	93,31	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.329.260,00	83.356.500,00	(5.972.760,00)	93,31	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04		Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	79.396.557,00	78.883.000,00	(513.557,00)	99,35	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	45.406.297,00	44.895.000,00	(511.297,00)	98,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.406.297,00	44.895.000,00	(511.297,00)	98,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.406.297,00	44.895.000,00	(511.297,00)	98,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	33.990.260,00	33.988.000,00	(2.260,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.990.260,00	33.988.000,00	(2.260,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.990.260,00	33.988.000,00	(2.260,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	345.586.425,00	309.686.000,00	(35.900.425,00)	91,61	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.207.500,00	19.535.000,00	(8.672.500,00)	69,25	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.085.500,00	505.000,00	(6.580.500,00)	7,12	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.085.500,00	505.000,00	(6.580.500,00)	7,12	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.085.500,00	505.000,00	(6.580.500,00)	7,12	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.361.000,00	4.340.000,00	(1.021.000,00)	80,95	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.361.000,00	4.340.000,00	(1.021.000,00)	80,95	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.361.000,00	4.340.000,00	(1.021.000,00)	80,95	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.561.000,00	14.490.000,00	(1.071.000,00)	93,11	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.561.000,00	14.490.000,00	(1.071.000,00)	93,11	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.561.000,00	14.490.000,00	(1.071.000,00)	93,11	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.062.800,00	14.060.000,00	(2.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.031.800,00	7.030.000,00	(1.800,00)	99,98	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.428.000,00	77.300.000,00	(128.000,00)	99,83	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0011		Sinkronisasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.628.000,00	72.500.000,00	(128.000,00)	99,82	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	72.628.000,00	72.500.000,00	(128.000,00)	99,82	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.628.000,00	72.500.000,00	(128.000,00)	99,82	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.133.925,00	316.791.000,00	(33.342.925,00)	95,13	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.242.923,00	23.200.000,00	(42.923,00)	99,81	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.242.923,00	23.200.000,00	(42.923,00)	99,81	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.242.923,00	23.200.000,00	(42.923,00)	99,81	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.192.000,00	13.000.000,00	(192.000,00)	98,54	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.192.000,00	13.000.000,00	(192.000,00)	98,54	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.192.000,00	13.000.000,00	(192.000,00)	98,54	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.699.000,00	280.591.000,00	(23.108.000,00)	92,39	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	303.699.000,00	280.591.000,00	(23.108.000,00)	92,39	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.699.000,00	280.591.000,00	(23.108.000,00)	92,39	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.285.000,00	10.200.000,00	(85.000,00)	99,17	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.285.000,00	10.200.000,00	(85.000,00)	99,17	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.285.000,00	10.200.000,00	(85.000,00)	99,17	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.285.000,00	10.200.000,00	(85.000,00)	99,17	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.720.000,00	25.050.000,00	(3.670.000,00)	87,22	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.720.000,00	25.050.000,00	(3.670.000,00)	87,22	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.720.000,00	25.050.000,00	(3.670.000,00)	87,22	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.720.000,00	25.050.000,00	(3.670.000,00)	87,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH [illegible]
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	8.418.599.072,00	7.594.038.880,00	(821.760.822,00)	90,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.007.202.164,00	7.214.613.800,00	(792.588.364,00)	90,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.007.202.164,00	7.214.613.800,00	(792.588.364,00)	90,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.976.688.294,00	1.925.638.800,00	(51.049.494,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.976.688.294,00	1.925.638.800,00	(51.049.494,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.888.294,00	904.838.800,00	(36.049.494,00)	95,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.800.000,00	1.050.800.000,00	(50.000.000,00)	98,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000,00	70.000.000,00	(5.000.000,00)	93,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Teknis Kesejahteraan Sosial	6.030.513.870,00	5.288.975.000,00	(741.538.870,00)	87,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.030.513.870,00	5.288.975.000,00	(741.538.870,00)	87,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.1.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.030.513.870,00	5.288.975.000,00	(741.538.870,00)	87,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	409.397.498,00	383.229.000,00	(29.172.498,00)	93,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.989.552,00	20.889.000,00	(7.100.552,00)	74,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.484.000,00	(16.000,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.484.000,00	(16.000,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.484.000,00	(16.000,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.989.552,00	14.405.000,00	(584.552,00)	96,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.989.552,00	14.405.000,00	(584.552,00)	96,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.552,00	14.405.000,00	(584.552,00)	96,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.500.000,00	26.400.000,00	(100.000,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.500.000,00	26.400.000,00	(100.000,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	26.400.000,00	(100.000,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.400.000,00	(100.000,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.977.906,00	199.616.800,00	(13.361.906,00)	93,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.906,00	9.995.000,00	(3.906,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.998.906,00	9.995.000,00	(3.906,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.906,00	9.995.000,00	(3.906,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.800,00	9.564.000,00	(436.000,00)	95,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.800,00	9.564.000,00	(436.000,00)	95,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.800,00	9.564.000,00	(436.000,00)	95,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.620.800,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.800,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.359.600,00	174.437.000,00	(12.922.600,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.359.600,00	174.437.000,00	(12.922.600,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.359.600,00	174.437.000,00	(12.922.600,00)	93,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.400.800,00	36.290.000,00	(2.110.800,00)	94,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.400.800,00	36.290.000,00	(2.110.800,00)	94,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.800,00	36.290.000,00	(2.110.800,00)	94,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.800,00	36.290.000,00	(2.110.800,00)	94,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

Lasara, 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

IRFAN SAIFULLAH HAZAK

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Lampiran L.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	1.064.576.000,00	1.020.208.500,00	(44.367.500,00)	95,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.064.576.000,00	1.020.208.500,00	(44.367.500,00)	95,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.470.000,00	21.470.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.470.000,00	21.470.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.000.000,00	215.674.500,00	(27.325.500,00)	88,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	22.182.500,00	(2.817.500,00)	88,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	22.182.500,00	(2.817.500,00)	88,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.182.500,00	(2.817.500,00)	88,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.000.000,00	163.492.000,00	(24.508.000,00)	86,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.000.000,00	163.492.000,00	(24.508.000,00)	86,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.000.000,00	163.492.000,00	(24.508.000,00)	86,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	73.000.000,00	(3.000.000,00)	96,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000,00	51.000.000,00	(3.000.000,00)	94,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	51.000.000,00	(3.000.000,00)	94,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	51.000.000,00	(3.000.000,00)	94,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000,00	58.574.000,00	(2.426.000,00)	96,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.000.000,00	58.574.000,00	(2.426.000,00)	96,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.000.000,00	58.574.000,00	(2.426.000,00)	96,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	58.574.000,00	(2.426.000,00)	96,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	622.906.000,00	611.290.000,00	(11.616.000,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	319.364.500,00	317.485.500,00	(1.879.000,00)	99,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	319.364.500,00	317.485.500,00	(1.879.000,00)	99,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.364.500,00	317.485.500,00	(1.879.000,00)	99,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.275.500,00	39.155.500,00	(120.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.275.500,00	39.155.500,00	(120.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.275.500,00	39.155.500,00	(120.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	106.904.000,00	106.904.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.904.000,00	106.904.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.660.000,00	15.610.000,00	(50.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.660.000,00	15.610.000,00	(50.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.610.000,00	(50.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	141.702.000,00	132.135.000,00	(9.567.000,00)	93,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	141.702.000,00	132.135.000,00	(9.567.000,00)	93,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.702.000,00	132.135.000,00	(9.567.000,00)	93,24	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

BIPTU SAIFULLAH RAZAK

BAGIAN HUKUM

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN HUKUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	848.000.000,00	911.396.112,00	(36.603.888,00)	96,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	217.583.500,00	217.560.000,00	(23.500,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	217.583.500,00	217.560.000,00	(23.500,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	201.323.500,00	201.320.000,00	(3.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	201.323.500,00	201.320.000,00	(3.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.323.500,00	201.320.000,00	(3.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	16.260.000,00	16.240.000,00	(20.000,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.260.000,00	16.240.000,00	(20.000,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000,00	16.240.000,00	(20.000,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	730.416.500,00	699.856.112,00	(36.580.388,00)	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.226.000,00	22.156.000,00	(70.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.726.000,00	15.656.000,00	(70.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.726.000,00	15.656.000,00	(70.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.726.000,00	15.656.000,00	(70.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.650.000,00	118.298.000,00	(340.900,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9002	5.1	BELANJA OPERASI	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9010	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.660.000,00	(340.000,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9011	5.1	BELANJA OPERASI	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.9011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.874.650,00	376.720.112,00	(36.154.538,00)	91,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.054.450,00	20.054.000,00	(450,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.054.450,00	20.054.000,00	(450,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.054.450,00	20.054.000,00	(450,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.257.200,00	49.245.000,00	(12.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.257.200,00	49.245.000,00	(12.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.257.200,00	49.245.000,00	(12.200,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.080.800,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.800,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.536.000,00	290.394.112,00	(36.141.888,00)	88,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	326.536.000,00	290.394.112,00	(36.141.888,00)	88,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.536.000,00	290.394.112,00	(36.141.888,00)	88,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.493.000,00	47.490.000,00	(3.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Perabotan dan Modin Lainnya	47.493.000,00	47.490.000,00	(3.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	47.493.000,00	47.490.000,00	(3.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.493.000,00	47.490.000,00	(3.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.765.000,00	67.760.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.005.000,00	1.000.000,00	(5.000,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.005.000,00	1.000.000,00	(5.000,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	1.000.000,00	(5.000,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.427.850,00	48.420.000,00	(7.850,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0004		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	44.401.200,00	44.400.000,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.401.200,00	44.400.000,00	(1.200,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.401.280,00	44.400.000,00	(1.200,00)	99.99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.026.650,00	4.020.000,00	(6.650,00)	99.83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.026.650,00	4.020.000,00	(6.650,00)	99.83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.026.650,00	4.020.000,00	(6.650,00)	99.83	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

REFQI SAIFULLAH RAZAK

BAGIAN

PROTOKOLER DAN

KOMUNIKASI

PIMPINAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.235.625.000,00	1.184.399.700,00	(51.225.300,00)	95,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.235.625.000,00	1.184.399.700,00	(51.225.300,00)	95,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.486.700,00	31.415.000,00	(71.700,00)	99,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.499.600,00	6.490.000,00	(9.600,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.600,00	6.490.000,00	(9.600,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.600,00	6.490.000,00	(9.600,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.800,00	6.495.000,00	(4.800,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.800,00	6.495.000,00	(4.800,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.800,00	6.495.000,00	(4.800,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.497.300,00	18.430.000,00	(67.300,00)	99,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.497.300,00	18.430.000,00	(67.300,00)	99,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.497.300,00	18.430.000,00	(67.300,00)	99,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.000.400,00	6.450.000,00	(5.549.400,00)	49,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.800,00	0,00	(6.499.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.800,00	0,00	(6.499.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.800,00	0,00	(6.499.800,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.499.800,00	6.450.000,00	(49.800,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.800,00	6.450.000,00	(49.800,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.800,00	6.450.000,00	(49.800,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.593.800,00	43.593.800,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.593.800,00	43.593.800,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.769.127,00	555.948.500,00	(29.820.627,00)	94,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.275.127,00	32.270.000,00	(5.127,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.275.127,00	32.270.000,00	(5.127,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.275.127,00	32.270.000,00	(5.127,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	130.165.000,00	130.165.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.165.000,00	130.165.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kearsipan Tata	51.975.000,00	45.765.000,00	(6.210.000,00)	88,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.975.000,00	45.765.000,00	(6.210.000,00)	88,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.975.000,00	45.765.000,00	(6.210.000,00)	88,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.114.000,00	322.508.500,00	(23.605.500,00)	93,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	346.114.000,00	322.508.500,00	(23.605.500,00)	93,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.114.000,00	322.508.500,00	(23.605.500,00)	93,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.671.180,00	44.340.000,00	(331.180,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	20.700.000,00	(300.000,00)	98,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	20.700.000,00	(300.000,00)	98,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	20.700.000,00	(300.000,00)	98,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.671.180,00	23.640.000,00	(31.180,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	23.671.180,00	23.640.000,00	(31.180,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.671.180,00	23.640.000,00	(31.180,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.637.393,00	47.888.000,00	(6.749.393,00)	87,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.667.393,00	44.950.000,00	(6.717.393,00)	86,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.667.393,00	44.950.000,00	(6.717.393,00)	86,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.667.393,00	44.950.000,00	(6.717.393,00)	86,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.970.000,00	2.938.000,00	(32.000,00)	98,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.970.000,00	2.938.000,00	(32.000,00)	98,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	2.938.000,00	(32.000,00)	98,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	460.506.000,00	452.813.200,00	(7.692.800,00)	98,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Kepecakolan	206.961.000,00	200.961.000,00	(6.000.000,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.961.000,00	200.961.000,00	(6.000.000,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.961.000,00	200.961.000,00	(6.000.000,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	131.829.000,00	131.794.200,00	(34.800,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.829.000,00	131.794.200,00	(34.800,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.829.000,00	131.794.200,00	(34.800,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.8.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0000		Pendelegasian Tugas Pimpinan	121.716.800,00	120.058.000,00	(1.658.080,00)	98,63	
4.01	4.01.8.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	121.716.800,00	120.058.000,00	(1.658.080,00)	98,63	
4.01	4.01.8.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.716.800,00	120.058.000,00	(1.658.080,00)	98,63	

Langara, 28 Agustus 2015
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 1 Tahun 1905
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009		#	BELANJA DAERAH	768.500.000,00	697.352.400,00	(71.147.600,00)	90,74	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	285.601.680,00	252.351.500,00	(33.250.180,00)	88,35	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	285.601.680,00	252.351.500,00	(33.250.180,00)	88,35	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25.840.626,00	0,00	(25.840.626,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.840.626,00	0,00	(25.840.626,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.840.626,00	0,00	(25.840.626,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	159.375.804,00	142.766.500,00	(7.609.304,00)	94,83	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	159.375.804,00	142.766.500,00	(7.609.304,00)	94,83	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.375.804,00	142.766.500,00	(7.609.304,00)	94,85	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	109.585.250,00	109.581.000,00	(250,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	109.585.250,00	109.581.000,00	(250,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.585.250,00	109.581.000,00	(250,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.898.320,00	445.000.900,00	(37.887.420,00)	92,15	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.314.479,00	21.740.000,00	(6.574.479,00)	81,84	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.505.633,00	3.503.000,00	(3.000.633,00)	53,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.505.633,00	3.503.000,00	(3.000.633,00)	53,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.505.633,00	3.503.000,00	(3.000.633,00)	53,87	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.961.250,00	3.211.000,00	(1.750.250,00)	64,72	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.961.250,00	3.211.000,00	(1.750.250,00)	64,72	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.961.250,00	3.211.000,00	(1.750.250,00)	64,72	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.847.619,00	15.024.000,00	(23.619,00)	99,84	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.847.619,00	15.024.000,00	(23.619,00)	99,84	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.847.619,00	15.024.000,00	(23.619,00)	99,84	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.490.222,00	4.678.000,00	(1.812.222,00)	72,07	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.490.222,00	4.678.000,00	(1.812.222,00)	72,07	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.490.222,00	4.678.000,00	(1.812.222,00)	72,07	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.490.222,00	4.678.000,00	(1.812.222,00)	72,07	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.022.000,00	18.150.000,00	(22.872.000,00)	44,24	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.872.000,00	0,00	(22.872.000,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.872.000,00	0,00	(22.872.000,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.872.000,00	0,00	(22.872.000,00)	0,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.636.923,00	195.160.400,00	(1.476.523,00)	99,25	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0001		Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.419.280,00	6.419.000,00	(280,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.419.280,00	6.419.000,00	(280,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.419.280,00	6.419.000,00	(280,00)	99,99	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.489.546,00	3.476.000,00	(13.546,00)	99,61	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.489.546,00	3.476.000,00	(13.546,00)	99,61	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.489.546,00	3.476.000,00	(13.546,00)	99,61	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.053.215,00	19.039.000,00	(14.215,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.053.215,00	19.039.000,00	(14.215,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.053.215,00	19.039.000,00	(14.215,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.555.782,00	28.524.000,00	(31.782,00)	99,88	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.555.782,00	28.524.000,00	(31.782,00)	99,88	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.555.782,00	28.524.000,00	(31.782,00)	99,88	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.800,00	9.950.000,00	(25.800,00)	99,74	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.975.800,00	9.950.000,00	(25.800,00)	99,74	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.975.800,00	9.950.000,00	(25.800,00)	99,74	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.144.800,00	127.758.400,00	(1.386.400,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	128.144.800,00	127.758.400,00	(1.386.400,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.144.800,00	127.758.400,00	(1.386.400,00)	99,92	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.998.300,00	49.900.000,00	(98.300,00)	99,80	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.998.300,00	49.900.000,00	(98.300,00)	99,80	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	49.998.300,00	49.900.000,00	(98.300,00)	99,80	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Pendatan dan Mesin	49.998.300,00	49.900.000,00	(98.300,00)	99,80	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.296.400,00	133.157.500,00	(5.138.900,00)	96,28	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.496.400,00	5.587.500,00	(4.908.900,00)	52,47	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.496.400,00	5.587.500,00	(4.908.900,00)	52,47	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.496.400,00	5.587.500,00	(4.908.900,00)	52,47	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.959.996,00	22.209.000,00	(1.750.996,00)	92,70	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.959.996,00	22.209.000,00	(1.750.996,00)	92,70	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.959.996,00	22.209.000,00	(1.750.996,00)	92,70	
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.959.996,00	22.209.000,00	(1.750.996,00)	92,70	

Lasusua, 20 Agustus 2020
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

SEKRETARIAT

DPRD

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	50.332.256.964,00	28.304.731.397,00	(1.627.525.197,00)	94.63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.334.603.944,00	14.460.689.423,00	(873.913.621,00)	94.30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		Pemberdayaan Perangkat Daerah dan Perangkat DPRD	591.962.110,00	589.854.160,00	(2.107.950,00)	99.50	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pemberdayaan Perangkat Daerah	52.590.960,00	52.140.960,00	(450.000,00)	99.14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.590.960,00	52.140.960,00	(450.000,00)	99.14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.590.960,00	52.140.960,00	(450.000,00)	99.14	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	51.043.200,00	50.413.200,00	(630.000,00)	98.76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.043.200,00	50.413.200,00	(630.000,00)	98.76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.043.200,00	50.413.200,00	(630.000,00)	98.76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Pengelolaan Keuangan Naskah Akademik	488.327.950,00	486.520.080,00	(1.807.950,00)	99.63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	488.327.950,00	486.520.080,00	(1.807.950,00)	99.63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.327.950,00	486.520.080,00	(1.807.950,00)	99.63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	868.929.196,00	606.815.644,00	(262.963.592,00)	71.38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS	147.025.440,00	125.535.440,00	(18.490.000,00)	86.98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.025.440,00	125.535.440,00	(18.490.000,00)	86.98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.025.440,00	125.535.440,00	(18.490.000,00)	86.98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148.080.440,00	146.916.440,00	(1.164.000,00)	99.21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.080.440,00	146.916.440,00	(1.164.000,00)	99.21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.080.440,00	146.916.440,00	(1.164.000,00)	99.21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD	331.769.688,00	109.169.688,00	(222.600.000,00)	32.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	331.769.688,00	109.169.688,00	(222.600.000,00)	32.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.769.688,00	109.169.688,00	(222.600.000,00)	32.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perubahan	167.873.388,00	167.313.396,00	(559.992,00)	99.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	167.873.388,00	167.313.396,00	(559.992,00)	99.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.873.388,00	167.313.396,00	(559.992,00)	99.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005		Pembahasan Penanggungjawaban APBD	59.230.440,00	58.880.440,00	(350.000,00)	99.40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.230.440,00	58.880.440,00	(350.000,00)	99.40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.230.440,00	58.880.440,00	(350.000,00)	99.40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		Penyusunan Pertanggungjawaban Pemerintahan	99.569.880,00	99.219.880,00	(350.000,00)	99.64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.919.920,00	8.919.920,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		Penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	38.130.440,00	37.780.440,00	(350.000,00)	99.03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.130.440,00	37.780.440,00	(350.000,00)	99.03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.130.440,00	37.780.440,00	(350.000,00)	99.03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		Pendukungan Kegiatan DPRD	1.438.096.340,00	1.388.705.560,00	(49.390.780,00)	96.56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendukungan Tugas DPRD	160.916.980,00	139.526.000,00	(21.390.980,00)	86.70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.916.980,00	139.526.000,00	(21.390.980,00)	86.70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.916.980,00	139.526.000,00	(21.390.980,00)	86.70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		Pemvalidasian Tenaga Ahli/Pakar	132.000.000,00	104.000.000,00	(28.000.000,00)	78.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	104.000.000,00	(28.000.000,00)	78.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	104.000.000,00	(28.000.000,00)	78.78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.179.360,00	9.179.360,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.179.360,00	9.179.360,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.247.024.568,00	1.234.906.385,00	(12.118.283,00)	99.02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	38.300.000,00	33.900.000,00	(4.400.000,00)	88.51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.300.000,00	33.900.000,00	(4.400.000,00)	88.51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	33.900.000,00	(4.400.000,00)	88.51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.608.100,00	11.608.100,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.608.100,00	11.608.100,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Rapat	1.197.116.488,00	1.189.398.285,00	(7.718.203,00)	99.35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.197.116.488,00	1.189.398.285,00	(7.718.203,00)	99.35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.197.116.488,00	1.189.398.285,00	(7.718.203,00)	99.35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	11.186.970.730,00	10.543.767.334,00	(566.303.896,00)	94.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.186.922.800,00	10.535.029.104,00	(565.993.896,00)	94.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.186.922.800,00	10.535.029.104,00	(565.993.896,00)	94.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.186.922.800,00	10.535.029.104,00	(565.993.896,00)	94.90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8.948.730,00	8.738.730,00	(210.000,00)	97.65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.948.730,00	8.738.730,00	(210.000,00)	97.65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.948.730,00	8.738.730,00	(210.000,00)	97.65	
4.03	4.03.0.00.0.00.01.0000	4.2.03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.997.653.020,00	14.244.052.896,00	(753.591.356,00)	94.97	
4.03	4.03.0.00.0.00.01.0000	4.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.929.200,00	39.608.200,00	(321.000,00)	99.19	
4.03	4.03.0.00.0.00.01.0000	4.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.946.660,00	14.681.460,00	(265.200,00)	98.22	
4.03	4.03.0.00.0.00.01.0000	4.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.946.660,00	14.681.460,00	(265.200,00)	98.22	
4.03	4.03.0.00.0.00.01.0000	4.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.946.660,00	14.681.460,00	(265.200,00)	98.22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.769.160,00	10.765.160,00	(4.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.769.160,00	10.765.160,00	(4.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.769.160,00	10.765.160,00	(4.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.213.480,00	14.161.480,00	(52.000,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.213.480,00	14.161.480,00	(52.000,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.213.480,00	14.161.480,00	(52.000,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.012.511,00	1.110.150.217,00	(54.862.294,00)	95,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.151.690.551,00	1.096.836.257,00	(54.854.294,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.151.690.551,00	1.096.836.257,00	(54.854.294,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.151.690.551,00	1.096.836.257,00	(54.854.294,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.521.980,00	13.513.980,00	(8.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.521.980,00	13.513.980,00	(8.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.521.980,00	13.513.980,00	(8.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	263.322.480,00	48.800.080,00	(214.472.400,00)	17,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.800.080,00	48.800.080,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.800.080,00	48.800.080,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	155.609.480,00	0,00	(155.609.480,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	155.609.480,00	0,00	(155.609.480,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.609.480,00	0,00	(155.609.480,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.813.000,00	0,00	(78.813.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	78.813.000,00	0,00	(78.813.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.813.000,00	0,00	(78.813.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.314.255.863,00	1.302.750.296,00	(11.505.567,00)	99,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.440.000,00	38.440.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.440.000,00	38.440.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.300.000,00	114.100.000,00	(200.000,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.300.000,00	114.100.000,00	(200.000,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.300.000,00	114.100.000,00	(200.000,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.739.880,00	273.739.566,00	(314,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	273.739.880,00	273.739.566,00	(314,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.739.880,00	273.739.566,00	(314,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.549.000,00	49.482.512,00	(66.488,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.549.000,00	49.482.512,00	(66.488,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.549.000,00	49.482.512,00	(66.488,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.040.000,00	15.360.000,00	(4.680.000,00)	76,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.040.000,00	15.360.000,00	(4.680.000,00)	76,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	15.360.000,00	(4.680.000,00)	76,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	74.626.983,00	74.626.983,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.626.983,00	74.626.983,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		Pemiliharaan Kendaraan Dinas	246.960.000,00	244.230.279,00	(2.729.721,00)	98,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	246.960.000,00	244.230.279,00	(2.729.721,00)	98,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.960.000,00	244.230.279,00	(2.729.721,00)	98,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.600.000,00	492.770.956,00	(3.829.044,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	496.600.000,00	492.770.956,00	(3.829.044,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.600.000,00	492.770.956,00	(3.829.044,00)	99,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	899.878.750,00	897.590.000,00	(2.288.750,00)	99,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.800,00	48.200.800,00	(1.800.000,00)	96,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	50.000.800,00	48.200.800,00	(1.800.000,00)	96,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.800,00	48.200.800,00	(1.800.000,00)	96,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	401.289.580,00	401.000.000,00	(289.580,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	401.289.580,00	401.000.000,00	(289.580,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	401.289.580,00	401.000.000,00	(289.580,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.589.150,00	248.398.000,00	(199.150,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	221.589.150,00	221.398.000,00	(199.150,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.589.150,00	221.398.000,00	(199.150,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.638.320,00	878.346.012,00	(18.292.308,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Kemasikan, Sumber Daya Air dan Listrik	86.172.000,00	69.381.172,00	(16.790.828,00)	70,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.172.000,00	69.381.172,00	(16.790.828,00)	70,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.172.000,00	69.381.172,00	(16.790.828,00)	70,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.756.320,00	43.754.840,00	(1.480,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	43.756.320,00	43.754.840,00	(1.480,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.756.320,00	43.754.840,00	(1.480,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	780.000.000,00	778.500.000,00	(1.500.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	780.000.000,00	778.500.000,00	(1.500.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	778.500.000,00	(1.500.000,00)	99,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.536.416,00	720.453.503,00	(225.082.853,00)	76,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	505.300.000,00	330.213.608,00	(175.086.392,00)	65,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	505.300.000,00	330.213.608,00	(175.086.392,00)	65,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.300.000,00	330.213.608,00	(175.086.392,00)	65,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000,00	41.439.955,20	(2.360.045,00)	96,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	41.439.955,20	(2.360.045,00)	96,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	41.439.955,20	(2.360.045,00)	96,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	597.436.416,00	348.800.000,00	(48.636.416,00)	87,76	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	349.709.916,00	348.800.000,00	(909.916,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.709.916,00	348.800.000,00	(909.916,00)	99,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	47.726.500,00	0,00	(47.726.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.726.500,00	0,00	(47.726.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		Layanan Kesekretariatan DPRD	8.085.500.000,00	7.966.750.696,00	(118.749.304,00)	98,53	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.715.500.000,00	7.618.764.096,00	(96.735.904,00)	98,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.715.500.000,00	7.618.764.096,00	(96.735.904,00)	98,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.02	Belanja Pegawai	7.715.500.000,00	7.618.764.096,00	(96.735.904,00)	98,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	245.000.000,00	240.772.523,00	(4.227.477,00)	98,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	245.000.000,00	240.772.523,00	(4.227.477,00)	98,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	240.772.523,00	(4.227.477,00)	98,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	107.214.077,00	(17.785.923,00)	85,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	107.214.077,00	(17.785.923,00)	85,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	107.214.077,00	(17.785.923,00)	85,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.567.680.000,00	1.479.613.000,00	(88.067.000,00)	94,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.567.680.000,00	1.479.613.000,00	(88.067.000,00)	94,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.567.680.000,00	1.479.613.000,00	(88.067.000,00)	94,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.680.000,00	1.479.613.000,00	(88.067.000,00)	94,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDO SAIFULLAH BAZAK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.554.527.274,00	5.472.991.240,00	(141.536.034,00)	97,45	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.362.888.200,00	1.335.695.580,00	(37.162.620,00)	87,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Penganaan	981.404.700,00	964.978.080,00	(26.426.640,00)	96,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Unsur Perangkat Daerah	182.598.500,00	181.608.500,00	(990.300,00)	99,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.598.500,00	181.608.500,00	(990.300,00)	99,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.598.500,00	181.608.500,00	(990.300,00)	99,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	166.778.700,00	155.242.060,00	(11.536.640,00)	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	166.778.700,00	155.242.060,00	(11.536.640,00)	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.778.700,00	155.242.060,00	(11.536.640,00)	93,08	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	672.027.500,00	648.127.500,00	(23.900.000,00)	96,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	672.027.500,00	648.127.500,00	(23.900.000,00)	96,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.027.500,00	648.127.500,00	(23.900.000,00)	96,44	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	71.844.000,00	71.169.000,00	(675.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	71.844.000,00	71.169.000,00	(675.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.844.000,00	71.169.000,00	(675.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.844.000,00	71.169.000,00	(675.000,00)	99,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	349.609.580,00	349.548.520,00	(60.980,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	295.013.580,00	294.952.520,00	(60.980,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	295.013.580,00	294.952.520,00	(60.980,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.013.580,00	294.952.520,00	(60.980,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	54.596.000,00	54.596.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.596.000,00	54.596.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.170.255.000,00	1.168.030.385,00	(2.224.615,00)	99,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	629.955.000,00	628.995.747,00	(539.353,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		Adminsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	98.500.000,00	98.161.000,00	(339.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	98.500.000,00	98.161.000,00	(339.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	98.161.000,00	(339.000,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	99,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	238.000.000,00	237.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	238.000.000,00	237.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.000.000,00	237.999.800,00	(200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	127.035.000,00	127.034.947,00	(53,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	127.035.000,00	127.034.947,00	(53,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.035.000,00	127.034.947,00	(53,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	288.000.000,00	286.315.000,00	(1.685.000,00)	99,37	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	238.000.000,00	236.315.000,00	(1.685.000,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	238.000.000,00	236.315.000,00	(1.685.000,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.000.000,00	236.315.000,00	(1.685.000,00)	99,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	272.720.000,00	272.719.638,00	(362,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.720.000,00	59.720.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	59.720.000,00	59.720.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	145.000.000,00	144.999.638,00	(362,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	144.999.638,00	(362,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	144.999.638,00	(362,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.021.214.074,00	2.919.285.275,00	(101.848.799,00)	96,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.649.500,00	111.529.500,00	(120.000,00)	99,89	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	34.094.500,00	33.974.500,00	(120.000,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.094.500,00	33.974.500,00	(120.000,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.094.500,00	33.974.500,00	(120.000,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.548.000,00	13.548.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.548.000,00	13.548.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.047.000,00	36.047.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.047.000,00	36.047.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.090.777.155,00	993.649.555,00	(97.127.602,00)	91,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0006		Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	1.068.141.155,00	971.015.555,00	(97.127.602,00)	90,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.068.141.155,00	971.015.555,00	(97.127.602,00)	90,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.068.141.155,00	971.013.553,00	(97.127.602,00)	90,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.656.000,00	8.656.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.656.000,00	8.656.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	980.648.619,00	980.647.567,00	(1.052,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.408.619,00	7.408.619,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.408.619,00	7.408.619,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.505.000,00	61.504.902,00	(98,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.505.000,00	61.504.902,00	(98,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.505.000,00	61.504.902,00	(98,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000,00	67.999.921,00	(79,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	67.999.921,00	(79,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	67.999.921,00	(79,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kearsipan Tata	88.800.000,00	88.799.120,00	(880,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	88.800.000,00	88.799.120,00	(880,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	88.799.120,00	(880,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	660.735.000,00	660.735.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.735.000,00	660.735.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.000.000,00	363.300.000,00	(4.700.000,00)	98,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.000.000,00	363.300.000,00	(4.700.000,00)	98,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0002	5.3	BELANJA MODAL	368.000.000,00	363.300.000,00	(4.700.000,00)	98,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0002	5.3.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.000.000,00	363.300.000,00	(4.700.000,00)	98,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.200.140,00	208.200.000,00	(140,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Keamanan, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.140,00	3.000.000,00	(140,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.140,00	3.000.000,00	(140,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.140,00	3.000.000,00	(140,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	276.340.000,00	276.340.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.340.000,00	276.340.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.488.668,00	59.488.668,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.488.668,00	59.488.668,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.348.000.000,00	2.322.190.800,00	(25.809.200,00)	98,90	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.348.000.000,00	2.322.190.800,00	(25.809.200,00)	98,90	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	686.782.700,00	673.792.300,00	(12.990.400,00)	98,11	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	137.568.500,00	136.840.000,00	(728.500,00)	99,47	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	137.568.500,00	136.840.000,00	(728.500,00)	99,47	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.568.500,00	136.840.000,00	(728.500,00)	99,47	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	113.049.500,00	101.046.000,00	(12.003.500,00)	89,38	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.049.500,00	101.046.000,00	(12.003.500,00)	89,38	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.049.500,00	101.046.000,00	(12.003.500,00)	89,38	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0004		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	257.771.000,00	257.602.300,00	(168.700,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	257.771.000,00	257.602.300,00	(168.700,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.771.000,00	257.602.300,00	(168.700,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	36.360.000,00	36.346.000,00	(13.500,00)	99,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.259.500,00	36.246.000,00	(13.500,00)	99,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.259.500,00	36.246.000,00	(13.500,00)	99,96	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0012		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Penelitian	53.988.800,00	53.928.000,00	(60.800,00)	99,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	53.988.800,00	53.928.000,00	(60.800,00)	99,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.988.800,00	53.928.000,00	(60.800,00)	99,88	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0014		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Diklat dan Penelitian Pertanian	88.145.400,00	88.130.000,00	(15.400,00)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	88.145.400,00	88.130.000,00	(15.400,00)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.145.400,00	88.130.000,00	(15.400,00)	99,98	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.02.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0004	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0007	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0011	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	211.217.300,00	98.398.980,00	(12.818.880,00)	46,59	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	141.292.000,00	141.035.000,00	(257.000,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	141.292.000,00	141.035.000,00	(257.000,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.292.000,00	141.035.000,00	(257.000,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	69.925.300,00	57.363.500,00	(12.561.800,00)	82,03	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.925.300,00	57.363.500,00	(12.561.800,00)	82,03	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.925.300,00	57.363.500,00	(12.561.800,00)	82,03	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KIFLI SAIFULLAH RAZAK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	640.850.699.577,00	638.575.923.793,00	(2.274.785.784,00)	99,64	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.951.532.486,00	14.285.144.713,00	333.612.227,00	102,39	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	3.640.000.000,00	4.296.468.604,00	756.468.604,00	120,78	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.256.088.487,00	4.256.088.487,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.917.843.999,00	5.410.087.620,00	(507.856.377,00)	91,42	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	626.919.157.091,00	624.290.779.080,00	(2.628.378.011,00)	99,58	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.094.396.000,00	608.499.872.023,00	1.405.476.023,00	100,23	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.824.761.091,00	15.790.907.057,00	(3.933.854.034,00)	80,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	136.408.478.148,00	131.438.686.141,00	(4.969.792.007,00)	97,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	111.116.841.459,00	109.503.936.706,00	(1.102.684.753,00)	98,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah	2.208.260.130,00	2.080.236.042,00	(128.024.088,00)	94,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	143.308.400,00	130.419.500,00	(9.888.900,00)	92,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	143.308.400,00	130.419.500,00	(9.888.900,00)	92,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.308.400,00	130.419.500,00	(9.888.900,00)	92,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RUA dan Perubahan PPAS	153.113.520,00	153.112.760,00	(760,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	153.113.520,00	153.112.760,00	(760,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.113.520,00	153.112.760,00	(760,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.555.680,00	72.555.000,00	(680,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.555.680,00	72.555.000,00	(680,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.555.680,00	72.555.000,00	(680,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	67.150.550,00	67.142.260,00	(8.290,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	67.150.550,00	67.142.260,00	(8.290,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.150.550,00	67.142.260,00	(8.290,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58.591.280,00	39.672.000,00	(18.919.280,00)	67,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.591.280,00	39.672.000,00	(18.919.280,00)	67,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.591.280,00	39.672.000,00	(18.919.280,00)	67,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	57.700.020,00	57.700.000,00	(20,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.700.020,00	57.700.000,00	(20,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.700.020,00	57.700.000,00	(20,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450.221.888,00	435.721.000,00	(14.500.888,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	450.221.888,00	435.721.000,00	(14.500.888,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.221.888,00	435.721.000,00	(14.500.888,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	217.252.420,00	217.252.000,00	(420,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	217.252.420,00	217.252.000,00	(420,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.252.420,00	217.252.000,00	(420,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	48.575.280,00	48.575.000,00	(280,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.575.280,00	48.575.000,00	(280,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.575.280,00	48.575.000,00	(280,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0010		Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan	46.184.368,00	46.184.000,00	(368,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	46.184.368,00	46.184.000,00	(368,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.184.368,00	46.184.000,00	(368,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011		Koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	463.315.306,00	379.152.532,00	(84.162.778,00)	81,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	463.315.306,00	379.152.532,00	(84.162.778,00)	81,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.315.306,00	379.152.532,00	(84.162.778,00)	81,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0012		Koordinasi Penyusunan Anggaran Pembiayaan	46.121.608,00	46.120.000,00	(1.608,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	46.121.608,00	46.120.000,00	(1.608,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.121.608,00	46.120.000,00	(1.608,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penggunaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	387.156.860,00	386.620.000,00	(536.860,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	387.156.860,00	386.620.000,00	(536.860,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.156.860,00	386.620.000,00	(536.860,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.180.000.038,00	1.178.604.840,00	(1.395.198,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	77.508.500,00	77.498.500,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.508.500,00	77.498.500,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.508.500,00	77.498.500,00	(10.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.522.500,00	76.232.500,00	(290.000,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.522.500,00	76.232.500,00	(290.000,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.522.500,00	76.232.500,00	(290.000,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	57.114.500,00	57.114.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.114.500,00	57.114.500,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	283.678.000,00	282.843.840,00	(834.160,00)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	283.678.000,00	282.843.840,00	(834.160,00)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.678.000,00	282.843.840,00	(834.160,00)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/ Pemanggilan dan Penyelesaian Pemberitahuan Pajak Kotor (PFK)	115.065.500,00	115.059.000,00	(6.500,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	115.065.500,00	115.059.000,00	(6.500,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.065.500,00	115.059.000,00	(6.500,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penerapan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	38.261.000,00	38.254.000,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.261.000,00	38.254.000,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.261.000,00	38.254.000,00	(7.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerapan dan Pemrosesan atas SP2D dengan Instansi Terkait	98.562.538,00	98.561.000,00	(1.538,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	98.562.538,00	98.561.000,00	(1.538,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.562.538,00	98.561.000,00	(1.538,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pembukuan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	272.879.000,00	272.638.000,00	(212.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	272.879.000,00	272.638.000,00	(212.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.879.000,00	272.638.000,00	(212.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	160.417.500,00	160.403.500,00	(14.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	160.417.500,00	160.403.500,00	(14.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.417.500,00	160.403.500,00	(14.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.140.000.000,00	2.012.511.141,00	(127.488.859,00)	94,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	50.000.000,00	49.762.000,00	(238.000,00)	99,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.762.000,00	(238.000,00)	99,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.762.000,00	(238.000,00)	99,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	350.000.000,00	348.276.120,00	(1.723.880,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	348.276.120,00	(1.723.880,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	348.276.120,00	(1.723.880,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	70.000.000,00	69.819.000,00	(181.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.819.000,00	(181.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.819.000,00	(181.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	500.000.000,00	499.698.000,00	(302.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.698.000,00	(302.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.698.000,00	(302.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000,00	48.227.000,00	(1.773.000,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.227.000,00	(1.773.000,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.227.000,00	(1.773.000,00)	96,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000,00	98.729.000,00	(1.271.000,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.729.000,00	(1.271.000,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.729.000,00	(1.271.000,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	900.000.000,00	898.000.021,00	(1.999.979,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	898.000.021,00	(1.999.979,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	898.000.021,00	(1.999.979,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	104.616.811.300,00	103.693.295.010,00	(923.516.290,00)	99,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Dagang dan Mendanai	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	973.579.991,00	971.319.673,00	(2.260.318,00)	99,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	973.579.991,00	971.319.673,00	(2.260.318,00)	99,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	973.579.991,00	971.319.673,00	(2.260.318,00)	99,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.579.991,00	971.319.673,00	(2.260.318,00)	99,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.050.234.000,00	1.049.813.605,00	(420.395,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.050.234.000,00	1.049.813.605,00	(420.395,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	205.000.000,00	204.945.200,00	(54.800,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	205.000.000,00	204.945.200,00	(54.800,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.945.200,00	(54.800,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.178.000,00	51.178.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.178.000,00	51.178.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	75.000.000,00	74.980.000,00	(20.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.980.000,00	(20.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.980.000,00	(20.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	220.000.000,00	219.820.000,00	(180.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	220.000.000,00	219.820.000,00	(180.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	219.820.000,00	(180.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.01	Belanja Modal Tanah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	(80.000,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	(80.000,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	(80.000,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	106.496.000,00	106.490.405,00	(5.595,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	106.496.000,00	106.490.405,00	(5.595,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.496.000,00	106.490.405,00	(5.595,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.488.712.000,00	1.483.477.060,00	(6.234.940,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.488.712.000,00	1.483.477.060,00	(6.234.940,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	77.000.000,00	76.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	76.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	76.950.000,00	(50.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	69.300.000,00	69.125.000,00	(175.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.300.000,00	69.125.000,00	(175.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	69.125.000,00	(175.000,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	424.250.000,00	423.660.000,00	(590.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	424.250.000,00	423.660.000,00	(590.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.250.000,00	423.660.000,00	(590.000,00)	99,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	293.937.000,00	288.503.960,00	(4.448.020,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	293.937.000,00	288.503.960,00	(4.448.020,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.937.000,00	288.503.960,00	(4.448.020,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		Pengolahan, Penelitian, dan Pelaporan Hasil Data Pajak Daerah	250.000.000,00	249.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.125.000,00	37.111.000,00	(14.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	37.125.000,00	37.111.000,00	(14.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.125.000,00	37.111.000,00	(14.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	24.750.000,00	24.736.000,00	(14.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	24.736.000,00	(14.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.736.000,00	(14.000,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.750.000,00	24.744.000,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	24.744.000,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.744.000,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	24.750.000,00	24.554.000,00	(196.000,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	24.554.000,00	(196.000,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	24.554.000,00	(196.000,00)	99,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	114.835.000,00	114.488.080,00	(346.920,00)	99,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	114.835.000,00	114.488.080,00	(346.920,00)	99,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.835.000,00	114.488.080,00	(346.920,00)	99,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.749.830.688,00	18.969.338.770,00	(1.780.491.919,00)	91,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.379.396,00	278.012.396,00	(1.367.000,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.764.600,00	45.735.600,00	(29.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.764.600,00	45.735.600,00	(29.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.764.600,00	45.735.600,00	(29.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.568.190,00	42.286.190,00	(279.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.568.190,00	42.286.190,00	(279.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.568.190,00	42.286.190,00	(279.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.497.735,00	47.367.735,00	(130.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.497.735,00	47.367.735,00	(130.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.497.735,00	47.367.735,00	(130.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.113.494,00	22.105.494,00	(8.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.113.494,00	22.105.494,00	(8.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.113.494,00	22.105.494,00	(8.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.412.899,00	23.406.899,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.412.899,00	23.406.899,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.412.899,00	23.406.899,00	(6.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.473.308,00	51.094.308,00	(379.000,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	51.473.308,00	51.094.308,00	(379.000,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.473.308,00	51.094.308,00	(379.000,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.552.170,00	47.016.170,00	(536.000,00)	98,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	47.552.170,00	47.016.170,00	(536.000,00)	98,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.552.170,00	47.016.170,00	(536.000,00)	98,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.706.941.549,00	13.520.933.826,00	(1.186.007.723,00)	91,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyelipan Gaji dan Tunjangan ASN	13.543.212.621,00	12.358.029.898,00	(1.185.182.723,00)	91,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.543.212.621,00	12.358.029.898,00	(1.185.182.723,00)	91,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.543.212.621,00	12.358.029.898,00	(1.185.182.723,00)	91,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0002		Penyelipan Administrasi Pelaksanaan Tugas	44.927.535,00	44.742.535,00	(185.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.927.535,00	44.742.535,00	(185.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.927.535,00	44.742.535,00	(185.000,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.923.885,00	27.627.885,00	(296.000,00)	98,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.923.885,00	27.627.885,00	(296.000,00)	98,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.923.885,00	27.627.885,00	(296.000,00)	98,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.739.300,00	33.649.300,00	(90.000,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.739.300,00	33.649.300,00	(90.000,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.739.300,00	33.649.300,00	(90.000,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.863.604,00	36.523.604,00	(340.000,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.31.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.863.604,00	36.523.604,00	(340.000,00)	99,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.843.604,00	36.603.604,00	(240.000,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.284.624,00	20.280.624,00	(14.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.284.624,00	20.280.624,00	(14.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.284.624,00	20.280.624,00	(14.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109.765.750,00	109.249.620,00	(516.130,00)	99,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	27.190.195,00	26.739.995,00	(450.200,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.190.195,00	26.739.995,00	(450.200,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.190.195,00	26.739.995,00	(450.200,00)	98,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.373.795,00	15.351.495,00	(22.300,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.373.795,00	15.351.495,00	(22.300,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.373.795,00	15.351.495,00	(22.300,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.981.230,00	27.967.000,00	(14.230,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.981.230,00	27.967.000,00	(14.230,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.981.230,00	27.967.000,00	(14.230,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0006		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada	21.630.355,00	21.614.955,00	(15.400,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.630.355,00	21.614.955,00	(15.400,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.630.355,00	21.614.955,00	(15.400,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	17.590.175,00	17.576.175,00	(14.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.590.175,00	17.576.175,00	(14.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.590.175,00	17.576.175,00	(14.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.282.305,00	282.786.809,00	(495.510,00)	99,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002		Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	115.000.000,00	114.630.000,00	(370.000,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	114.630.000,00	(370.000,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	114.630.000,00	(370.000,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	20.660.765,00	20.645.765,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.660.765,00	20.645.765,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.660.765,00	20.645.765,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.177.935,00	24.162.935,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.177.935,00	24.162.935,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.177.935,00	24.162.935,00	(15.000,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0006		Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai	24.020.605,00	24.004.305,00	(16.300,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.020.605,00	24.004.305,00	(16.300,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.020.605,00	24.004.305,00	(16.300,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.423.000,00	99.343.800,00	(79.200,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.423.000,00	99.343.800,00	(79.200,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.423.000,00	99.343.800,00	(79.200,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.659.124.705,00	1.643.764.599,00	(15.360.106,00)	99,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.445.140,00	13.427.900,00	(17.240,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.445.140,00	13.427.900,00	(17.240,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.445.140,00	13.427.900,00	(17.240,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.797.940,00	0,00	(10.797.940,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.587.940,00	0,00	(10.587.940,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.587.940,00	0,00	(10.587.940,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Perajatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.964.325,00	84.901.000,00	(63.325,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	84.964.325,00	84.901.000,00	(63.325,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.964.325,00	84.901.000,00	(63.325,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.589.300,00	103.466.900,00	(111.400,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	103.589.300,00	103.466.900,00	(111.400,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.589.300,00	103.466.900,00	(111.400,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.558.000,00	3.520.000,00	(38.000,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.558.000,00	3.520.000,00	(38.000,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.558.000,00	3.520.000,00	(38.000,00)	98,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	361.210.000,00	360.836.000,00	(374.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	361.210.000,00	360.836.000,00	(374.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.210.000,00	360.836.000,00	(374.000,00)	99,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.311.000,00	731.287.699,00	(23.301,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	731.311.000,00	731.287.699,00	(23.301,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.311.000,00	731.287.699,00	(23.301,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.266.000,00	296.323.100,00	(3.942.900,00)	98,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	300.266.000,00	296.323.100,00	(3.942.900,00)	98,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.266.000,00	296.323.100,00	(3.942.900,00)	98,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.188.440.000,00	2.083.800.000,00	(104.640.000,00)	95,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.514.080.000,00	1.484.480.000,00	(29.600.000,00)	98,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.514.080.000,00	1.484.480.000,00	(29.600.000,00)	98,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.514.080.000,00	1.484.480.000,00	(29.600.000,00)	98,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	509.400.000,00	509.400.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	509.400.000,00	509.400.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.040.000,00	90.000.000,00	(75.040.000,00)	54,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	90.040.000,00	90.000.000,00	(40.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.040.000,00	90.000.000,00	(40.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.752.569,00	726.901.881,00	(160.850.688,00)	81,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Jasa Monyetan	6.150.000,00	1.500.000,00	(4.650.000,00)	24,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	1.500.000,00	(4.650.000,00)	24,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	1.500.000,00	(4.650.000,00)	24,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.802.508,00	117.801.881,00	(619,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.802.508,00	117.801.881,00	(619,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.802.508,00	117.801.881,00	(619,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.840.000,00	607.500.000,00	(156.340.000,00)	79,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	763.840.000,00	607.500.000,00	(156.340.000,00)	79,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.840.000,00	607.500.000,00	(156.340.000,00)	79,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.854.149.484,00	1.323.989.645,00	(511.154.841,00)	68,05	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	514.650.000,00	465.006.629,00	(49.643.371,00)	90,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	514.650.000,00	465.006.629,00	(49.643.371,00)	90,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.650.000,00	465.006.629,00	(49.643.371,00)	90,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.170.484,00	236.991.314,00	(179.170,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.170.484,00	236.991.314,00	(179.170,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.170.484,00	236.991.314,00	(179.170,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.000.000,00	83.991.708,00	(8.308,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	83.991.708,00	(8.308,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	83.991.708,00	(8.308,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	428.320.000,00	415.000.000,00	(13.320.000,00)	96,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	428.320.000,00	415.000.000,00	(13.320.000,00)	96,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.320.000,00	415.000.000,00	(13.320.000,00)	96,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	370.004.000,00	122.000.000,00	(248.004.000,00)	32,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.004.000,00	20.000.000,00	(4.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.004.000,00	20.000.000,00	(4.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	102.000.000,00	(248.000.000,00)	29,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	102.000.000,00	(248.000.000,00)	29,14	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.884.731.412,00	59.884.731.412,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.308.782.634,00	3.557.235.261,00	(611.547.373,00)	85,33	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.311.786.825,00	1.804.124.000,00	(507.662.825,00)	78,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	888.222.000,00	767.154.000,00	(121.068.000,00)	86,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	68.950.000,00	58.905.000,00	(7.045.000,00)	89,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.950.000,00	58.905.000,00	(7.045.000,00)	89,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.950.000,00	58.905.000,00	(7.045.000,00)	89,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	425.552.000,00	368.669.000,00	(56.883.000,00)	86,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	425.552.000,00	368.669.000,00	(56.883.000,00)	86,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.552.000,00	368.669.000,00	(56.883.000,00)	86,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	76.450.000,00	73.739.000,00	(2.811.000,00)	96,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.450.000,00	73.739.000,00	(2.811.000,00)	96,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.450.000,00	73.739.000,00	(2.811.000,00)	96,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	135.550.000,00	132.784.000,00	(2.766.000,00)	97,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	135.550.000,00	132.784.000,00	(2.766.000,00)	97,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.550.000,00	132.784.000,00	(2.766.000,00)	97,95	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	185.020.000,00	133.457.000,00	(51.563.000,00)	72,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	185.020.000,00	133.457.000,00	(51.563.000,00)	72,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.020.000,00	133.457.000,00	(51.563.000,00)	72,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	464.900.000,00	443.515.000,00	(21.385.000,00)	95,39	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	49.996.000,00	33.300.000,00	(16.696.000,00)	66,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.996.000,00	33.300.000,00	(16.696.000,00)	66,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.000,00	33.300.000,00	(16.696.000,00)	66,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	168.900.000,00	164.013.000,00	(4.887.000,00)	97,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	168.900.000,00	164.013.000,00	(4.887.000,00)	97,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.900.000,00	164.013.000,00	(4.887.000,00)	97,10	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Pensiun ASN	246.010.000,00	246.000.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	246.010.000,00	246.000.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.010.000,00	246.000.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pemberhentian Kematian ASN	696.772.000,00	309.359.000,00	(387.413.000,00)	55,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center	447.550.000,00	183.709.000,00	(263.841.000,00)	41,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	447.550.000,00	183.709.000,00	(263.841.000,00)	41,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.550.000,00	183.709.000,00	(263.841.000,00)	41,04	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	199.222.000,00	195.650.000,00	(3.572.000,00)	97,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	199.222.000,00	195.650.000,00	(3.572.000,00)	97,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.222.000,00	195.650.000,00	(3.572.000,00)	97,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	281.846.825,00	204.261.000,00	(97.586.825,00)	72,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,00	34.345.000,00	(655.000,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.345.000,00	(655.000,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.345.000,00	(655.000,00)	98,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	0,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Penghargaan bagi Pegawai	71.060.025,00	33.000.000,00	(38.060.025,00)	46,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.060.025,00	33.000.000,00	(38.060.025,00)	46,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.060.025,00	33.000.000,00	(38.060.025,00)	46,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	83.076.800,00	71.266.000,00	(11.810.800,00)	85,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.076.800,00	71.266.000,00	(11.810.800,00)	85,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.076.800,00	71.266.000,00	(11.810.800,00)	85,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	116.200.000,00	114.155.000,00	(2.045.000,00)	98,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	116.200.000,00	114.155.000,00	(2.045.000,00)	98,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00	114.155.000,00	(2.045.000,00)	98,24	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Pemeliharaan Perlengkapan Pelayanan Publik ASN	34.250.000,00	1.532.000,00	(32.718.000,00)	4,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	1.532.000,00	(32.718.000,00)	4,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	1.532.000,00	(32.718.000,00)	4,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.850.995.809,00	1.739.111.261,00	(103.884.548,00)	94,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.250.000,00	20.395.000,00	(855.000,00)	95,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	6.790.000,00	6.690.000,00	(100.000,00)	98,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.790.000,00	6.690.000,00	(100.000,00)	98,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	6.690.000,00	(100.000,00)	98,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.550.000,00	13.795.000,00	(755.000,00)	94,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.550.000,00	13.795.000,00	(755.000,00)	94,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	13.795.000,00	(755.000,00)	94,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.081.615.613,00	495.861.661,00	(585.753.952,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.044.915.613,00	589.211.661,00	(455.703.952,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.044.915.613,00	589.211.661,00	(455.703.952,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.044.915.613,00	589.211.661,00	(455.703.952,00)	94,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.700.000,00	6.650.000,00	(50.000,00)	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.650.000,00	(50.000,00)	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.650.000,00	(50.000,00)	99,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.650.000,00	33.200.000,00	(450.000,00)	98,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.650.000,00	33.200.000,00	(450.000,00)	98,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.650.000,00	33.200.000,00	(450.000,00)	98,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	33.200.000,00	(450.000,00)	98,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.555.100,00	373.550.600,00	(39.892.500,00)	90,37	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.685.000,00	2.000.000,00	(685.000,00)	74,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.685.000,00	2.000.000,00	(685.000,00)	74,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	2.000.000,00	(685.000,00)	74,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.627.600,00	1.500.000,00	(1.127.600,00)	57,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.627.600,00	1.500.000,00	(1.127.600,00)	57,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.627.600,00	1.500.000,00	(1.127.600,00)	57,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.104.500,00	19.382.600,00	(2.721.900,00)	87,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.104.500,00	19.382.600,00	(2.721.900,00)	87,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		BASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	22.934.500,00	19.382.600,00	(3.721.900,00)	87,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		Pemeliharaan Barang Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	12.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000,00	10.080.000,00	(320.000,00)	96,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	10.080.000,00	(320.000,00)	96,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.080.000,00	(320.000,00)	96,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.020.000,00	31.475.000,00	(2.545.000,00)	92,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.020.000,00	31.475.000,00	(2.545.000,00)	92,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.020.000,00	31.475.000,00	(2.545.000,00)	92,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.516.000,00	296.114.000,00	(32.402.000,00)	90,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	328.516.000,00	296.114.000,00	(32.402.000,00)	90,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.516.000,00	296.114.000,00	(32.402.000,00)	90,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000,00	87.190.000,00	(2.810.000,00)	96,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	27.250.000,00	(2.750.000,00)	90,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	27.250.000,00	(2.750.000,00)	90,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	27.250.000,00	(2.750.000,00)	90,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.195.000,00	139.578.000,00	(1.617.000,00)	98,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	1.995.000,00	1.950.000,00	(45.000,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.995.000,00	1.950.000,00	(45.000,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.000,00	1.950.000,00	(45.000,00)	97,74	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	5.628.000,00	(1.572.000,00)	78,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	5.628.000,00	(1.572.000,00)	78,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.628.000,00	(1.572.000,00)	78,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.932.096,00	103.336.000,00	(2.596.096,00)	97,54	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.932.096,00	103.336.000,00	(2.596.096,00)	97,54	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	105.932.096,00	103.336.000,00	(2.596.096,00)	97,54	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.932.096,00	103.336.000,00	(2.596.096,00)	97,54	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	100,00	

Langkia, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH BAZAM

INSPEKTORAT

DAERAH

Lampiran I. 2 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.511.373.915,00	6.874.912.588,00	(1.336.461.327,00)	83,06	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN	2.386.010.900,00	1.707.448.523,00	(678.561.477,00)	71,56	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.875.110.900,00	1.319.188.523,00	(555.921.477,00)	70,35	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.069.750.900,00	777.794.000,00	(291.956.900,00)	72,70	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.069.750.900,00	777.794.000,00	(291.956.900,00)	72,70	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.750.900,00	777.794.000,00	(291.956.900,00)	72,70	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	242.750.900,00	170.575.000,00	(72.175.900,00)	70,26	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	242.750.900,00	170.575.000,00	(72.175.900,00)	70,26	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.750.900,00	170.575.000,00	(72.175.900,00)	70,26	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0003		Kota Laporan Kinerja	75.950.900,00	71.525.900,00	(4.425.000,00)	94,17	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.950.900,00	71.525.900,00	(4.425.000,00)	94,17	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.950.900,00	71.525.900,00	(4.425.000,00)	94,17	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0004		Kota Laporan Keuangan	34.750.900,00	31.010.900,00	(3.740.000,00)	89,23	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.750.900,00	31.010.900,00	(3.740.000,00)	89,23	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.750.900,00	31.010.900,00	(3.740.000,00)	89,23	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Dana	288.700.900,00	146.920.900,00	(141.780.000,00)	50,89	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	288.700.900,00	146.920.900,00	(141.780.000,00)	50,89	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.700.900,00	146.920.900,00	(141.780.000,00)	50,89	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	13.410.900,00	12.974.523,00	(435.477,00)	96,75	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.410.900,00	12.974.523,00	(435.477,00)	96,75	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.410.900,00	12.974.523,00	(435.477,00)	96,75	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	147.800.000,00	108.400.000,00	(39.400.000,00)	73,34	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	147.800.000,00	108.400.000,00	(39.400.000,00)	73,34	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.800.000,00	108.400.000,00	(39.400.000,00)	73,34	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	512.900.000,00	388.250.000,00	(124.650.000,00)	75,69	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0001		Penanganan Pengaduan Kewajiban	295.200.000,00	275.750.000,00	(19.450.000,00)	93,41	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	295.200.000,00	275.750.000,00	(19.450.000,00)	93,41	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.200.000,00	275.750.000,00	(19.450.000,00)	93,41	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	217.700.000,00	112.500.000,00	(105.200.000,00)	51,67	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	217.700.000,00	112.500.000,00	(105.200.000,00)	51,67	
6.01	6.01.0.00.0.60.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.700.000,00	112.500.000,00	(105.200.000,00)	51,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	663.405.000,00	568.404.350,00	(95.000.150,00)	85,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	71.640.000,00	46.960.000,00	(24.680.000,00)	65,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	71.640.000,00	46.960.000,00	(24.680.000,00)	65,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.640.000,00	46.960.000,00	(24.680.000,00)	65,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.640.000,00	46.960.000,00	(24.680.000,00)	65,54	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	591.855.000,00	521.444.350,00	(70.410.150,00)	88,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000,00	73.325.000,00	(4.175.000,00)	94,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.500.000,00	73.325.000,00	(4.175.000,00)	94,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	73.325.000,00	(4.175.000,00)	94,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.975.000,00	0,00	(13.975.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.975.000,00	0,00	(13.975.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.975.000,00	0,00	(13.975.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	491.560.000,00	448.119.350,00	(43.440.150,00)	91,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	491.560.000,00	448.119.350,00	(43.440.150,00)	91,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.560.000,00	448.119.350,00	(43.440.150,00)	91,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengadaan Inovasi	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	0,00	(8.820.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.261.868.915,00	3.750.119.215,00	(462.749.698,00)	88,14	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.686.000,00	14.388.780,00	(26.297.220,00)	35,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.086.000,00	14.388.780,00	(14.697.220,00)	49,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.086.000,00	14.388.780,00	(14.697.220,00)	49,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.086.000,00	14.388.780,00	(14.697.220,00)	49,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.771.813,00	1.743.435.979,00	(94.335.834,00)	94,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.831.271.813,00	1.743.435.979,00	(87.835.834,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.831.271.813,00	1.743.435.979,00	(87.835.834,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.831.271.813,00	1.743.435.979,00	(87.835.834,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	916.623.000,00	709.446.712,00	(209.176.288,00)	77,39	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000,00	21.915.000,00	(85.000,00)	99,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	21.915.000,00	(85.000,00)	99,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.915.000,00	(85.000,00)	99,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	670.271.000,00	543.481.712,00	(126.791.288,00)	81,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	670.271.000,00	543.481.712,00	(126.791.288,00)	81,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	670.271.000,00	543.481.712,00	(126.791.288,00)	81,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	226.350.000,00	144.050.000,00	(82.300.000,00)	63,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	226.350.000,00	144.050.000,00	(82.300.000,00)	63,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.350.000,00	144.050.000,00	(82.300.000,00)	63,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.649.700,00	521.097.531,00	(24.552.169,00)	95,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.260.700,00	74.860.800,00	(6.399.900,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.260.700,00	74.860.800,00	(6.399.900,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.260.700,00	74.860.800,00	(6.399.900,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.268.000,00	46.260.000,00	(8.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	46.268.000,00	46.260.000,00	(8.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.268.000,00	46.260.000,00	(8.000,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.180.000,00	(620.000,00)	87,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.180.000,00	(620.000,00)	87,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.180.000,00	(620.000,00)	87,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.200.000,00	52.750.000,00	(7.450.000,00)	87,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.200.000,00	52.750.000,00	(7.450.000,00)	87,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	52.750.000,00	(7.450.000,00)	87,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.121.000,00	343.046.731,00	(7.074.269,00)	97,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	350.121.000,00	343.046.731,00	(7.074.269,00)	97,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.121.000,00	343.046.731,00	(7.074.269,00)	97,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	592.473.400,00	555.473.400,00	(37.000.000,00)	93,75	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000,00	433.000.000,00	(37.000.000,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	470.000.000,00	433.000.000,00	(37.000.000,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.000.000,00	433.000.000,00	(37.000.000,00)	92,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	122.473.400,00	122.473.400,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.473.400,00	122.473.400,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.610.000,00	117.609.200,00	(29.800.800,00)	80,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.700.000,00	5.199.200,00	(18.500.800,00)	21,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.700.000,00	5.199.200,00	(18.500.800,00)	21,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	5.199.200,00	(18.500.800,00)	21,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000,00	103.500.000,00	(10.500.000,00)	90,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	114.000.000,00	103.500.000,00	(10.500.000,00)	90,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	103.500.000,00	(10.500.000,00)	90,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.055.000,00	137.667.613,00	(36.387.387,00)	79,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.055.000,00	137.667.613,00	(26.387.387,00)	83,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	164.055.000,00	137.667.613,00	(26.387.387,00)	83,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.055.000,00	137.667.613,00	(26.387.387,00)	83,91	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	

Langgur, 11 Agustus 2025
RUMAH KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN
WAWONII BARAT

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII BARAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	433.000.000,00	435.280.000,00	2.280.800,00	100,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	362.000.000,00	364.280.800,00	2.280.800,00	100,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.830.440,00	19.590.000,00	(240.440,00)	98,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.832.880,00	4.680.000,00	(152.880,00)	96,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.832.880,00	4.680.000,00	(152.880,00)	96,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.832.880,00	4.680.000,00	(152.880,00)	96,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.997.560,00	14.910.000,00	(87.560,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.997.560,00	14.910.000,00	(87.560,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.997.560,00	14.910.000,00	(87.560,00)	99,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.732.560,00	213.570.080,00	8.837.440,00	104,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.838.860,00	19.080.000,00	3.241.140,00	120,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.838.860,00	19.080.000,00	3.241.140,00	120,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.838.860,00	19.080.000,00	3.241.140,00	120,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.993.700,00	14.895.000,00	(98.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.993.700,00	14.895.000,00	(98.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.993.700,00	14.895.000,00	(98.700,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.100.000,00	18.780.000,00	1.680.000,00	109,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	18.780.000,00	1.680.000,00	109,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	18.780.000,00	1.680.000,00	109,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	156.800.000,00	160.815.000,00	4.015.000,00	102,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	156.800.000,00	160.815.000,00	4.015.000,00	102,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.800.000,00	160.815.000,00	4.015.000,00	102,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	54.800.000,00	(5.200.000,00)	91,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000,00	54.800.000,00	(5.200.000,00)	91,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	60.000.000,00	54.800.000,00	(5.200.000,00)	91,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	54.800.000,00	(5.200.000,00)	91,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	59.247.000,00	58.740.000,00	(507.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	1.600.000,00	(500.000,00)	76,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.600.000,00	(500.000,00)	76,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.600.000,00	(500.000,00)	76,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.147.000,00	3.140.000,00	(7.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.147.000,00	3.140.000,00	(7.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.147.000,00	3.140.000,00	(7.000,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.190.000,00	14.580.000,00	(610.000,00)	95,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.590.000,00	4.980.000,00	(610.000,00)	89,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.590.000,00	4.980.000,00	(610.000,00)	89,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	4.980.000,00	(610.000,00)	89,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	

Lasuara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. IR. SAIFULLAH BAZAK

KELURAHAN
LANGARA LAUT

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN LANGARA LAUT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	260.000.000,00	249.040.000,00	(10.960.000,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.07.0003	5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.07.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.000.000,00	51.040.000,00	(10.960.000,00)	82,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05		Administrasi Kependuduk Pencatatan Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	(50.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	(50.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	(50.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	(50.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.400.000,00	42.490.000,00	(9.910.000,00)	81,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.274.500,00	5.960.000,00	(3.314.500,00)	64,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.274.500,00	5.960.000,00	(3.314.500,00)	64,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.274.500,00	5.960.000,00	(3.314.500,00)	64,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.995.500,00	1.990.000,00	(5.500,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.995.500,00	1.990.000,00	(5.500,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.500,00	1.990.000,00	(5.500,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kearsipan Tarsip	23.730.000,00	22.850.000,00	(1.680.000,00)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.730.000,00	22.850.000,00	(1.680.000,00)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.730.000,00	22.850.000,00	(1.680.000,00)	92,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.400.000,00	12.490.000,00	(4.910.000,00)	71,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	12.490.000,00	(4.910.000,00)	71,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	12.490.000,00	(4.910.000,00)	71,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.000,00	950.000,00	(1.000.000,00)	48,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000,00	950.000,00	(1.000.000,00)	48,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	950.000,00	(1.000.000,00)	48,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	950.000,00	(1.000.000,00)	48,71	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN
WAWONII UTARA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII UTARA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	423.000.000,00	426.811.502,00	(6.158.698,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.964.000,00	19.964.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.964.000,00	19.964.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000,00	4.475.000,00	(525.000,00)	89,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	4.475.000,00	(525.000,00)	89,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	4.475.000,00	(525.000,00)	89,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.475.000,00	(525.000,00)	89,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.475.000,00	(525.000,00)	89,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.040.900,00	13.040.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.040.900,00	13.040.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	371.995.500,00	366.321.802,00	(5.673.698,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.005.500,00	182.999.502,00	(1.005.998,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.909.900,00	(90.100,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.909.900,00	(90.100,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.909.900,00	(90.100,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.058.500,00	6.000.000,00	(58.500,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.058.500,00	6.000.000,00	(58.500,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.058.500,00	6.000.000,00	(58.500,00)	99,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		Pemeliharaan Rutin Kendaraan dan Komunitas SKPD	150.000.000,00	149.102.902,00	(897.098,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.102.902,00	(897.098,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.102.902,00	(897.098,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.651.900,00	64.390.000,00	(1.261.900,00)	98,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	36.100.000,00	(900.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0001	5.3	BELANJA MODAL	37.000.000,00	36.100.000,00	(900.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0001	5.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	36.100.900,00	(900.000,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0004		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.651.900,00	28.290.900,00	(361.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0004	5.2	BELANJA MODAL	28.651.900,00	28.290.900,00	(361.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.651.900,00	28.290.900,00	(361.000,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.445.000,00	58.414.500,00	(3.031.500,00)	95,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.456.000,00	3.424.500,00	(3.031.500,00)	53,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.456.000,00	3.424.500,00	(3.031.500,00)	53,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.456.000,00	3.424.500,00	(3.031.500,00)	53,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.892.100,00	26.600.500,00	(291.600,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	21.500.000,00	21.465.000,00	(35.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.3	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.465.000,00	(35.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.3.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.465.000,00	(35.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0003		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.392.100,00	5.135.500,00	(256.600,00)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.392.100,00	5.135.500,00	(256.600,00)	95,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.392.100,00	5.135.500,00	(256.600,00)	95,24	

Lampiran, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KELURAHAN
LANSILOWO

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN LANSILOWO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	280.000.000,00	234.000.000,00	(26.000.000,00)	-90,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.290.000,00	217.790.000,00	(3.500.000,00)	98,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Kualitas Pemberdayaan Kelurahan	21.290.000,00	17.790.000,00	(3.500.000,00)	83,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.350.000,00	9.850.000,00	(3.500.000,00)	73,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.350.000,00	9.850.000,00	(3.500.000,00)	73,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	9.850.000,00	(3.500.000,00)	73,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.710.000,00	16.210.000,00	(22.500.000,00)	41,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.710.000,00	16.210.000,00	(22.500.000,00)	41,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.950.000,00	5.150.000,00	(800.000,00)	86,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.950.000,00	5.150.000,00	(800.000,00)	86,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.150.000,00	(800.000,00)	86,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.700.000,00	0,00	(21.700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.700.000,00	0,00	(21.700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	0,00	(21.700.000,00)	0,00	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

REFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	433.000.000,00	432.151.017,00	(848.983,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.175.000,00	12.330.000,00	(2.845.000,00)	81,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.175.000,00	12.330.000,00	(2.845.000,00)	81,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.175.000,00	12.330.000,00	(2.845.000,00)	81,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.175.000,00	12.330.000,00	(2.845.000,00)	81,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	12.330.000,00	(2.845.000,00)	81,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.257.000,00	48.115.000,00	1.858.000,00	104,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.257.000,00	21.257.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.257.000,00	21.257.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.063.000,00	18.517.000,00	(546.000,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.063.000,00	18.517.000,00	(546.000,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	19.063.000,00	18.517.000,00	(546.000,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.063.000,00	18.517.000,00	(546.000,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.063.000,00	18.517.000,00	(546.000,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	340.540.000,00	341.204.017,00	664.017,00	100,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.080.000,00	23.690.000,00	(320.000,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	6.180.000,00	(320.000,00)	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.180.000,00	(320.000,00)	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.180.000,00	(320.000,00)	95,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.160.000,00	(340.000,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	6.160.000,00	(340.000,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.160.000,00	(340.000,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.160.000,00	(340.000,00)	94,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.322.000,00	46.560.078,00	(761.922,00)	98,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011		Sinergitas Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.572.000,00	30.810.078,00	(761.922,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	31.572.000,00	30.810.078,00	(761.922,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.572.000,00	30.810.078,00	(761.922,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.597.758,00	184.011.492,00	2.273.734,00	101,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.181.020,00	1.181.900,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.181.020,00	1.181.900,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.020,00	1.181.900,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.689.738,00	17.686.500,00	(3.238,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.689.738,00	17.686.500,00	(3.238,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.689.738,00	17.686.500,00	(3.238,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.400.000,00	17.372.000,00	5.972.000,00	152,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	17.372.000,00	5.972.000,00	152,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	17.372.000,00	5.972.000,00	152,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.498.000,00	22.498.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.498.000,00	22.498.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	132.969.000,00	129.273.992,00	(3.695.008,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	132.969.000,00	129.273.992,00	(3.695.008,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.969.000,00	129.273.992,00	(3.695.008,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.493.000,00	23.450.000,00	(43.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.493.000,00	23.450.000,00	(43.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.3	BELANJA MODAL	23.493.000,00	23.450.000,00	(43.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.493.000,00	23.450.000,00	(43.000,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	34.164.000,00	34.130.000,00	(34.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	5.164.800,00	5.130.000,00	(34.800,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.164.800,00	5.130.000,00	(34.800,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.164.800,00	5.130.000,00	(34.800,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.222.442,00	19.212.442,00	(110.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0005		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.840.000,00	12.730.000,00	(110.000,00)	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.31.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.840.000,00	12.710.000,00	(110.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.31.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	12.710.000,00	(110.000,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.31.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.482.442,00	6.482.442,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.31.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.482.442,00	6.482.442,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH MAZAK

KELURAHAN
LADIANTA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN LADIANTA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001		5	BELANJA DAERAH	260.000.000,00	247.490.000,00	(12.510.000,00)	95,19	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	213.860.000,00	211.981.000,00	(1.879.000,00)	99,12	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	213.860.000,00	211.981.000,00	(1.879.000,00)	99,12	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02.0004		Fasilitasi Kelurahan	15.860.000,00	13.982.000,00	(1.878.000,00)	88,15	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.860.000,00	13.982.000,00	(1.878.000,00)	88,15	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.860.000,00	13.982.000,00	(1.878.000,00)	88,15	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.140.000,00	35.508.000,00	(10.632.000,00)	76,95	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.140.000,00	35.508.000,00	(10.632.000,00)	76,95	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.900.000,00	5.908.000,00	(5.992.000,00)	49,64	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	5.908.000,00	(5.992.000,00)	49,64	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	5.908.000,00	(5.992.000,00)	49,64	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.440.000,00	12.950.000,00	(490.000,00)	96,20	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.440.000,00	12.950.000,00	(490.000,00)	96,20	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	12.950.000,00	(490.000,00)	96,20	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.800.000,00	16.670.000,00	(4.130.000,00)	80,14	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	16.670.000,00	(4.130.000,00)	80,14	
7.01	7.01.E.00.0.00.03.9001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	16.670.000,00	(4.130.000,00)	80,14	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN
WAWONII TIMUR

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII TIMUR

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	433.000.000,00	431.323.500,00	(1.676.500,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03.8001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03.8001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03.8001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	97,5	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.8001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.8001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.8003	5.1	BELANJA OPERASI	48.970.500,00	48.970.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.8003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.970.500,00	48.970.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.8001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.8001	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.8001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.550.000,00	(50.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.8003	5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.8003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.8016	5.1	BELANJA OPERASI	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.8016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.990,00	7.895.000,00	(105.990,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.990,00	7.895.000,00	(105.990,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.8017		Koordinasi Perencanaan Desa di Wilayahnya	8.000.990,00	7.895.000,00	(105.990,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.8017	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.990,00	7.895.000,00	(105.990,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.8017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.990,00	7.895.000,00	(105.990,00)	98,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	316.238.510,00	314.868.000,00	(1.370.510,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.040.000,00	9.880.000,00	(160.000,00)	98,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.8001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.8001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.8001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.965.000,00	(35.000,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.040.000,00	4.915.000,00	(125.000,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.040.000,00	4.915.000,00	(125.000,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.915.000,00	(125.000,00)	97,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.332.510,00	192.432.500,00	(900.010,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.509.000,00	2.500.000,00	(9.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.509.000,00	2.500.000,00	(9.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.509.000,00	2.500.000,00	(9.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.498.865,00	12.498.000,00	(65,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.498.865,00	12.498.000,00	(65,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.498.865,00	12.498.000,00	(65,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.646.500,00	11.646.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.646.500,00	11.646.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000,00	1.800.000,00	(840.000,00)	68,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	1.800.000,00	(840.000,00)	68,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	1.800.000,00	(840.000,00)	68,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan Material	1.566.945,00	1.566.000,00	(945,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.566.945,00	1.566.000,00	(945,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.566.945,00	1.566.000,00	(945,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.005.000,00	12.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.005.000,00	12.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.467.000,00	150.417.000,00	(50.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.467.000,00	150.417.000,00	(50.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.467.000,00	150.417.000,00	(50.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.456.000,00	66.455.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.456.000,00	6.455.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.456.000,00	6.455.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.456.000,00	6.455.000,00	(1.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.410.000,00	32.100.500,00	(309.500,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	32.410.000,00	32.100.500,00	(309.500,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.410.000,00	32.100.500,00	(309.500,00)	99,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.410.000,00	32.100.500,00	(309.500,00)	99,04	

Langara, 31 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KELURAHAN MUNSE

Lampiran I.3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH 2
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 01 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN MUNSE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		5	BELANJA DAERAH	260.000.000,00	259.993.500,00	(6.500,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.855.500,00	5.855.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.3.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.855.500,00	5.855.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.3.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.3.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	41.646.500,00	41.640.000,00	(6.500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.646.500,00	41.640.000,00	(6.500,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.546.500,00	5.540.000,00	(4.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.546.500,00	5.540.000,00	(4.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.546.500,00	5.540.000,00	(4.500,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0008		Pemberian Kompensasi Tanah	5.012.000,00	5.010.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.012.000,00	5.010.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.000,00	5.010.000,00	(2.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.045.000,00	25.045.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.045.000,00	25.045.000,00	0,00	100,00	

Lingara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN WAWONII TENGGARA

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII TENGGARA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	433.800.000,00	429.766.500,00	(3.239.500,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.899.500,00	39.580.000,00	1.680.500,00	104,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.899.500,00	37.030.000,00	(869.500,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0005		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.219.500,00	19.350.000,00	(869.500,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.219.500,00	19.350.000,00	(869.500,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.219.500,00	19.350.000,00	(869.500,00)	95,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.119.500,00	16.494.500,00	(625.000,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.119.500,00	16.494.500,00	(625.000,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.5.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Penegak Disiplin yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kewilayahan Negara Republik Indonesia	17.119.500,00	16.494.500,00	(625.000,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.119.500,00	16.494.500,00	(625.000,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.119.500,00	16.494.500,00	(625.000,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.800.000,00	6.940.000,00	(4.860.000,00)	65,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	11.800.000,00	6.940.000,00	(4.860.000,00)	65,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Kesatuan) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.800.000,00	6.940.000,00	(4.860.000,00)	65,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	6.940.000,00	(4.860.000,00)	65,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	6.940.000,00	(4.860.000,00)	65,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.200.000,00	14.200.000,00	(1.000.000,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.200.000,00	14.200.000,00	(1.000.000,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.200.000,00	14.200.000,00	(1.000.000,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	14.200.000,00	(1.000.000,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	14.200.000,00	(1.000.000,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	334.381.000,00	335.146.000,00	765.000,00	100,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.630.000,00	22.655.000,00	1.025.000,00	104,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	5.800.000,00	(700.000,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	5.800.000,00	(700.000,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.800.000,00	(700.000,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.130.000,00	16.855.000,00	1.725.000,00	111,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.130.000,00	16.855.000,00	1.725.000,00	111,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	16.855.000,00	1.725.000,00	111,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	5.045.000,00	(1.455.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	5.045.000,00	(1.455.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	5.045.000,00	(1.455.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.045.000,00	(1.455.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.989.000,00	16.989.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.989.000,00	16.989.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.817.000,00	190.017.000,00	1.200.000,00	100,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.812.000,00	16.167.000,00	355.000,00	102,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.812.000,00	16.167.000,00	355.000,00	102,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.812.000,00	16.167.000,00	355.000,00	102,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	1.290.000,00	(8.710.000,00)	12,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	1.290.000,00	(8.710.000,00)	12,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	1.290.000,00	(8.710.000,00)	12,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kendaraan Tamu	35.000.000,00	44.410.000,00	9.410.000,00	126,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	44.410.000,00	9.410.000,00	126,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	44.410.000,00	9.410.000,00	126,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.000.000,00	128.145.000,00	145.000,00	100,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	128.000.000,00	128.145.000,00	145.000,00	100,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	128.145.000,00	145.000,00	100,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Pengadaan dan Modal	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.950.000,00	17.945.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	17.950.000,00	17.945.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.950.000,00	17.945.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	17.945.000,00	(5.000,00)	99,97	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDHO SAIFULLAH RAZAK

KELURAHAN POLARA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN POLARA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		5	BELANJA DAERAH	260.000.000,00	247.800.000,00	(12.200.000,00)	95,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.1.00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	213.977.000,00	209.377.000,00	(2.600.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.977.000,00	11.377.000,00	(2.600.000,00)	81,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	3.008.000,00	458.000,00	(2.550.000,00)	15,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.008.000,00	458.000,00	(2.550.000,00)	15,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.008.000,00	458.000,00	(2.550.000,00)	15,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan	10.969.000,00	10.919.000,00	(50.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.969.000,00	10.919.000,00	(50.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.969.000,00	10.919.000,00	(50.000,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.023.000,00	38.423.000,00	(9.600.000,00)	80,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.773.000,00	36.173.000,00	(9.600.000,00)	79,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	350.500,00	350.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.500,00	350.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.492.500,00	11.127.500,00	(365.000,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.492.500,00	11.127.500,00	(365.000,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.492.500,00	11.127.500,00	(365.000,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.820.000,00	1.770.000,00	(50.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.820.000,00	1.770.000,00	(50.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	1.770.000,00	(50.000,00)	97,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Komputasian Tanda	8.925.000,00	5.600.000,00	(3.325.000,00)	62,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.925.000,00	5.600.000,00	(3.325.000,00)	62,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	5.600.000,00	(3.325.000,00)	62,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.185.000,00	17.325.000,00	(5.860.000,00)	74,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.185.000,00	17.325.000,00	(5.860.000,00)	74,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.185.000,00	17.325.000,00	(5.860.000,00)	74,72	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIPOI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN WAWONII SELATAN

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII SELATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	483.000.000,00	480.805.858,00	(2.196.142,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.012.200,00	18.012.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.012.200,00	18.012.200,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	387.392.800,00	385.196.658,00	(2.196.142,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05		Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Daerah	33.734.000,00	32.518.658,00	(1.216.342,00)	96,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.685.000,00	22.468.658,00	(1.216.342,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.685.000,00	22.468.658,00	(1.216.342,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.685.000,00	22.468.658,00	(1.216.342,00)	94,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.765.308,00	222.626.000,00	(139.200,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.184.800,00	5.100.000,00	(64.800,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.184.800,00	5.100.000,00	(64.800,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.184.800,00	5.100.000,00	(64.800,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.974.400,00	20.900.000,00	(74.400,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.974.400,00	20.900.000,00	(74.400,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.974.400,00	20.900.000,00	(74.400,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.762.000,00	14.762.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.762.000,00	14.762.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	163.764.000,00	163.764.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.764.000,00	163.764.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.552.680,00	18.552.000,00	(680,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0001		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.552.680,00	18.552.000,00	(680,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	18.552.680,00	18.552.000,00	(680,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.552.680,00	18.552.000,00	(680,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.840.000,00	42.000.000,00	(840.000,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.840.000,00	12.000.000,00	(840.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.840.000,00	12.000.000,00	(840.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	12.000.000,00	(840.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	

Langara, 31 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KELURAHAN SAWAEA

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN SAWAEA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001		5	BELANJA DAERAH	268.000.000,00	259.600.000,00	(400.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.331.000,00	15.331.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.331.000,00	15.331.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.669.000,00	44.269.000,00	(400.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.585.000,00	30.185.000,00	(400.000,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.125.000,00	17.725.000,00	(400.000,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.125.000,00	17.725.000,00	(400.000,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	17.725.000,00	(400.000,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	12.084.000,00	12.084.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.084.000,00	12.084.000,00	0,00	100,00	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

KECAMATAN

WAWONII TENGAH

Lampiran I. 3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN WAWONII TENGAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		4	BELANJA DAERAH	423.998.000,00	441.860.000,00	8.360.000,00	102,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.828.866,80	23.820.000,00	(8.866,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.828.866,80	23.820.000,00	(8.866,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.409.941,80	11.405.000,00	(4.941,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.409.941,80	11.405.000,00	(4.941,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.409.941,80	11.405.000,00	(4.941,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.418.925,00	12.415.000,00	(3.925,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.418.925,00	12.415.000,00	(3.925,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.418.925,00	12.415.000,00	(3.925,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.259.575,00	9.250.000,00	(9.575,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.259.575,00	9.250.000,00	(9.575,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.259.575,00	9.250.000,00	(9.575,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.259.575,00	9.250.000,00	(9.575,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.259.575,00	9.250.000,00	(9.575,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.994.915,00	14.840.000,00	(154.915,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepala Daerah	14.994.915,00	14.840.000,00	(154.915,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Kesbangmas	14.994.915,00	14.840.000,00	(154.915,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.994.915,00	14.840.000,00	(154.915,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.994.915,00	14.840.000,00	(154.915,00)	98,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.000.000,00	12.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.000.000,00	12.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.000.000,00	12.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.985.000,00	(15.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	358.916.644,00	367.965.000,00	9.048.356,00	102,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000,00	19.390.000,00	(110.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.395.000,00	(105.000,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.395.000,00	(105.000,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.395.000,00	(105.000,00)	98,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.495.000,00	(5.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.400.000,00	(100.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.227.000,00	234.995.000,00	11.768.000,00	105,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	111,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	111,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	111,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.021.000,00	11.808.000,00	1.777.000,00	117,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.021.000,00	11.808.000,00	1.777.000,00	117,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.000,00	11.808.000,00	1.777.000,00	117,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.832.000,00	36.369.000,00	1.537.000,00	104,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	34.832.000,00	36.369.000,00	1.537.000,00	104,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.832.000,00	36.369.000,00	1.537.000,00	104,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.372.000,00	166.810.000,00	6.438.000,00	104,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	160.372.000,00	166.810.000,00	6.438.000,00	104,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.372.000,00	166.810.000,00	6.438.000,00	104,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.651.900,00	20.640.000,00	(11.900,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.651.900,00	20.640.000,00	(11.900,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.651.900,00	20.640.000,00	(11.900,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.03	Belanja Modal Pembelian dan Mesin	20.651.900,00	20.640.000,00	(11.900,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.091.744,00	34.600.000,00	(2.491.744,00)	93,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	60,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.091.744,00	0,00	(2.091.744,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.091.744,00	0,00	(2.091.744,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.091.744,00	0,00	(2.091.744,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.946.000,00	14.940.000,00	(6.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	14.946.000,00	14.940.000,00	(6.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.946.000,00	14.940.000,00	(6.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.946.000,00	14.940.000,00	(6.000,00)	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	

Lampiran I, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDO SAIFULLAH RAZAK

KELURAHAN LAMPEAPI

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KELURAHAN LAMPEAPI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		REKTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001		5	BELANJA DAERAH	260.000.000,00	248.800.000,00	(12.800.000,00)	95,38	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.900.000,00	46.900.000,00	(12.000.000,00)	79,62	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.900.000,00	46.900.000,00	(12.000.000,00)	79,62	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.485.000,00	12.485.000,00	(2.000.000,00)	86,19	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.485.000,00	12.485.000,00	(2.000.000,00)	86,19	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	12.485.000,00	(2.000.000,00)	86,19	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)	84,61	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)	84,61	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)	84,61	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	8.960.000,00	(1.540.000,00)	85,33	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	8.960.000,00	(1.540.000,00)	85,33	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	8.960.000,00	(1.540.000,00)	85,33	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.915.000,00	14.455.000,00	(6.460.000,00)	69,11	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.915.000,00	14.455.000,00	(6.460.000,00)	69,11	
7.01	7.01.8.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.915.000,00	14.455.000,00	(6.460.000,00)	69,11	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

REPIN SAIFULLAH RAZAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintah : URUSAN PEMERINTAH UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	29.437.159.252,00	29.232.998.165,00	(204.161.087,00)	99,30	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.047.592.788,00	1.027.441.588,00	(20.151.200,00)	98,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.047.592.788,00	1.027.441.588,00	(20.151.200,00)	98,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.590.800,00	7.590.800,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.590.800,00	7.590.800,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.010.512.788,00	993.469.588,00	(17.043.200,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.010.512.788,00	993.469.588,00	(17.043.200,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.512.788,00	993.469.588,00	(17.043.200,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.590.800,00	12.112.000,00	(2.478.800,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.590.800,00	12.112.000,00	(2.478.800,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.590.800,00	12.112.000,00	(2.478.800,00)	83,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000,00	14.360.000,00	(640.000,00)	95,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.360.000,00	(640.000,00)	95,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.360.000,00	(640.000,00)	95,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	26.517.437.464,00	26.503.250.964,00	(14.186.500,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pengawasan Sistem Politik	26.517.437.464,00	26.503.250.964,00	(14.186.500,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	26.470.150.464,00	26.456.263.964,00	(13.886.500,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.470.150.464,00	26.456.263.964,00	(13.886.500,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.090.464,00	44.701.464,00	(1.389.000,00)	97,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	26.424.110.000,00	26.411.472.500,00	(12.637.500,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	47.287.000,00	46.987.000,00	(300.000,00)	99,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.287.000,00	46.987.000,00	(300.000,00)	99,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.287.000,00	46.987.000,00	(300.000,00)	99,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	53.749.000,00	53.279.000,00	(470.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	53.749.000,00	53.279.000,00	(470.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	20.704.000,00	20.604.000,00	(100.000,00)	99,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.704.000,00	20.604.000,00	(100.000,00)	99,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.704.000,00	20.604.000,00	(100.000,00)	99,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.045.000,00	28.675.000,00	(370.000,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.045.000,00	28.675.000,00	(370.000,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.045.000,00	28.675.000,00	(370.000,00)	98,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI	139.878.000,00	86.820.000,00	(53.058.000,00)	62,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	139.878.000,00	86.820.000,00	(53.058.000,00)	62,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.428.000,00	0,00	(25.428.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.428.000,00	0,00	(25.428.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.428.000,00	0,00	(25.428.000,00)	0,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pendapat Kepercayaan di	114.450.000,00	86.820.000,00	(27.630.000,00)	75,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	114.450.000,00	86.820.000,00	(27.630.000,00)	75,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.450.000,00	11.820.000,00	(27.630.000,00)	29,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.998.000,00	12.998.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.998.000,00	12.998.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.108.000,00	33.108.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.0.6.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.641.412.000,00	1.525.116.613,00	(116.295.387,00)	92,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.183.000,00	17.462.000,00	(721.000,00)	96,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.683.000,00	10.962.000,00	(721.000,00)	93,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.683.000,00	10.962.000,00	(721.000,00)	93,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.683.000,00	10.962.000,00	(721.000,00)	93,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	885.330.000,00	781.726.097,00	(83.603.903,00)	90,53	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	855.330.000,00	771.726.097,00	(83.603.903,00)	90,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	855.330.000,00	771.726.097,00	(83.603.903,00)	90,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	855.330.000,00	771.726.097,00	(83.603.903,00)	90,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.020.000,00	522.873.516,00	(29.146.484,00)	94,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.045.000,00	48.045.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.045.000,00	48.045.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.475.000,00	445.328.516,00	(30.146.484,00)	93,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	475.475.000,00	445.328.516,00	(30.146.484,00)	93,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	475.475.000,00	445.328.516,00	(30.146.484,00)	93,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.500.000,00	59.700.000,00	(1.800.000,00)	97,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	48.200.000,00	(1.800.000,00)	96,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.200.000,00	(1.800.000,00)	96,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	48.200.000,00	(1.800.000,00)	96,39	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.180.000,00	77.155.000,00	(25.000,00)	99,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	62.495.000,00	62.495.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.495.000,00	62.495.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.685.000,00	14.660.000,00	(25.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.685.000,00	14.660.000,00	(25.000,00)	99,82	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.685.000,00	14.660.000,00	(25.000,00)	99,82	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN 1.4

Lampiran I. 4 PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	188.300.158.039	177.364.043.800	181.657.816.897	172.309.326.829	0	0	0	0
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	82.230.140.119	75.124.577.628	27.690.684.537	27.109.891.079	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	82.230.140.119	75.124.577.628	27.690.684.537	27.109.891.079	0	0	0	0
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.073.000.069	58.610.899.028,00	389.868.500	743.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.022.000	54.662.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.041.000	8.881.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.881.000	8.881.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.881.000	8.881.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.219.000	28.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	60.434.214.729	57.252.142.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.434.214.729	57.242.142.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.242.500	38.317.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	46.242.500	38.317.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.750.000	108.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pemblnaan Kinerja Pegawai	99.750.000	58.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.280.780	813.230.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.120.000	3.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.777.280	87.777.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.797.500	81.797.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.800.000	65.511.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.506.000	574.064.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	789.868.500	743.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	580.000.000	556.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	209.868.500	187.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.590.000	146.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.990.000	16.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.600.000	129.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.900.000	198.221.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.900.000	198.221.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	19.095.362.950	15.668.586.800,00	26.018.306.037	25.485.218.079,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	8.705.668.040	7.149.524.300,00	13.425.556.922	13.281.652.221,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	250.795.000	250.756.802,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	548.700.001	548.686.001,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	4.817.042.386	4.695.248.946,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	159.908.000	159.887.350,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	399.279.335	384.282.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0,00	400.000.000	389.150.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	630.730.000	578.685.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000	199.700.000,00	2.193.500.000	2.190.050.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	504.686.000	455.986.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	495.000.000	375.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.120.665.800	364.479.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.394.365.620	837.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.664.778.800	3.664.778.800,00	921.561.200	921.561.200,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	593.182.640	567.854.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	556.442.080	500.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0,00	501.590.000	501.562.900,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	176.486.500	176.486.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0,00	2.602.442.000	2.581.772.022,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.512.175.410	4.139.546.450,00	11.126.989.835	10.928.620.496,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	1.069.910.000	1.065.448.134,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	666.750.000	666.726.448,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0	0,00	346.000.000	345.958.882,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	3.769.049.550	3.598.775.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0,00	183.000.000	182.971.912,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	1.290.560.000	1.289.892.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0,00	399.279.335	388.422.300,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0,00	400.000.000	398.320.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	477.360.000	476.730.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	300.000.000	199.700.000,00	1.570.000.000	1.566.870.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	387.000.000	291.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	921.803.580	140.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.089.936.089	657.233.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.915.619.050	1.915.619.050,00	425.080.950	425.080.950,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	482.297.648	405.920.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	285.784.148	279.484.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	249.735.000	249.735.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0,00	530.000.000	523.423.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.012.295.000	3.628.475.300,00	1.465.759.280	1.354.945.362,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0,00	850.768.280	746.600.362,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	0,00	614.991.000	608.345.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	402.571.500	399.190.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	750.000.000	713.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	135.104.500	131.804.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.031.621.000	750.236.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.328.670.000	1.328.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	364.328.000	305.324.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	885.284.500	751.040.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	288.614.500	129.782.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	656.670.000	621.258.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	669.893.160	664.241.800,00	682.510.000	681.673.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	669.893.160	664.241.800,00	492.505.000	491.773.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	0,00	492.505.000	491.773.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	669.893.160	664.241.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0,00	190.005.000	189.900.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0,00	100.005.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	366.452.000	180.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.452.000	180.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.452.000	180.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	25.432.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.432.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.432.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0	0,00	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Pemanfaatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0,00	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	69.340.328.812	60.451.493.699	59.239.023.762	55.027.042.830	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	41.726.419.200	41.033.696.646	37.345.276.447	34.202.665.606	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.047.217.432	27.903.915.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	359.995.000	358.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.805.000	122.335.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.165.000	20.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.025.000	216.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.055.677.798	25.866.422.138,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.045.527.798	25.856.022.138,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.150.000	10.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.140.000	69.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80.200.000	41.058.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28.940.000	28.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.004.634	1.063.097.403,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.800.000	6.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.819.764	81.819.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.846.870	39.415.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.940.000	32.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.320.000	71.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	814.278.000	830.842.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.600.000	208.579.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.600.000	21.195.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	89.384.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.000.000	99.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.880.000	336.473.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.880.000	324.473.521,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.195.069.087	11.931.506.832,00	37.345.276.447	34.202.665.606,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.809.889.280	1.822.185.660,00	37.009.840.709	33.867.565.606,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0,00	15.913.513.609	13.962.123.350,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	0,00	466.200.000	434.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	0	0,00	18.754.562.060	17.624.267.256,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0,00	676.620.000	660.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000	100.000.000,00	1.198.945.000	1.186.375.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.570.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.238.494.200	1.254.332.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	420.825.000	407.853.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.156.425.340	9.921.069.232,00	335.435.738	335.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.960.000	83.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.480.000	56.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.660.000	64.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	101.780.000	96.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.110.000	44.598.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	67.110.000	67.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	199.966.000	199.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	44.740.000	44.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	55.900.240	55.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	197.695.000	195.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	75.968.000	44.665.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	44.740.000	44.193.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	21.770.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	526.432.000	451.167.000,00	335.435.738	335.100.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.235.000	56.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	319.299.000	162.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	370.334.000	198.841.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	308.370.000	259.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	421.816.000	294.029.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.071.295.000	4.045.148.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	53.730.000	51.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	50.640.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	66.805.000	62.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.850.000.000	2.594.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	448.309.940	432.529.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	56.400.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	122.270.000	122.226.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	34.940.580	24.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	137.749.000	132.462.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	169.549.467	169.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	169.549.467	169.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.205.000	19.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	19.205.000	19.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.201.810.461	955.691.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	183.527.000	169.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.580.000	22.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	160.947.000	147.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.018.283.461	786.035.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.018.283.461	786.035.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	178.160.000	139.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.650.000	37.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	37.650.000	37.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.510.000	101.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	140.510.000	101.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	164.162.300	101.292.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.647.300	77.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.647.300	77.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.515.000	25.515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.515.000	25.515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	17.300.973.295	15.608.948.241	21.741.601.705	20.732.664.797	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.061.899.295	5.735.363.795,00	440.448.705	436.701.809,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.930.000	5.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.840.000	3.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.840.000	1.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.836.950.000	3.777.812.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.836.700.000	3.777.812.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	802.879.895	734.225.697,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.440.000	7.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.701.600	28.701.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.787.000	36.786.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.595.295	66.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.860.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.450.000	586.985.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	440.648.705	436.701.800,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	390.648.705	386.701.800,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.649.400	558.812.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.649.400	298.312.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.000.000	264.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.690.000	658.562.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.350.000	48.285.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.110.000	220.157.833,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.470.000	138.400.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	243.720.000	231.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.998.062.000	4.636.780.839,00	21.301.153.000	20.295.962.997,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.281.500.000	3.026.895.438,00	21.301.153.000	20.295.962.997,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.000.000	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	7.577.805.176	7.504.495.712,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	99.649.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0	0,00	13.723.347.824	12.791.467.285,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.901.500.000	2.867.245.932,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.716.562.000	1.609.885.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	166.500.000	152.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	85.500.000	75.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.440.000.000	1.357.358.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	24.562.000	24.457.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.241.812.000	5.236.803.603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.036.000.000	5.031.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.036.000.000	5.031.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.812.000	205.578.603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.812.000	205.578.603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		PUSKESMAS LANGARA	1.508.535.840	1.421.244.537	24.144.900	11.925.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.508.535.840	1.421.244.537,00	24.144.900	11.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.508.535.840	1.421.244.537,00	24.144.900	11.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28.560.000	28.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.723.000	29.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	77.400.000	77.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.800.000	28.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	264.225.000	264.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.761.000	19.761.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	249.559.000	249.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	161.955.000	304.742.015,00	24.144.900	11.925.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	302.814.840	272.875.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.200.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	16.800.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	41.400.000	41.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	56.340.000	56.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		PUSKESMAS LAMPEAPI	1.128.450.100	1.103.449.809	6.986.000	6.468.750	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.128.450.100	1.103.449.809,00	6.986.000	6.468.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.128.450.100	1.103.449.809,00	6.986.000	6.468.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.659.000	9.659.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	199.744.000	199.744.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000	11.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.821.000	29.821.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.001.500	178.001.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	251.014.000	235.660.337,00	6.986.000	6.468.750,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	240.910.600	231.264.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.200.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.800.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	64.800.000	64.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		PUSKESMAS LANSELOWO	1.126.372.980	1.061.210.824	1.746.500	1.698.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.126.372.980	1.061.210.824,00	1.746.500	1.698.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.126.372.980	1.061.210.824,00	1.746.500	1.698.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.660.000	25.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.878.000	7.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.550.000	35.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000	13.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.950.000	4.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.819.500	182.608.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.450.000	12.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.198.000	29.098.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	188.580.000	188.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	288.253.580	227.326.928,00	1.746.500	1.698.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	236.473.980	223.159.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.900.000	9.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000	3.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.900.000	24.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	73.260.000	73.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		PUSKESMAS BOBOLIO	1.253.797.920	1.198.638.327	17.493.000	17.443.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.253.797.920	1.198.638.327,00	17.493.000	17.443.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.253.797.920	1.198.638.327,00	17.493.000	17.443.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.760.000	34.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.213.000	16.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	85.500.000	85.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.200.000	25.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.800.000	19.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	247.459.500	233.119.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.750.000	12.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.462.000	21.462.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	191.977.000	191.977.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	241.466.720	201.101.086,00	17.493.000	17.443.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	258.249.700	257.795.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.200.000	13.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.600.000	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	47.960.000	47.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		PUSKESMAS LADIANTA	1.091.160.090	1.023.474.387	9.744.750	7.020.777	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.091.160.090	1.023.474.387,00	9.744.750	7.020.777,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.091.160.090	1.023.474.387,00	9.744.750	7.020.777,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.465.000	12.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.100.000	53.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	40.500.000	40.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	272.192.000	272.192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.700.000	24.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	185.900.000	185.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	233.035.250	201.296.034,00	9.744.750	7.020.771,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	169.967.840	135.561.353,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		PUSKESMAS WAWORETE	1.091.536.700	1.005.127.495	30.566.700	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.091.536.700	1.005.127.495,00	30.566.700	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyelisan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.091.536.700	1.005.127.495,00	30.566.700	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.760.000	34.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.721.000	14.721.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	61.560.000	61.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.200.000	13.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Giat Masyarakat	197.523.500	172.293.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.700.000	11.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.991.000	21.991.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	199.520.500	199.520.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	233.487.060	172.413.472,00	30.566.700	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	217.673.700	217.568.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.600.000	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10.800.000	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	44.660.000	44.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		PUSKESMAS POLARA	1.047.610.992	995.390.153	24.133.160	15.300.800	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.047.610.992	995.390.153,00	24.133.160	15.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.047.610.992	995.390.153,00	24.133.160	15.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.280.000	18.518.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.139.500	19.139.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	54.300.000	54.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.400.000	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14.400.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	143.456.000	158.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.100.000	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.134.000	18.134.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	290.437.380	199.536.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	226.666.652	188.129.216,00	24.133.160	15.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	228.297.460	227.076.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.600.000	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	54.600.000	54.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		PUSKESMAS ROKO-ROKO	1.007.422.880	985.664.370	10.256.900	10.256.900	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.007.422.880	985.664.370,00	10.256.900	10.256.900,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.007.422.880	985.664.370,00	10.256.900	10.256.900,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.600.000	31.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.994.000	16.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	71.100.000	71.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000	12.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	229.698.500	229.698.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.842.000	26.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	173.551.500	171.551.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	187.743.100	166.353.605,00	10.256.900	10.256.900,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	176.993.700	176.644.765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.200.000	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	37.900.000	37.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		PUSKESMAS WAWOROPE	1.058.048.895	1.014.648.910	27.873.700	21.600.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.058.048.895	1.014.648.910,00	27.873.700	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.058.048.895	1.014.648.910,00	27.873.700	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.580.000	37.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.525.000	7.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	164.968.000	164.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.400.000	26.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.468.000	12.468.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	239.772.000	239.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	162.166.000	137.067.849,00	27.673.700	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	264.897.895	250.082.061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.400.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.900.000	9.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	65.580.000	64.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.993.053.905	16.839.047.857	87.181.171.578	82.867.886.845	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	16.993.053.905	16.839.047.857	87.181.171.578	82.867.886.845	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.652.181.225	6.535.933.730,00	263.555.338	258.436.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.179.500	143.887.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.999.500	123.727.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.180.000	20.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.971.145.000	3.836.918.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.881.805.000	3.800.278.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.000.000	54.892.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.500.000	7.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.340.000	7.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.500.000	7.448.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.060.000	73.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.500.000	17.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.550.000	51.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.542.000	149.694.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	73.200.000	73.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.342.000	75.894.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	709.044.725	701.628.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.260.000	2.232.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.806.725	102.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.055.000	13.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.940.000	7.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.900.000	18.877.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.883.000	556.593.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	263.555.538	258.406.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	50.800.000	45.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	19.462.538	19.350.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	194.092.800	193.306.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.380.000	54.837.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.380.000	12.837.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.544.840.000	1.535.665.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.000.000	183.018.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.100.000	102.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	1.123.900.000	1.115.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.760.000	92.657.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	41.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.444.240.000	1.444.240.000,00	5.507.063.150	3.542.961.035,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	42.000.000,00	3.071.877.750	1.120.922.088,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	12.000.000	12.000.000,00	406.389.500	404.576.737,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	12.000.000	12.000.000,00	356.988.250	348.798.400,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	18.000.000	18.000.000,00	2.307.100.000	367.546.951,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.402.240.000	1.402.240.000,00	2.435.986.800	2.422.038.947,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Pemukaan	0	0,00	209.986.000	209.986.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Pemukaan	143.080.000	143.080.000,00	2.226.000.000	2.212.052.947,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemukaan	1.259.160.000	1.259.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.496.368.000	2.483.440.807,00	10.161.900.000	9.415.680.036,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.496.368.000	2.483.440.807,00	10.161.900.000	9.415.680.036,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	158.000.000	158.000.000,00	8.643.450.000	7.897.260.036,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.188.650.000	2.178.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	149.718.000	146.690.807,00	1.518.450.000	1.518.420.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0,00	387.536.100	385.799.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	387.536.100	385.799.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	0	0,00	387.536.100	385.799.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	0,00	4.705.435.500	4.695.195.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	4.705.435.500	4.695.195.500,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0	0,00	4.305.455.500	4.695.195.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	314.000.000	314.000.000,00	6.557.114.510	6.475.993.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.000.000	314.000.000,00	6.557.114.510	6.475.993.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	114.000.000	114.000.000,00	6.557.114.510	6.475.993.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	159.415.000	159.415.000,00	27.689.792.900	27.486.086.829,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	159.415.000	159.415.000,00	27.689.792.900	27.486.086.829,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	57.000.000	57.000.000,00	27.689.792.900	27.486.086.829,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	102.415.000	102.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	200.000.000	200.000.000,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	200.000.000,00	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.300.086.000	5.299.130.000,00	29.524.973.800	28.723.955.765,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.300.086.000	5.299.130.000,00	29.524.973.800	28.723.955.765,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	9.000.000	9.000.000,00	8.298.153.900	7.908.370.160,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	191.080.000	191.080.000,00	20.430.969.900	20.019.386.915,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	750.000.000	750.000.000,00	500.000.000	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	0	0,00	283.650.000	283.803.690,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.350.086.000	4.349.050.000,00	12.000.000	11.995.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	155.075.680	131.200.320,00	8.799.680	8.799.680,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	131.249.680	131.200.320,00	8.799.680	8.799.680,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	131.249.680	131.200.320,00	8.799.680	8.799.680,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	23.826.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	23.826.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	271.688.000	271.688.000,00	2.275.000.000	1.775.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	2.275.000.000	1.775.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	0	0,00	1.325.000.000	1.075.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	0,00	950.000.000	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	271.688.000	271.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	271.688.000	271.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.632.405.511	4.541.893.954	3.227.519.470	3.067.489.900	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.632.405.511	4.541.893.954	3.227.519.470	3.067.489.900	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.189.980.766	2.102.182.132,00	266.382.320	265.942.500,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.149.000	38.184.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.491.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.500.000	6.467.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.149.000	12.203.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.214.050.000	1.181.572.563,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.207.550.000	1.175.119.563,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.453.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.426.500	39.389.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.426.500	39.389.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.585.869	448.970.260,00	266.302.320	265.942.500,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.712.000	8.712.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	266.302.320	265.942.500,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.387.866	14.228.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.080.000	7.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	3.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	6.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.366.000	408.144.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.819.400	312.800.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.819.400	28.050.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000	282.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.910.000	91.265.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.900.000	65.443.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.010.000	25.822.795,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	96.087.120	96.016.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	96.087.120	96.016.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	47.584.760	47.549.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	48.502.360	48.467.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.546.745	1.500.526.462,00	625.000.000	624.389.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.097.800	3.097.800,00	625.000.000	624.389.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	3.097.800	3.097.800,00	625.000.000	624.389.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.497.448.945	1.497.428.662,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.341.167.508	1.341.167.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Peningaran/Perencanaan Perumkiman Kumah	156.281.445	156.261.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	845.810.880	843.160.000,00	2.336.217.150	2.177.158.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	845.810.880	843.160.000,00	2.336.217.150	2.177.158.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	805.603.480	802.962.000,00	2.336.217.150	2.177.158.400,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	40.207.400	40.207.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.446.631.560	11.829.835.900	4.214.872.450	4.131.816.175	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	10.294.069.640	9.679.324.508	1.400.766.050	1.335.710.250	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.391.807.630	7.816.710.638,00	1.190.661.200	1.125.011.250,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.228.000	25.144.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.056.000	6.056.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.970.000	5.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.202.000	13.118.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.597.000	2.439.565.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.497.472.000	2.433.440.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.125.000	6.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.864.000	335.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	335.864.000	335.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.228.830	1.390.788.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.457.880	20.457.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.648.950	9.607.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.480.000	6.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	902.660.000	902.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.102.000	451.776.245,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	124.999.000,00	1.190.061.200	1.125.011.250,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	437.000.000	389.900.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	234.991.200	234.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	124.999.000,00	518.070.000	500.511.250,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.335.959.800	3.011.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.059.800	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.321.900.000	2.997.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.150.000	489.126.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	520.150.000	489.126.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	773.255.700	734.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	516.610.700	505.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	42.416.700	31.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	49.850.000	49.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.500.000	45.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	182.200.000	182.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	196.644.000	196.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	256.645.000	229.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.580.000	40.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	111.600.000	84.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	104.375.000	104.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.129.806.310	1.128.128.870,00	210.704.850	210.699.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0001	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	193.536.230	193.511.230,00	210.704.850	210.699.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0002	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.390.000	48.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0003	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.827.450	47.827.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0004	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	49.475.000	49.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0005	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.843.780	47.843.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0006	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0,00	210.704.850	210.699.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0008	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	874.683.280	873.038.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0009	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	463.354.280	462.674.680,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0010	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	411.329.000	410.356.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0011	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	61.586.800	61.586.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0012	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	61.586.800	61.586.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.242.561.920	2.150.511.392	2.813.306.400	2.796.105.925	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.744.931.920	1.672.843.058,00	44.400.000	44.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000	27.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.351.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	688.147.000	634.499.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	681.647.000	628.099.023,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	54.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Jaminan dan Prasarana Disiplin Pegawai	55.000.000	54.778.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.784.929	527.350.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.784.929	23.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	19.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.204.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.000.000	445.402.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	44.400.000	44.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	44.400.000	44.400.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.000.000	248.366.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	11.366.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.000.000	237.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.000.000	180.299.387,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.000.000	163.949.387,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	16.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	497.630.000	477.668.294,00	2.768.906.400	2.751.705.925,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	79.796.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	80.000.000	79.796.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	125.000.000	116.925.000,00	2.768.906.400	2.751.705.925,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0006	Pengisian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0,00	2.653.246.400	2.651.155.925,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	34.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	34.235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	0	0,00	100.660.000	100.550.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	48.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0	0,00	15.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50.050.000	42.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	32.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.050.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	242.580.000	238.072.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kementrian dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	187.580.000	187.072.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	20.000.000	18.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.000.000	32.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.657.578.132	2.577.194.762	105.345.100	105.200.000	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	2.657.578.132	2.577.194.762	105.345.100	105.200.000	0	0	0	0
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.509.043.132	1.431.379.262,00	105.345.100	105.200.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000	26.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	705.928.000	652.744.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	699.428.000	646.244.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.500.000	85.476.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	79.976.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.540.000	287.009.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.981.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.000.000	227.481.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	105.345.100	105.200.600,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	105.345.100	105.200.600,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.250.000	273.471.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.721.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	265.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.825.132	105.817.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.825.132	90.817.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranа dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	70.000.000	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	760.000.000	759.080.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	530.000.000	529.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemakaman	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000	108.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	230.000.000	229.209.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.209.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	178.715.000	177.601.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	15.185.000	14.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	5.185.000	4.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	163.600.000	162.766.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.500.000	80.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	59.100.000	58.266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	139.750.000	139.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	139.750.000	139.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	15.000.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	124.750.000	124.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	40.989.740.076	39.252.870.621	16.151.867.680	15.645.109.130	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	331.411.060	329.376.772	105.000.000	104.992.125	0	0	0	0
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	331.411.060	329.376.772	105.000.000	104.992.125	0	0	0	0
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	311.129.845	310.705.772,00	105.000.000	104.992.125,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	303.253.445	302.829.372,00	105.000.000	104.992.125,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	303.253.445	302.829.372,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0	0,00	105.000.000	104.992.125,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	7.876.400	7.876.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	7.876.400	7.876.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20.281.215	18.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.281.215	18.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9.184.000	9.179.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.097.215	9.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.824.685.120	3.754.848.397	158.000.000	157.600.000	0	0	0	0
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.824.685.120	3.754.848.397	158.000.000	157.600.000	0	0	0	0
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.421.595.120	2.357.080.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.500.000	35.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.232.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.312.315.000	1.445.337.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.499.315.000	1.432.347.513,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	6.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.800.000	20.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.800.000	20.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.046.000	360.937.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.695.000	30.695.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.015.000	17.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.456.000	305.309.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.364.000	1.364.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.364.000	1.364.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.510.000	374.798.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000	2.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.288.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.500.000	367.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.750.120	109.219.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.750.120	109.219.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	411.500.000	411.084.000,00	44.000.000	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	99.584.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	67.000.000	66.584.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	33.000.000	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	311.500.000	311.500.000,00	44.000.000	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	311.500.000	311.500.000,00	44.000.000	44.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	553.500.000	548.975.000,00	114.000.000	113.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	417.475.000	417.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.475.000	417.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	136.025.000	131.970.000,00	114.000.000	113.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	136.025.000	131.970.000,00	114.000.000	113.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	115.000.000	115.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	115.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	115.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	165.000.000	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	165.000.000	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	157.700.000	157.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	157.700.000	157.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	157.700.000	157.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.980.014.340	1.962.408.288	38.857.500	38.850.000	0	0	0	0
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	1.980.014.340	1.962.408.288	38.857.500	38.850.000	0	0	0	0
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.410.023.020	1.392.747.468,00	29.257.500	29.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	40.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0004	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0005	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0008	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	732.327.000	718.384.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0009	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	719.327.000	705.384.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0010	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0011	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.888.000	30.813.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.888.000	30.813.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.068.020	380.877.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.912.000	3.912.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.554.440	26.554.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.229.580	12.834.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.600.000	12.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.332.000	323.536.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	29.257.500	29.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	11.440.000	11.440.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	17.817.500	17.810.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.360.000	81.168.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.360.000	13.168.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.000.000	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.380.000	140.623.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.880.000	98.123.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.500.000	42.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0	0,00	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Sekunder Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0	0,00	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	511.072.320	510.721.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	511.072.320	510.721.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	191.101.520	191.101.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	228.464.000	228.364.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	57.846.900	57.846.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	33.659.900	33.409.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	58.939.000	58.939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	58.939.000	58.939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.0.00.0.00.01.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	58.939.000	58.939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	469.411.870	469.401.870	2.003.037.400	1.778.430.000	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	469.411.870	469.401.870	2.003.037.400	1.778.430.000	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	361.254.510	361.244.510,00	2.003.037.400	1.778.430.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	361.254.510	361.244.510,00	2.003.037.400	1.778.430.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	36.535.060	36.535.060,00	215.500.000	215.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	324.719.450	324.709.450,00	1.787.537.400	1.562.930.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	108.157.360	108.157.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	108.157.360	108.157.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	60.294.560	60.294.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Penetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	47.862.800	47.862.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.368.798.532	2.314.119.855	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.368.798.532	2.314.119.855	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.446.805.330	1.392.326.653,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.662.110	16.662.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.350	6.500.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.161.760	10.161.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	799.360.500	758.083.826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	786.360.000	745.083.326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.250	6.500.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.500.250	6.500.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.813.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.550.000	8.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.263.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.549.400	321.523.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.545.400	19.544.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.520.000	3.519.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.950.000	19.949.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.604.060	274.669.067,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Perahuan dan Mesin Lainnya	0	0,00	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.920.320	74.920.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.420.320	1.420.320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.500.000	70.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.300.000	212.586.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.000.000	55.999.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.190.000	83.477.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.110.000	73.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	80.604.500	80.604.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.604.500	80.604.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.604.500	80.604.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	394.039.850	393.639.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	394.039.850	393.639.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	18.031.090	17.631.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	28.680.000	28.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	347.328.760	347.328.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	12.136.500	12.136.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.136.500	12.136.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12.136.500	12.136.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.392	200.000.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.392	200.000.392,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	47.413.642	47.413.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	152.586.750	152.586.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	235.411.960	235.411.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	235.411.960	235.411.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	39.999.800	39.999.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	12.560.000	12.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	182.852.160	182.852.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.180.419.368	2.950.318.761	72.096.800	72.091.000	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.180.419.368	2.950.318.761	72.096.800	72.091.000	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.092.750.080	1.864.569.083,00	72.096.800	72.091.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.346.016	39.292.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.872.900	14.672.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.473.116	24.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	843.235.744	740.251.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	830.615.800	727.711.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.372.944	6.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.247.000	6.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.310.000	20.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.350.000	20.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.980.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.392.320	542.418.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.560.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.414.000	3.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.700.320	51.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.375.000	13.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000	2.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.143.000	428.103.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	72.096.800	72.091.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	72.096.800	72.091.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.886.000	435.145.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485.000	480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.591.000	39.855.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.810.000	394.808.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.160.000	87.337.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.060.000	74.799.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.100.000	12.537.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	493.283.680	493.040.428,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	72.528.140	72.448.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	44.954.640	44.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.573.500	27.573.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Pemutakhiran Pendaftaran Penduduk	79.481.700	79.446.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	79.481.700	79.446.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	206.802.570	206.753.958,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98.930.000	98.881.388,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	43.387.970	43.387.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	64.484.600	64.484.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	134.391.270	134.391.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	134.391.270	134.391.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	244.275.839	244.224.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	57.790.919	57.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	57.790.919	57.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	46.477.350	46.476.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	20.737.760	20.737.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	25.739.590	25.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.998.570	139.998.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	9.999.020	9.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	129.999.550	129.999.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	350.189.769	348.493.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	152.373.868	151.421.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	38.582.900	38.541.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	89.791.068	88.981.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0005	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	23.999.840	23.899.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.916.153	163.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	163.916.153	163.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.889.810	33.349.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	33.889.810	33.349.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.230.069.034	3.937.545.628	30.798.900	30.798.000	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.230.069.034	3.937.545.628	30.798.900	30.798.000	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.090.417.398	1.947.212.451,00	30.798.900	30.798.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.050.000	26.622.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	5.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	4.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.500.000	5.142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.550.000	11.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.284.666.113	1.243.865.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.284.666.113	1.243.865.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.800.000	18.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.800.000	18.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.903.285	404.375.427,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.950.000	1.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.235.285	33.197.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.029.000	2.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000	5.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.144.000	18.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.685.000	342.603.427,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	30.798.900	30.798.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	30.798.900	30.798.000,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.308.000	132.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.390.000	3.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.918.000	5.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0004	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.000.000	123.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0008	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.690.000	121.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0009	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.690.000	121.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	330.199.920	281.953.852,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	330.199.920	281.953.852,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	130.199.920	118.313.852,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200.000.000	163.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.899.451.716	1.708.379.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.899.451.716	1.708.379.325,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	73.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	201.604.000	201.604.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	168.701.741	166.052.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.429.145.975	1.267.597.975,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.794.640.000	3.789.072.000	1.327.975.000	1.262.942.000	0	0	0	0
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.794.640.000	3.789.072.000	1.327.975.000	1.262.942.000	0	0	0	0
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000	25.000.000,00	15.000.000	14.773.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000,00	15.000.000	14.773.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.01.2.09.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	15.000.000	14.773.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	942.522.000	941.788.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.01	Penataan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	600.000.000	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	600.000.000	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.02	Penataan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	342.522.000	341.788.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	178.436.000	178.012.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	46.446.000	46.176.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.02.2.02.0019	Penataan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	57.640.000	57.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.587.318.000	1.582.484.000,00	1.312.975.000	1.248.169.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	459.138.000	459.138.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	459.138.000	459.138.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	448.000.000	448.000.000,00	1.312.975.000	1.248.169.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0	0,00	1.312.975.000	1.248.169.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	448.000.000	448.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	329.410.000	325.076.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesetaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	309.660.000	309.376.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4.050.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15.700.000	15.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB	350.750.000	350.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	350.750.000	350.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.239.800.000	1.239.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	804.800.000	804.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	804.800.000	804.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	435.000.000	435.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14	2.14.2.08.0.00.01.0000	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	435.000.000	435.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.867.793.700	3.684.002.379	5.525.581.600	5.402.451.800	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	3.867.793.700	3.684.002.379	5.525.581.600	5.402.451.800	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.374.489.700	2.662.323.079,00	121.546.100	120.767.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.000.000	42.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	6.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.449.585.000	1.353.557.579,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.585.000	1.346.557.579,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.013.250	629.782.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	572.000	560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.220.650	75.215.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.110.000	14.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.840.000	19.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.948.000	44.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.292.600	475.117.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	62.845.000	62.065.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	50.000.000	49.300.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	12.845.000	12.765.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.350.000	154.952.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.992.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.350.000	12.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000	132.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.531.450	458.081.500,00	58.702.500	58.702.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.210.000	30.143.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.234.450	184.915.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	247.087.000	237.021.508,00	27.077.500	27.077.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	31.625.000	31.625.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	456.104.000	454.581.000,00	2.337.522.500	2.273.366.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	144.085.000	142.500.000,00	1.737.522.500	1.674.486.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	84.085.000	82.500.000,00	1.737.522.500	1.674.486.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	0,00	600.000.000	598.880.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	0	0,00	600.000.000	598.880.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	230.729.000	230.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	230.729.000	230.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.370.000	81.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13.515.000	13.515.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	67.855.000	67.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	637.200.000	567.098.500,00	3.866.513.000	3.008.317.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	637.200.000	567.098.500,00	3.866.513.000	3.008.317.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	626.000.000	555.928.500,00	3.866.513.000	3.008.317.500,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.200.000	11.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.109.776.978	4.049.322.195	72.138.930	71.870.000	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.109.776.978	4.049.322.195	72.138.930	71.870.000	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.606.608.250	1.556.851.306,00	18.180.000	18.070.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.000	59.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.000.000	37.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.650.000	11.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.400.000	13.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	869.428.700	835.055.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	849.928.700	815.923.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.000.000	12.942.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.450.000	2.036.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.450.000	2.036.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.264.000	35.685.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.950.000	24.800.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.314.000	10.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.115.050	468.686.087,00	4.180.000	4.170.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	924.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.000	120.000,00	4.180.000	4.170.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.192.050	27.192.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	9.953.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	4.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000	15.401.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.847.000	410.375.987,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	14.000.000	13.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	14.000.000	13.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.120.500	88.048.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.970.500	9.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.000.000	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.140.000	65.377.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.510.000	61.546.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.100.000	1.900.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.550.000	1.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.294.485.000	1.288.924.100,00	34.958.930	34.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.294.485.000	1.288.924.100,00	34.958.930	34.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	227.485.000	225.004.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	26.920.000	23.920.000,00	34.958.930	34.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.040.000.000	1.040.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.208.763.728	1.205.546.780,00	19.000.000	18.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.113.763.728	1.110.582.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.113.763.728	1.110.582.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	94.964.000,00	19.000.000	18.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	55.000.000	94.964.000,00	19.000.000	18.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.077.518.470	2.035.446.124	97.475.600	97.400.000	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.077.518.470	2.035.446.124	97.475.600	97.400.000	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.855.117.844	1.815.998.224,00	97.475.600	97.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.905.644	28.882.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.433.000	6.433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.906	6.499.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.972.708	15.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	858.947.750	833.179.677,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.448.042	825.680.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.708	6.499.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.469.544	506.432.318,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.318.444	34.318.408,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.638.100	33.633.244,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.087.000	52.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.586.000	382.560.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	97.475.600	97.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	97.475.600	97.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.304.936	356.114.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.405.000	6.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.899.936	30.959.597,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000	318.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.470.000	92.388.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.470.000	92.388.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	67.483.826	66.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67.483.826	66.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	67.483.826	66.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	61.025.900	59.875.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.025.900	59.875.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	61.025.900	59.875.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	93.890.900	92.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dikelola Melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	93.890.900	92.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	57.850.900	56.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	36.040.000	36.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.355.107.294	2.274.543.224	140.364.800	140.194.880	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.355.107.294	2.274.543.224	140.364.800	140.194.880	0	0	0	0
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.811.833.464	1.731.477.278,00	140.364.800	140.194.880,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.300.000	30.614.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.300.000	6.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.700.000	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	4.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.300.000	16.134.226,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	929.737.044	851.272.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.637.044	845.172.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.100.000	6.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.400.000	6.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.400.000	6.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.158.000	108.638.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.158.000	63.638.796,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.494.556	534.949.818,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.867.000	9.867.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.262.556	49.262.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.560.000	12.559.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.965.000	459.420.618,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	140.364.800	140.194.880,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	122.364.800	122.194.880,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.733.864	139.622.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.733.864	19.622.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	114.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.940.000	19.931.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.940.000	19.931.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.940.000	19.931.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	123.254.830	123.246.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	123.254.830	123.246.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	123.254.830	123.246.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	355.089.000	354.888.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.089.000	354.888.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.2.07.3.32.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	355.089.000	354.888.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.230.335.704	3.143.654.011	713.441.150	657.900.000	0	0	0	0
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.230.335.704	3.143.654.011	713.441.150	657.900.000	0	0	0	0
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.219.398.604	2.140.433.402,00	78.546.150	78.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.260.000	84.958.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.698.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.260.000	9.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.980.000	958.538.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.002.980.000	945.538.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.450.000	78.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.450.000	78.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.345.104	625.240.242,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.032.600	4.032.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.200.944	22.118.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.497.560	22.241.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.640.000	80.588.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.134.000	492.419.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	78.546.150	78.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	78.546.150	78.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.393.500	289.435.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.893.500	54.885.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234.000.000	227.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.460.000	97.638.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.460.000	97.638.870,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	37.658.600	36.258.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.658.600	36.258.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	37.658.600	36.258.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	623.278.500	616.960.009,00	634.895.000	579.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.500.000	17.000.000,00	634.895.000	579.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	17.500.000	17.000.000,00	634.895.000	579.450.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.778.500	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	385.778.500	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000	249.960.009,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250.000.000	249.960.009,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350.000.000	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.01.0000	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	86.620.000	71.713.000	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	86.620.000	71.713.000	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86.620.000	71.713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.620.000	71.713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48.300.000	35.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Multi Statistik Daerah yang Terintegrasi	38.320.000	35.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	23.240.000	22.280.000	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	23.240.000	22.280.000	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	23.240.000	22.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.240.000	22.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.240.000	22.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.550.524.565	1.255.654.560	2.781.400.000	2.747.808.000	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.550.524.565	1.255.654.560	2.781.400.000	2.747.808.000	0	0	0	0
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	620.312.840	419.937.840,00	2.581.400.000	2.548.058.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	620.312.840	419.937.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Kebudayaan	620.312.840	419.937.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	2.581.400.000	2.548.058.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0	0,00	2.581.400.000	2.548.058.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	523.238.200	468.738.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	523.238.200	468.738.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	523.238.200	468.738.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	0,00	200.000.000	199.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	200.000.000	199.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	0	0,00	200.000.000	199.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	406.973.525	374.978.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	242.660.000	210.665.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	242.660.000	210.665.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	164.313.525	164.313.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	164.313.525	164.313.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.378.683.591	3.080.651.997	3.071.700.000	3.067.782.125	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.378.683.591	3.080.651.997	3.071.700.000	3.067.782.125	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.043.425.142	1.756.737.300,00	52.200.000	52.185.080,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.741.900	35.725.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.402.000	6.402.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.492.000	6.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.757.900	22.739.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.3.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.286.367.956	1.021.246.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.280.875.956	1.014.754.814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.492.000	6.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.450.000	39.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.450.000	39.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.882.520	251.383.624,00	52.200.000	52.185.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.618.000	1.618.000,00	52.200.000	52.185.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.094.400	16.093.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.489.000	12.489.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.788.200	10.298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4.960.920	4.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.950.000	12.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.882.000	191.876.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.130.950	359.311.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.130.950	41.311.962,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.000.000	315.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.851.816	49.621.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.851.816	49.621.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.335.258.449	1.323.914.697,00	3.019.500.000	3.015.597.125,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.220.280.549	1.218.645.797,00	2.749.580.000	2.746.072.125,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	80.727.019	80.546.600,00	200.000.000	199.959.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277.938.339	277.040.124,00	249.500.000	249.350.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.479.500	99.301.823,00	1.600.000.000	1.597.527.625,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	88.599.900	88.599.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	102.156.300	101.583.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.655.600	111.655.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	53.151.000	53.151.000,00	500.000.000	499.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	164.320.750	164.320.600,00	200.000.000	199.444.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.261.150	242.246.758,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.968.900	105.468.900,00	270.000.000	269.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	52.798.900	52.748.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	270.000.000	269.525.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	62.170.000	52.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	130.750.450	127.711.360	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	130.750.450	127.711.360	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	130.750.450	127.711.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	29.549.900	29.023.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	29.549.900	29.023.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	62.025.550	60.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	62.025.550	60.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	39.175.000	38.645.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	39.175.000	38.645.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.383.809.382	16.040.445.900	6.541.810.073	6.370.402.900	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.671.044.297	5.448.814.793	307.858.900	178.458.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004		DINAS PERIKANAN	5.671.044.297	5.448.814.793	307.858.900	178.458.000	0	0	0	0
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.251.444.255	2.116.491.220,00	183.291.900	178.458.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.951.493	36.273.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.372.393	12.094.393,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.499.796	3.220.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.976.510	3.976.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.302.800	16.982.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.221.818.000	1.158.048.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.214.818.000	1.151.048.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.701.890	6.701.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.097.500	1.097.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.604.390	5.604.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.516.000	75.511.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.680.000	22.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.916.000	52.911.545,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.682.930	398.248.970,00	31.750.000	31.723.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.735.000	7.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.483.300	1.000.000,00	31.750.000	31.723.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.235.630	25.190.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0004	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.021.000	20.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.480.000	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.985.000	19.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.743.000	322.552.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	51.541.900	51.540.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Perahan dan Mesin Lainnya	0	0,00	51.541.900	51.540.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.725.936	178.375.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.475.936	27.125.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000	141.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.048.000	271.331.258,00	100.000.000	95.195.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.950.000	105.963.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.098.000	165.368.000,00	100.000.000	95.195.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.217.689.712	2.142.244.775,00	24.567.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.217.689.712	2.142.244.775,00	24.567.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.054.089.000	2.031.554.809,00	24.567.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	163.600.712	110.689.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	942.615.910	931.060.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	181.301.030	174.887.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	77.789.110	71.962.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	54.305.660	53.839.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Konsultasi dan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49.086.260	49.086.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	761.314.880	756.182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.136.880	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Perbudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	749.178.000	745.082.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	126.259.360	126.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	126.259.360	126.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota	126.259.360	126.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	133.115.060	132.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	133.115.060	132.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	133.115.060	132.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	667.197.210	665.383.900	170.625.000	170.600.000	0	0	0	0
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	667.197.210	665.383.900	170.625.000	170.600.000	0	0	0	0
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	97.447.210	96.975.900,00	170.625.000	170.600.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	69.797.900	69.324.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	69.797.900	69.324.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	27.649.310	27.649.000,00	170.625.000	170.600.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	27.649.310	27.649.000,00	170.625.000	170.600.000,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	292.889.800	292.349.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	292.889.800	292.349.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	121.931.200	121.391.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.03.2.01.0007	Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	170.958.600	170.958.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	130.400.000	130.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÃ	130.400.000	130.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	130.400.000	130.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	346.400.200	145.660.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	73.230.100	72.830.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.230.100	72.830.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	73.230.100	72.830.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.01.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	73.230.100	72.830.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	9.134.238.320	9.037.134.160	1.141.558.673	1.083.538.900	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERTANIAN	9.134.238.320	9.037.134.160	1.141.558.673	1.083.538.900	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.191.227.520	2.105.897.181,00	468.042.675	465.818.500,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.751.600	40.751.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.417.200	6.417.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.417.200	6.417.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.417.200	6.417.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.500.000	21.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.185.719.600	1.132.623.945,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.179.520.000	1.126.404.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.219.600	6.219.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.219.600	6.219.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.219.600	6.219.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.646.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.646.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.551.904	502.414.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.700	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.754.404	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.710.808	29.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.840.000	21.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.625.000	416.534.389,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	468.042.675	465.818.508,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	330.600.000	330.600.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	137.442.675	135.218.508,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.841.816	42.469.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.841.816	9.469.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.477.000	372.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.265.000	61.651.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.212.000	310.767.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	792.874.870	791.166.318,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	792.874.870	791.166.318,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	729.569.870	727.875.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	63.305.000	63.291.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.635.335.000	3.633.407.793,00	673.515.998	617.720.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	50.335.000	49.407.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.335.000	49.407.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.585.000.000	3.584.000.000,00	673.515.998	617.720.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.585.000.000	3.584.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0	0,00	673.515.998	617.720.400,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	327.767.070	327.259.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penetapan dan Pemberakan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	36.100.000	36.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	36.100.000	36.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.000.000	84.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	84.000.000	84.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	207.667.070	207.234.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	50.335.000	50.326.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	157.332.070	156.908.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	61.097.000	61.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	61.097.000	61.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	61.097.000	61.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.125.936.860	2.118.362.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.125.936.860	2.118.362.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	727.936.860	727.872.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.049.000.000	1.049.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	149.000.000	149.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000	192.490.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	252.470.000	248.600.000	949.982.500	939.727.000	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	252.470.000	248.600.000	949.982.500	939.727.000	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	203.830.000	199.960.000,00	949.982.500	939.727.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	203.830.000	199.960.000,00	949.982.500	939.727.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	203.830.000	199.960.000,00	949.982.500	939.727.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	48.640.000	48.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	48.640.000	48.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48.640.000	48.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	467.113.000	448.767.489	4.071.785.000	3.998.079.000	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	467.113.000	448.767.489	4.071.785.000	3.998.079.000	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	467.113.000	448.767.489,00	4.071.785.000	3.998.079.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	467.113.000	448.767.489,00	4.071.785.000	3.998.079.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	82.500.000	82.500.000,00	4.071.785.000	3.998.079.000,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	384.613.000	366.267.489,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	191.746.555	191.745.558	0	0	0	0	0	0
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	191.746.555	191.745.558	0	0	0	0	0	0
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	191.746.555	191.745.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	191.746.555	191.745.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.18.2.07.3.32.01.0000	3.32.04.2.01.0001	Pengaturan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	191.746.555	191.745.558,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	65.547.320.921	61.921.910.350	2.349.710.700	2.295.982.840	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	36.355.669.487	34.287.768.843	1.229.105.470	1.225.392.840	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	11.939.713.000	12.524.697.326	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.939.713.000	12.463.177.326,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	21.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	10.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	0	1.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	7.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.519.610.000	11.320.179.211,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.519.610.000	11.260.322.211,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	18.272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyimpan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	17.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	25.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	187.646.038,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	1.810.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	2.681.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	11.822.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	8.754.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	11.789.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	150.787.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	92.088.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	90.938.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	134.837.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	48.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	34.517.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	650.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.103.000	435.308.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	420.103.000	381.308.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	0	262.567.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0	92.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0	166.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0	4.567.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	0	9.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	9.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	30.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	0	15.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0	15.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	30.808.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	0	5.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	5.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	25.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0	25.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	809.000.000	773.565.410	175.000.000	174.500.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	479.767.120	460.057.800,00	175.000.000	174.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	19.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.279.620	247.102.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.451.620	27.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.890.000	29.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.938.000	170.812.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.880.000	128.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.880.000	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.000.000	126.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.607.580	40.075.000,00	175.000.000	174.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.582.580	39.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.025.000	550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	175.000.000	174.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	329.232.880	313.507.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	329.232.880	313.507.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	329.232.880	313.507.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN PEMBANGUNAN	682.712.300	647.053.000	25.000.000	23.050.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	475.878.300	445.981.000,00	25.000.000	23.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	18.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000	1.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	4.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	4.998.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	1.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.606.000	63.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.060.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.606.000	57.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.072.380	254.842.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.100.000	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000	800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.941.300	9.831.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.440.000	8.439.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.791.000	227.672.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	25.000.000	23.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	25.000.000	23.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.010.000	65.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.010.000	2.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	63.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.690.000	36.545.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.150.000	34.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	1.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.320.000	1.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	206.834.000	201.072.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	206.834.000	201.072.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	21.860.000	21.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	66.974.000	61.222.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	118.000.000	117.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.416.599.622	7.594.838.800	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	409.397.438	380.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.989.552	26.899.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.484.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.989.552	14.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.500.000	26.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.500.000	26.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.977.906	199.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.906	9.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	9.564.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.620.000	4.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.359.000	174.437.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.020.000	97.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	1.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.000.000	96.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.400.000	36.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.400.000	36.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.007.202.164	7.214.613.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.007.202.164	7.214.613.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.976.688.294	1.925.638.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.030.513.870	5.288.975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	1.064.576.000	1.020.208.500	0	0	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.064.576.000	1.020.208.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.970.000	27.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.470.000	21.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.700.000	21.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.700.000	21.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.000.000	215.674.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	22.182.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.000.000	163.492.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	51.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.000.000	58.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.000.000	58.574.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	622.966.000	611.293.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	319.364.500	317.485.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.275.500	39.155.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	106.904.000	106.904.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.660.000	15.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	141.702.000	132.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN HUKUM	900.507.000	863.906.112	47.493.000	47.490.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	682.923.500	646.346.112,00	47.493.000	47.490.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.226.000	22.156.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.726.000	15.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.630.000	118.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.200.000	14.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	49.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.430.000	54.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.874.650	374.720.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.930.000	5.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.017.000	1.017.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.054.450	20.054.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.257.200	49.245.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.080.000	10.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.536.000	290.394.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	47.493.000	47.490.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	47.493.000	47.490.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.765.000	67.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.005.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.760.000	6.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.427.850	48.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	44.401.200	44.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.026.650	4.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	217.583.500	217.560.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	217.583.500	217.560.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	201.323.500	201.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	16.260.000	16.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.188.753.820	1.137.859.700	46.871.180	46.540.000	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.188.753.820	1.137.859.700,00	46.871.180	46.540.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.486.700	31.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.499.600	6.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.499.800	6.495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.487.300	18.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.999.600	6.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.499.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.499.800	6.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.550.000	43.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.550.000	43.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.569.127	553.748.500,00	2.200.000	2.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	2.200.000	2.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.275.127	32.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.165.000	130.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.040.000	23.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.975.000	45.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.114.000	322.508.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	44.671.180	44.340.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	21.000.000	20.700.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	23.671.180	23.640.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.995.000	1.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.000	1.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.637.393	47.888.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.667.393	44.958.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.970.000	2.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	460.506.000	451.813.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Kepprotokolan	286.961.000	280.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	131.829.000	131.794.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	121.716.000	120.058.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022		BAGIAN UMUM	9.766.227.545	8.306.132.095	874.457.990	873.712.840	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.766.227.545	8.306.132.095,00	874.457.990	873.712.840,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.950.000	21.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.975.000	10.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.975.000	10.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.880.000	43.287.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.960.000	9.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18.420.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.500.000	33.522.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.400.000	18.105.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.400.000	7.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.000.000	10.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	494.920.000	453.304.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.300.000	78.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.860.000	214.036.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	175.760.000	164.968.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.176.534.845	2.143.317.264,00	72.000.000	71.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.800.000	61.952.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.494.560	35.783.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	72.000.000	71.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.074.375	60.215.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.471.910	33.818.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	279.216.000	273.479.708,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.683.468.000	1.675.067.365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	790.557.840	789.712.848,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	277.651.340	277.557.848,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	360.702.500	360.450.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	152.804.000	151.705.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.490.213.500	2.301.846.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	10.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	503.313.500	384.741.561,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	34.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.922.880.000	1.874.805.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.880.967.260	1.447.940.628,00	12.100.150	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	393.400.000	290.104.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	840.400.000	723.334.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.540.000	81.243.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.09.0009	Pendirian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	354.607.200	353.258.880,00	12.100.150	12.100.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.581.832.000	1.027.513.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.250.000	160.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	105.207.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.172.582.000	753.059.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.203.540.000	846.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	514.400.000	468.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	524.400.000	266.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0022	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	124.740.000	120.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004		BAGIAN EKONOMI DAN SDA	849.078.500	773.055.500	10.285.000	10.200.000	0	0	0	0
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	535.301.423	499.486.000,00	10.285.000	10.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.007.500	19.335.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.085.500	505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.361.000	4.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.561.000	14.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.062.000	14.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.031.000	7.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.031.000	7.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.428.000	77.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.800.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.628.000	72.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.113.923	316.791.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.242.923	23.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.192.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.699.000	280.591.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	0,00	10.285.000	10.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	0,00	10.285.000	10.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.950.000	46.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.720.000	25.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.720.000	25.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	313.777.077	273.569.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	214.380.520	194.686.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	145.051.260	111.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	89.329.260	83.356.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	79.396.557	78.883.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	45.406.297	44.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0004	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	33.990.260	33.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN	718.501.700	647.452.000	49.998.300	49.900.000	0	0	0	0
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.900.020	395.100.900,00	49.998.300	49.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.514.479	21.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.505.630	3.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.961.230	3.211.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.047.619	15.024.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.490.222	4.678.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.490.222	4.678.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.022.000	18.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.150.000	18.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.872.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.636.923	195.166.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.419.380	6.419.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.489.546	3.476.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.063.215	19.039.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.555.782	28.524.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	9.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.144.000	127.758.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	49.998.300	49.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	49.998.300	49.900.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.286.400	133.157.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.486.400	5.507.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.000.000	126.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.939.986	22.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.939.986	22.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	285.601.680	252.351.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	285.601.680	252.351.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25.640.626	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0009	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150.375.804	142.766.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.4.01.4.01.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	109.585.250	109.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	29.211.651.434	27.634.141.507	1.120.605.230	1.070.590.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	29.211.651.434	27.634.141.507	1.120.605.230	1.070.590.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.277.048.398	11.573.472.084,00	720.605.230	670.590.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.929.300	39.008.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.945.660	14.681.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.769.160	10.765.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.213.480	14.161.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.012.511	1.110.150.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.151.490.531	1.096.636.237,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.521.980	13.513.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.222.480	48.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.800.000	48.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	155.609.480	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.813.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.314.255.863	1.302.759.296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.440.000	38.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.300.000	114.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	273.739.880	273.739.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.549.040	49.482.512,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.040.000	15.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	74.626.983	74.626.983,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Pasilitasi Kunjungan Tamu	246.900.000	244.230.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.600.000	492.730.956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	27.000.000,00	672.878.750	670.598.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	50.000.000	48.200.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	401.289.580	401.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	27.000.000,00	221.589.150	221.398.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.638.320	878.346.012,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.710.000	16.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.172.000	39.381.172,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.756.320	43.754.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	780.000.000	778.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.809.916	720.451.563,00	47.726.500	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	585.300.000	339.213.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.800.000	41.439.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.709.916	348.800.008,00	47.726.500	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.085.500.000	7.966.750.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.715.500.000	7.618.764.096,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	245.000.000	240.772.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000	107.214.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.567.680.000	1.479.613.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.567.680.000	1.479.613.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.934.603.044	14.080.669.423,00	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	591.962.110	589.058.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	52.590.960	52.140.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	51.065.200	50.413.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	488.327.950	486.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	848.979.196	606.015.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	142.025.440	123.535.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148.080.440	146.916.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	331.769.688	169.169.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	167.873.188	167.513.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	59.230.440	58.880.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	98.569.880	96.219.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	8.919.920	8.919.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	36.130.440	35.780.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.088.096.540	988.705.569,00	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	160.916.980	159.526.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216.000.000	216.000.004,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	132.000.000	104.000.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.179.560	9.179.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	520.000.000	520.000.000,00	400.000.000	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.247.024.588	1.234.906.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	38.300.000	33.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.608.100	11.608.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.197.116.488	1.189.398.285,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	11.109.970.730	10.543.767.834,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	11.101.022.000	10.535.029.104,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8.948.730	8.738.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	37.285.968.836	34.770.118.432	4.896.347.940	4.587.290.000	1.500.000.000	991.052.110	103.116.811.300	102.702.242.900
5.01			PERENCANAAN	5.186.327.274	5.049.691.240	368.000.000	363.300.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.186.327.274	5.049.691.240	368.000.000	363.300.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.653.214.074	2.555.965.275,00	368.000.000	363.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.649.500	111.529.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.094.500	33.974.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.980.000	13.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.980.000	13.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.548.000	13.548.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.047.000	36.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.040.777.155	993.649.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.028.141.155	971.013.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.980.000	13.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.656.000	8.656.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.100.000	26.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.100.000	26.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.648.619	900.647.562,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.700.000	4.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.408.619	7.408.619,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.505.000	61.504.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.000.000	67.999.921,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.800.000	88.799.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.235.000	660.235.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	368.000.000	363.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	368.000.000	363.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.200.140	206.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.140	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.838.660	315.838.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	276.340.000	276.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.498.660	39.498.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.362.858.200	1.325.695.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	941.404.700	904.978.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	102.598.500	101.608.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	166.778.700	155.242.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	672.027.500	648.127.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	71.844.000	71.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	71.844.000	71.169.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	349.609.500	349.546.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	255.013.500	254.952.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	54.596.000	54.596.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.170.255.000	1.168.030.385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	629.535.000	628.993.747,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	96.500.000	96.161.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.000.000	29.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	238.000.000	237.999.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	127.035.000	127.034.947,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	138.000.000	138.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	268.000.000	266.315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	238.000.000	236.315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	272.720.000	272.719.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.720.000	59.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	68.000.000	68.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	145.000.000	144.999.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	26.803.258.908	25.058.591.131	2.988.347.940	2.686.800.000	1.500.000.000	991.052.110	103.116.811.300	102.702.242.900
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEUANGAN DAERAH	26.803.258.908	25.058.591.131	2.988.347.940	2.686.800.000	1.500.000.000	991.052.110	103.116.811.300	102.702.242.900
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.797.482.749	16.318.538.730,00	2.952.347.940	2.650.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.379.396	279.012.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.764.680	45.735.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	42.565.190	42.286.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.497.735	47.367.735,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	22.113.494	22.105.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	23.412.899	23.406.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.471.308	51.094.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.552.170	47.016.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.706.941.549	12.520.933.826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.543.212.621	12.358.029.898,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.927.535	44.742.535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.923.865	27.627.865,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33.739.308	33.649.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.843.604	36.693.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.294.624	20.280.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109.765.750	109.249.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	27.190.195	26.739.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.373.795	15.351.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.981.230	27.967.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.630.355	21.614.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	17.590.175	17.576.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.282.305	282.786.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	115.000.000	114.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	20.660.765	20.645.765,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24.177.935	24.162.935,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.020.605	24.004.305,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.423.000	99.343.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.598.536.765	1.593.764.599,00	60.587.940	58.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.445.148	13.427.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000	0,00	10.587.940	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0,00	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.964.325	84.901.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.580.300	103.468.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.550.000	3.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	361.210.000	360.836.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.311.000	731.287.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.266.000	296.323.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000	0,00	2.113.440.000	2.083.800.009,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	1.514.000.000	1.484.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	509.000.000	509.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	0,00	90.940.000	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.752.500	726.801.881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.150.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.802.500	117.801.881,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.800.000	607.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.824.484	805.980.643,00	778.320.000	517.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	514.650.000	465.006.629,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.170.484	236.991.314,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.000.000	83.991.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	0,00	428.320.000	415.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000,00	350.000.000	102.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.501.830.159	6.242.661.696,00	0	0,00	1.500.000.000	991.052.110,00	103.116.811.380	102.762.242.980,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.208.250.130	2.080.226.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	140.308.400	138.419.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	153.113.520	153.112.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.555.680	72.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	67.150.550	67.142.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58.591.280	39.672.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	57.703.020	57.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	490.221.880	435.721.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	217.252.420	217.252.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	48.575.260	48.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	46.184.360	46.184.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	463.315.300	379.152.522,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	46.121.600	46.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	387.156.860	386.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.180.000.038	1.178.604.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	77.998.500	77.498.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.522.500	76.232.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	57.114.500	57.114.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	283.678.000	282.843.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penanganan/ Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	115.065.500	115.059.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	38.261.000	38.254.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penangatan dan Penerbitan atas SP2D dengan Instansi Terkait	98.562.538	98.561.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	272.870.000	272.638.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	168.417.500	168.403.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.140.000.000	2.012.511.141,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	50.000.000	49.762.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	350.000.000	348.236.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	70.000.000	69.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	500.000.000	499.698.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50.000.000	48.227.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	98.229.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	60.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000	898.000.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	1.500.000.000	991.052.118,00	103.116.811.300	102.702.242.900,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	103.116.811.300	102.702.242.900,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	1.500.000.000	991.052.118,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	973.579.991	971.319.673,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	973.579.991	971.319.673,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.014.234.000	1.013.913.695,00	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.014.234.000	1.013.913.695,00	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	205.000.000	204.945.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.178.000	51.178.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	75.000.000	74.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	220.000.000	219.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	50.000.000	50.000.000,00	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	166.500.000	166.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80.000.000	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	106.496.000	106.496.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.489.712.000	1.483.477.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.489.712.000	1.483.477.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	77.000.000	76.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	69.300.000	69.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	424.250.000	423.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	292.952.000	288.503.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	250.000.000	249.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.125.000	37.111.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	24.750.000	24.736.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.750.000	24.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	24.750.000	24.554.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	100.000.000	99.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	114.835.000	114.408.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	4.078.782.634	3.470.045.261	90.000.000	87.190.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	4.078.782.634	3.470.045.261	90.000.000	87.190.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.766.595.803	1.665.921.261,00	90.000.000	87.190.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.250.000	20.395.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.700.000	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.550.000	13.795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.051.615.613	995.861.661,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.044.915.613	989.211.661,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.700.000	6.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.650.000	33.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.650.000	33.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.353.100	375.558.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.685.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.627.600	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.104.500	19.382.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000	12.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.400.000	10.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.020.000	31.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.516.000	296.114.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	90.000.000	87.190.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	30.000.000	27.250.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	60.000.000	59.940.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.195.000	139.578.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.995.000	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	5.628.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000	132.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.932.096	103.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.932.096	103.336.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.311.786.825	1.804.124.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	888.222.000	767.154.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	65.550.000	58.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	425.552.000	368.669.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	76.550.000	73.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	135.550.000	132.784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	185.020.000	135.457.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	464.906.000	443.313.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	49.996.000	33.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	168.900.000	164.013.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	246.010.000	246.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	606.772.000	339.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	447.550.000	183.709.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	159.222.000	155.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	351.886.825	254.298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000	34.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	71.060.025	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	83.076.800	71.266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	116.200.000	114.155.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	34.250.000	1.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	319.600.000	319.600.000	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	319.600.000	319.600.000	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	319.600.000	319.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	319.600.000	319.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	319.600.000	319.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	898.000.000	872.190.800	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	898.000.000	872.190.800	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	898.000.000	872.190.800,00	1.450.000.000	1.450.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penglojian Peraturan	686.782.700	673.792.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	137.568.500	136.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	113.049.500	101.046.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	257.771.000	257.602.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	36.259.500	36.246.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	53.988.800	53.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Penglojian Peraturan	88.145.400	88.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0,00	450.000.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	0,00	450.000.000	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	0,00	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0,00	500.000.000	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0,00	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	0,00	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,00	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	213.217.300	198.398.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Pemkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	141.292.000	141.035.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	69.925.300	57.363.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.718.900.513	5.519.499.188	592.473.400	555.473.400	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.718.900.513	5.519.499.188	592.473.400	555.473.400	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT DAERAH	6.718.900.513	5.519.499.188	592.473.400	555.473.400	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.669.385.513	3.243.645.815,00	592.473.400	555.473.400,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.686.000	14.388.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.086.000	14.388.780,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.837.771.813	1.743.435.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.831.271.813	1.743.435.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	918.623.000	709.646.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	21.915.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	670.273.000	543.481.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	226.350.000	144.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.649.700	521.097.531,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.268.700	74.860.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.268.000	46.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.200.000	52.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.121.000	343.046.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	592.473.400	555.473.400,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	470.000.000	433.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	122.473.400	122.473.400,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.610.000	117.609.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.910.000	8.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.700.000	5.199.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.000.000	103.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.055.000	137.667.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.055.000	137.667.613,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.386.010.000	1.707.448.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.873.110.000	1.319.198.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.069.750.000	777.794.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	242.750.000	170.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	75.950.000	71.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	34.750.000	31.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Ilmu	288.700.000	146.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	13.410.000	12.976.523,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	147.800.000	108.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	512.900.000	388.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	295.200.000	275.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	217.700.000	112.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	663.495.000	568.404.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	71.640.000	46.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	71.640.000	46.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	591.855.000	521.444.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	73.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.975.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	491.560.000	448.119.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	8.820.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	4.684.380.100	4.613.721.172	216.699.900	218.182.500	0	0	0	0
7.01			KECAMATAN	4.684.380.100	4.613.721.172	216.699.900	218.182.500	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN WAWONII BARAT	573.000.000	380.480.000	60.000.000	54.800.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	302.000.000	309.480.000,00	60.000.000	54.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.830.440	19.590.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.832.880	4.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.997.560	14.910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.732.569	213.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.838.864	19.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.993.704	14.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.100.000	18.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.800.000	160.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	60.000.000	54.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	60.000.000	54.800.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.247.000	58.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	1.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.147.000	3.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.150.000	14.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.550.000	4.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.600.000	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.000.000	71.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.000.000	71.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001		KELURAHAN LANGARA LAUT	260.000.000	249.040.000	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.000.000	51.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.650.000	7.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.650.000	7.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.400.000	42.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.274.500	5.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.995.500	1.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.730.000	22.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.400.000	12.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.000	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN WAWONII UTARA	367.348.100	362.411.302	65.651.900	64.390.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	306.343.600	301.931.802,00	65.651.900	64.390.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	4.957.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.957.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.005.500	182.959.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.987.000	1.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.909.903,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.058.500	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.960.000	15.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.102.902,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	65.651.900	64.390.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	37.000.000	36.100.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	28.651.900	28.290.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.446.000	58.414.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.456.000	3.424.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.802.100	26.606.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.500.000	21.465.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.302.100	5.135.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.964.000	42.964.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.964.000	42.964.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.964.000	19.964.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.000.000	4.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	4.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	4.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.040.500	13.040.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.040.500	13.040.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.040.500	13.040.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001		KELURAHAN LANSILOWO	200.000.000	234.000.000	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.710.000	16.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.710.000	16.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.060.000	6.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.950.000	5.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	221.290.000	217.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	21.290.000	17.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.940.000	7.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.350.000	9.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0001	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT	469.507.000	468.701.912	23.493.000	23.450.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	317.047.000	317.754.012,00	23.493.000	23.450.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	23.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	6.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.322.000	46.560.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.750.000	15.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.572.000	30.810.078,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.737.758	188.011.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.181.020	1.181.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.689.738	17.686.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.400.000	17.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.498.000	22.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.960.000	126.273.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	23.493.000	23.450.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	23.493.000	23.450.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.164.800	34.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.164.800	5.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.000.000	27.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.322.442	19.212.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.840.000	12.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.482.442	6.482.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.175.000	12.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.175.000	12.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.175.000	12.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.237.000	48.115.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.237.000	46.237.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.237.000	21.237.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	1.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	0	1.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.985.000	11.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.985.000	11.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.985.000	11.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.065.000	18.517.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.065.000	18.517.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	29.065.000	18.517.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001		KELURAHAN LADIANTA	260.000.000	247.490.900	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.140.000	35.508.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.140.000	35.508.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.900.000	5.908.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.440.000	12.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.800.000	16.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	213.860.000	211.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	213.860.000	211.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0001	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	15.860.000	13.982.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN WAWONII TIMUR	433.000.000	431.323.500	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	316.238.510	314.868.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.040.000	9.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.040.000	4.915.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.332.510	192.432.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.498.065	12.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.646.500	11.646.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.566.945	1.566.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.005.000	12.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.467.000	150.417.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.456.000	66.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.456.000	6.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.410.000	32.100.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.410.000	32.100.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGABAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.000.000	5.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.000.000	5.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.000.000	5.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.970.500	71.970.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.970.500	71.970.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.970.500	48.970.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.600.000	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.600.000	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.190.000	25.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.190.000	25.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.750.000	15.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.440.000	9.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.000.990	7.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.000.990	7.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.990	7.895.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001		KELURAHAN MUNSE	260.000.000	259.993.500	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.646.500	41.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.646.500	41.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.544.500	5.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.045.000	6.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.012.000	1.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.045.000	25.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	218.353.500	218.353.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.353.500	18.353.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.853.500	5.853.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.500.000	12.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0001	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN WAWONII TENGGARA	485.000.000	401.760.500	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	386.581.000	307.146.000,00	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.630.000	22.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	5.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.130.000	16.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	5.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	5.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.489.000	25.489.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.500.000	8.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.989.000	16.989.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.812.000	198.012.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.812.000	16.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	1.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	44.418.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.000.000	128.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000	46.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.950.000	17.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.950.000	17.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.400.000	17.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Penelikaraan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	17.400.000	17.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Penelikaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	17.400.000	17.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.899.500	39.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.899.500	37.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.680.000	17.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.219.500	19.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.119.500	16.494.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.119.500	16.494.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.119.500	16.494.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000	6.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000	6.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	11.000.000	6.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.200.000	14.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.200.000	14.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.200.000	14.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001		KELURAHAN POLARA	259.649.500	247.449.500	350.500	350.500	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.672.500	38.072.500,00	350.500	350.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.250.000	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.422.500	35.822.500,00	350.500	350.500,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	350.500	350.500,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.492.500	11.127.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.820.000	1.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.925.000	5.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.185.000	17.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	211.977.000	209.377.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.977.000	11.377.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.008.000	458.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	10.969.000	10.919.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0001	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	198.000.000	198.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		KECAMATAN WAWONII SELATAN	464.447.400	462.251.358	18.552.600	18.552.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	368.840.200	366.644.658,00	18.552.600	18.552.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000	26.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.755.000	32.518.658,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.050.000	10.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.685.000	22.468.658,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.765.200	222.626.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.164.800	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.976.400	20.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.762.000	14.762.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.100.000	16.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.764.000	163.764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	18.552.600	18.552.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	18.552.600	18.552.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.840.000	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.840.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.625.000	15.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.625.000	15.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.625.000	15.625.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.970.000	11.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.970.000	11.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.970.000	11.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.012.200	18.012.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.012.200	18.012.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.012.200	18.012.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001		KELURAHAN SAWAEA	260.000.000	259.600.000	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.669.000	44.269.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.585.000	30.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.460.000	12.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.125.000	17.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.084.000	12.084.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.084.000	12.084.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	215.331.000	215.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	215.331.000	215.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0001	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	15.331.000	15.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN WAWONII TENGAH	412.348.100	421.220.000	20.651.900	20.640.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.264.744	347.325.000,00	20.651.900	20.640.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	19.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.395.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.500.000	6.495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.227.000	234.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.023.000	11.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.832.000	36.365.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.372.000	166.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	20.651.900	20.640.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	20.651.900	20.640.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.091.744	54.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.091.744	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.940.000	14.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.940.000	14.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	13.000.000	13.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.828.866	23.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.828.866	23.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.409.941	11.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.418.925	12.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.259.575	9.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.259.575	9.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.259.575	9.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.994.915	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.994.915	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.994.915	14.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.000.000	12.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.000.000	12.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.000.000	12.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001		KELURAHAN LAMPEAPI	260.000.000	248.000.000	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.900.000	46.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.900.000	46.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.485.000	12.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000	8.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.915.000	14.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.100.000	201.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	201.100.000	201.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.100.000	9.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0001	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	192.000.000	192.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	29.375.659.252	29.173.298.165	61.500.000	59.700.000	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.375.659.252	29.173.298.165	61.500.000	59.700.000	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.375.659.252	29.173.298.165	61.500.000	59.700.000	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.579.912.000	1.465.416.613,00	61.500.000	59.700.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.182.000	17.462.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.682.000	10.962.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	865.330.000	781.726.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	857.330.000	773.726.097,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.020.000	522.873.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.045.000	49.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.000.000	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	475.475.000	445.328.516,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	61.500.000	59.700.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	50.000.000	48.200.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	11.500.000	11.500.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.200.000	55.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.180.000	77.155.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.495.000	62.495.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.685.000	14.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.047.592.788	1.027.441.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.047.592.788	1.027.441.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.010.512.788	991.469.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.580.000	12.112.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000	14.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	26.517.437.464	26.503.250.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	26.517.437.464	26.503.250.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	26.470.150.464	26.456.263.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	47.287.000	46.987.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	53.749.000	53.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	53.749.000	53.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.704.000	20.604.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Merilasi Surgksta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.045.000	28.675.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	139.878.000	86.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	139.878.000	86.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25.428.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	114.450.000	86.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	37.090.000	37.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanpan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	37.090.000	37.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.990.000	12.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.100.000	20.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	**389.285.857.099**	**368.605.107.628,00**	**212.468.226.590**	**202.033.467.999,00**	**1.500.000.000**	**991.053.118,00**	**103.116.811.300**	**102.702.242.900,00**

Langkan, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SABULLAH HAZAK

LAMPIRAN II

Lampiran II PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TA 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	59.884.731.412,00	115.581.819.970,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pemblayaan Tahun Berjalan	59.884.831.464,00	115.581.819.970,00
3	**Sub Total**	**(100.052,00)**	-
4			
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	29.067.140.222,00	59.884.731.412,00
6	**Sub Total**	**29.067.040.170,00**	**59.884.731.412,00**
7			
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	100.052,00	-
9	Lain-lain		
10	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (6 + 8)**	**29.067.140.222,00**	**59.884.731.412,00**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAMPIRAN III

Lampiran III PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
2	PENDAPATAN	5.4.1.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	4.196.047.660,00	4.453.839.699,00	(257.792.039,00)	(5,79)
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	3.146.636.744,00	1.871.011.956,00	1.274.624.788,00	68,09
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	4.356.088.467,00	2.573.323.227,00	1.782.565.260,00	69,27
7	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.1.4	5.419.097.622,00	7.434.809.141,64	(2.015.717.519,64)	(27,11)
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)		17.117.790.513,00	16.334.080.025,64	783.680.487,36	4,80
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2				
11	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.1.2.1.1	51.396.089.480,00	68.446.779.000,00	(17.050.709.520,00)	(24,91)
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.1.2.1.2	331.928.914.627,00	315.958.478.961,00	15.972.437.666,00	5,06
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.1.2.1.3	78.102.010.197,00	69.883.510.111,00	8.218.500.086,00	11,76
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.1.2.1.4	34.136.833.519,00	32.962.432.431,00	1.174.401.088,00	3,56
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s/d 15)		495.463.828.023,00	487.145.198.903,00	8.318.629.120,00	1,71
17						
18	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.4.1.1.2.2				
19	Insentif Fiskal	5.4.1.1.2.2.2	11.314.714.000,00	11.754.042.000,00	(439.328.000,00)	(3,74)
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19)		11.314.714.000,00	11.754.042.000,00	(439.328.000,00)	(3,74)
21						
22	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.1.2.3	16.609.020.978,00	22.170.507.046,00	(5.561.486.068,00)	(25,54)
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.3.1	16.609.020.978,00	17.170.507.046,00	(561.486.068,00)	(3,60)
24	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.4.1.1.2.3.2	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (23 s/d 24)		16.609.020.978,00	22.170.507.046,00	(5.561.486.068,00)	(36,64)
26						
27	Total Pendapatan Transfer (16 + 20 + 25)		523.387.563.001,00	521.073.747.949,00	2.313.815.052,00	0,43
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.1.3				
30	Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	222.789.816,00	3.857.669.744,00	(3.634.879.928,00)	(94,22)
31	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.4.1.1.3.2	1.923.744.739,00	0,00	1.923.744.739,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (30 s/d 31)		2.146.534.557,00	3.857.669.744,00	(1.711.135.187,00)	(44,36)
33						
34	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 27 + 32)		542.651.868.071,00	541.265.497.318,64	1.286.360.752,36	0,24
35						
36	BEBAN	5.4.1.2				
37	BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1				
38	Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	150.995.168.573,00	124.205.063.732,00	26.789.104.841,00	21,57
39	Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.1.2	195.580.366.660,00	184.990.947.485,13	3.708.519.174,90	1,90
40	Beban Hibah	5.4.1.2.1.3	29.585.270.179,00	16.565.135.000,00	13.020.135.179,00	78,60
41	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.4	4.297.021.000,00	2.393.030.000,00	1.903.991.000,00	79,56
42	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.5	185.759.676,59	433.372.053,80	(247.582.376,81)	(57,13)
43	Jumlah Beban Operasi (38 s/d 42)		383.752.616.089,02	338.578.448.270,93	45.174.167.818,09	13,34
44						
45	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.1.2.2				
46	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.2.1	28.251.654.969,58	29.021.716.219,86	(770.061.250,28)	(2,65)
47	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.2.2	16.181.179.010,00	14.883.632.955,00	1.297.546.055,00	8,72
48	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.2.3	105.534.580.059,00	103.283.186.575,00	2.051.393.484,00	1,99
49	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.2.4	429.534.637,00	430.060.613,00	(526.976,00)	(0,12)
50	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.2.5	6.980.925.470,76	9.995.863.601,19	(3.014.938.130,41)	(30,16)
51	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (46 s/d 50)		157.177.874.146,36	157.614.462.964,05	(436.588.817,69)	(0,28)
52						
53	BEBAN TRANSFER	5.4.1.2.3				
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.1.2.3.2	37.204.382.700,00	36.757.102.900,00	447.279.800,00	1,22
55	Jumlah Beban Transfer (54)		37.204.382.700,00	36.757.102.900,00	447.279.800,00	1,22
56						
57	JUMLAH BEBAN (43 + 51 + 55)		578.134.872.935,38	532.950.014.134,98	45.184.858.800,40	8,48
58						
59	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34 - 57)		(35.583.014.864,38)	8.315.483.183,66	(43.898.498.048,04)	(527,91)
60						

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
61	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
62	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.1				
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	5.4.2.1.1	8.040.540,00	0,00	8.040.540,00	0,00
64	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.1.2	13.143.976,92	2.533.300,00	10.610.676,92	418,85
65	Jumlah Defisit Non Operasional (63 s/d 64)		21.184.516,92	2.533.300,00	18.651.216,92	736,24
66						
67	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (65)		(21.184.516,92)	2.533.300,00	18.651.216,92	736,24
68	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (59 +67)		(35.604.199.381,33)	8.318.016.483,66	(43.922.215.864,99)	(528,04)
69						
70	POS LUAR BIASA	5.4.3				
71	Beban Luar Biasa	5.4.3.1	130.909.090,00	90.000.000,00	40.909.090,00	45,45
72	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (71)		(130.909.090,00)	(90.000.000,00)	40.909.090,00	(45,45)
73						
74	SURPLUS/DEFISIT - LO (68 + 72)		(35.735.108.471,33)	8.228.016.483,66	(43.963.124.954,99)	(534,31)

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAMPIRAN IV

Lampiran IV PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	**1.254.668.678.292,65**	**1.246.134.446.345,05**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2	**(35.735.108.471,30)**	**8.228.016.483,66**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	5.6.3	**(3.651.598.108,57)**	**306.215.463,94**
4	Koreksi Ekuitas Awal - Kas dan Setara Kas	5.6.3.1	100.052,00	(2.533.300,00)
5	Koreksi Ekuitas Awal - Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.2		0,00
6	Koreksi Ekuitas Awal - Aset Tetap		(662.440.268,00)	(838.100.000,00)
7	Koreksi Ekuitas Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.3	1.419.500.000,00	1.208.534.212,00
8	Koreksi Ekuitas Awal - Aset Lain-Lain	5.6.3.4	(4.766.006.426,00)	0,00
9	Koreksi Ekuitas Awal - Penyisihan Piutang	5.6.3.5	377.248.533,43	21.793.351,94
10	Koreksi Ekuitas Awal - Utang Belanja			(83.475.900,00)
11	Koreksi Ekuitas Awal - Piutang			(2.900,00)
12	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**1.216.281.971.712,78**	**1.254.668.678.292,65**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAMPIRAN V

Lampiran V PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
1	ASET	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	276.692,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	1.594.529,00	0,00
6	Kas di Bendahara BOSP	5.3.1.1.4	197.389,00	97.337,00
7	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	3.715.995,00	5.754.217,00
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.6	9.065.503,00	315.315,00
9	Setara Kas	5.3.1.1.7	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
10	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	5.3.1.1.8	171.375.055,00	614.464.936,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	884.900.296,74	1.085.221.240,74
12	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	(506.817.063,02)	(438.829.087,93)
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	395.405.900,00	356.745.500,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	(26.609.513,00)	(12.898.727,50)
15	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.3.1.1.11	0,00	0,00
16	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.3.1.1.11	0,00	0,00
17	Piutang Transfer	5.3.1.1.12	4.062.505.991,00	3.444.392.070,00
18	Penyisihan Piutang Transfer	5.3.1.1.12	(20.312.529,97)	(344.439.207,00)
19	Piutang Lainnya	5.3.1.1.13	514.790.600,00	5.100.000,00
20	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.13	(56.069.060,00)	(5.100.000,00)
21	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	0,00	3.333.333,33
22	Persediaan	5.3.1.1.15	5.642.639.719,17	8.180.511.423,79
23	**Jumlah Aset Lancar (3 s/d 22)**		**39.966.740.065,92**	**72.159.083.272,43**
24				
25	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.1.2		
26	Investasi Permanen			
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
28	**Jumlah Investasi Permanen (27)**	5.3.1.2.1	**12.500.000.000,00**	**12.500.000.000,00**
29	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (28)**	5.3.1.2.1	**12.500.000.000,00**	**12.500.000.000,00**
30				
31	**ASET TETAP**	5.3.1.3		
32	Tanah	5.3.1.3.1	62.661.131.770,00	60.083.873.770,00
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	348.450.776.238,77	312.016.755.918,77
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	565.767.491.580,00	524.302.855.294,00
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.103.472.669.807,00	1.055.089.810.188,00
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	11.855.669.627,74	9.930.397.135,74
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	58.751.180.444,00	10.777.793.500,00
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.6.1	(1.016.608.549.843,31)	(867.831.101.167,73)
39	**Jumlah Aset Tetap (32 s/d 38)**		**1.134.170.369.624,20**	**1.104.370.384.638,78**
40				
41	**ASET LAINNYA**	5.3.1.4		
42	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	243.585.000,00	0,00
43	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	75.414.874.961,00	67.001.485.271,00
44	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2.1	(83.408.046.686,39)	(56.427.121.417,61)
45	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	19.115.334.691,00	18.534.291.487,00
46	Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	5.3.1.4.3.1	(3.523.985.950,95)	(3.523.985.950,95)
47	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*	5.3.1.4.4	8.156.865.000,00	43.965.569.000,00
48	**Jumlah Aset Lainnya (42 s/d 46)**		**35.998.626.812,66**	**69.550.238.389,44**
49				
50	**JUMLAH ASET (23+29+39+47)**		**1.222.635.736.502,78**	**1.258.579.706.300,65**
51				
52	KEWAJIBAN	5.3.2		
53	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.2.1		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	9.065.503,00	315.315,00
55	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	750.000,00	9.750.000,00
56	Utang Belanja	5.3.2.1.3	7.343.949.287,00	3.900.962.693,00
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	0,00	0,00
58	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**7.353.764.790,00**	**3.911.028.008,00**
59	**JUMLAH KEWAJIBAN (57)**		**7.353.764.790,00**	**3.911.028.008,00**
60				

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2024	2023
61	**EKUITAS**	5.3.3		
62	EKUITAS	5.3.3.1	1.215.281.971.712,78	1.254.668.678.292,65
63	**JUMLAH EKUITAS (61)**		**1.215.281.971.712,78**	**1.254.668.678.292,65**
64				
65	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58 + 62)**		**1.222.635.736.502,78**	**1.258.579.706.300,65**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAMPIRAN VI

Lampiran VI PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NO		Catatan	2024	2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	**Arus Kas Masuk**	**5.5.1.1**		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	4.396.468.604,00	4.612.262.047,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	3.107.876.344,00	1.568.575.656,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.3	4.356.088.487,00	2.573.523.227,00
6	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	5.273.978.422,00	7.371.844.090,00
7	Pendapatan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	67.204.773.480,00	29.206.590.018,00
8	Pendapatan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	331.828.914.827,00	315.656.476.961,00
9	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.7	112.238.843.716,00	102.845.942.542,00
10	Pendapatan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.8	11.314.714.000,00	11.754.042.000,00
11	Pendapatan Dana Desa	5.5.1.1.9	65.912.626.000,00	65.129.304.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.5.1.1.10	15.890.907.057,00	17.295.757.943,00
13	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.5.1.1.11	0,00	5.000.000.000,00
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	5.5.1.1.12	1.923.744.739,00	0,00
15	**Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 14)**		**643.448.935.676,00**	**563.214.318.486,00**
16	**Arus Kas Keluar**	**5.5.1.2**		
17	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	146.544.208.655,00	124.206.063.732,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	187.646.533.095,00	192.296.333.588,00
19	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	30.188.210.759,00	16.565.135.000,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	4.297.021.000,00	2.393.030.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.5	991.052.110,00	90.000.000,00
22	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.6	102.702.242.900,00	101.886.406.900,00
23	**Jumlah Arus Kas Keluar (17 s/d 22)**		**472.369.268.519,00**	**437.436.969.220,00**
24	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 23)**		**171.079.667.157,00**	**125.777.349.266,00**
25				
26	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2**		
27	**Arus Kas Masuk**	**5.5.2.1**		
28	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.1	136.109.200,00	55.107.100,00
29	**Jumlah Arus Kas Masuk (28 s/d 28)**		**136.109.200,00**	**55.107.100,00**
30	**Arus Kas Keluar**	**5.5.2.2**		
31	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	1.768.930.000,00	4.091.525.640,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	33.676.841.899,00	33.886.037.488,00
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	92.894.711.664,00	60.907.127.172,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	61.587.257.321,00	73.036.471.874,00
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	4.559.190.025,00	4.262.828.750,00
36	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.6	7.546.536.690,00	2.845.554.000,00
37	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	5.5.2.2.7	0,00	2.500.000.000,00
38	**Jumlah Arus Kas Keluar (31 s/d 37)**		**202.033.467.599,00**	**181.529.544.924,00**
39	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29 - 38)**		**(201.897.358.399,00)**	**(181.474.437.824,00)**
40				
41	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3**		
42	**Arus Kas Keluar**	**5.5.3.1**		
43	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.3.1.1	0,00	0,00
44	**Jumlah Arus Kas Keluar (43)**		**0,00**	**0,00**
45	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (- 44)**		**0,00**	**0,00**
46				
47	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
48	**Arus Kas Masuk**	**5.5.4.1**		
49	Penerimaan Kas Tahun Berkenaan	5.5.4.1.1		0,00
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.2	36.593.620.836,00	35.686.175.931,00
51	**Jumlah Arus Kas Masuk (49 s/d 50)**		**36.593.620.836,00**	**35.686.175.931,00**
52	**Arus Kas Keluar**	**5.5.4.2**		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	36.584.870.648,00	35.685.860.616,00
54	Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya	5.5.4.2.2		0,00
55	**Jumlah Arus Kas Keluar (53 s/d 54)**		**36.584.870.648,00**	**35.685.860.616,00**
56	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 55)**		**8.750.188,00**	**315.315,00**
57				

NO		Catatan	2024	2023
58	**Kenaikan / (Penurunan) Kas (24 + 39 + 45 + 56)**	**5.5.5**	**(30.808.941.054,00)**	**(55.696.773.243,00)**
59	Saldo Awal Kas di BUD	**5.5.6**	59.885.046.727,00	115.581.819.970,00
60	Koreksi SILPA Tahun Lalu	**5.5.7**	100.052,00	0,00
61	**Saldo Akhir Kas di BUD (58 + 59 + 60)**	**5.5.8**	**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**
62				
63	Kas di Kasda	5.5.8.1	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00
64	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8.2	276.692,00	0,00
65	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.8.3	1.594.529,00	0,00
66	Kas di Bendahara BOS	5.5.8.4	197.369,00	97.337,00
67	Kas di Bendahara FKTP	5.5.8.5	3.715.995,00	5.754.217,00
68	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.5.8.6	9.065.503,00	315.315,00
69	Setara Kas	5.5.8.7	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
70	Kas di Bendahara BOK	5.5.8.8	171.376.055,00	614.454.836,00
71	**Saldo Akhir Kas di BUD (63 s/d 70)**		**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAMPIRAN VII

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik adalah merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsi-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah Konawe Kepulauan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Konawe Kepuluan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepuluan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak; dan
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlandaskan pada:

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara;
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah :
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

t. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

u. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

v. Peraturan Bupati Konawe Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

w. Peraturan Bupati Konawe Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024; dan

x. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

1.3. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Aset Lancar

4.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.4.1.2 Akuntansi Investasi Jangka Pendek

4.4.1.3 Akuntansi Piutang

4.4.1.4 Akuntansi Persediaan

4.4.2 Aset Non Lancar

4.4.2.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
4.4.2.2 Akuntansi Aset Tetap
4.4.2.3 Akuntansi Dana Cadangan
4.4.2.4 Akuntansi Aset Lainnya
4.5 Akuntansi Kewajiban
4.6 Akuntansi Ekuitas
4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.4.1 Kegiatan Operasional
5.4.1.1. Pendapatan
5.4.1.2. Beban
5.4.2 Kegiatan Non Operasional
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.6 Penjelasan Pos-PosLaporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1. Ekuitas Awal
5.6.2. Surplus/Defisit-LO
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
6.2 Kepemimpinan Daerah

Bab 7 Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil maupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat. Semakin tinggi peredaran suatu produk menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional berkaitan serta berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi serta stabilitas politik dan keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi serta stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Perkembangan perekonomian suatu daerah digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit–unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah – daerah di seluruh Indonesia.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan selama tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang positif dan dinamis. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku serta laju inflasi. Berdasarkan indikator ekonomi makro tahun 2020-2024, prospek perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan Angka PDRB (ADHB dan ADHK) perkapita, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan selama tahun 2020-2024. Angka-angka tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan target ekonomi makro daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada 2025.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkiraan kondisi ekonomi daerah pada tahun 2025 akan mengalami perbaikan sebagai akibat dari bergeraknya mata-rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan berjalannya kegiatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024
Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Kabupaten Konawe Kepulauan			
2020	1.398,58	1.046,99	-0,63
2021	1.467,82	1.071,11	2,30
2022	1.579,45	1.105,75	3,23
2023*	1.717,40	1.136,61	2,79
2024**	1.972,34	1.217,96	7,16
II. Provinsi Sulawesi Tenggara			
2020	130.107,27	93.446	-0,65
2021	139.476,77	97.276	4,10
2022	158.800,27	102.657	5,53
2023*	176.179,90	108.153	5,35
2024**	189.481,75	113.990	5,40

*Catatan : * Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS
Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2025, BPS

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2024 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan ekonomi senilai 7,16 persen dibandingkan tahun 2023 senilai 2,79 persen. Angka ini berada diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama yaitu senilai 5,40 persen. Perkembangan perekonomian dan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya). Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor dan subsektor. Selain itu data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

A. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Berdasarkan tabel 2.1, PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19* serta menurunnya produksi beberapa komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan kembali pulih melalui peningkatan konsumsi akhir pelaku ekonomi. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Konawe Kepulauan

(Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	525,58	540,96	558,41	582,18	607,16
Konsumsi LNPRT	12,76	12,88	13,11	13,83	14,33
Konsumsi Pemerintah	304,85	314,59	320,19	351,82	366,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	333,15	355,92	353,65	367,99	368,97
Perubahan Inventori	0,39	0,77	0,93	28,67	21,78
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 129,55	- 154,02	- 140,55	-207,71	-161,03
PDRB	**1.046,99**	**1.071,11**	**1.105,74**	**1.136,78**	**1.217,96**

*Catatan : * Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Konawe Kepulauan berturut-turut, yakni 1.046,99 miliar rupiah (2020); 1.071,11 miliar rupiah (2021); 1.105,74 miliar rupiah (2022); 1.136,78 miliar (2023); dan 1.217,96 miliar rupiah. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat secara bertahap di tahun 2021 sampai dengan 2023 dimana pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi *Covid-19*. Pemulihan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan berdampak pada pola konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, PMTB serta ekspor dan impor barang dan jasa.

B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB nominal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan kemampuan Kabupaten Konawe Kepulauan memanfaatkan sumber daya ekonominya. Dari sisi pengeluaran, PDRB ADHB menggambarkan total penggunaan seluruh konsumen akhir barang dan jasa yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2024, Kabupaten Konawe Kepulauan menciptakan nilai PDRB sebesar 1,00 persen terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada berikut ini :

Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Konawe Kepulauan

(Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	743,16	781,51	847,57	925,60	983,33
Konsumsi LNPRT	16,97	17,59	18,69	20,62	21,87
Konsumsi Pemerintah	440,64	462,39	475,93	529,41	557,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	437,95	481,70	508,33	545,95	551,61
Perubahan Inventori	0,59	1,19	1,49	46,35	36,68
Net Ekspor Barang dan Jasa	-240,72	-276,57	-272,55	-350,53	-180,73
PDRB	**1.398,58**	**1.467,82**	**1.579,45**	**1.717,40**	**1.972,34**

*Catatan : * Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku yakni sebesar 1.398,58 miliar rupiah (2020); 1.467,82 miliar rupiah (2021); 1.579,45 miliar rupiah (2022); 1.717,40 miliar rupiah (2023); dan 1.972,34 miliar rupiah (2024). Selama kurun waktu 2020-2024, rata-rata PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga berlaku sebesar 1.627,12 miliar rupiah. Peningkatan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan dari sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Selain nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di suatu daerah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya penurunan inflasi yang secara menyeluruh di beberapa daerah termasuk Kabupaten Konawe Kepulauan. Laju pertumbuhan PDRB Konawe Kepulauan mencapai 7,16 persen pada tahun 2024, angka tersebut naik dari angka 2.79 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat sebesar 4.37 persen 2024, berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 0,44 persen dari tahun 2022.

Tiga kategori dengan pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,65 persen); kemudian dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (6,49 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,39 persen). Disamping itu tiga kategori dengan penurunan/perlambatan pertumbuhan tertinggi dihasilkan dari sektor Konstruksi

(-0,94 persen); kemudian disusul Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (-0,59 persen) dan Pengadaan Listrik dan Gas (1,45 persen). Menurunnya produksi menjadi faktor penyebab turun dan melambatnya pertumbuhan ekonomi kategori tersebut. Laju pertumbuhan rill PDRB menurut lapangan usaha (persen) periode 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Konawe Kepulauan

(Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022*	2023**	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,06	-0,01	3,39	4,20	6,49
Pertambangan dan Penggalian	-0,84	1,24	3,68	-3,26	5,32
Industri Pengolahan	-2,17	8,64	1,34	-5,92	3,92
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,33	3,46	4,00	5,79	1,45
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,46	-0,54	0,04	4,23	-0,59
Konstruksi	-0,03	10,78	-1,17	0,43	-0,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,15	9,89	4,38	2,68	6,39
Transportasi dan Pergudangan	-2,11	0,67	2,08	6,83	5,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	2,45	3,27	5,16	3,70
Informasi dan Komunikasi	6,81	8,02	4,33	5,61	3,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,75	7,51	3,23	6,52	1,99
Real Estat	3,59	0,67	2,22	2,96	5,87
Jasa Perusahaan	4,42	-1,24	1,50	5,34	5,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,67	-0,04	3,59	3,69	18,65
Jasa Pendidikan	7,02	5,32	3,68	3,92	4,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17	9,28	7,07	8,52	3,48
Jasa Lainnya	3,59	-2,31	3,04	3,28	6,23
Produk Domestik Regional Bruto	**-0,63**	**2,30**	**3,23**	**2,79**	**7,16**

*Catatan : * Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS

2.1.2 PDRB Per Kapita

Produk domestik regional bruto per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi

penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Nilai PDRB per kapita menggambarkan kinerja perekonomian disuatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB per kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomi setiap penduduk secara riil. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Konawe Kepulauan

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40	1.972,34
- Atas Dasar Harga Konstan	1.046,99	1.071,11	1.105,75	1.136,61	1.217,96
PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku	37,900	39,027	41,227	44,040	49,696
- Atas Dasar Harga Konstan	28,372	28,479	28,862	29,147	30,688
Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010)	**-0,63**	**2,30**	**3,23**	**2,79**	**7,16**
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)	**-11,11**	**0,38**	**1,34**	**0,99**	**5,29**
Jumlah Penduduk (orang)	**36.902**	**37.639**	**38.383**	**41.520**	**43.545**

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS
Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2025, BPS

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan positif selama tahun 2020-2024, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Peningkatan PDRB per kapita menjadi indikator yang paling kasar untuk menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2024 tercatat PDRB per kapita ADHB Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 49,696 ribu rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK sebesar 30,688 ribu rupiah atau meningkat 5,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita ini diikuti oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di kisaran 2 persen. Indikator ini juga menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di tahun 2024. Meningkatnya daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan antar wilayah serta naiknya investasi berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Konawe Kepulauan.

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan pollitik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Konawe Kepulauan. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melaui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinan.

Secara umum garis kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp335.414/kapita/bulan, kemudian pada tahun 2021 meningkat mencapai Rp347.332/kapita/bulan, dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan terus naik hingga pada tahun 2024 mencapai Rp415.880/kapita/bulan.

Berdasarkan data BPS dalam kurung lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 17,01 persen dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 17,81 persen, kemudian ditahun 2022 mengalami penurunan sebesar 16,15 persen selanjutnya tahun 2023 turun menjadi sebesar 15,90 persen, dan pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan kembali mengalami penurunan sebesar 16,01 persen dari jumlah penduduk Konawe Kepulauan. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tabel berikut juga disajikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2. 6

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
2020	335.414,00	17,01	2,56	0,60
2021	347.332,00	17,81	4,05	1,21
2022	370.682,00	16,15	3,09	0,90
2023	393.000,00	15,90	2,79	0,73
2024	415.880,00	15,54	2,78	0,76

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024, BPS

Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan rata-rata nasional. Sehingga dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang hal ini masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka menekan angka kemiskinan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan yang memadai sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lancar.

Pada tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 2,78 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 2,79. Data ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang baik.

Sedangkan dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 adalah 0,73 persen sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 0,76 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa masih terdapat ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Kepulauan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah sebesar 1,51 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 1,59. Jika dibandingkan TPT Kabupaten Konawe Kepulauan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,09 persen dan Nasional yang sebesar 4,91 persen.

Secara matematis, TPT dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran pada tahun berkenan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun berkenan. Angka TPT yang tinggi merupakan gambaran terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, hal sebaliknya apabila angka TPT rendah berarti banyak angkatan kerja yang terserap.

Secara umum, lapangan pekerjaan mengikuti pertumbuhan ekonomi atau PDRB. PDRB Konawe Kepulauan yang didominasi dengan lapangan usaha pertanian dan perikanan menjadikan sektor ini merupakan lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Rp1.717,40 miliar rupiah tahun 2023, meningkat menjadi Rp 1.972,34 miliar rupiah di tahun 2024.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu pengukuran pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Sebelum lebih jauh, patut diingatkan bahwa upaya pembangunan manusia adalah upaya yang tidak bisa seketika diharapkan hasilnya. Sebab investasi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang ditanam sekarang, baru bisa diharapkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pada prinsipnya IPM adalah alat monitoring jangka panjang.

Secara umum, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat dari 67,32 poin di tahun 2023 menjadi 68,77 poin di tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 poin atau tumbuh sebesar 2,15 persen jika dibandingkan tahun 2023. Saat ini, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada level sedang. Terjadi peningkatan angka pada beberapa indikator IPM di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat ke-14 IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, peningkatan ini selaras dengan peningkatan IPM di seluruh kabupaten secara umum.

Tabel 2. 7

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2020	65,41
2021	65,73
2022	66,69
2023	67,32
2024	68,77

Sumber : Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025, BPS

2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi tersebut identik dengan perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan serta nilai absolut PDRB yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu daerah). Terkait dari pengertian ini disebutkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Adapun nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar Rp1.217,96 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar Rp1.105,75 miliar. Disisi lain, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 7,16 persen mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 2,79 persen. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dihasilkan oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (18,65 persen); kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (6,49 persen). Sedangkan kategori dengan penurunan/perlambatan pertumbuhan tertinggi dihasilkan dari sektor Konstruksi (-0,94 persen); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (-0,59 persen), meskipun pertumbuhan pada kategori tersebut mengalami kondisi kurang stabil (berfluktuasi) pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024.

2.1.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengatur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi ringan (*creeping inflasion*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi sedang *(Galloping Inflasion*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi. Dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-10% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar besaran dan mencapai lebih dari 100 persen setahun.

Untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, laju inflasi masih mengikuti inflasi Kota Kendari. Perhitungan rutin nilai inflasi di Indonesia hanya dilaksanakan pada wilayah administrasi kota, sedangkan nilai inflasi wilayah administrasi kabupaten akan mengikuti nilai inflasi wilayah administrasi kota terdekatnya oleh sebab itu nilai inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan mengikuti nilai inflasi pada Kota Kendari. Selain itu, penyediaan bahan-bahan baku di Kabupaten Konawe Kepulauan masih bergantung pada Kota Kendari dan banyak upah/gaji pegawai negeri dan swasta yang dibelanjakan pada kota tersebut.

Laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya masih mengalami fluktuatif angka akibat pengaruh laju inflasi pada Kota Kendari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2025, laju inflasi sebesar 0,06 persen. Nilai inflasi ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa mengalami penurunan. Komoditas yang berperan besar dalam sumbangan inflasi yang terjadi ini antara lain emas perhiasan, beras, rokok/tembakau, pendidikan, barang pecah belah, peralatan, dan kendaraan.

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi dalam setahun terakhir (2024-2025) yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,29 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,63 persen; kelompok transportasi sebesar 0,85 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,33 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,49 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,11 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,09 persen. Sementara itu terdapat komoditas yang memberikan sumbangan deflasi dalam setahun terakhir yaitu pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 6,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 15,48 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa sebesar 0,41 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga

diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kategori belanja ke daerah sebagai transfer ke daerah, dalam bentuk pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan di sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan dasar untuk menilai pencapaian kinerja, dengan demikian kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 antara lain :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan pendapatan berdasarkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
3. Melakukan koordinasi secara sinergis terkait dengan pendapatan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan *hard budget constraint* yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow function.*

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi

dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (*Self Financing*) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi stagnan.

Dengan demikian secara umum kebijakan peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan pendapatan daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang demikian pada tahun 2024 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dimana sebagian besar potensinya berbasis sektor primer primer dengan cara mengoptimalisasi penggunaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Secara umum arah kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasionalisasi dalam penetapan target pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Domestik Regional Bruto. Untuk mencapai hal tersebut Pertama dilakukan Intensifikasi meliputi peningkatan pelayanan pajak, pembinaan sumber daya manusia dan administrasi, peningkatan warga binaan, sosialisasi perpajakan, dan koordinasi lintas pemda/sektor/OPD. Kedua dilakukan Ekstensifikasi dengan pemberlakuan Perda, pengembangan jenis dan obyek pajak
3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan dan aset daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan yang Sah. Dana Perimbangan merupakan dana transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum,

karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;

2. Melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD, Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dibentuklah Satgas P2DD dengan tujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD yang terdiri dari elektronifikasi transaksi pendapatan daerah berupa transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan tata kelola keuangan. Bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Dalam upaya pengimplementasian Peraturan Pemerintah dan mendukung upaya digitalisasi daerah maka perlu di lakukan kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk dapat mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP dalam hal ini bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran salah satunya berupa pembayaran non tunai baik berbasis kartu maupun server yang dapat menyediakan kanal pembayaran non tunai guna memproses instrumen pembayaran non tunai dalam trnsaksi pembayaran. Kanal pembayaran non tunai meliputi Teller, mobile dan internet banking, *Automated Teller Machine (ATM), Short Message Service Banking (SMS-Banking), Electronic Data Captured (EDC), Mobile Point Of Sale (M-POS), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),* dan/atau Kanal Pembayaran Nontunai lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian melakukan kerjasama pada penyedia jasa yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) tentang Kerjasama Layanan Penerimaan Pembayaran Secara Elektronik. PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses (PLUS) merupakan perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank yang berizin Bank Indonesia Kategori II sebagai Payment Gateway dan Dompet Elektronik dengan No.23/675/DKSP/Srt/B yang terhubung dengan Bank-bank nasional, institusi finansial, dan gerai-gerai pembayaran lainnya sebagai penyedia kanal penerimaan pembayaran. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk percepatan dan peningkatan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi non tunai sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan lainya, selain itu kerjasama ini juga bertujuan untuk membangun kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan memberikan multiplier effect bagi seluruh pihak yang terkait sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses dan PT. Mitra Pembayaran Elektronik tentang Digitalisasi layanan sistem pembayaran secara non tunai dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai penyedia jasa untuk Pajak maupun Retribusi Daerah yang berada dibawah pengawasan Bank Indonesia. Semua transaksi Pajak dan Retribusi yang menggunakan QRIS dapat di akses di Aplikasi yang disediakan oleh PT. Lintas Usaha Sukses yaitu Ependa dan Espay-pos. Ependa adalah aplikasi QRIS yang di gunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk Pembayaran Retribusi yang sifatnya tidak berubah-rubah atau yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Aplikasi tersebut digunakan untuk menginput jenis retribusi yang dipungutkan serta mengakses laporan transaksi yang dapat di gunakan untuk keperluan rekonsiliasi, sedangkan Espay-Pos adalah aplikasi QRIS yang di gunakan untuk Pajak maupun Retribusi Daerah yang nilainya tidak tetap. Pada pelaksanaanya QRIS tersebut digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memungut Pajak dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam perencanaan pendapatan daerah pada prinsipnya juga tetap mengacu pada kebijakan APBD Perubahan Tahun 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Perhitungan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
b. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2024.
c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
e. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
f. SiLPA Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
g. Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023.

B. Kebijakan Pendapatan Reguler

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah

sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi daerah :

   (a) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

   (c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

   (d) Untuk mendukung Program Pemerintah dalam Transaksi Elektronik pemda Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis jaringan yang bertujuan meningkatkan Tata Kelola Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih transparan serta memudahkan wajib pajak membayarkan kewajibannya dengan melakukan Perjanjian MoU terkait Digitalisasi Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2022.

   (e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   (f) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

   (g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian

Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Darah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

(h) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(k) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan program strategis nasional berpedoman yang pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kebijakan Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

(a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang penganggarannya memperhatikan potensi penerimaan tahun anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah

(b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(3) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

(a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(b) Hasil kerja sama daerah;

(c) Jasa giro;

(d) Pendapatan bunga;

(e) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

(f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(g) Pendapatan denda pajak daerah;

(h) Pendapatan denda retribusi daerah;

(i) Pendapatan dari pengembalian;

(j) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;dan

(k) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan.

b) Pendapatan Transfer

Kebijakan penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Penganggaran Transfer Pusat meliputi Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

(a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.

(b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

(c) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya yang dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

(d) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024.

(e) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

2. Penganggaran Tranfer Pusat meliputi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil (DBH)-Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

(a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan.

(b) DBH-SDA Kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

(c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan

(d) Penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan tersebut serta didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

(e) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Tranfer Pusat Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

4. Penganggaran Tranfer Pusat Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024 dan apabila setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

(a) DAK Fisik

(1) Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

i) Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

- Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) Bidang Perumahan dan Permukiman

Kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan.

iii) Bidang Sanitasi

ketentuan peraturan kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang

yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Bidang Air Minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan.

v) Bidang Pertanian

kegiatan pada ketentuan peraturan bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya *(cash for work)* yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan perundang-undangan. ketentuan peraturan

(2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

(3) Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:

i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:

- Untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024;
- Untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2024 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

- Bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau
- Bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

(4) Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(b) DAK Non Fisik

(1) Penganggaran dan penggunaan DAK Non Fisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Non Fisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan yaitu :

i) Pengaanggaran Dana BOS pada bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

ii) Penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri diselenggarakan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

iii) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana Kesetaraan TA BOS/BOP PAUD/BOP 2024. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

(3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(4) Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA

2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2024.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK - Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA. 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA. 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA. 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024.

5. Penganggaran Tranfer Pusat - Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

6. Penganggaran Tranfer Pusat - Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

7. Kebijakan Penganggaran Transfer Antar Daerah meliputi :

(a) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022. Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah

provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(b) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi :

1. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan undangan. ketentuan peraturan perundangan.
2. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

C. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2024 diupayakan dapat meningkat terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah. Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, pada penyusunan KUA tahun 2024 dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2024, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2024;
b. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat serta pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;dan
c. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dimasukkan pada Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan

sesuai dengan APBD TA 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara keseluruhan target pendapatan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target Anggaran Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**15.350.000.000,00**	**17.249.032.486,00**	**1.899.032.486,00**	**12,37**
4.1.1	Pajak Daerah	3.476.000.000,00	3.640.000.000,00	164.000.000,00	4,71
4.1.2	Retribusi Daerah	1.850.000.000,00	3.340.000.000,00	1.490.000.000,00	80,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000,00	4.356.088.487,00	1.356.088.487,00	45,20
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.024.000.000,00	5.912.943.999,00	(1.111.056.001,00)	(15,81)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**555.788.124.000,00**	**626.919.157.091,00**	**71.141.033.091,00**	**12,80**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	549.182.706.000,00	607.094.396.000,00	57.911.690.000,00	10,54
4.2.2	Transfer Antar Daerah	6.595.418.000,00	19.824.761.091,00	13.229.343.091,00	200,58
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.500.000.000,00**	**2.317.974.000,00**	**(182.026.000,00)**	**(7,28)**
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Udangan	2.500.000.000,00	2.317.974.000,00	(182.026.000,00)	(7,28)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**573.628.124.000,00**	**646.486.163.577,00**	**72.858.039.577,00**	**12,70**

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024, naik sebesar Rp72.858.039.577,00 (12,70%) yaitu dari Rp573.628.124.000,00 menjadi Rp646.486.163.577,00. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp164.000.000,00 (4,71%), Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.490.000.000,00 (80,54%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp1.356.088.487,00 (45,20%) dan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp71.141.033.091,00 (12,80%).

Adapun Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.111.056.001,00 atau turun 15,81% dari target APBD murni 2024, demikian juga pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp182.026.000,00 atau turun sebesar 7,28% dari target APBD murni 2024.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.899.032.486,00 dari 15.350.000.000,00 menjadi 17.249.032.486,00 pada

APBD Perubahan atau naik sebesar 12,37% dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.9
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2023-2024

Kelompok Pendapatan	Realisasi 2023 (Rp)	Target APBD 2024-Murni (Rp)	Target APBD 2024-Perubahan (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	**16.181.312.122,00**	**15.350.000.000,00**	**17.249.032.486,00**	**1.899.032.486,00**
Hasil Pajak Daerah	4.612.262.047,00	3.476.000.000,00	3.640.000.000,00	164.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	1.568.575.658,00	1.850.000.000,00	3.340.000.000,00	1.490.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.573.523.227,00	3.000.000.000,00	4.356.088.487,00	1.356.088.487,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.426.951.190,00	7.024.000.000,00	5.912.943.999,00	(1.111.056.001,00)

b. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).

Pendapatan Transfer pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp555.778.124.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp626.919.157.091,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp71.141.033.091,00 (12,80%) dibandingkan dengan target penerimaan pada APBD Murni Tahun 2024. Peningkatan ini bersumber pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.141.033.091,00. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2023–2024

Kelompok Pendapatan	Realisasi 2023 (Rp)	Target APBD 2024-Murni (Rp)	Target APBD 2024-Perubahan (Rp)	Lebih/ (Kurang)
Pendapatan Transfer	**547.088.113.464,00**	**555.788.124.000,00**	**626.919.157.091,00**	**71.141.033.091,00**
Transfer Pemerintah Pusat	524.792.355.521,00	549.192.706.000,00	607.094.396.000,00	57.911.690.000,00
Transfer Antar Daerah	22.295.757.943,00	6.595.418.000,00	19.824.761.091,00	13.229.343.091,00

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selain hal tersebut, alokasi Anggaran untuk setiap program kegiatan didasarkan pada prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 – 2026 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, dapat juga dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan.

Peningkatan target kinerja pada tahun 2024, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya *coverage* (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Kesinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreativitas akan tetapi merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program- program startegis.

Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subjek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024, antara lain adalah :

a. Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBD sebagaimana diamanatakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan.
b. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas dan di RSUD.
c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perubahan kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan untuk :

a. Penyesuaian belanja pegawai sesuai kebutuhan gaji dan tunjangan di masing-masing OPD;
b. Penambahan belanja infrastruktur, pertanian, perindustrian dan kelautan berdasarkan aspirasi masyarakat;
c. Pemenuhan sarana prasarana kerja secara bertahap di beberapa OPD;
d. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
e. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP); dan
f. Penyesuaian Belanja Bantuan Operasional Kesehatan.

Belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2024 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan, ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2024.

Total belanja pada APBD perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 mengalami kenaikan, dari target awal sebesar Rp585.128.124.000 menjadi Rp706.370.894.989,00 atau kenaikannya sebesar Rp121.242.770.989,00 atau naik sebesar 20,72%, secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11

Target Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

Kode Rek.	Uraian	Target Belanja Daerah (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah (+/-)	%
5.1	**Belanja Operasi**	**327.461.228.198,00**	**389.285.857.099,00**	**61.824.628.901,00**	**18,87**
5.1.01	Belanja Pegawai	133.899.633.257,00	153.100.700.515,00	19.200.867.258,00	14,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.235.935.941,00	201.635.236.744,00	40.399.300.803,00	25,05
5.1.05	Belanja Hibah	29.550.500.000,00	30.246.300.000,00	695.800.000,00	2,35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.774.959.000,00	4.303.619.840,00	1.528.660.840,00	55,08
5.2	**Belanja Modal**	**156.181.489.502,00**	**212.468.226.590,00**	**56.286.737.088,00**	**36,03**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	442.562.400	1.993.537.400,00	1.550.975.000,00	350,45
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.368.868.249,00	34.426.116.413,00	8.057.248.164,00	30,55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.901.743.753,00	97.827.899.937,00	13.926.156.184,00	16,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.351.955.100,00	65.600.987.940,00	26.249.032.840,00	66,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.882.510.000,00	4.565.834.900,00	2.683.324.900,00	142,53
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.233.850.000,00	8.053.850.000,00	3.820.000.000,00	90,22
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**50,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00
5.4	**Belanja Transfer**	**100.485.406.300,00**	**103.116.811.300,00**	**2.631.405.000,00**	**2,61**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.485.406.300,00	103.116.811.300,00	2.631.405.000,00	2,61
	Jumlah Belanja	**585.128.124.000,00**	**706.370.894.989,00**	**121.242.770.989,00**	**20,72**

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp327.461.228.198,00 sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp389.285.857.099,00 mengalami peningkatan sebesar Rp61.824.628.901,00 atau naik sebesar 18,87%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya :

- Peningkatan pada belanja pegawai sebesar Rp19.200.867.258,00;
- Peningkatan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp40.399.300.803,00;
- Peningkatan pada belanja hibah sebesar Rp695.800.000,00; dan
- Peningkatan pada belanja bantuan sosial sebesar Rp1.528.660.840,00.

1. Belanja Pegawai

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024,

dinyatakan bahwa Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. maka penyediaan alokasi dana dalam APBD Perubahan TA 2024 untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara kumulatif direncanakan sebesar Rp153.100.700.515,00 mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp133.899.833.257,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diperuntukkan untuk pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas dipakai dan persediaan barang. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pada APBD Perubahan 2024 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar Rp201.635.236.744,00 meningkat dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp161.235.935.941,00.

3. Belanja Hibah

Pada APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 direncanakan pos Belanja Hibah sebesar Rp30.246.300.000,00 mengalami peningkatan dari target awal pada APBD Reguler sebesar Rp29.550.500.000,00 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup pemerintah dan semi pemerintah, yakni Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

4. Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. menyangkut Belanja Bantuan Sosial, penganggarannya akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 ditujukan untuk kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Mengingat komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tetap mendukung organisasi maupun kelompok masyarakat terutama yang turut berperan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka alokasi dana untuk Belanja Bantuan Sosial APBD Tahun Anggaran 2024 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp4.303.619.840,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada APBD Reguler sebesar Rp2.774.959.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal

ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp56.286.737.088,00 atau 36,03% yaitu dari Rp156.181.489.502,00 setelah perubahan menjadi Rp212.468.226.590,00. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pada seluruh komponen belanja modal yang terdiri dari :

- Belanja Modal Tanah naik sebesar Rp1.550.975.000,00.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp8.057.248.164,00.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp13.926.156.184,00.
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi naik sebesar Rp26.249.032.840,00.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya naik sebesar Rp2.683.324.900,00.
- Belanja Modal Aset Lainnya naik sebesar Rp3.820.000.000,00.

1. Belanja Modal Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.993.537.400,00 meningkat signifikan 350,45% dibandingkan pada APBD Reguler sebesar Rp442.562.400,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.368.868.249,00 namun pada APBD Perubahan naik menjadi Rp34.426.116.413,00 atau 30,55%.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Bangunan dan Gedung APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp97.827.899.937,00 lebih tinggi dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp83.901.743.753,00.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup seluruh jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.600.987.940,00 meningkat sebesar 66,70% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp39.351.955.100,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap pakai. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.565.834.900,00 meningkat sebesar 142,53% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp1.882.510.000,00.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memnuhi definisi asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Modal Aset Lainnya APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.053.850.000,00 meningkat sebesar 90,22% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp4.233.850.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat yang mungkin terjadi termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan akan terulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta bencana penyakit yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 jumlah Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 meningkat sebesar 50,00% dibandingkan APBD Reguler sebesar Rp1.000.000.000,00.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada Perubahan APBD Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.631.405.000,00 atau 2,61% dari target pada APBD reguler sebesar Rp100.485.406.300,00 setelah perubahan menjadi Rp103.116.811.300,00. Kenaikan ini berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Secara rinci uraian Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan Daerah	573.628.124.000,00	646.486.163.577,00	72.858.039.577,00	12,70

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	15.350.000.000,00	17.249.032.486,00	1.899.032.486,00	12,37
4.2	Pendapatan Transfer	555.778.124.000,00	626.919.157.091,00	71.141.033.091,00	12,80
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.500.000.000,00	2.317.974.000,00	(182.026.000,00)	(7,28)
5	**Belanja Daerah**	**585.128.124.000,00**	**706.370.894.989,00**	**121.242.770.989,00**	**20,72**
5.1	Belanja Operasi	327.461.228.198,00	389.285.857.099,00	61.824.628.901,00	18,87
5.2	Belanja Modal	156.181.489.502,00	212.468.226.590,00	56.286.737.088,00	36,03
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00
5.4	Belanja Transfer	100.485.406.300,00	103.116.611.300,00	2.631.405.000,00	2,61
SURPLUS / (DEFISIT)		**(11.500.000.000)**	**(59.884.731.412,00)**	**(48.384.731.412,00)**	**420,73**

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rencana penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi. Dari perhitungan pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp646.486.163.577,00 dikurangi dengan belanja daerah sebesar Rp706.370.894.989,00, maka anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengalami defisit sebesar (Rp59.884.731.412,00). Dalam hal perubahan APBD mengalami defisit, maka ditutup melalui kebijakan Pembiayaan Daerah.

B. Kebijakan Belanja Wajib

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran Pembangunan. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan prinsip dan kebijakan umum terkait Belanja Wajib yang harus dianggarkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

a. Belanja Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan secara konsisten dan berkesinambungan telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sebesar 20,01% dari total belanja daerah sebesar Rp706.370.894.989,00 pada tahun 2024 sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Pemerintah Daerah wajib

mengalokasikan paling sedikit 20% anggaran berdasarkan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Alokasi anggaran Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	**a. Urusan Bidang Pendidikan:**	**109.920.824.656,00**
	1) Belanja Operasi	82.230.140.119,00
	a) Belanja Pegawai	60.424.214.729,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	19.800.585.390,00
	c) Belanja Hibah	1.985.340.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00
	2) Belanja Modal	27.690.684.537,00
	3) Belanja Transfer	0,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	**4.331.924.565,00**
	1) Belanja Operasi	1.550.524.565,00
	a) Belanja Pegawai	0,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.550.524.565,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	2.781.400.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	**6.450.383.591,00**
	1) Belanja Operasi	3.378.683.591,00
	a) Belanja Pegawai	1.289.875.956,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	2.088.807.635,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	3.071.700.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	**3.943.776.854,00**
	1) Belanja Operasi	3.230.335.704,00
	a) Belanja Pegawai	1.002.990.000,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.627.345.704,00
	c) Belanja Hibah	600.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	713.441.150,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	**16.709.649.642,00**
	1) Belanja Transfer:	**0,00**
	a) Belanja bantuan keuangan...	0,00
	2) Bagian Kesejahteraan Rakyat	6.030.513.870,00
	3) Dinas Sosial	700.000.000,00
	4) Dinas Lingkungan Hidup	200.000.392,00
	5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.484.600,00
	6) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.826.000,00
	7) Dinas Perikanan	2.338.566.430,00
	8) Dinas Pertanian	357.332.070,00
	9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	874.683.280,00
	10) Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	130.000.000,00
	11) Dinas Kesehatan	179.397.300,00
	12) Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi	607.876.400,00
	13) Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.492.025.000,00
	14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	430.199.920,00
	15) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.278.074.700,00
	16) Badan Keuangan Daerah	424.250.000,00
	17) Dinas Pariwisata	146.460.200,00
	18) Inpektorat Daerah	226.350.000,00
	19) Sekretariat DPRD	155.609.480,00
	20) Bagian Hukum	50.000.000,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	**141.366.559.308,00**
3.	Total Belanja Daerah	**706.370.894.989,00**
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	**20,01%**

b. Belanja Fungsi Kesehatan

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengalokasikan anggaran sebesar 18,20% dari total belanja daerah sebesar Rp706.370.894.989,00 yang diperuntukkan untuk membiayai belanja yang menjadi skala prioritas bidang kesehatan sebagai *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yaitu paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Alokasi anggaran kesehatan tersebut diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 selain itu alokasi anggaran tersebut juga diarahkan guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

1) Penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
2) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
3) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
5) Penguatan jejaring layanan primer;
6) Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit;
7) Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda); dan
8) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Adapun Alokasi anggaran Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	128.579.352.574,00
	1) Belanja Operasi	69.340.328.812,00
	a) Belanja Pegawai	30.680.902.398,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	38.558.376.414,00
	c) Belanja Hibah	101.050.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	59.239.023.762,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	0,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	128.579.352.574,00
3.	Total Belanja Daerah	706.370.894.989,00
4.	Total Belanja Pegawai	153.100.700.515,00
5.	Total Belanja Daerah Diluar Belanja Pegawai	553.270.194.474,00
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	18,20%

b. Belanja Fungsi Pengawasan

Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar 1,04% yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dalam APBD sebesar Rp706.370.894.989,00 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 bahwa Pemerintah wajib menaglokasikan anggaran untuk mendanai program, kegiatan, sub kegiatan pengawasan paling sedikit sebesar I,00% (satu persen) dari total belanja daerah dalam APBD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan
2) Peningkatan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan

teknis

3) Sarana dan prasarana pengawasan

Alokasi anggaran Fungsi Pengawasan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Inspektorat Daerah	7.311.373.913,00
	1) Belanja Operasi	6.718.900.513,00
	a) Belanja Pegawai	1.831.271.813,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	4.887.628.700,00
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	592.473.400,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang pengawasan yang menunjang Pengawasan, antara lain:	0,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan	7.311.373.913,00
3.	Total Belanja Daerah	706.370.894.989,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan Terhadap Belanja Daerah	1,04%

c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 60,64% dari total Belanja Daerah sebesar Rp706.370.894.989,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Total Belanja Daerah	706.370.894.989,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) Belanja Bagi Hasil	0,00
	b) Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00
2.	Jumlah (a+b)	103.116.811.300,00
3.	Selisih (1-2)	603.254.083.689,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	241.301.633.475,60

Tabel 2.17
Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	a) Belanja Modal	212.468.226.590,00
	1. Tanah	1.993.537.400,00
	2. Peralatan dan Mesin	34.426.116.413,00
	3. Bangunan dan Gedung	97.827.899.937,00
	4. Jalan, jaringan dan irigasi	65.600.987.940,00
	5. Aset Tetap Lainnya	4.565.834.900,00
	6. Aset Lainnya	8.053.850.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	15.681.044.041,00
	c) Belanja Hibah	30.246.300.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	4.303.619.840,00
	e) Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (a+b+c+d+e)	365.816.001.771,00

d. Alokasi Dana Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar Rp65.912.626.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp37.204.185.300,00 untuk pemerintah desa dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa. Dana Desa bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp65.912.626.000,00 sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp37.204.185.300,00 bersumber dari 10% (sepuluh persen) Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp330.150.530.000,00 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41.891.323.000,00 berdasarkan Transfer ke Daerah yang alokasikan dalam APBN TA 2024 tidak termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dari uraian tersebut, alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp103.116.811.300,00 yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp65.912.626.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp37.204.185.300,00. Rincian Belanja Tranfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Alokasi Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*10%
1.	Total Dana Perimbangan (Tidak termasuk DAK fisik dan DAK Non Fisik)		
	a) Dana Alokasi Umum	330.150.530.000,00	33.015.053.000,00

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah (Rp)
	b) Dana Bagi Hasil	41.891.323.000,00	4.189.132.300,00
2.	**Minimal Alokasi Dana Desa**		**37.204.185.300,00**
3.	**Anggaran Alokasi Dana Desa APBD 2024**		**37.204.185.300,00**

Tabel 2.19
Belanja Bantuan Keuangan

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Anggaran (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	**Dana Desa**	**65.912.626.000,00**
	a) Transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat	65.912.626.000,00
2.	**Alokasi Dana Desa (a+b)**	**37.204.185.300,00**
	a) 10% dari Dana Alokasi Umum	33.015.053.000,00
	b) 10% Dana Bagi Hasil	4.189.132.300,00
3.	**Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2024 (1+2)**	**103.116.811.300,00**

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal sisa lebih perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi APBD 2024. Di samping itu, Pembiayaan daerah diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman yang merupakan kewajiban daerah, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman daerah. Selanjutnya mengenai pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2024 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak menggangu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SiLPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan
4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi, pembayaran pokok utang.

Adapun kebijakan dan strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kebijakan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan dan Strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00. Adapun SiLPA pada Perubahan APBD tahun 2024 akan digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program prioritas daerah pada Perubahan APBD tahun 2024 dimana penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

(1) Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2024 dan harus dianggarkan kembali;

(2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah ditahun anggaran 2024; dan

(3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2024 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan.

Adapun Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

Kode	Uraian	Target APBD 2024 – Reguler	Target APBD 2024 - Perubahan	Lebih / (Kurang)	%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**11.500.000.000,00**	**59.884.731.412,00**	**48.384.731.412,00**	**420,73**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.500.000.000,00	59.884.731.412,00	48.384.731.412,00	420,73
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**11.500.000.000,00**	**59.884.731.412,00**	**48.384.731.412,00**	420,73

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya kondisi surplus atau defisit pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 di dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 188/91/BA-DPRD/XI/2023, tanggal 22 November 2023 telah dilakukan penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan dan sejalan dengan perubahan – perubahan asumsi, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 188/12/BA-DPRD/VIII/2024 dan Nomor 900.1.1/17/BA/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.21

APBD Reguler dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Reguler	APBD Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	15.350.000.000,00	17.249.032.486,00	1.899.032.486,00	12,37
Pendapatan Transfer	555.778.124.000,00	626.919.157.091,00	71.141.033.091,00	12,80

Uraian	APBD Reguler	APBD Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	2.500.000.000,00	2.317.974.000	(182.026.000,00)	(7,28)
Jumlah Pendapatan	**573.628.124.000,00**	**646.486.163.577,00**	**72.858.039.577,00**	**12,70**
Belanja				
Belanja Operasi	327.461.228.198,00	389.285.857.099,00	61.824.628.901,00	18,87
Belanja Modal	156.181.489.502,00	212.468.226.590,00	56.286.737.088	36,03
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00
Belanja Transfer	100.485.406.300,00	103.116.811.300,00	2.631.405.000,00	2.61
Jumlah Belanja	**585.128.124.000,00**	**706.370.894.989,00**	**121.242.770.989,00**	**20,72**
Surplus (Defisit)	**(11.500.000.000,00)**	**(59.884.731.412,00)**	**(48.384.731.412,00)**	**420,73**
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	11.500.000.000,00	59.884.731.412,00	48.384.731.412,00	420.73
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Bersih	**11.500.000.000,00**	**59.884.731.412,00**	**48.384.731.412,00**	**420,73**
SiLPA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memegang peranan penting dalam penerimaan PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor ini dibutuhkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah secara optimal dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.

Pada APBD Perubahan tahun 2024 total pendapatan ditargetkan sebesar Rp646.486.163.577,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,70% dari target Pendapatan APBD Reguler tahun 2024 sebesar Rp573.628.124.000,00. Target PAD sebesar Rp17.249.032.486,00 atau mengalami peningkatan sebesar 12,37% dari APBD Reguler Tahun 2024 sebesar Rp15.350.000.000,00. Pendapatan Transfer Pusat di proyeksi sebesar Rp607.094.396.000,00 mengalami peningkatan sebesar 10,54% dari APBD Reguler tahun 2024 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 pada APBD Reguler turun 7,28% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.317.974.000,00.

2.3.2 Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi Pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian". Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar *(Primary Health Care)* dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Mengentaskan kemiskinan; dan
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan
f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; dan
e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

a. Konsolidasi demokrasi;
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%;
b. Inflasi sebesar 2,7%;
c. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
d. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54; dan
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6– 4,3%.

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* yang telah menimbulkan dampak yang besar pada berbagai sendi kehidupan serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, sehingga menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD, dengan makna lain adalah penyempurnaan fokus-fokus pembangunan tahun sebelumnya dan juga perbaikan penanganan masalah-masalah yang terjadi dan masih akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun system perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan system ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam, disamping itu penyelesaiaan jalan lingkar masih menjadi prioritas utama sebagai wujud dalam membuka isolasi wilayah. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fokus lain pada tahun ini guna mengimbangi kemajuan pembangunan fisik.

Tema pembangunan tahun 2024 sebagai upaya merespon dinamika pembangunan

adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Optimalisasi Sektor-Sektor Penerimaan Daerah". Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Dasar dan Koneksitas Antar Wilayah.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Peningkatan/ Pembangunan Sektor-Sektor Perekonomian.
4. Revitalisasi Sektor-Sektor Potensi Penerimaan Daerah.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan prioritas Pembangunan daerah tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kebijakan Umum Anggaran sebelum perubahan mengacu kepada RPJPN 2025 dan RPJMN 2019-2024 serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 - 2026, maka visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 sebagai berikut:

A. Visi

"MENUJU WAWONII BANGKIT DALAM BINGKAI LINGKARAN HATI EMAS TAHUN 2026"

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum. Adapun makna yang terkandung didalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Wawonii Bangkit

Kriteria pokok visi ini adalah pada prinsipnya sebuah frase atau Akronim dari kata Wawonii berkembang, Wawonii kompetitif dan Wawonii tangguh.

- Berkembang dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki peradaban dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding dengan kondisi di masa lalu dan di hari ini.
- Kompetitif dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki daya saing dan karenanya mampu *exist* dalam kancah kompetisi lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.
- Tangguh dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai dinamika perubahan internal dan eksternal sebagai dampak dari pengaruh globalisasi, seperti namun tidak terbatas fenomena revolusi industri 4.0.

Selanjutnya Wawonii Bangkit digambarkan oleh:

- Kemudahan mendapatkan akses pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan yang selanjutnya disebut Wawonii Cerdas;
- Kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta seluruh masyarakat Wawonii sudah memiliki jaminan atas resiko pembiayaan kesehatannya selanjutnya disebut Wawonii Sehat;

- Semua aktivitas sektor perekonomian diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas perekonomian yang disebut Wawonii Produktif;
- Pelestarian budaya dan beberapa situs bersejarah serta mendukung kepariwisataan daerah yang disebut Wawonii Berbudaya; dan
- Kepedulian terhadap permasalahan sosial masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sosial dan kepekaaan pemerintah terhadap masalah sosial yang disebut Wawonii Peduli terhadap masalah sosial.

Bingkai Lingkaran Hati Emas

Lingkaran Hati Emas itu sendiri berasal dari komposisi akronim dari: optimalisasi infrastruktur dasar, pembangunan kawasan dan prasarana wilayah, *human resources*, teknologi informasi dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan Wawonii Bangkit, maka strategi prioritas yang digunakan adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan dan prasarana wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*), mendorong penguasaan teknologi informasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 disusunlah misi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rumusan sebagai berikut :

1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman dan prasarana wilayah;
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii
3) Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
4) Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik
5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Misi-misi ini selanjutnya akan di-operasional-kan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut. Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut :

MISI 1

Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah.

Misi ini berupaya untuk melakukan percepatan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, kelistrikan dan air bersih), kawasan pemukiman dalam bentuk penataan perumahan dan prasarana wilayah (Pelabuhan, transportasi, telekomunikasi) dalam upaya menunjang produktivitas pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya.

MISI 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wawonii.

Misi ini mendorong untuk pembentukan daya saing pembangunan SDM yang meliputi pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang budaya dan bidang akhlak.

MISI 3

Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah

Misi ini berupaya untuk penguatan dan pembangunan sektor-sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan industri termasuk industri tepat guna dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

MISI 4

Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik

Misi ini berupaya menata kualitas tata kelola pemerintahan baik sifatnya sinergitas antar komponen pemerintahan, antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa dalam upaya menciptakan kualitas pelayanan publik guna menunjang produktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

MISI 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Misi ini mengupayakan pengelolaan dan pemanfataan potensi sumberdaya alam bagi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain juga berupaya mengkonservasi dan merehabilitasi daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan serta berupaya untuk mencegah terjadinya bencana dan kepedulian yang sangat besar terhadap akibat bencana. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

C. Grand Strategi Pencapaian Keseluruhan Sasaran

Ada tiga strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai grand strategi pendekatan dalam mencapai visi-misi serta tujuan sasaran.

- **Strategi Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat.**

  Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan prioritas di lingkaran pulau Wawonii. Strategi ini akan dilaksanakan dalam dua pendekatan utama, yakni: (1) pendekatan pembangunan infrastruktur di lingkaran Pulau Wawonii; (2) pembangunan infrastruktur penunjang utama pada Kawasan pertumbuhan ekonomi; serta (3) Pendekatan pembangunan Kawasan perkotaan *Smart City* di ibukota kabupaten (Langara). Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Produktif**

- **Strategi Pembangunan yang Bertumpu pada Manusia *(People Based Development Strategy)*.**

  Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan daerah yang menempatkan dimensi masyarakat (manusia) sebagai aktor (pelaku), sekaligus sebagai objek pencapaian tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan Wawonii Bangkit. Strategi ini dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

  1) Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan.

     Menyatakan bahwa setiap aktivitas pembangunan harus dapat mengikut-sertakan masyarakat, mulai proses tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya menumbuh kembangkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam merumuskan inisiatif -inisiatif lokal, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif dan Wawonii Berbudaya.**

2) Pendekatan Gerakan Masyarakat Sipil (*civil society*).

Mengandung arti bahwa segala aktivitas pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan pergerakan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Perubahan sosial menujuk penguatan sosial kapital, memerlukan adanya upaya mendorong perubahan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku dan aturan-aturan khusus kearah peradaban masyarakat yang bersifat mendewasakan, memanusiakan, mencerdaskan, dan memberdayakan. Disamping kepedulian masalah sosial menjadi hal sangat diutamakan dalam pendekatan gerakan *civil society* dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya percepatan terwujudnya **Wawoni Produktif, Wawonii Berbudaya, Wawonii Peduli Masalah Sosial.**

- **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan (*Sustainable Resource Management Strategy*)**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjamin terwujudnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pulau Ramah Lingkungan yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Strategi ini dilakukan melalui interelasi sinergis antara tiga pendekatan utama (trilogi pendekatan) dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi SDA, yakni:

Pendekatan Ekonomi, yakni bahwa setiap aktivitas pengelolaan SDA harus mampu menjawab kepentingan/kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengelolaan SDA harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dan penciptaan nilai tambah ekonomi untutk setiap aktivita spengelolaan SDA menjadi sangat penting.

Pendekatan Sosial, yakni bahwa setiap aktivitas pengelolaan SDA harus selaras dengan sistem nilai budaya, norma-norma, prilaku, dan aturan khusus yang berlaku di tengah kelompok masyarakat dimana aktivitas pengelolaan SDA itu berlangsung. Pengelolaan SDA harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pola tingkah dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi turun temurun dan berlaku secara umum. Pengelolaan SDA harus mampu memberikan manfaat sosial (*social benefit*) kepada masyarakat sekitar.

Pendekatan Ekologis, yakni bahwa setiap aktivitas pengelolaan SDA harus dapat menjamin kelestarian lingkungan alam dan kebudayaan lokal. Keberlanjutan pembangunan bisa diwujudkan apabila tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Untuk itu pengelolaan SDA harus mampu dilakukan dengan prinsip *Good Activity Practicies* (GAP). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang lestari dapat Strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai *grand strategy* disajikan pada Gambar berikut maka sangat perlu untuk membuat sebuah *grand strategy* pembangunan untuk lebih "membumikan" program-program pembangunan daerah agar mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. *Grand strategy* ini akan menjadi "*branding*" pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang senantiasa akan menjadi tema sentral pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 tersebut akan diintegrasikan dengan strategy dan arah kebijakan pembangunan daerah agar *grand strategy* yang dirancang tersebut tidak saja hanya kuat dalam tataran retorika namun dapat terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Grand strategy yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan ke dalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan

terpilih **Ir. H. Amrullah, MT** dan **Andi Muhammad Lutfi SE., MM**, maka di rumuskanlah *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 kedalam konsep program unggulan.

"WAWONII BANGKIT"

Grand Strategy ***"WAWONII BANGKIT"*** selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan dalam 5 (lima) pilar strategi Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, dan Wawonii Peduli Masalah Sosial yang dijabarkan seperti berikut:

Gambar 2.1 Pilar Operasional Wawonii Bangkit

1) Wawonii Cerdas

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang sering ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus *(predisposing)* yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kemampuan membaca-menulis, status pendidikan, dan tingkat kepesertaan sekolah.

Kemampuan membaca dan menulis (baca-tulis) penduduk tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia Wawonii yang berkualitas, perlu akses dan mutu pelayanan pendidikan baik sifatnya formal maupun informal.

Wawonii Cerdas dilaksanakan dalam dua pendekatan yakni:

1. **Pendekatan Pendidikan Formal** meliputi pemberian bantuan biaya pendidikan, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan literasi masyarakat dalam bentuk Pojok Baca dan Perpustakaan Keliling.
2. **Pendekatan Pembinaan Mental Spiritual** adalah wujud pembinaan masyarakat Wawonii sebagai masyarakat yang religious. Pembinaan mental spiritual dilakukan melalui kegiatan pengembangan rumah santri, Gerakan ASN bersedekah dan pengembangan sekolah Da'i.

Gambar 2.2 Pendekatan dalam PelaksanaanWawonii Cerdas

2) Wawonii Sehat

Pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan daya saing suatu bangsa. Pembangunan kesehatan secara langsung memegang peranan penting terhadap produktivitas seseorang. Menyadari hal tersebut, maka dihampir semua negara dan daerah menjadikan pilar pembangunan SDM sebagai penciptaan daya saing suatu bangsa. Dalam upaya penciptaan SDM inilah pembangunan kesehatan menjadi pilar yang sangat menentukan kualitas daya saing. Pembangunan kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pembangunan kesehatan harus tetap didekatkan pada hukum permintaan dan penawaran (*supply demand*) walaupun tidak sepenuhya dapat dijelaskan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program yang bersifat sektoral selama ini, maka dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dalam arti luas, perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya *continum of care and continum of life cycle* yang melibatkan semua sektor secara terintegrasi di tingkat desa/kelurahan dengan menjadikan keluarga sebagai lokus utama pembangunan kesehatan.

Pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan merupakan upaya yang memiliki keterjaminan keberlangsungan program pembangunan kesehatan. Masyarakat harus diajak untuk terus berproses dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan kesehatan. Masyarakat lebih memahami upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang terus diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya terdapat Bab tentang Pengembangan Inovasi Daerah.

Wawonii Sehat dilaksanakan dengan 2 pilar utama yaitu: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif, dan pemberdayaan masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; serta 3) Perluasan sasaran dan *benefit* jaminan kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya. Selain komponen pelayanan kesehatan, Wawonii Sehat juga sangat tergantung pada peran pelayanan keluarga berencana, pengelolaan lingkungan hidup dan kelayakan sanitasi, dan akses air minum.

Gambar 2.3 Pilar PelaksanaanWawonii Sehat

3) Wawonii Produktif

Pengembangan produktivitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk menciptakan produktivitas berbagai upaya harus dilakukan yang meliputi pilar pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan sektor perikanan, pembangunan sektor perindustrian, pembangunan sektor perdagangan, UMKM dan Koperasi serta pembangunan sektor parawisata dan ekonomi kreatif. Disamping upaya tersebut yang merupakan *Hard Factor Function* juga perlu upaya pengembangan sistem pelayanan perijinan, regulasi investasi, pemasaran digital (*digital marketing*) serta penciptaan akses pendanaan khususnya bagi kelompok petani, nelayan dan UMKM. Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif meliputi pengembangan Industri Kelapa, pengembangan industri air mineral kemasan, pengembangan industri pengolahan pangan lokal, pengembangan keparawisataan dan ekonomi kreatif, pengembangan tanaman porang, pengembangan teknologi pengolahan jambu mete dan pengembangan industri dan budidaya perikanan, pengembangan industri pertambangan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan.

Gambar 2.4 Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif

4) Wawonii Berbudaya

Perkembangan dan keterbukaan daerah serta informasi akan berdampak terhadap pergerakan penduduk, tenaga kerja serta faktor-faktor produksi yang lain. Disisi lain, keterbukaan sistem jaringan telekomunikasi dan media juga akan banyak mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, dihampir semua aspek kehidupan. Kecenderungan untuk meniru dan mengikuti perkembangan perubahan dalam tatanan kehidupan membutuhkan filter yang kuat. Salah satu filter yang yang kuat adalah kontrol budaya sebagai salah satu instrumen tata kehidupan masyarakat.

Budaya masyarakat, disamping sebagai instrumen dalam tata kehidupan masyarakat, juga akan menjadi daya tarik dalam pengembangan sektor parawisata. Perlu disadari bahwa keunikan budaya suatu daerah merupakan sosial kapital dalam pembangunan daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan khususnya terkait dengan budaya asli Wawonii diantaranya pembentukan instrumen-instrumen budaya Asli Wawonii, identifikasi Budaya Asli Wawonii, Promosi Budaya Asli Wawonii dan Festival Pekan Budaya Asli Wawonii.

Gambar 2.5 Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya

5) Wawonii Peduli Masalah Sosial

Dewasa ini telah terjadi bergeseran tata kehidupan masyarakat dari tatanan kehidupan sosial menjadi tatanan kehidupan individu. Kondisi ini berdampak pada tatanan kehidupan sosial menjadi tidak seimbang sudah mengarah kepada kehidupan modernisasi yang akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Kepedulian terhadap sesama semakin berkurang, upaya tolong menolong, saling menghargai juga semakin berkurang serta berbagai kehidupan individu alislainnya.

Permasalahan sosial juga tidak bisa terlepas dari kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya khusunya terkait dengan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi diartikan sebagai tatanam kehidupan bersama individu dalam suatu keluarga dan melakukan berbagai aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga bagi warga masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial secara jelas merupakan bagian dari kualitas hidup masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui terlebih dahulu diketahui indikatornya antara lain pendidikan, perumahan, kesehatan, pendapatan, lingkungan, dan lapangan kerja.

Indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dalam melakukan pengamatan serta memberikan penilaian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat selalu didasarkan pada indikator-indikator penelitian yang sifatnya fisik dan non fisik, sehingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Permasalahan bencana alam maupun bencana sosial menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Bencana banjir, puting beliung, longsor, tsunami adalah bencana alam yang sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, terdapat bencana non alam sebut saja pandemi covid-19, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwujudkan berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder*. Upaya-upaya tersebut meliputi pembentukan posko Unit Reaksi Cepat Bantuan Sosial, pengembangan desa/kelurahan tangguh masalah sosial dan pendampingan masalah sosial dan pendampingan masalah kekerasan pada kelompok rentan. Pendekatan dalam upaya pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial disajikan pada dibawah ini :

Gambar 2.6 Pendekatan dalam Upaya Pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial

Konsep **"WAWONII BANGKIT"** ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

Grand strategy **"WAWONII BANGKIT"** selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan diinternalisasikan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut. Program-program **"WAWONII BANGKIT"** dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki daya dukung bagi pembangunan daerah. Program kegiatan tersebut sebagaimana telah dituangkan pada APBD Reguler dan APBD Perubahan TA 2023 yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja *(performance budget)* berorientasi pada sasaran, keluaran dan hasil yang berdasarkan berbagai program kegiatan. Sistematika kerja program-program unggulan **"WAWONII BANGKIT"** terhubung seperti skema dibawah ini :

Gambar 2.7 Keterkaitan Program-Program Unggulan Wawonii Bangkit

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam 20 (Dua Puluh) konsepsi dasar pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan yang terangkum dalam 9 (Sembilan) pokok prioritas pembangunan Tahun 2024 yaitu:

- Pendidikan
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak.
- Kesehatan
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan.
- Pertanian
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pertanian adalah revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.
- Pariwisata
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pariwisata pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal.
- Usaha Kecil Menengah
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang usaha kecil menengah adalah meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster serta penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah.
- Infrastruktur
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan akses transportasi dan informasi serta peningkatan investasi.
- Perlindungan sosial
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesadaran hukum.
- Lingkungan Hidup
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan dan rehabilitasi lahan dan hutan.
- Birokrasi
  Sasaran dari prioritas pembangunan bidang birokrasi adalah pengembangan jejaring kekuatan ekonomi, peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berbagai bidang yang terlibat dengan keterpaduan masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalan pencapaian indikator target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan RPJMD terdapat beberapa

indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SPKD tetapi harus lintas SKPD, untuk itu sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD dalam pencapaian target sangat diperlukan.

Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil belum memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan presentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana rincian pada berikut :

Tabel. 3. 1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kerja
Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Naik/(Turun) (Rp)
Pendapatan	646.486.163.577,00	643.585.044.876,00	99,55	563.269.425.586,00	80.315.619.290,00
Belanja	706.370.894.989,00	674.402.736.118,00	95,47	616.466.514.144,00	57.936.221.974,00
Surplus/Defisit	**(59.884.731.412,00)**	**(30.817.691.242,00)**	**51,46**	**(53.197.088.558,00)**	**22.379.397.316,00**
Penerimaan Pembiayaan	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00	(53.196.988.506,00)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)
Netto	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	100,00	**113.081.819.970,00**	**(53.196.988.506,00)**
SiLPA	**0,00**	**29.067.140.222,00**	**0,00**	**59.884.731.412,00**	**(30.817.591.190,00)**

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp646.486.163.577,00 terealisasi sebesar Rp643.585.044.876,00 atau 99,55%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp563.269.425.586,00, realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80.315.619,290,00 atau 14,26% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sedangkan dari sisi Belanja Tahun Anggaran 2024, dianggarkan sebesar Rp706.370.894.989,00 terealisasi sebesar Rp674.402.736.118,00 atau 95,47%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp616.466.514.144,00 terdapat kenaikan sebesar Rp57.936.221.974,00 atau 9,40% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.

Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD beserta realisasi murni APBD 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Realisasi Anggaran Pendapatan
Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 dan TA 2023

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.417.974.000,00	2.159.827.139,00	89,32	2.350.293.266,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000.000,00	1.652.077.332,00	82,60	833.375.342,00

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.060.000.000,00	1.046.947.420,00	98,77	628.600.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00	18.970.000,00	126,47	5.445.100,00
5	Dinas Perhubungan	77.500.000,00	66.837.000,00	86,24	91.718.750,00
6	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	8.289.112,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.000.000,00	14.644.500,00	73,22	12.292.020,00
8	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	35.713.000,00
9	Dinas Pertanian	10.000.000,00	26.276.692,00	262,76	0,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrega	35.000.000,00	23.541.000,00	67,26	21.961.010,00
11	Badan Keuangan Daerah	640.850.689.577,00	638.575.923.793,00	99,65	34.491.382.465,00
12	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	524.792.355.521,00
Jumlah		**646.486.163.577,00**	**643.585.044.876,00**	**99,55**	**563.269.425.586,00**

Tabel 3. 3
Realisasi Anggaran Belanja
Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 dan TA 2023

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	114.252.749.221,00	106.237.931.267,00	92,99	91.820.369.769,00
2	Dinas Kesehatan	89.536.777.574,00	84.003.994.894,00	93,82	63.090.094.756,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	39.042.575.000,00	37.495.407.516,00	96,04	24.992.755.656,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	104.174.225.483,00	99.706.934.702,00	95,71	95.544.875.624,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	10.332.394.251,00	9.857.215.724,00	95,40	11.154.143.877,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar	11.604.835.690,00	11.015.034.758,00	94,92	10.140.343.399,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.055.868.320,00	4.946.617.317,00	97,84	6.380.914.579,00
8	Dinas Sosial	2.762.923.232,00	2.682.394.762,00	97,09	3.145.400.062,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.018.891.840,00	2.001.256.288,00	99,13	2.887.099.280,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.382.798.532,00	2.328.119.855,00	97,71	3.214.949.169,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.252.516.168,00	3.022.409.761,00	92,93	3.302.041.864,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.260.867.934,00	3.968.343.628,00	93,13	5.017.882.945,00
13	Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.105.220.120,00	8.964.462.397,00	98,45	9.598.325.276,00

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
14	Dinas Perhubungan	9.393.375.300,00	9.086.453.579,00	96,73	7.133.506.045,00
15	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	4.291.775.908,00	4.215.185.195,00	98,22	4.773.281.508,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.916.344.570,00	7.768.019.613,00	98,13	5.353.931.137,00
17	Dinas Penanaman Modal,PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.123.629.709,00	3.040.852.559,00	97,35	3.563.343.911,00
18	Dinas Perpustakaan	6.581.134.041,00	6.276.145.482,00	95,37	16.100.512.240,00
19	Dinas Perikanan	5.878.903.197,00	5.627.272.793,00	95,72	4.531.658.324,00
20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4.781.599.064,00	4.637.537.911,00	96,99	5.685.204.628,00
21	Dinas Pertanian	10.275.796.993,00	10.120.673.060,00	98,49	7.236.789.050,00
22	Sekretariat Daerah	11.939.713.000,00	12.524.697.326,00	104,90	12.678.943.979,00
23	Bagian Umum dan Keuangan	10.640.685.535,00	9.178.844.935,00	86,26	14.423.283.323,00
24	Bagian Pemerintahan Umum	984.000.000,00	948.065.410,00	96,35	1.497.318.937,00
25	Bagian Pembangunan	707.712.300,00	670.103.000,00	94,69	860.535.289,00
26	Bagian Ekonomi dan SDA	859.383.500,00	783.255.500,00	91,14	756.452.500,00
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.416.599.622,00	7.594.838.800,00	90,24	7.926.098.000,00
28	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	1.064.576.000,00	1.020.208.500,00	95,83	1.428.392.600,00
29	Bagian Hukum	948.000.000,00	911.396.112,00	96,14	1.880.236.120,00
30	Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan	1.235.625.000,00	1.184.399.700,00	95,85	1.632.549.768,00
31	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan	768.500.000,00	697.352.400,00	90,74	869.609.900,00
32	Sekretariat DPRD	30.332.256.664,00	28.704.731.507,00	94,63	28.604.151.567,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.902.327.274,00	7.735.182.040,00	97,88	7.770.167.751,00
34	Badan Keuangan Daerah	134.408.418.148,00	131.438.686.141,00	97,79	19.103.830.272,00
35	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	101.976.406.900,00
36	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.488.382.634,00	3.876.835.261,00	86,37	4.936.830.485,00
37	Inspektorat	7.311.373.913,00	6.074.972.588,00	83,09	5.752.245.934,00
38	Kecamatan Wawonii Barat	693.000.000,00	684.320.000,00	98,75	769.300.000,00
39	Kecamatan Wawonii Utara	693.000.000,00	660.801.302,00	95,35	721.760.000,00
40	Kecamatan Wawonii Timur Laut	693.000.000,00	679.641.012,00	98,07	764.397.661,00

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
41	Kecamatan Wawonii Timur	693.000.000,00	691.317.000,00	99,76	768.537.000,00
42	Kecamatan Wawonii Tenggara	693.000.000,00	677.580.500,00	97,77	742.458.000,00
43	Kecamatan Wawonii Selatan	743.000.000,00	740.403.858,00	99,65	810.142.000,00
44	Kecamatan Wawonii Tengah	693.000.000,00	689.860.000,00	99,55	757.390.000,00
45	Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.437.159.252,00	29.232.998.165,00	99,31	14.398.050.019,00
Jumlah		**706.370.894.989,00**	**674.402.736.118,00**	**95,47**	**616.466.514.144,00**

3.1.1 Pendapatan Daerah

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp643.585.044.876,00 atau naik 99,55% dari jumlah yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp646.486.163.577,00. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp563.269.425.586. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih besar sebesar Rp80.315.342.598,00 atau naik sebesar 14,26% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pendapatan transfer dari Pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terealisasi sebesar Rp87.204.773.480,00 atau sebesar 198,58% atau naik sebesar Rp57.998.183.462,00 dari realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp29.206.590.018,00, serta adanya kenaikan pendapatan transfer Pusat yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp331.828.914.827,00 atau sebesar 5,06% atau naik sebesar Rp15.972.437.866,00 dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp315.856.476.961,00.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis menurut per- urusan, yaitu: 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, dan 4) Urusan pemerintahan fungsi penunjang. Ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 secara lebih terinci dapat dilihat melalui Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp674.402.736.118,00 atau 95,47% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp706.370.894.989,00. Realisasi Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer ini mengalami peningkatan sebesar 9,40% atau Rp57.936.221.974,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp616.466.514.144,00. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 meliputi :

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan dan dipergunakan untuk mencukupi kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari :

a. Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp153.100.700.515,00 terealisasi sebesar Rp146.544.208.655,00 atau sebesar 95,72% digunakan untuk membayar gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan sisa anggaran Rp6.556.491.860,00;

b. Belanja Barang Jasa dari yang dialokasikan sebesar Rp201.635.236.744,00 telah direalisasi sebesar Rp187.646.533.095 atau 93,06%, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat atau pihak lain dengan sisa anggaran sebesar Rp13.988.703,649,00;

c. Belanja Hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp30.246.300.000,00 telah direalisasi sebesar Rp30.188.210.759,00 atau 99,81%. Belanja Hibah tahun 2024 diberikan kepada Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sisa anggaran sebesar Rp58.089.241,00;

d. Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp4.303.619.840,00 terealisasi sebesar Rp4.297.021.000,00 atau hanya sebesar 99,85% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.598.840,00.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp368.675.973.509,00 mengalami peningkatan sebesar Rp33.215.411.189,00 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp335.460.562.320,00 atau naik 9,90%. Lebih rinci belanja operasi yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Total anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai urusan wajib adalah sebesar Rp376.762.348.771,00 terealisasi sebesar Rp355.945.530.940,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Belanja bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp114.252.749.221,00 terealisasi sebesar Rp106.237.931.267,00 belanja tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang meliputi :

- Peningkatan pendidikan anak usia dini;
- Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- Peningkatan pendidikan menengah;
- Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- Peningkatan pendidikan non formal;
- Peningkatan pendidikan luar biasa; dan
- Peningkatan manajemen pelayanan Pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Bidang Kesehatan

Belanja bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp128.579.352.574,00 terealisasi sebesar Rp121.499.402.410,00 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang meliputi :

- Obat dan perbekalan kesehatan;
- Upaya kesehatan masyarakat;

- Pengawasan obat dan makanan;
- Perbaikan gizi masyarakat;
- Pengembangan lingkungan sehat;
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya;
- Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
- Pengembangan sistem informasi kesehatan; dan
- Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari anggaran sebesar Rp104.174.225.483,00 terealisasi sebesar Rp99.706.934.702,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sarana gedung aparatur dalam mendukung pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas dan fungsionalitas wilayah pemukiman sesuai standar tata ruang, kesehatan dan estetika serta konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dengan pengawasan pemanfaatan ruang meliputi :

- Pembangunan jalan dan jembatan;
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- Pembangunan sistem informasi/*database* jalan dan jembatan;
- Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- Penyediaan dan pengelolaan air baku;
- Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
- Pengendalian banjir;
- Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Pembangunan infrastruktur perdesaan;
- Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- Perencanaan tata ruang;
- Pemanfaatan ruang; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belanja langsung pada bidang perumahan dan kawasan pemukiman dari anggaran sebesar Rp10.332.394.251,00 terealisasi sebesar Rp9.857.215.724,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Belanja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp16.660.704.010,00 terealisasi sebesar Rp15.961.652.075,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan :

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

6. Bidang Sosial

Belanja bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp2.762.923.232,00 terealisasi sebesar Rp2.682.394.762,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan

kualitas kesejahteraan sosial yang meliputi :

- Pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Pembinaan anak terlantar;
- Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
- Pengelolaan areal pemakaman.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pangan
   Belanja bidang pangan dari anggaran sebesar Rp2.018.891.840,00 terealisasi sebesar Rp2.001.258.288,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kewaspadaan ketahanan pangan yaitu peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).

2. Bidang Lingkungan Hidup
   Belanja bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp2.382.798.532,00 terealisasi sebesar Rp2.328.119.855,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi :
   - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
   - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
   - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
   - Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   - Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
   - Peningkatan pengendalian polusi.

3. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
   Belanja bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp3.252.516.168,00 terealisasi sebesar Rp3.022.409.761,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya meliputi penataan administrasi kependudukan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp4.260.867.934,00 terealisasi sebesar Rp3.968.343.628,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa yang meliputi :
   - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
   - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
   - Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; dan
   - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Belanja langsung Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp9.105.220.120,00 terealisasi sebesar Rp8.964.462.397,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan pengadaan alat kontrasepsi, meliputi:
   - Keluarga berencana;
   - Kesehatan reproduksi remaja;
   - Pelayanan kontrasepsi;
   - Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
   - Pengembangan model operasional BKB- Posyandu- PADU;

- Pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera; dan
- Revitalisasi program KB.

6. Bidang Perhubungan
   Belanja pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp9.393.375.300,00 terealisasi sebesar Rp9.086.453.579,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan perhubungan yang meliputi:
   - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
   - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
   - Peningkatan pelayanan angkutan;
   - Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
   - Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan
   - Peningkatan kelalaian pengoperasian kendaraan bermotor.

7. Bidang Komunikasi dan Informatika
   Belanja bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp4.291.775.908,00 terealisasi sebesar Rp4.215.185.195,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informatika dan media massa, serta kerjasama informasi dengan media massa.

8. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   Belanja bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari anggaran sebesar Rp7.916.344.570,00 terealisasi sebesar Rp7.768.019.613,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang meliputi:
   - Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif;
   - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
   - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; dan
   - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

9. Bidang Penanaman Modal
   Belanja bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp3.123.629.709,00 terealisasi sebesar Rp3.040.852.559,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

10. Bidang Perpustakaan
    Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran sebesar Rp6.581.134.041,00 terealisasi sebesar Rp6.276.145.482,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan
   Belanja bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp5.878.903.197,00 terealisasi sebesar Rp5.627.272.793,00 dengan prioritas dan sasaran pembangunan pengembangan perikanan dan kelautan dengan menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana dengan melaksanakan:
   - Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut;
   - Pengembangan budidaya perikanan;
   - Pengembangan perikanan tangkap;
   - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
   - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
   - Optimalisasi pengelolaan konversi sumber daya kelautan; dan

- Perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.

2. Bidang Pariwisata
   Belanja bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp4.781.599.064,00 terealisasi sebesar Rp4.637.537.911,00 dengan prioritas dan sasaran pengembangan pemasaran pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata, penyediaan fasilitas pendukung pariwisata, peningkatan jumlah pengunjung/wisatawan lokal dan luar daerah.

3. Bidang Pertanian
   Belanja bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp10.275.796.993,00 terealisasi sebesar Rp 10.120.673.060,00 dengan prioritas dan sasaran pada revitalisasi usaha pertanian, peternakan dan perkebunan guna memperkuat posisi tawar petani yang terdiri dari:
   - Peningkatan kesejahteraan petani;
   - Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan);
   - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
   - Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
   - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
   - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
   - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
   - Peningkatan produksi hasil peternakan;
   - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
   - Peningkatan produksi peternakan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Bidang Sekretariat Daerah
   Belanja bidang Sekretariat Daerah dari anggaran sebesar Rp37.564.774.957,00 terealisasi sebesar Rp35.513.161.683,00 dengan prioritas dan sasaran pendukung urusan pemerintahan daerah.

2. Bidang Sekretariat DPRD
   Belanja bidang Sekretariat DPRD dari anggaran sebesar Rp30.332.256.664,00 terealisasi sebesar Rp28.704.731.507,00 dengan prioritas dan sasaran pendukung urusan DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaaan
   Belanja bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp7.902.327.274,00 terealisasi sebesar Rp7.735.182.040,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan partisipatif dan berkesinambungan, meliputi:
   - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
   - Pengembangan data/informasi;
   - Kerjasama pembangunan;
   - Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
   - Perencanaan pembangunan daerah;
   - Perencanaan pembangunan ekonomi;
   - Perencanaan sosial dan budaya;
   - Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
   - Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; dan
   - Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

2. Bidang Keuangan
   Belanja bidang keuangan dari anggaran sebesar Rp134.408.418.148,00 terealisasi sebesar Rp131.438.686.141,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan keuangan daerah.

3. Bidang Kepegawaian
   Belanja bidang kepegawaian dari anggaran sebesar Rp4.488.382.634,00 terealisasi sebesar Rp3.876.835.261,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan keuangan daerah
   - Peningkatan disiplin aparatur;
   - Fasilitasi pindah/purna tugas PNS; dan
   - Pembinaan dan pengembangan aparatur.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Bidang Inspektorat
   Belanja bidang Inspektorat dari anggaran sebesar Rp7.311.373.913,00 terealisasi sebesar Rp6.074.972.588,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

G. Unsur Kewilayahan

1. Bidang Kecamatan
   Belanja kecamatan dari anggaran sebesar Rp4.901.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.823.903.672,00 dengan prioritas dan sasaran pada kecamatan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
   Belanja bidang kesatuan bangsa dan politik dari anggaran sebesar Rp29.437.159.252,00 terealisasi sebesar Rp29.232.998.165,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan:
   - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
   - Pendidikan politik masyarakat;
   - Pengembangan wawasan kebangsaan;
   - Kemitraan wawasan kebangsaan; dan
   - Peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.884.831.464,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp59.884.731.412,00 dan Koreksi Kas BOSP sebesar Rp100.052,00. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp59.884.831.464,00 atau turun 47,04% sebesar Rp53.196.988.506,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp113.081.819.970,00.

Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp29.067.140.222,00 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan untuk Tahun Buku 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	646.486.163.577,00	643.585.044.876,00	99,55	563.269.425.586,00
Belanja	706.370.894.989,00	674.402.736.118,00	95,47	-616.466.514.144,00
Surplus/Defisit	**-59.884.731.412,00**	**-30.817.691.242,00**	**51,46**	**-53.197.088.558,00**
Penerimaan Pembiayaan	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100	115.581.819.970,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	100	2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100**	**113.081.819.970,00**
SiLPA	**0,00**	**29.067.140.222,00**	**0,00**	**59.884.731.412,00**

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan memfokuskan penerimaan pendapatan yang bersumber langsung dari penerimaan daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah). Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan hingga Tahun 2024 sebagaimana juga disampaikan dalam laporan capaian kinerja, dikelompokkan berdasarkan pokok kebijakan yang tertuang dalam misi rencana strategi yang terdapat pada 7 (tujuh) SKPD yang memiliki realisasi pendapatan sebagai berikut:

Faktor-faktor permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Konawe Kepulauan hingga tahun 2024 dalam pengelolaan pengelolaan Pendapatan Daerah dan Solusi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik;
b. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur;
c. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan sehingga belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Untuk itu diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer;
d. Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja profesional;
e. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;dan
f. Kurangnya pengkajian sumber–sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu :

a. Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan;

b. Terkait dengan proses pengadaan tanah menemui kendala antara lain perencanaan yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran);

c. Kurangnya koordinasi pengelolaan keuangan antara Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dan SKPD dalam hal menetukan Belanja yang yang seharusnya menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan;dan

d. Rencana Anggaran Kas SKPD yang tidak tepat sasaran utamanya terkait proses pengadaan belanja baik barang dan jasa maupun belanja modal yang di realisasikan lebih besar di triwulan akhir sehingga menghambat realisasi belanja SKPD secara keseluruhan.

Schubungan adanya hambatan dan kendala tersebut beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain :

a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;

b. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penganggaran dari penentuan kode rekening dapat diminimalisir;

c. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif;

d. Melakukan perencanaan anggaran kas yang tepat waktu sehingga dapat meningkatkan realisasi belanja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Konawe Kepulauan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggungjawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkompilasi laporan keuangan dari entitas akuntansi tersebut. BKD sebagai entitas pelaporan telah menggunakan aplikasi SIPD Keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disusun dan disajikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024, yakni sebagai berikut:

4.3.1 Aset Lancar

a. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan Sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

b. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

c. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimasukkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

4.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasi-nya menjadi permanen dan non permanen yang terdiri dari Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Serta Investasi Non Permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

4.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum dengan klasifikasi aset tetap yakni sebagai berikut:

a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;

b. Peralatan dan Mesin, mencakup antara lain, alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer,

alat eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan;

c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dikelompokkan berdasarkan peruntukannya (misalnya: gedung kantor, gedung rumah sakit, rumah dinas, gedung pertemuan, tempat pembibitan pertanian, kandang peternakan, gedung sekolah, gedung asrama/mess/pesanggrahan/villa/wisma/gedung pabrik/bengkel studio, gedung panti asuhan/jompo, stadion). Bangunan mencakup antara lain monumen, menara, tugu, pagar dan rambu-rambu;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; dan

e. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

4.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

4.3.6 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Dana diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang tanpa harus dibayar kembali. Ekuitas Dana yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi Ekuitas Dana.

4.3.7 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hak atas pendapatan; dan
b. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen; dan
b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan di depan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di rekening kas umum daerah. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.8 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah dimana belanja ini diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan kas yang sekarang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Sedangkan untuk pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Adapun Belanja diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain kepemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah; dan

b. Terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Pengukuran Belanja Non Modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang Kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal

menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.9 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan dimana penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi. Untuk akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan pengeluaran pembiayaan sendiri diakui pada saat timbulnya kewajiban dimana akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:
1. Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

   Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

   a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
   b. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas
      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan;
4. Beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban; dan
5. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan bagi kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti

pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan

b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung *(direct payment)*, rekening khusus *(special account)*, dan pembiayaan pendahuluan (*pre-financing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
   1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
   2) Telah terjadi pengeluaran *(disbursed)* oleh pemberi pinjaman *(lender)* atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung *(direct payment)*, rekening khusus *(special account)*, dan pembiayaan pendahuluan *(pre-financing)*, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
   1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
   2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemda dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah

daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal *(reliable)*, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai *(cash dividend)*, diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

2) Investasi jangka panjang non permanen:

a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga;

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh tempo *(aging schedule)*. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Rincian Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh *(the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baikinvestasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitur. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan,

terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku Sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
4. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
5. Piutang Transfer Lainnya Diakui Apabila:
   1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
   2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
6. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan

7. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
   a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a. Pemberian pinjaman
      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
   b. Penjualan
      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
   c. Kemitraan
      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
   d. Pemberian fasilitas/jasa
      Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
   b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
   c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar Sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya *(Subsequent Measurement)* terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan *(write-off)* dan penghapus bukuan *(write down)*. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 4. 2

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 4. 3

Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a	Lancar	Umur Piutang 0 Sampai Dengan 1 Bulan;
b	Kurang Lancar	Umur Piutang 1 Sampai Dengan 3 Bulan
c	Diragukan	Umur Piutang 3 Sampai Dengan 12 Bulan
d	Macet	Umur Piutang Lebih Dari 12 Bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Penggolongan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Penggolongan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan *(write-off)* dan penghapus bukuan *(write down)*.

Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus bukuan. Kriteria penghapus bukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapus bukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapus bukuan.
    a. Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    b. Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
    c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus bukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus bukuan.
3. Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan

penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan diatas Rp5 miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD

Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
2. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
3. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
4. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *re-scheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
5. Penghapus tagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
6. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum *industry* (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
7. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapus bukuan *(write down* maupun *write off)* masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas-nya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

2. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan caralainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar meliputi:

1. Investasi Jangka Panjang;
2. Aset Tetap;
3. Dana Cadangan; dan
4. Aset Lainnya.

4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

   Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

   Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* tanpa nilai sisa aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal pembukuan yang didasarkan pada dokumen:

1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

4.5 Akuntansi Kewajiban

Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu

kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. **Transaksi dengan Pertukaran *(Exchange Transactions)***

   Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

   Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. **Transaksi Tanpa Pertukaran *(Non-Exchange Transactions)*,**

   Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

   Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. **Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah *(Government-Related Events)***

   Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

   Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diperkirakan dengan

andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. **Kejadian yang Diakui Pemerintah *(Government-Acknowledged Events).***

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk menanggapi kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

a. Badan Legislatif telah menyetujui atau meng-otorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan

b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR meng-otorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui Sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan kepemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;

b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang

persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;

d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;

e. Utang Beban, diakui pada saat:

   1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

   2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;

   3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

f. Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;

g. Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

   1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau

   2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau

   3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat. Penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi; dan

i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditanda tanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
2. Utang Kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
3. Utang Transfer dicatat Sebesar nilai kekurangan transfer; dan
4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kas-nya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh tempo;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
   a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      1) Pengurangan pinjaman;
      2) Modifikasi persyaratan utang;
      3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

c. Biaya pinjaman:
1) Perlakuan biaya pinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.6 Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan kedalam:

1. Ekuitas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi; dan
3. Ekuitas Dana Cadangan;

Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Cadangan Piutang;
3. Cadangan Persediaan; dan
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan); dan
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas dana yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

BAB V

PENJELASAN POS–POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyajian atas laporan keuangannya mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tata cara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas secara teknis juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Jumlah anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp646.486.163.577,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024, Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 serta Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024. Realisasi Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disajikan pada laporan ini yaitu yaitu Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dimana realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp643.585.044.876,00 atau mengalami kenaikan 14,26% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp563.269.425.586,00 dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp17.249.032.486,00 terealisasi Rp17.270.521.057,00 atau 100,12%, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp626.919.157.091,00 terealisasi Rp624.390.779.080,00 atau 99,60%, dan anggaran Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.317.974.000,00 terealisasi sebesar Rp1.923.744.739,00 atau 82,99%. Komposisi Pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 1

Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Pendapatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.249.032.486,00	17.270.521.057,00	100,12	(21.488.571,00)	16.181.312.122,00

Pendapatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Transfer	626.919.157.091,00	624.390.779.080,00	99,60	2.528.378.011,00	547.068.113.464,00
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	82,99	394.229.261,00	0,00
Jumlah	**646.486.163.577,00**	**643.585.044.876,00**	**99,55**	**2.901.116.701,00**	**563.269.425.586,00**

Anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp646.486.163.577,00 tersebut sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepualuan Tahun 2024. Realisasi pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp643.585.044.876,00 atau 99,55% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp563.269.425.586,00 atau 102,75% dari target pendapatan pada periode tersebut sebesar Rp548.181.378.000,00. Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80.315.619.290,00 atau sebesar 14,26% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp563.269.425.586,00.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp17.249.032.486,00 dengan realisasi mencapai Rp17.270.521.057,00 atau 100,12% dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 2

Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	3.640.000.000,00	4.396.468.604,00	120,78	4.612.262.047,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.340.000.000,00	3.107.876.344,00	93,05	1.566.575.658,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	100,00	2.573.523.227,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.912.943.999,00	5.410.087.622,00	91,50	7.426.951.190,00
Jumlah	**17.249.032.486,00**	**17.270.521.057,00**	**100,12**	**16.181.312.122,00**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan baik melalui metode pembayaran tunai pada juru pungut ataupun bendahara penerimaan yang menyetorkan di Bank secara tunai maupun melalui metode pembayaran non tunai dengan menggunakan Qris maupun Virtual Account sebagai kanal pembayarannya yang dapat diakses di aplikasi Espay-pos yang disediakan oleh PT. Pembayaran Lintas Usaha Sukses sebagai penyedia jasa pembayaran transaksi

elektronik. Espay Pos adalah aplikasi Qris yang digunakan untuk pajak yang nilainya tidak tetap atau berubah-ubah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Restoran. Kemudian pada Tahun 2024 Bidang Pendapatan melakukan kerjasama dengan penyediaa jasa pembayaran secara elektronik yang baru yaitu PT. Buana Media Teknologi dan PT. Rakyat Sejahtera. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 3

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	73,99	26.575.000,00
Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	157,22	2.332.553.571,00
Pajak Reklame	15.000.000,00	21.469.513,00	143,13	450.000,00
Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000,00	943.175.159,00	94,32	951.813.603,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	1.141.903.387,00	126,88	902.623.585,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	500.000.000,00	388.141.124,00	77,63	398.246.287,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00	3.989.600,00	39,90	0,00
Jumlah	**3.640.000.000,00**	**4.396.468.604,00**	120,78	**4.612.262.047,00**

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 ada beberapa objek pajak mengalami peningkatan yang siginifikan kecuali pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta terdapat objek pajak yang baru yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang dianggarkan. Hal ini dapat dilihat bahwa anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.640.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.396.468.604,00 atau 120,78%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.612.262.047,00 pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp215.793.443,00 atau 4,68%. penurunan tersebut disebabkan:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp11.099.091,00 atau 73,99% dari target pendapatan sebesar Rp15.000.000,00. Penerimaan pendapatan dari sektor Perhotelan diperoleh dari adanya kerjasama antara KPK-RI, Bank RKUD dalam hal ini Bank Sultra dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berupa Launching/Pencanangan penggunaan Alat Perekam Pajak/Tapping Box pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Bupati Konawe Kepulauan sehingga menunjukkan adanya realisasi Pajak Hotel pada TA 2024 walaupun hasilnya belum optimal yang diakibatkan oleh jumlah hotel yang masih terbatas sehingga tingkat penghunian hotel (okupansi hotel) juga masih terbatas karena rusaknya alat tapping box yang ada di hotel - hotel. Rincian Realisasi Pajak Hotel dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.886.690.730,00 atau 157,22% dari target pendapatan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.26 Tahun 2023 tentang pembebanan kewajiban bagi bendahara untuk memotong/memungut dan menyetorkan pajak daerah dalam hal ini pajak restoran yang berasal dari belanja makan minum yang dialokasikan pada DPA/DIPA/APBDesa yang menjadi pengelolaan bendahara dengan dasar pengenaan tarif sebesar 10% terhadap jasa layanan restoran maupun catering. Penerimaan atas pajak restoran terbesar juga berasal dari penerimaan yang disetorkan oleh PT. Gobel Dharma Sarana Karya yang merupakan pihak yang mengelola jasa catering pada pusat pertambangan nikel PT. Gema Kreasi Perdana yang terdapat di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara. Rincian Realisasi Pajak Restoran dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

c. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.469.513,00 atau 143,13% dari target pendapatan sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar Rp21.019.513,00 atau 4.671,00% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Reklame pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp450.000,00. Peningkatan pendapatan Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2024 sedikit banyak dipengaruhi oleh aktivitas pemilu serentak tahun 2024 dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Rincian Realisasi Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

d. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp943.175.159,00 atau 94,32% dari target pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.638.444,00 atau 0,91% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp951.813.603,00. Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.141.903.387,00 atau 126,88% dari target pendapatan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp239.279.801,00 atau 26,51% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp902.623.586,00. Adapun kenaikan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya dipengaruhi meningkatnya kesadaran stakeholder untuk membayar kewajiban atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Rincian Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dasar pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 April 2018. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp388.141.124,00 atau 77,63% dari target pendapatan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan sebesar Rp10.105.163,00 atau 2,54% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode yang sama

tahun 2023 adalah sebesar Rp398.246.287,00. Rincian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.989.600,00 atau 39,90% dari target pendapatan sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari BPHTB Pemindahan Hak dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembayaran retribusi pada lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan juga dapat dilakukan secara non tunai dengan menggunakan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi E-Penda yaitu aplikasi QRIS yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah untuk pembayaran retribusi yang sifatnya tidak berubah-rubah atau yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Pada pelaksanaannya QRIS tersebut digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memungut retribusi, antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Perindagkop
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kesehatan
7. RSUD
8. Dinas Lingkungan Hidup

Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 3 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 4

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.115.000.000,00	1.907.129.732,00	90,17	780.260.878,00
Retribusi Jasa Usaha	1.225.000.000,00	1.200.746.612,00	98,02	752.571.780,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	35.713.000,00
Jumlah Retribusi	**3.340.000.000,00**	**3.107.876.344,00**	**93,05**	**1.568.575.658,00**

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.340.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.107.876.344,00 atau 93,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.539.300.686,00 atau 98,13% dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.568.575.658,00.

Masing- masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 5

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000,00	1.888.159.732,00	89,91	766.556.666,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.000.000,00	18.970.000,00	126,47	5.445.100,00
Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	8.289.112,00
Jumlah	**2.115.000.000,00**	**1.907.129.732,00**	**90,17**	**780.290.878,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2024 sebesar Rp2.115.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.907.129.732,00 atau 90,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp780.290.878,00 mengalami kenaikan sebesar 144,41%. Retribusi Jasa Umum dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.888.159.732,00 atau 89,91% dari target pendapatan sebesar Rp2.100.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.603.066,00 atau 146,32% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp766.556.666,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan diakibatkan oleh adanya Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp1.652.077.332,00 yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang murni berasal dari pelayanan RSUD sebesar Rp129.535.535,00 dan Retribusi yang berasal dari Klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp1.519.224.700,00 maupun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp615.380,00 dan klaim Jasa Raharja sebesar Rp2.701.717,00. Selain itu kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan juga berasal dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp236.082.400,00 berupa Pendapatan Dana Non Kapitasi yang masuk sebagai penambah dalam akun Retribusi Pelayanan Kesehatan. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 8 dan 9.**

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.970.000,00 atau 126,47% dari target pendapatan sebesar Rp15.000.000,00.00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan jasa persampahan dan kebersihan baik itu dari pengusaha restoran, hotel, perkantoran dan masyarakat. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

c. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan sehingga Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp8.289.112,00 atau turun sebesar 100,00%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 6

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	800.000.000,00	685.458.692,00	85,68	626.600.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	14.644.500,00	73,22	12.292.020,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.950.000,00	79,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	60.655.000,00	86,65	91.718.750,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	19.591.000,00	65,30	21.961.010,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.000.000,00	416.447.420,00	138,82	0,00
Jumlah	**1.225.000.000,00**	**1.200.746.612,00**	**98,02**	**752.571.780,00**

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa usaha TA 2024 sebesar Rp1.225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.200.746.612,00 atau 98,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp752.571.780,00 mengalami kenaikan sebesar 59,55%. Retribusi Jasa Usaha dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp685.458.692,00 atau 85,68% dari target pendapatan sebesar Rp800.000.000,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp58.858.692,00 atau 9,39% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp626.600.000,00. Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 11, 12, dan 13.**

Tabel 5. 7

Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	6.182.000,00	82,43	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	770.000.000,00	656.776.692,00	85,29	626.600.000,00
Jumlah	**800.000.000,00**	**685.458.692,00**	**85,68**	**626.600.000,00**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 berasal dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp22.500.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00. Kemudian Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan realisasi sebesar Rp6.182.000,00 atau 82,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 serta realisasi Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp656.776.692,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp770.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp58.858.692,00 atau naik 9,39% dari realisasi tahun 2023 yang hanya sebesar Rp626.600.000,00.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp14.644.500,00 atau 73,22% dari target pendapatan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami peningkatan sebesar Rp2.352.480,00 atau 19,14% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp12.292.020,00. Rincian Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp3.950.000,00 atau 79,00% dari target pendapatan sebesar Rp5.000.000,00. Adapun Rincian Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp60.655.000,00 atau 86,65% dari target pendapatan Rp70.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mengalami penurunan sebesar Rp31.063.750,00 atau 33,87% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp91.718.750,00. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp19.591.000,00 atau 65,30% dari target pendapatan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp2.370.010,00 atau 10,79% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada periode yang sama tahun 2023 sebesar

Rp21.961.010,00 yang berasal hanya dari satu tempat wisata yaitu Pantai Kampa. Hal ini terjadi akibat masih banyaknya tempat wisata yang ada belum terlalu dieksplor oleh Pemerintah serta masih kurangnya promosi ke pihak luar sehingga potensi wisata yang seharusnya menghasilkan pendapatan asli daerah berjalan kurang maksimal. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasarana khusunya akses jalan untuk menuju ke tempat wisata yang ada membuat para wisatawan domestik baik yang berasal dari dalam Kabupaten Konawe Kepulauan maupun luar Kabupaten Konawe Kepulauan berpikir untuk ke tempat wisata pada saat hari libur sehingga membuat retribusi yang berasal dari sektor pariwisata belum memberikan kontribusi berarti pada Pendapatan Asli Daerah. Rincian realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp416.447.420,00 atau 138,82% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00. Rincian realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pembagian deviden tunai tahun buku 2024 tersebut berdasarkan penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang menetapkan besarnya deviden sesuai dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka deviden yang diterima adalah sebesar Rp4.356.088.487,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.356.088.487,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp4.356.088.487,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.782.565.260,00 atau 69,27% dibandingkan dengan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp2.573.523.227,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.356.088.487,00 memberikan kontribusi 25,22% terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp17.270.521.057,00 dan 0,68% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.585.044.876,00. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerimaan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 8

Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	136.109.200,00	272,22	55.107.100,00
Penerimaan Jasa Giro	1.020.000.000,00	604.283.651,00	59,24	1.840.289.920,00
Pendapatan Bunga Deposito	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	100,38	1.391.597.314,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	485.102.628,00	97,02	824.207.082,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	12,60	333.548.226,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	7.957.154,00	79,57	270.414,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.931.943.999,00	2.206.448.068,00	114,21	564.819.190,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	2.417.111.942,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.912.943.999,00**	**5.410.087.622,00**	**91,50**	**7.426.951.190,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.410.087.622,00 atau 91,50% dari target pendapatan sebesar Rp5.912.943.999,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.016.863.568,00 atau 27,16% dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp7.426.951.190,00.

Walaupun mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 namun dari rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdapat beberapa objek yang melampaui target diantaranya Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan yang terealisasi sebesar 272,22%, Pendapatan Bunga Deposito sebesar 100,38%, Pendapatan Dari Pengembalian sebesar 114,21% dari target. Hal ini dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan berasal dari Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD dilakukan melalui proses lelang dan dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) agar dapat diketahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah tersebut dengan syarat telah berusia paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Nilai Realisasi atas penjualan tersebut sebesar Rp136.109.200,00.

2) Penerimaan jasa giro berasal dari rekening bendahara pengeluaran yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) SKPD dan rekening Kas Umum Daerah (Bank Sultra) dengan Realisasi sebesar Rp604.283.651,00 atau 59,24% dari target pendapatan sebesar Rp1.020.000.000,00. Realisasi ini berasal dari Jasa Giro Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara BOK serta Jasa Giro di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.236.006.269,00 atau 67,16% dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan Jasa Giro pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp1.840.289.920,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20 dan 21.**

3) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp1.907.191.769,00 atau 100,38% dari target pendapatan sebesar Rp1.900.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp515.594.455,00 atau 37,05% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.391.597.314,00 berasal dari pendapatan yang diterima atas penempatan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 pada Bank Sultra dengan bunga deposito sebesar 0,4% dari sebelumnya ditahun 2023 sebesar 0,2% per bulan. Namun bunga deposito yang didapatkan flat pada periode januari-juni 2024, sebab Per Tanggal 1 Juli 2024 terjadi perubahan nilai bunga yang didapatkan akibat adanya perubahan regulasi terkait suku bunga Deposito sesuai Surat Edaran Nomor : 007/SE.DIR/BPD/2024 perihal suku bunga Deposito yaitu berdasarkan jumlah hari dalam satu bulan kalender, sehingga total pendapatan bunga deposito yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.907.191.769,00. Rincian Pendapatan Bunga dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan dari penggantian aset daerah yang dihilangkan atau kerugian daerah oleh pegawai bukan bendahara dan bendahara yang menyebabkan kerugian dan merupakan temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2024. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp485.102.628,00 atau 97,02% dari target pendapatan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp339.104.454,00 atau 41,14% dibandingkan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp824.207.082,00. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

5) Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp62.995.131,00 atau 12,60% dari target pendapatan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp270.553.097,00 atau 81,11% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp333.548.228,00. Rincian Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 24.**

6) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.957.154,00 atau 79,57% dari target pendapatan sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.686.740,00 atau 2.842,58% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp270.414,00 Pendapatan Denda ini berasal dari Denda Pajak Hotel sebesar Rp27.000,00; Denda Pajak Restoran sebesar Rp16.020,00; dan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.147.961,00 dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.766.173,00 Rincian Denda Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 25, 26, 27, dan 28.**

7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.206.448.089,00 atau 114,21% dari target pendapatan sebesar Rp1.931.943.999,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.641.628.899,00 atau 290,65% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp564.819.190,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian ini berasal dari dari pengembalian perjalanan dinas sebesar Rp427.715.660,00; Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp242.973.005,00; Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp10.603.482,00; Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Rp991.643.009,00; Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp499.602.610,00;

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp33.910.323,00. Rincian Pendapatan dari Pengembalian dapat dilihat pada **Lampiran 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp626.919.157.091,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 seluruhnya sebesar Rp624.390.779.080,00 atau 99,60%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp77.302.665.616,00 atau 14,13% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer pada periode yang sama tahun 2023 adalah sebesar Rp547.088.113.464,00.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp624.390.779.080,00 memberikan kontribusi sebesar 97,02% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.585.044.876,00. Berdasarkan jenisnya Pendapatan Transfer dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5. 9

Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	529.867.056.000,00	531.272.532.023,00	100,27	447.909.009.521,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	77.227.340.000,00	77.227.340.000,00	100,00	76.883.346.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16	22.295.757.943,00
Jumlah	**626.919.157.091,00**	**624.390.779.080,00**	**99,60**	**547.088.113.464,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2024, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik ,Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa. Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu. Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB, PPh Pasal 21, 25/29 dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp531.272.532.023,00 atau 100,27% dari target pendapatan sebesar Rp529.867.056.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp83.363.522.502,00 atau 18,61% dari Realisasi

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp447.909.009.521,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp531.272.532.023,00 memberikan kontribusi sebesar 85,09% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp624.390.779.080,00 dan sebesar 82,55% terhadap jumlah Pendapatan–LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.585.044.876,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 10
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	86.856.894.000,00	87.204.773.480,00	101,57	29.206.590.018,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	330.150.530.000,00	331.828.914.827,00	100,51	315.856.476.961,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.917.626.000,00	78.102.010.197,00	98,97	69.883.510.111,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.942.005.000,00	34.136.833.519,00	97,70	32.962.432.431,00
Jumlah	**529.867.055.000,00**	**531.272.532.023,00**	100,27	**447.909.009.521,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD (Transfer Ke Daerah) yang bersumber dari APBN yang dialokasikan berdasarkan persentase atau pendapatan tertentu dalam APBN yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Berdasarkan Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility*

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.204.773.480,00 atau 101,57% dari target pendapatan sebesar Rp85.856.894.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mengalami peningkatan sebesar Rp57.998.183.462,00 atau 198,58% dibandingkan dengan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp29.206.590.018,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp87.204.773.480,00 memberikan kontribusi sebesar 16,41% terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp531.272.532.023,00 dan sebesar 13,97% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp624.390.779.080,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari :

Tabel 5. 11
Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.535.962.000,00	1.535.962.000,00	100,00	1.178.131.000,00
DBH PPh Pasal 21	1.621.366.000,00	1.621.366.000,00	100,00	1.277.117.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	27.747.000,00	27.747.000,00	100,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.000,00	1.000,00	50,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	81.629.000,00	81.629.000,00	100,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	80.607.514.000,00	81.955.394.480,00	101,67	24.698.597.018,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH)	158.249.000,00	158.249.000,00	100,00	38.580.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.824.425.000,00	1.824.425.000,00	100,00	2.014.165.000,00
Jumlah	**85.856.894.000,00**	**87.204.773.480,00**	**101,57**	**29.206.590.018,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1 **Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2024 mendapatkan Bagi Hasil sebesar Rp1.535.962.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.535.962.000,00.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp357.831.000,00 atau 30,37% dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp1.178.131.000,00.

2. **Bagi Hasil dari PPH 21**

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh 21 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.621.366.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.621.366.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp344.249.000,00 atau 26,96% dari Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.277.117.000,00.

3. **Bagi Hasil dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN**

   Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

   Realisasi Bagi Hasil dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.747.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp27.747.000,00.

4. **Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**

   Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

   Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.000,00 atau 50,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.000,00 atau 100% dari Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5. **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent**

   Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Royalty Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

   Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp81.629.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp81.629.000,00.

6. **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**

   Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Royalty Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

   Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp81.955.394.480,00 atau 101,67% dari target sebesar Rp80.607.514.00,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp57.256.797.462,00 atau 231,82% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar Rp24.698.597.018,00.

7. **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)**

   Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp158.249.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp158.249.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp119.669.000,00 atau 310,18% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada periode yang sama Tahun 2023 adalah sebesar Rp38.580.000,00.

8. Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.824.425.000,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp1.824.425.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp189.740.000,00 atau 9,42% dari realisasi bagi hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada periode yang sama Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.014.165.000,00.
Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada **Lampiran 35.**

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengaan prioritas masing-masing daerah. Sementara DAU yang ditentukan Penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Penggajian formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang Pekerjaan Umum.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp330.150.530.000,00 dengan realisasi mencapai Rp331.828.914.827,00 atau mencapai 100,51%, mengalami kenaikan sebesar Rp15.972.437.866,00 atau 5,06% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp315.856.476.961,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp331.828.914.827,00 memberikan kontribusi sebesar 53,14% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp624.390.779.080,00 dan 51,56% terhadap jumlah Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.585.044.876,00.

Dari total realisasi DAU Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp331.828.914.827,00 terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya *(block grant)* sebesar Rp239.512.064.000,00 serta DAU yang ditentukan penggunaannya *(specific grant)* sebesar Rp92.316.850.827,00 yang tersebar di beberapa OPD dan seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Realisasi DAU Peruntukkan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 12

Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum Peruntukan Tahun Anggaran 2024

OPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	RASIO	LEBIH/(KURANG)
	Rp	Rp	%	Rp
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.116.634.600,00	43.116.634.600,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan	20.924.881.300,00	20.732.027.127,00	99,08	192.854.173,00
RSUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.780.516.000,00	18.780.516.000,00	100,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	752.577.300,00	752.577.300,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Pertanian	243.200.300,00	243.200.300,00	100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Langara Laut	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lansilowo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Ladianta	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Munse	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Polara	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Sawaea	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lampeapi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	**92.509.705.000,00**	**92.316.850.827,00**	**99,79**	**192.854.173,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya terealisasi sebesar Rp92.316.850.827,00 atau 99,79% dari target yang dianggarkan sebesar Rp92.509.705,000 atau sebesar 27,82% dari total seluruh realisasi DAU yang ditransferkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp331.828.914.827,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya per bidang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggajian Formasi PPPK

Realisasi DAU Penggajian PPPK sebesar Rp12.449.256.827,00 atau sebesar 98,47% dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.642.111.000,00 Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan penggajian formasi PPPK dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5. 13
Rincian Realisasi DAU Peruntukan Penggajian Formasi PPPK
Tahun Anggaran 2024

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	3.369.938.600,00	3.369.938.600,00	100,00	0,00
Dinas Kesehatan	8.484.499.300,00	8.291.645.127,00	97,73	192.854.173,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	602.577.300,00	602.577.300,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UsahaKecil dan Menengah	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Perikanan	47.298.500,00	47.298.500,00	100,00	0,00
Dinas Pertanian	43.200.300,00	43.200.300,00	100,00	0,00
Jumlah	**12.642.111.000,00**	**12.449.256.827,00**	**98,47**	**192.854.173,00**

b. Pendanaan Kelurahan

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Bagian DAU pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik/nonfisik tanpa mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD. Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pendanaan Kelurahan sebesar Rp200.000.000,00 dikalikan jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Pemerintah Daerah dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata atau dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja kelurahan. Alokasi pendanaan Kelurahan dihitung paling sedikit sebesar 50% dari pagu DAU pendanaan Kelurahan yang dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata dengan memperhatikan :

1) Jumlah penduduk
2) Angka kemiskinan
3) Luas wilayah
4) Ketersediaan pelayanan dasar
5) Kondisi infrastruktur
6) Transportasi/aksesibilitas setiap kelurahan
7) Indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas daerah

Realisasi DAU Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya berdasarkan pendanaan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 14

Rincian Realisasi DAU Peruntukan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2024

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Kelurahan Langara Laut	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lansilowo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Ladianta	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Munse	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Polara	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Sawea	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Kelurahan Lampeapi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

c. Bidang Pendidikan

Penggunaan DAU bidang Pendidikan dipergunakan untuk membiayai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang penentuan besaran pendanaannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional. Kegiatan yang dapat digunakan dengan menggunakan DAU pendidikan terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah sebesar paling tinggi 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang Pendidikan. Selain itu adapula kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan menggunakan DAU bidang pendidikan yaitu untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah, belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar serta belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas layanan dasar.

Realisasi DAU Bidang Pendidikan sebesar Rp42.246.696.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp42.246.696.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 15

Rincian Realisasi DAU Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pendidikan	39.746.696.000,00	39.746.696.000,00	100,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pertanian	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**42.246.696.000,00**	**42.246.696.000,00**	**100,00**	**0,00**

d. Bidang Kesehatan

Penggunaan DAU bidang Kesehatan dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehaatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud adalah belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN dibidang Kesehatan paling tinggi sebesar 20% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan serta belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional paling tinggi 25% dari jumlah alokasi bagian DAU bidang Kesehatan. Realisasi DAU Bidang Kesehatan sebesar Rp17.440.382.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.440.382.000,00. Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 16

Rincian Realisasi DAU Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Kesehatan	12.440.382.000,00	12.440.382.000,00	100,00	0,00
RSUD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**17.440.382.000,00**	**17.440.382.000,00**	**100,00**	**0,00**

e. Bidang Pekerjaan Umum

Penggunaan DAU bidang Pekerjaan Umum dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan yang dimaksud adalah belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum. Realisasi DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp18.780.516.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp18.780.516.000,00 Adapun realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 17

Rincian Realisasi DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024

OPD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Lebih/(Kurang)
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.780.516.000,00	18.780.516.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**18.780.516.000,00**	**18.780.516.000,00**	**100,00**	**0,00**

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah yang terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan atau jenis DAK Lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp78.102.010.197,00 atau 98,97% dari target pendapatan sebesar Rp78.917.626.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.218.500.086,00 atau 11,76% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp69.883.510.111,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp78.102.010.197,00 memberikan kontribusi sebesar 14,70% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp531.272.532.023,00 dan 12,14% terhadap jumlah Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.585.044.876,00 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai berikut :

Tabel 5. 18
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	283.233.000,00	283.083.000,00	99,95	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.895.139.000,00	3.890.514.000,00	99,88	1.675.317.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.085.083.000,00	3.083.958.000,00	99,96	3.472.962.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	379.906.000,00	373.685.000,00	98,36	474.940.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.899.577.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler - KB	987.975.000,00	950.600.000,00	96,22	1.064.670.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	23.610.417.900,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.426.301.000,00	9.391.144.000,00	99,63	8.384.912.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.988.536.000,00	3.988.435.500,00	100,00	1.626.565.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	9.090.150.000,00	8.928.220.485,00	98,22	3.377.464.752,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	209.450.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	47.781.303.000,00	47.212.370.212,00	98,81	15.087.213.959,00
Jumlah	**78.917.626.000,00**	**78.102.010.197,00**	98,97	**69.883.510.111,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan – PAUD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp283.083.000,00 atau 99,95% dari target pendapatan sebesar Rp283.233.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp283.083.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan– PAUD pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00.
2. Realisasi Pendapatan DAK regular- Bidang Pendidikan – SD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.890.514.000,00 atau 99,88% dari target pendapatan sebesar Rp3.895.139.000.00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.215.197.000,00 atau 132,23% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Reguler Bidang Pendidikan – SD pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.675.317.000,00.
3. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan – SMP sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.083.958.000,00 atau 99,96% dari target pendapatan sebesar Rp3.085.083.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp389.004.000,00 atau 11,20% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik-Bidang Pendidikan – SMP pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3.472.962.000,00.
4. Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp373.685.000,00 atau 98,36% dari target pendapatan sebesar Rp379.906.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp101.255.000,00 atau 21,32% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp474.940.000,00.
5. Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.899.577.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp10.899.577.000,00.
6. Realisasi Pendapatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp950.600.000,00 atau 96,22% dari target pendapatan sebesar Rp987.975.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp114.070.500,00 atau 10,71% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler – KB pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.064.670.500,00.
7. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Jalan – Reguler – Jalan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.610.417.900,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Jalan – Reguler – Jalan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp23.610.417.900,00.
8. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Air Minum – Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.391.144.000,00 atau 99,63% dari target pendapatan

sebesar Rp9.426.301.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.006.232.000,00 atau 12,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp8.384.912.000,00.

9. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi – Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.988.435.500,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp3.988.536.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.361.870.500,00 atau 145,21% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.626.565.000,00.
10. Realisasi Pendapatan DAK – Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan AKI dan AKB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.928.220.485,00 atau 98,22% dari target pendapatan sebesar Rp9.090.150.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.550.735.733,00 atau 164,35% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK penugasan- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan AKI dan AKB pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3.377.484.752,00.
11. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp209.450.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp209.450.000,00.
12. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.212.370.212,00 atau 98,81% dari target pendapatan sebesar Rp47.781.303.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.125.156.253,00 atau 212,93% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp15.087.213.959,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Berdasarkan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 adalah Dana yang di alokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri atas a) Dana BOS yang terdiri atas Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja; b) Dana BOP PAUD yang terdiri dari BOP PAUD Reguler dan Dana BOP PAUD Kinerja; c) Dana BOP Kesetaraan terdiri dari Dana Dana BOP Kesetaraan Reguler dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja; d) Dana Tunjangan Guru ASN Daerah (TPG Guru) terdiri atas Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah e) Dana BOK terdiri atas BOK Dinas dan BOK Puskesmas serta Dana Non Fisik Jenis Lainnya.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp34.136.833.519,00 atau 97,70% dari target pendapatan sebesar Rp34.942.006.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.401.088,00 atau 3,56% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp32.962.432.431,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp34.136.833.519,00 memberikan kontribusi sebesar 6,43% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan sebesar Rp531.272.532.023,00 dan 5,30% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp643.584.768.184,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 19

Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)- Non Fisik

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik- BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	6.955.050.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	10.387.646.000,00	10.419.722.000,00	100,31	9.333.279.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	721.000.000,00	1.011.250.000,00	140,26	951.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	1.381.590.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	522.770.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	9.767.132.492,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.136.408.439,00
DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	355.089.000,00	355.089.000,00	100,00	480.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.868.680.000,00	2.864.577.910,00	99,86	0,00
DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	435.202.500,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.537.040.000,00	6.537.040.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	566.670.000,00	531.258.250,00	93,75	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.830.457.000,00	2.356.927.195,00	83,27	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.696.754.000,00	7.082.299.164,00	92,02	0,00
Jumlah	**34.942.006.000,00**	**34.136.833.519,00**	**97,70**	**32.962.432.431,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghitungan alokasi Dana Bos Kabupaten/Kota diberikan kepada satuan Pendidikan dasar negeri dan satuan Pendidikan dasar swasta yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- BOS Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.955.050.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - BOS Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp6.955.050.000,00.
2. Penghitungan alokasi Dana TPG PNSD diberikan dengan memperhitungkan kurang salur dan perkiraan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya dengan melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – TPG PNSD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.419.722.000,00 atau 100,31% dari target pendapatan sebesar Rp10.387.646.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.086.443.000,00 atau 11,64% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–TPG PNSD pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp9.333.279.000,00.
3. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.011.250.000,00 atau 140,26%

dari target pendapatan sebesar Rp721.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp60.250.000,00 atau 6,34% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–Tamsil Guru PNSD pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp951.000.000,00.

4. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.381.590.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOP PAUD pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.381.590.000,00.

5. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOP Pendidikan Kesetaraan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp522.770.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOP Pendidikan Kesetaraan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp522.770.000,00.

6. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOKKB - BOK sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.767.132.492,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOKKB - BOK pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp9.767.132.492,00.

7. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOKKB-BOKB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.136.408.439,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–BOKKB-BOKB pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3.136.408.439,00.

8. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Fasilitasi Penanaman Modal sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp355.089.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp355.089.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp124.911.000,00 atau 26,02% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Fasilitasi Penanaman Modal pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp480.000.000,00.

9. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOKB-KB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.864.577.910,00 atau 99,86% dari target pendapatan sebesar Rp2.868.680.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.864.577.910,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOKB-KB pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00.

10. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp520.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp520.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp520.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00.

11. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp650.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp650.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp214.797.500,00 atau 49,36% dibandingkan dengan

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp435.202.500,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 36.**

12. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOS Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.537.040.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp6.537.040.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.537.040.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOS Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00.

13. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOS Kinerja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp390.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp390.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp390.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– BOSP-BOS Kinerja pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik Reguler dan DAK Non Fisik Kinerja dapat dilihat pada **Lampiran 37.**

14. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.328.670.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.328.670.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.328.670.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP PAUD Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 38.**

15. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp531.258.250,00 atau 93,75% dari target pendapatan sebesar Rp566.670.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp531.258.250,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00.

16. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp90.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp90.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp90.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik – BOP Kesetaraan Reguler dan DAK Non Fisik – BOP Kesetaraan Kinerja dapat dilihat pada **Lampiran 39.**

17. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.356.927.195,00 atau 83,27% dari target pendapatan sebesar Rp2.830.457.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.356.927.195,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 40.**

18. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOK-BOK Puskesmas sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.082.299.164,00 atau 92,02% dari target pendapatan sebesar Rp7.696.754.000,00. Realisasi tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp7.082.299.164,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik– Dana BOK-BOK Puskesmas pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 41.**

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Pendapatan Dana Desa merupakan bagian dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) yang berasal dari APBN berupa Transfer Dana Penyesuaian Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang alokasi dasarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.912.626.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp65.912.626.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp783.322.000,00 atau 1,20% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Desa pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp65.129.304.000,00.

5.1.1.2.2.2 Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 merupakan Dana Insentif Fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dibidang dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang mendukung kebijkan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Tahun 2024 berdasarkan PMK No.43 Tahun 2024 tentang pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memperoleh Alokasi Dana Insentif dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.314.714.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00% dari target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp11.314.714.000,00. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2024 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan karena dianggap telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria dan kategori yang telah ditentukan baik atas kinerja tahun sebelumnya maupun atas kinerja tahun berjalan yang menjadi syarat yang meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri serta percepatan belanja daerah.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pemerintah provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dengan angka persentase tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta pendapatan bantuan keuangan yang diterima pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya baik dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp19.824.761.091,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp15.890.907.057,00 atau 80,16% dari target yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Pajak sebesar Rp15.890.907.057,00 merupakan realisasi Dana Bagi Hasil Triwulan IV tahun sebelumnya yang baru ditransfer pada tahun 2024 dan realisasi Dana Bagi Hasil triwulan I sampai triwulan III tahun 2023. Rincian pendapatan transfer antar daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 20
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	80,16	17.295.757.943,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah	**19.824.761.091,00**	**15.890.907.057,00**	**80,16**	**22.295.757.943,00**

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dihitung berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Daerah setelah dikeluarkan Insentif dari hasil yang di setor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/155 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penetapan Pagu Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.824.761.091,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp15.890.907.057,00 atau 80,16% dari target yang dianggarkan atau mengalami penurunan sebesar Rp1.404.850.886,00 atau 8,12% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.295.757.943,00. Adapun rincian berdasarkan objek Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 21

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.901.864.599,00	1.864.991.953,00	98,06	1.860.457.594,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.641.192.505,00	3.062.147.555,00	115,94	2.559.444.336,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.347.704.497,00	8.865.668.535,00	94,84	9.041.686.913,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	261.712.868,00	17.683.122,00	6,76	176.878,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	5.672.286.622,00	2.080.415.892,00	36,68	3.833.992.222,00
Jumlah	**19.824.761.091,00**	**15.890.907.057,00**	**80,16**	**17.295.757.943,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.864.991.953,00 atau 98,06% dari target pendapatan sebesar Rp1.901.864.599,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.534.359,00 atau 0,24% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.860.457.594,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.864.991.953,00 berasal dari Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp371.242.223,00 dan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp1.493.749.730,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 42.**

2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.062.147.555,00 atau 115,94% dari target pendapatan sebesar Rp2.641.192.505,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp502.703.219,00 atau 19,64% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2.559.444.336,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3.062.147.555,00 berasal dari Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp645.736.511,00 dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp2.416.411.044,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 43.**

3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.865.668.535,00 atau 94,84% dari target pendapatan sebesar Rp9.347.704.497,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp176.018.378,00 atau 1,95% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp9.041.686.913,00. Penurunan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp8.865.668.535,00 berasal dari Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp2.420.019.577,00 dan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp6.445.648.958,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 44.**

4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.683.122,00 atau 6,76% dari target pendapatan sebesar Rp261.712.868,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.506.244,00 atau 9.897,36% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp176.878,00. Kenaikan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp17.683.122,00 berasal dari Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp7.393.759,00 dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp10.289.363,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dapat dilihat di **Lampiran 45.**

5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.080.415.892,00 atau 36,68% dari target pendapatan sebesar Rp5.672.286.622,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.753.576.330,00 atau 45,74% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3.833.992.222,00. Penurunan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp2.080.415.892,00 berasal dari Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp1.465.212.970,00 dan Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2024 sebesar

Rp615.202.922,00. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dapat dilihat di **Lampiran 46.**

Adapun Rincian Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berasal dari Pemerintah Provinsi Per Triwulan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 22

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024			Jumlah
	Triwulan IV (Rp)	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	(Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	371.242.223,00	768.087.653,00	664.380.918,00	61.281.159,00	1.864.991.953,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	645.736.511,00	1.250.189.123,00	1.125.104.936,00	41.166.985,00	3.062.147.555,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.420.019.577,00	2.131.747.125,00	2.052.021.852,00	2.261.879.981,00	8.865.668.535,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	7.393.759,00	228.695,00	10.060.468,00	0,00	17.683.122,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	1.485.212.970,00	615.202.922,00	0,00	0,00	2.080.415.892,00
Jumlah	**4.909.605.040,00**	**4.765.455.718,00**	**3.851.568.173,00**	**2.364.328.126,00**	**15.890.907.057,00**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.1.1.3.1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.317.974.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.923.744.739,00 atau 82,99% dari target yang dianggarkan atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.923.744.739,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 23

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2,317,974,000.00	1,923,744,739.00	82.99	0,00
Jumlah	**2,317,974,000.00**	**1,923,744,739.00**	82.99	**0,00**

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode Tahun Anggaran 2024 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 24

Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasi	389.285.857.099,00	368.675.973.509,00	94,71	335.460.562.320,00
2	Belanja Modal	212.468.226.590,00	202.033.467.599,00	95,09	179.029.544.924,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	66,07	90.000.000,00
4	Transfer	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.886.406.900,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	**706.370.894.989,00**	**674.402.736.118,00**	**95,47**	**616.466.514.144,00**

Belanja Daerah yang anggarannya ditetapkan senilai Rp706.370.894.989,00 tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp674.402.736.118,00 atau 95,47% lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp616.466.514.144,00 dengan kata lain telah terjadi peningkatan belanja daerah sebesar Rp57.936.221.974,00 atau naik 9,40% dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2023 pada rincian tabel berikut:

Tabel 5. 25

Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Pegawai	153.100.700.515,00	146.544.208.655,00	95,72	124.206.063.732,00
Belanja Barang dan Jasa	201.635.236.744,00	187.646.533.065,00	93,06	192.296.333.588,00
Belanja Hibah	30.246.300.000,00	30.188.210.759,00	99,81	16.565.135.000,00
Belanja Bantuan sosial	4.303.619.840,00	4.297.021.000,00	99,85	2.393.030.000,00
Jumlah	**389.285.857.099,00**	**368.675.973.509,00**	**94,71**	**335.460.562.320,00**

Tabel diatas mengungkapkan bahwa Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp389.285.857.099,00 direalisasikan sebesar Rp368.675.973.509,00 atau 94,71%. Sedangkan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 hanya senilai Rp335.460.562.320,00 atau belanja operasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp33.215.411.189,00 atau naik 9,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi disajikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun ini adalah senilai Rp146.544.208.655,00 atau sebesar 95,72% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai Rp153.100.700.515,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja pegawai hanya sebesar Rp124.206.063.732,00 Hal ini berarti realisasi Belanja

Pegawai Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp22.338.144.923,00 atau naik 17,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 47.**

Tabel 5. 26

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Gaji dan Tunjangan	117.236.633.344,00	112.126.922.636,00	95,64	90.304.334.784,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.443.304.822,00	9.251.847.152,00	97,97	10.559.163.555,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.285.159.349,00	17.165.366.101,00	93,88	15.387.941.700,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.565.500.000,00	7.517.157.696,00	99,36	7.484.524.387,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.103.000,00	166.408.670,00	97,83	165.048.586,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	316.506.400,00	79,13	305.052.750,00
Jumlah	**153.100.700.515,00**	**146.544.208.655,00**	**95,72**	**124.206.063.732,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp187.646.533.095,00 atau 93,06% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yakni sebesar Rp201.635.236.744,00. Sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp192.296.333.588,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih rendah Rp4.649.800.493,00 atau turun sebesar 2,42% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023. Dibandingkan dengan jenis belanja pegawai, belanja barang jasa memiliki jenis komponen yang lebih banyak dan diklasifikasi berdasarkan beberapa jenis. Rincian Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 48.**

Tabel 5. 27

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA				
Belanja Barang	40.438.440.868,00	38.267.802.667,00	94,63	39.931.573.701,00
Belanja Jasa	56.582.355.524,00	52.215.657.666,00	92,28	59.561.014.494,00
Belanja Pemeliharaan	15.681.044.041,00	15.243.062.039,00	97,21	16.462.781.175,00
Belanja Perjalanan Dinas	69.818.199.061,00	63.663.262.229,00	91,18	63.692.781.768,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.703.220.000,00	5.933.090.000,00	88,51	7.194.529.500,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	100,00	5.453.652.950,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	98,71	0,00
Jumlah	**201.635.236.744,00**	**187.646.533.095,00**	93,06	**192.296.333.588,00**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2024 mengalokasikan anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/kelompok masyarakat senilai Rp30.246.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.188.210.759,00 atau 99,81% di 5 (Lima) OPD yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berupa hibah uang yang diserahkan kepada Lembaga KONI, Karang Taruna dan PRAMUKA, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah uang kepada partai politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kepada Palang Merah Indonesia, dan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini menunjukkan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi Rp13.623.075.759,00 atau naik sebesar 82,24% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.565.135.000,00. Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Rincian Penerima Hibah dapat dilihat pada **Lampiran 49.**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode Tahun Anggaran 2024 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.297.021.000,00 atau 99,85% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2024 sebesar Rp4.303.619.840,00. Hal ini menunjukkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi Rp1.903.991.000,00 atau naik sebesar 79,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.393.030.000,00. Rincian Realisasi Belanja Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 28

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024

OPD	Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.180.000.000,00	0,00	1.180.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Dinas Perikanan	0,00	2.527.021.000,00	2.527.021.000,00
Dinas Pertanian	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah	**1.270.000.000,00**	**3.027.021.000,00**	**4.297.021.000,00**

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp1.275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.270.000.000,00 atau sebesar 99,61% di 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman berupa Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp1.180.000.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu untuk kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sebesar Rp20.000.000,00 dan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat berupa Bantuan Uang yang diserahkan untuk kegiatan pelayanan ibadah haji sebesar Rp70.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 29

Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

OPD	URAIAN	NILAI (Rp)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Langara Indah Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 70.3/SP3-SWK/DPKP/2024 Tahun Anggaran 2024	220.000.000,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara dan Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 70.9/SP3-SWK/DPKP/2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman T.A 2024	200.000.000,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sainoa Indah dan Desa Nambo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 70.5/SP3-SWK/DPKP/2024 Tahun Anggaran 2024	200.000.000,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Watuondo Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 70.4/SPK-SWK/DPKP/2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024	280.000.000,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Mata Langara, Desa Lamoluo, Desa Wawolaa Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024	280.000.000,00
		1.180.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Bayar Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Uang Pembinaan)Keperluan Penyelenggaraan Kegiatan PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Sesuai Nota Pembelian Terlampir	20.000.000,00
		20.000.000,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bayar Belanja Uang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA sesuai Bukti terlampir	70.000.000,00
		70.000.000,00
JUMLAH		1.270.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.028.619.840,00 terealisasi sebesar Rp3.027.021.000,00 atau sebesar 99,95%, di 2 (dua) OPD yaitu Dinas Perikanan dengan bantuan yang diberikan kepada kelompok Masyarakat yaitu alat bantu penangkap ikan, kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, Bubu kepiting bakau dan pembuatan demplot tambak yang di harapkan dengan bantuan yang di berikan bisa membantu kesejahteraan Masyarakat dan pada Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis skala rumah tangga atau pekarangan guna peningkatkan kesahteraan masyarakat terealisasi sebesar Rp500.000.000,00. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 50.**

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah yang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan nilai realisasi sebesar Rp202.033.467.599,00 atau 95,09% dari total yang dianggarkan sebesar Rp212.468.226.590,00. Realisasi Belanja Modal tahun 2024 naik 12,85% dari realisasi belanja modal tahun 2023 yakni sebesar Rp179.029.544.924,00. Belanja Modal Tahun 2024 juga

memberikan kontribusi sebesar 29,96% terhadap Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 30

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Belanja Modal	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73	4.091.525.640,00
Belanja Peralatan dan Mesin	34.426.116.413,00	33.676.841.899,00	97,82	33.886.037.488,00
Belanja Gedung dan Bangunan	97.827.899.937,00	92.894.711.664,00	94,96	60.907.127.172,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.600.987.940,00	61.587.257.321,00	93,88	73.036.471.874,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.565.834.900,00	4.559.190.025,00	99,85	4.262.828.750,00
Belanja Aset Lainnya	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	93,70	2.845.554.000,00
Jumlah	**212.468.226.590,00**	**202.033.467.599,00**	**95,09**	**179.029.544.924,00**

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp202.033.467.599,00 atau 95,09% dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2024 senilai Rp212.468.226.590,00 Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.003.922.675,00 atau naik 12,85% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp179.029.544.924,00. Realisasi Belanja Modal TA 2024 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah per jenis belanja dapat dilihat pada **Lampiran 51, 52, 53, 54, 55, dan 56.**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp991.052.110,00 atau 66,07% dari total anggaran. Realisasi ini meningkat sebesar Rp901.052.110,00 atau naik 1.001,17% dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp90.000.000,00. Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2024 yang dipergunakan untuk Belanja Tidak Terduga Untuk Warga dalam menangani bencana alam, dan kebutuhan pangan. Rincian Belanja Tidak Terduga pada tabel berikut :

Tabel 5. 31

Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Per OPD Tahun Anggaran 2024

OPD	URAIAN	NILAI SP2D (Rp)
Badan Keuangan Daerah	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024	506.015.750,00
	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tak Terduga Tagihan Sewa Gedung Menara Global , Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Nusansa Putra Perkasa	433.636.360,00
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Labeau Kec. Wawoni Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Haruna Rasyid Mouti.	5.000.000,00
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Dongkalaea Kec. Wawoni Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Abdullah.	1.400.000,00

OPD	URAIAN	NILAI SP2D (Rp)
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Dongkalaea Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Sapria.	15.000.000,00
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Mosolo Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama La Dunca	5.000.000,00
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Lebo Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama Tipo	15.000.000,00
	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Kencang, Desa Munse Indah Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama Nurhayani	10.000.000,00
JUMLAH		991.052.110,00

Tabel 5. 32

Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

No.	No. Bukti SP2D	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1.	74.12/04.0/000019/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/M/3/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024	506.015.750,00
2.	74.12/04.0/000050/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/M/5/2024	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tak Terduga Tagihan Sewa Gedung Menara Global , Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Nuansa Putra Perkasa	433.636.360,00
3.	74.12/04.0/000132/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/M/6/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Haruna Rasyid Mouti.	5.000.000,00
4.	74.12/04.0/000131/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/M/6/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Dongkalaea Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Abdullah.	1.400.000,00
5.	74.12/04.0/000133/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/M/6/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Dongkalaea Kec. Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 atas nama Sapria.	15.000.000,00
6.	74.12/04.0/000454/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/PR/12/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Mosolo Kec. Wawonii Tenggara Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama La Dunca	5.000.000,00
7.	74.12/04.0/000460/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/PR/12/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Lebo Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama Tipo	15.000.000,00
8.	74.12/04.0/000461/LS/5.02.0.0 0.0.00.01.0000/PR/12/2024	Permintaan Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Kencang, Desa Munse Indah Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024, Atas Nama Nurhayani	10.000.000,00
JUMLAH			991.052.110,00

5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2024 adalah sebesar Rp102.702.242.900,00 atau 99,60% dari anggaran APBD Perubahan TA 2024 senilai Rp103.116.811.300,00. Realisasi belanja bantuan keuangan ini berasal dari realisasi belanja Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp65.912.626.000,00 dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp36.789.616.900,00. Jika dibandingkan realisasi

Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2023 sebesar Rp101.886.406.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp815.836.000,00 atau 0,80% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 33

Rincian Transfer/ Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2024

Transfer	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60	101.886.406.900,00
Jumlah	**103.116.811.300,00**	**102.702.242.900,00**	**99,60**	**101.886.406.900,00**

5.1.2.4.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Desa merupakan transfer bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2024 senilai Rp102.702.242.900,00 atau 99,60% dari anggaran APBD Perubahan TA 2024 senilai Rp103.116.811.300,00. Realisasi tersebut terdiri Alokasi Dana Desa senilai Rp36.789.616.900,00 yang berasal dari APBD dan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat senilai Rp65.912.626.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan Ke Desa baik yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD maupun dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp815.836.000,00 atau 0,80% dibandingkan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 34

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2024

No.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Transfer Dana Desa Tahap I (Satu) dan Tahap II (Dua)	31.852.500.400,00
2.	Transfer Dana Desa Tahap II (Dua)	34.060.125.600,00
3.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap I dan II T.A. 2024	18.186.928.830,00
4.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Tahap III dan IV T.A. 2024	18.602.688.070,00
	Jumlah	**102.702.242.900,00**

Rincian realisasi transfer bantuan keuangan ke desa Tahun 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 57.**

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 35

Rincian Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00

No.	Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		2.500.000.000,00
	Jumlah	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100,00**	**113.081.819.970,00**

Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, pinjaman dalam negeri, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp59.884.831.464,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2024 sebesar Rp59.884.731.412,00. Realisasi ini turun sebesar Rp55.696.988.506,00 atau 48,19% dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 36

Rincian Realisasi Penerimaan PembiayaanTahun Anggaran 2024

No.	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Penggunaan SILPA	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00
	Jumlah	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100,00**	**115.581.819.970,00**

5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 dan koreksi atas Kas BOSP sebesar Rp100.052,00 atau 100% dari target anggaran sebesar Rp59.884.731.412,00. Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 48,19% atau Rp55.696.988.506,00 dari realisasi Penggunaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp643.585.044.876,00 sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp674.402.736.118,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp30.817.691.242,00 sehingga untuk menutupi defisit tersebut ditambah dengan penerimaan SILPA Tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 dan Koreksi atas Kas BOSP sebesar Rp100.052,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp29.067.140.222,00. Rincian Sisa Lebih Pembiayan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. 37

Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Perhitungan / APBD	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Daerah	646.486.163.577,00	643.585.044.876,00	99,55	563.269.425.586,00
2	Belanja dan Transfer	706.370.894.989,00	674.402.736.118,00	95,47	616.466.514.144,00
3	Surplus/(Defisit)	(59.884.731.412,00)	(30.817.691.242,00)	51,46	(53.197.088.558,00)
4	Penerimaan Pembiayaan	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	115.581.819.970,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
6	Pembiayaan Netto	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100,00	113.081.819.970,00
	SILPA / (SIKPA)	**0,00**	**29.067.140.222,00**	**0,00**	**59.884.731.412,00**

SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.067.140.222,00 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 5. 38

Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kas Daerah	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	276.692,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.594.529,00	0,00
4	Kas di Bendahara BOSP	197.389,00	97.337,00
5	Kas di Bendahara FKTP	3.715.995,00	5.754.217,00
6	Kas Lainnya	9.065.503,00	315.315,00
7	Setara Kas	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
8	Kas di Bendahara BOK	171.376.055,00	614.454.636,00
9	Utang PFK	(9.065.503,00)	(315.315,00)
Jumlah		**29.067.140.222,00**	**59.884.731.412,00**

SiLPA tahun 2024 sebesar Rp29.067.140.222,00 termasuk didalamnya Kas di Kas Daerah sebesar Rp8.889.979.562,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp276.692,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.594.529,00, Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp197.389,00, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp3.715.995,00, Kas Lainnya sebesar Rp9.065.503,00 serta penempatan uang Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Kas di Bendahara BOK sebesar Rp171.376.055,00. Realisasi Rincian SiLPA berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 39

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	SiLPA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.270.561.048,00	16.220.863.618,00	1.049.697.430,00

No	Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	SiLPA
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Dana Alokasi Umum (DAU) murni	239.512.024.009,00	226.815.627.111,00	12.696.396.898,00
3	DAU Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-
4	DAU PPPK	12.449.256.827,00	12.449.256.827,00	-
5	DAU Pendidikan	42.246.696.000,00	42.246.696.000,00	-
6	DAU Kesehatan	17.440.382.000,00	17.440.382.000,00	-
7	DAU PU	18.780.516.000,00	18.780.516.000,00	-
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	87.204.773.480,00	81.346.181.868,00	5.858.591.612,00
9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.102.010.197,00	73.996.538.239,00	4.105.471.958,00
10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.136.833.519,00	32.717.521.254,00	1.419.312.265,00
11	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	-
12	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	-
13	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	15.890.907.057,00	11.957.053.023,00	3.933.854.034,00
14	Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.923.744.739,00	1.920.028.766,00	3.715.973,00
15	Silpa	59.884.831.464,00	59.884.731.412,00	100.052,00
JUMLAH		703.469.499.596,00	674.402.736.118,00	29.067.140.222,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ini nantinya akan dipergunakan sebagai penerimaan pendapatan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Rincian SiLPA dapat dilihat pada **Lampiran 58.**

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp59.884.731.412,00 turun sebesar Rp55.697.088.558,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan penerimaan pembiayaan atas penggunaan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00 yang dipakai untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp59.884.731.412,00.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada tahun 2024 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp59.884.831.464,00 atau turun sebesar Rp55.696.988.506,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp115.581.819.970,00.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp29.067.140.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.817.591.190,00 atau turun 51,46% dari tahun 2023 sebesar Rp59.884.731.412,00

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 senilai Rp29.067.140.222,00 terdiri dari:

Tabel 5. 40

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024

NO	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	Realisasi Pendapatan	643.585.044.876,00	563.269.425.586,00	14,26
2	Realisasi Belanja	(571.700.493.218,00)	(514.580.107.244,00)	11,10
3	Transfer	(102.702.242.900,00)	(101.886.406.900,00)	0,80
4	Penerimaan Pembiayaan	59.884.831.464,00	115.581.819.970,00	(48,19)
5	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**29.067.140.222,00**	**69.884.731.412,00**	(51,46)

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca menjelaskan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan serta pengungkapan informasi yang diharuskan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1. Aset

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Total Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.222.635.736.502,78 menurun sebesar Rp35.943.969.797,87 atau 2,86% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.258.579.706.300,65. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 41

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Aset Lancar	39.966.740.065,92	72.159.083.272,43	(32.192.343.206,51)	(44,61)
Investasi Jangka Panjang	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap	1.134.170.369.624,20	1.104.370.384.638,78	29.799.984.985,42	2,70
Aset Lainnya	35.998.626.812,66	69.550.238.389,44	(33.551.611.576,78)	(48,24)
Jumlah	**1.222.635.736.502,78**	**1.258.579.706.300,65**	**(35.943.969.797,87)**	**(2,86)**

Berdasarkan tabel diatas diketahui penurunan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebesar Rp35.943.969.797,87 atau turun 2,86% dibandingkan tahun 2023. Hal ini di tandai dengan menurunnya jumlah aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.192.343.206,51, Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp29.799.984.985,42 dan Aset Lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp33.551.611.576,78.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp39.966.740.065,92 dan Rp72.159.083.272,43, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 42
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024

Uraian	Aset Lancar Per 31 Desember 2024 (Rp)	Aset Lancar Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00	(374.445.460,00)	(4,04)
Kas di Bendahara Penerimaan	276.692,00	0,00	276.692,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.594.529,00	0,00	1.594.529,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	3.715.995,00	5.754.217,00	(2.038.222,00)	(35,42)
Kas Lainnya	9.065.503,00	315.315,00	8.750.188,00	2.775,06
Setara Kas	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(60,00)
Kas Dana BOSP	197.389,00	97.337,00	100.052,00	102,79
Kas Dana BOK Puskesmas	171.376.055,00	614.454.836,00	(443.078.781,00)	(72,11)
Piutang Pajak Daerah	884.800.296,74	1.085.221.240,74	(200.420.944,00)	(18,47)
Piutang Retribusi Daerah	395.405.900,00	356.745.500,00	38.660.400,00	10,84
Piutang Transfer	4.062.505.991,00	3.444.392.070,00	618.113.921,00	17,95
Piutang Lainnya	514.790.600,00	5.100.000,00	509.690.600,00	9.993,93
Penyisihan Piutang	(609.808.165,99)	(801.267.022,43)	191.458.856,44	(23,89)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.333.333,33	(3.333.333,33)	(100,00)
Persediaan	5.642.839.719,17	8.180.511.423,79	(2.537.671.704,62)	(31,02)
Jumlah	**39.966.740.065,92**	**72.159.083.272,43**	**(32.192.343.206,51)**	**(44,61)**

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp32.192.343.206,51 atau 44,61% yang salah satunya disebabkan adanya penurunan nilai Kas yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan akibat dari meningkatnya realisasi Belanja atau meningkatnya serapan anggaran tahun 2024.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Konawe Kepulauan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2024 pada Neraca sebesar Rp8.889.979.562,00. Dalam saldo kas tersebut antara lain terdapat sisa dari penerimaan dana yang diterima Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 belum tercalisasi sesuai target. Sisa penerimaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum baik DAU *Block Grant* maupun DAU *Spesifie Grant*, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik serta Dana Bagi Hasil Pusat maupun Dana Bagi Hasil Provinsi.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	276.692,00	0,00

Nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp276.692,00 yang merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024 ke Kas Daerah.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran OPD yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali Ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	1.594.529,00	0,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.594.529,00, yang merupakan sisa TU yang belum di setorkan per 31 Desember 2024. Sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 43
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nomor SP2D	Nilai (Rp)	Tanggal Setor
1	Satuan Polisi Pamong Praja	74.12/04.0/000058/TU/1.05.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	400.500,00	13 Januari 2025
2	Dinas Penanaman Modal PTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.12/04.0/000039/TU/2.18.2.07.3.32.01.0000/PR/10/2024	201.445,00	9 Januari 2025
3	Dinas Pertanian	74.12/04.0/000117/TU/3.27.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	64.609,00	10 Januari 2025
4	Inspektorat Daerah	74.12/04.0/000073/TU/6.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	927.975,00	10 Januari 2025
Jumlah			1.594.529,00	

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BOSP

Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOSP yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS pada satuan pendidikan.

Kas di Bendahara BOSP	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	197.389,00	97.337,00

Saldo kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp197.389,00. Saldo kas tersebut merupakan saldo dana BOSP Pada Sekolah SD Negeri 2 Wawonii Barat sebesar Rp352,00, SD Negeri 2 Wawonii Tenggara sebesar Rp161,00, SMP Negeri 2 Wawonii Selatan sebesar Rp53,00, SMP Negeri 2 Wawonii Tenggara sebesar Rp891,00, SMP Negeri 1 Wawonii Timur Laut sebesar Rp338,00, SMP Negeri 1 Wawonii Utara sebesar Rp7.361,00, SMP Negeri 3 Wawonii Utara sebesar Rp88.233,00, TK Negeri Munse sebesar Rp100.000,00 serta adanya koreksi Kas pada Sekolah SD Negeri 6 Wawonii Tengah sebesar Rp1,00.

Adapun Rincian Realisasi Alokasi Penerimaan dan Belanja Dana Bos per masing-masing unit sekolah Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 59.**

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP-JKN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	3.715.995,00	5.754.217,00

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama – Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.715.995,00 dan Rp5.754.217,00. Sisa Kas sebesar Rp3.715.995,00 terdapat pada Puskesmas Roko-Roko sebesar Rp3.715.995,00. Perhitungan Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 selengkapnya disajikan pada **Lampiran 60.**

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	9.065.503,00	315.315,00

Kas Lainnya adalah saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.065.503,00 merupakan *outstanding* pajak yang tidak disetor per 31 Desember 2024 terdapat Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.497.875,00 yang di setorkan ke Kas Negara tanggal 14 Januari 2025, Puskesmas Bobolio Sebesar Rp8.800,00 yang di setorkan ke Kas Negara di tanggal 10 Februari 2025 dan Bagian Organisasi sebesar Rp1.558.828,00 yang di setorkan ke Kas Negara di tanggal 12 Bulan Februari 2025.

5.3.1.1.7 Setara Kas

Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Penempatan Dana di Bank Sultra Capem Wawonii dalam bentuk Deposito Berjangka sampai 31 Desember 2023 namun apabila Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka tidak akan dikenakan penalti/denda serta tidak akan diberikan bunga harian. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Pihak Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii Nomor 900/027.A/BKD/2023 dan Nomor 006.A/PKS/DIR.BPD/II/2023 dengan total sebesar Rp50.000.000.000,00 yang tersimpan pada 5 (lima) Rekening Deposito masing- masing sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dilakukan melalui proses pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito serta pemindah bukuan pencairan dari Rekening Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah dengan memberikan Bunga Deposito sesuai tanggal penempatan Deposito berdasarkan ketentuan suku bunga yang berlaku. Adapun bunga yang diberikan oleh Bank Sultra sebesar 0,2% atas penempatan Deposito tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat tambahan PAD berupa bunga Deposito sebesar Rp100.000.000,00 setiap bulannya. Namun sejak bulan Oktober tahun 2023 bunga yang diberikan atas penempatan Deposito tersebut naik sebesar 0,25% sehubungan dengan kenaikan suku bunga deposito sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat tambahan bunga sebesar Rp125.000.000,00 perbulan atas kepemilikan 5 (lima) Rekening Deposito.

Tahun 2024 Deposito berjangka dilakukan pencairan sebesar Rp30.000.000.000,00, sehingga per tanggal 31 Desember 2024 deposito yang ada sebesar Rp20.000.000.000,00.

Tabel 5. 44
Rincian Mutasi Setara Kas per 31 Desember 2024

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2024	50.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah		50.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00

5.3.1.1.8 Kas di Bendahara BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	171.376.055,00	614.454.836,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan adalah Dana Bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan oleh Puskesmas serta dilakukan Pengesahan dan Pencatatan oleh BUD. Saldo Kas di BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp171.376.055,00 dan Rp614.454.836,00. Sisa Kas sebesar Rp171.376.055,00 terdapat pada seluruh puskesmas yang mana sisa Dana BOK tersebut akan digunakan oleh Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya. Rincian realisasi penggunaan Dana BOK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 45

Rincian Realisasi Dana BOK Tahun 2024

No.	Puskesmas	Anggaran	Realisasi	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Langara	1.096.542.000,00	1.067.065.234,00	29.476.766,00
2	Puskesmas Lampeapi	827.396.500,00	817.839.772,00	9.556.728,00
3	Puskesmas Lansilowo	808.079.600,00	783.889.817,00	24.189.683,00
4	Puskesmas Ladianta	808.045.000,00	772.138.513,00	35.906.487,00
5	Puskesmas Bobolio	962.291.500,00	947.583.541,00	14.707.959,00
6	Puskesmas Waworete	808.010.000,00	782.760.323,00	25.249.677,00
7	Puskesmas Polara	770.904.500,00	757.221.097,00	13.683.403,00
8	Puskesmas Roko-Roko	769.640.000,00	769.291.065,00	348.935,00
9	Puskesmas Waworope	845.845.000,00	827.588.583,00	18.256.417,00
Jumlah		**7.696.754.000,00**	**7.525.377.945,00**	**171.376.055,00**

Perhitungan Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 selengkapnya disajikan pada **Lampiran 61.**

5.3.1.1.9 Piutang

Jumlah Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.857.502.787,74 dan Rp4.891.458.810,74. Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.857.502.787,74 terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp1.540.000,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.759.800,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp95.939.972,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp371.614.448,74, Piutang Pajak PBB sebesar Rp413.946.076,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Pendapatan Non Kapitasi JKN pada FKTP di RSUD dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp395.405.900,00, Piutang Transfer sebesar Rp4.062.505.991,00 serta Piutang Lainnya sebesar Rp514.790.600,00. Berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), jumlah piutang netto adalah sebesar Rp5.247.694.621,75 berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.857.502.787,74 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp609.808.165,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 46

Rincian Piutang per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Piutang Per 31 Desember 2024	Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Piutang Netto
1	Piutang Pajak Daerah	884.800.296,74	1.085.221.240,74	(506.817.063,02)	377.983.233,72
2	Piutang Retribusi Daerah	395.405.900,00	356.745.500,00	(26.609.513,00)	368.796.387,00
4	Piutang Transfer	4.062.505.991,00	3.444.392.070,00	(20.312.529,97)	4.042.193.461,03
5	Piutang Lainnya	514.790.600,00	5.100.000,00	(56.069.060,00)	458.721.540,00
Jumlah		**5.857.502.787,74**	**4.891.458.810,74**	**(609.808.165,99)**	**5.247.694.621,75**

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

laporan keuangan. Sesuai kewenangannya ada perbedaan jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dan merupakan kewajiban pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun oleh Wajib Pajak belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp884.800.296,74 mengalami penurunan sebesar Rp200.420.944,00 atau 18,47% dari jumlah piutang pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp1.085.221.240,74. Nilai Piutang per 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value)* sebesar Rp377.983.233,72 berasal dari nilai bruto sebesar Rp884.800.296,74 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp506.817.063,02 atas piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2024 sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Piutang yang terdapat dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 41 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lampiran IX bahwa perhitungan penyisihan Piutang Pajak sebagai berikut :

- Lancar 0,5% (Usia Piutang < 1 Tahun)	Rp	954.511,63
- Kurang Lancar 10% (Usia piutang 1 s/d 2 Tahun)	Rp	8.756.884,20
- Diragukan 50% (Usia Piutang 2 s/d 5 Tahun)	Rp	109.223.461,48
- Macet 100% (Usia Piutang> 5 Tahun)	Rp	387.882.205,71
Jumlah	**Rp**	**506.817.063,02**

Penyisihan piutang pajak daerah tahun 2024 yaitu sebesar Rp506.817.063,20. Adapun rincian piutang pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 5. 47

Piutang Pajak per 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang Pajak	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) Tahun 2024 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(3-4)*
1.	Piutang Pajak Hotel	1.540.000,00	(17.200,00)	1.522.800,00
2.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.759.800,00	(161.682,50)	1.598.117,50
3.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	371.614.448,74	(252.220.078,80)	119.394.369,94
4.	Piutang PBBP2	413.946.076,00	(253.938.401,86)	160.007.674,14
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	95.939.972,00	(479.699,86)	95.460.272,14
Jumlah		**884.800.296,74**	**(506.817.063,02)**	**377.983.233,72**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp884.800.296,74 terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp1.540.000,00, Piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.759.800,00 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp371.614.448,74, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp413.946.076,00 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp95.939.972,00 dengan rincian mutasi piutang pajak daerah adalah sebagai berkut :

Tabel 5. 48

Rincian Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pajak Hotel	260.000,00	1.440.000,00	160.000,00	1.540.000,00
2	Piutang Pajak PMbL	606.087.760,74	42.654.238,00	277.127.550,00	371.614.448,74
3	Piutang Pajak PBB	387.402.824,00	50.717.616,00	24.174.364,00	413.946.076,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	89.772.056,00	95.939.972	89.772.056,00	95.939.972,00
5	Piutang Pajak Restoran	1.699.600,00	150.500,00	89.300,00	1.760.800,00
Jumlah		1.085.221.240,74	190.902.326,00	391.323.270,00	884.800.296,74

5.3.1.1.9.1. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	1.540.000,00	260.000,00

Piutang Pajak Hotel merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Hotel Bulan Desember Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Piutang Pajak Hotel yang tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.540.000,00 dengan nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp17.200,00, rincian pada tabel berikut:

Saldo awal (31 Desember 2023)	Rp 260.000,00
Mutasi debet	Rp 1.440.000,00
Mutasi kredit	Rp 160.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp 1.540.000,00**

Mutasi debet sebesar Rp1.440.000,00 merupakan piutang pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan akhir tahun 2024 belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak. Mutasi kredit sebesar Rp160.000,00 merupakan pelunasan piutang pajak hotel pada tahun 2024 oleh debitur. Rincian Piutang Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tiap-tiap tahun per 31 Desember 2024, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 49

Rincian Mutasi Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2024	260.000,00	1.440.000,00	160.000,00	1.540.000,00
Jumlah		260.000,00	1.440.000,00	160.000,00	1.540.000,00

5.3.1.1.9.2. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	371.614.448,74	**606.087.760,74**

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp371.614.448,74 dan Rp606.087.760,74. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2024, rincian pada tabel berikut :

Saldo awal (31 Desember 2023)	Rp606.087.760,74
Mutasi debet	Rp 42.654.238.00
Mutasi kredit	Rp277.127.550,00
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp371.614.448,74**

Mutasi debet sebesar Rp42.654.238,00 merupakan piutang pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan akhir tahun 2024 belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak.

Mutasi kredit sebesar Rp277.127.550,00 merupakan pelunasan piutang pajak mineral bukan logam pada tahun 2024 oleh debitur dengan rincian penyetoran sebagaimana pada **Lampiran 62.**

Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tiap-tiap tahun per 31 Desember 2024, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 50
Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	*2*	*3*
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.060,00
2	Tunggakan Pajak MineralBukan Logam dan Batuan Tahun 2015	41.358.607,74
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	1.220.032,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	104.697.930,00
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	26.660.469,00
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024	42.654.238,00
	Jumlah	**371.614.448,74**

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 telah melakukan penyisihan terhadap piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat tertagih, sehingga saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 51

Rincian Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 Netto
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.060,00	(129.548.060,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak MineralBukan Logam dan Batuan Tahun 2015	41.358.607,74	(41.358.607,74)	0,00
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00	(25.475.112,00)	0,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	1.220.032,00	(610.016,00)	610.016,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	104.697.930,00	(52.348.965,00)	52.348.965,00
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	26.660.469,00	(2.666.046,90)	23.994.422,10
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024	42.654.238,00	(213.271,19)	42.440.966,81
Jumlah		**371.614.448,74**	**(252.220.078,83)**	**119.394.369,91**

Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat ditagih per 31 Desember 2024 dapat dilihat lebih lengkap pada **Lampiran 63.**

Melihat data pajak mineral bukan logam seperti yang disajikan pada tabel piutang pajak mineral bukan logam dan batuan diatas, diakui dari tahun ke tahun mengalami penurunan piutang namun demikian terhadap piutang tahun tahun sebelumnya ada yang tidak mengalami perubahan baik perubahan karena koreksi ataupun pelunasan oleh debitur, walaupun upaya penagihan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemotongan terhadap tagihan debitur secara langsung oleh BUD.

5.3.1.1.9.3 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	413.946.076,00	**387.402.824,00**

Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp413.946.076,00 dan Rp387.402.824,00. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp413.946.076,00 merupakan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Terutang namun sampai akhir tahun 2024 belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak.

Rincian mutasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal (31 Desember 2023)	Rp 387.402.824,00
Mutasi debet	Rp 50.717.616,00
Mutasi kredit	Rp 24.174.364,00
Saldo per 31 Desember 2024	**Rp 413.946.076,00**

Mutasi debet sebesar Rp50.717.616,00 merupakan piutang pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan aplikasi SIP PBB yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak terutang tahun 2024 namun belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak sampai akhir tahun 2024.

Mutasi kredit sebesar Rp24.174.364,00 merupakan pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2024 yang merupakan pendapatan sesuai STS Tahun 2024 pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 64.**

Pemerintah Kabupaten Konawe dalam implementasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah menggunakan metode pembayaran secara non tunai dengan aplikasi yang disediakan oleh PT. Lintas Usaha Sukses yaitu Ependa dan Espay-pos dalam bentuk kanal Qris untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan digitalisasi daerah. Sedangkan dalam penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), rincian lebih lengkap tentang informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan rincian per debitur dapat dilihat pada SIP-PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 untuk tiap-tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 52

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Netto Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3
1	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	50.824.732,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	49.526.636,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	57.103.022,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	34.046.036,00
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	31.051.780,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020	24.660.141,00
7	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	56.787.040,00
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	31.986.339,00
9	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023	27.212.734,00
10	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024	50.717.616,00
	Jumlah	**413.946.076,00**

Penyisihan terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang kemungkinan tidak dapat tertagih telah diperhitungkan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga saldo piutang pajak PBB-P2 netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 53

Rincian Saldo Piutang PBB-P2 Netto Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyisihan Piutang tak tertagih	Saldo Piutang Pajak Daerah Netto Per 31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tunggakan Pajak Bumi dan BangunanTahun 2015	50.824.732,00	(50.824.732,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan BangunanTahun 2016	49.526.636,00	(49.526.636,00)	0,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan BangunanTahun 2017	57.103.022,00	(57.103.022,00)	0,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2018	34.046.036,00	(34.046.036,00)	0,00
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2019	31.051.780,00	(15.525.890,00)	15.525.890,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020	24.690.141,00	(12.345.070,50)	12.345.070,50
7	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2021	56.787.040,00	(28.393.520,00)	28.393.520,00
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2022	31.986.339,00	(3.198.633,88)	28.787.705,12
9	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2023	27.212.734,00	(2.721.273,40)	24.491.460,60
10	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan BangunanTahun 2023	50.717.616,00	(253.588,08)	50.464.027,92
	Jumlah	**413.946.076,00**	**(253.938.401,86)**	**160.007.674,14**

Rincian perhitungan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang tidak tertagih per 31 Desember 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 65.**

5.3.1.1.9.4 Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Piutang Pajak PPJU	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	95.939.972,00	**89.772.056,00**

Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Bulan Desember Tahun 2024 oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sultra Area Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp95.939.972,00 namun belum disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga dikenakan penyisihan 0,5% dari nilai piutangnya sebesar Rp479.699,86 dikarenakan masih tergolong piutang lancar dan telah disetorkan di Kas Daerah pada bulan Januari 2024.

Tabel 5. 54

Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024(Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2024	89.772.056,00	95.939.972,00	89.772.056,00	95.939.972,00
Jumlah		**89.772.056,00**	**95.939.972,00**	**89.772.056,00**	**95.939.972,00**

5.3.1.1.9.5 Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	1.759.800,00	1.698.600,00

Piutang Pajak Restoran merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Restoran Bulan Desember Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Piutang Pajak Restoran yang tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.759.800,00 dengan nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp161.682,50.

Tabel 5. 55

Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024

No	Tahun	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2024	1.698.600,00	150.500,00	89.300,00	1.759.800,00
Jumlah		1.698.600,00	150.500,00	89.300,00	1.759.800,00

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	395.405.900,00	356.745.500,00

Jumlah Piutang Pajak Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp395.405.900,00 dan Rp356.745.500,00. Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 terdiri atas Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD sebesar Rp 382.154.600,00 yang merupakan Pendapatan atas Klaim BPJS terhadap Pelayanan Rumah Sakit Bulan Agustus 2024 sebesar Rp143.494.500,00, Bulan Oktober 2024 sebesar Rp115.794.800,00 serta Bulan November 2024 sebesar Rp122.865.300,00 serta Piutang Pendapatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.251.300,00. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 56

Rincian Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	122.865.300,00	-614.326,50	Lancar
2.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	259.289.300,00	-25.928.930,00	Kurang Lancar
3.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinas Kesehatan	13.251.300,00	-66.256,50	Lancar
Jumlah		395.405.900,00	-26.609.513,00	

Tabel 5. 57
Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	216.647.100,00	382.154.600,00	216.647.100,00	382.154.600,00
2	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinas Kesehatan	23.098.400,00	13.251.300,00	23.098.400,00	13.251.300,00
Jumlah		239.745.500,00	395.405.900,00	239.745.500,00	395.405.900,00

Pengurangan sebesar Rp239.745.500,00 merupakan pelunasan piutang retribusi untuk Tahun 2023 yang dibayarkan di Tahun 2024. Sedangkan penambahannya sebesar Rp395.405.900,00 merupakan penambahan piutang Tahun 2024.

5.3.1.1.12 Piutang Transfer

Piutang Transfer	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	4.062.505.991,00	3.444.392.070,00

Jumlah Piutang Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.062.505.991,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp3.444.392.070,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 618.113.921,00.

5.3.1.1.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	514.790.600,00	5.100.000,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 514.790.600,00 dan Rp5.100.000,00. Piutang Lainnya sebesar Rp514.790.600 terdiri atas piutang kelebihan pembayaran gaji pensiun Tahun 2019 berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) namun masih menerima pembayaran gaji sebesar Rp5.100.000,00. Piutang ini masih tercatat sebagai piutang lainnya dikarenakan sampai akhir tahun 2024 belum ada pengembalian ke kas daerah dari yang bersangkutan sehingga dicatat sebagai piutang dengan kategori macet dan dikenakan penyisihan sebesar 100% serta piutang atas pengembalian temuan kekurangan volume (kurvol) sebesar Rp509.690.600,00 yang kategorinya kurang lancar dan dikenakan penyisihan sebesar 10%. Rincian Piutang dan Penyisihannya dapat dilihat pada tabel **Lampiran 66.**

Tabel 5. 58
Rincian Nilai Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	KualitasPiutang
1	Piutang Lainnya	5.100.000,00	(5.100.000,00)	Macet
		509.690.600,00	(50.969.060,00)	Kurang Lancar
Jumlah		514.790.600,00	(56.069.060,00)	

5.3.1.1.14 Beban di Bayar Dimuka

Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	0,00	3.333.333,33

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian beban dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Saldo Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Beban di bayar di muka Tahun 2023 sebesar Rp3.333.333,33.

5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	5.642.839.719,17	8.180.511.423,79

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan pada laporan keuangan ini berdasarkan sumber dana dibagi menjadi 4 (empat) jenis persediaan yaitu:

1. Persediaan APBD, yakni persediaan yang sumber pendanaannya dari belanja APBD diantaranya Persediaan di OPD.
2. Persediaan non APBD adalah persediaan yang sumber dana untuk pengadaannya bersumber dari Non APBD Kabupaten Konawe Kepulauan diataranya hibah dari pemerintah pusat, hibah dari Provinsi dan persediaan yang bersumber dari tugas pembantuan.
3. Persediaan BTT COVID, yakni persediaan yang pengadaannya bersumber dari belanja tak terduga dalam rangka penanganan virus covid-19 pada SKPD fungsional covid.

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.642.839.719,17 menurun sebesar Rp2.537.671.704,62 atau 31,02% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2023 sebesar Rp8.180.511.423,79. Saldo tersebut merupakan persediaan habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri dari saldo persediaan APBD, Non APBD, persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 59

Rincian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024

No	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	11.389.310,00	7.401.593,00
2	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	256.914.240,00	386.368.980,00
3	BMHP	2.352.863.632,81	3.818.135.048,44
4	BTT BMHP	351.624.461,32	596.192.772,50

No	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
5	Obat-obatan	2.431.738.451,15	2.996.307.491,11
6	BTT Obat-Obatan	238.309.623,89	374.105.538,74
Total Persediaan		**5.642.839.719,17**	**8.180.511.423,79**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 merupakan Persediaan yang terdapat pada OPD dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan OPD per 31 Desember 2024 berupa Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Bahan Medis Pakai Habis dan Obat-Obatan dengan total nilai sebesar Rp5.642.839.719,17. Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 67.**

5.3.1.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	12.500.000.000,00	**12.500.000.000,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah dalam jangka panjang, investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berupa investasi jangka panjang permanen (penyertaan modal) yang sumber dananya berasal dari APBD atau sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyertaan modal Kabupaten Konawe Kepulauan disebutkan bahwa besaran modal yang harus disetorkan sebesar Rp24.000.000.000,00. Sementara nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 60

Rincian Investasi Jangka Panjang Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Tahun	Investasi Permanen	Penyertaan Modal (Rp)
1	2014	Bank Sultra	1.000.000.000,00
2	2016	Bank Sultra	1.500.000.000,00
3	2017	Bank Sultra	3.000.000.000,00
4	2019	Bank Sultra	2.000.000.000,00
5	2022	Bank Sultra	2.500.000.000,00
6	2023	Bank Sultra	2.500.000.000,00
7	2024	Bank Sultra	0,00
Jumlah			**12.500.000.000,00**

Tabel 5. 61
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Akhir per 31-12-2023	Mutasi		Saldo Akhir per 31-12-2024
			Tambah	Kurang	
A	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.500.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00
	Jumlah Investasi Permanen	12.500.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		12.500.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Rp12.500.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dinilai dengan menggunakan metode biaya pada PT. Bank Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii. Penilaian tersebut didasarkan pada kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% yang memiliki pengaruh signifikan sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp12.500.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencerminkan kekayaan daerah dan merupakan representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Aset tetap setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengelolaan aset tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Secara umum pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah lainnya baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya di Indonesia. Karakteristik permasalahan pengelolaan aset tetap masih dipicu lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah yang disebabkan terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia, lambatnya penyelesaian dokumen kepemilikan utamanya pada aset-aset yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, rendahnya fungsi manfaat aset serta pergerakan tahapan reformasi manajemen aset. Kembali pada prinsip

accountabilty for probity and legality, dijelaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset tetap sebagai kekayaan daerah pada sebagian organisasi perangkat daerah selaku pengguna barang belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana jika konsep pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Dengan akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) penggunaan dan pemanfaatan aset sebagai kekayaan daerah sesuai dengan perencanaan semula serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula dengan akuntabilitas hukum yang diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. Sedangkan akuntabilitas proses (*process accountability*) diharapkan bahwa dalam proses pengelolaan aset sebagai kekayaan daerah wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sekaligus sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran rencana pengadaan barang milik daerah. Terhadap hal ini diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya terkait penyajian aset tetap di neraca, angka yang disajikan merupakan angka yang dihasilkan dari penatausahaan melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMDA BMD) yang sebelum penyajiannya terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Bidang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang.

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebesar Rp1.134.170.369.624,20 dan Rp1.104.370.384.638,78. Nilai tersebut dipengaruhi nilai mutasi baik penambahan yang dibentuk melalui belanja maupun pengurangan akibat adanya aset yang diserahkan maupun adanya jenis pekerjaan yang kurang volume serta pengelolaan BMD berupa penghapusan atas aset yang dijual atau dilelang. Selain itu Aset Tetap tersebut dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan) yang mencerminkan kekayaan daerah sebagai representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan semakin kompleks baik dari jenis maupun jumlahnya. Sehingga pengelolaan Aset Tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountabilty for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Belanja Modal sebagai sumber perolehan aset tetap dianggarkan sebesar Rp204.414.376.590,00 dengan realisasi sebesar 95,14% atau sebesar Rp194.486.930.909,00 yang secara kuantitas mengalami peningkatan dari Tahun 2023. Nilai tersebut merupakan nilai yang seharusnya mempengaruhi penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024. namun akibat adanya koreksi yang dilakukan terhadap pencatatan aset tetap maka penambahan mutlak nilai perolehan aset tetap tidak lagi sama dengan nilai realisasi Belanja Modal sehingga Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.170.369.624,20.

Jika dilakukan prosedur analitis, maka terdapat selisih dan selisih tersebut dijelaskan sebelumnya bahwa pada TA 2024 diketahui mutasi nilai perolehan aset tetap dipengaruhi oleh penambahan yang terjadi akibat pengakuan atas belanja modal aset yang secara fisik sudah selesai dan diserahkan Pemerintah melalui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang masing-masing walaupun belanja tersebut belum dilakukan pelunasan dan hanya diakui

sebagai utang jangka pendek sesuai dengan skema pembayarannya. Selain itu, penambahan juga terjadi akibat adanya koreksi belanja serta penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas pertanian .

Begitu pula dari sisi pengurangan bahwa pada periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 mutasi nilai perolehan aset tetap juga dipengaruhi oleh adanya yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi atau *capitalization tresshold* pada belanja modal sehingga tidak seluruh output belanja modal tersebut diakui sebagai aset tetap (*Ekstrakomptabel*). Selain itu, pengurangan terjadi akibat adanya kesalahan penganggaran yaitu output belanja modal setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada belanja barang jasa berupa barang persediaan ataupun aset tetap yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Rincian mengenai mutasi nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 62
Rincian Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	60.083.873.770,00	2.597.258.000,00	0	62.681.131.770,00
Peralatan dan Mesin	312.016.755.918,77	40.863.467.787,00	4.429.447.467,00	348.450.776.238,77
Gedung dan Bangunan	524.302.855.294,00	111.442.779.237,00	69.978.142.951,00	565.767.491.580,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.055.089.810.168,00	67.572.632.411,00	19.189.772.792,00	1.103.472.669.807,00
Aset Tetap Lainnya	9.930.397.135,74	4.862.310.025,00	3.137.037.533,00	11.655.669.627,74
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	10.777.793.500,00	51.895.682.771,00	3.922.305.827,00	58.751.180.444,00
Jumlah	1.972.201.495.806,51			2.150.778.919.467,51
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-867.831.101.167,73	(153.676.442.148,58)	(4.898.993.473,00)	-1.016.808.549.843,31
Nilai Buku Aset Tetap	**1.104.370.384.638,78**	**279.234.140.231,00**	**100.656.706.570,00**	**1.134.170.369.624,20**

Dari tabel mutasi nilai perolehan Aset Tetap di atas dapat dijelaskan bahwa saldo Aset Tetap masing-masing jenis Per 31 Desember 2024 dipengaruhi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang berasal dari penambahan realisasi Belanja Modal tahun 2024 serta juga di akibatkan adanya Kapitalisasi Aset yang berasal dari pengakuan utang kontrak Belanja Modal serta Reklasifikasi antar Aset Tetap dan adanya Hibah dari kementrian pusat/pihak ketiga. Sedangkan untuk pengurangan nilai Aset Tetap dipengaruhi oleh penerapan kebijakan akuntansi diantaranya batasan kapitalisasi atau *capitalization tresshold* pada Belanja Modal sehingga tidak seluruh output Belanja Modal tersebut diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel. Selain itu pengurangan juga terjadi karena masih terjadinya kesalahan penganggaran yaitu akibat adanya output Belanja Modal yang setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang Jasa berupa barang persediaan maupun adanya Aset tetap yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga. Tidak hanya penerapan kebijakan akuntansi tersebut namun pengurangan nilai Aset Tetap juga terjadi akibat dipengaruhi oleh Pengelolaan BMD yang menyebabkan Aset Tetap akhirnya direklasifikasi dalam Aset Lainnya serta adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa jenis aset.

5.3.1.3.1 Aset Tetap - Tanah

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp 62.681.131.770,00 terdapat penambahan sebesar Rp2.597.258.000,00 dari saldo awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp60.083.873.770,00. Penyajian nilai aset tetap tanah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang tertuang dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Harus diakui secara umum Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya informasi yang disajikan dalam kartu inventaris barang (KIB A – Tanah) antara lain luasan bidang tanah, penggunaan atau peruntukkan tanah, lokasi tanah terlebih pada nomor bukti kepemilikan tanah hingga nomor sertifikat hak pakai. Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum maksimal dalam melakukan pencatatan barang sebagai salah satu bentuk pengamanan aset/barang yakni Pengaman Administrasi. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap lembaga pemerintahan diwajibkan melaksanakan sensus barang minimal sekali dalam 5 (Lima) tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan sensus barang milik daerah dimana TA. 2024 sensus BMD hanya mengkhususkan sensus atas Aset Tetap Tanah. Dengan terlaksananya sensus tersebut, terdapat bidang tanah belum memiliki informasi valid atas ukuran bahkan masih ada bidang tanah yang belum dimutasi ke dalam daftar inventaris barang di masing-masing OPD pengguna.

Terhadap sisi pengamanan hukum, Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai. Hasil identifikasi sementara ada 103 buah sertifikat tanah yang tersimpan oleh Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk mendukung Pengamanan Hukum Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bidang Aset terus melakukan koordinasi dengan Bidang Tanah pada Dinas Perumahan terkait aset tanah yang dimiliki pemerintah baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum. Selain itu aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga berasal dari hibah dari Kabupaten Konawe Tahun 2019.

Tabel 5. 63
Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
TANAH	LRA	1.768.930.000,00
	Reklasifikasi	628.368.000,00
	Koreksi Belanja	199.960.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		2.597.258.000,00

Penambahan sajian nilai perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp Rp2.597.258.000,00 pada tahun 2024 selain berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp1.768.930.000,00 juga diperoleh dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp628.368.000,00 dimana sebelumnya berada di Aset Tetap Gedung Bangunan. Selain berasal dari reklasifikasi antar aset penambahan juga berasal dari Koreksi belanja dari belanja barang jasa dikoreksi menjadi belanja modal sebesar Rp199.960.000,00 masing-masing terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Rincian atas penambahan tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 64

Rincian Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah tahun 2024

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.732.930.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2024	1.732.930.000,00
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	828.328.000,00	Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	199.960.000,00
			Berasal dari Reklesifikasi aset berasal dari Gedung Bangunan	628.368.000,00
3	Badan Keuangan daerah	36.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2024	36.000.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah				**2.597.258.000,00**

Tahun 2024 Aset Tetap Tanah tidak mengalami depresiasi atau nilai perolehan sama dengan nilai buku. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah dilihat pada **Lampiran 68.**

5.3.1.3.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Tahun 2024 saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp348.450.776.238,77. Aset Tetap Peralatan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang disajikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dimana penerapan batasan kapitalisasi (*Capitalization Tresshold*) dilakukan pada Sub Kelompok Peralatan dan Mesin dengan nilai berbeda begitupun halnya dengan perhitungan depresiasi. Aset Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi digolongkan sebagai aset ekstrakomptabel.

Dari sisi manajemen, Aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaannya diketahui terdapat masalah-masalah baik dalam pengamanan administrasi, pengamanan hukum maupun pengamanan fisik. Sebagaimana temuan pemeriksaan pada tahun pelaporan sebelumnya terhadap pengamanan administrasi diketahui Aset Peralatan dan Mesin tersaji dengan informasi yang memadai dalam Kartu Inventaris Barang (KIB–B Peralatan dan Mesin), meskipun penatausahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menggunakan sistem informasi atau aplikasi SIMDA BMD yang prosesnya dibangun berdasarkan regulasi pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Pengurus Barang pada organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan optimal disebabkan minimnya pemahaman atas proses pengelolaan BMD serta proses dari sistem informasi yang digunakan. OPD selaku Pengguna Barang tidak melakukan inventarisasi secara periodik untuk melakukan pengendalian dan pengawasan sekaligus melakukan up to date terhadap sajian informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sehingga pada saat dilakukan audit (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan Auditor BPK-RI) permasalahan pengamanan administrasi Aset/BMD dan /atau sajian KIB B yang tidak informative masih terulang. Berdasarkan kondisi tersebut, Pengelola Barang melalui Bidang Pengelolaan Aset BKD melakukan upaya perbaikan dengan peningkatan kualitas laporan tata kelola BMD dengan menekankan beberapa langkah yang mesti dilakukan OPD selaku Pengguna Barang khususnya terhadap aset Peralatan dan Mesin yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi kembali BMD yang berada dalam Penguasaannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam KIB yang terdapat dalam Aplikasi SIMDA BMD guna memperoleh Informasi yang memadai akan BMD yang dikuasai seperti informasi : Merek / Type / No. Pabrik / No Rangka / No. Mesin / No. Polisi / Nama Pemakai BMD

/ untuk aset Peralatan dan Mesin, Informasi Ukuran / Alamat / Bukti Kepemilikan / Sertifikat;

2. Menyampaikan Laporan jika terdapat penyalahgunaan Aset/Kekayaan Milik Daerah yang dapat mengakibatkan kerugian Daerah di lingkup OPD nya masing-masing seperti Kendaraan Dinas yang digunakan oleh yang tidak berhak;
3. Mengajukan Usul Penguasaan dan Penetapan Status Pengguna BMD untuk seluruh BMD yang dikuasai oleh OPD nya masing-masing kepada Bupati Konawe Kepulauan dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya selaku Pengelola Barang;
4. Selanjutnya membuat BAST terhadap Oknum Pegawai yang terdata menggunakan fasilitas BMD seperti Kendaraan Dinas/Laptop/Kamera/HP/Hard Disk/Komputer PC Dekstop/GPS/dan peralatan kantor lainnya) dengan mengacu pada SK Penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sesuai dengan Kewenangannya dan selanjutnya menyampaikan pada Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Melakukan *Up-dating* data BMD dari hasil inventarisasi yang dilakukan atau dengan informasi dari Bukti Kepemilikan Aset (BPKB) guna penyajian informasi yang lengkap atas BMD yang dicatat dalam KIB seperti informasi Merek/Type/Nomor Rangka Kendaraan/Nomor Mesin/Nomor Serial Pabrik untuk alat elektronik lainnya masing-masing, lalu meng-update ke SIMDA BMD;
6. Mengajukan Usul Penghapusan BMD Kepada Bupati Konawe Kepulauan jika syarat penghapusannya terpenuhi (Rusak Berat dengan foto barangnya/Nilai Buku Asetnya sudah 0 (Nol)/Hilang dengan keterangan kepolisian;
7. Mengajukan Usul Pengalihan Status Penguasaan kepada Bupati Konawe Kepulauan jika BMD yang tercatat dalam KIB nya sudah berpindah penguasaan dan penggunaannya ke OPD lain;
8. Mengajukan Usul Penarikan Kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terhadap barang jika alih statusnya tidak disetujui dan mengajukan Usul Penarikan terhadap BMD yang dikuasai/digunakan oleh Pensiunan;
9. Memberikan Label yang dicetak dari SIMDA BMD pada seluruh BMD yang terdapat/dikuasai oleh OPD masing-masing guna Pengendalian Aset dan memudahkan pemeriksaan;
10. Menyusun KIR pada ruangan gedung kantor masing-masing dengan form cetakan dari SIMDA BMD; dan
11. Diharapkan dari instruksi diatas para OPD segera melakukan perbaikan tata kelola BMD untuk meningkatkan kualitas Laporan Aset Barang Milik Daerah.

Jika dilihat dari sisi pengamanan hukum, kondisi aset Peralatan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Sub Kelompok Kendaraan Dinas dapat digambarkan bahwa dari sejumlah aset Kendaraan Dinas yang dikuasai belum semua bahkan sebagian besar sajian informasi KIB-nya tidak dilengkapi dengan nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Hal ini disebabkan pada saat melakukan input data BMD pada aplikasi data atau fisik BPKB dari kendaraan yang diinput belum tersedia oleh Penyedia Kendaraan Dinas untuk Pengadaan Kendaraan Dinas sejak Tahun 2013. Dari penertiban Bukti Kepemilikan Kendaraan Dinas masih didapat beberapa OPD yang belum sepenuhnya menyetorkan bukti kepemilikan Kendaraan Dinas. Begitupula dengan aset peralatan mesin jenis lainnya seperti Laptop yang sebagai aset bergerak sangat rentan dengan potensi kehilangan/rusak, sebagian OPD selaku Pengguna Barang dalam pemanfaatan/penggunaannya telah dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai bukti pelimpahan tanggungjawab pengamanan fisik jika suatu saat aset tersebut rusak atau hilang.

Seperti diungkapkan diawal bahwa sajian nilai perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp Rp348.450.776.238,77 dari saldo awal 1 Januari 2024 tercatat Sebesar Rp312.016.755.918,77 dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan aset baik yang diakibatkan oleh realisasi belanja modal atas APBD Tahun 2024, reklasifikasi dari belanja modal jenis aset yang lain seperti belanja modal gedung bangunan (Dinas Pendidikan) yang didalamnya terdapat perabot serta reklasifikasi dari KDP serta adanya Koreksi Belanja dimana sebelumnya merupakan belanja barang jasa dikoreksi menjadi belanja modal.

Tabel 5. 65

Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
PERALATAN MESIN	LRA	33.676.841.899,00
	Kapitalisasi dari Utang Retensi	29.932.500,00
	Reklasifikasi Belanja	5.715.361.746,00
	Mutasi Aset Tetap	242.850.000,00
	Hibah	757.059.732,00
	Koreksi Belanja	441.421.910,00
TOTAL PENAMBAHAN		**40.863.467.787,00**

Penambahan sajian nilai perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin mencapai angka Rp40.863.467.787,00 dipengaruhi oleh realisasi belanja modal peralatan mesin sebesar Rp33.676.841.899,00. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin berasal dari adanya pencatatan atas utang retensi yang telah tercatat menjadi aset tetap sebesar Rp29.932.500,00. Selain itu penambahan juga diakibatkan adanya Reklasifikasi aset antar KIB sebesar Rp5.715.361.746,00 terdapat pada Dinas pendidikan sebesar Rp391.696.435,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp4.486.100.000,00, Dinas Perumahan sebesar Rp28.000.000,00, Dinas Perindagkop sebesar Rp595.065.311,00, Bagian Pemerintahan sebesar Rp174.500.000,00 dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp40.000.000,00. Penambahan Peralatan mesin juga disebabkan adanya Hibah dari kementerian pada Dinas Pertanian berupa eksa mini sebesar Rp757.059.732,00. koreksi atas kesalahan penganggaran yang sebelumnya merupakan belanja barang dan jasa yang kemudian dikoreksi menjadi belanja modal juga menambah aset peralatan mesin tahun ini sebesar Rp430.484.410,00 masing-masing terdiri Rp56.585.000,00 pada Dinas Pendidikan, Nilai Rp98.517.807,00 pada Dinas Pertanian dan Nilai Rp275.381.603,00 pada Sekretariat DPRD. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas atas penambahan ini selanjutnya diuraikan pada **Lampiran 69.**

Tabel 5. 66

Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
PERALATAN MESIN	Reklasifikasi Aset Tetap	615.800.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	665.160.125,00
	Retensi tahun sebelumnya	15.732.500,00

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
	Mutasi Aset Tetap	242.850.000,00
	Koreksi Belanja	40.052.180,00
	Tidak Terealisasi	200.548.800,00
	Eksrakompetabel	1.229.803.862,00
	Penjualan kendaraan Dinas	1.419.500.000,00
TOTAL PENGURANGAN		**4.429.447.467,00**

Pengurangan nilai perolehan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 hanya sebesar Rp4.429.447.467,00. Dipengaruhi oleh pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin yang berasal dari reklasifikasi antar aset sebesar Rp615.800.000,00 terdiri dari Reklasifikasi ke JIJ terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp580.800.000,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp35.000.000,00. Reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp665.160.125,00 yaitu merupakan Aset yang diserahkan ke Pihak lain yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp560.168.000,00 dan PTSP sebesar Rp104.992.125,00. Pengurangan nilai Aset Tetap Perlatan Mesin juga terjadi akibat adanya utang retensi yang dibayarkan namun telah dicacat tahun sebelumnya sebesar Rp15.732.500,00 terdapat pada Dinas Perhubungan. Pengurangan juga disebabkan adanya Koreksi belanja ke barang persediaan sebesar Rp40.052.180,00 terdapat pada Dinas Pekerjaaan Umum sebesar Rp8.799.680,00, Kec. Wawonii Tenggara sebesar Rp350.500,00 dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp30.902.000,00. Pengurangan peralatan mesin juga disebabkan adanya Aset yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi sehingga harus direklas menjadi aset ekstrakompetabel sebesar Rp1.229.803.862,00 masing-masing terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.096.212.462,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.008.000,00, RSUD sebesar Rp14.527.000,00, Dinas Perumahan sebesar Rp5.927.400,00, KBP3A sebesar Rp283.000,00, Perindagkop sebesar Rp1.783.000,00, PTSP sebesar Rp18.700.000,00, Dinas Perpustakaan sebesar Rp52.185.000,00, Bagian Umum sebesar Rp36.540.000,00, Bagian Protokoler sebesar Rp3.000.000,00 dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.038.000,00 serta Terdapat pula aset yang dijual pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.419.500.000,00 berupa 3 unit kendaraan dinas milik pimpinan DPRD dan Aset yang tidak terealisasi sebesar Rp200.548.800,00 masing-masing terdapat pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp31.400.000,00, Dinas Perindagkop sebesar Rp141.986.800,00 dan Sekertariat DPRD sebesar Rp27.162.000,00.

Selanjutnya rincian pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 67
Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.684.380.462,00	Terdapat Aset Tetap peralatan mesin yang diserahkan	560.168.000,00
			Tidak Terealisasi	31.400.000,00
			Ekstrakomptabel	1.092.812.462,00
2	Dinas Kesehatan	582.808.000,00	Terdapat Reklasifikasi ke JIJ	580.800.000,00

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Ekstrakomptabel	2.008.000,00
3	Rumah Sakit Umum	14.527.000,00	Ekstrakomptabel	14.527.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	8.799.680,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	8.799.680,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	5.927.400,00	Ekstrakomptabel	5.927.400,00
6	Dinas Sosial	35.000.000,00	Terdapat Reklasifikasi ke JU	35.000.000,00
7	Dinas Kependudukan, KB, P3A	283.000,00	Ekstrakomptabel	283.000,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	143.769.800,00	Ekstrakomptabel	1.783.000,00
			Tidak Terealisasi	141.986.800,00
9	Dinas Perhubungan	15.732.500,00	Terdapat Retensi tahun sebelumnya	15.732.500,00
10	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	123.692.125,00	Terdapat Aset Tetap peralatan mesin yang diserahkan	104.992.125,00
			Ekstrakomptabel	18.700.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	52.185.000,00	Ekstrakomptabel	52.185.000,00
12	Bagian Umum	36.540.000,00	Ekstrakomptabel	36.540.000,00
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.000.000,00	Ekstrakomptabel	3.000.000,00
14	Badan Keuangan Daerah	32.940.000,00	Ekstrakomptabel	2.038.000,00
			Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	30.902.000,00
15	Sekretariat DPRD	1.689.512.000,00	Terdapat mutasi Aset tetap	242.850.000,00
			Tidak Terealisasi	27.162.000,00
			Terdapat Aset Tetap yang dijual	1.419.500.000,00
16	Kecamatan Wawonii Tenggara	350.500,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	350.500,00
Total Pengurangan Mutasi Nilai Perolehan Aset Peralatan Mesin				**4.429.447.467,00**

Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dengan Nilai Buku dimana terdapat nilai depresiasi atau nilai penyusutan yang sifatnya mengurangi nilai perolehan aset tersebut. Rincian penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per entitas akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran 70.**

5.3.1.3.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Entitas Pelaporan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp565.767.491.580,00. Terjadi peningkatan sebesar 7,91% atau sebesar Rp41.464.636.286,00 dari total nilai perolehan aset jenis gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pelaporan per 31 Desember 2023 sebesar

Rp524.302.855.294,00. Peningkatan sebesar 7,91% ini lebih signifikan pengaruhnya terhadap kualitas jenis aset tetap gedung bangunan dibanding dengan kuantitasnya mengingat bahwa belanja terhadap jenis aset gedung dan bangunan lebih terkosentrasi pada belanja rehabilitasi dari pada belanja pembangunan baru.

Seperti halnya aset tetap Tanah dan Peralatan Mesin, Penyajian Nilai Aset Tetap Gedung Bangunan juga telah menggunakan kaidah-kaidah akuntansi seperti mencatat nilai pertambahan Aset Gedung Bangunan jika berasal dari belanja rehabilitasi maka akan dicatat sebagai kapitalisasi atas obyek aset gedung bangunan yang direhabilitasi serta memperhitungkan perubahan atau penambahan masa manfaat. Perhitungan perubahan/penambahan masa manfaat mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan penerapannya dalam sistem informasi manajemen barang yang digunakan diatur pada menu kapitalisasi. Terhadap hal ini tetap dilakukan perbaikan kualitas tata kelola aset/barang milk daerah seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola aset yang ada pada entitas akuntansi.

Dari sudut pandang manajemen aset, pengelolaan aset gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Gedung dan Bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-C) belum menyajikan informasi yang memadai seperti luasan gedung, nama gedung bangunan sehingga memudahkan identifikasi saat melakukan pencatatan dengan kapitalisasi, belum lagi masih adanya Organisasi Perangkat Daerah yang belum pasti menempati gedung yang dijadikan sebagai kantor tetap menyebabkan sulitnya menetapkan status penguasaan/penggunaan suatu gedung bangunan. Dari sisi pemanfaatan aset Gedung dan Bangunan selain sebagai fungsi pelayanan masyarakat juga didorong untuk memacu penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 5. 68

Mutasi Tambah Penambahan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
GEDUNG DAN BANGUNAN	LRA	92.894.711.664,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	468.606.250,00
	Pencatatan atas Utang Pekerjaan	7.216.000,00
	Reklasifikasi dari KDP	2.647.262.400,00
	Aset Hibah	1.255.585.842,00
	Mutasi antar OPD	13.708.137.081,00
	Koreksi Belanja	461.260.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		**111.442.779.237,00**

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 dipengaruhi Realisasi Belanja Modal sebesar Rp92.894.711.664,00 (Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2024) yang didominasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Belanja Dana Alokasi Khusus, juga adanya pencatatan utang retensi ke Aset Tetap Gedung Bangunan disebabkan fisik pekerjaaan telah selesai 100% sebesar Rp468.606.250,00. Penambahan juga disebabkan adanya pencatatan atas utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp7.216.00,00. Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan juga disebabkan adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.647.262.400,00 yang merupakan reklasifikasi dari KDP yaitu pekerjaaan yang secara fisik telah selesai tahun ini. Penambahan juga berasal dari Hibah Pemerintah Pusat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Renovasi bangunan sekolah sebesar Rp1.255.585.842,00 serta adanya koreksi belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa kemudian dilakukan koreksi menjadi belanja modal sebesar Rp461.260.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp318.950.000,00 dan

Dinas Perikanan sebesar Rp142.310.000,00. Selanjutnya rincian penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan pada **Lampiran 71.**

Tabel 5. 69
Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
GEDUNG DAN BANGUNAN	Koreksi Belanja	46.305.200,00
	Retensi telah dicatat Tahun Sebelumnya	476.982.550,00
	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	2.936.674.000,00
	Aset Tetap yang diserahkan	232.417.262,00
	Reklasifikasi Belanja	6.262.417.686,00
	Mutasi antar OPD	13.708.137.081,00
	Kurang Volume	237.977.437,00
	Reklasifikasi ke KDP	46.077.231.735,00
TOTAL PENGURANGAN		**69.978.142.951,00**

Begitupula dengan mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp69.978.142.951,00. Pengurangan nilai mutasi ini dipengaruhi oleh adanya Koreksi Belanja yang dikoreksi ke Belanja barang jasa sebesar Rp46.305.200,00 terdapat pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp17.500.000,00 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sebesar Rp28.805.200,00. Selain itu adanya utang retensi yang telah tercatat tahun sebelumnya sehingga tahun ini tidak lagi dilakukan pencatatan atas aset tersebut sebesar Rp476.982.550,00 yaitu belanja yang sebelumnya merupakan kewajiban/utang entitas pada Pihak ketiga yang sudah menyerahkan hasil pekerjaan termasuk pemeliharaannya. serta pengurangan yang disebabkan adanya Aset Tetap Gedung Bangunan yang akan diserahkan sebesar Rp2.936.674.000,00 dan untuk sementara direklas ke Aset lain-lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum berupa Pek. Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Bintara Polsek, Pembangunan Rumah Dinas Bintara Polsek Wawonii Tengah, Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Bintara Polsek, Pembangunan Rumah Dinas Bintara Polsek Wawonii Tengah (LANJUTAN), Pengawasan renovasi interior kantor kejari, Perencanaan renovasi interior kantor kejari, Renovasi Interior Kantor Kejari Konawe, Pengawasan Rehab Bangunan dan Penataan halaman TK. Pek. Rehab Bangunan TK Polsek Kemaraya, Penataan Halaman TK Polsek Kemaraya, Pembangunan Musholla Polsek Wawonii Utara. Ada pula Aset yang diserahkan ke pihak swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp232.417.262,00. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.262.417.686,00 merupakan pengurangan dari Aset Tetap Gedung Bangunan berupa aset yang direklasifikasi ke aset tetap Tanah sebesar Rp628.368.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp391.696.435,00 pada Dinas pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp28.000.000,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sebesar Rp595.065.311,00, Bagian Pemerintahan Umum sebesar Rp174.500.000,00, Badan Keuangan Daerah sebear Rp40.000.000,00. Reklasifikasi ke JIJ sebasar Rp315.892.500,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.489.154.400,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM sebesar Rp1.599.741.040,00. Pengurangan juga disebabkan adanya Aset Gedung dan bangunan yang direklas ke KDP sebesar Rp46.077.231.735,00 dan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp237.977.437,00 masing-masing terdapat pada

Dinas Kesehatan dan Perindagkop. Selanjutnya pengurangan-pengurangan tersebut diuraikan pada **Lampiran 72.**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2023 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2024 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2024. Selanjutnya nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 73.**

5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Entitas Pelaporan per 31 Desember 2023 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan sebesar Rp1.103.472.669.807,00 mengalami peningkatan sebesar 4,59% atau sebesar Rp48.382.859.619,00 dari tahun sebelumnya yang disajikan hanya sebesar Rp1.055.089.810.188,00. Penyajian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ini sama dengan penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu mengacu pada kebijakan akuntansi.

Begitupula dari sudut Manajemen Aset, Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi, oleh OPD juga masih disajikan kurang informatif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-D) sehingga menyulitkan identifikasi atas aset tersebut. Hal ini menjadi permasalahan sebagaimana diungkap dalam temuan pemeriksaan tahun sebelumnya. Penyelesaian terhadap masalah ini oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan perbaikan data base baik melalui kegiatan inventarisasi maupun penilaian kembali atau revaluasi. Selain hal tersebut perbaikan juga akan dilakukan melalui penyesuaian regulasi khususnya terhadap aset berupa Jalan dan Irigasi dimana aset tersebut juga diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait kewenangan penguasaan yang didasarkan pada Klasifikasi untuk Aset Jalan (Jalan Kabupaten/Jalan Provinsi dan Jalan Negara) serta Aset Jaringan yang didasarkan pada luasan area daerah irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Pusat).

Tabel 5. 70

Mutasi Penambahan Nilai Perolahan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN (Rp)	
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	LRA	61.587.257.321,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	566.219.650,00
	Pencatatan Utang ke Aset Tetap	57.307.500,00
	Reklasifikasi dari KDP	341.260.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	5.020.587.940,00
TOTAL PENAMBAHAN		**67.572.632.411,00**

Mutasi penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp67.572.632.411,00 selain dipengaruhi oleh adanya Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2024 sebesar Rp61.587.257.321,00 dimana realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penambahan juga diakibatkan oleh adanya Kapitalisasi yang berasal dari pengakuan atas sisa utang Pekerjaan termasuk utang retensi 5% dari belanja Konstruksi Jalan jaringan dan Irigasi yang realisasi fisik pekerjaan telah selesai 100% sebesar Rp566.219.650,00. Ada pula penambahan yang berasal dari dana kegiatan yang tidak sempat cair per 31 Desember 2024 sementara fisik pekerjaan telah selesai terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp57.307.500,00. Selain itu penambahan juga terjadi akibat adanya reklasifikasi antar KIB termasuk yang berasal dari KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Fisik dan Realisasi Keuangan yang telah mencapai 100% yakni Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp341.260.000,00 yang mana

merupakan Desain atau perencanaan dimana kegiatan fisiknya telah dikerjakan tahun ini terdapat pada Dinas pekerjaan Umum serta Penambahan akibat rekalsifikasi antar KIB selain KDP terdiri dari yang berasal dari Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp580.800.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas sosial sebesar Rp35.000.000,00 serta reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp315.892.500,00 pada Dinas pendidikan, Pada dinas Perhubungan sebesar Rp2.489.154.400,00 dan Dinas Perindagkop sebesar Rp1.599.741.040,00. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan pada **Lampiran 74.**

Tabel 5. 71
Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	Utang Retensi	2.163.354.050,00
	Koreksi Belanja	11.995.000,00
	Reklasifikasi ke KDP	5.731.961.036,00
	Aset Tetap yang diserahkan	4.145.085.500,00
	Aset yang dihibahkan ke Pihak lain	2.430.375.630,00
	Kurang Volume	220.901.576,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	4.486.100.000,00
TOTAL PENGURANGAN		**19.189.772.792,00**

Mutasi pengurangan nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp19.189.772.792,00. Pengurangan tersebut disebabkan adanya Utang Retensi yang tahun sebelumnya telah tercatat sebagai penambah aset tetap sehingga tahun ini tidak lagi dicatat sebesar Rp2.163.354.050,00 serta adanya koreksi ke belanja barang jasa sebesar Rp11.995.000,00. Pengurangan juga diakibatkan adanya reklasifikasi ke Peralatan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.486.100.000,00 terdiri dari pengadaan UPS, Sollar Cell dan genset serta reklasifikasi belanja dari Aset Tetap JIJ yang kemudian di reklas ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.731.961.036,00. Selain itu pengurangan juga diakibatkan adanya aset yang diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.145.085.500,00 dan Nilai Rp2.430.375.630,00 merupakan asset yang diserahkan ke Desa berupa pekerjaan jalan desa pada Dinas Pekerjaan Umum serta terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp220.901.576,00 masing-masing terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perindagkop. Rincian pengurangan nilai perolehan dapat diuraikan pada **Lampiran 75.**

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2023 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2024 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2024. Selanjutnya nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 76.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya Entitas Pelaporan per 31 Desember 2024 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan Sebesar Rp11.655.669.627,74 dimana mengalami peningkatan sebesar 17,37% atau sebesar Rp1.725.272.492,00 dari penyajian tahun

sebelumnya sebesar Rp9.930.397.135.74. Aset tetap lainnya juga telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang lebih dominan yaitu pada penerapan capitalization tresshold atau batasan kapitalisasi pada perolehan awal suatu aset tetap lainnya. Secara Manajemen Aset, Aset Tetap Lainnya telah disajikan sedikit lebih informatif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-E) dibanding jenis aset yang lain seperti Peralatan Mesin. Mengingat belum lagi dilaksanakannya kegiatan inventarisasi diperkirakan permasalahan aset tetap lainnya ini terdapat pada fungsi dan manfaatnya apakah masih layak dikatakan sebagai aset tetap terutama pada dokumen-dokumen ensiklopedi, buku penelitian, yang sudah tidak sesuai dengan kandungannya atau dengan kata lain sudah tidak memberi manfaat namun masih dicatat sebagai aset tetap lainnya. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 72

Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
ASET TETAP LAINNYA	LRA	4.559.190.025,00
	Koreksi Atas Realisasi BOS	3.120.000,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	300.000.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		4.862.310.025,00

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp4.862.310.025,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp4.559.190.025,00 dan adanya penambahan yang berasal koreksi kesalahan atas kurang catat realisasi belanja BOS sebesar Rp3.120.000,00 serta reklasifikasi yang berasal dari Aset tidak berwujud sebesar Rp300.000.000,00. Rincian penambahan nilai perolehan aset tetap lainnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 73

Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	2.365.337.900,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2024	2.362.217.900,00
			Koreksi Atas Realisasi BOS	3.120.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.796.972.125,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2024	1.796.972.125,00
3	Sekretariat DPRD	400.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2024	400.000.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00	Reklasifikasi dari Aset Tidak berwujud	300.000.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya				4.862.310.025,00

Tabel 5. 74

Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
ASET TETAP LAINNYA	Batasan Kapitalisasi/Ekstrakom	3.137.037.533,00
TOTAL PENGURANGAN		3.137.037.533,00

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 disajikan sebesar Rp3.137.037.533,00, pengurangan ini disebabkan oleh nilai Aset tetap lainnya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) sehingga menjadi barang ekstrakomptabel. Selanjutnya Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 75

Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	1.721.060.408,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	1.716.960.408,00
			Aset Tidak Terealisasi	4.100.000,00
2	Dinas Perpustakaan	1.415.977.125,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	1.415.977.125,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya				**3.137.037.533,00**

Dalam Neraca Laporan Keuangan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami depresiasi atau dalam menyajikan nilai buku sama dengan nilai perolehan. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 77.**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Pelaporan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Entitas Pelaporan per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.751.180.444,00. Penyajian nilai KDP ini telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimana jika terdapat belanja konstruksi yang fisiknya belum selesai 100% maka nilai KDPnya akan disajikan sebesar realisasi keuangan yang dibayarkan pada belanja tersebut. Sementara dari sisi Manajemen Aset sajian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ini lebih informative dikarenakan informasinya dibutuhkan dalam hal kapitalisasi jika aset tersebut telah menjadi aset tetap konstruksi baik gedung bangunan maupun belanja jalan jaringan irigasi.

Mutasi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Tahun 2024 mengalami penambahan sebesar Rp51.895.692.771,00 yang berasal reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp46.163.731.735,00 dan JIJ sebesar Rp5.731.961.036,00. Selanjutnya penambahan aset KDP ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 76

Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Kesehatan	21.257.830.256,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	21.171.330.256,00
			Pencatatan Utang atas Realisasi perencanaan	86.500.000,00
2	Rumah Sakit Umum	4.033.540.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	4.033.540.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	26.239.205.515,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	20.507.244.479,00
			Reklasifikasi Dari Aset Jalan Jaringan dan Irigasi	5.731.961.036,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	9.600.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	9.600.000,00

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
5	Dinas Kependudukan, KB, P3A	113.600.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Peralatan Mesin	113.600.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	99.467.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	99.467.000,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	142.450.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	142.450.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP				**51.895.692.771,00**

Selain penambahan, Aset KDP tersebut juga mengalami pengurangan sebesar Rp3.922.305.827,00. Pengurangan ini terdiri dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp2.647.262.400,00 dan Aset Tetap JIJ sebesar Rp341.260.000,00. Selain itu pengurangan juga berasal dari reklasifikasi Aset KDP ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp531.538.000,00 dan ke Aset Lain-Lain sebesar Rp69.900.000,00 serta adanya utang realisasi fisik tahun sebelumnya sebesar Rp239.927.100,00. Pengurangan Aset KDP lebih banyak dipengaruhi oleh Penerapan Kebijakan Akuntansi yang akhirnya mereklasifikasi aset-aset yang selama ini disajikan sebagai Aset KDP menjadi Aset Tetap jenis Gedung Bangunan, Jalan Jaringan Irigasi maupun Aset Tidak berwujud sebagaimana kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya rincian pengurangan KDP tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 77

Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Kesehatan	113.777.299,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	52.190.000,00
			Kurang Volume atas KDP	61.587.299,00
2	Rumah Sakit Umum	230.575.528,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	199.744.500,00
			Kurang Volume atas KDP	30.831.028,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	3.063.716.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	2.318.137.900,00
			Reklasifikasi Ke Jalan Jaringan dan irigasi	341.260.000,00
			Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	94.490.000,00
			Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	69.900.000,00
			Utang realisasi fisik Tahun sebelumnya	239.927.100,00
4	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.390.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	32.390.000,00
5	Dinas Perhubungan	44.800.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	44.800.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	39.798.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	39.798.000,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	149.850.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	149.850.000,00
8	Bagian Pemerintahan Umum	247.400.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	247.400.000,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP				**3.922.305.827,00**

Selanjutnya rekapitulasi nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 78.**

5.3.1.3.6.1 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Renovasi sebelum pelaksanaan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah yang mewajibkan untuk menghitung nilai penyusutan aset lain-lain dan aset renovasi. Aset Renovasi ini merupakan jenis aset Tanah/Peralatan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Jaringan Irigasi milik entitas lainnya. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 disajikan sebesar Rp1.016.608.549.843,31 dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 78
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

No.	Rekening		Akumulasi Penyusutan s.d 01-01-2024 (Rp)	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 01-01-2024 (Rp)	Beban Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31-12-2024 (Rp)
	Kode	Uraian				
1	2	3	4	5	5	6=(4+5)
1	1.3.1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	221.194.323.606,99	219.774.823.606,99	28.251.654.969,58	248.026.478.576,57
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	97.891.114.357,00	97.891.114.357,00	16.181.179.010,00	114.072.293.367,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	539.263.814.735,00	539.263.814.735,00	105.334.560.059,00	644.598.394.794,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.481.848.466,74	9.481.848.466,74	429.534.637,00	9.911.383.103,74
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**867.831.101.167,73**	**866.411.601.167,73**	**150.196.948.675,58**	**1.016.608.549.843,31**

Pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp1.016.608.549.843,31 selain dipengaruhi oleh beban penyusutan tahun berjalan juga terdapat koreksi penyesuaian penyusutan akibat Penyesuaian atas Aset Tetap kendaraan yang dijual/dilelang bahkan adanya mutasi aset kendaraan antar OPD serta dipengaruhi oleh adanya penyesuaian masa manfaat atas Aset Tetap tahun ini. Selanjutnya rincian penyusutan masing-masing jenis aset tetap per OPD disajikan pada **Lampiran 79, 80, 81 dan 82.**

Dalam Penyajian Nilai Penyusutan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, terhadap Nilai Beban Penyusutan dilakukan dengan cara mengintegrasikan Aplikasi dimana obyek Aset Tetap yang mengalami depresiasi sebagai beban penyusutan semester I dan Semester II pada SIMDA BMD terintegrasi dengan Simda Keuangan.

Kebijakan tentang penyusutan nilai aset tetap ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten KonaweKepulauan yang menggunakan metode garis lurus atau *Streng Line Methode.* Adapun Rumus Penyusutan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penyajian nilai penyusutan aset tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dilakukan dengan cara mengintergrasikan nilai beban penyusutan yang berasal dari Aplikasi Simda BMD sebagai bahan memo jurnal beban penyusutan Tahun 2024 dengan menggunakan parameter penyusutan secara bulanan terhitung sejak tanggal pembukuan. Sajian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada secara rinci pada Saldo Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 pada Simda BMD. Simda BMD selain digunakan untuk penatausahaan Barang Milik Daerah juga untuk mendukung ke andalan data Penyusutan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penatausahaan Aset yang dilakukan dengan bantuan Aplikasi SIMDA BMD untuk mendukung data sajian Aset Tetap Neraca. Adapun Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 79

Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kab. Konawe Kepulaun pada Tahun 2024

No.	Rekening		Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31-Desember 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Niai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Kode	Uraian			
1	1.3.1	Tanah	62.681.131.770,00	0,00	62.681.131.770,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	348.450.776.238,77	248.026.478.578,57	100.424.297.660,20
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	565.767.491.580,00	114.072.293.367,00	451.695.198.213,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.103.472.669.807,00	644.598.394.794,00	458.874.275.013,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	11.655.669.627,74	9.911.383.103,74	1.744.286.524,00
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.751.180.444,00	0,00	58.751.180.444,00
		Jumlah	**2.150.778.919.467,51**	**1.016.608.549.843,31**	**1.134.170.369.624,20**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	94.773.794.652,00	**85.535.776.758,00**

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp94.773.794.652,00 dan Rp85.535.776.758,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 80

Rincian Aset Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tak Berwujud	67.001.485.271,00	8.413.389.690,00		75.414.874.961,00
2	Tagihan Jangka Panjang		243.585.000,00		243.585.000,00
3	Aset Lain-lain	18.534.291.487,00	5.367.049.630,00	4.786.006.426,00	19.115.334.691,00
	Jumlah	**85.535.776.758,00**	**14.024.024.320,00**	**4.786.006.426,00**	**94.773.794.652,00**

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak berwujud	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	75.414.874.961,00	**67.001.485.271,00**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud pada Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan Nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp 75.414.874.961,00 dan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp67.001.485.271,00. Dalam penyajian Aset Tidak Berwujud pada Tahun Pelaporan 2024 terjadi penambahan sebesar Rp8.413.389.690,00 terdiri dari Penambahan sebesar Rp8.713.389.690,00 dan pengurangan sebesar Rp300.000.000,00 berupa kajian/penelitian dalam bentuk buku yang penambahannya dipengaruhi oleh adanya penambahan nilai perolehan ATB itu sendiri melalui reklasifikasi dari realisasi belanja barang dan jasa pada beberapa entitas akuntansi serta Desain/Perencanaan dimana berdasarkan kebijakan akuntansi apabila kegiatan fisiknya tidak dikerjakan selama dua tahun maka desain/perencanaannya di reklas ke Aset Tidak Berwujud. Penambahan nilai perolehan tersebut terjadi pada entitas yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Bappeda, Dinas Perhubungan serta Sekretariat DPRD. Rincian ATB per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 83.**

Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 81
Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN (Rp)	
ASET TIDAK BERWUJUD	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	7.546.536.690,00
	Reklasifikasi dari KDP	531.538.000,00
	Reklasifikasi dari Barang Jasa	635.315.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		**8.713.389.690,00**

Tabel 5. 82
Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.249.257.690,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	4.154.767.690,00
			Reklasifikasi dari KDP	94.490.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	624.389.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	624.389.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	39.798.000,00	Reklasifikasi dari KDP	39.798.000,00
4	Dinas Pencatatan Sipil	112.300.000,00	Reklasifikasi dari Barjas	112.300.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	247.400.000,00	Reklasifikasi dari KDP	247.400.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	149.850.000,00	Reklasifikasi dari KDP	149.850.000,00
			Koreksi Belanja barang dan jasa	36.515.000,00
7	Sekretariat DPRD	486.500.000,00	Koreksi Belanja barang dan jasa	486.500.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	1.450.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.317.380.000,00	Realisasi Belanja Aset Tidak Berwujud	1.317.380.000,00
Total Penambahan Nilai Aset Tidak Berwujud				**8.713.389.690,00**

Tabel 5. 83
Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN (Rp)	
ASET TIDAK BERWUJUD	Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya	300.000.000,00
TOTAL PENGURANGAN		**300.000.000,00**

Tabel 5. 84
Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya	300.000.000,00
Total Pengurangan Nilai Aset Tidak Berwujud				300.000.000,00

Tabel 5. 85
Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024

OPD	Nilai (Rp) TA. 2023	Tambah	Kurang	Nilai (Rp) TA. 2024
Bappeda	29.317.844.200,00	1.150.000.000,00		30.467.844.200,00
Pekerjaan Umum	14.644.842.795,00	4.249.257.690,00		18.894.100.485,00
Dinas Perumahan	3.820.713.460,00	624.389.000,00		4.445.102.460,00
Dinas Pendidikan	1.004.677.733,00			1.004.677.733,00
Dinas Kesehatan	526.509.168,00			526.509.168,00
RSUD	49.900.000,00			49.900.000,00
Dinas Sosial	769.900.000,00			769.900.000,00

OPD	Nilai (Rp) TA. 2023	Tambah	Kurang	Nilai (Rp) TA. 2024
Dinas Lingkungan Hidup	1.114.483.200,00			1.114.483.200,00
Kominfo	466.760.000,00			466.760.000,00
Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	499.890.000,00			499.890.000,00
Dinas Perhubungan	825.000.000,00	1.317.380.000,00		2.142.380.000,00
Dinas Perindagkop	200.000.000,00	39.798.000,00		239.798.000,00
Dinas Pariwisata	805.846.000,00	186.365.000,00		992.211.000,00
BPMD	650.000.000,00			650.000.000,00
BPBD	750.000.000,00			750.000.000,00
Dinas Perpustakaan	424.497.700,00			424.497.700,00
Badan Keuangan Daerah	879.834.000,00			879.834.000,00
Dinas Perikanan	1.199.210.000,00			1.199.210.000,00
Dinas Pertanian	977.560.000,00			977.560.000,00
Badan Kepegawaian dan PSDM	519.800.000,00			519.800.000,00
Sekretariat DPRD	5.797.352.015,00	486.500.000,00		6.283.852.015,00
Bagian Umum Setda	97.450.000,00			97.450.000,00
Bagian Pemerintahan Umum Setda	102.401.000,00	247.400.000,00		349.801.000,00
Bagian Orpeg Setda	199.600.000,00			199.600.000,00
Setda Bag. ULP	187.414.000,00			187.414.000,00
Bagian Hukum Setda	1.100.000.000,00			1.100.000.000,00
Inspektorat Daerah	70.000.000,00			70.000.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		112.300.000,00		112.300.000,00
Jumlah	67.001.485.271,00	8.413.389.690,00	0,00	75.414.874.961,00

5.3.1.4.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
b. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2024 untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2024 menggunakan nilai perolehan;
c. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada awal tahun 2024 melakukan penyesuaian terhadap aset tak berwujud dengan melaksanakan perhitungan amortisasi terhadap aset tak berwujud yang diperoleh sampai dengan tahun 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai amanat dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing – masing sebesar Rp63.405.003.971,72 dan Rp56.427.121.417,61. Pada Neraca Laporan Keuangan tahun 2024 telah memperhitungkan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang pada tahun sebelumnya yang belum disajikan.

Seperti halnya Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud (ATB) sebagai bagian dari Aset Lainnya pada Entitas Akuntansi, penatausahaannya juga dilakukan melalui sistem Informasi Aplikasi yang langsung dapat menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi Tahun sebelumnya serta Beban Amortisasi Tahun Berjalan. Terhadap Nilai Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud yang disajikan tahun ini dapat dilihat pada **Lampiran 84.**

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain dalam aset lainnya yang disajikan dalam Neraca merupakan hasil reklasifikasi dari beberapa Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi dan/atau kriteria suatu Aset Tetap baik Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan jika terdapat pengalihan status penguasaan. Selain itu juga berasal dari Kerugian Daerah yang belum di SKTJM serta kelebihan rekonsiliasi Kas tahun-tahun sebelumnya. Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun ini, selain nilai perolehan aset lain-lain juga disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya. Nilai Perolehan Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya disajikan sebagai berikut :

Aset Lain – Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	19.115.334.691,00	**18.534.291.487,00**

Terhadap sajian nilai aset lain-lain tersebut diatas jika dilihat dari jumlah saldo per 31 Desember 2024 dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.115.334,691,00 dan Rp18.534.291.487,00. Realisasi Aset Lain-Lain mengalami mutasi penambahan sebesar Rp5.367.049.630,00 atas aset yang akan diserahkan atau dihibahkan dimana terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang. Adapun pengurangan Aset lain-lain disebabkan adanya aset yang telah diserahkan dimana dibuktikan adanya dokumen Berita Acara Serah Terima sebesar Rp4.786.006.426,00. Rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran 85 dan 86.**

Tabel 5. 86

Mutasi Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2024 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lain-lain	18.534.291.487,00	5.367.049.630,00	4.786.006.426,00	19.115.334.691,00

Adapun rincian aset lain-lain terdiri dari aset yang diserahkan, aset yang hilang dan aset yang rusak dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 87

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain	Nilai (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aset Lain-Lain yang diserahkan	17.043.412.487,00	5.367.049.630,00	4.786.006.426,00	17.624.455.691,00
Aset Lain-Lain yang hilang/Tuntutan Ganti Rugi	418.046.000,00			418.046.000,00
Aset Lain-lain yang rusak	1.072.833.000,00			1.072.833.000,00
Jumlah	**18.534.291.487,00**	**5.367.049.630,00**	**4.786.006.426,00**	**19.115.334.691,00**

Aset lain-lain yang merupakan aset yang diserahkan sebesar Rp17.624.455.691,00 terdapat dibeberapa OPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan aset yang

akan diserahkan ke Provinsi, pada Dinas Pertanian merupakan aset yang akan diserahkan ke Desa dan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan aset yang akan diserahkan ke pihak Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Polda SULTRA. Selanjutnya rincian aset lain-lain yang akan diserahkan dapat dilihat pada **Lampiran 87.**

Aset Lain-lain yang merupakan aset hilang atau aset yang masuk dalam tuntutan ganti rugi sebesar Rp418.046.000,00 terdapat pada Setda Bagian Ekonomi dan SDA, Setda Bagian Kerjasama Komunikasi Publik, Setda bagian Pembangunan, Dinas Pencatatan Sipil dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Selanjutnya rincian aset lain-lain yang Hilang atau aset yang masuk tuntutan ganti rugi dapat dilihat pada **Lampiran 88.**

Terdapat pula Aset Lain-lain yang rusak berat sebesar Rp1.072.833.000,00 masing-masing terdapat pada Setda bagian Pemerintahan Umum, Dinas pekerjaan Umum, Dinas perhubungan, RSUD, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas Pencatatan Sipil, KBP3A dan Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya rincian aset lain-lain yang rusak berat dapat dilihat pada **Lampiran 89.**

Penyajian nilai Aset Lain-lain dalam Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan dengan nilai Buku yaitu nilai perolehan jenis aset lain-lain yang mengalami depresiasi. Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya sebagian besar merupakan hasil reklasifikasi atas Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Tetap yang karena kondisi dan keberadaannya sudah tidak diketahui Selain itu juga merupakan aset yang sudah beralih status dan/atau aset yang sudah harus dihapuskan namun belum memenuhi syarat administrasi seperti Surat Keputusan Bupati.

5.3.1.4.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	3.523.985.950,95	3.523.985.950,95

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.523.985.950,95. Penyusutan Aset lain-lain terdiri dari Penyusutan Aset yang diserahkan sebesar Rp2.370.885.372,00, penyusutan Aset Lain-lain yang hilang sebesar Rp252.946.152,00 serta penyusutan Aset Lain-Lain yang rusak sebesar Rp900.154.426,95. Akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain tersebut merupakan koreksi pengurangan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lain-Lain.

5.3.1.4.3 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*

Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	8.156.865.000,00	43.965.569.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebihsehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan Pemda dalam jumlah yang wajar. Atas Dana TDF tersebut pemerintah daerah mendapatkan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan TDF pada Bank Indonesia. Penyaluran DBH secara non tunai melalui fasilitas TDF memiliki masa *Holding Period* selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dalam fasilitas TDF sebelum akhirnya disalurkan ke RKUD.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.156.865.000,00 dan Rp43.965.569.000,00.

5.3.2 Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Secara garis besarnya kewajiban atau liabilitas ini diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada Tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan hanya memiliki Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2) Pendapatan Diterima Dimuka
3) Utang Belanja
4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp7.353.764.790,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.353.764.790,00 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja. Rincian dan penjelasan untuk masing-masing Kewajiban Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 88

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Kab. Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.065.503,00	315.315,00
2	Pendapatan Diterima di muka	750.000,00	9.750.000,00
3	Utang Belanja	7.343.949.287,00	3.900.962.693,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**7.353.764.790,00**	**3.911.028.008,00**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**Rp**	**Rp**
	9.065.503,00	**315.315,00**

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.065.503,00 dan Rp315.315,00. Realisasi ini mengalami kenaikan dari saldo Utang PFK Tahun 2023 sebesar Rp315.315. Utang PFK tahun 2024 merupakan pajak outstanding Dinas Perhubungan sebesar Rp7.497.875,00, Puskesmas Bobolio sebesar Rp8.800,00 dan Bagian Organisasi sebesar Rp1.558.828,00. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5. 89

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga TA 2024

No	Uraian	Saldo Utang PFK 2023 (Rp)	Penerimaan PFK 2024 (Rp)	Penyetoran PFK 2024 (Rp)	Utang PFK 2024 (Rp)	Saldo Utang PFK 2024 (Rp)
1	Utang PFK BUD	315.315,00	36.593.620.836,00	36.593.936.151,00	-315.315,00	0,00
2	Utang PFK Bendahara Pengeluaran	0,00	1.645.413.922,00	1.636.357.219,00	9.056.703,00	9.056.703,00
3	Utang PFK Bendahara FKTP	0,00	41.336.110,00	41.327.310,00	8.800,00	8.800,00
4	Utang PFK Bendahara BOSP	0,00	120.246.969,00	120.246.969,00	0,00	0,00
5	Utang PFK Bendahara BOK	0,00	146.599.577,00	146.599.577,00	0,00	0,00
Total		315.315,00	38.547.217.414,00	38.538.467.226,00	8.750.188,00	9.065.503,00

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	750.000,00	9.750.000,00

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp750.000,00 dan Rp9.750.000,00 adalah pendapatan retribusi yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemda. Realisasi Pendapatan diterima dimuka ini berupa sewa tanah selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2025 berupa pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra yang berada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	7.343.949.287,00	3.900.962.693,00

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan Utang Belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp7.343.949.287,00. Realisasi Utang ini mengalami penurunan sebesar Rp2.895.996.200,00 dari Tahun 2023 yang tercatat di Neraca sebesar Rp3.900.962.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 90

Rincian Utang Belanja Per Jenis TA 2024

No.	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2024 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Utang Belanja Aset Tetap	3.761.695.293,00	1.198.343.400,00	2.797.959.300,00	2.162.079.393,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	139.267.400,00	274.913.676,00	98.036.900,00	316.144.176,00
3	Utang Belanja Pegawai	0,00	4.450.959.918,00	0,00	4.450.959.918,00
4	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	414.765.800,00	0,00	414.765.800,00
Total		3.900.962.693,00	6.338.982.794,00	2.895.996.200,00	7.343.949.287,00

Penurunan realisasi Utang Tahun 2024 berasal dari realisasi pelunasan Utang Belanja Barang dan jasa sebesar Rp98.036.900,00 serta pelunasan utang belanja Aset Tetap sebesar Rp2.797.959.300,00 yang terdiri dari Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp188.994.150,00, Utang Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp15.732.500,00, Utang Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp522.915.500,00, Utang Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp2.070.317.150,00 dan Utang Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp239.927.100,00. Selain itu penambahan utang belanja juga berasal dari belanja pegawai sebesar Rp4.450.959.918,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp274.913.676,00 belanja modal sebesar Rp1.198.343.400,00 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp414.765.800,00 sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat sebagai penambah utang Per 31 Desember 2024 dan akan menganggarkan kembali pada APBD Perubahan pada tahun 2024. Adapun rincian Utang Belanja Per jenis Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 90, 91, 92, 93, 94 dan 95.**

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
	1.215.281.971.712,78	**1.254.668.678.292,65**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Total saldo pos Ekuitas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.215.281.971.712,78 mengalami penurunan kekayaan bersih sebesar Rp39.386.706.579,87 atau turun sebesar 3,14% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.254.668.678.292,65.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, menyajikan informasi tentang Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Beban yang merupakan Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Aset Ekstrakomptabel, Beban Amortisasi dan Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan LO, Beban LO dan Surplus/defisit LO dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selama periode tahun 2024 nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar (Rp35.583.014.864,38). Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp542.551.858.071 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp578.134.872.935,38

5.4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Berbeda dengan Pendapatan LRA yang di akui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah oleh entitas pelaporan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal basis akuntansi LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual sedangkan LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas

sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan penyajian antara LRA dan LO dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perbedaan penyajian Pendapatan dan Pendapatan - LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 91
Rincian Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

No	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1	Pajak Daerah	4.396.468.604,00	4.196.047.660,00	200.420.944,00
2	Retribusi Daerah	3.107.876.344,00	3.146.536.744,00	(38.660.400,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	0,00
4	Lain- Lain PAD Yang Sah	5.410.087.622,00	5.419.087.622,00	(9.000.000,00)
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.499.872.023,00	506.778.542.023,00	101.721.330.000,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.890.907.057,00	16.509.020.978,00	(618.113.921,00)
7	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.923.744.739,00	2.146.534.557,00	(222.789.818,00)
Jumlah		**643.585.044.876,00**	**542.551.858.071,00**	**101.033.186.805,00**

Perbedaan nilai antara Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO akan dijelaskan pada rekening pendapatan masing-masing. Sedangkan Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp542.551.858.071,00 terlihat pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 5. 92
Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Pendapatan	Pendapatan 2024 (Rp)	Pendapatan 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.117.760.513,00	16.334.080.025,64	783.680.487,36	4,80
Pendapatan Transfer	523.287.563.001,00	521.073.747.549,00	(10.005.555.539,00)	(1,92)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.146.534.557,00	3.857.669.744,00	(1.711.135.187,00)	(44,36)
Jumlah	**542.551.858.071,00**	**541.265.497.318,64**	**(10.933.010.238,64)**	(2,02)

Adapun realisasi pendapatan diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp17.117.760.513,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 93
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan 2024 (Rp)	Pendapatan 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak daerah	4.196.047.660,00	4.453.839.699,00	(257.792.039,00)	(5,79)
Pendapatan Retribusi Daerah	3.146.536.744,00	1.871.911.958,00	1.274.624.786,00	68,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	2.573.523.227,00	1.782.565.260,00	69,27
Lain-lain PAD yang Sah	5.419.087.622,00	7.434.805.141,64	(2.015.717.519,64)	(27,11)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**17.117.760.513,00**	**16.334.080.025,64**	**783.680.487,36**	**4,80**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp17.117.760.513,00 mengalami peningkatan Rp783.680.487,36 atau 4,80% bila dibandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp16.334.080.025,64 Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.196.047.660,00 dan Rp4.453.839.699,00. Pendapatan Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan Penyesuaian atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 94

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	12.379.091,00	26.835.000,00	(14.455.909,00)	(53,87)
2.	Pajak Restoran	1.886.751.930,00	2.333.946.171,00	(447.194.241,00)	(19,16)
3.	Pajak Reklame	21.469.513,00	450.000,00	21.019.513,00	4.671,00
4.	Pajak Penerangan Jalan	949.343.075,00	964.051.855,00	(14.708.780,00)	(1,53)
5.	Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	907.430.075,00	894.880.335,00	12.549.740,00	1,40
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	414.664.376,00	233.676.338,00	181.008.038,00	77,46
7.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.989.600,00	0,00	3.989.600,00	100,00
Jumlah		**4.196.047.660,00**	**4.453.839.699,00**	**(257.792.039,00)**	**(5,79)**

Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO berbeda dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp4.196.047.660,00. Perbedaan sebesar Rp200.420.944,00 diakibatkan oleh adanya piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp1.085.224.140,74 yang terbayarkan di Tahun 2024 terdiri atas pelunasan piutang pajak hotel sebesar Rp160.000,00, piutang pajak restoran sebesar Rp89.300,00, piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp89.772.056,00, piutang pajak PMBLB sebesar Rp277.127.550,00 dan pelunasan piutang pajak PBB sebesar Rp24.174.364,00 sehingga total piutang pajak daerah yang terbayarkan di Tahun 2024 sebesar Rp391.323.270,00 serta adanya penambahan piutang pajak daerah di Tahun 2024 terdiri atas piutang pajak hotel sebesar Rp1.440.000,00, piutang pajak restoran sebesar Rp150.500,00, piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp95.939.972,00, piutang pajak PMBLB sebesar Rp42.654.238,00 dan penambahan piutang pajak PBB sebesar Rp50.716.616,00, total dari penambahan piutang pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp190.901.326,00. Rincian Pendapatan LRA dan Pendapatan LO bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 95

Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan (Rp)		
	LRA	LO	Selisih
Pajak Hotel	11.099.091,00	12.379.091,00	(1.280.000,00)
Pajak Restoran	1.886.690.730,00	1.886.751.930,00	(61.200,00)
Pajak Reklame	21.469.513,00	21.469.513,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	943.175.159,00	949.343.075,00	(6.167.916,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	1.141.903.387,00	907.430.075,00	234.473.312,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	388.141.124,00	414.684.376,00	(26.543.252,00)
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.989.600,00	3.989.600,00	0,00
JUMLAH	**4.396.468.604,00**	**4.196.047.660,00**	**200.420.944,00**

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp12.379.091,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp26.835.000,00 terjadi penurunan (Rp14.455.909,00) atau (53,87%). Penjelasan atas Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. 96

Rincian Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel (Rp)
1	Pendapatan Pajak Hotel	11.099.091,00
2	Penambahan Piutang Pajak Hotel tahun 2024	1.440.000,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Hotel tahun 2023	160.000,00
Pendapatan Pajak Hotel (1+2-3)		**12.379.091,00**

b. Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.886.751.930,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.333.946.171,00 terjadi penurunan sebesar Rp447.194.241,00 atau 19,16%. Penjelasan atas Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. 97

Rincian Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran (Rp)
1	Pendapatan Pajak Restoran	1.886.690.730,00
2	Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2024	150.500,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Restoran Tahun 2023	89.300,00
Pendapatan Pajak Restoran (1+2-3)		**1.886.751.930,00**

c. Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp21.469.513,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp450.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.019.513,00 atau 4.671%. Penjelasan atas Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. 98

Rincian Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame (Rp)
1	Pendapatan Pajak Reklame	21.469.513,00
2	Piutang Pajak Reklame tahun 2024	0,00
3	Piutang Pajak Reklame tahun 2023	0,00
Pendapatan Pajak Reklame (1+2-3)		**21.469.513,00**

d. Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp949.343.075,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp964.051.855,00 terjadi penurunan sebesar Rp14.708.780,00 atau 1,53%. Penjelasan atas Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 99

Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak (Rp)
1	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	943.175.159,00
2	Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2024	95.939.972,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2023	89.772.056,00
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (1+2-3)		949.343.075,00

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya

Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp907.430.075,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp894.880.335,00 terjadi peningkatan Rp12.549.740,00 atau 1,40%. Penjelasan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. 100

Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak PMBLB (Rp)
1	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.141.903.387,00
2	Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun 2024	42.654.238,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun 2023	277.127.550,00
Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya (1+2-3)		**907.430.075,00**

f. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp414.684.376,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp233.676.338,00 terjadi kenaikan sebesar Rp181.008.038,00 atau 77,46%. Penjelasan atas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. 101

Rincian Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak – PBB (Rp)
1	Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	388.141.124,00
2	Penambahan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2024	50.717.616,00
3	Pelunasan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2023	24.174.364,00
Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (1+2-3)		**414.684.376,00**

g. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.989.600,00, bila dibandingkan Tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.989.600,00 atau 100%.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh delapan OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.146.536.744,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.871.911.958,00 terlihat Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.274.624.786,00 atau 68,09%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 102

Rincian Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	2.062.790.132,00	966.627.178,00	1.096.162.954,00	113,40
2	Retribusi Jasa Usaha	1.083.746.612,00	869.571.780,00	214.174.832,00	24,63
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	35.713.000,00	(35.713.000,00)	(100,00)
Jumlah		**3.146.536.744,00**	**1.871.911.958,00**	**1.274.624.786,00**	**68,09**

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.062.790.132,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp966.627.178,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.096.162.954,00 atau naik 113,40%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2024. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2024 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan sebesar Rp395.405.900,00 yang berasal dari Piutang Retribusi Non Kapitasi RSUD dan Dinas Kesehatan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya sebesar Rp 356.745.500,00 yang juga berasal dari Piutang Retribusi Non Kapitasi RSUD dan Dinas Kesehatan tahun 2023 yang telah disetor pada tahun 2024. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 103

Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	1.907.129.732,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2024	395.405.900,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2023	239.745.500,00
Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)		**2.062.790.132,00**

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.083.746.612,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp869.571.780,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp214.174.832,00 atau 24,63%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2024. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2024 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 104

Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.200.469.920,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Usaha tahun 2024	0,00
3	Penambahan atas Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024	276.692,00
4	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Usaha tahun 2023	117.000.000,00
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha (1+2+3-4)		**1.083.746.612,00**

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp35.713.000,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp35.713.000,00 atau turun 100%. Nilai Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodisasi tahun anggaran 2024. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2024 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 105

Rincian Retribusi PerizinanTertentu Tahun Anggaran 2024

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2024	0,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2023	0,00
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (1+2-3)		**0,00**

Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA masing-masing sebesar Rp3.146.536.744,00 dan Rp3.107.599.652,00 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 106

Rincian Pendapatan Retribusi– LO dan LRA Tahun Anggaran 2024

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.868.159.732,00	2.043.820.132,00	(155.660.400,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	685.458.692,00	568.458.692,00	117.000.000,00
4	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	14.644.500,00	14.644.500,00	0,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.655.000,00	60.655.000,00	0,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.591.000,00	19.591.000,00	0,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	416.447.420,00	416.447.420,00	0,00
9	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**3.107.876.344,00**	**3.146.536.744,00**	**(38.660.400,00)**

Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp3.146.536.744,00 berbeda dari Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp3.107.876.344,00. Perbedaan sebesar Rp38.937.092,00 ini diakibatkan oleh pelunasan atas Piutang Dana Non Kapitasi sebesar Rp239.745.500,00 yang berasal dari Dana Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan

yang terealisasi Tahun 2024 sebesar Rp23.098.400,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp216.647.100,00 serta adanya Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp117.000.000,00. Selain itu terdapat pula penambahan Piutang Retribusi atas Dana Klaim BPJS Tahun 2024 sebesar Rp13.251.300,00 pada Dinas Kesehatan dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp382.154.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 107

Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi– LO dan LRA Tahun Anggaran 2024

No.	Retribusi Daerah	Mutasi		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan	13.251.300,00	23.098.400,00	(9.847.100,00)
2.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Rumah Sakit Umum Daerah	382.154.600,00	216.647.100,00	165.507.500,00
3	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	117.000.000,00	(117.000.000,00)
	JUMLAH	**395.405.900,00**	**356.745.500,00**	**38.660.400,00**

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.356.088.487,00 dan tahun 2023 sebesar Rp2.573.523.227,00. Dengan demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.782.565.260,00 atau 69,27%. Rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 108

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Badan Keuangan Daerah	4.356.088.487,00	2.573.523.227,00	1.782.565.260,00	69,27
Jumlah		**4.356.088.487,00**	**2.573.523.227,00**	**1.782.565.260,00**	**69,27**

5.4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan diluar pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nilai Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp5.419.087.622,00 berbeda dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LRA sebesar Rp5.410.087.622,00. Perbedaan sebesar Rp9.000,000,00, diakibatkan adanya pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah untuk pembangunan mesin ATM Bank Sultra sebesar Rp9.000.000,00 yang nilai kontraknya atas sewa tanah sebesar Rp45.000.000,00 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 sehingga menyebabkan perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di Laporan Keuangan LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 5. 109

Rincian Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA

No	Uraian	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	136.109.200,00	136.109.200,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)
3	Penerimaan Jasa Giro	604.283.651,00	604.283.651,00	0,00
4	Pendapatan Bunga	1.907.191.769,00	1.907.191.769,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	485.102.628,00	485.102.628,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	62.995.131,00	62.995.131,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	2.206.448.089,00	2.206.448.089,00	0,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.957.154,00	7.957.154,00	0,00
	JUMLAH	**5.410.087.622,00**	**5.419.087.622,00**	**(9.000.000,00)**

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp523.287.563.001,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.213.815.452,00 atau 0,42% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer pada periode tahun 2023 sebesar Rp521.073.747.549,00. Perbedaan nilai antara LRA dan LO sebesar Rp101.103.216.079,00 terjadi akibat adanya realisasi Pendapatan Transfer pemerintah daerah lainnya atas kurang bayar Triwulan IV atas Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp3.444.392.070,00 yang terealisasi di tahun 2024, adanya realisasi TDF sebesar Rp43.965.569.000,00, dan adanya pencatatan pendapatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp65.912.626.000,00. Adanya Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp4.062.505.991,00 dan Pengakuan dana TDF yang belum tercalisasi di Tahun 2024 sebesar Rp8.156.865.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 110

Rincian Pendapatan Transfer LO dan LRA

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pusat	608.499.872.023,00	506.778.542.023,00	101.721.330.000,00
2.	Pendapatan Transfer Daerah	15.890.907.057,00	16.509.020.976,00	(618.113.921,00)
JUMLAH		**624.390.779.080,00**	**523.287.563.001,00**	**101.103.216.079,00**

Tabel 5. 111

Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	495.463.828.023,00	487.149.198.503,00	8.314.629.520,00	1,71
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	11.314.714.000,00	11.754.042.000,00	-439.328.000,00	-3,74
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.509.020.978,00	22.170.507.046,00	-5.661.486.068,00	-25,54
Total Pendapatan Transfer		**523.287.563.001,00**	**521.073.747.549,00**	**2.213.815.452,00**	**0,42**

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 2024 terealisasi sebesar Rp495.463.828.023,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp8.314.629.520,00 atau 1,71% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp487.149.198.503,00, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 112

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	51.396.069.480,00	68.446.779.000,00	(17.050.709.520,00)	(24,91)
2	Dana Alokasi Umum	331.828.914.827,00	315.856.476.961,00	15.972.437.866,00	5,06
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	78.102.010.197,00	69.883.510.111,00	8.218.500.086,00	11,76
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	34.136.833.519,00	32.962.432.431,00	1.174.401.088,00	3,56
Jumlah		**495.463.828.023,00**	**487.149.198.503,00**	**8.314.629.520,00**	**1,71**

Adapun rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 96, 97, dan 98.**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2024 terdapat perbedaan nilai antara LO dan LRA sebesar Rp35.808.704.000,00 yang merupakan Pengakuan Pendapatan Dana TDF Tahun 2023 yang terealisasi di Tahun 2024 sebesar Rp43.965.569.000,00 dan adanya pencatatan atas Pendapatan TDF sebesar Rp8.156.865.000,00.

Tabel 5. 113

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA

No	Uraian	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	87.204.773.480,00	51.396.069.480,00	35.808.704.000,00
2	Dana Alokasi Umum	331.828.914.827,00	331.828.914.827,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	78.102.010.197,00	78.102.010.197,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	34.136.833.519,00	34.136.833.519,00	0,00
	JUMLAH	**531.272.532.023,00**	**487.306.963.023,00**	**35.808.704.000,00**

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode tahun 2024 terealisasi sebesar Rp11.314.714.000,00 merupakan Pendapatan Transfer dari Insentif Fiskal jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp11.754.042.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp439.328.000,00 atau turun 3,74%. Atas Pendapatan Transfer Dana Desa tidak masuk dalam komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO disebabkan Dana Desa yang ditransfer langsung dari APBN ke Rekening Desa sehingga tidak menambah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Tabel 5. 114

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan LRA

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Insentif Fiskal	11,314,714,000,00	11.314.714.000,00	0,00
2.	Dana Desa	65.912.626.000,00	0,00	65.912.626.000,00
	JUMLAH	**77.227.340.000,00**	**11.314.714.000,00**	**65.912.626.000,00**

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi diakui pada saat pendapatan diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp12.446.514.987,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sebesar Rp9.723.992.059,00 atau turun 43,86% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp22.170.507.046,00, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 115

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.205.661.259,00	1.770.437.296,00	435.223.963,00	24,58
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.660.309.494,00	2.503.622.947,00	156.686.547,00	6,26
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.017.540.095,00	9.055.060.822,00	(37.520.727,00)	(0,41)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.289.383,00	7.393.779,00	2.895.604,00	39,16
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.615.220.767,00	3.833.992.222,00	(1.218.771.455,00)	(31,79)
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**16.509.020.978,00**	**22.170.507.046,00**	**(5.661.486.068,00)**	**(25,54)**

Nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA terdapat perbedaan sebesar (Rp618.113.921,00) yang disebabkan oleh adanya pelunasan atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp3.444.392.070,00 serta adanya pengakuan kurang bayar dana bagi hasil pajak sebesar Rp4.062.505.991,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 116

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan		
		LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.664.991.953,00	2.205.661.259,00	(340.669.306,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.062.147.565,00	2.660.309.494,00	401.838.061,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.865.668.535,00	9.017.540.095,00	(151.871.560,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	17.683.122,00	10.289.363,00	7.393.759,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.080.415.892,00	2.615.220.767,00	(534.804.875,00)
6	Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Provinsi		0,00	0,00
	JUMLAH	**15.890.907.057,00**	**16.509.020.978,00**	**(618.113.921,00)**

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.146.534.557,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp1.711.135.187,00 atau 44,36% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3.857.669.744,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 117

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Hibah	222.789.818,00	3.857.669.744,00	(3.634.879.926,00)	(94,22)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.923.744.739,00	0,00	1.923.744.739,00	100,00
Jumlah	**2.146.534.557,00**	**3.857.669.744,00**	**(1.711.135.187,00)**	**(44,36)**

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk tahun 2024 sebesar Rp222.789.818,00 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan 94,22% atau turun sebesar Rp3.634.879.926.00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.857.669.744,00. Realisasi Pendapatan Hibah - LO berbeda dengan pendapatan hibah - LRA disebabkan oleh pencatatan pendapatan Hibah di LRA hanya mengakui pendapatan hibah dalam bentuk uang sedangkan pendapatan hibah di LO juga mengakui pendapatan hibah dalam bentuk barang. Hibah tahun 2024 berasal dari bantuan Hibah BMHP dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Hibah Kementerian Pekerjaan Umum berupa pekerjaan renovasi SDN Mata Dimba.

5.4.1.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp578.134.872.935,38. Beban tahun 2024 mengalami kenaikan

8,48% atau sebesar Rp45.184.858.800,40 jika dibandingkan dengan Beban tahun 2023 sebesar Rp532.950.014.134,98. Berikut rincian jenis beban dan komposisinya pada tabel berikut :

Tabel 5. 118

Rincian Beban Tahun Anggaran 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	383.752.616.089,02	338.578.448.270,93	45.174.167.818,09	13,34
Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.177.874.146,36	157.614.462.964,05	(436.588.817,69)	(0,28)
Beban Transfer	37.204.382.700,00	36.757.102.900,00	447.279.800,00	1,22
Jumlah Beban	**578.134.872.935,38**	**532.950.014.134,98**	**45.184.858.800,40**	**8,48**

Realisasi Beban dalam tahun 2024 dan tahun 2023 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp383.752.616.089,02. Realisasi Beban Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp45.174.167.818,09 atau 13,34% dibandingkan dengan Realisasi Beban Operasi pada periode tahun 2023 sebesar Rp338.578.448.270,93 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp150.995.168.573,00. Realisasi Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp26.789.104.841,00 atau 21,57% dari realisasi Beban Pegawai pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp124.206.063.732,00. Rincian realisasi beban pegawai menurut jenisnya lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 99.**

Tabel 5. 119

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	115.559.009.694,00	90.304.334.764,00	25.254.674.930,00	112.126.922.636,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.270.720.012,00	10.559.163.565,00	-288.443.553,00	9.251.647.152,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.165.366.101,00	15.387.941.700,00	1.777.424.401,00	17.165.366.101,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.517.157.696,00	7.484.524.387,00	32.633.309,00	7.517.157.696,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.408.670,00	165.046.566,00	1.362.104,00	166.408.670,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	316.506.400,00	305.052.750,00	11.453.650,00	316.506.400,00
JUMLAH	**150.995.168.573,00**	**124.206.063.732,00**	**22.338.144.923,00**	**146.544.208.655,00**

5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp198.689.366.660,03. Realisasi Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp3.708.519.174,90 atau 1,90% dari realisasi Beban Barang dan Jasa pada periode tahun 2023 sebesar Rp194.980.847.485,13. Lebih lanjut rincian beban barang dan jasa – LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 120

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Barang	45.833.561.982,70	43.715.032.998,13	2.118.528.984,57	4,85
Beban Jasa	52.600.878.445,33	58.259.802.094,00	-5.658.923.648,67	-9,71
Beban Pemeliharaan	14.480.022.509,00	14.106.136.175,00	373.886.334,00	2,65
Beban Perjalanan Dinas	63.632.862.229,00	63.597.021.768,00	35.840.461,00	0,06
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.754.475.500,00	9.836.055.500,00	-81.580.000,00	-0,83
Beban Barang Jasa BOS	5.515.322.850,00	5.466.798.950,00	48.523.900,00	0,89
Beban Barang dan Jasa BOSP	129.002.500,00	0	129.002.500,00	100
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.743.240.644,00	0	6.743.240.644,00	100
Jumlah	**198.689.366.660,03**	**194.980.847.485,13**	**3.708.519.174,90**	**1,9**

Pada penyajian Laporan Keuangan nilai Beban Barang dan Jasa memiliki perbedaan dengan nilai Belanja Barang dan Jasa LO – LRA. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya jurnal koreksi kesalahan penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa yang dikoreksi ke Belanja Modal maupun sebaliknya dari Belanja Modal ke Belanja Barang Jasa. Selain itu perbedaan biasanya akibat adanya Belanja Barang Persediaan yang belum tercatat sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan penyajian Beban Barang Jasa LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 121

Rincian Belanja Barang dan Jasa LO dan LRA

Belanja Barang dan Jasa	Belanja		
	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang	38.267.802.667,00	45.833.561.982,70	(7.565.759.315,70)
Beban Jasa	52.215.657.666,00	52.600.878.445,33	(385.220.779,33)
Beban Pemeliharaan	15.243.082.039,00	14.480.022.509,00	763.059.530,00
Beban Perjalanan Dinas	63.663.262.229,00	63.632.862.229,00	30.400.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.933.090.000,00	9.754.475.500,00	(3.821.385.500,00)
Beban Barang Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.515.322.850,00	65.075.000,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	129.002.500,00	(129.002.500,00)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.743.240.644,00	6.743.240.644,00	0,00
JUMLAH	**187.646.533.095,00**	**198.689.366.660,03**	**(10.058.315.894,60)**

Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 100.**

5.4.1.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp29.585.270.179,00. Realisasi Beban Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp13.020.135.179,00 atau 78,60% dari Realisasi Beban Hibah pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp16.565.135.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 122

Rincian Beban Hibah

.No.	Beban Hibah	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan	27.547.144.429,00	16.324.360.000,00	11.222.784.429,00	68,75
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	228.137.500,00	240.775.000,00	(12.637.500,00)	(5,25)
3	Beban Hibah Dana BOSP	1.809.988.250,00	0,00	1.809.988.250,00	100
	Jumlah	**29.585.270.179,00**	**16.565.135.000,00**	**13.020.135.179,00**	**78,6**

5.4.1.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp4.297.021.000,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp1.903.991.000,00 atau 79,56% dari Realisasi Beban Bantuan Sosial pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2.393.030.000,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 123

Rincian Beban Bantuan Sosial

.No.	Beban Bantuan sosial	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	1.270.000.000,00	1.400.000.000,00	(130.000.000,00)	1.270.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	3.027.021.000,00	993.030.000,00	2.033.991.000,00	3.027.021.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**4.297.021.000,00**	**2.393.030.000,00**	**1.903.991.000,00**	**4.297.021.000,00**

5.4.1.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp185.789.676,99. Realisasi Beban Penyisihan Piutang mengalami penurunan sebesar Rp247.582.376,81 atau 57,13% dari Realisasi Beban Penyisihan Piutang pada periode tahun 2023 sebesar Rp433.372.053,80, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 124

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2	42.628.005,41	45.090.636,92	(2.462.631,51)	(5,46)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.625.187,75	30.480.586,60	14.144.601,15	46,41
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	26.609.513,00	1.198.727,50	25.410.785,50	2.119,81
4.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	11.700.000,00	(11.700.000,00)	(100,00)
5.	Beban Penyisihan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	148.981,00	12.735,50	136.245,50	1.069,81
7.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	16.700,00	1.300,00	15.400,00	1.184,62
8.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	479.699,86	448.860,28	30.839,58	6,87
9.	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	20.312.529,97	344.439.207,00	(324.126.677,03)	(100,00)
10.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	50.969.060,00	0,00	50.969.060,00	0,00
Jumlah		185.789.676,99	433.372.053,80	(247.582.376,81)	(57,13)

5.4.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp157.177.874.146,36 mengalami penurunan sebesar Rp436.588.817,69 atau 0,28% dari realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp157.614.462.964,05. Lebih lanjut rincian beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 125

Rincian Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.251.654.969,58	29.021.716.219,86	(770.061.250,28)	(2,65)
Beban Gedung Bangunan	16.181.179.010,00	14.883.632.955,00	1.297.546.055,00	8,72
Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	105.334.680.059,00	103.283.186.575,00	2.051.393.484,00	1,99
Beban Aset Tetap Lainnya	429.534.637,00	430.063.613,00	(528.976,00)	(0,12)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6.980.925.470,78	9.996.863.601,19	(3.014.938.130,41)	(30,16)
Jumlah	157.177.874.146,36	157.614.462.964,05	(436.588.817,69)	(0,28)

5.4.1.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp28.251.654.969,58 mengalami penurunan sebesar Rp770.061.250,28 atau 2,65% dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp29.021.716.219,86.

5.4.1.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp16.181.179.010,00 mengalami kenaikan Rp1.297.546.055,00 atau 8,72% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Gedung Bangunan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp14.883.632.955,00.

5.4.1.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp105.334.580.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.051.393.484,00 atau 1,99% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp103.283.186.575,00.

5.4.1.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp429.534.637,00 mengalami penurunan sebesar Rp528.976,00 atau 0,12% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp430.063.613,00.

5.4.1.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.980.925.470,78 mengalami penurunan sebesar Rp3.014.938.130,41 atau 30,16% dari realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada periode tahun 2023 sebesar Rp9.995.863.601,19.

5.4.1.2.3 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.204.382.700,00. Realisasi Beban Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp447.279.800,00 atau 1,22% dibandingkan realisasi Beban Transfer pada periode tahun 2023 sebesar Rp36.757.102.900,00. Realisasi Beban Transfer-LO dan LRA terdapat perbedaan sebesar Rp65.497.860.200,00 yang disebabkan oleh beban transfer dana desa yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak tercatat sebagai beban bantuan keuangan ke desa sebesar Rp65.912.626.000,00 serta adanya pengakuan utang belanja transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp414.765.800,00.

5.4.1.2.3.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.204.382.700,00 merupakan Alokasi Dana Desa tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp447.279.800,00 atau 1,22% dibandingkan realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada periode tahun 2023 sebesar Rp36.757.102.900. Atas Beban Transfer Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak tercatat sebagai Beban Bantuan Keuangan ke Desa disebabkan oleh realisasi Dana Desa tidak melalui rekening Pemerintah Daerah tapi langsung di transfer dari APBN ke rekening desa masing-masing. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 126

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	Nilai
1.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawonii Barat	6.213.779.780,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawonii Utara	8.271.147.600,00

No.	Uraian	Nilai
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawoni Timur Laut	3.314.374.040,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawoni Timur	4.151.693.840,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawoni Tenggara	5.837.010.940,00
6.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawoni Selatan	4.150.355.280,00
7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Kecamatan Wawoni Tengah	4.552.918.200,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan	286.037.220,00
9.	Pengakuan Utang Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke desa	414.765.800,00
Jumlah		37.204.382.700,00

Surplus Defisit dari Operasi

Surplus Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp35.583.014.864,38) mengalami penurunan sebesar Rp43.898.498.048,04 atau 527,91% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 127

Rincian Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun Anggaran 2024

Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	542.551.858.071,00	541.265.497.318,64
Beban	-578.134.672.935,38	-532.950.014.134,98
Surplus/Defisit dari Operasi	**-35.583.014.864,38**	**8.315.483.183,66**

5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan surplus defisit dari kegiatan non operasional juga merupakan surplus defisit sebelum pos luar biasa. Pada tahun 2024 kegiatan non operasional surplus sebesar Rp21.184.516,92. Realisasi ini lebih besar dibandingkan defisit kegiatan non operasional pada periode tahun 2023 sebesar Rp2.533.300,00. Surplus Defisit Non Operasional merupakan koreksi atas Defisit penghapusan aset dan persediaan kedaluwarsa.

5.4.3 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tidak Terduga atau Beban Luar Biasa yang membuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.4.3.1 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa merupakan Beban Tidak Terduga per 31 Desember 2024 sebesar Rp130.909.090,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp40.909.090,00 atau 45,45% dibandingkan realisasi Beban Tidak Terduga pada periode Tahun 2023 sebesar Rp90.000.000,00.

5.4.3.2 Surplus Defisit

Surplus Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp35.735.108.471,30) mengalami penurunan sebesar Rp43.963.124.954,96 atau 534,31% dibandingkan Surplus Defisit –LO periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp8.228.016.483,66.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 terdiri atas :

Tabel 5. 128

Rincian Arus Kas

No.	Arus Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	171.079.667.157,00	125.777.349.266,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(201.897.358.399,00)	(181.474.437.824,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	8.750.188,00	315.315,00
5	**Kenaikan (Penurunan) Kas (1 s.d 4)**	**(30.808.941.054,00)**	**(55.696.773.243,00)**
6	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara	59.885.046.727,00	115.581.819.970,00
7	Koreksi Silpa Tahun Lalu	100.062,00	0,00
8	**Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara (5+6)**	**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**
9	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	276.692,00	0,00
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.594.529,00	0,00
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	197.389,00	97.337,00
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	3.715.995,00	5.754.217,00
14	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.065.503,00	315.315,00
15	Setara Kas	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
16	Kas di Bendahara BOK	171.376.055,00	614.454.836,00
17	**Saldo Akhir Kas (9 s.d 16)**	**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 Sebesar Rp171.079.667.157,00 naik sebesar Rp45.302.317.891,00 atau 36,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp125.777.349.266,00. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Sebesar Rp643.448.935.676,00 merupakan pendapatan daerah dari hasil operasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan akhir Tahun 2024 jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp80.234.617.190,00 atau 14,25%.

Tabel 5. 129

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.396.488.604,00	4.612.262.047,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.107.876.344,00	1.568.575.658,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	2.573.523.227,00
Lain-lain PAD yang sah	5.273.978.422,00	7.371.844.090,00
Dana Bagi Hasil Pajak	87.204.773.480,00	29.206.590.018,00
Dana Alokasi Umum	331.828.914.827,00	315.856.476.961,00
Dana Alokasi Khusus	112.238.843.716,00	102.845.942.542,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	11.314.714.000,00	11.754.042.000,00
Pendapatan Dana Desa	65.912.626.000,00	65.129.304.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	15.890.907.057,00	17.295.757.943,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0	5.000.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	1.923.744.739,00	0
Jumlah Arus Masuk Kas	**643.448.935.676,00**	**563.214.318.486,00**

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp472.369.268.519,00 meningkat sebesar Rp34.932.299.299,00 atau 0,08% dari arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp437.436.969.220,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama Tahun 2024 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 130

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	146.544.208.656,00	124.206.063.732,00
Belanja Barang dan Jasa	187.646.533.095,00	192.296.333.568,00
Belana Hibah	30.188.210.759,00	16.565.135.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.297.021.000,00	2.393.030.000,00
Belanja Tak Terduga	991.052.110,00	90.000.000,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	102.702.242.900,00	101.896.406.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**472.369.268.519,00**	**437.436.969.220,00**

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp201.897.358.399,00. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2024 sebesar Rp136.109.200,00 merupakan uang masuk dari penjualan aset tetap kendaraan dinas Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD Konawe Kepulauan.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp202.033.467.599,00 merupakan pengeluaran belanja modal tahun 2024 untuk memperoleh aset tetap dan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 5. 131

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Tanah	1.768.930.000,00	4.091.525.640,00
Belanja Peralatan Mesin	33.676.841.899,00	33.886.037.488,00
Belana Gedung dan Bangunan	92.894.711.664,00	60.907.127.172,00
Belana Jalan Irigasi	61.567.257.321,00	73.036.471.874,00
Belanja Aset Tetap lainnnya	4.559.190.025,00	4.262.828.750,00
Perolehan Aset Lainnya	7.546.536.690,00	2.845.554.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	0,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**202.033.467.599,00**	**181.529.544.924,00**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2024 tidak terdapat arus kas masuk maupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2024 berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pajak dan pihak ketiga, misalnya potongan PPN, PPh, Taspen dan Askes. Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp8.750.188,00 merupakan pajak outstanding per 31 Desember 2024. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp36.593.620.836,00 merupakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD dan di bendahara pengeluaran sebesar Rp36.593.620.836,00.

Tabel 5. 132

Rincian Arus Kas Masuk - dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penerimaan Kas Tahun Berkenaan	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36.593.620.836,00	35.686.175.931,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**36.593.620.836,00**	**35.686.175.931,00**

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp36.584.870.648,00 yang terdiri dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BUD sebesar Rp36.593.620.836,00 di tambah PFK outstanding sebesar Rp315.315,00 dan di kurangi Pajak outstanding sebesar Rp9.065.503,00.

Tabel 5. 133

Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.584.870.648,00	35.685.860.616,00
Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**36.584.870.648,00**	**35.685.860.616,00**

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(30.808.941.054,00)	**(55.696.773.243,00)**

Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas BUD/kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga diperoleh saldo akhir kas

daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 penurunan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp30.808.941.054,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 134

Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	171.079.667.157,00	125.777.349.266,00
Aliran Bersih Kas dari Akthvitas Investasi	(201.897.358.399,00)	(181.474.437.824,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	0,00	0,00
Aliran Bersih Kas dari Aktivitas Non Anggaran	8.750.188,00	316.316,00
Jumlah Kenaikan/penurunan bersih kas	**(30.808.941.054,00)**	**(55.696.773.243,00)**

Tabel 5. 135

Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	(30.808.941.054,00)	(55.696.773.243,00)
Saldo Awal di Kas BUD dan BendaharaPengeluaran	59.885.046.727,00	115.581.819.970,00
Koreksi SILPA Tahun Lalu	100.052,00	0,00
Saldo Akhir di Kas BUD	**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**

5.5.6	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	**2024 (Rp)**	**2023 (Rp)**
		59.885.046.727,00	**115.581.819.970,00**

Saldo awal kas di BUD Tahun 2024 sebesar Rp59.885.046.727,00 merupakan saldo akhir kas tahun 2023 atas jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah yang terdapat pada Bank Sultra sampai dengan 31 Desember 2023, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOSP, dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 136

Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)
Kas di Kasda	9.264.425.022,00
Kas di Bendahara BOSP	97.337,00
Kas di Bendahara FKTP	5.754.217,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	315.315,00
Setara Kas	50.000.000.000,00
Kas di Bendahara BOK	614.454.836,00
Saldo Awal di Kas BUD	**59.885.046.727,00**

5.5.7	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2024 (Rp)	2023 (Rp)
		29.076.205.725,00	59.885.046.727,00

akhir kas di BUD merupakan penjumlahan sisa saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di BOK, Kas di Bendahara BOSP, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Setara Kas sehingga menjadi saldo akhir kas sebesar Rp29.076.205.725,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 137

Rincian Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kasda	8.889.979.562,00	9.264.425.022,00
Kas di Bendahara Penerimaan	276.692,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.594.529,00	0,00
Kas di Bendahara Dana FKTP	3.715.995,00	5.754.217,00
Kas di Bendahara BOK	171.376.055,00	614.454.836,00
Kas di BOSP	197.389,00	97.337,00
Kas Lainnya	9.065.503,00	315.315,00
Setara Kas	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas di BUD	**29.076.205.725,00**	**59.885.046.727,00**

Saldo akhir kas sebesar Rp29.076.205.725,00 terdiri dari penjumlahan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOSP, Bendahara FKTP, Bendahara BOK, Kas Lainnya dan Setara Kas yang merupakan penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito pada Bank Sultra Capem Wawonii dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Kas di Kasda sebesar Rp8.889.979.562,00 merupakan sisa uang dari seluruh penerimaan yang terdapat pada rekening giro Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2024 yang terdiri dari sisa uang yang berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik serta atas sisa SILPA Tahun 2023.
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan sisa kas yang belum di setorkan di rekening kas daerah sebesar Rp276.692,00.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih ada di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.594.529,00.
4. Kas di FKTP merupakan sisa akhir kas di bendahara puskesmas dan RSUD atas Dana Kapitasi tahun 2024 sebesar Rp3.715.995,00.
5. Kas di BOK merupakan sisa akhir kas di bendahara puskesmas atas Dana BOK tahun 2024 sebesar Rp171.376.055,00

6. Kas di Bendahara BOSP merupakan sisa kas yang masih berada di bendahara BOSP di tingkat satuan pendidikan baik Sekolah PAUD, Kesetaraan, Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp197.389,00.

7. Kas lainnya merupakan saldo akhir kas yang berada di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.065.503,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 138

Rincian Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo Kas Lainnya Per 31 Des 2024 (Rp)	Tanggal Penyetoran
1.	Dinas Perhubungan	7.497.875,00	14 Januari 2025
2.	Puskesmas Bobolio	8.800,00	10 Februari 2025
3.	Bagian Organisasi	1.558.828,00	12 Februari 2025
Jumlah		**9.065.503,00**	

8. Setara Kas pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 tersisa sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.215.281.971.712,78. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp1.254.668.678.292,65 merupakan saldo akhir ekuitas dana per 31 Desember 2023. Ekuitas Awal mengalami kenaikan Rp8.534.231.947,60 atau 0,68% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.246.134.446.345,05.

5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar (Rp35.735.108.471,30) mengalami penurunan sebesar Rp27.507.091.987,64 atau turun 334,31% dari Surplus/Defisit – LO tahun 2023 sebesar Rp8.228.016.483,66.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp3.651.598.108,57) pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.345.382.644,63 atau turun 1.092,49% dibandingkan dengan dampak kumulatif Perubahan Kebijakan 2023 sebesar Rp306.215.463,94. Adapun rincian koreksi pencatatan sebagai berikut :

a. Koreksi Ekuitas Awal – Aset Tetap	Rp	(662.440.268,00)
b. Koreksi Ekuitas Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	1.419.500.000,00
c. Koreksi Ekuitas Awal – Penyisihan Piutang	Rp	377.248.533,43

d.	Koreksi Ekuitas Awal – Aset Lain-Lain	Rp (4.786.006.426,00)
e.	Koreksi Ekuitas Awal – Kas BOSP	Rp 100.052,00
	Jumlah	**Rp (3.651.598.108,57)**

Koreksi Penambahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp1.419.500.000,00 merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kendaraan roda empat berupa mobil dinas pimpinan DPRD Konawe Kepulauan.
2. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp377.248.533,43 merupakan koreksi penghapusan penyisihan piutang atas pelunasan piutang tahun sebelumnya yang terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp800,00, Pajak Restoran sebesar Rp446,50, Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp448.860,28, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp184.446,65, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp19.276.045,50, Pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp11.700.000,00, penyisihan piutang Dana Non Kapitasi di RSUD sebesar Rp1.083.235,50 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp115.492,00 serta penghapusan penyisihan piutang transfer sebesar Rp344.439.207,00.
3. Koreksi penambahan Kas BOS sebesar Rp100.052,00 merupakan koreksi penambahan kas BOSP.

Koreksi Pengurangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp662.440.268,00) terdiri dari koreksi atas penambahan hibah sebesar Rp757.059.732,00 adanya mutasi aset tetap dari sekwan ke bagian hukum sebesar Rp242.850.000,00 dan adanya Pengurangan Aset akibat penjualan mobil sebesar Rp(1.662.350.000,00). Rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 101.**
2. Koreksi Aset Lain-lain sebesar (Rp4.786.006.426,00) atas Aset Lain-lain yang telah diserahkan ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Polda.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp1.215.281.971.712,78 merupakan saldo ekuitas tahun 2024. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp39.386.706.579,87 atau 3,14% dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp1.254.668.678.292,65.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

6.1.1 Letak Geografis, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian timur jazirah Pulau Sulawesi bagian tenggara. Secara geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 03°68' dan 04°16' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 122°56' dan 123°16' Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara Kecamatan Wawonii Barat, 53 km dari Kota Kendari. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 867,58 km², dengan panjang garis pantai 120,77 km. Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut. Wilayah kecamatan terluas adalah Wawonii Tenggara dengan luas 147,00 km² atau 16,94 persen, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Wawonii Timur Laut yaitu seluas 90,58 km² atau 10,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas wilayah Kebupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Luas (km)	Persentase (%)
1	Wawonii Selatan	Sawaea	11	1	137.45.00	15,84
2	Wawonii Barat	Langara	16	1	92,63	10,68
3	Wawonii Tengah	Lampeapi	12	1	142,39	16,41
4	Wawonii Tenggara	Polara	15	1	147	16,95
5	Wawonii Timur	Munse	11	1	119,83	13,81
6	Wawonii Utara	Lansilowo	21	1	137,7	15,87
7	Wawonii Timur Laut	Ladianta	10	1	90,58	10,44
Total			**96**	**7**	**867,58**	**100,00**

Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan juga dikelilingi oleh perairan laut, yaitu Laut Banda dan Selat Wawonii. Dengan demikian, maka batas-batas administrative daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
2. Sebelah timur berbatasandengan Laut Banda
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii

Selain itu Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada posisi sangat strategis karena :

1. Perairan laut Kabupaten Konawe Kepulauan dilalui oleh jalur pelayaran kapal kendari ibu kota provinsi, kota Kendari;
2. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pelabuhan laut yang sangat besar untuk menopang kegiatan industri perikanan laut serta arus perdagangan nasional dan internasional;

3. Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten Konawe Kepulauan sangat penting karena wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii merupakan pertemuan segi tiga arus laut, yaitu Laut Banda, Selat Wawonii, dan Selat Buton, sehingga memiliki potensi sumber daya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar. Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat, sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, berpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan kerapu.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi tambang, seperti nikel laterit, besi laterit, dan krom serta emas. Sebaran 21.960 ha. Potensi hipotetik±batuan ultrabasa di pulau Wawonii seluas sumber daya nikel laterite sebesar 865.639.325,93 m3. Jika cadangan ini diolah menjadi crude ferro nickel (CFN) yang berkapasitas produksi 100.000 ton/tahun dengan kebutuhan umpan 736.000 ton/tahun bijih nikel laterit, maka umur eksploitasi tambang di Wawonii dipastikan berada di atas 30 tahun.
5. Transportasi laut antar Kendari – Langara (ibu kota kabupaten Konawe Kepulauan) cukup lancar, tersedia setiap hari dengan armada kapal rakyat dan ferry ASDP. Akses transportasi darat antar kecamatan semakin lancar dengan terbukanya jalan lingkar pulau Wawonii.

6.1.2 Arti dan Makna Lambang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

1. **Bintang**

   Adalah simbol yang merupakan pencerahan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersumber dari spritualitas religius yang menunjukan bahwa masyarakat Konawe Kepulauan adalah masyarakat agamis (beriman dan bertaqwa) yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang dianutnya.

2. **Kolungku**

   Adalah Simbol Adat. Sebuah wadah seserahan atas suatu peristiwa adat yang menunjukan bentuk penghormatan, penghargaan dan pemuliaan nilai-nilai budaya, tradisi dan peradaban masyarakat / suku WAWONII yang bersifat normatif dan mengikat.

3. **Padi dan Kapas**

   Adalah simbol kemakmuran dan kesejahtraan. Sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan daerah melalui upaya-upaya pembangunan yang berencana, bertahap dan berkelanjutan menuju pada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

4. **23 (dua puluh tiga) Butir Padi**

   Adalah simbol yang menunjukan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013.

5. **13 (tiga belas) Butir Kapas**

   Adalah simbol yang menunjukan bahwa upaya perjuangan pemekaran yang dilakukan selama 6 tahun 3 bulan 12 hari telah berhasil menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang -Undang No. 13 Tahun 2013.

6. **7 (tujuh) Simpul Ikatan Padi Kapas**

   Adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat mulai dari tujuh 7 (tujuh) desa berkembang menjadi 7 (tujuh) kecamatan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. **Lingkaran Inti yang Terdiri atas Darat (Pulau) Laut & Udara.**

   Adalah simbol yang menunjukkan cakupan wilayah/daerah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri atas 3 (tiga) Matra yakni: Matra Darat (wilayah darat), Matra Laut (wilayah laut), Matra Udara (wilayah dirgantara).

8. **Pulau & Kelapa**

   a. Pulau menunjukan nama daerah letak dan kedudukan Kabupaten Konawe Kepulauan yakni Pulau Wawonii;
   b. Kelapa adalah komoditi utama masyarakat Wawonii (Konawe Kepulauan) sebagai sumber penghidupan sosial ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
   c. Kelapa adalah simbol yang sakral karena di jadikan Mas Kawin dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan;dan
   d. 11 (sebelas) pelepah dan 5 (lima) buah kelapa menunjukan bahwa daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan disahkan pada tanggal 11 (sebelas) bulan 5 (lima) tahun 2013.

Lambang daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini juga mempunyai arti dan makna yang luas, dalam mencakup seluruh ruangan dan waktu, lingkungan kehidupan masyarakat, dan segenap aspirasi dijiwa rakyat yangdituangkan dalam tata nilai dan sumber sejarah kebudayaan, adat istiadat dan sumber kehidupan sosial lainnya.

Serta lambang ini juga mengandung nilai-nilai kreatif yang menggerakkan dan memotivasi cita-cita rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6.1.3 Keadaan Daerah

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai ciri khas mulai dari bermacam makanan maupun suku yang ada, serta hasil-hasil bumi yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karena itu sejak era reformasi dan terbentuknya otonomi daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan telah meningkatkan nilai adat istiadat untuk mempererat tali persaudaraan antar suku dalam menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam meningkatkan kehidupan dan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kabupaten Konawe Kepulauan juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang luas, serta sumber daya manusia yang baik untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

6.1.3.1 Topografi

Sebagian besar (39,42%) wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada ketinggian 0 - 100 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada daerah pesisir pantai. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian lokasi, wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 6. 2
Topografi Ketinggian diatas Permukaan Elevasi

No	Elevasi (mdpl)	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	0 - 100	28.086,48	39,42
2.	101 - 200	13.260,19	18,60
3.	201 - 300	10.037,37	14,09
4.	301 - 400	6.589,79	9,25
5.	401 - 500	3.982,04	5,59
6.	501 - 600	4.132,94	5,80
7.	601 - 700	3.245,50	4,55
8.	701 - 800	1.530,22	2,15
9.	801 - 884	392,25	0,55
Jumlah		**71.256,78**	**100,00**

Dataran rendah terutama terdapat di Wawonii Barat dan Wawonii Timur Laut dengan kisaran ketinggian 2-5 m dpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian berkisar antara 15 s.d. 31 m dpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kab. Konawe Kepulauan, 2025). Sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (64%) berada pada kelas lereng > 8%. Sementara itu, terdapat 36% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dengan kondisi yang datar hingga landai. Selain menurut ketinggianya dapat diklasifikasi menurut kemiringan tanah dan jenis tanah sebagaimana telah dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. 3
Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Lereng)

Tingkat Kemiringan Tanah		Persentase (%)
Kelas Lereng (%)	Ha	
0 -3	13,801	19,57
3 -8	11,460	16,24
8 -15	17,301	24,54
15 25	18,223	25,84
25 -40	8,442	11,97
> 40	1,297	1,84
Jumlah	**70,514**	**100,00**

Wilayah dengan kelerengan 0-8% terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu di Wawonii Barat mencapai 4.234 ha, Wawonii Selatan 5.459 ha, Wawonii Tengah 3.890 ha, Wawonii Tenggara 2.320 ha, Wawonii Timur 1.554 ha, Wawonii Timur Laut 3.594 ha, dan Wawonii Utara 4.199 ha.

6.1.3.2 Hidrologi

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai beberapa sungai yang relatif besar seperti sungai Lampeapi, sungai Lansilowo, sungai Ladianta, dan sungai Wongkolo, serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut potensial sebagai sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik mikro hidro *(hydro power)*. Adapun sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik mikro hidro *(hydro power)* adalah sungai Lansilowo, sungai Mosolo, dan sunagi Lampeapi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari bekerjasama dengan BPPT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kincir angin mikro sebagai pembangkit listrik.

6.1.3.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Secara umum wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah. Potensi pengembangan kawasan budidaya perikanan terdiri dari Kecamatan Wawonii Tengah dan Kecamatan Wawonii Selatan. Sedangkan potensi pengembangan budidaya pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi wilayah Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara. Sementara untuk pengembangan sektor pariwisata meliputi Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut. Adapun kawasan pengembangan obyek wisata utamanya di tiga wilayah tersebut yakni Pantai Kampa, Air Terjun Tumburano, dan Peninggalan Sejarah Watu Tinapi (Kanopi). Sementara pengembangan kawasan obyek wisata bahari terutama di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara antara lain Pantai Polara, DAS Mosolo, Pantai Nambo Jaya, dan Kawasan Pantai Tengkera. Selain itu, terdapat obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Wawonii Selatan yakni obyek wisata Air Terjun Kopea, Pantai Baku Baku, dan Air Panas, Tahi Laro (Danau). Khusus untuk potensi pengembangan industri perikanan terpadu terdapat di Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah. Selain itu, potensi pembangunan industri perikanan terpadu di sektor lainnya adalah industri pengolahan kelapa terutama di Desa Wawonii Kecamatan Wawonii Barat. Pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu akan menjadi salah satu prioritas oleh karena wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan terkenal sebagai salah satu daerah produsen kopra di Provinsi Sulawesi Tenggara.

6.2 Kepemimpinan Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Bupati H. Amrullah dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Andi Muhammad Lutfi, SE, MM. Kepemimpinan tersebut merupakan masa jabatan Periode Kedua 2021 – 2026 setelah terpilih pada pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2021.

DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2019 yang akan berakhir pada tahun 2024. Susunan kepemimpinan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua DPRD : ISHAK, SE
b. Wakil Ketua DPRD : ISMAN
c. Wakil Ketua DPRD : IRWAN

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna *(full disclosure)*, laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran- sasaran stratejik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah target kinerja APBD yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai rata – rata diatas 90% dari target yang ditetapkan.
2. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :
   a. Target Pendapatan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 646.486.163.577,00
   b. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 643.585.044.876,00
   c. Selisih Lebih Pendapatan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 2.901.118.701,00
3. Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :
   a. Target Belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp 706.370.894.989,00
   b. Realisasi Belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp 674.402.736.118,00
   c. Selisih kurang Belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp 31.968.158.871,00
4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 terdiri atas :
   a. Belanja Pegawai tahun 2024 Rp 146.544.208.655,00
   b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 Rp 187.646.533.095,00
   c. Belanja Hibah tahun 2024 Rp 30.188.210.759,00
   d. Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 Rp 4.297.021.000,00
   e. Belanja Modal tahun 2024 Rp 202.033.467.599,00
   f. Belanja Tak Terduga tahun 2024 Rp 991.052.110,00
   g. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024 Rp 102.702.242.900,00
5. Defisit pada Laporan Realisasi sebesar Rp30.817.691.242,00 merupakan pengurangan realisasi pendapatan sebesar Rp643.585.044.876,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp674.402.736.118,00

6. Realisasi pembiayaan tahun 2024 terdiri atas :

a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024	Rp	59.884.831.464,00
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024	Rp	0,00
c. Pembiayaan Netto	Rp	59.884.831.464,00

7. Realisasi Pendapatan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp 542.551.858.071,00
8. Realisasi Beban Operasional (LO) Tahun 2024 Rp 578.134.872.935,38
9. Surplus/Defisit dari operasi (LO) tahun 2024 Rp (35.583.014.864,38)
10. Surplus dari non operasi (LO) tahun 2024 Rp (21.184.516,92)
11. Realisasi Beban Luar Biasa (LO) Tahun 2024 Rp 130.909.090,00
12. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa (LO) Tahun 2024 Rp (130.909.090,00)
13. Total Surplus/defisit (LO) tahun 2024 Rp (35.735.108.471,30)
14. Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 sebesar Rp1.222.635.736.502,78 terdiri dari :

a. Aset Lancar	Rp	39.966.740.065,92
b. Investasi Jangka Panjang	Rp	12.500.000.000,00
c. Aset Tetap	Rp	1.134.170.369.624,20
d. Aset Lainnya	Rp	35.998.626.812,66

15. Total Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 Rp7.353.764.790,00 terdiri atas:

a. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	7.353.764.790,00
b. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00

16. Saldo ekuitas awal tahun 2024 Rp 1.254.668.678.292,65
17. Saldo ekuitas akhir tahun 2024 Rp 1.215.281.971.712,78

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ini dapat berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyampaian Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN VIII

Lampiran VIII : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Badan Keuangan Daerah	Piutang PBB-P2	387.402.824,00	50.717.616,00	24.174.364,00	413.946.076,00
		Piutang PMBLB	606.687.760,74	42.654.238,00	277.127.550,00	371.614.448,74
		Piutang Pajak Restoran	1.698.600,00	150.500,00	89.300,00	1.759.800,00
		Piutang Pajak Hotel	260.000,00	1.440.000,00	160000	1.540.000,00
		Piutang Pajak Penerangan Jalan	89.772.056,00	95.939.972,00	89.772.056,00	95.939.972,00
		Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	3.444.392.070,00	4.062.505.991,00	3.444.392.070,00	4.062.505.991,00
		Piutang Lainnya	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	Piutang Pajak Retribusi RSUD	216.647.100,00	382.154.600,00	216.647.100,00	382.154.600,00
		Piutang Lainnya	0,00	60.513.453,00	0,00	60.513.453,00
3	Dinas Kesehatan	Piutang Pajak Retribusi Dinas Kesehatan	23.098.400,00	13.251.300,00	23.098.400,00	13.251.300,00
		Piutang Lainnya	0,00	61.587.299,00	0,00	61.587.299,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117.000.000,00	-	117.000.000,00	-
		Piutang Lainnya	0,00	62.004.736,00	0,00	62.004.736,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Piutang Lainnya	0,00	129.040.912,00	0,00	129.040.912,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Piutang Lainnya	0,00	196.544.200,00	0,00	196.544.200,00
JUMLAH			4.891.458.810,74	5.158.504.817,00	4.192.460.840,00	5.857.502.787,74

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIDZI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN IX

Lampiran IX PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Pembangunan Tuga Langara, Kec. Wawonii Barat	1.666.220,00	1.666.220,00	-
2	Pembangunan Gorong-Gorong (6 Unit) Desa Bukit Permai Kec. W. Barat	2.460.350,00	2.460.350,00	-
3	Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong 4 (empat) Unit	1.274.330,00	1.274.330,00	-
4	Pembangunan Kantor Sekretariat / SKPD C Kec. Wawonii Barat	3.687.800,00	3.687.800,00	-
5	Pembangunan Talud Tebing Sungai Air Bajo Kec. Wawonii Barat	12.883.440,00	12.883.440,00	-
6	Lanjutan Pembangunan Pendopo Rujab Bupati Konkep Kec. W. Barat	39.280,00	39.280,00	-
7	Pembangunan Jalan, Bobolio- Batulu Segmen 1	107.028.000,00	107.028.000,00	-
8	Pembangunan Talud/ Bronjong Pengaman Sungai Lampopi, Kec. W. Tengah	508.640,00	508.640,00	-
9	Pembangunan Pagar SDN Lawey Kec. Wawonii Selatan	1.258.814,00	1.258.814,00	-
10	Pembangunan Bendung D.I Ladianta Kec. Wawonii Timur Laut	12.309.850,00	12.309.850,00	-
11	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Kec. Wawonii Timur Laut	496.275,94	496.275,94	-
12	Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula SMPN 2 Kecamatan Wawonii Barat	4.986.741,80	4.986.741,80	-
13	Pembangunan Pagar SMPN 2 Wawonii Utara	1.998.100,00	1.998.100,00	-
14	Pembangunan Kantor UPTD Kec. Wawonii Timur Laut	3.865.755,00	3.865.755,00	-
15	Pembangunan Jalan Desa Kec. Wawonii Barat	1.571.100,00	1.571.100,00	-
16	Pembangunan Gorong - Gorong Kec. Wawonii Timur Laut	2.298.331,00	2.298.331,00	-
17	Pembangunan Saluran Primer/ Sekunder Desa Landianta	2.737.720,00	2.737.720,00	-
18	Pembangunan Jalan Desa Matabubu	5.389.920,00	5.389.920,00	-
19	Pembangunan Jalan Pelabuhan Jalan Desa Matalurunga	4.446.000,00	4.446.000,00	-
20	Peningkatan Jalan Aspal Ruas Langara-Wawobili	22.019.112,00	22.019.112,00	-
21	Pembinaan Jalan Desa LABISA Kec. Wawonii Utara	3.456.000,00	3.456.000,00	-
22	Penataan Halaman SDN Matabubu	1.220.032,00	610.016,00	610.016,00
23	Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Wungkolo (DAK)	17.500.467,00	8.750.233,50	8.750.233,50
24	Rekonstruksi/ Peningkatan Struktur Jalan Aspal Ruas Kolora Batulu (DAK)	27.576.819,00	13.788.409,50	13.788.409,50
25	Rehabilitasi/Pengembangan Areal Parkir Pelabuhan Rakyat Langara	34.284.564,00	17.142.282,00	17.142.282,00
26	Peningkatan Jalan Ruas Langara Indah-Pasir Putih	25.336.080	12.668.040,00	12.668.040,00
27	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Waworope	729.234	72.923,40	656.310,60
28	Pembangunan Saluran Drainase Desa Pesue	2.203.740	220.374,00	1.983.366,00
29	Peningkatan Jalan Aspal Ruas SP. 4 - Lamoluo - Perkamoran	15.840.000	1.584.000,00	14.256.000,00
30	Penataan Jalan Akses Masuk Pelabuhan Sawapatani	1.144.044	114.404,40	1.029.639,60
31	Penataan Halaman Kantor di Kabupaten Konawe Kepulauan	3.331.625	333.162,50	2.998.462,50
32	Penataan Halaman dan Water Proofing Gedung Power House	2.124.760	212.476,00	1.912.284,00
33	Pembangunan Lapangan Parkir Desa Capil	149.633	14.963,30	134.669,70
34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Sekolah SDN 3 Wawonii Timur	167.189	16.718,90	150.470,10
35	Pembangunan Saluran Banjir Desa Nanga	970.244	97.024,40	873.219,60
36	Pembinaan dan Penataan Halaman SDN 1 Wawonii Tenggara	6.718.140	33.590,70	6.684.549,30
37	Rekonstruksi Jalan Aspal Tombaone - Lansilowo Keluruhan	35.936.098	179.680,49	35.756.417,51
	Jumlah Piutang PNBL	**371.614.448,74**	**252.220.078,83**	**119.394.369,91**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	27.494.479,00	27.494.479,00	-
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	16.457.490,00	16.457.490,00	-
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.893.869,00	5.893.869,00	-
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	978.894,00	978.894,00	-
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22.047.081,00	22.047.081,00	-
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	16.923.426,00	16.923.426,00	-
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	7.196.694,00	7.196.694,00	-
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.359.435,00	3.359.435,00	-

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
9	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	21.462.774,00	21.462.774,00	-
10	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.398.690,00	3.398.690,00	-
11	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17.121.072,00	17.121.072,00	-
12	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	6.923.370,00	6.923.370,00	-
13	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.788.316,00	5.788.316,00	-
14	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.408.800,00	2.408.800,00	-
15	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.499.933,00	3.499.933,00	-
16	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.691.625,00	4.691.625,00	-
17	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	14.980.000,00	14.980.000,00	-
18	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8.474.478,00	8.474.478,00	-
19	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.400.000,00	2.400.000,00	-
20	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.823.982,00	1.911.991,00	1.911.991,00
21	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.703.741,00	2.851.870,50	2.851.870,50
22	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	14.918.715,00	7.459.357,50	7.459.357,50
23	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.261.404,00	2.130.702,00	2.130.702,00
24	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.343.938,00	1.171.969,00	1.171.969,00
25	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	255.685,00	127.842,50	127.842,50
26	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	402.488,00	201.244,00	201.244,00
27	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.622.966,00	1.811.483,00	1.811.483,00
28	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	32.161.038,00	16.080.519,00	16.080.519,00
29	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	553.884,00	276.942,00	276.942,00
30	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.419.158,00	6.209.579,00	6.209.579,00
31	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	11.652.960,00	5.826.480,00	5.826.480,00
32	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	467.485,00	46.748,50	420.736,50
33	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.985.250,00	598.525,00	5.386.725,00
34	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.596.860,00	259.686,00	2.337.174,00
35	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.497.360,00	149.736,00	1.347.624,00
36	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	16.061.994,00	80.309,97	15.981.684,03
37	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.430.334,00	27.151,67	5.403.182,33
38	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8.279.999,00	41.399,80	8.238.559,21
39	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8.742.892,00	43.714,46	8.699.177,54
40	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.202.437,00	61.012,19	12.141.424,82
41	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	20.409.002,00	10.204.501,00	10.204.501,00
42	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.262.220,00	326.222,00	2.935.998,00
43	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	21.605.964,00	2.160.590,40	19.445.313,60
44	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	13.494.968,00	1.349.496,80	12.145.471,20
45	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2,00	0,20	1,80
46	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.327.354,00	432.735,40	3.894.618,60
47	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.296.190,00	529.619,00	4.766.571,00
48	Pintang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	665.480,00	66.548,00	598.932,00
Jumlah Piutang PBB		**413.946.076,00**	**253.938.401,88**	**160.007.674,12**
NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENIVISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	PAJAK RESTORAN BULAN JUNI	27.000,00	2.700,00	24.300,00
2	PAJAK RESTORAN BULAN JULI	12.000,00	1.200,00	10.800,00
3	PAJAK RESTORAN BULAN OKTOBER	10.000,00	1.000,00	9.000,00
4	Pajak Rumah Makan Bulan Januari 2023 An. Rumah Makan PAK DAENG	186.000,00	18.600,00	167.400,00

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
5	Pajak Rumah Makan Bulan Januari 2023 An. Rumah Makan POLMAS	24.500,00	2.450,00	22.050,00
6	Pajak Rumah Makan Bulan Februari 2023 An. Rumah Makan SEDERHANA	500,00	50,00	450,00
7	Pajak Rumah Makan Bulan Februari 2023 An. Rumah OGIE 2	78.500,00	7.850,00	70.650,00
8	Pajak Rumah Makan Bulan Februari 2023 An. Rumah Makan PUTRI SAONA	176.500,00	17.650,00	158.850,00
9	Pajak Rumah Makan Bulan Februari 2023 An. Rumah OGIE 1	233.500,00	23.350,00	210.150,00
10	Pajak Rumah Makan Bulan Maret 2023 An. Rumah Makan PUTRI SAONA	42.500,00	4.250,00	38.250,00
11	Pajak Rumah Makan Bulan Mei 2023 An. Rumah Makan BAROKAH	25.000,00	2.500,00	22.500,00
12	Pajak Rumah Makan Bulan Mei 2023 An. Rumah Makan POLMAS	26.000,00	2.600,00	23.400,00
13	Pajak Rumah Makan Bulan Mei 2023 An. Rumah Makan OGIE 2	20.000,00	2.000,00	18.000,00
14	Pajak Rumah Makan Bulan Mei 2023 An. Rumah Makan OGIE 1	3.000,00	300,00	2.700,00
15	Pajak Rumah Makan Bulan Mei 2023 An. Rumah Makan PUTRI SAONA	73.500,00	7.350,00	66.150,00
16	Pajak Rumah Makan Bulan Juni 2023 An. Rumah Makan BAROKAH	3.000,00	300,00	2.700,00
17	Pajak Rumah Makan Bulan Juni 2023 An. Rumah Makan MAS DAENG	191.500,00	19.150,00	172.350,00
18	Pajak Rumah Makan Bulan Juli 2023 An. Rumah Makan MAS DAENG	153.500,00	15.350,00	138.150,00
19	Pajak Rumah Makan Bulan Agustusi 2023 An. Rumah Makan MAS DAENG	40.000,00	4.000,00	36.000,00
20	Pajak Rumah Makan Bulan Oktober 2023 An. Rumah Makan Warung 69	134.800,00	13.480,00	121.320,00
21	Pajak Rumah Makan Bulan Oktober 2023 An. Rumah Makan OGIE 1	114.000,00	11.400,00	102.600,00
22	Pajak Rumah Makan Bulan November 2023 An. Rumah Makan SAHABAT NUSANTARA	29.000,00	2.900,00	26.100,00
23	Pajak Rumah Makan Bulan November 2023 An. Rumah Makan OGIE 1	5.000,00	500,00	4.500,00
24	Pajak Rumah Makan Bulan Desember 2023 An. Rumah Makan OGIE 1	150.500,00	752,50	149.747,50
Jumlah Piutang Pajak Restoran		**1.759.800,00**	**161.682,50**	**1.598.117,50**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	PAJAK HOTEL BULAN SEPTEMBER	100.000,00	10.000,00	90.000,00
2	PAJAK HOTEM BULAN NOVEMBER	1.440.000,00	7.200,00	1.432.800,00
Jumlah Piutang Pajak Hotel		**1.540.000,00**	**17.200,00**	**1.522.800,00**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember	95.939.972,00	479.699,86	95.460.272,14
Jumlah Piutang Pajak Penerangan Jalan		**95.939.972,00**	**479.699,86**	**95.460.272,14**
Jumlah Piutang Pajak Daerah		**884.800.296,74**	**506.817.063,07**	**377.983.233,67**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.251.300,00	66.256,50	13.185.043,50
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	122.865.300,00	614.326,50	122.250.973,50
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	115.794.860,00	11.579.480,00	104.215.320,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	143.494.500,00	14.349.450,00	129.145.050,00
Jumlah Piutang Pajak Retribusi		**395.405.900,00**	**26.609.513,00**	**368.796.387,00**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	4.062.505.991,00	20.312.529,97	4.042.193.461,03
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		**4.062.505.991,00**	**20.312.529,97**	**4.042.193.461,03**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Lainnya	514.790.600,00	56.069.040,00	458.721.540,00
Jumlah Piutang Lainnya		**514.790.600,00**	**56.069.040,00**	**458.721.540,00**
Jumlah Piutang Tak Tertagih		**5.857.502.787,74**	**609.808.166,04**	**5.247.694.621,70**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

ASRAFI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN X

Lampiran X : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 40
Tanggal : 31 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITLASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
	NIHIL			
JUMLAH				

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XI

Lampiran XI : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang Telah disertakan sampai dengan awal tahun	Jumlah Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2014	PT. BANK SULTRA	SK BUPATI KONAWE KEPULAUAN NO. 8A TAHUN 2014, TGL 21 JULI 2014	SAHAM	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00		
2	2016	PT. BANK SULTRA	PERDA KONAWE KEPULAUAN NO. 12 TAHUN 2016, 19 DESEMBER 2016	SAHAM	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00		
3	2017	PT. BANK SULTRA	PERDA KONAWE KEPULAUAN NO. TAHUN 2017	SAHAM	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00		
4	2019	PT. BANK SULTRA	PERDA KONAWE KEPULAUAN NO. TAHUN 2019	SAHAM	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00			
5	2022	PT. BANK SULTRA	PERDA KONAWE KEPULAUAN NO. TAHUN 2022	SAHAM	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00			
6	2023	PT. BANK SULTRA	PERDA KONAWE KEPULAUAN NO. TAHUN 2023	SAHAM	2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00			
Jumlah					12.500.000.000,00		12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00		

Tangara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XII

Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH 2025
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	283.374.321.882,11	31.976.296.796,00	4.433.617.979,00	310.917.000.699,11
2	Dinas Kesehatan	163.759.417.533,10	60.713.792.540,00	40.041.958.837,00	186.431.251.236,10
3	Rumah Sakit Umum	68.623.159.620,00	38.820.266.050,00	4.494.979.425,00	102.948.386.245,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	990.231.441.169,00	108.048.806.220,00	41.161.609.111,00	1.057.118.868.278,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	42.774.928.600,00	4.353.116.790,00	79.340.690,00	47.048.704.700,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	812.812.900,00	59.700.000,00	-	872.512.900,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	6.666.264.127,00	1.377.798.000,00	32.390.000,00	8.011.672.127,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.567.227.604,00	2.796.105.925,00	46.746.400,00	29.316.587.129,00
9	Dinas Sosial	1.687.223.350,00	140.200.000,00	35.000.000,00	1.792.423.350,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	768.572.775,00	48.450.000,00	9.600.000,00	807.422.775,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.556.259.350,00	14.000.000,00	-	6.570.259.350,00
12	Dinas Pencatatan Sipil	2.862.608.508,00	72.091.000,00	-	2.934.699.508,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	1.531.282.000,00	30.798.000,00	-	1.562.080.000,00
14	Dinas Kependudukan, KB, P3A	14.306.288.310,00	1.534.142.000,00	113.883.000,00	15.726.547.310,00
15	Dinas Perhubungan	66.252.111.261,00	7.124.383.400,00	2.621.179.400,00	70.755.315.261,00
16	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	3.108.990.500,00	71.870.000,00	-	3.180.860.500,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	49.865.066.899,30	8.162.797.351,00	1.270.857.291,00	54.757.006.959,30
18	Dinas Penanaman Modal, Perjinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.715.386.700,00	245.187.005,00	123.692.125,00	2.836.881.580,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	17.038.231.780,00	3.007.782.125,00	1.408.162.125,00	18.637.851.780,00
20	Dinas Perikanan	23.790.531.723,00	332.853.000,00	-	24.123.384.723,00
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	10.294.181.483,00	970.950.000,00	292.300.000,00	10.972.831.483,00
22	Dinas Pertanian	18.978.789.158,00	1.948.705.439,00	102.629.400,00	20.824.865.197,00
23	Bagian Umum	36.465.120.520,00	873.712.840,00	48.640.000,00	37.290.193.360,00
24	Bagian Pemerintahan Umum	82.235.235.502,00	349.000.000,00	421.900.000,00	82.162.335.502,00
25	Bagian Perekonomian	902.362.600,00	23.050.000,00	-	925.412.600,00
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	375.903.000,00	-	-	375.903.000,00
27	Bagian Ekonomi dan SDA	370.168.032,00	10.200.000,00	-	380.368.032,00
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	1.151.490.000,00	-	-	1.151.490.000,00
29	Bagian Hukum	449.487.000,00	290.340.000,00	-	739.827.000,00
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.405.663.290,00	46.540.000,00	3.000.006,00	1.449.203.290,00
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1.259.596.950,00	49.900.000,00	-	1.309.496.950,00
32	Sekretariat DPRD	11.835.841.427,00	1.345.971.603,00	1.689.512.000,00	11.492.301.030,00
33	Kecamatan Wawonii Barat	1.474.334.806,00	54.800.000,00	-	1.529.134.806,00
34	Kecamatan Wawonii Utara	1.221.498.136,00	64.390.000,00	-	1.285.888.136,00
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	1.013.339.000,00	23.450.000,00	-	1.036.789.000,00
36	Kecamatan Wawonii Timur	901.183.250,00	-	-	901.183.250,00
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	999.658.000,00	28.350.500,00	350.500,00	1.027.658.000,00
38	Kecamatan Wawonii Selatan	1.304.782.468,00	18.552.000,00	-	1.323.334.468,00
39	Kecamatan Wawonii Tengah	1.244.650.000,00	20.640.000,00	-	1.265.290.000,00
40	Inspektorat Daerah	2.078.186.360,00	555.473.400,00	-	2.633.659.760,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.380.191.100,00	663.300.000,00	-	5.043.491.100,00
42	Badan Keuangan Daerah	14.331.953.173,00	2.726.800.000,00	72.940.000,00	16.985.813.173,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.235.744.000,00	87.190.000,00	-	2.322.934.000,00
	TOTAL ASET	1.972.201.485.806,51	279.141.721.904,00	100.564.288.243,00	2.150.778.919.467,51

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XIII

Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	Aset Tetap Tanah	60.083.873.770,00	2.597.258.000,00	-	62.681.131.770,00
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	312.016.755.918,77	40.863.467.787,00	4.429.447.467,00	348.450.776.238,77
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	524.302.855.294,00	111.442.779.237,00	69.978.142.951,00	565.767.491.580,00
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.055.089.810.188,00	67.572.632.411,00	19.189.772.792,00	1.103.472.669.807,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.930.397.135,74	4.862.310.025,00	3.137.037.533,00	11.655.669.627,74
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	10.777.793.500,00	51.895.692.771,00	3.922.305.827,00	58.751.180.444,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset	-867.831.101.167,73	(153.676.442.148,58)	(4.898.993.473,00)	(1.016.608.549.843,31)
JUMLAH		**1.104.370.384.638,78**	**279.234.140.231,00**	**95.757.713.097,00**	**1.134.170.369.624,20**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XIV

Lampiran XIV : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI									BEKLASIFIKASI /PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG						
			ASET TIDAK BERWUJUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TIDAK BERWUJUD	ASET LAIN-LAIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12=2+3+4+5+6-7-8-9-10-11
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.422.000,00											201.422.000,00
2	Dinas Kesehatan	251.830.000,00		21.257.834.256,00					113.777.299,00				21.395.887.957,00
3	Rumah Sakit Umum	404.372.300,00		4.033.540.000,00					230.575.528,00				4.207.336.772,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	9.243.181.200,00		20.507.244.479,00	5.731.961.026,00								35.484.386.705,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-											-
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-					94.490.000,00	69.900.000,00	2.558.665.000,00	341.260.000,00			- 3.063.715.000,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	32.390.000,00							32.390.000,00				-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.950.000,00											45.950.000,00
9	Dinas Sosial	-											-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-		9.600.000,00									9.600.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	-											-
12	Dinas Pencatatan Sipil	-											-
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	-											-
14	Dinas Kependudukan, KB, PPA	-				113.600.000,00							113.600.000,00
15	Dinas Perhubungan	53.700.000,00							44.800.000,00				8.900.000,00
16	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	-											-
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	129.698.000,00		99.467.000,00			38.798.000,00						189.367.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-											-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.000.000,00											16.000.000,00
20	Dinas Perikanan	-											-
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	149.850.000,00		142.450.000,00			149.850.000,00						142.450.000,00
22	Dinas Pertanian												-
23	Bagian Umum	-											-
24	Bagian Pemerintahan Umum	247.400.000,00					247.400.000,00						-

NO	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI									RECLASSIFICATION / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG						
			ASET TIDAK BERWUJUD	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TIDAK BERWUJUD	ASET LAIN-LAIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
25	Bagian Pembangunan	-											-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-											-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-											-
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	-											-
29	Bagian Hukum	-											-
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-											-
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-											-
32	Sekretariat DPRD	-											-
33	Kecamatan Wawonii Barat	-											-
34	Kecamatan Wawonii Utara	-											-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-											-
36	Kecamatan Wawonii Timur	-											-
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-											-
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-											-
39	Kecamatan Wawonii Tengah	-											-
40	Inspektorat Daerah	-											-
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-											-
42	Badan Keuangan Daerah												-
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-											-
Jumlah KDP		10.777.751.500,00	-	46.050.131.725,00	5.731.961.036,00	113.608.000,00	531.538.000,00	69.500.000,00	2.979.607.827,00	341.260.000,00		-	58.751.180.444,00

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XV

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.004.677.733,00	0,00		1.004.677.733,00
2	Dinas Kesehatan	526.509.168,00	-		526.509.168,00
3	Rumah Sakit Umum	49.900.000,00	0,00		49.900.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	14.644.842.795,00	4.249.257.690,00		18.894.100.485,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.820.713.460,00	624.389.000,00		4.445.102.460,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	0,00		-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	-		-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.000.000,00	-		750.000.000,00
9	Dinas Sosial	769.900.000,00	-		769.900.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	-		-
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.114.483.200,00	-		1.114.483.200,00
12	Dinas Pencatatan Sipil	-	112.300.000,00		112.300.000,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	650.000.000,00	-		650.000.000,00
14	Dinas Kependudukan, KB, P3A	-	-		-
15	Dinas Perhubungan	825.000.000,00	1.317.380.000,00		2.142.380.000,00
16	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	466.760.000,00	-		466.760.000,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	200.000.000,00	39.798.000,00		239.798.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	499.890.000,00	-		499.890.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	424.497.700,00	-		424.497.700,00
20	Dinas Perikanan	1.199.210.000,00	-		1.199.210.000,00
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	805.846.000,00	186.365.000,00		992.211.000,00
22	Dinas Pertanian	977.560.000,00	0,00		977.560.000,00
23	Bagian Umum	97.450.000,00	-		97.450.000,00
24	Bagian Pemerintahan Umum	102.401.000,00	247.400.000,00		349.801.000,00
25	Bagian Pembangunan	-	-		-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-		-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-	-		-
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	199.600.000,00	-		199.600.000,00
29	Bagian Hukum	1.100.000.000,00	-		1.100.000.000,00
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		-
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	187.414.000,00	-		187.414.000,00
32	Sekretariat DPRD	5.797.352.015,00	486.500.000,00		6.283.852.015,00
33	Kecamatan Wawonii Barat	-	-		-
34	Kecamatan Wawonii Utara	-	0,00		-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-	-		-
36	Kecamatan Wawonii Timur		-		-
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-	-		-
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-	-		-
39	Kecamatan Wawonii Tengah	-	-		-
40	Inspektorat Daerah	70.000.000,00	-		70.000.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.317.844.200,00	1.450.000.000,00	300.000.000,00	30.467.844.200,00
42	Badan Keuangan Daerah	879.834.000,00	-		879.834.000,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	519.800.000,00	-		519.800.000,00
	Total	**67.001.485.271,00**	**8.713.389.690,00**	**300.000.000,00**	**75.414.874.961,00**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XVI

Lampiran XVI : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMEBNTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMEBNTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DI RENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSER DARI KAS DAERAH	TRANSER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	NIHIL							
3								
4								
	JUMLAH							

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XVII

Lampiran XVII : PERATURAN BAKRAH 2024
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 31 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINCIAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung TK Bunda Pertiwi	642/13/SPK/DAU/DIKBUD-KONKEP/VII/2016 tgl 18 Juli 2016	2016	CV. ANUGRAH MANDIRI	35.200,00	0,00	0,00	-	35.200,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar SMPN 1 Wawonii Timur Laut	06/29/SPK/DAU- PL/DIKBUD-KONKEP/VI/2016 tgl 13 Juni 2016	2016	CV. ADITYA JAYA	9.729.900,00	0,00	0,00	-	9.729.900,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan gedung kantor SD 1 Lampapi	91/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/VII/2017	2017	CV. RUN ABADI JAYA	70.000,00	0,00	0,00	-	70.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SDN 1 Wawonepe	35/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/PL/V/2017	2017	CV. MILANDA JAYA	1.464.600,00	0,00	0,00	-	1.464.600,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar SMPN 1 Wawonii Timur	42/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/IV/2017	2017	CV. FATHAN PRATAMA	2.814.150,00	0,00	0,00	-	2.814.150,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SDN Wakalowu	26/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/IV/2017	2017	CV. NUKUL MAQDA	2.838.500,00	0,00	0,00	-	2.838.500,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan RKB SDN 1 Palangi	92/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/VII/2017	2017	CV. ENDRIA PERKASA KONSTRUKSI	2.936.250,00	0,00	0,00	-	2.936.250,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi RKB SDN Dimba	600/16/SPKK/DIKBUD/DAU/KONKEP/VII/2017	2017	CV. SAHL RIZKI	2.954.587,00	0,00	0,00	-	2.954.587,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SMPN 1 Wawonii Timur	30/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/IV/2017	2017	CV. MILANDA JAYA	2.995.500,00	0,00	0,00	-	2.995.500,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penrh. Perpustakaan SDN 1 Mauru	39/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/IV/2017	2017	CV. CAHAYA WATU TUMAPI	3.322.350,00	0,00	0,00	-	3.322.350,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan gedung kantor SD Wungkolo	90/KONT.PL/DAU/SPK/PPK -DIKBUD/VII/2017	2017	CV. RAHMA BUANA JAYA	9.875.000,00	0,00	0,00	-	9.875.000,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemasangan Tegel SDN Matalimbo	642.2/SPK/01/TEGEL/VDIK BUD/XI/2018	2018	CV. MIFTAH PRIMA	1.161.800,00	0,00	0,00	-	1.161.800,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar SMPN Satap Wawonii Selatan	21.83/SPK/04/PAGAR SMP/DIKBUD/IV/2018	2018	CV. FATHAN PRATAMA	1.595.000,00	0,00	0,00	-	1.595.000,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemasangan Tegel SMPN 2 Wawonii Barat	642.2/SPK/02/TEGEL/VDIK BUD/XI/2018	2018	CV. TUNAS INTI PERKASA	1.803.450,00	0,00	0,00	-	1.803.450,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar Makam Desa Kareya Kec. Wawonii Barat	621.83/SPK/04/PAGAR/PDI KBUD/XI/2018	2018	CV. MUTIARA BURKAH	2.482.600,00	0,00	0,00	-	2.482.600,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar TK Bina Insani Lanjutan	621.83/SPK/02/PAGAR/PDI KBUD/XI/2018	2018	CV. MILANDA JAYA	2.486.100,00	0,00	0,00	-	2.486.100,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sumber Air Bersih/Sumur Bor SDN 2 Langara	691.2/SPK/02/SB/DIKBUDI V/2018	2018	CV. MARGIN ENGINEERING	2.489.400,00	0,00	0,00	-	2.489.400,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Lampapi (Lanjutan) Kec. Wawonii Tengah	621.83/SPK/01/PERPUS/DIK BUD/IV/2018	2018	CV. WAWOMINDO PRATAMA	2.495.000,00	0,00	0,00	-	2.495.000,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sumber Air Bersih/Sumur Bor SMPN 1 Wawonii Tengah	691.2/SPK/05/SB/DIKBUD/I V/2018	2018	CV. WAWONII PRATAMA	2.541.500,00	0,00	0,00	-	2.541.500,00
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sumber air Bersih Air Bersih/Sumur bor SDN 2 Bobolio	691.2/SPK/14/SB/DIKBUD/I V/2018	2018	CV. KELUARGA MANDIRI	2.637.100,00	0,00	0,00	-	2.637.100,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Sumber Air Bersih/Sumur Bor SDN Nuko Kec. Wawonii Timur Laut	691.2/SPK/08/SB/DIKBUD/I V/2018	2018	CV. SINUR ALVIDO	2.638.750,00	0,00	0,00	-	2.638.750,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Lanjutan) SDN 1 Bobolio	642.2/SPK/05/KANTOR/DIK BUD/IV/2018	2018	CV. RAFI PRATAMA	2.768.000,00	0,00	0,00	-	2.768.000,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Lanjutan) SDN 1 Roko-roko	642.2/SPK/09/KANTOR/DIK BUD/IV/2018	2018	CV. AISYAH MANDIRI	2.770.650,00	0,00	0,00	-	2.770.650,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Lanjutan) SDN 2 Lebo	642.2/SPK/13/KANTOR/DIK BUD/IV/2018	2018	CV. ANOA NUSANTARA	2.772.100,00	0,00	0,00	-	2.772.100,00
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung Kantor Permanen (Lanjutan) SDN 1 Lebo	642.2/SPK/16/KANTOR/DIK BUD/IV/2018	2018	CV. ANOA NUSANTARA	2.773.450,00	0,00	0,00	-	2.773.450,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Gedung UKS SMPN 1 Wawonii Utara Kec. Wawonii Utara	642.2/SPK/03/UKS/DIKBUD /IV/2018	2018	CV. GEMILANG FAHRI	2.975.950,00	0,00	0,00	-	2.975.950,00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Dimba(Lanjutan) Kec. Wawonii Timur Laut	642.2/SPK/03/REHABILRK/D IKBUD/IV/2018	2018	CV. TUNAS INTI P	3.344.500,00	0,00	0,00	-	3.344.500,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar TK Cenrikin Kec. Wawonii Barat	621.83/SPK/03/PAGAR TK/DIKBUD/IV/2018	2018	CV. TUNAS INTI PERKASA	4.971.400,00	0,00	0,00	-	4.971.400,00
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar TK Bina Insani Kec. Wawonii Timur Laut	621.83/SPK/09/PAGAR TK/ DIKBUD/IV/2018	2018	CV. SAHL RIZKI	4.989.000,00	0,00	0,00	-	4.989.000,00
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sumur Bor SDN Teodengito	425.3/48/SPK-DAU/V/2019	2019	CV. NIKA PUTRI TUNGGAL	2.980.000,00	0,00	0,00	-	2.980.000,00
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Lanjutan Kantor UPTD Wawonii Barat	425.3/183/SPK-DAU/APBD-P/XII/2019	2019	CV. NIKA PUTRI TUNGGAL	9.250.000,00	0,00	0,00	-	9.250.000,00
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Roko-Roko	420/34/DAK- DIKNAS/VII/2021	2021	CV. AYUNI INDAH	20.832.750,00	0,00	0,00	-	20.832.750,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru TK Ibu Pertiwi Lebo	420/49/SPK- PL/PK/VIII/2022	2022	CV. NUR JAYA MANDIRI	4.331.750,00	0,00	0,00	-	4.331.750,00
34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Sekolah SMPN 3 WAWONII BARAT	420/76/SPK PL/PE/XI/2022	2022	CV. ADHI KARYA PERDANA	5.461.100,00	0,00	0,00	-	5.461.100,00
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor beserta kelengkapannya SDN 4 Wawonii Tengah	420/122/SPK-PL/PK/XI/2024	2024	CV. LIPU RAYA		2.950.000,00			2.950.000,00
36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Wawonii Selatan	420/07/KONTRAK-TENDER/PK/VII/2024	2024	CV. ASYIFA HAKY PRATAMA		14.577.900,00			14.577.900,00
37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pembangunan paving blokSMPN 1 Wawonii Barat	420/103/SPK-PL/PK/XI/2024	2024	CV. LA BIO PERKASA		9.945.000,00			9.945.000,00
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Pembangunan MCK beserta Sanitasi SMPN 4 Wawonii Tenggara	420/96/SPK-PL/PK/XI/2024	2024	CV. ANANDONIANO		57.307.500,00			57.307.500,00
39	Dinas Kesehatan	Pengadaan Bak Penampungan/Tower Air Bersih/Air Baku RS. Pratama		2016	CV. KARYA NUSANTARA	9.976.000,00	0,00	0,00	-	9.976.000,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
40	Dinas Kesehatan	Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas rawat Inap Puskesmas Babolio kec. Wawoni Selatan	440/08/SPK- UELANG/VIII/2016	2016	CV. MAHADEWI	81.550.800,00	0,00	0,00	-	81.550.000,00
41	Dinas Kesehatan	Pek. Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Polam (DAK)	00011/PPK- DINKES/KONTRAK-KONSTEUKSI/VII/2017	2017	CV. ENDHA PERKASA KONSTRUKSI	9.500,00	0,00	0,00	-	9.500,00
42	Dinas Kesehatan	Pek. Pembangunan Sarana Air Bersih/Baku dan Tower Puskesmas Bobolio (DAK)	01/44/SPK/DAK- PL/DINKES-KONKIP/VII/2017	2017	CV. KELUARGA MANDIRI	-1,00	0,00	0,00	-	(1,00)
43	Dinas Kesehatan	Pek. Pembangunan Sarana Air Bersih/Baku dan Tower Puskesmas Lawey (DAK)	01/48/SPK/DAK- PL/DINKES-KONKIP/VI/2017	2017	CV. INTANG TEKNIK PERKASA	9.240.000,00	0,00	0,00	-	9.240.000,00
44	Dinas Kesehatan	Pengadaan Obat-Obatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar E-Katalog DAK 05	09/PPK-KONTRAK/DINKES/E-KATALOG/V/2019	2019	CV. MERAPI UTAMA FARMA CABANG MAKASSAR	1.000.000,00	0,00	0,00	-	1.000.000,00
45	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sarana Puskesmas Pembantu Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawoni Tenggara (DAK)	14/SPPPK-DINKES/VI/2023, 25-05-2023	2023	CV. BADAR MANDATI	13.936.949,00	0,00	0,00	-	13.936.949,00
46	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sarana Puskesmas Pembantu Desa Teponoko Kecamatan Wawoni Tenggara (DAK)	08/SPPPK-DINKES/VI/2023, 25-05-2023	2023	CV. ARSHINDO KARYA	13.935.900,00	0,00	0,00	-	13.935.900,00
47	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sarana Puskesmas Pembantu Desa Bahuba Kecamatan Wawoni Tenggara (DAK)	12/SPPPK-DINKES/VI/2023, 25-05-2023	2023	CV. ASYIFA HARY PRATAMA	13.935.900,00	0,00	0,00	-	13.935.900,00
48	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sarana Puskesmas Pembantu Kelurahan Lampagi Kecamatan Wawoni Tengah (DAK)	58/SPPPK-DINKES/VI/2023, 25-05-2023	2023	CV. HALIPAH MULYA	13.935.900,00	0,00	13.935.900,00	74.12.04.0.000452(LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
49	Dinas Kesehatan	Pembangunan Pagar Puskesdes Watusi	64/SPK/PPK-DINKES/X/2023	2023	CV. TUNAS INTI PERKASA	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	74.12.04.0.000462(LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
50	Dinas Kesehatan	PEMBANGUNAN BSL 2 LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (LABKESMAS) (DAK)	04/DINKES/SP-SPURCHASING/BSL/II/2024, 2024-03-25	2024	PT. TEKNINDO JAYA PRAKARSA		19.600.000,00			19.600.000,00
51	Dinas Kesehatan	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS WAWOROPE (DAK)	05/SPPPK-DINKES/VI/2024, 2024-06-21	2024	CV. MILANDA JAYA		76.750.000,00			76.750.000,00
52	Dinas Kesehatan	Pekerjaan Pengadaan Instalasi Suplai Air Bersih untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS)	SPK/PKT.10/PL-DINKES/VII/2024, 2024-07-10	2024	CV. SWARA BARU ABADI		7.731.550,00			7.731.550,00
53	Dinas Kesehatan	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BARU PUSKESMAS PEMBANTU DESA WAWOSO BARU, DESA BAWAPATANE DAN DESA LANGGARA JAYA KECAMATAN WAWOSI SELATAN	SPK/PKT.19/PL-DINKES/XI/2024, 2024-11-27	2024	CV. RANTAI SAUDARA CONSULTANT		86.500.000,00			86.500.000,00
54	RSUD	Pekerjaan Pengadaan Pemasang Listrik	445.05/SPJT- RSUD/VIII/2021	2021	CV. ENDHA PERKASA KONSTRUKSI	170.000.000,00	0,00	0,00	-	170.000.000,00
55	RSUD	Pembangunan Lanjutan Koridor Penghubung Rumah Sakit	08/SPPPK-RSUD/V/2023	2023	CV. HALIPAH MULYA	131.700.000,00	-	131.700.000,00	74.12.04.0.000453(LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
56	RSUD	Pembangunan Ruang Rawat Inap Standar	12/SP/RSUD/VII/2024	2024	CV. ASYIFA HARY PRATAMA		176.950.700,00			176.950.700,00
57	Dinas PU dan Tata Ruang	Lanbangun Air Bersih Desa Pasir Putih		2016	CV. TUNAS HARAPAN JAYA	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
58	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Rumah Jaga Bendung Bobolio	4.03/PL/DPU-SDA/IX/2016	2016	CV. PADI MAS	6.217.150,00	0,00	0,00		6.217.150,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
59	Dinas PU dan Tata Ruang	Pek. Pembangunan Rumah Jaga Bendung	01.1/PL/KONSTRUKSI/DPU PR-SDA/VIII/2017	2017	CV. ADPUTRA GROUP	6.247.000,00	0,00	0,00		6.247.000,00
60	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong Desa Pelura	6.1/PL/KONSTRUKSI/DPUP R-CK/IV/2017	2017	CV. FATNA ARISINDO TEKNIK	9.385.300,00	0,00	0,00		9.385.300,00
61	Dinas PU dan Tata Ruang	Pek. Peningkatan Jalan Aspal Ruas SP3 Pelabuhan Pahagi Mata Basanga	620/02.02/SP/PPP/JK PUPR/KONKSD/2018	2018	PT. RAJA KARYA ALAM UTAMA	8.100,00	0,00	0,00		8.100,00
62	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Drainase/Gorong gorong Dr. Bukit Permai 3 Kec. Wawonii Barat	600/123/KONT/PUPR CK/VI/2019	2019	CV. BAHRI KEPULAUAN	13.039.210,00	0,00	0,00		13.039.210,00
63	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Langara Baja (5x18 M) di Kec. Wawonii Barat	600/002/KONT-PL/PUTR-CK/VII/2020	2020	CV. ALIVA MUNSE	9.949.000,00	0,00	0,00		9.949.000,00
64	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jembatan Ruas Lantula - Mata Baho	630/06-15/SPK/BM/DPUTR/VIII/2022	2022	CV. ANUGERAH MULTI KARYA	9.977.400,00	0,00	0,00		9.977.400,00
65	Dinas PU dan Tata Ruang	Pekerjaan Penggantian Jembatan Sungai Watusi 2 (Ruas Tondonggila - Mosolo)	630/06-06/SPBM/DPUTR/V/2022	2022	CV. BESDAYA MEDIATAMA	298.868.050,00	0,00	0,00		298.868.050,00
66	Dinas PU dan Tata Ruang	Pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Bandu - Tondonggila	620/06-01/SP/BM/DPUTR/V/2022	2022	CV. RADILA SULTHAN	426.249.950,00	0,00	426.249.950,00	05.0.00.0.00.01.0000/PR/XI/2024	-
67	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Tribal Desa Tiumbu - Tiumbu Jaya	610/SP.03-15/FISIK-SDA/PUTR/XI/2023	2023	CV. TADIKA BROTHERS	9.988.250,00	0,00	9.988.250,00	74.12/04.0/000304/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/11/2024	-
68	Dinas PU dan Tata Ruang	Normalisasi Kali Nako	610/SP.03-14/FISIK-SDA/PUTR/XI/2023	2023	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA	9.989.500,00	0,00	9.989.500,00	74.12/04.0/000306/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/11/2024	-
69	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Pembuang D.I Wangkolo	610/SP.03-13/FISIK-SDA/PUTR/XI/2023	2023	CV. ELSA CIPTA UTAMA	9.986.000,00	0,00	9.986.000,00	74.12/04.0/000473/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-
70	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab SPAM Desa Teporoko	600/085/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	74.12/04.0/000265/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/10/2024	-
71	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Desa Pesoe	600/032/SPK-PL/CK-BK/DPUTR-KONKEP/VI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUA ENAM	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	74.12/04.0/000244/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/11/2024	-
72	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Desa Bukit Permai II	600/052/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. DUA PUTRA VANHART	9.980.000,00	0,00			9.980.000,00
73	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Decker Plat Ruas Jalan Desa Torobuntu	600/078/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. FATHIR PRATAMA	9.992.500,00	0,00	9.992.500,00	74.12/04.0/000300/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/11/2024	-
74	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Rumah Sakit Kab. Konawe Kepulauan	600/077/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. ADHI KARYA PERDANA	9.987.500,00	0,00	9.987.500,00	74.12/04.0/000514/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-
75	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Decker/Plat (Drainase) Kawasan Rumah Sakit Kab. Konawe Kepulauan	600/079/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. TADIKA BROTHERS	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	74.12/04.0/000495/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-
76	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Rumah Dinas Kapolsek Wawonii Tengah	600/089/SP/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. LANGGE PRIMA KONSTRUKSI	13.840.000,00	0,00	13.840.000,00	74.12/04.0/000376/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-
77	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Kantor Polsek Wawonii Tengah (Lanjutan)	600/090/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. ABYAH DWI PUTRI	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	74.12/04.0/000377/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-
78	Dinas PU dan Tata Ruang	Penataan Halaman Kantor Pengadilan Negeri Unaaha (Lanjutan)	600/091/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUA ENAM	7.485.000,00	0,00			7.485.000,00
79	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab. Aula Polresta Kota Kendari	600/093/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. SAWAL AL FITRAH	9.972.500,00	0,00	9.972.500,00	74.12/04.0/000378/LS/1.03.0.00. 0.00.01.0000/PR/12/2024	-

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
80	Dinas PU dan Tata Ruang	Penataan Lahan Rumah Sakit Kab. Kaurou Kepulauan	600/099/SPK-PL/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/OCI/2023	2023	CV. MILANDA JAYA	9.980.000,00	0,00			9.980.000,00
81	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembebasan Lokasi Pembangunan Mesjid Raya	600/096/SP/APBDP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/XI/2023	2023	CV. JONA DWITAMA	188.994.150,00	0,00	188.994.150,00	74.12/04.0/000322/LS/1.03.0.04.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
82	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Tugu Kab. Kaurou Kepulauan	600/044/SPK-PL/CK-BK/DPUTR-KONKEP/V/2023	2023	CV. MITRA ARCHIMI	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	74.12/04.0/000309/LS/1.03.0.04.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
83	Dinas PU dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Aspal Ilaan Sp. 4 Lamuluo - Pertanteran	620/06-05/SPBBM/DPUTR/VI/2023	2023	CV. AMI PRATAMA	173.334.400,00	0,00	173.334.400,00	74.12/04.0/000532/LS/1.03.0.06.0.00.01.0000/PB/12/2024	-
84	Dinas PU dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Perkerasan Ruas Lanoloyo - Tumbarano	620/06-06/SPBBM/DPUTR/VI/2023	2023	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA	49.665.900,00	0,00	49.665.900,00	74.12/04.0/000318/LS/1.03.0.06.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
85	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Ruas Pasir Putih - Batumea	620/06-07/SPBBM/DPUTR/VI/2023	2023	CV. NUR JAYA MANDIRI	74.300.400,00	0,00	74.300.400,00	74.12/04.0/000350/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
86	Dinas PU dan Tata Ruang	Preservasi dan Peningkatan Jalan Ruas Meta Dimko - Lebo	620/06-04/SPBBM/DPUTR/V/2023	2023	CV. PHILA DELFIA	663.500.000,00	0,00	663.500.000,00	74.12/04.0/000274/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
87	Dinas PU dan Tata Ruang	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Ruas Lawey - Wawasano	620/06-02/SPBBM/DPUTR/V/2023	2023	CV. SWARA ASKANA	261.063.900,00	0,00	261.063.900,00	74.12/04.0/000339/LS/1.03.0.06.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
88	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Dosker Plat Desa Wawo Indah	630.3/20/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	4.990.750,00	0,00	4.990.750,00	74.12/04.0/000336/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
89	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Dosker Plat Desa Lamongapa	630.3/19/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	4.986.850,00	0,00	4.986.850,00	74.12/04.0/000351/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
90	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Teporoko I	620/06-09/SPBBM/DPUTR/VI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	14.900.200,00	0,00	14.900.200,00	74.12/04.0/000359/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
91	Dinas PU dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Desa Ruas Mawo - Mawo Jamsi	620/06-15/SPK/BM/DPUTR/VII/2023	2023	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	74.12/04.0/000317/LS/1.03.0.06.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
92	Dinas PU dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Desa Tumbu - Tumbu Jaya	620/06-16/SPK/BM/DPUTR/VII/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	9.980.000,00	0,00	9.980.000,00	74.12/04.0/000321/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
93	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Kawa-Kawali	620.3/24/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. AZZAM AULIAN PUTRA JUNIOR	9.988.400,00	0,00	9.988.400,00	74.12/04.0/000433/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/12/2024	-
94	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Rabat Desa Langkowala	620.3/28/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	9.993.400,00	0,00	9.993.400,00	74.12/04.0/000358/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
95	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Wungkolo	620.3/26/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	9.987.200,00	0,00	9.987.200,00	74.12/04.0/000355/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
96	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Tapunbatu	620.3/25/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. OITA NATA JAYA	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	74.12/04.0/000313/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
97	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Labeau	620.3/27/SPK/BM-APBDP/DPUTR/XI/2023	2023	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA	9.993.950,00	0,00	9.993.950,00	74.12/04.0/000320/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/11/2024	-
98	Dinas PU dan Tata Ruang	Pemeliharaan Berkala Ruas Lanowatu - Bukit Permai	620/06-11/SPBBM/DPUTR/VI/2023	2023	CV. AZZAM ALILIAN PUTRA JUNIOR	19.857.500,00	0,00	19.857.500,00	74.12/04.0/000434/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/12/2024	-
99	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jembatan Penghubung Desa Sawapahui	630/06-18/SPK/BM/DPUTR/VII/2023	2023	CV. NAUFAL SHAHTERA	7.992.500,00	0,00	7.992.500,00	74.12/04.0/000369/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/12/2024	-
100	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jembatan Titian Langsa Bajo	630/06-17/SPK/BM/DPUTR/VII/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUAEKAM	9.985.000,00	0,00	9.985.000,00	74.12/04.0/000445/LS/1.03.0.09.0.00.01.0000/PB/12/2024	-

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
101	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Box Culvert Ruas SP. 3 Palingi - Watuondo I	630/006-12/SP/BM&D/PUTR/VI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUAENAM	19.847.500,00	0,00			19.847.500,00
102	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Box Culvert Ruas SP. 3 Palingi - Watuondo II	630/006-13/SP/BM&D/PUTR/VI/2023	2023	CV. AMI PRATAMA	17.152.500,00	0,00	17.152.500,00	74.12/04.0/000520/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
103	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab Jembatan Tiran Desa Langara-Tanjung Batu	630.3/325/PK/BM-APBD/DPUTR/XI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUAENAM	9.990.250,00	0,00	9.990.250,00	74.12/04.0/000423/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
104	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab Jembatan Desa Morobea - Buke Puuwolu	630.3/315/PK/BM-APBD/DPUTR/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	9.991.700,00	0,00	9.991.700,00	74.12/04.0/000521/LS/1.03.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2024	-
105	Dinas PU dan Tata Ruang	Penggantian Jembatan (Box Culvert) Ruas SMP 2 - Pasir Putih	630/006-36/SP/BM-DID/DPUTR/XI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUAENAM	79.400.000,00	0,00	39.400.000,00	74.12/04.0/000346/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	-
106	Dinas PU dan Tata Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	600/046/SPCK-BL/DPUTR-KDMKEP/VIII/2023	2023	PT. NOBIKEL JAYA ABADI	239.927.100,00	0,00	239.927.100,00	74.12/04.0/000375/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
107	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Tahal Desa Tumbo-Tumbu Jaya Lanjutan	610/SP.63-04/PIK-SDA/PUTR/V/2024	2024	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA		6.973.850,00			6.973.850,00
108	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab.MCK Masjid Desa Watuondo	600.1.15.2/090/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. TADIKA BROTHERS		7.485.000,00			7.485.000,00
109	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Desa Langkowala	600.1.4.2/069/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. ANDRI ANGKASA		9.575.000,00			9.575.000,00
110	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Desa Mata Bubu	600.1.4.2/083/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. PUTRA BANGKIT PERKASA		7.180.000,00			7.180.000,00
111	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Saluran Drainase Kel. Sirenca II	600.1.4.2/088/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. PRIMA LESTARI		7.190.000,00			7.190.000,00
112	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Maskolla Polsek Wawonii Utara	600.1.15.2/086/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. MILANDA JAYA		7.485.000,00			7.485.000,00
113	Dinas PU dan Tata Ruang	Pondasi Halaman TK Polsek Kumaya	600.1.15.2/094/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. POKA DULU MANDIRI		9.980.000,00			9.980.000,00
114	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab. Bangunan TK Polsek Kumaya	600.1.15.2/093/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. SWARA BARU ABADI		9.980.000,00			9.980.000,00
115	Dinas PU dan Tata Ruang	Rehab. Kantor Bupati	600.1.15.2/092/SPK-PL/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. TADIKA BROTHERS		7.485.000,00			7.485.000,00
116	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Rumah Dinas Bintara Polsek Wawonii Tengah (Lanjutan)	600.1.15.2/096/SP/APBDP/DPUTR-CKBK/X/2024	2024	CV. ADHI RAJASA KARYA		39.715.400,00			39.715.400,00
117	Dinas PU dan Tata Ruang	Rekonstruksi Jalan Aspal Ruas Tombaone - Lassilowo Kebandoa	600.1.9.3/08-12/SP/BM-DBH/DPUTR/IX/2024	2024	PT. RAYA HASKI ABADI		295.266.100,00			295.266.100,00
118	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Desa Mekar Sari II	600.1.9.3/06-17/SPK/BM-APBDP/DPUTR/X/2024	2024	CV. MAHARANI INDAH EKA PUTRI		4.794.250,00			4.794.250,00
119	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Jalan Rabat Desa Bebelio	600.1.9.3/06-20/SPK/BM-APBDP/DPUTR/X/2024	2024	CV. AKSARA JAYA		7.190.000,00			7.190.000,00
120	Dinas PU dan Tata Ruang	Perkerasan Jalan Desa Langara Iwuwo	600.1.9.3/06-25/SP/BM-APBD/DPUTR/X/2024	2024	CV. MUKMIN ALFA DUAENAM		9.598.050,00			9.598.050,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
121	Dinas PU dan Tata Ruang	Pembangunan Gedung Kantor Bupati (Lanjutan)	600/046/SP/CK-BK/DPUTR-KONKEP/VIII/2023	2024	PT. NOBIKEL JAYA ABADI		7.216.000,00			7.216.000,00
122	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Tahal Pengaman Pantai Desa Kokco	04/KONTRAK-TENDER/BPBDKONKEP/VII/2023	2023	CV. ABSAH JAYA PUTRI	23.926.250,00		23.926.250,00	74.12/04.0/000078/LS/1.05.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2024	-
123	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Tahal Pengaman Pantai Desa Matsiwei	05/KONTRAK-TENDER/BPBDKONKEP/VII/2023	2023	CV. PESONA NUSANTARA SUKSES	22.820.150,00		22.820.150,00	74.12/04.0/000096/LS/1.05.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2024	-
124	Dinas Kependudukan, KB, P3A	Pek. Pemb. Pagar Gedung Balai Penyuluhan Kec. Waroeni Tengah	640/SPK/06/PPKBP3A/IV/2017	2017	CV. AL-ABIYYU	7.500.000,00	0,00	0,00		7.500.000,00
125	Dinas Kependudukan, KB, P3A	Pek. Pemb. Pagar Gedung Balai Penyuluhan Kec. Waroeni Barat	640/SPK/13/PPKBP3A/X/2017	2017	CV. ANDINI ANAWAI KONSTRUKSI	7.500.000,00	0,00	0,00		7.500.000,00
126	Dinas Kependudukan, KB, P3A	Pek. Pemb. Gedung Balai Penyuluhan Kec. Waroeni Tenggara	640/SPK/10/PPKBP3A/IV/2017	2017	CV. CAHAYA WATU TUMAPI	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00
127	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Penyediaan Perlengkapan Jalan Dalam Kota Langsa Tahap I di Kec. Waroeni Barat,	17/SPJK/DISHUB-KONKEP/VIII/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	16.815.000,00	-	16.815.000,00	74.12/04.0/000076/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
128	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan di Kab. Konawe Kepulauan,	28/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/IX/2023	2023	CV. KING WATER MANUBUNG	5.997.500,00	-	5.997.500,00	74.12/04.0/000099/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
129	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Lokal Saponea di Kab. Konawe Kepulauan	64/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. ASTRINA BANGKIT	4.997.500,00	-	4.997.500,00	74.12/04.0/000071/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
130	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pemasangan Halaman Kantor di Kabupaten Konawe Kepulauan,	70/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUABNAM	9.950.000,00	-	9.950.000,00	74.12/04.0/000070/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
131	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Konawe Kepulauan,	85/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. SINAR HARAPAN PUSAT KENDARI	9.735.000,00	-	9.735.000,00	74.12/04.0/000078/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
132	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Dermaga Pelabuhan Sawapatani	82/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. KASTARA PUTRA PERKASA	9.375.000,00	-	9.375.000,00	74.12/04.0/000074/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
133	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kota Langsa Tahap I b di Kab. Konawe Kepulauan,	67/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	9.975.000,00	-	9.975.000,00	74.12/04.0/000079/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
134	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Perataan Jalur Akses Masuk Pelabuhan Sawapatani di Kabupaten Konawe Kepulauan,	73/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. MUKMIN ALFA DUABNAM	2.475.000,00	-	2.475.000,00	74.12/04.0/000077/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
135	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu Semesdara Pelabuhan Sawapatani di Kabupaten Konawe Kepulauan	88/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. BIMA SAKTI KONSTRUKSI	8.000.000,00	-	8.000.000,00	74.12/04.0/000073/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
136	Dinas Perhubungan	Pekerjaan Pembuatan Pagar Pengaman Pelabuhan Sawapatani di Kabupaten Konawe Kepulauan	91/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/XI/2023	2023	CV. DELVA KARYA	9.825.000,00	-	9.825.000,00	74.12/04.0/000076/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	-
137	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelengseran Pelabuhan Penyeberangan Ferry Sawasa Pelabuhan WAYONE (Sawasa/Sawapatani)	49.1/SPJK/DISHUB-KONKEP/IX/2024	2024	CV. UTAMA JAYA PERKASA		99.650.000,00			99.650.000,00
138	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan Dalam Kota Langsa Tahap II Depan Kejaksaan Bupati	48.1/SPJK/DISHUB-KONKEP/IX/2024	2024	CV. ANDRI ANGKASA		22.350.000,00			22.350.000,00
139	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Pelabuhan Waroeni (Sawasa/Sawapatani)	42.1/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/VIII/2024	2024	CV. SINAR HARAPAN PUSAT KENDARI		7.489.500,00			7.489.500,00
140	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi Pelabuhan Tumbu-Tumbu Jaya	41.1/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/VIII/2024	2024	CV. ADHI RAJASA KARYA		9.994.500,00			9.994.500,00
141	Dinas Perhubungan	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Ham Nambo Jaya - Mandio	39.1/SPK/JK/DISHUB-KONKEP/VIII/2024	2024	CV. KASTARA PUTRA PERKASA		9.993.000,00			9.993.000,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
142	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Wawonii Timur Laut	38.1/SPK/JK/DISHUB-KOMICH/VIII/2024	2024	CV. KASYARA PUTRA PERKASA		9.743.500,00			9.743.500,00
143	Dinas Perhubungan	Pemasangan dan Pengadaan Delineator Tersebar titik Rawan	37.1/SPK/JK/DISHUB-KOMICH/VIII/2024	2024	CV. DELYA KARYA		7.496.500,00			7.496.500,00
144	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Kec. Wawonii Utara	36.1/SPK/JK/DISHUB-KOMICH/VIII/2024	2024	CV. SINAR HARAPAN PUSAT KENDARI		9.242.500,00			9.242.500,00
145	Dinas Perhubungan	Peninbaman Parkiran Bis Peristis	35.1/SPK/JK/DISHUB-KOMICH/VIII/2024	2024	CV. DELYA KARYA		9.948.500,00			9.948.500,00
146	Dinas Perindakop	Pembangunan Pos Jaga Sentra Industri Kecil Menengah	03/SPK/PERINDAG/KOPKOP KEP/IX/2022	2022	CV. MUKMIN ALFA DUABNAM	1.750.000,00	0,00	0,00		1.750.000,00
147	Dinas Perindakop	Pekerjaan Pembangunan Pagar Depan Pasar Langara	SPK/PKT.12/PL/PERINDAG/XI/2023	2023	CV. SADAR MANDATI	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	74.12.04.0.0000465.KS/2.17.3.36. 3.31.01.0000/PB/12/2024	-
148	Dinas Perindakop	Pekerjaan Pembangunan Talud Sentra IKM	SPK/PKT.11/PL/PERINDAG/XI/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	74.12.04.0.0001063.KS/2.17.3.36. 3.31.01.0000/PB/12/2024	-
149	Dinas Perindakop	Pekerjaan Pembuatan Halaman Belakang Sentra IKM	SPK/PKT.13/PL/PERINDAG/XI/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	9.975.000,00	0,00	9.975.000,00	74.12.04.0.0001181.KS/2.17.3.36. 3.31.01.0000/PB/12/2024	-
150	Dinas Perindakop	Pekerjaan Pemilihanan/Rehabilitasi Gedung Kantor,Pemeliharaan kantor	SPK/PKT.05/PL/PERINDAG/VI/2023	2023	CV. ANDRI ANGKASA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	74.12.04.0.0001171.KS/2.17.3.36. 3.31.01.0000/PB/12/2024	-
151	Dinas Perindakop	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pasar	SPK/PKT.14/PL/PERINDAG/XI/2024	2024	CV. SADAR MANDATI		4.990.000,00			4.990.000,00
152	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan/Desain Pembuatan Gudang Penyimpanan Es	523/4.A.DK-T/VIII/2015 tgl 02/11/2015	2015	CV. LAKIDENDE KONSULTAN	6.000.000,00	0,00	0,00	-	6.000.000,00
153	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekerjaan Pembuatan Gudang Penyimpanan Es	523/04/DKP-PT/XI/2015 tgl 02/11/2015	2015	CV. RIYAN PERDANA	7.217.000,00	0,00	0,00	-	7.217.000,00
154	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekerjaan Jasa Konsultasi Desain/Perencanaan Pembuatan Pagar PPI Langara	523/17.A/SPK/DKP-PT/02/2015 tgl 23/02/2015	2015	CV. DIMENSI KREATIF KONSULTAN	9.000.000,00	0,00	0,00	-	9.000.000,00
155	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Pos Jaga PPI Langara	523/33/SPK-SES/DKP/KONK2/PT/X/2016	2016	CV. RIAN PERDANA	2.350.000,00	0,00	0,00	-	2.350.000,00
156	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehab bangunan sekretaris (Pos Jaga Kantor)	SPK/PKT.25/PL/DKP/XI/2024	2024	CV. NIAGA SUBATRA KONSTRUKSI		4.595.000,00			4.595.000,00
157	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	SPK/PKT.27/PL/DKP/XI/2024	2024	CV. LINTAS DIRGANTARA		7.490.000,00			7.490.000,00
158	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lebo II	320/80.b/SPK/PL.JUT/DIST AN-HUT/2016,8/31/2016	2016	CV. PACHRI PRATAMA	2.300	0,00	0,00		2.300
159	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan usaha Tani desa Nanga	320/689/KT/Dinas-Hut/2016, 7/19/2016	2016	CV. TELAGA BUSINO NUSANTARA	5.000	0,00	0,00		5.000
160	Dinas Pertanian	Pek. Cetak Sawah Desa Lanukowo	320/PKT-2/SAWAH-LANSILOWO/DISTAN- HUT/IX/2016, 9/13/2016	2016	CV. MACRONESIA RAYA	5.000	0,00	0,00		5.000
161	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Langkowala	320/30/KT/DISTAN-HUT/2016, 5/2/2016	2016	CV. TUNAS INTI ABADI	40.000	0,00	0,00		40.000
162	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Paligi	320/64.a.6/IX/SPK/PL.JUT/D inas-Hut/2016, 11/6/2016	2016	CV. ADJI KARYA MANDIRI	40.000	0,00	0,00		40.000

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
163	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Wawoh	520/414/KTS/DISTAN- HUT/2016, 5/2/2016	2016	CV. TUKAS INTI ABADI	75.000	0,00	0,00		75.000
164	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sinauh	520/64.2/SPK/PL.JUT/DIST AN-HUT/2016, 7/10/2016	2016	CV. ALFAH DWITAMA	75.000	0,00	0,00		75.000
165	Dinas Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mosolo	520/64.1/SPK/PL.JUT/DIST AN-HUT/2016, 7/10/2016	2016	CV. MAJU BERSAMA	8.455.000	0,00	0,00		8.455.000
166	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Gedung BP3K Kec. Wawonii Tenggara	03/KONTRAK/PERTANERI T/2015 tgl 03/09/2015	2015	CV. SULTRA PERKASA	244.110	0,00	0,00		244.110
167	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Gedung BP3K Kec. Wawonii Tenggara	03/KONTRAK/PERTANERI T/2015 tgl 03/09/2015	2015	CV. SULTRA PERKASA	2.196.988	0,00	0,00		2.196.988
168	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Tanah Dangkal Desa Polara 1	CV. PILAR INVESTAMA	2016	CV. PILAR INVESTAMA	500	0,00	0,00		500
169	Dinas Pertanian	Pembangunan Saluran Air Tanah Dangkal Desa Lawey I	CV. ARYA PERKASA	2016	CV. ARYA PERKASA	5.000	0,00	0,00		5.000
170	Dinas Pertanian	Pembangunan Embung Desa Wawolesa	CV. NUSANTARA IWAWONO JAYA	2016	CV. NUSANTARA IWAWONO JAYA	5.000	0,00	0,00		5.000
171	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Bungin Mekar I	CV. EKA MANDIRI GROUP	2016	CV. EKA MANDIRI GROUP	85.000	0,00	0,00		85.000
172	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Lanonggua	CV. IKHTIAR NUSANTARA	2016	CV. IKHTIAR NUSANTARA	90.000	0,00	0,00		90.000
173	Dinas Pertanian	Pembangunan Tanah Air Dangkal Desa Polara 2	CV. NURUL MAQDA	2016	CV. NURUL MAQDA	90.000	0,00	0,00		90.000
174	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Tanah Dangkal Desa Wawonue	CV. ALFAH DWITAMA	2016	CV. ALFAH DWITAMA	92.500	0,00	0,00		92.500
175	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Lebo	CV. ALIVA MUNSE	2016	CV. ALIVA MUNSE	95.000	0,00	0,00		95.000
176	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Wanga	CV. NURUL MAQDA	2016	CV. NURUL MAQDA	95.000	0,00	0,00		95.000
177	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Munse 1	CV. NURUL MAQDA	2016	CV. NURUL MAQDA	95.000	0,00	0,00		95.000
178	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Munse 2	CV. ARFIQA MANDIRI	2016	CV. ARFIQA MANDIRI	95.000	0,00	0,00		95.000
179	Dinas Pertanian	Pembangunan Air Pertanian (Embung) Desa Bungan Mekar II	CV. ASYFA MEGA KONSTRUKSI	2016	CV. ASYFA MEGA KONSTRUKSI	4.985.000	0,00	0,00		4.985.000
180	Dinas Pertanian	Pembangunan Saluran Air Tanah Dangkal Desa Wawasoa II	CV. ULFA AMALIA	2016	CV. ULFA AMALIA	4.990.000	0,00	0,00		4.990.000
181	Dinas Pertanian	Pembangunan Jembatan Tani Desa Mosolo	CV. MAJU BERSAMA	2016	CV. MAJU BERSAMA	7.492.000	0,00	0,00		7.492.000
182	Dinas Pertanian	Pembangunan Cetak Sawah Desa Bekolo Kec. Wawonii Selatan Pada Dinas Pertanian	05/SPK/PPK-DISTAN/X/20222/10/2022	2022	CV. DARMAWAN INDONESIA	83.466.900,00		83.466.900,00	74.12.04.0.00.00.0000.0000.LS/3.27.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	0
183	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Gedung BMU Wawonii Tenggara, pada Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan T.A	02/SPK/PPK-DISTAN/VII/2023	2023	RAFI PRATAMA	9.592.500,00		9.592.500,00	74.12.04.0.00.01.5435.0.27.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	0

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
184	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Wawo Indah, pada Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan T.A. 2023	05/SPK/PPK-DISTAN/VII/2023	2023	CV MUKMIN ALFA DUA ENAM	9.390.600,00				9.390.000
185	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Wangkolo, pada DISTAN Kab. KonKep T.A. 2023	14/SPK/PPK-DISTAN/XI/2023	2023	CV. ZAKY PERKASA	9.570.000,00		9.570.000,00	74.12.04.0.0000109.LS/1.27.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	0
186	Dinas Pertanian	Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan Laulurus, pada DISTAN Kab. KonKep T.A. 2023	16/SPK/PPK-DISTAN/XI/2023	2023	CV. FACHRI PRATAMA	7.143.000,00				7.143.000
187	Dinas Pertanian	Pembangunan Pagar Kawat Duri	08/SPK/PPK-DISTAN/XI/2024	2024	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA		Rp 9.589.000			9.589.000
188	Dinas Pertanian	Pemeliharaan Gedung BPP W.Utara dan W.Tenggara	07/SPK/PPK-DISTAN/XI/2024	2024	CV MUKMIN ALFA DUAENAM		Rp 5.000.000			5.000.000
189	Bagian Umum dan Keuangan	Perawatan (Interior) Kantor Sekretariat Daerah Beg. Umum Setda	100/SPK/17/SETDA-UMUM/X/2016, 10/24/2016	2016	CV. SYAM JAYA MANDIRI	150,00	0,00	0,00		150,00
190	Bagian Umum dan Keuangan	Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor Penghubung KDI	02.18/KONTRAK/PAGAR-PENGHUBUNG/BAGIAN-UMUM/IX/2022	2022	CV. LANGGE PRIMA KONSTRUKSI	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	74.12.04.0.0000107.LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
191	Sekretariat DRPD	Pembangunan Gedung Mesin	028/07/SPK.640.01.10/SETW AN/2016, 12/23/2016	2016	CV. KITA MAJU BERSAMA	1.260.000	0,00	0,00		1.260.000
192	Sekretariat DRPD	Pembangunan Gedung Alat Kelengkapan Dewan	64/001.02/SPK/Set.DPRD-KONKEP/2016	2016	CV. ARINI KARSA UTAMA	1.400.000	0,00	0,00		1.400.000
193	Sekretariat DRPD	Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga	64/001.08/SPK/SET.DPRD-KONKEP/2016, 10/31/2016	2016	CV. ANARCHI GROUP KONSTRUKSI	1.490.000	0,00	0,00		1.490.000
194	Sekretariat DRPD	Pekerjaan Pembangunan Halaman Parkir (Paving Block)	64/001.08./SPK/Set.DPRD-KONKEP/2016, 8/29/2016	2016	CV. KITA MAJU BERSAMA	9.785.000	0,00	0,00		9.785.000
195	Sekretariat DRPD	Pembangunan Gedung Fraksi DPRD	64/001.01./SPK/Set.DPRD-KONKEP/2016, 7/26/2016	2016	CV. ALAM TEHNIK	9.985.000	0,00	0,00		9.985.000
196	Sekretariat DRPD	Pekerjaan Pembangunan Gedung Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD	64/001.02.SPG/Set.DPRD-KONKEP/2016	2017	CV. ARINI KARSA UTAMA	1.400.000	0,00	0,00		1.400.000
197	Sekretariat DRPD	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD	01/UMYKT/01-KONST/DPRD/2017	2017	CV. PRIMA GROUP	7.485.000	0,00	0,00		7.485.000
198	Sekretariat DRPD	Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Ketua DPRD Kab. Konawe Kepulauan	017/SPK/KONSTRUKSI/SETWAN-KONKEP/VI/2019	2019	CV. ZIKRY PRATAMA	4.986.500	0,00	0,00		4.986.500
199	Sekretariat DRPD	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekretariat DPRD	005/SPK/DPRD-KONKEP/III/2021/V/DPRD- KONKEP 2021	2021		9.935.000,00	0,00	0,00		9.935.000
200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar CELL Desa Rasua Indah	03/SPK/DPKPKONKEP/XI/2021	2021	CV. AMI PRATAMA	6.670.450,00				6.670.450,00
201	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar CELL Kelurahan Lampeapi	04/SPK/DPKPKONKEP/XI/2021	2021	CV. AMI PRATAMA	6.670.450,00				6.670.450,00
202	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belanja Modal Jaringan Listrik (PJU) CV. HALIPAH MULYA	SPK/11/DPKP-PPK/KONTRAK-PLX/2023	2023	CV. HALIPAH MULYA	8.927.500,00	-	8.927.500,00	74.12.04.0.0001/081.LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
203	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belanja Modal Pembangunan Pemasangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Ruas Jalan Lampeapi - Lampeapi Baru	SPK/10/DPKP-PPK/KONTRAK-PLX/2023	2023	CV. FATTAH PERDANA TEKNIK	9.095.250,00	-	9.095.250,00	74.12.04.0.0001/07/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/12/2024	-
204	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya (PJU Solar Cell) CV. HALIPAH MULYA	SPK/04/DPKP-PPK/KONTRAK-PLX/2023	2023	CV. HALIPAH MULYA	9.890.000,00	-	9.890.000,00	74.12.04.0.0001/091/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/PR/12/2024	-

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
205	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kec. Wawonii Tenggara	SPK/PKT.08/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. KARYA AMANAH		7.085.000			7.085.000,00
206	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kecamatan Wawonii Utara	SPK/PKT.05/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. HALIPAH MULYA		9.190.000			9.190.000,00
207	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kecamatan Wawonii Timur Laut	SPK/PKT.06/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. KARYA AMANAH		4.550.000			4.550.000,00
208	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kecamatan Wawonii Timur	SPK/PKT.07/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. HALIPAH MULYA		7.934.850			7.934.850,00
209	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kec. Wawonii Selatan	SPK/PKT.09/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. KARYA AMANAH		5.695.000			5.695.000,00
210	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PJU Lingkungan Sekolah Kecamatan Wawonii Tengah	SPK/PKT.10/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. HALIPAH MULYA		9.190.000			9.190.000,00
211	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	SPK/PKT.11/PL/DPKP/VII/2024	2024	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA		9.030.000			9.030.000,00
212	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan By Pass	SPK/PKT.18/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. HALIPAH MULYA		8.568.000			8.568.000,00
213	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Perkantoran	SPK/PKT.19/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. MAHKOTA TRI KARYA		8.568.000			8.568.000,00
214	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Ibu Kota Kecamatan Wawonii Utara	SPK/PKT.22/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. MAHKOTA TRI KARYA		5.725.000			5.725.000,00
215	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Bokori Kecamatan Wawonii Timur	SPK/PKT.21/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. KARYA AMANAH		6.878.500			6.878.500,00
216	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Ibu Kota Kecamatan Wawonii Tengah	SPK/PKT.23/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. HALIPAH MULYA		5.725.000			5.725.000,00
217	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Ibu Kota Kecamatan Wawonii Timur Laut	SPK/PKT.20/PL/DPKP/IX/2024	2024	CV. KARYA AMANAH		6.878.500			6.878.500,00
218	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Ruas Lumalu - Wanoha	SPK/PKT.17/PL/DPKP/IX/202	2024	CV. AURELIA CAHAYA KONSTRUKSI		8.568.000			8.568.000,00
219	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Gedung Pos Jaga Dankar Satpol PP dan Kebakaran Kab. Konawe Kepulauan oleh CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA sesuai Kontrak Nomor: SPK/PKT.05/PL/SATPOL/IX/2024	SPK/PKT.05/PL/SATPOL/IX/2024	2024	CV. AGIL PUTRA PERKASA JAYA	-	9.697.750,00			9.697.750,00
220	Dinas Pendidikan	Utang Tambahan THR dan Gaji 13 Guru PNS		2024			1.678.983.200,00			1.678.983.200,00
221	Dinas Pendidikan	Utang Tambahan THR dan Gaji 13 Guru PPPK		2024			226.276.800,00			226.276.800,00
222	Dinas Pendidikan	Utang Tunjangan Fungsional Umum PPPK		2024			4.100.000,00			4.100.000,00
223	Dinas Pendidikan	Utang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan SD dan SMP		2024			124.500.000,00			124.500.000,00
224	Sekretariat Daerah	Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2024			1.782.000,00			1.782.000,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
225	Sekretariat Daerah	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		2024			306.088,00			306.088,00
226	Dinas Lingkungan Hidup	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS atas Gaji 13 Tahun 2024		2024			1.396.450,00			1.396.450,00
227	RSUD	Utang Belanja atas Kekurangan Askes Gaji CPNS Tahun 2019 20% RSUD 2024		2024			4.308.096,00			4.308.096,00
228	Inspektorat Daerah	utang Belanja ASKES TPP Tahun 2022		2024			11.707.628,00			11.707.628,00
229	Dinas Pertanian	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Gaji 13 Tahun 2024 Bulan Juni		2024			1.243.150,00			1.243.150,00
230	Badan Keuangan Daerah	Utang Belanja atas Honorarium Dana Pemade		2024			414.765.880,00			414.765.880,00
231	Badan Keuangan Daerah	Utang Belanja TPP Dinas Kesehatan		2024			1.018.872.880,00			1.018.872.880,00
232	Badan Keuangan Daerah	utang Belanja ASKES TPP		2024			40.754.916,00			40.754.916,00
233	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Gaji Rapelan atas kenaikan gaji 8% Bulan Januari dan Februari 2024 PNS		2024			104.574.395,00			104.574.395,00
234	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Gaji Rapelan PPPK Angkatan Tahun 2023 atas kenaikan Gaji 8% Bulan Januari dan Februari, Gaji 14 PPPK Bulan April 2024 dan kekurangan Gaji PPPK angkatan 2024 Bulan Februari 2024		2024			1.054.577.756,00			1.054.577.756,00
235	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS Bulan Desember Tahun 2024		2024			610.800,00			610.800,00
236	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN		2024			7.948.212,00			7.948.212,00
237	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		2024			59.230.000,00			59.230.000,00
238	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		2024			66.844.144,00			66.844.144,00
239	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK		2024			51.925.140,00			51.925.140,00
240	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Pembulatan Gaji PPPK		2024			23.308,00			23.308,00
241	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2024			2.984.344,00			2.984.344,00
242	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2024			81.226.122,00			81.226.122,00
243	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		2024			127.975.176,00			127.975.176,00
244	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		2024			24.354.208,00			24.354.208,00
245	Dinas Kesehatan	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2024			228.744,00			228.744,00

NO.	SATUAN KERJA	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN	REKANAN	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NO SP2D PELUNASAN UTANG	NERACA UTANG PER 31 DESEMBER 2024
							TAMBAH	KURANG		
246	Dinas Kesehatan	Utang Belanja lutan Jaminan Kesehlutan Kerja PPPK		2024			1.304.085,00			1.304.085,00
247	Dinas Kesehatan	Utang Belanja lutan Jaminan Kematian PNS		2024			686.198,00			686.198,00
248	Dinas Kesehatan	Utang Belanja lutan Jaminan Kematian PPPK		2024			3.912.074,00			3.912.074,00
JUMLAH						3.908.562.033,00	6.338.982.704,00	2.809.936.360,00		7.343.049.287,00

Laugara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAHULLAH RAZAK

LAMPIRAN XVIII

Lampiran XVIII : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1					
2	NIHIL				
3					
4					

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XIX

Lampiran XIX : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8=(4-5-6)	8
	JUMLAH							

NIHIL

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XX

LAMPIRAN XX. 1

Lampiran XX.1 :PERATURAN DAERAH 1924
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	SUMBER b)	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	RPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17+18
	NIHIL																	

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN XX. 2

Lampiran XX.2 : PERATURAN DAERAH 2024
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	BUMD/PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER a)	STATUS b)	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	BEBAN DI LUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
	NIHIL								

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN INFORMASI LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0		**389.285.857.099,00**	**212.468.226.590,00**	**1.500.000.000,00**	**103.116.811.300,00**
		368.675.973.509,00	**202.033.467.599,00**	**991.052.110,00**	**102.702.242.500,00**
0.1.01	PENDIDIKAN	82.230.140.119,00	27.690.684.537,00	0,00	0,00
		75.124.577.628,00	27.109.891.079,00	0,00	0,00
0.1.02	KESEHATAN	69.340.328.812,00	59.239.023.762,00	0,00	0,00
		66.472.359.580,00	55.027.042.830,00	0,00	0,00
0.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.993.053.905,00	87.181.171.578,00	0,00	0,00
		16.839.047.857,00	82.867.886.845,00	0,00	0,00
0.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.632.425.511,00	3.227.519.470,00	0,00	0,00
		4.541.893.954,00	3.067.489.900,00	0,00	0,00
0.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.446.631.560,00	4.214.072.450,00	0,00	0,00
		11.829.835.900,00	4.131.816.175,00	0,00	0,00
0.1.06	SOSIAL	2.657.578.132,00	105.345.100,00	0,00	0,00
		2.577.194.762,00	105.200.000,00	0,00	0,00
0.2.07	TENAGA KERJA	331.411.060,00	105.000.000,00	0,00	0,00
		329.376.772,00	104.992.125,00	0,00	0,00
0.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.824.605.120,00	158.000.000,00	0,00	0,00
		3.754.848.397,00	157.600.000,00	0,00	0,00
0.2.09	PANGAN	1.980.034.340,00	38.857.500,00	0,00	0,00
		1.962.408.288,00	38.850.000,00	0,00	0,00
0.2.10	PERTANAHAN	469.411.870,00	2.003.037.400,00	0,00	0,00
		469.401.870,00	1.778.430.000,00	0,00	0,00
0.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	2.368.798.532,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		2.314.119.855,00	14.000.000,00	0,00	0,00
0.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.180.419.368,00	72.096.800,00	0,00	0,00
		2.950.318.761,00	72.091.000,00	0,00	0,00
0.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.230.069.034,00	30.798.900,00	0,00	0,00
		3.937.545.628,00	30.798.000,00	0,00	0,00
0.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.394.640.000,00	1.327.975.000,00	0,00	0,00
		3.789.072.000,00	1.262.942.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0.2.15	PERHUBUNGAN	3.867.793.700,00	5.525.581.600,00	0,00	0,00
		3.684.002.579,00	5.402.451.000,00	0,00	0,00
0.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	4.109.776.978,00	72.138.930,00	0,00	0,00
		4.049.322.195,00	71.870.000,00	0,00	0,00
0.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.077.518.470,00	97.475.600,00	0,00	0,00
		2.035.446.124,00	97.400.000,00	0,00	0,00
0.2.18	PENANAMAN MODAL	2.355.107.294,00	140.364.800,00	0,00	0,00
		2.274.543.224,00	140.194.880,00	0,00	0,00
0.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.210.335.704,00	713.441.150,00	0,00	0,00
		3.143.654.011,00	657.900.000,00	0,00	0,00
0.2.20	STATISTIK	86.620.600,00	0,00	0,00	0,00
		71.713.600,00	0,00	0,00	0,00
0.2.21	PERSANDIAN	23.240.800,00	0,00	0,00	0,00
		22.280.800,00	0,00	0,00	0,00
0.2.22	KEBUDAYAAN	1.550.524.565,00	2.781.400.000,00	0,00	0,00
		1.255.654.560,00	2.747.808.000,00	0,00	0,00
0.2.23	PERPUSTAKAAN	3.378.683.591,00	3.071.700.000,00	0,00	0,00
		3.080.651.997,00	3.067.782.125,00	0,00	0,00
0.2.24	KEARSIPAN	130.750.450,00	0,00	0,00	0,00
		127.711.360,00	0,00	0,00	0,00
0.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.671.044.297,00	207.858.900,00	0,00	0,00
		5.448.814.793,00	178.458.000,00	0,00	0,00
0.3.26	PARIWISATA	667.197.210,00	170.625.000,00	0,00	0,00
		665.383.900,00	170.600.000,00	0,00	0,00
0.3.27	PERTANIAN	9.134.238.320,00	1.141.558.673,00	0,00	0,00
		9.037.134.160,00	1.083.538.900,00	0,00	0,00
0.3.30	PERDAGANGAN	252.470.800,00	949.982.500,00	0,00	0,00
		248.600.800,00	939.727.000,00	0,00	0,00
0.3.31	PERINDUSTRIAN	467.113.000,00	4.071.785.000,00	0,00	0,00
		448.767.489,00	3.998.079.000,00	0,00	0,00
0.3.32	TRANSMIGRASI	191.746.555,00	0,00	0,00	0,00
		191.745.558,00	0,00	0,00	0,00
0.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	36.335.669.487,00	1.229.105.470,00	0,00	0,00
		34.287.768.843,00	1.225.392.840,00	0,00	0,00
0.4.02	SEKRETARIAT DPRD	29.211.651.434,00	1.120.605.230,00	0,00	0,00
		27.634.141.507,00	1.070.590.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
0.5.01	PERENCANAAN	5.186.327.274,00	368.000.000,00	0,00	0,00
		5.049.691.240,00	363.300.000,00	0,00	0,00
0.5.02	KEUANGAN	26.803.258.908,00	2.988.347.940,00	1.500.000.000	103.116.811.300,00
		25.058.591.131,00	2.686.800.000,00	991.052.110,00	102.702.242.900,00
0.5.03	KEPEGAWAIAN	4.078.782.634,00	90.000.000,00	0,00	0,00
		3.470.045.261,00	87.190.000,00	0,00	0,00
0.5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	319.600.000,00	-	0,00	0,00
		319.600.000,00	-	0,00	0,00
0.5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	898.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
		872.190.800,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00
0.6.01	INSPEKTORAT	6.718.900.513,00	592.473.400,00	0,00	0,00
		5.519.499.188,00	555.473.400,00	0,00	0,00
0.7.01	KECAMATAN	4.684.300.100,00	216.699.900,00	0,00	0,00
		4.613.721.172,00	210.182.500,00	0,00	0,00
0.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.375.659.252,00	61.500.000,00	0,00	0,00
		29.173.298.165,00	59.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

LAMPIRAN REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPANDING* BDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*-BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**a. Urusan Bidang Pendidikan ;**	**107.900.824.656,00**	**75.124.577.628,00**	**69,62%**
	1) Belanja Operasi	82.230.140.119,00	75.124.577.628,00	91,36%
	a. Belanja Pegawai	60.424.214.729,00	57.242.142.528,00	94,73%
	b. Belanja Barang dan Jasa	19.800.585.390,00	15.912.506.850,00	80,36%
	c. Belanja Hibah	1.985.340.000,00	1.949.928.250,00	98,22%
	d. Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
	2) Belanja Modal	25.670.684.537,00		0,00%
	b. Urusan Bidang Kebudayaan ;	**4.331.924.565,00**	**4.003.462.560,00**	**92,42%**
	1) Belanja Operasi	1.550.524.565,00	1.255.654.560,00	80,98%
	a. Belanja Pegawai	0,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.550.524.565,00	1.255.654.560,00	**80,98%**
	c. Belanja Hibah	0,00		
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00		
	2) Belanja Modal	2.781.400.000,00	2.747.808.000,00	98,79%
	c. Urusan Bidang Perpustakaan ;	**5.681.159.791,00**	**6.148.434.122,00**	**108,22%**
	1) Belanja Operasi:	3.258.959.791,00	3.080.651.997,00	94,53%
	a. belanja pegawai;	1.170.152.156,00	1.014.754.814,00	86,72%
	b. belanja barang dan jasa;	2.088.807.635,00	2.065.897.183,00	98,90%
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal;	2.422.200.000,00	3.067.782.125,00	126,65%
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;	**3.943.776.854,00**	**3.801.554.011,00**	**96,39%**
	1) Belanja Operasi:	3.230.335.704,00	3.143.654.011,00	97,32%
	a. belanja pegawai;	1.002.990.000,00	945.538.110,00	94,27%
	b. belanja barang dan jasa;	1.627.345.704,00	1.598.155.892,00	98,21%
	c. belanja hibah;	600.000.000,00	599.960.009,00	99,99%

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal;	713.441.150,00	657.900.000,00	92,22%
	b. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan antara lain ;	**15.362.357.932,00**	**10.709.715.287,00**	**69,71%**
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.362.357.932,00	10.709.715.287,00	69,71%
	a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (Belanja Beasiswa) (BAG. KESRA)	6.000.000.000,00	5.259.850.000,00	87,66%
	b. DINAS SOSIAL	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
	c. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.392,00	200.000.392,00	100,00%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	47.413.642,00	47.413.642,00	100,00%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	152.586.750,00	152.586.750,00	100,00%
	d. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64.484.600,00	64.484.600,00	100,00%
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	64.484.600,00	64.484.600,00	100,00%
	e. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	23.826.000,00	-	0,00%
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	23.826.000,00	-	0,00%
	f. DINAS PERIKANAN	1.021.788.590,00	1.010.100.800,00	98,86%
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	761.878.160,00	756.182.000,00	99,25%
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	77.709.110,00	71.962.800,00	92,61%
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	49.086.260,00	49.086.000,00	100,00%

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	133.115.060,00	132.870.000,00	99,82%
	g. DINAS PERTANIAN	357.332.070,00	349.399.325,00	97,78%
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	192.490.665,00	96,25%
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	157.332.070,00	156.908.660,00	99,73%
	h. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	874.683.280,00	873.030.840,00	99,81%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	463.354.280,00	462.674.680,00	99,85%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	411.329.000,00	410.356.160,00	99,76%
	i. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	130.000.000,00	128.246.000,00	98,65%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	80.000.000,00	79.796.000,00	99,75%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.450.000,00	96,90%
	j. DINAS KESEHATAN	179.397.300,00	134.647.000,00	75,06%
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78.647.300,00	77.777.000,00	98,89%
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.515.000,00	-	0,00%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.235.000,00	56.870.000,00	75,59%
	k. DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	607.876.400,00	502.451.330,00	82,66%
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	7.876.400,00	7.876.400,00	100,00%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	303.253.445,00	302.829.372,00	99,86%
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	105.000.000,00		0,00%
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	191.746.555,00	191.745.558,00	99,999%
	l. DINAS KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.492.025.000,00	1.487.505.000,00	99,70%
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-	-	0,00%
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4.050.000,00	-	0,00%

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	355.500.000,00	355.500.000,00	100,00%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.475.000,00	417.005.000,00	99,89%
	m. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	430.199.920,00		0,00%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000,00	73.325.000,00	73,33%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	130.199.920,00	118.313.852,00	90,87%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	200.000.000,00	163.640.000,00	81,82%
	n. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.278.074.700,00		0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	137.568.500,00	136.840.000,00	99,47%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	113.049.500,00	101.046.000,00	89,38%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	257.771.000,00	257.602.300,00	99,93%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	36.259.500,00	36.246.000,00	99,96%
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	53.988.800,00	53.928.000,00	99,89%
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	88.145.400,00	88.130.000,00	99,98%
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	141.292.000,00	141.035.000,00	99,82%
	o. BADAN KEUANGAN DAERAH	424.250.000,00		0,00%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	424.250.000,00	423.660.000,00	
	p. DINAS PARIWISATA	146.460.200,00		0,00%
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	73.230.100,00	72.830.100,00	99,45%

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.230.100,00	72.830.100,00	99,45%
	q. INSPEKTORAT	226.350.000,00		0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	226.350.000,00	144.050.000,00	63,64%
	r. SEKRETARIAT DPRD	155.609.480,00		0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	155.609.480,00	-	0,00%
	s. BAGIAN HUKUM	50.000.000,00		0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	49.660.000,00	99,32%
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)**	**137.220.043.798,00**	**99.787.743.608,00**	**72,72%**
3	**Total Belanja Daerah**	**661.263.197.970,00**	**616.466.514.144,00**	**93,23%**
	Rasio Anggaran Pendidikan (2: 3) X 100%	**20,75%**	**16,19%**	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPANDING*) TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPANDING* BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*
BIDANG INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERHITUNGAN BELANJA BAGI HASIL DAN ATAU TRANSFER KEPADA DAERAH/DESA

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Penerimaan**			
	1) Dana Transfer Umum	**416.007.424.000,00**	**419.033.688.307,00**	**100,73%**
	a. DAU	330.150.530.000,00	331.828.914.827,00	100,51%
	b. DBH	85.856.894.000,00	87.204.773.480,00	101,57%
	Jumlah Penerimaan			
2	**Pengurang**	**37.204.185.300,00**	**36.789.616.900,00**	**98,89%**
	a. DBH CHT	2.000	0,00	
	b. DBH DR	0,00	0,00	
	c. ADD	37.204.185.300,00	36.789.616.900,00	**98,89%**
	Jumlah Pengurang			
3	**Jumlah Dana Transfer Umum Yang Diperhitungkan**	**378.803.238.700,00**	**382.244.071.407,00**	**100,91%**

B. PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a) Belanja Modal	212.468.226.590,00	202.033.467.599,00	95,09%
	1) Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	88,73%
	2) Peralatan dan Mesin	34.426.116.413,00	33.676.841.899,00	97,82%
	3) Bangunan dan Gedung	97.827.899.937,00	92.894.711.664,00	94,96%

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	65.600.987.940,00	61.587.257.321,00	93,88%
	5) Aset Tetap Lainnya	4.565.834.900,00	4.559.190.025,00	99,85%
	6) Aset Lainnya	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	93,70%
	b) Belanja Pemeliharaan	15.681.044.041,00	15.243.082.039,00	97,21%
2.	a) Belanja Hibah	30.246.300.000,00	30.188.210.759,00	99,81%
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.303.619.840,00	4.297.021.000,00	99,85%
	c) Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	99,60%
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**365.816.001.771,00**	**354.464.024.297,00**	**96,90%**
4.	**Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum**	**96,57%**	**92,73%**	

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPANDING* BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING* -BIDANG KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**a. Urusan Bidang Kesehatan ;**	**128.579.352.574,00**	**121.499.402.410,00**	**94,49%**
	1) Belanja Operasi	69.340.328.812,00	66.472.359.580,00	95,86%
	a. Belanja Pegawai	30.680.902.398,00	30.415.972.081,00	99,14%
	b. Belanja Barang dan Jasa	38.558.376.414,00	35.955.337.499,00	93,25%
	c. Belanja Hibah	101.050.000,00	101.050.000,00	100,00%
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	2) Belanja Modal	59.239.023.762,00	55.027.042.830,00	92,89%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain ;	**0,00**	**0,00**	
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00	
2	**Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)**	**128.579.352.574,00**	**121.499.402.410,00**	**94,49%**
3	**Total Belanja Daerah**	**706.370.894.989,00**	**674.402.736.118,00**	**95,47%**
4	**Gaji ASN**	**153.100.700.515,00**	**146.544.208.655,00**	**95,72%**
5	**Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)**	**553.270.194.474,00**	**527.858.527.463,00**	**95,41%**
	Rasio Anggaran Kesehatan (2: 5) X 100%	**23,24%**	**23,02%**	

Lunggara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A.	**SPM Bidang Pendidikan**			
1	Pendidikan Dasar		**14.571.467.720**	**11.563.703.622**
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.452.000	180.850.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.240.492.000	7.724.289.022
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.964.523.720	3.658.564.600
2	Pendidikan Anak Usia Dini		**2.531.716.500**	**2.203.635.900**
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.531.716.500	2.203.635.900
	Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan		**17.103.184.220**	**13.767.339.522**
B.	**SPM Bidang Kesehatan**	**Kegiatan (Rp)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		**631.560.000**	**609.040.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	631.560.000	609.040.000
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		**199.966.000**	**199.916.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.966.000	199.916.000
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		**44.740.000**	**44.115.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.740.000	44.115.000
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		**55.900.240**	**55.240.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.900.240	55.240.000
5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		**197.695.000**	**195.245.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	197.695.000	195.245.000
6	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		**227.168.000**	**195.865.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.168.000	195.865.000
7	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		**151.390.000**	**150.840.000**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.390.000	150.840.000
8	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		**347.760.000**	**340.260.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.760.000	340.260.000
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		**196.807.500**	**191.357.500**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.807.500	191.357.500
10	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		**91.660.000**	**64.167.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.660.000	64.167.000
11	Pelayanan Kesehatan Balita		**101.780.000**	**96.410.000**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.780.000	96.410.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan			**2.246.426.740**	**2.142.455.500**
C.	**SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Kegiatan (Rp)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		**12.658.268.000**	**12.658.268.000**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.658.268.000	11.899.120.843
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		**4.705.435.500**	**4.695.195.500**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.705.435.500	4.695.195.500
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			**17.363.703.500**	**17.353.463.500**
D.	**SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**Kegiatan (Rp)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		**47.584.760**	**47.549.000**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	47.584.760	47.549.000
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		**48.502.360**	**48.467.360**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	48.502.360	48.467.360
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			**96.087.120**	**96.016.360**
E.	**SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kegiatan (Rp)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		**182.200.000**	**182.200.000**
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	182.200.000	182.200.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		**1.129.806.310**	**1.128.128.870**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	411.329.000	410.356.160
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	463.354.280	462.674.680
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.827.450	47.827.450
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.843.780	47.843.780
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.390.000	48.390.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.475.000	49.450.000
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	61.586.800	61.586.800
3	Pelayanan informasi rawan bencana		**80.000.000**	**79.796.000**
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	79.796.000
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**165.660.000**	**149.000.000**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	165.660.000	149.000.000
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		**50.050.000**	**42.875.000**
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50.050.000	42.875.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**1.607.716.310**	**1.581.999.870**
F.	**SPM Bidang Sosial**	**Kegiatan (Rp)**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		**530.000.000**	**529.880.000**
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	530.000.000	529.880.000
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial			**530.000.000**	**529.880.000**

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KAB. KONAWE KEPULAUAN

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**646.486.163.577,00**	**643.585.044.876,00**	**(2.901.118.701,00)**	**99,55**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**17.249.032.486,00**	**17.270.521.057,00**	**21.488.571,00**	**100,12**
4.1.01	Pajak Daerah	3.640.000.000,00	4.396.468.604,00	756.468.604,00	120,78
4.1.01.06	Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	(3.900.909,00)	73,99
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	(3.900.909,00)	73,99
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	15.000.000,00	11.099.091,00	(3.900.909,00)	73,99
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	686.690.730,00	157,22
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	686.690.730,00	157,22
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	1.886.690.730,00	686.690.730,00	157,22
4.1.01.09	Pajak Reklame	15.000.000,00	21.469.513,00	6.469.513,00	143,13
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	21.469.513,00	6.469.513,00	143,13
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.000.000,00	21.469.513,00	6.469.513,00	143,13
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000,00	943.175.159,00	(56.824.841,00)	94,32
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.000.000.000,00	943.175.159,00	(56.824.841,00)	94,32
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.000.000.000,00	943.175.159,00	(56.824.841,00)	94,32
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	1.141.903.387,00	241.903.387,00	126,88
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000,00	1.141.903.387,00	241.903.387,00	126,88
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000,00	1.141.903.387,00	241.903.387,00	126,88
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000.000,00	388.141.124,00	(111.858.876,00)	77,63
4.1.01.15.01	PBBP2	500.000.000,00	388.141.124,00	(111.858.876,00)	77,63
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	500.000.000,00	388.141.124,00	(111.858.876,00)	77,63
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000,00	3.989.600,00	(6.010.400,00)	39,90
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000,00	3.989.600,00	(1.010.400,00)	79,79
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000,00	3.989.600,00	(1.010.400,00)	79,79
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.340.000.000,00	3.107.876.344,00	(232.123.656,00)	93,05
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.115.000.000,00	1.907.129.732,00	(207.870.268,00)	90,17
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000,00	1.888.159.732,00	(211.840.268,00)	89,91
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100.000.000,00	236.082.400,00	136.082.400,00	236,08
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000.000,00	1.652.077.332,00	(347.922.668,00)	82,60
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.000.000,00	18.970.000,00	3.970.000,00	126,47
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	15.000.000,00	18.970.000,00	3.970.000,00	126,47

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.225.000.000,00	1.200.746.612,00	(24.253.388,00)	98,02
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	800.000.000,00	685.458.692,00	(114.541.308,00)	85,68
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	6.182.000,00	(1.318.000,00)	82,43
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	770.000.000,00	656.776.692,00	(113.223.308,00)	85,30
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	14.644.500,00	(5.355.500,00)	73,22
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	20.000.000,00	14.644.500,00	(5.355.500,00)	73,22
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	79,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	79,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	60.655.000,00	(9.345.000,00)	86,65
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000,00	60.655.000,00	(9.345.000,00)	86,65
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	19.591.000,00	(10.409.000,00)	65,30
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	19.591.000,00	(10.409.000,00)	65,30
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.000.000,00	416.447.420,00	116.447.420,00	138,82
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	300.000.000,00	416.447.420,00	116.447.420,00	138,82
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	0,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	0,00	100,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	0,00	100,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.356.088.487,00	4.356.088.487,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.912.943.999,00	5.410.087.622,00	(502.856.377,00)	91,50
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	136.109.200,00	86.109.200,00	272,22
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	136.109.200,00	86.109.200,00	272,22
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	136.109.200,00	86.109.200,00	272,22
4.1.04.05	Jasa Giro	1.020.000.000,00	604.283.651,00	(415.716.349,00)	59,24
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	593.665.713,00	(406.334.287,00)	59,37
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	593.665.713,00	(406.334.287,00)	59,37
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	10.617.938,00	(9.382.062,00)	53,09
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	10.617.938,00	(9.382.062,00)	53,09

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	7.191.769,00	100,38
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	7.191.769,00	100,38
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00	1.907.191.769,00	7.191.769,00	100,38
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	485.102.628,00	(14.897.372,00)	97,02
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	485.102.628,00	(14.897.372,00)	97,02
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00	485.102.628,00	(14.897.372,00)	97,02
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	(437.004.869,00)	12,60
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	(437.004.869,00)	12,60
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	62.995.131,00	(437.004.869,00)	12,60
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	7.957.154,00	(2.042.846,00)	79,57
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	27.000,00	(973.000,00)	2,70
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	27.000,00	(973.000,00)	2,70
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000,00	16.020,00	(983.980,00)	1,60
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000,00	16.020,00	(983.980,00)	1,60
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	3.147.961,00	(1.852.039,00)	62,96
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000,00	3.147.961,00	(1.852.039,00)	62,96
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000,00	4.766.173,00	3.766.173,00	476,62
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.000.000,00	4.766.173,00	3.766.173,00	476,62
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.931.943.999,00	2.206.448.089,00	274.504.090,00	114,21
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	500.000.000,00	427.715.660,00	(72.284.340,00)	85,54
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	500.000.000,00	427.715.660,00	(72.284.340,00)	85,54
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	112.000.000,00	242.973.005,00	130.973.005,00	216,94
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	100.000.000,00	240.281.981,00	140.281.981,00	240,28
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	10.000.000,00	2.691.024,00	(7.308.976,00)	26,91
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.000.000,00	10.603.482,00	(4.396.518,00)	70,69
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	15.000.000,00	10.603.482,00	(4.396.518,00)	70,69
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.11.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	710.033.676,00	991.643.009,00	281.609.333,00	139,66
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.033.676,00	397.033.676,00	387.000.000,00	3.957,01
4.1.04.15.15.0640	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500.000.000,00	418.357.467,00	(81.642.533,00)	83,67
4.1.04.15.15.0670	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.000.000,00	176.251.866,00	(23.748.134,00)	88,13
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	551.000.000,00	499.602.610,00	(51.397.390,00)	90,67
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	550.000.000,00	499.602.610,00	(50.397.390,00)	90,84
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.15.76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	33.910.323,00	33.910.323,00	0,00	100,00
4.1.04.15.76.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	33.910.323,00	33.910.323,00	0,00	100,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**17.249.032.486,00**	**17.270.521.057,00**	**21.488.571,00**	**100,12**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**626.919.157.091,00**	**624.398.779.080,00**	**(2.528.378.011,00)**	**99,60**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	607.094.396.000,00	608.499.872.023,00	1.405.476.023,00	100,23
4.2.01.01	Dana Perimbangan	529.867.056.000,00	531.272.532.023,00	1.405.476.023,00	100,27
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.856.894.000,00	87.204.773.480,00	1.347.879.480,00	101,57

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.535.962.000,00	1.535.962.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.621.366.000,00	1.621.366.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	27.747.000,00	27.747.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)	50,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	81.629.000,00	81.629.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	80.607.514.000,00	81.955.394.480,00	1.347.880.480,00	101,67
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	158.249.000,00	158.249.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.824.425.000,00	1.824.425.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	330.150.530.000,00	331.828.914.827,00	1.678.384.827,00	100,51
4.2.01.01.02.0001	DAU	237.640.825.000,00	239.512.064.000,00	1.871.239.000,00	100,79
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.642.111.000,00	12.449.256.827,00	(192.854.173,00)	98,47
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	42.246.696.000,00	42.246.696.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.440.382.000,00	17.440.382.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.780.516.000,00	18.780.516.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.917.626.000,00	78.102.010.197,00	(815.615.803,00)	98,97
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	283.233.000,00	283.083.000,00	(150.000,00)	99,95
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.895.139.000,00	3.890.514.000,00	(4.625.000,00)	99,88
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.085.083.000,00	3.083.958.000,00	(1.125.000,00)	99,96
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	379.906.000,00	373.685.000,00	(6.221.000,00)	98,36
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	987.975.000,00	950.600.000,00	(37.375.000,00)	96,22
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.426.301.000,00	9.391.144.000,00	(35.157.000,00)	99,63
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.988.536.000,00	3.988.435.500,00	(100.500,00)	100,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	9.090.150.000,00	8.928.220.485,00	(161.929.515,00)	98,22
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	47.781.303.000,00	47.212.370.212,00	(568.932.788,00)	98,81
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.942.006.000,00	34.136.833.519,00	(805.172.481,00)	97,70
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	10.387.646.000,00	10.419.722.000,00	32.076.000,00	100,31
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	721.000.000,00	1.011.250.000,00	290.250.000,00	140,26
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidkan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355.089.000,00	355.089.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.868.680.000,00	2.864.577.910,00	(4.102.090,00)	99,86
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	6.537.040.000,00	6.537.040.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	566.670.000,00	531.258.250,00	(35.411.750,00)	93,75
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.830.457.000,00	2.356.927.195,00	(473.529.805,00)	83,27
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.696.754.000,00	7.082.299.164,00	(614.454.836,00)	92,02
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**529.867.056.000,00**	**531.272.532.023,00**	**1.405.476.023,00**	**100,27**
4.2.01.05	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	0,00	100,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11.314.714.000,00	11.314.714.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**77.227.340.000,00**	**77.227.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	(3.933.854.034,00)	80,16
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	(3.933.854.034,00)	80,16
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.824.761.091,00	15.890.907.057,00	(3.933.854.034,00)	80,16
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.901.864.599,00	1.864.991.953,00	(36.872.646,00)	98,06
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.641.192.505,00	3.062.147.555,00	420.955.050,00	115,94
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.347.704.497,00	8.865.668.535,00	(482.035.962,00)	94,84
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	261.712.868,00	17.683.122,00	(244.029.746,00)	6,76
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.672.286.622,00	2.080.415.892,00	(3.591.870.730,00)	36,68
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**19.824.761.091,00**	**15.890.907.057,00**	**(3.933.854.034,00)**	**80,16**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**626.919.157.091,00**	**624.390.779.080,00**	**(2.528.378.011,00)**	**99,60**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.317.974.000,00**	**1.923.744.739,00**	**(394.229.261,00)**	**82,99**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	(394.229.261,00)	82,99

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	(394.229.261,00)	82,99
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	(394.229.261,00)	82,99
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	2.317.974.000,00	1.923.744.739,00	(394.229.261,00)	82,99
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**2.317.974.000,00**	**1.923.744.739,00**	**(394.229.261,00)**	**82,99**
	JUMLAH PENDAPATAN	**646.486.163.577,00**	**643.585.044.876,00**	**(2.901.118.701,00)**	**99,55**
5	**BELANJA DAERAH**	**706.370.894.989,00**	**674.402.736.118,00**	**(31.968.158.871,00)**	**95,47**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**389.285.857.099,00**	**368.675.973.509,00**	**(20.609.883.590,00)**	**94,71**
5.1.01	Belanja Pegawai	153.100.700.515,00	146.544.208.655,00	(6.556.491.860,00)	95,72
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	117.236.633.344,00	112.126.922.636,00	(5.109.710.708,00)	95,64
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	87.171.894.872,00	84.178.531.805,00	(2.993.363.067,00)	96,57
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	62.562.396.072,00	59.894.486.905,00	(2.667.909.167,00)	95,74
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.609.498.800,00	24.284.044.900,00	(325.453.900,00)	98,68
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.813.239.086,00	7.519.413.476,00	(293.825.610,00)	96,24
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.921.206.426,00	5.692.905.428,00	(228.300.998,00)	96,14
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.892.032.660,00	1.826.508.048,00	(65.524.612,00)	96,54
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.227.620.000,00	4.067.975.000,00	(159.645.000,00)	96,22
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.227.620.000,00	4.067.975.000,00	(159.645.000,00)	96,22
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.405.705.000,00	3.286.844.000,00	(118.861.000,00)	96,51
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.360.705.000,00	3.242.819.000,00	(117.886.000,00)	96,49
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	45.000.000,00	44.025.000,00	(975.000,00)	97,83
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.885.726.965,00	1.801.010.000,00	(84.716.965,00)	95,51
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	509.781.965,00	456.750.000,00	(53.031.965,00)	89,60
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.375.945.000,00	1.344.260.000,00	(31.685.000,00)	97,70
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.007.874.648,00	4.804.356.680,00	(203.517.968,00)	95,94
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.587.069.628,00	3.419.396.600,00	(167.673.028,00)	95,33
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.420.805.020,00	1.384.960.080,00	(35.844.940,00)	97,48
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	267.631.928,00	230.474.930,00	(37.156.998,00)	86,12
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	267.631.928,00	230.474.930,00	(37.156.998,00)	86,12
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.415.615,00	1.326.054,00	(1.089.561,00)	54,90
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.439.565,00	835.026,00	(604.539,00)	58,01
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	976.050,00	491.028,00	(485.022,00)	50,31
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.712.732.392,00	5.550.872.051,00	(1.161.860.341,00)	82,69
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.704.443.611,00	4.595.225.186,00	(1.109.218.425,00)	80,56
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.008.288.781,00	955.646.865,00	(52.641.916,00)	94,78
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	196.854.899,00	171.529.376,00	(25.325.523,00)	87,13
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	143.435.645,00	120.995.781,00	(22.439.864,00)	84,36
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.419.254,00	50.533.595,00	(2.885.659,00)	94,60
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	544.937.939,00	514.589.264,00	(30.348.675,00)	94,43

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	387.280.869,00	362.992.709,00	(24.288.160,00)	93,73
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	157.657.070,00	151.596.555,00	(6.060.515,00)	96,16
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.443.304.822,00	9.251.847.152,00	(191.457.670,00)	97,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.095.304.822,00	8.903.847.152,00	(191.457.670,00)	97,89
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.095.304.822,00	8.903.847.152,00	(191.457.670,00)	97,89
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.285.159.349,00	17.165.366.101,00	(1.119.793.248,00)	93,88
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	10.852.856.697,00	10.010.858.800,00	(841.997.897,00)	92,24
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	10.852.856.697,00	10.010.858.800,00	(841.997.897,00)	92,24
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.026.300.000,00	1.026.000.000,00	(300.000,00)	99,97
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.026.300.000,00	1.026.000.000,00	(300.000,00)	99,97
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	798.674.600,00	782.137.301,00	(16.537.299,00)	97,93
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	798.674.600,00	782.137.301,00	(16.537.299,00)	97,93
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.607.328.052,00	5.346.370.000,00	(260.958.052,00)	95,35
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.983.158.052,00	4.767.400.000,00	(215.758.052,00)	95,67
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	624.170.000,00	578.970.000,00	(45.200.000,00)	92,76
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.565.500.000,00	7.517.157.696,00	(48.342.304,00)	99,36
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	454.000.000,00	451.290.000,00	(2.710.000,00)	99,40
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	454.000.000,00	451.290.000,00	(2.710.000,00)	99,40
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.000.000,00	35.632.300,00	(3.367.700,00)	91,36
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.000.000,00	35.632.300,00	(3.367.700,00)	91,36
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	48.000.000,00	43.741.680,00	(4.258.320,00)	91,13
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	48.000.000,00	43.741.680,00	(4.258.320,00)	91,13
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	41.000.000,00	38.682.000,00	(2.318.000,00)	94,35
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	41.000.000,00	38.682.000,00	(2.318.000,00)	94,35
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	657.000.000,00	654.370.500,00	(2.629.500,00)	99,60
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	657.000.000,00	654.370.500,00	(2.629.500,00)	99,60
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.000.000,00	70.644.000,00	(2.356.000,00)	96,77
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.000.000,00	70.644.000,00	(2.356.000,00)	96,77
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.520.000.000,00	1.512.000.000,00	(8.000.000,00)	99,47
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.520.000.000,00	1.512.000.000,00	(8.000.000,00)	99,47

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00	561.160,00	(438.840,00)	56,12
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00	561.160,00	(438.840,00)	56,12
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.506.500.000,00	1.484.826.056,00	(21.673.944,00)	98,56
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	42.000.000,00	39.112.584,00	(2.887.416,00)	93,13
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.500.000,00	928.368,00	(571.632,00)	61,89
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.000.000,00	2.785.104,00	(214.896,00)	92,84
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.460.000.000,00	1.442.000.000,00	(18.000.000,00)	98,77
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	0,00	100,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	194.000.000,00	193.410.000,00	(590.000,00)	99,70
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	194.000.000,00	193.410.000,00	(590.000,00)	99,70
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.103.000,00	166.408.670,00	(3.694.330,00)	97,83
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.000.000,00	54.600.000,00	(400.000,00)	99,27
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.000.000,00	54.600.000,00	(400.000,00)	99,27
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.200.000,00	2.940.000,00	(260.000,00)	91,88
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.200.000,00	2.940.000,00	(260.000,00)	91,88
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	(1.720.000,00)	98,28
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	(1.720.000,00)	98,28
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.300.000,00	3.041.640,00	(258.360,00)	92,17
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.300.000,00	3.041.640,00	(258.360,00)	92,17
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	1.753.390,00	(246.610,00)	87,67
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	1.753.390,00	(246.610,00)	87,67
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.960,00	(1.040,00)	65,33
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	1.960,00	(1.040,00)	65,33
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	5.342.400,00	(657.600,00)	89,04
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	5.342.400,00	(657.600,00)	89,04
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	200.000,00	112.320,00	(87.680,00)	56,16
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	200.000,00	112.320,00	(87.680,00)	56,16
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00	336.960,00	(63.040,00)	84,24
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.000,00	336.960,00	(63.040,00)	84,24
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	316.506.400,00	(83.493.600,00)	79,13
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	150.000.000,00	101.606.400,00	(48.393.600,00)	67,74
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	150.000.000,00	101.606.400,00	(48.393.600,00)	67,74
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	250.000.000,00	214.900.000,00	(35.100.000,00)	85,96
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	250.000.000,00	214.900.000,00	(35.100.000,00)	85,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.635.236.744,00	187.646.533.095,00	(13.988.703.649,00)	93,06
5.1.02.01	Belanja Barang	40.438.440.868,00	38.267.802.667,00	(2.170.638.201,00)	94,63

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.411.440.868,00	38.240.802.667,00	(2.170.638.201,00)	94,63
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	480.684.292,00	472.917.796,00	(7.686.496,00)	98,40
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	38.436.800,00	38.436.000,00	(800,00)	100,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bahan dan Pelumas	3.331.846.446,00	3.242.695.910,00	(89.150.536,00)	97,32
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	541.697.343,00	513.110.418,00	(28.586.925,00)	94,72
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	49.206.380,00	44.986.000,00	(4.220.380,00)	91,42
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	101.222.500,00	1.222.500,00	(100.000.000,00)	1,21
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.732.500,00	1.732.500,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	116.051.541,00	113.967.000,00	(2.084.541,00)	98,20
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.499.968.688,00	6.201.167.952,00	(298.800.736,00)	95,40
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.670.265.320,00	1.457.890.851,00	(212.374.469,00)	87,28
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	191.255.000,00	183.387.000,00	(7.868.000,00)	95,89
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.531.700,00	79.446.700,00	(6.085.000,00)	92,89
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	65.326.546,00	60.710.961,00	(4.615.585,00)	92,93
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	204.863.320,00	203.550.976,00	(1.312.344,00)	99,36
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	256.816.320,00	240.744.820,00	(16.071.500,00)	93,74
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	416.912.500,00	416.312.500,00	(600.000,00)	99,86
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.957.500,00	5.890.000,00	(67.500,00)	98,87
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.280.660.000,00	2.248.838.393,00	(31.821.607,00)	98,60
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.297.259.642,00	1.864.687.039,00	(432.672.603,00)	81,17
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.237.156.030,00	4.981.584.160,00	(255.571.870,00)	95,12
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.458.756.800,00	9.018.822.399,00	(439.934.401,00)	95,35
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.151.345.000,00	2.049.409.400,00	(101.935.600,00)	95,26
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	198.000.000,00	197.800.000,00	(200.000,00)	99,90
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.861.831.150,00	1.780.837.150,00	(80.994.000,00)	95,65
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	165.000.000,00	160.772.523,00	(4.227.477,00)	97,44
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	153.300.000,00	153.250.000,00	(50.000,00)	99,97
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	412.700.000,00	412.165.000,00	(535.000,00)	99,87
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	272.364.800,00	271.414.000,00	(950.800,00)	99,65
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	71.928.000,00	71.928.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	321.600.000,00	316.300.000,00	(5.300.000,00)	98,35
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	925.445.000,00	888.773.219,00	(36.671.781,00)	96,04
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	42.039.750,00	41.791.500,00	(248.250,00)	99,41
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	56.582.355.524,00	52.215.657.666,00	(4.366.697.858,00)	92,28
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.882.419.924,00	43.207.372.365,00	(3.675.047.559,00)	92,16
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Penitia	4.916.750.000,00	3.905.685.000,00	(1.011.065.000,00)	79,44
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.319.550.000,00	1.198.907.501,00	(120.642.499,00)	90,86
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	693.800.000,00	693.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	219.900.000,00	219.400.000,00	(500.000,00)	99,77
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	52.800.000,00	30.000.000,00	(22.800.000,00)	56,82
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	354.400.000,00	339.900.000,00	(14.500.000,00)	95,91
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.632.000.000,00	1.380.750.000,00	(251.250.000,00)	84,60
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.899.000.030,00	10.308.985.693,00	(590.014.337,00)	94,59
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	44.980.000,00	2.100.000,00	(42.880.000,00)	4,67
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.287.000.000,00	1.287.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	204.000.000,00	183.750.000,00	(20.250.000,00)	90,07
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	357.600.000,00	357.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	229.800.000,00	228.300.000,00	(1.500.000,00)	99,35
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.814.200.000,00	3.665.400.000,00	(148.800.000,00)	96,10
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.296.000.000,00	1.258.350.000,00	(37.650.000,00)	97,09
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.078.240.000,00	1.020.980.000,00	(57.260.000,00)	94,69
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.230.500.000,00	2.187.750.000,00	(42.750.000,00)	98,08
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.643.500.000,00	3.287.523.000,00	(355.977.000,00)	90,23
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.452.000.000,00	1.351.500.000,00	(100.500.000,00)	93,08
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000,00	71.000.000,00	(1.000.000,00)	98,61
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	96.020.000,00	96.020.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	195.000.000,00	194.500.000,00	(500.000,00)	99,74
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	265.000.000,00	261.800.000,00	(3.200.000,00)	98,79
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	216.500.000,00	202.270.000,00	(14.230.000,00)	93,43
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	224.000.000,00	223.920.000,00	(80.000,00)	99,96
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	186.000.000,00	175.000.000,00	(11.000.000,00)	94,09
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	5.628.000,00	(1.572.000,00)	78,17
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.500.000,00	815.600,00	(1.684.400,00)	32,62
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.360.124.491,00	1.252.926.261,00	(107.198.230,00)	92,12
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.836.860.000,00	1.815.250.000,00	(21.610.000,00)	98,82
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.845.090.283,00	1.781.859.457,00	(63.230.826,00)	96,57
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	74.710.000,00	8.102.000,00	(66.608.000,00)	10,84
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	860.575.120,00	522.406.876,00	(338.168.244,00)	60,70
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.081.620.000,00	1.998.571.400,00	(83.048.600,00)	96,01
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	375.000.000,00	231.421.577,00	(143.578.423,00)	61,71
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.721.485.000,00	3.718.905.500,00	(2.580.100,00)	99,93
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.717.252.000,00	3.716.211.900,00	(1.040.100,00)	99,97
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.233.000,00	2.693.000,00	(1.540.000,00)	63,62
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.234.928.000,00	1.169.128.869,00	(65.799.131,00)	94,67
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	239.500.000,00	211.500.000,00	(28.000.000,00)	88,31
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	83.200.000,00	83.000.000,00	(200.000,00)	99,76
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	44.000.000,00	42.000.000,00	(2.000.000,00)	95,45
5.1.02.02.04.0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	38.178.000,00	38.178.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	690.300.000,00	654.700.869,00	(35.599.131,00)	94,84
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.720.050.000,00	2.195.878.000,00	(524.172.000,00)	80,73
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.966.250.000,00	1.443.878.000,00	(522.372.000,00)	73,43
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.331.000,00	21.322.900,00	(8.100,00)	99,96
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	9.427.000,00	9.423.900,00	(3.100,00)	99,97
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	11.904.000,00	11.899.000,00	(5.000,00)	99,96
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.10.0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.128.541.000,00	1.029.450.032,00	(99.090.968,00)	91,22
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	717.541.000,00	629.450.032,00	(88.090.968,00)	87,72
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	71.500.000,00	60.500.000,00	(11.000.000,00)	84,62
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	339.500.000,00	339.500.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.681.044.041,00	15.243.082.039,00	(437.962.002,00)	97,21
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.186.370.700,00	3.941.218.293,00	(245.152.407,00)	94,14
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	170.900.000,00	163.075.000,00	(7.825.000,00)	95,42
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	769.438.000,00	685.640.379,00	(83.797.621,00)	89,11
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.398.743.700,00	2.291.653.708,00	(107.089.992,00)	95,54
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.000.000,00	39.295.000,00	(705.000,00)	98,24
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	224.000.000,00	216.326.700,00	(7.673.300,00)	96,57
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	50.630.000,00	49.250.000,00	(1.380.000,00)	97,27
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	130.694.000,00	99.649.506,00	(31.044.494,00)	76,25
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.465.000,00	8.828.000,00	(5.637.000,00)	61,03
5.1.02.03.02.0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.916.107.341,00	2.726.894.746,00	(189.212.595,00)	93,51
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.516.107.341,00	2.396.966.246,00	(119.141.095,00)	95,26
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00	129.928.500,00	(70.071.500,00)	64,96
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.578.566.000,00	8.574.969.000,00	(3.597.000,00)	99,96
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	5.040.006.000,00	5.039.050.000,00	(956.000,00)	99,98
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	853.560.000,00	853.560.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	1.685.000.000,00	1.685.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	800.000.000,00	797.359.000,00	(2.641.000,00)	99,67
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	49.818.199.061,00	63.663.262.229,00	(6.154.936.832,00)	91,18
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.818.199.061,00	63.663.262.229,00	(6.154.936.832,00)	91,18
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.495.733.461,00	46.811.872.406,00	(2.683.861.055,00)	94,58
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.113.512.600,00	9.785.418.080,00	(1.328.094.520,00)	88,05
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	712.890.000,00	644.640.000,00	(88.250.000,00)	87,96
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.476.063.000,00	6.421.331.743,00	(2.054.731.257,00)	75,76
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.703.220.000,00	5.933.090.000,00	(770.130.000,00)	88,51
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.299.620.000,00	5.529.490.000,00	(770.130.000,00)	87,77
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	37.620.000,00	30.140.000,00	(7.480.000,00)	80,12
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	262.000.000,00	239.500.000,00	(22.500.000,00)	91,41
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.000.000.000,00	5.259.850.000,00	(740.150.000,00)	87,66
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	403.600.000,00	403.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	403.600.000,00	403.600.000,00	0,00	100,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	0,00	100,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	0,00	100,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.580.397.850,00	5.580.397.850,00	0,00	100,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	(88.338.756,00)	98,71
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	(88.338.756,00)	98,71
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.831.579.400,00	6.743.240.644,00	(88.338.756,00)	98,71
5.1.05	Belanja Hibah	30.246.300.000,00	30.188.210.759,00	(58.089.241,00)	99,81
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.020.185.000,00	28.010.143.009,00	(10.039.991,00)	99,96
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.945.185.000,00	27.935.145.009,00	(10.039.991,00)	99,96
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.945.185.000,00	27.935.145.009,00	(10.039.991,00)	99,96
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	240.775.000,00	228.137.500,00	(12.637.500,00)	94,75
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	240.775.000,00	228.137.500,00	(12.637.500,00)	94,75
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	240.775.000,00	228.137.500,00	(12.637.500,00)	94,75
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.985.340.000,00	1.949.928.250,00	(35.411.750,00)	98,22
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	0,00	100,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.328.670.000,00	1.328.670.000,00	0,00	100,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	656.670.000,00	621.258.250,00	(35.411.750,00)	94,61
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	656.670.000,00	621.258.250,00	(35.411.750,00)	94,61
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.303.619.840,00	4.297.021.000,00	(6.598.840,00)	99,85
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.275.000.000,00	1.270.000.000,00	(5.000.000,00)	99,61
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.275.000.000,00	1.270.000.000,00	(5.000.000,00)	99,61
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.275.000.000,00	1.270.000.000,00	(5.000.000,00)	99,61
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.028.619.840,00	3.027.021.000,00	(1.598.840,00)	99,95
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.528.619.840,00	2.527.021.000,00	(1.598.840,00)	99,94
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.528.619.840,00	2.527.021.000,00	(1.598.840,00)	99,94
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**389.285.857.499,00**	**368.675.973.509,00**	**(20.609.883.990,00)**	**94,71**
5.2	**BELANJA MODAL**	**212.468.226.590,00**	**202.033.467.599,00**	**(10.434.758.991,00)**	**95,09**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	(224.607.400,00)	88,73
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	(224.607.400,00)	88,73
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.993.537.400,00	1.768.930.000,00	(224.607.400,00)	88,73
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.545.800.000,00	1.325.017.000,00	(220.783.000,00)	85,72
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	447.737.400,00	443.913.000,00	(3.824.400,00)	99,15
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.426.116.413,00	33.676.841.899,00	(749.274.514,00)	97,82
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.657.408.371,00	3.645.226.985,00	(12.181.586,00)	99,67
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.613.408.371,00	3.601.226.985,00	(12.181.586,00)	99,66
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	587.158.571,00	583.426.985,00	(3.731.586,00)	99,36
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.813.750.000,00	2.807.800.000,00	(5.950.000,00)	99,79
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	212.500.000,00	210.000.000,00	(2.500.000,00)	98,82
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.435.064.000,00	6.186.150.000,00	(248.914.000,00)	96,13
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.435.064.000,00	6.186.150.000,00	(248.914.000,00)	96,13
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.503.327.000,00	3.354.700.000,00	(148.627.000,00)	95,76
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	370.000.000,00	369.500.000,00	(500.000,00)	99,86
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.187.248.000,00	1.136.950.000,00	(50.298.000,00)	95,76
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.248.489.000,00	1.199.000.000,00	(49.489.000,00)	96,04
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	351.075.000,00	350.715.125,00	(359.875,00)	99,90
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	30.375.000,00	30.303.000,00	(72.000,00)	99,76
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	30.375.000,00	30.303.000,00	(72.000,00)	99,76
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	105.000.000,00	104.992.125,00	(7.875,00)	99,99
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	105.000.000,00	104.992.125,00	(7.875,00)	99,99
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	215.700.000,00	215.420.000,00	(280.000,00)	99,87
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	215.700.000,00	215.420.000,00	(280.000,00)	99,87
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.666.273.628,00	5.391.956.867,00	(274.316.761,00)	95,16
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	61.194.150,00	60.703.000,00	(491.150,00)	99,20
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.194.150,00	60.703.000,00	(491.150,00)	99,20
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.707.484.880,00	4.455.639.697,00	(251.845.183,00)	94,65
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.069.664.670,00	2.839.632.036,00	(230.032.634,00)	92,51
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	18.903.100,00	18.902.500,00	(600,00)	100,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	745.692.260,00	724.852.400,00	(20.839.860,00)	97,21
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	128.000.000,00	127.827.400,00	(172.600,00)	99,87
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	534.520.000,00	533.726.361,00	(793.639,00)	99,85
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	210.704.850,00	210.699.000,00	(5.850,00)	100,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	897.594.598,00	875.614.170,00	(21.980.428,00)	97,55
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	65.946.693,00	65.768.000,00	(178.693,00)	99,73
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	78.300.000,00	78.269.931,00	(30.069,00)	99,96
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	179.506.625,00	176.453.027,00	(3.053.598,00)	98,30
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	215.152.000,00	215.077.372,00	(74.628,00)	99,97
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	234.367.780,00	215.805.840,00	(18.561.940,00)	92,08
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	124.321.500,00	124.240.000,00	(81.500,00)	99,93
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	373.797.250,00	357.876.000,00	(15.921.250,00)	95,74
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	348.197.250,00	332.612.000,00	(15.585.250,00)	95,52

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	197.102.320,00	196.755.500,00	(346.820,00)	99,82
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	151.094.930,00	135.856.500,00	(15.238.430,00)	89,91
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.000.000,00	2.664.000,00	(336.000,00)	88,80
5.2.02.06.03.0028	Belanja Modal Peralatan Penerima	3.000.000,00	2.664.000,00	(336.000,00)	88,80
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.769.739.664,00	7.698.727.732,00	(71.051.932,00)	99,09
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.494.556.876,00	7.423.982.732,00	(70.574.144,00)	99,06
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	900.616.000,00	900.000.000,00	(616.000,00)	99,93
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.179.807.200,00	2.179.807.200,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	872.760.000,00	869.921.032,00	(2.838.968,00)	99,67
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	2.467.654.176,00	2.400.535.000,00	(67.119.176,00)	97,28
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.063.719.500,00	1.063.719.500,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	275.222.788,00	274.745.000,00	(477.788,00)	99,83
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	275.222.788,00	274.745.000,00	(477.788,00)	99,83
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.837.831.980,00	3.798.810.660,00	(39.021.320,00)	98,98
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	83.248.300,00	80.512.980,00	(2.735.320,00)	96,71
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	83.248.300,00	80.512.980,00	(2.735.320,00)	96,71
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.610.124.800,00	3.588.948.000,00	(21.176.000,00)	99,41
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	1.191.500.000,00	1.190.520.000,00	(980.000,00)	99,92
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang StudiAgama	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan	2.031.906.000,00	2.012.135.000,00	(19.771.000,00)	99,03
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	386.718.000,00	386.293.000,00	(425.000,00)	99,89
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	124.459.680,00	109.349.680,00	(15.110.000,00)	87,86
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	124.459.680,00	109.349.680,00	(15.110.000,00)	87,86
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.269.194.470,00	3.214.549.280,00	(54.645.190,00)	98,33
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.175.732.870,00	3.121.190.280,00	(54.542.590,00)	98,28
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	500.000.000,00	499.800.000,00	(200.000,00)	99,96
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.138.626.700,00	1.135.332.000,00	(3.294.700,00)	99,71
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.537.106.170,00	1.486.058.280,00	(51.047.890,00)	96,68
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	93.461.600,00	93.359.000,00	(102.600,00)	99,89
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.461.600,00	14.459.000,00	(2.600,00)	99,98
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	19.000.000,00	18.900.000,00	(100.000,00)	99,47
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.263.464.500,00	1.260.443.000,00	(3.021.500,00)	99,76
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	95.000.000,00	92.000.000,00	(3.000.000,00)	96,84
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	95.000.000,00	92.000.000,00	(3.000.000,00)	96,84
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	1.168.464.500,00	1.168.443.000,00	(21.500,00)	100,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	1.168.464.500,00	1.168.443.000,00	(21.500,00)	100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	383.177.600,00	380.669.000,00	(2.508.600,00)	99,35
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	383.177.600,00	380.669.000,00	(2.508.600,00)	99,35
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	83.177.600,00	83.100.000,00	(77.600,00)	99,91
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	300.000.000,00	297.569.000,00	(2.431.000,00)	99,19
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	555.732.500,00	528.400.000,00	(27.332.500,00)	95,08
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	555.732.500,00	528.400.000,00	(27.332.500,00)	95,08
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	555.732.500,00	528.400.000,00	(27.332.500,00)	95,08
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	863.317.250,00	863.317.250,00	0,00	100,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	863.317.250,00	863.317.250,00	0,00	100,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	863.317.250,00	863.317.250,00	0,00	100,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.827.899.937,00	92.894.711.664,00	(4.933.188.273,00)	94,95
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	91.557.352.437,00	86.766.174.039,00	(4.791.178.398,00)	94,77
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.177.312.437,00	84.464.295.439,00	(4.713.016.998,00)	94,72
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.825.106.348,00	8.634.522.390,00	(190.583.958,00)	97,84
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	13.217.000,00	0,00	(13.217.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	4.060.000,00	0,00	(4.060.000,00)	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	36.647.823.402,00	33.080.461.456,00	(3.567.361.946,00)	90,27
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20.688.994.150,00	20.626.338.629,00	(62.655.521,00)	99,70
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.789.689.387,00	12.402.305.464,00	(387.383.923,00)	96,97
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	400.000.000,00	399.300.000,00	(700.000,00)	99,83
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Perokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00	194.277.000,00	(5.723.000,00)	97,14
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	146.134.150,00	127.980.000,00	(18.154.150,00)	87,58
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00	199.525.000,00	(475.000,00)	99,76
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.630.360.500,00	2.574.465.000,00	(55.895.500,00)	97,87
5.2.03.01.01.0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.198.895.000,00	1.142.424.000,00	(56.471.000,00)	95,29
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	3.912.815.000,00	3.840.859.000,00	(71.956.000,00)	98,16
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	95.195.000,00	(4.805.000,00)	95,20
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	600.000.000,00	526.650.000,00	(73.350.000,00)	87,78
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	620.625.000,00	420.400.000,00	(200.225.000,00)	67,74
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.592.500,00	9.592.500,00	0,00	100,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.380.040.000,00	2.301.878.600,00	(78.161.400,00)	96,72
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	28.000.000,00	27.800.000,00	(200.000,00)	99,29
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	2.352.040.000,00	2.274.078.600,00	(77.961.400,00)	96,69
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.270.547.500,00	6.128.537.625,00	(142.009.875,00)	97,74
5.2.03.04.01	Belnaja Modal Tugu/Tanda Batas	6.270.547.500,00	6.128.537.625,00	(142.009.875,00)	97,74
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.225.047.500,00	6.083.037.625,00	(142.009.875,00)	97,72
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.600.987.940,00	61.587.257.321,00	(4.013.730.619,00)	93,88
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	29.330.223.700,00	28.496.514.475,00	(833.709.225,00)	97,16
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	20.524.577.800,00	20.088.144.315,00	(436.433.485,00)	97,87
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	17.880.314.550,00	17.496.326.335,00	(383.988.215,00)	97,85
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	2.552.669.650,00	2.525.457.980,00	(27.211.670,00)	98,93
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	91.593.600,00	66.360.000,00	(25.233.600,00)	72,45
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.805.645.900,00	8.408.370.160,00	(397.275.740,00)	95,49
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.441.400.000,00	8.358.415.710,00	(82.984.290,00)	99,02
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	356.753.900,00	49.954.450,00	(306.799.450,00)	14,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	7.492.000,00	0,00	(7.492.000,00)	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.438.531.990,00	12.362.224.460,00	(2.076.307.530,00)	85,62

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.488.139.500,00	1.464.207.447,00	(23.932.053,00)	98,39
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.079.667.600,00	1.055.740.547,00	(23.927.053,00)	97,78
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	83.471.900,00	83.466.900,00	(5.000,00)	99,99
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.166.776.480,00	4.205.108.513,00	(1.961.667.967,00)	68,19
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.967.054.650,00	4.005.508.513,00	(1.961.546.137,00)	67,13
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	199.721.830,00	199.600.000,00	(121.830,00)	99,94
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	19.216.000,00	0,00	(19.216.000,00)	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.216.000,00	0,00	(19.216.000,00)	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.764.480.010,00	6.692.908.500,00	(71.491.510,00)	98,94
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	6.722.000.000,00	6.672.933.000,00	(49.067.000,00)	99,27
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	19.975.500,00	19.975.500,00	0,00	100,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	22.424.510,00	0,00	(22.424.510,00)	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	18.661.515.100,00	17.721.319.986,00	(948.195.114,00)	94,96
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.607.364.000,00	8.847.039.486,00	(760.324.514,00)	92,09
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	154.741.000,00	146.899.450,00	(7.841.550,00)	94,93
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.452.023.000,00	8.700.140.036,00	(751.882.964,00)	92,05
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.138.435.500,00	4.130.650.500,00	(7.785.000,00)	99,81
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	4.138.435.500,00	4.130.650.500,00	(7.785.000,00)	99,81
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	187.536.100,00	187.530.000,00	(6.100,00)	100,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	187.536.100,00	187.530.000,00	(6.100,00)	100,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.488.179.500,00	4.486.100.000,00	(2.079.500,00)	99,95
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	602.054.500,00	602.000.000,00	(54.500,00)	99,99
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	3.492.000.000,00	3.490.000.000,00	(2.000.000,00)	99,94
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	394.125.000,00	394.100.000,00	(25.000,00)	99,99
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	0,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.170.717.150,00	3.007.198.400,00	(163.518.750,00)	94,84
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	720.800.000,00	715.540.000,00	(4.460.000,00)	99,38
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	720.000.000,00	715.540.000,00	(4.460.000,00)	99,38
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.450.717.150,00	2.291.658.400,00	(159.058.750,00)	93,51

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.450.717.150,00	2.291.658.400,00	(159.058.750,00)	93,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.565.834.900,00	4.559.190.025,00	(6.644.875,00)	99,85
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.082.510.000,00	4.075.865.125,00	(6.644.875,00)	99,84
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.082.510.000,00	4.075.865.125,00	(6.644.875,00)	99,84
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.282.510.000,00	2.278.893.000,00	(3.617.000,00)	99,84
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.800.000.000,00	1.796.972.125,00	(3.027.875,00)	99,83
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Berconak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Berconak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.324.900,00	483.324.900,00	0,00	100,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.324.900,00	483.324.900,00	0,00	100,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	483.324.900,00	483.324.900,00	0,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	(507.313.310,00)	93,70
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	(507.313.310,00)	93,70
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	(507.313.310,00)	93,70
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	8.053.850.000,00	7.546.536.690,00	(507.313.310,00)	93,70
	JUMLAH BELANJA MODAL	**212.468.226.590,00**	**202.033.467.599,00**	**(10.434.758.991,00)**	**95,09**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.500.000.000,00**	**991.052.110,00**	**(508.947.890,00)**	**66,07**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	991.052.110,00	(508.947.890,00)	66,07

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.500.000.000,00**	**991.052.110,00**	**(508.947.890,00)**	**66,07**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**103.116.811.300,00**	**102.702.242.900,00**	**(414.568.400,00)**	**99,60**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,60
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,60
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.116.811.300,00	102.702.242.900,00	(414.568.400,00)	99,60
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	65.912.626.000,00	65.912.626.000,00	0,00	100,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	37.204.185.300,00	36.789.616.900,00	(414.568.400,00)	98,89
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**103.116.811.300,00**	**102.702.242.900,00**	**(414.568.400,00)**	**99,60**
	JUMLAH BELANJA	**706.370.894.589,00**	**674.402.736.118,00**	**(31.968.158.871,00)**	**95,47**
	SURPLUS/DEFISIT	**(59.884.731.412,00)**	**(30.817.691.242,00)**	**29.067.040.170,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100.052,00**	**100,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100.052,00**	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.884.731.412,00	59.884.831.464,00	100.052,00	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	592.312.122,00	592.312.122,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	592.312.122,00	592.312.122,00	0,00	100,00
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	592.312.122,00	592.312.122,00	0,00	100,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	14.495.735.464,00	14.495.735.464,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	14.495.735.464,00	14.495.735.464,00	0,00	100,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	14.495.735.464,00	14.495.735.464,00	0,00	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	44.796.683.826,00	44.796.683.826,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	31.194.136.200,00	31.194.136.200,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	13.095.679.544,00	13.095.679.544,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	3.175.134.473,00	3.175.134.473,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	401.172.330,00	401.172.330,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	316.040.410,00	316.040.410,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	22.305.934,00	22.305.934,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	947.250,00	947.250,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	1.841.732.664,00	1.841.732.664,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	3.791.242.786,00	3.791.242.786,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	442.046.213,00	442.046.213,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	3.172.534.376,00	3.172.534.376,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.832.618.220,00	4.832.618.220,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	101.890.000,00	101.890.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.992.547.626,00	10.992.547.626,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	3.684.874.360,00	3.684.874.360,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	252.010.855,00	252.010.855,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	306.907.053,00	306.907.053,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.434.000,00	6.434.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	94.436.399,00	94.436.399,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	546.955,00	546.955,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	694.359.328,00	694.359.328,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	36.991.518,00	36.991.518,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	111.133.805,00	111.133.805,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	67.500,00	67.500,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	49.342.500,00	49.342.500,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.394.185.946,00	1.394.185.946,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	235.754.765,00	235.754.765,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	3.352.500.925,00	3.352.500.925,00	0,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	(%)
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	228.260.660,00	228.260.660,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	260.207.152,00	260.207.152,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	48.129.770,00	48.129.770,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	4.226.945,00	4.226.945,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	141.785,00	141.785,00	0,00	100,00
6.1.01.05.02.0043	Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	217.460.405,00	217.460.405,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.610.000.000,00	2.610.000.000,00	0,00	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	100.052,00	100.052,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100.052,00**	**100,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.884.731.412,00**	**59.884.831.464,00**	**100.052,00**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**29.067.140.222,00**	**29.067.140.222,00**	**0,00**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (%)
I	**BELANJA OPERASI**	**1.357.452.050,00**	-	**926.491.294,00**	
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat	1.357.452.050,00		926.491.294,00	
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	
II	**BELANJA MODAL**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00%**
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00			
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00			
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00			
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00			
II.5	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%
	Total (1 + 2)	**1.857.452.050,00**	**500.000.000,00**	**1.426.491.294,00**	**285,30%**

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
				(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.	1.952.593.444,00	823.494.619,80	42,17%
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	67.483.826,00	0,00	0,00%
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	61.825.500,00	0,00	0,00%
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	93.190.900,00	92.840.000,00	98,88%
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	1.153.812.500,00	1.139.687.000,00	98,78%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	48.640.000,00	48.640.000,00	100,00%
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	4.538.898.000,00	153.829.000,00	3,39%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	2.434.736.155,00	2.294.949.220,00	94,26%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	2.242.176.712,00	2.142.244.773,00	95,54%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	942.615.910,00	931.060.800,00	98,78%
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	126.259.360,00	126.139.000,00	99,90%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	133.115.000,00	132.870.000,00	99,82%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00%
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	127.149.324,00	127.149.324,00	100,00%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	58.939.600,00	58.939.600,00	100,00%
				13.998.936.691,00	**8.081.451.736,00**	**57,74%**
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.705.435.500,00	4.695.195.500,00	99,78%
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	2.297.944.754,00	2.218.885.402,00	96,56%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata	37.684.903,00	36.258.600,00	96,22%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelembagaan	Dinas Pariwisata	1.258.173.500,00	1.196.410.000,00	95,09%
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pariwisata	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00%
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	268.072.210,00	267.573.900,00	99,81%
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	292.889.800,00	292.549.800,00	99,82%
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata	130.600.000,00	130.400.000,00	99,85%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	146.460.200,00	145.660.200,00	99,45%
				9.677.269.867,00	**9.532.733.411,00**	**98,40%**
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Program Penanganan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	44.225.827.489,00	44.225.827.489,00	100,00%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.021.214.074,00	2.919.265.275,00	96,63%
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.362.858.200,00	1.325.695.580,00	97,27%

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.170.255.000,00	1.168.030.385,00	99,81%
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.348.000.000,00	2.322.190.800,00	98,90%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.104.594.458,00	60.104.594.458,00	100,00%
				112.252.749.221,00	**112.065.603.987,00**	**99,85%**
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.243.671.374,00	24.243.671.374,00	100,00%
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	525.238.280,00	460.738.280,00	88,06%
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.201.712.840,00	2.967.995.840,00	92,70%
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.352.403.160,00	1.345.914.800,00	99,52%
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.201.712.840,00	2.967.995.840,00	92,70%
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	406.973.525,00	374.978.520,00	92,14%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penerintahan Desa	Kecamatan Wawonii Utara	13.040.500,00	13.040.500,00	100,00%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penerintahan Desa	Kecamatan Wawonii Timur	8.000.990,00	7.895.000,00	98,68%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penerintahan Desa	Kecamatan Wawonii Tenggara	15.200.000,00	14.200.000,00	93,42%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penerintahan Desa	Kecamatan Wawonii Tengah	13.000.000,00	12.985.000,00	99,88%
				33.178.953.429,00	**32.689.415.074,00**	**98,28%**
5.	Mengerikan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	27047217412	27003915824	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.201.810.461,00	955.691.990,00	79,52%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	2372195760	2246576491	94,70%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	13.599.476.347,00	12.549.958.799,00	92,28%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.951.303.750,00	4.987.201.035,00	71,74%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.658.268.000,00	11.899.120.843,00	94,00%
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	387.536.100,00	385.799.000,00	99,55%
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.825.059.800,00	34.023.065.765,00	97,70%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.396.245.892,00	4.398.245.892,00	100,00%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.456.283.086,00	2.102.182.132,00	85,58%
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.887.120,00	96.016.360,00	99,93%
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.125.546.745,00	2.124.915.462,00	99,97%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.182.828.030,00	3.020.327.400,00	94,92%
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.364.291.910,00	2.139.674.510,00	90,50%
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	108.157.360,00	108.157.360,00	100,00%
				114.271.507.793,00	**109.438.848.863,00**	**95,77%**

No.	Prioritas Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
				(Rp)	(Rp)	(%)
6.	Memhangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Program Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	1.460.685.330,00	567.399.460,00	38,85%
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	80.684.500,00	0,00	0,00%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PplH)	Dinas Lingkungan Hidup	12.136.500,00	0,00	0,00%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.392,00	0,00	0,00%
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	235.411.960,00	45.000.000,00	19,12%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup	394.039.850,00	84.000.000,00	21,32%
				2.382.798.532,00	**696.399.460,00**	**29,23%**
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	497.630.000	477.668.294	95,99%
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	493.203.680	493.040.428	99,97%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	350.189.769	348.493.700	99,52%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	27.370.276.701	26.250.308.908	95,91%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Utara	38.710.000	16.210.000	41,88%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Timur Laut	15.175.000	12.330.000	81,25%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Timur	6.000.000	5.850.000	97,50%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Tenggara	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Selatan	15.625.000,00	15.625.000,00	100,00%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Wawonii Tengah	15.625.000,00	15.625.000,00	100,00%
				28.819.835.150,00	**27.652.551.330,00**	**95,95%**
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD				**314.554.841.003,00**	**300.067.093.861,00**	**95,39%**

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REALISASI BELANJA DAERAH SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.113.600.997	45.113.894.879	91,22
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.332.985.180	1.345.914.000	99,32
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.632.000	180.830.000	49,55
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.281.712.000	2.867.900.000	82,70
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	525.126.200	466.750.000	88,89
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.432.000	0	-
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	468.970.205	374.976.520	92,14
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	58.948.343.436	96.134.172.450	91,29
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.201.930.461	668.691.990	79,32
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	104.162.200	182.295.000	99,14
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	70.000.000	70.000.000	100,00
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	700.000.000	700.000.000	99,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	178.700.000	177.000.000	99,24
		Program Pelestarian Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.259.750.445	4.259.511.022	99,65
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	329.750.450	327.731.760	97,68
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.007.202.164	7.214.613.000	90,10
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan Umum	229.232.000	213.587.610	93,17
		Program pemberdayaan dan Pemberantasan	Bagian Pemberantasan	206.934.000	201.077.000	97,17
		Program Penyelahan Pelayanan	Dinas Perumkim	2.139.950.000	2.118.362.950	99,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.705.435.000	6.695.105.500	99,78
		Program Penyelenggaraan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.544.000.000	2.016.000.000	80,37
		Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.871.134.550	6.789.995.000	98,82
		Program pemukiman Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	27.849.207.000	27.645.581.829	99,27
		Program pemukiman Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	300.000.000	180.000.000	300,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34.825.050.000	34.033.065.765	97,70
		Program Pengembangan Air Konservasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	162.875.500	140.000.000	85,42
		Program Penyelenggaraan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.544.000.000	2.016.000.000	80,37
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.799.656.500	2.727.997.800	97,69
		Program Pengelolaan Pelayanan	Dinas Perhubungan	3.705.713.000	3.575.416.000	96,54

No.	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Penguatan Modelpi Pemerolh Dan Kualitas Kebijakan	Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.047.582.781	68.462.220	6,85
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Alcidai Pendidikan Politik dan Pengembangan Dalam Seni Budaya Politik	Kesatuan Bangsa Dan Politik	26.517.407.464	7.319.006.464	27,60
		Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa Dan Politik	55.749.000	4.088.860	7,44
		Program pemblasan Dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa Dan Politik	159.575.000	0	-
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Pencegahan Konflik dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa Dan Politik	57.080.000	11.448.000	20,06
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.311.766.921	491.644.800	21,27
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	519.600.000	0	-
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	2.586.810.000	551.890.000	8,72
		Program Penunaian Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah	663.495.000	0	-
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	6.501.838.159	1.282.390.320	19,72
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah	1.814.234.800	193.980.000	10,69
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah	1.489.712.800	126.050.000	8,52
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.362.598.289	276.229.100	20,12
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.178.255.008,00	207.889.225	17,76
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	888.080.000	81.500.000	9,08
		Program Pembinaan Pelaksanaan Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	15.334.603.044	5.095.190.271	32,97
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	2.243.176.712	7.800.800	0,35
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	902.615.910	15.700.800	1,67
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	126.299.360	7.525.000	5,59
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan	133.135.000	0	-
		program Penyelasan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	792.674.870	781.166.310	98,55
		Program Penyuluhan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	4.308.550.098	4.251.138.193	98,66
		Program Pangelahan Pertanian	Dinas Pertanian	5.125.936.598	2.138.362.916	41,77
		Program Penegakan, Penanggulangan, Pencegahan dan Pengalamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	1.340.511.190	1.338.827.870	99,87
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	67.483.800	66.732.000	98,89
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	61.025.800	60.871.800	98,12
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	93.800.800	92.840.000	98,50
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	550.199.928	281.987.852	51,25
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.889.451.716	1.708.379.525	90,44
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	1.229.365.900	1.103.824.190	89,79
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	1.253.763.758	1.224.446.788	97,72
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian	86.928.800	71.733.800	82,79

No.	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunfo Statistik dan Persandian	114.888.844	22.280.000	19,43
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.807.139	96.016.360	99,93
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.125.546.745	2.124.515.492	
				287.197.702.519	223.999.857.004	77,97
				287.197.702.519		
7	Perwujudan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	416.128.845	415.687.897	99,90
		Program Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.281.215	19.071.000	92,80
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	455.500.098	455.084.080	99,91
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	667.500.098	662.575.080	99,26
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115.000.000	115.000.000	100,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	165.000.098	165.000.000	100,00
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	157.780.000	157.708.000	100,00
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	942.922.000	861.700.000	90,82
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.889.499.000	2.834.455.000	97,75
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.234.808.890	1.228.808.000	100,00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	67.005.856	66.702.800	99,55
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	61.825.908	59.871.000	96,84
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	85.890.900	85.840.000	99,95
		Program Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.281.215	18.971.000	93,54
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.040.080	18.921.160	99,38
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.000.080	45.000.000	100,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.041.884	121.346.204	98,98
		Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	555.000.000	554.000.500	99,94
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	37.650.000	37.600.000	100,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelembagaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.258.173.080	1.198.473.000	95,08
		Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	250.000.080	250.000.000	100,00
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	395.889.000	395.889.000	100,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif/Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	130.460.000	130.460.000	100,00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	144.460.000	144.460.000	100,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	790.874.870	781.166.210	98,77
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	327.707.070	327.259.000	99,86
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	1.589.813.000	1.589.687.000	99,71
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	48.640.000	48.640.000	100,00
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.	4.525.788.652	4.446.846.469	98,26
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Ekonomi dan SDA	215.777.077	2.600.000	1,20
		Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		3.054.200.170,00	3.020.217.900	
				28.275.308.170	19.716.499.519	97,25
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	778.251.708	734.488.000	94,38
		Program Pendidikan Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	460.283.888	455.080.428	98,87

No.	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Penertiban Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	244.275.820	244.224.550	99,98
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	268.189.760	248.400.700	99,63
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	338.199.920	201.350.852	85,39
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.899.451.716	1.708.379.325	89,94
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunik, Statistik dan Persandian	1.299.480.000	1.208.804.100	89,68
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunik, Statistik dan Persandian	1.208.763.728	1.206.548.788	99,72
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunik, Statistik dan Persandian	86.620.000	71.711.000	82,79
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunik, Statistik dan Persandian	23.240.000	22.200.000	95,47
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan Umum	329.232.000	313.507.610	95,22
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	217.583.500	217.360.000,00	99,90
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.311.798.825	1.804.124.900	78,04
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	319.600.000	319.600.000	100,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Utara			
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Timur Laut	15.175.000	12.350.000	81,39
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Timur	6.000.000	5.850.000	97,50
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Tenggara	17.400.000	17.400.000	100,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Selatan	15.625.000	15.625.000	100,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Waiwadi Tengah	13.000.000	13.000.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Barat	71.000.000	71.000.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Lengora Lore	188.000.000	188.000.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Utara	42.964.000	42.964.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Lendowo	221.290.000	221.290.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Timur Laut	46.227.000	46.227.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Lafilewa	215.900.000	211.992.900	98,19
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Timur	71.978.500	71.978.500	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Mataw	214.383.000	214.383.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Tenggara	37.899.000	37.030.000	97,71
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kelurahan Polewa	211.977.000	209.377.000	98,77
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Selatan	50.000.000	50.000.000	100,00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Waiwadi Tengah	23.828.500	23.828.000	99,99
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Utara	5.000.000	4.475.000	89,50
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Timur Laut	11.905.000	11.905.000	100,00
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Timur	5.600.000	5.550.000	99,11
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Tenggara	17.119.500	16.494.500	96,35
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Selatan	11.970.000	11.970.000	100,00
		Program Koordinasi Kegiatanan Dan Kegiatan Umum	Kecamatan Waiwadi Tengah	9.299.575	9.290.000	99,90
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Waiwadi Timur Laut	19.063.000	18.517.000	97,14
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Waiwadi Timur	28.190.000	28.190.000	100,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Waiwadi Tenggara	11.000.000	6.948.000	63,16
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Waiwadi Selatan	18.012.200	18.012.200	100,00

No.	Prioritas Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa	Kecamatan Wawonii Utara	15.040.500	15.040.500	100,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa	Kecamatan Wawonii Timur	8.000.500	7.899.000	98,68
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa	Kecamatan Wawonii Tenggara	15.250.000	14.200.000	93,12
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa	Kecamatan Wawonii Tengah	15.156.257	12.993.000	85,72
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik	37.000.000	37.000.000	100,00
				11.577.846.225	10.733.695.984	92,71
	Perkembangan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berorientasi Pembangunan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.501.385.750	4.807.201.025	73,94
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.695.285.000	11.899.120.943	94,00
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	495.036.100	383.709.000	77,54
		Program Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	168.192.320	108.167.360	45,09
				30.273.380.170	17.380.278.358	85,73
				30.273.380.170		
JUMLAH				339.331.540.124	271.385.578.775	80,09

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

SIHAQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH PENURUNAN *STUNTING* TAHUN ANGGARN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**25.515.000,00**	**25.515.000,00**	**100,00%**
	1 **Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**25.515.000,00**	**25.515.000,00**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**25.515.000,00**	**25.515.000,00**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	25.515.000,00	25.515.000,00	100,00%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**16.579.688.900,00**	**15.185.417.567,00**	**91,59%**
	1 **Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)**	**90.300.000,00**	**63.900.000,00**	**70,76%**
	Belanja Operasi	**90.300.000,00**	**63.900.000,00**	**70,76%**
	Belanja Barang dan Jasa	90.300.000,00	63.900.000,00	70,76%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	2 **Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**2.229.114.880,00**	**2.099.988.632,00**	**94,21%**
	Belanja Operasi	**2.229.114.880,00**	**2.099.988.632,00**	**94,21%**
	Belanja Barang dan Jasa	2.229.114.880,00	2.099.988.632,00	94,21%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	3 **Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**	**7.769.063.282,00**	**7.281.734.435,00**	**93,73%**
	Belanja Operasi	**7.677.032.822,00**	**7.234.577.535,00**	**94,24%**
	Belanja Barang dan Jasa	7.677.032.822,00	7.234.577.535,00	94,24%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	Belanja Modal	**92.030.460,00**	**47.156.900,00**	**51,24%**
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	92.030.460,00	47.156.900,00	51,24%
	4 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**	**101.780.000,00**	**96.410.000,00**	**94,72%**
	Belanja Operasi	**101.780.000,00**	**96.410.000,00**	**94,72%**
	Belanja Barang dan Jasa	101.780.000,00	96.410.000,00	94,72%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
	Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	5 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**91.660.000,00**	**64.167.000,00**	**70,01%**
	Belanja Operasi	**91.660.000,00**	**64.167.000,00**	**70,01%**
	Belanja Barang dan Jasa	91.660.000,00	64.167.000,00	70,01%
	Belanja Hibah	0,00	0,00	
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	

No.		Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Modal	-	-	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin			
	6	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	**2.783.951.738,00**	**2.643.571.500,00**	**95,68%**
		Belanja Operasi	**2.448.516.000,00**	**2.328.471.500,00**	**95,10%**
		Belanja Barang dan Jasa	2.448.516.000,00	2.328.471.500,00	95,10%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**335435738,00**	**335100000,00**	**99,90%**
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	335.435.738,00	335.100.000,00	**99,90%**
	7	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**347.760.000,00**	**332.100.000,00**	**95,50%**
		Belanja Operasi	**347.760.000,00**	**332.100.000,00**	**95,50%**
		Belanja Barang dan Jasa	347.760.000,00	332.100.000,00	95,50%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	8	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	**807.999.000,00**	**436.895.000,00**	**54,07%**
		Belanja Operasi	**807.999.000,00**	**436.895.000,00**	**54,07%**
		Belanja Barang dan Jasa	807.999.000,00	436.895.000,00	54,07%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	9	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**631.560.000,00**	**609.040.000,00**	**96,43%**
		Belanja Operasi	**631.560.000,00**	**609.040.000,00**	**96,43%**
		Belanja Barang dan Jasa	631.560.000,00	609.040.000,00	96,43%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	10	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**67.110.000,00**	**67.060.000,00**	**99,93%**
		Belanja Operasi	**67.110.000,00**	**67.060.000,00**	**99,93%**
		Belanja Barang dan Jasa	67.110.000,00	67.060.000,00	99,93%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	11	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi**	**146.400.000,00**	**146.250.000,00**	**99,90%**
		Belanja Operasi	**146.400.000,00**	**146.250.000,00**	**99,90%**
		Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	146.250.000,00	99,90%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	-	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	12	**Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**	**370.334.000,00**	**198.841.000,00**	**53,69%**
		Belanja Operasi	**370.334.000,00**	**198.841.000,00**	
		Belanja Barang dan Jasa	370.334.000,00	198.841.000,00	
		Belanja Hibah	0,00	0,00	

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin		0,00	
	13	**Pengelolaan Surveilans Kesehatan**	**514.799.000,00**	**503.498.800,00**	**97,80%**
		Belanja Operasi	**514.799.000,00**	**503.498.800,00**	
		Belanja Barang dan Jasa	514.799.000,00	503.498.800,00	
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	14	**Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak**	**627.849.000,00**	**621.962.800,00**	**99,06%**
		Belanja Operasi	**627.849.000,00**	**621.962.800,00**	
		Belanja Barang dan Jasa	627.849.000,00	621.962.800,00	
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**5.036.000.000,00**	**5.031.225.000,00**	**99,91%**
	1	**Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar**	**5.036.000.000,00**	**5.031.225.000,00**	**99,91%**
		Belanja Operasi	**5.036.000.000,00**	**5.031.225.000,00**	**99,91%**
		Belanja Barang dan Jasa	5.036.000.000,00	5.031.225.000,00	99,91%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
4	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**140.510.000,00**	**101.640.000,00**	**72,34%**
	1	**Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**140.510.000,00**	**101.640.000,00**	**72,34%**
		Belanja Operasi	**140.510.000,00**	**101.640.000,00**	**72,34%**
		Belanja Barang dan Jasa	140.510.000,00	101.640.000,00	72,34%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**78.647.300,00**	**77.777.000,00**	**98,89%**
	1	**Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	**78.647.300,00**	**77.777.000,00**	**98,89%**
		Belanja Operasi	**78.647.300,00**	**77.777.000,00**	**98,89%**
		Belanja Barang dan Jasa	78.647.300,00	77.777.000,00	98,89%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	

No.	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
6	Penetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		443.133.855,00	439.812.000,00	99,25%
	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	443.133.855,00	439.812.000,00	99,25%
		Belanja Operasi	178.476.000,00	178.012.000,00	99,74%
		Belanja Barang dan Jasa	178.476.000,00	178.012.000,00	99,74%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	264.657.855,00	261.800.000,00	98,92%
		Belanja Gedung dan Bangunan			
		Belanja Peralatan dan Mesin	264.657.855,00	261.800.000,00	98,92%
7	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		4.850.800,00	-	0,00%
	1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4.850.800,00	-	0,00%
		Belanja Operasi	4.850.800,00	-	0,00%
		Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	-	0,00%
		Belanja Hibah	0,00	0,00	
		Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
		Belanja Modal	0,00	0,00	
		Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
		Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
	Total Belanja Stunting		22.307.537.055,00	20.861.386.567,00	93,52%

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00%**
	1 **Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**15.000.000,00**	**14.800.000,00**	**98,20%**
	1 **Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	2 **Pemberian Layanan Rujukan**	**10.000.000**	**9.880.000**	**98,80%**
	Belanja Operasi	**10.000.000**	**9.880.000**	**98,80%**
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.880.000	98,80%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
3	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bekas Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**15.000.000**	**14.209.500**	**94,73%**
	1 **Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	2 **Pemberian Layanan Rujukan**	**10.000.000**	**9.209.500**	**92,10%**
	Belanja Operasi	**10.000.000**	**9.209.500**	**92,10%**
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.209.500	92,10%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
4	**Pemulihaan Anakvanak Terlantar**	**15.185.000**	**14.835.000**	**97,70%**
	1 **Penjangkauan Anak-Anak Terlantar**	**15.185.000**	**14.835.000**	**97,70%**
	Belanja Operasi	**15.185.000**	**14.835.000**	**97,70%**
	Belanja Barang dan Jasa	15.185.000	14.835.000	97,70%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
5	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**163.698.000**	**162.766.000**	**99,09%**
	1 **Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**80.500.000**	**80.500.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**80.500.000**	**80.500.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000	80.500.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	2 **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**24.000.000**	**24.000.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**24.000.000**	**24.000.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	24.000.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	3 **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**	**59.100.000**	**58.266.000**	**98,59%**
	Belanja Operasi	**59.100.000**	**58.266.000**	**98,59%**
	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000	58.266.000,00	98,59%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
6	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**14.674.493.852**	**13.471.938.990**	**91,81%**
	1 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**347.760.000**	**332.100.000**	**95,50%**
	Belanja Operasi	**347.760.000**	**332.100.000**	**95,50%**
	Belanja Barang dan Jasa	347.760.000	332.100.000	95,50%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	2 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**196.807.500**	**191.357.500**	**97,23%**
	Belanja Operasi	**196.807.500**	**191.357.500**	**97,23%**
	Belanja Barang dan Jasa	196.807.500	191.357.500	97,23%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	3 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**	**101.780.000**	**96.410.000**	**94,72%**
	Belanja Operasi	**101.780.000**	**96.410.000**	**94,72%**
	Belanja Barang dan Jasa	101.780.000	96.410.000	94,72%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	4 **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	**91.660.000**	**64.167.000**	**70,01%**
	Belanja Operasi	**91.660.000**	**64.167.000**	**70,01%**
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
6	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**631.560.000**	**609.040.000**	**96,43%**
	Belanja Operasi	**631.560.000**	**609.040.000**	**96,43%**
	Belanja Barang dan Jasa	631.560.000	609.040.000	96,43%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
8	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**	**67.110.000**	**67.060.000**	**99,93%**
	Belanja Operasi	**67.110.000**	**67.060.000**	**99,93%**
	Belanja Barang dan Jasa	67.110.000	67.060.000	99,93%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
7	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**	**199.966.000**	**199.916.000**	**99,97%**
	Belanja Operasi	**199.966.000**	**199.916.000**	**99,97%**
	Belanja Barang dan Jasa	199.966.000	199.916.000	99,97%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
8	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**	**44.740.000**	**44.115.000**	**98,60%**
	Belanja Operasi	**44.740.000**	**44.115.000**	**98,60%**
	Belanja Barang dan Jasa	44.740.000	44.115.000	98,60%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
9	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**	**55.900.240**	**55.240.900**	**98,82%**
	Belanja Operasi	**55.900.240**	**55.240.900**	**98,82%**
	Belanja Barang dan Jasa	55.900.240	55.240.900	98,82%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
10	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**	**197.695.000**	**195.245.000**	**98,76%**
	Belanja Operasi	**197.695.000**	**195.245.000**	**98,76%**
	Belanja Barang dan Jasa	197.695.000	195.245.000	98,76%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
11	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**227.168.000**	**195.865.000**	**86,22%**
	Belanja Operasi	**227.168.000**	**195.865.000**	**86,22%**
	Belanja Barang dan Jasa	227.168.000	195.865.000	86,22%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
13	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**151.390.000**	**150.840.000**	**99,64%**
	Belanja Operasi	**151.390.000**	**150.840.000**	**99,64%**
	Belanja Barang dan Jasa	151.390.000	150.840.000	99,64%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
13	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**	**1.440.000.000**	**1.357.358.401**	**94,26%**
	Belanja Operasi	**1.440.000.000**	**1.357.358.401**	**94,26%**
	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000.000	1.357.358.401	94,26%
	Belanja Subsidi	-		
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-		
	Belanja Gedung dan Bangunan	-		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
14	**Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	**857.999.000**	**486.895.000**	**56,74%**
	Belanja Operasi	**807.999.000**	**436.895.000**	**54,07%**
	Belanja Barang dan Jasa	807.999.000	436.895.000	54,07%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**50.000.000**	**49.900.000**	**99,80%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Lainnya	50.000.000	49.900.000	99,80%
15	**Pdayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	**2.229.114.880**	**2.100.127.132**	**94,21%**
	Belanja Operasi	**2.229.114.880**	**2.100.127.132**	**94,21%**
	Belanja Barang dan Jasa	2.229.114.880	2.100.127.132	94,21%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
16	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)**	**4.075.873.600**	**4.043.148.600**	**99,20%**
	Belanja Operasi	**4.075.873.600**	**4.043.148.600**	**99,20%**
	Belanja Barang dan Jasa	4.075.873.600	4.043.148.600	99,20%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
17	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD)**	**1.440.000.000**	**1.357.358.401**	**94,26%**
	Belanja Operasi	**1.440.000.000**	**1.357.358.401**	**94,26%**
	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000.000	1.357.358.401	94,26%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
18	**Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**	**2.217.972.832**	**1.936.782.961**	**83,08%**
	Belanja Operasi	**2.165.827.222**	**1.834.070.534**	**84,68%**
	Belanja Barang dan Jasa	2.165.827.222	1.834.070.534	84,68%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**152.145.610**	**91.712.427**	**60,28%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.145.610	91.712.427	60,28%
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
7	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**303.253.445**	**302.829.372**	**99,86%**
	1 **Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi**	**303.253.445**	**302.829.372**	**99,86%**
	Belanja Operasi	**303.253.445**	**302.829.372**	**99,86%**
	Belanja Barang dan Jasa	303.253.445	302.829.372	99,86%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
8	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**	**11.097.215**	**9.492.800**	**85,53%**
	1 **Penyelenggaraan Perdamaian dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**	**11.097.215**	**9.492.800**	**85,53%**
	Belanja Operasi	**11.097.215**	**9.492.800**	**85,53%**
	Belanja Barang dan Jasa	11.097.215	9.492.800	85,53%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
9	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**81.370.000**	**81.370.000**	**100,00%**
	1 **Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota**	**81.370.000**	**81.370.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**81.370.000**	**81.370.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	81.370.000	81.370.000,00	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
10	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**3.691.513.000**	**3.564.240.800**	**96,55%**
	1 **Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**3.691.513.000**	**3.564.240.800**	**96,55%**
	Belanja Operasi	**626.000.000**	**555.928.500**	**88,81%**
	Belanja Barang dan Jasa	626.000.000	555.928.500	88,81%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**3.065.513.000**	**3.008.317.500**	**98,10%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.765.513.000	2.709.817.500	97,99%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Lainnya	300.000.000	298.500.000	
11	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**96.887.120**	**96.016.360**	**99,03%**
	1 **Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**48.503.360**	**48.467.360**	**99,93%**
	Belanja Operasi	**48.503.360**	**48.467.360**	**99,93%**
	Belanja Barang dan Jasa	48.503.360	48.467.360	99,93%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	2 **Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus**	**47.584.760**	**47.549.000**	**99,92%**
	Belanja Operasi	**47.584.760**	**47.549.000**	**99,92%**
	Belanja Barang dan Jasa	47.584.760	47.549.000	99,92%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
12	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**1.341.167.500**	**1.341.167.500**	**100,00%**
1	**Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bosetta PSU**	**1.341.167.500**	**1.341.167.500**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**1.341.167.500**	**1.341.167.500**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	161.167.500	161.167.500	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	1.180.000.000	1.180.000.000	100,00%
	Belanja Modal	**-**	**-**	0,00%
	Belanja Tanah	-	-	%
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0,00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
13	**Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**3.148.491.088**	**2.980.120.400**	**94,65%**
1	**Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**	**3.148.491.088**	**2.980.120.400**	**94,65%**
	Belanja Operasi	**805.603.480**	**802.962.000**	**99,67%**
	Belanja Barang dan Jasa	805.603.480	802.962.000,00	99,67%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**2.342.887.600**	**2.177.158.400**	**92,93%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	6.670.450	-	0,00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.336.217.150	2.177.158.400,00	93,19%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
14	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.242.176.712**	**2.142.144.773**	**95,54%**
1	**Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**	**2.078.656.000**	**2.031.554.809**	**97,73%**
	Belanja Operasi	**2.054.089.840**	**2.031.554.809**	**98,90%**
	Belanja Barang dan Jasa	245.423.160	223.591.809,00	91,10%
	Belanja Subsidi	-		
	Belanja Hibah	-		
	Belanja Bantuan Sosial	1.808.665.840	1.807.963.000,00	
	Belanja Modal	24.567.000	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	24.567.000	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**	**163.520.712**	**110.689.964**	**67,69%**
	Belanja Operasi	**163.520.712**	**110.689.964**	**67,69%**
	Belanja Barang dan Jasa	163.520.712	110.689.964	67,69%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
15	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**132.214.770**	**125.801.800**	**95,15%**
1	**Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil**	**77.709.110**	**71.963.800**	**92,61%**
	Belanja Operasi	77.709.110	71.963.800	92,61%
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**54.505.660**	**53.839.000**	**98,78%**
	Belanja Operasi	**54.505.660**	**53.839.000**	**98,78%**
	Belanja Barang dan Jasa	54.505.660	53.839.000	98,78%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
3	**Pemberian Pendampingan, Koordinasinya Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	**49.000.200**	**49.000.000**	**100,00%**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Operasi	49.886.260	49.886.000	100,00%
	Belanja Barang dan Jasa	49.886.260	49.886.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
4	**Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	749.178.000	748.082.000	99,85%
	Belanja Operasi	749.178.000	748.082.000	99,85%
	Belanja Barang dan Jasa	29.224.000	28.024.000,00	95,89%
	Belanja Subsidi	-		
	Belanja Hibah	-		
	Belanja Bantuan Sosial	719.954.000	718.058.000,00	99,74%
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
16	**Pembinaan Mutu dan Konsumsi Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	133.115.060	132.870.000	99,82%
1	**Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	133.115.060	132.870.000	99,82%
	Belanja Operasi	133.115.060	132.870.000	99,82%
	Belanja Barang dan Jasa	133.115.060	132.870.000	99,82%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
17	**Penyusunan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	80.000.000	79.796.000	99,75%
1	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)**	80.000.000	79.796.000	99,75%
	Belanja Operasi	80.000.000	79.796.000	99,75%
	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	79.796.000	99,75%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
18	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	50.050.000	42.875.000	85,66%
1	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	35.000.000	32.875.000	93,93%
	Belanja Operasi	35.000.000	32.875.000	93,93%
	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	32.875.000	93,93%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	15.050.000	10.000.000	66,45%
	Belanja Operasi	15.050.000	10.000.000	66,45%
	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000	10.000.000	66,45%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
19	**Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar**	12.507.414.500	11.962.923.868	95,64%
1	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	4.817.042.500	4.695.248.946	97,47%
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**4.817.042.586**	**4.695.248.946**	**97,47%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	4.757.042.586	4.638.248.946,00	97,50%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000	57.000.000	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			#DIV/0!
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**	**2.682.442.000**	**2.681.772.022**	**99,31%**
	Belanja Operasi	-	-	#DIV/0!
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**2.682.442.000**	**2.681.772.022**	**99,31%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.682.442.000	2.681.772.022	99,31%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
3	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**	**4.586.340.000**	**4.586.340.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**3.664.778.800**	**3.664.778.800**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	3.664.778.800	3.664.778.800	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**921.561.200**	**921.561.200**	**100,00%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	596.433.500	596.433.500	100,00%
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	325.127.700	325.127.700	100,00%
4	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**501.590.000**	**501.562.900**	**99,99%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**501.590.000**	**501.562.900**	**99,99**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan	501.590.000	501.562.900	99,99
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
20	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**7.930.309.550**	**7.752.791.450**	**97,76%**
1	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**3.769.049.550**	**3.598.775.950**	**95,48%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**3.769.049.550**	**3.598.775.950**	**95,48%**
	Belanja Tanah	-		
	Belanja Gedung dan Bangunan	3.569.049.550	3.399.075.950,00	95,24%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	200.000.000	199.700.000,00	99,85%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-		
2	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**1.290.560.000**	**1.289.892.500**	**99,95%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**1.290.560.000**	**1.289.892.500**	**99,95%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.290.560.000	1.289.892.500,00	99,95%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
3	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**	**2.348.700.000**	**2.348.700.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**1.915.619.050**	**1.915.619.050**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	1.915.619.050	1.915.619.050	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**425.080.950**	**425.080.950**	**100,00%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.883.750	266.883.750	100,00%
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	158.197.200	158.197.200	100,00%
4	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**530.000.000**	**523.423.000**	**98,76**
	Belanja Operasi	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi			
	Belanja Hibah			
	Belanja Bantuan Sosial			
	Belanja Modal	**530.000.000**	**523.423.000**	**98,76%**
	Belanja Tanah			
	Belanja Gedung dan Bangunan	530.000.000	523.423.000	98,76%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
21	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	**1.328.670.000**	**1.328.670.000**	**100,00%**
1	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	**1.328.670.000**	**1.328.670.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**1.328.670.000**	**1.328.670.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	1.328.670.000	1.328.670.000	100,00%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
22	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan**	**656.670.000**	**621.258.250**	**94,61%**
1	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**656.670.000**	**621.258.250**	**94,61%**
	Belanja Operasi	**656.670.000**	**621.258.250**	**94,61%**
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	656.670.000	621.258.250,00	94,61%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
23	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**523.238.200**	**460.738.200**	**88,06%**
1	**Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**	**523.238.200**	**460.738.200**	**88,06%**
	Belanja Operasi	**523.238.200**	**460.738.200**	**88,06%**
	Belanja Barang dan Jasa	523.238.200	460.738.200,00	88,06%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	0,00	
24	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**185.457.300**	**185.422.300**	**99,98%**
1	**Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Ketentuan**	**185.457.300**	**185.422.300**	**99,98%**
	Belanja Operasi	**79.481.700**	**79.446.700**	**99,96%**
	Belanja Barang dan Jasa	79.481.700	79.446.700	99,96%
	Belanja Subsidi	-		
	Belanja Hibah	-		
	Belanja Bantuan Sosial	-		
	Belanja Modal	**105.975.600**	**105.975.600**	**100,00%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.975.600	105.975.600	100,00%
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
25	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**57.799.919**	**57.750.000**	**99,91%**
1	**Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**	**57.799.919**	**57.750.000**	**99,91%**
	Belanja Operasi	57.799.919	57.750.000,00	99,91%
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
26	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Datalusc Kependudukan**	**128.373.964**	**127.922.700**	**99,34%**
1	**Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**	**38.582.900**	**38.541.000**	**99,89%**
	Belanja Operasi	38.582.900	38.541.000	99,89%
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan**	**89.791.066**	**88.981.700**	**99,10%**
	Belanja Operasi	**89.791.066**	**88.981.700**	**99,10%**
	Belanja Barang dan Jasa	89.791.066	88.981.700	99,10%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
27	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**63.305.000**	**63.291.310**	**99,98%**
1	**Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**	**63.305.000**	**63.291.310**	**99,98%**
	Belanja Operasi	**63.305.000**	**63.291.310**	**99,98%**
	Belanja Barang dan Jasa	63.305.000	63.291.310	99,98%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
28	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**4.267.206.498**	**4.201.720.400**	**98,47%**
1	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**3.593.690.500**	**3.584.000.000**	**99,73%**
	Belanja Operasi	**3.585.000.000**	**3.584.000.000**	**99,97%**
	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000.000	3.584.000.000,00	99,97%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**8.690.500**	-	**0,00%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.690.500	-	0,00%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
2	**Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya**	**673.515.998**	**617.720.400**	**91,72%**
	Belanja Operasi	-	-	0,00%
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	0,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**673.515.998**	**617.720.400**	**91,72%**
	Belanja Tanah	-		
	Belanja Gedung dan Bangunan	212.032.998	199.683.500	94,18%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	461.482.400	418.036.900	90,59%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
29	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**61.097.000**	**61.040.000**	**99,91%**
1	**Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**61.097.000**	**61.040.000**	**99,91%**
	Belanja Operasi	**61.097.000**	**61.040.000**	**99,91%**
	Belanja Barang dan Jasa	61.097.000	61.040.000	99,91%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
30	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.049.000.000**	**1.049.000.000**	**100,00%**
1	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**	**1.049.000.000**	**1.049.000.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**1.049.000.000**	**1.049.000.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	1.049.000.000	1.049.000.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
31	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-
	1 **Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	-	-	-
	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
32	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Peraturan Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.428.145.975**	**1.267.397.975**	**88,68%**
	1 **Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**1.428.145.975**	**1.267.397.975**	**88,68%**
	Belanja Operasi	1.428.145.975	1.267.397.975	88,68%
	Belanja Barang dan Jasa	1.428.145.975	1.267.397.975	88,68%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
33	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**209.986.000**	**209.986.000**	**100,00%**
	1 **Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian**	**209.986.000**	**209.986.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**209.986.000**	**209.986.000**	**100,00%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	209.986.000	209.986.000,00	100,00%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
34	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4.705.435.500**	**4.695.195.500**	**99,78%**
	1 **Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat**	**4.705.435.500**	**4.695.195.500**	**99,78%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	**4.705.435.500**	**4.695.195.500**	**99,78%**
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.205.435.500	4.197.360.500,00	99,81%
	Belanja Aset Lainnya	500.000.000	497.835.000	99,54%
35	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**9.600.000**	**9.600.000**	**100,00%**
	1 **Penyediaan Infrastruktur Pendukung Komandirian Pangan Lainnya**	**9.600.000**	**9.600.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	-	-	
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	9.600.000	9.600.000	100,00%
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	9.600.000	9.600.000	100,00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
36	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**58.939.000**	**58.939.000**	**100,00%**
	1 **Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**	**58.939.000**	**58.939.000**	**100,00%**
	Belanja Operasi	**58.939.000**	**58.939.000**	**100,00%**
	Belanja Barang dan Jasa	58.939.000	58.939.000	100,00%
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	Belanja Modal	-	-	
	Belanja Tanah	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
	Total Belanja Penghapusan Kendaraan Elektrik	61.386.468.348	59.112.692.653	96,30%

Langara, 21 Agustus 2025

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI *E-PURCHASING* TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) MELALUI E-PURCHASING

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing (Rp)	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.781.000.000,00	4.346.320.000,00	90,91%
2	Dinas Kesehatan	11.817.261.000,00	10.993.038.100,00	93,03%
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.579.895.747,00	11.445.962.697,00	98,84%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	84.317.800,00	79.750.000,00	94,58%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	647.704.850,00	410.700.000,00	63,41%
6	Dinas Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.287.975.000,00	1.248.169.000,00	96,91%
7	Dinas KOMINFO	1.109.263.728,00	1.109.261.889,00	100,00%
8	Dinas Perhubungan	512.600.000,00	511.300.000,00	99,75%
9	Dinas Perpustakaan	500.000.000,00	499.800.000,00	99,96%
10	Dinas Pertanian	321.037.800,00	317.700.000,00	98,96%
11	Sekretariat DPRD	50.000.000,00	48.200.000,00	96,40%
12	Bagian Pembangunan	25.000.000,00	23.050.000,00	92,20%
13	Bagian Protokoler	21.000.000,00	20.700.000,00	98,57%
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	368.000.000,00	363.300.000,00	98,72%
15	Badan Keuangan Daerah	1.999.000.000,00	1.943.600.000,00	97,23%
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.000.000,00	27.250.000,00	90,83%

No.	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing (Rp)	Persentase (%)
17	Inspektorat Daerah	120.000.000,00	116.500.000,00	97,08%
18	Kecamatan Wawonii Barat	60.000.000,00	54.800.000,00	91,33%
19	Kecamatan Wawonii Utara	65.651.900,00	56.400.000,00	85,91%
	Kecamatan Wawonii Selatan	25.000.000,00	0,00	0,00%
	Kecamatan Wawonii Timur	8.824.500,00	0,00	0,00%
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	48.200.000,00	96,40%
TOTAL		**35.463.532.325,00**	**33.664.001.686,00**	**94,93%**

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Belanja Barang / Jasa			Belanja Modal		
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja KKPD (Rp)	Persentase Realisasi KKPD (%)
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	818.448.000,00	20.865.881,00	2,55	0,00	0,00	0,00

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA HIBAH UNTUK PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM	26.183.335.000,00	14.100.000.000,00		-
2	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	26.183.335.000,00	4.800.000.000,00		-
3	POLRI	26.183.335.000,00	6.033.335.000,00		-
4	TNI	26.183.335.000,00	1.250.000.000,00		-
JUMLAH			**26.183.335.000,00**		-

Langara, 21 Agustus 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

RIFQI SAIFULLAH RAZAK

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024